

BUMN UNTUK
INDONESIA

AKHLAK



Moving Beyond

Eskalasi Kinerja Berkelanjutan

*Continuous Performance
Escalation*

2022
LAPORAN TAHUNAN
Annual Report



Moving Beyond

ESKALASI KINERJA BERKELANJUTAN

*Sustainable Performance
Escalation*

Pada Tahun 2022, Perum Jasa Tirta II telah genap 55 tahun telah hadir sebagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) memberikan dedikasi dan dukungan terhadap ketahanan pangan dan energi nasional.

Annual Report Perum Jasa Tirta II Tahun 2022 mengusung tema "MOVING BEYOND" (Bergerak Melampaui) dengan terus bergerak optimis, dinamis dan bersinergi dalam Pengelolaan SDA untuk dapat melampaui harapan visi dan misi serta target Perusahaan yang telah ditetapkan.

Tema tersebut dipilih mempertimbangkan kondisi dan situasi yang telah terjadi selama tahun 2022 serta masa keberlanjutan bisnis Perusahaan.

Bahwasanya seiring dengan penambahan wilayah kerja baru Perum Jasa Tirta II di Wilayah Sungai (WS) Cimanuk-Cisanggarung (Cirebon), Sebagian WS Cidanau-Ciujung-Cidurian (Prov. Banten), dan Sebagian WS Seputih-Sekampung (Prov. Lampung), Perusahaan dituntut untuk bergerak cepat, optimis, bersinergi, beradaptasi dan meningkatkan kinerja dan peluang bisnis usaha khususnya di wilayah kerja baru serta terus konsisten memberikan pelayanan yang berkualitas dalam pengelolaan, pengoperasian dan pemeliharaan SDA, serta pengusahaan SDA yang sehat.

In 2022, Perum Jasa Tirta II will turn 55 years old as a State-Owned Enterprise (BUMN) engaged in the field of Water Resources Management (SDA) providing dedication and support for national food and energy security.

The 2022 Annual Report of Perum Jasa Tirta II carries the theme "MOVING BEYOND" by continuing to move optimistically, dynamically and in synergy in the Management of Water Resources to be able to exceed the expectations of the Company's vision and mission and targets that have been set.

The theme was chosen considering the conditions and situations that have occurred during 2022 and the Company's business continuity period.

Whereas along with the addition of the new working area of Perum Jasa Tirta II in the Cimanuk-Cisanggarung River Basin (WS) Cimanuk-Cisanggarung (Cirebon), Part of the Cidanau-Ciujung-Cidurian WS (Banten Province), and Part of the Seputih-Sekampung WS (Prov. Lampung), the Company are required to move quickly, be optimistic, synergize, adapt and improve business performance and opportunities, especially in new work areas and continue to consistently provide quality services in the management, operation and maintenance of natural resources, as well as the healthy exploitation of Water resources.

The background of the entire page is a vibrant blue color, overlaid with a dense pattern of water droplets of various sizes. The droplets are rendered with realistic highlights and shadows, giving them a three-dimensional appearance. They are scattered across the entire frame, with some larger droplets being more prominent than others. The overall effect is a fresh, clean, and textured aesthetic.

SANGGAHAN DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB

Disclaimer and Limitation of Liability



Laporan Tahunan ini memuat pernyataan kondisi keuangan, hasil operasi, proyeksi, rencana, strategi, kebijakan, serta tujuan Perusahaan, yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku, kecuali hal-hal yang bersifat historis. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko, ketidakpastian, serta dapat mengakibatkan perkembangan aktual secara material berbeda dari yang dilaporkan.

Informasi keuangan tahun 2022 yang disajikan dalam Laporan Tahunan ini telah mendapatkan persetujuan pemilik modal Perusahaan berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/2MBU/04/2022 Tanggal 27 Juni 2022 termasuk didalam surat tersebut adalah persetujuan kembali Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan Tahun Buku 2022 dan 2021.

Pernyataan-pernyataan prospektif dalam laporan tahunan ini dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan kondisi mendatang Perusahaan serta lingkungan bisnis di mana Perusahaan menjalankan kegiatan usaha. Perusahaan tidak menjamin bahwa dokumen-dokumen yang telah dipastikan keabsahannya akan membawa hasil-hasil tertentu sesuai harapan.

Laporan tahunan ini memuat kata "Perum Jasa Tirta II", "PJT II", dan "Perusahaan" yang didefinisikan sebagai Perum Jasa Tirta II yang menjalankan bisnis di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air.

This Annual Report contains statements of financial condition, results of operations, projections, plans, strategies, policies, and objectives of the Company, which are classified as forward-looking statements in the implementation of applicable laws, except for historical matters. Such forward-looking statements are subject to known and unknown risks (prospective), uncertainties, and other factors that could cause actual results to differ materially from expected results.

The 2022 financial information presented in this Annual Report has obtained the approval of the Company's capital owners based on the Minister of SOE Regulation No. PER-05/2MBU/04/2022 On 27 June 2022 included in the letter is the re-approval of the Company's Consolidated Financial Statements for the 2022 and 2021 Financial Years.

Prospective statements in this annual report are prepared based on numerous assumptions concerning current and future conditions of the Company and the business environment where the Company conducts business. The Company shall have no obligation to guarantee that all the valid documents presented will bring specific results as expected.

This annual report contains the words "Perum Jasa Tirta II", "PJT II", and "Company" which is defined as Perum Jasa Tirta II, which conducts business in the field of Water Resources Management.

TENTANG LAPORAN TAHUNAN
PERUM JASA TIRTA II
About Perum Jasa Tirta II
Annual Report





Selamat datang pada Laporan Tahunan 2022 Perum Jasa Tirta II dengan tema **Moving Beyond - Eskalasi Kinerja Berkelanjutan**. Tema tersebut dipilih berdasarkan analisis dan kajian yang mendalam berdasarkan fakta dan perkembangan bisnis Perusahaan sepanjang tahun 2022 serta masa depan keberlanjutan bisnis Perusahaan.

Laporan Tahunan 2022 Perum Jasa Tirta II menjadi sumber dokumentasi komprehensif yang berisikan informasi kinerja Perusahaan dalam setahun. Informasi tersebut memuat dokumentasi lengkap yang menggambarkan profil Perusahaan; kinerja operasional, pemasaran, dan keuangan; informasi tentang tugas, peran, serta fungsi struktural organisasi perusahaan yang menerapkan konsep *best practices* dan prinsip-prinsip *corporate governance*.

Laporan Tahunan 2022 Perum Jasa Tirta II disusun berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER- 01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2022 tentang Perum Jasa Tirta II, Keputusan Menteri BUMN No. SK-16/S. MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012, dan Kriteria *Annual Report Award* (ARA).

Tujuan utama penyusunan Laporan Tahunan ini adalah untuk meningkatkan keterbukaan informasi Perusahaan kepada otoritas terkait serta menjadi buku tahunan yang turut membangun rasa bangga dan solidaritas di antara karyawan.

Selain itu, Laporan Tahunan ini juga bertujuan untuk membangun pemahaman dan kepercayaan tentang Perusahaan dengan menyediakan informasi yang tepat, seimbang, dan relevan. Para pemegang saham serta seluruh pemangku kepentingan lainnya dapat memperoleh informasi yang memadai terkait kebijakan yang telah dan akan dilakukan serta kesuksesan pencapaian Perusahaan sepanjang tahun 2022.

Laporan Tahunan Perum Jasa Tirta II 2022 disajikan dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dengan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca dan dicetak dengan kualitas yang baik. Laporan Tahunan ini dapat dilihat dan diunduh di website resmi Perusahaan yaitu www.jasatirta2.co.id.

Welcome to Perum Jasa Tirta II's 2022 Annual Report with the theme **Moving Beyond - Sustainable Performance Escalation**. The theme was chosen based on in-depth analysis and study based on the facts and developments of the Company's business throughout 2022 and the future of the Company's business sustainability.

2022 Annual Report of Perum Jasa Tirta II is a comprehensive source of documentation containing information on the Company's performance in a year. This information contains complete documentation describing the Company's profile; operational, marketing and financial performance; information about the tasks, roles and structural functions of the Company organization that applies the concepts of best practices and the principles of corporate governance.

2022 Annual Report of Perum Jasa Tirta II is prepared based on Regulation of The Minister of SOE No. PER-01/MBU/2011 on Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises, Government Regulation No. 25 of 2022 on Perum Jasa Tirta II, Decree of The Minister of SOE No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012, Annual Report Award Criteria (ARA).

The main purpose of the preparation of this Annual Report is to increase the disclosure of information of the Company to relevant authorities and to become an annual book that helps build pride and solidarity among employees.

In addition, this Annual Report also aims to build understanding and trust about the Company by providing appropriate, balanced and relevant information. Shareholders and all other stakeholders can obtain adequate information related to policies that have been and will be carried out as well as the Company's achievements throughout 2022.

Perum Jasa Tirta II 2022 Annual Report is presented in two languages, namely Indonesian and English using types and sizes of fonts that are easy to read and print with good quality. This Annual Report can be viewed and downloaded on the Company's official website, www.jasatirta2.co.id.



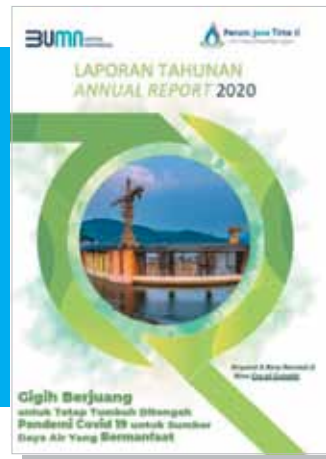
KESINAMBUNGAN TEMA

Theme Continuation



2019

Transformasi Menuju Masa Depan
Transformation for the Future



2020

Gigih Berjuang Tetap Tumbuh Ditengah
Pandemi Covid 19 untuk Sumber Daya Air Yang Bermanfaat
Beyond A New Normal A new Era of Growth

Selamat datang pada Laporan Tahunan 2022 Perum Jasa Tirta II dengan tema **Moving Beyond – Eskalasi Kinerja Berkelanjutan**.

Tema tersebut dipilih berdasarkan kesinambungan tema laporan tahunan dan mempertimbangan kondisi dan situasi yang telah terjadi selama tahun 2022 serta masa depan keberlanjutan bisnis Perusahaan.

Pada Tahun 2022, Perum Jasa Tirta II telah genap 55 tahun telah hadir sebagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) memberikan dedikasi dan dukungan terhadap ketahanan pangan dan energi nasional.

Annual Report Perum Jasa Tirta II Tahun 2022 mengusung tema **"MOVING BEYOND"** (Bergerak Melampaui) dengan terus bergerak optimis, dinamis dan bersinergi dalam Pengelolaan SDA untuk dapat melampaui harapan visi dan misi serta target Perusahaan yang telah ditetapkan.

Tema tersebut dipilih mempertimbangkan kondisi dan situasi yang telah terjadi selama tahun 2022 serta masa keberlanjutan bisnis Perusahaan.

Bahwasanya seiring dengan penambahan wilayah kerja baru Perum Jasa Tirta II di Wilayah Sungai (WS) Cimanuk-Cisanggarung (Cirebon), Sebagian WS Cidanau-Ciujung-Cidurian (Prov. Banten), dan Sebagian WS Seputih-Sekampung (Prov. Lampung), Perusahaan dituntut untuk bergerak cepat, optimis, bersinergi, beradaptasi dan meningkatkan kinerja dan peluang bisnis usaha khususnya di wilayah kerja baru serta terus konsisten memberikan pelayanan yang berkualitas dalam pengelolaan, pengoperasian dan pemeliharaan SDA, serta pengusahaan SDA yang sehat.



2021

Merangkul Perubahan Membangun Daya Tahan
Menyongsong Tantangan Kedepan
*Embracing Change Builds Endurance in Facing
Future Challenges*



2022

Moving Beyond
Eskalasi Kinerja Berkelanjutan
Sustainable Performance Escalation

Welcome to Perum Jasa Tirta II's 2022 Annual Report with the theme **Moving Beyond - Sustainable Performance Escalation**.

The theme was chosen based on the continuity of the annual report theme and considering the conditions and situations that have occurred during 2022 and the future of the Company's business sustainability.

In 2022, Perum Jasa Tirta II will have completed 55 years of existence as a State-Owned Enterprise (BUMN) company engaged in Water Resources Management (SDA) providing dedication and support for national food and energy security.

Perum Jasa Tirta II Annual Report 2022 carries the theme "MOVING BEYOND" by continuing to move optimistically, dynamically and synergise in Natural Resources Management to be able to exceed the expectations of the Company's vision and mission and targets that have been set.

The theme was chosen considering the conditions and situations that have occurred during 2022 and the Company's business sustainability period.

That along with the addition of new working areas of Perum Jasa Tirta II in the Cimanuk-Cisanggarung River Basin (Cirebon), Part of the Cidanau-Ciujung-Cidurian River Basin (Banten Province), and Part of the Seputih-Sekampung River Basin (Lampung Province), the Company is required to move quickly, optimistically, synergise, adapt and improve business performance and business opportunities, especially in new working areas and continue to consistently provide quality services in the management, operation and maintenance of natural resources, as well as healthy natural resource exploitation.

IKHTISAR KINERJA KEUANGAN

Financial Performance Highlights

Laporan Posisi Keuangan

Statement of Financial Position

Dalam juta Rupiah / in million Rupiah

URAIAN / Description	2018	2019	2020	2021	2022
ASET / Assets					
Kas dan Setara Kas / Cash and Cash Equivalent	434.206	597.052	518.162	452.330	567.815
Piutang Usaha / Trade Receivables	297.271	153.570	230.178	284.399	343.689
Persediaan / Inventories	2.147	2.548	2.074	1.903	1.928
Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka / Prepaid Expenses and Advances	14.838	9.824	20.915	8.467	7.155
Aset Keuangan Lancar Lainnya / Other Current Financial Assets	2.792	2.194	2.901	781	701
Jumlah Aset Lancar / Total Current Assets	751.254	765.188	774.23	747.880	939.123
Penyertaan pada Perusahaan Asosiasi / Participation in Associated Companies	-	-	-	-	-
Aset Tetap / Fixed Assets	476.051	540.399	599.694	752.743	804.197
Aset Tak Berwujud / Intangible Assets	9.017				
Aset Hak Guna / Right-Of-Use Assets	-	-	6.253	12.544	15.057
Aset Pajak Tangguhan / Deferred Tax Assets	41.042	46.308	57.433	74.712	97.494
Aset Tidak Lancar Lainnya / Other Non-Current Assets	48.442	79.97	102.125	101.875	48.529
Jumlah Aset Tidak Lancar / Total Non-Current Assets	565.535	666.677	765.505	941.874	974.294
Jumlah Aset / Total Assets	1.316.789	1.431.865	1.539.735	1.689.754	1.913.416
LIABILITAS / Liabilities					
Utang Usaha / Trade Payables	76.453	39.62	43.121	10.409	14.653
Beban Akrua / Accrual Expense	34.344	33.271	23.401	37.638	71.777
Utang Pajak / Tax Payable	15.748	21.411	25.987	26.306	58.886
Liabilitas Kontrak Jangka Pendek / Short-Term Contract Liabilities	-	-	154.147	168.016	6.160
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya / Other Short-Term Financial Liabilities	36.385	47.037	19.754	57.858	84.724
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek / Total Short-Term Liabilities	162.93	141.339	147.645	168.710	236.199
Utang Sewa Jangka Panjang / Long-Term Lease Liabilities	-	-	4.351	6.697	8.922
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja / Post Retirement Liabilities	79.403	72.762	150.037	211.054	274.739
Liabilitas Jangka Panjang Lainnya / Other Long-Term Liabilities	-	22.13	13.165	11.930	10.830
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang / Total Long-Term Liabilities	79.403	94.892	175.154	238.837	294.491
Jumlah Liabilitas / Total Liabilities	242.334	236.231	322.8	408.547	530.690
EKUITAS / Equity					
Modal Pemerintah / Government Share	164.548	164.548	164.548	164.548	164.548
Cadangan Umum / Reserved	13.943	13.943	13.943	13.943	13.943
Cadangan Bertujuan / Reserved Appropriated	760.306	893.921	1.027.001	1.027.001	1.027.001
Komponen Ekuitas Lainnya / Other Equity Components	(49.605)	(40.587)	194	194	23.914
Laba Tahun Berjalan / Current Year Profit	175.264	153.844	113.235	107.446	145.607
Kepentingan Non Pengendali / Non Controlling	9.999	9.965	8.272	8.072	7.517
Jumlah Ekuitas / Total Equity	1.074.455	1.195.634	1.216.935	1.281.207	1.382.728
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas / Total Liabilities and Equity	1.316.789	1.431.865	1.539.735	1.689.754	1.913.416



Laporan Laba Rugi

Statement of Profit or Loss

Dalam juta Rupiah / in million Rupiah

URAIAN / Description	2018	2019	2020	2021	2022
Pendapatan Usaha / Operating Revenues	825.544	812.881	839.386	755.911	981.047
Beban Usaha / Operating Expenses	(456.753)	(468.555)	(516.225)	(544.687)	(600.271)
Laba Usaha / Profit From Operations	368.791	344.326	323.161	311.831	380.776
Beban Promosi dan Pemasaran / Promotion and Marketing Expenses	(5.398)	(14.424)	(5.371)	(4.731)	(5.794)
Beban Administrasi dan Umum / General and Administration Expenses	(139.908)	(167.799)	(164.296)	(168.651)	(187.160)
Pendapatan Lain-lain / Other Income	31.255	48.881	24.669	11.005	10.879
Beban Lain-lain / Other Expenses	(18.209)	(20.619)	(17.795)	(4.872)	(6.845)
Laba Sebelum Pajak / Profit (Loss) Before Tax	236.531	190.365	157.629	144.582	191.855
Beban Pajak Penghasilan / Income Tax Expense	(69.935)	(36.556)	(44.394)	(37.135)	(46.607)
Laba Bersih Tahun Berjalan / Current Year Net Profit	166.596	153.809	113.235	107.446	145.248
Penghasilan Komprehensif Lain / Other Comprehensive Income	54.062	9.018	(62.055)	(43.175)	(43.729)
Laba Komprehensif Tahun Berjalan / Comprehensive Income for the Current Year	220.658	162.827	51.18	64.272	101.519

*) Penyajian kembali / [Restatement](#)

Rasio Keuangan

Financial Ratio

Dalam juta Rupiah / in million Rupiah

URAIAN / Description	2018	2019	2020*	2021	2022
Imbalan kepada Pemilik Modal (ROE) / Return on Equity	120,33	15,07	11,49	9,53	12,28
Imbalan Investasi (ROI) / Return on Investment	22,13	16,35	12,43	13,04	15,23
Laba terhadap Aset (ROA) / Return on Assets	17,96	13,29	9,32	8,56	10,03
Rasio Kas / Cash Ratio	266,5	422,43	355,44	269,22	245,40
Rasio Lancar / Current Ratio	461,09	541,39	528,50	445,12	405,87
Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset / Own Capital Ratio to Total Assets	65,18	71,18	70,35	75,82	72,26
Perputaran Persediaan (dalam satuan hari) / Inventory Turnover (in units of days)	1	1	1	1	1
Periode Penagihan (dalam satuan hari) / Billing Period (in units of days)	81	69	91	121	125

*) Penyajian kembali / [Restatement](#)

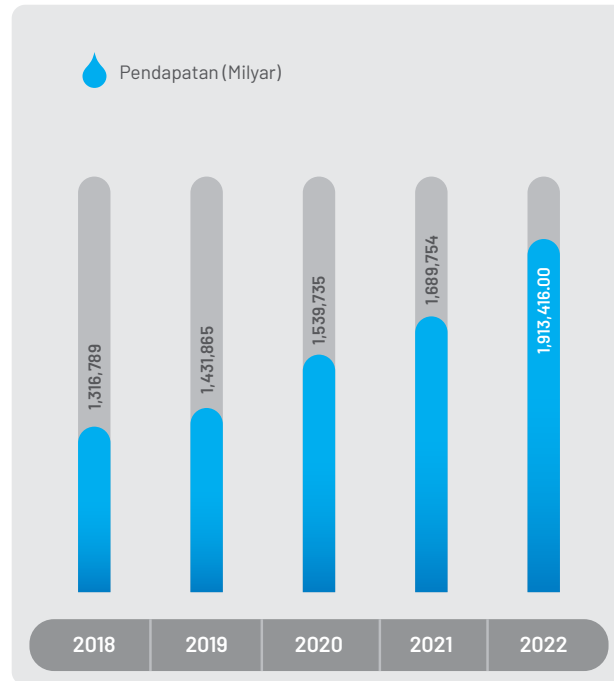


GRAFIK KINERJA KEUANGAN

Financial Performance Graphic

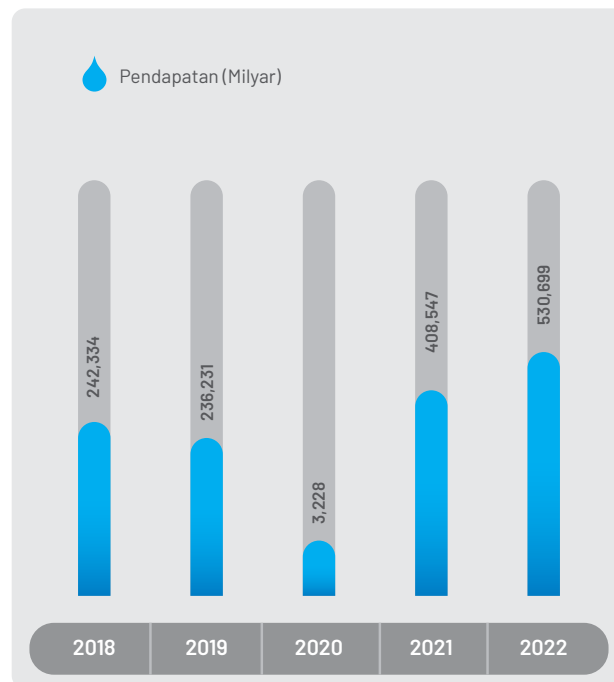
Jumlah Aset / *Total Assets*

(dalam jutaan Rupiah / *in million Rupiah*)



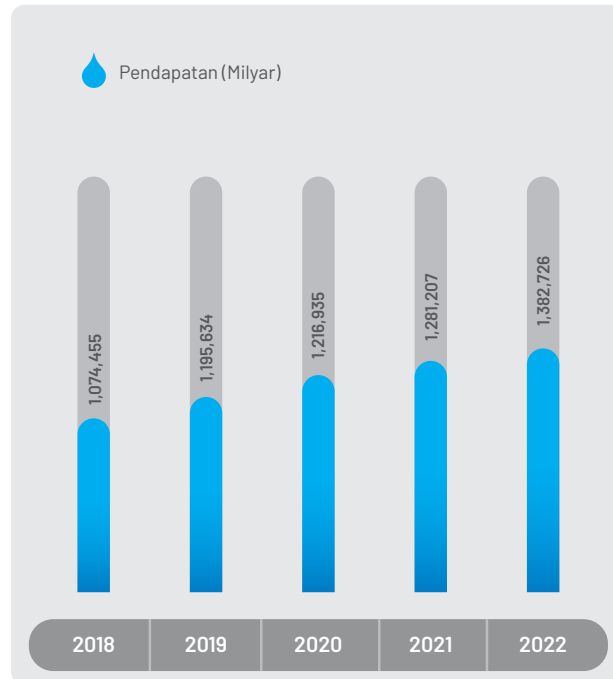
Jumlah Liabilitas / *Total Liabilities*

(dalam jutaan Rupiah / *in million Rupiah*)

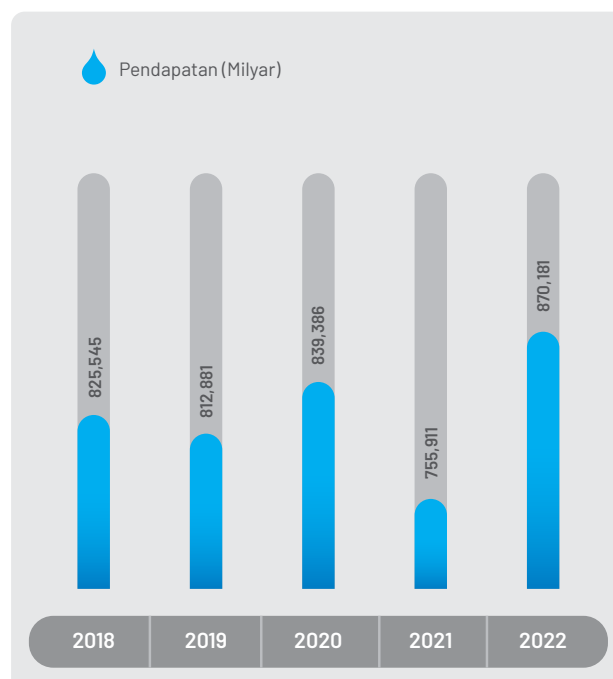




Jumlah Ekuitas / **Total Equity** (dalam jutaan Rupiah / *in million Rupiah*)



Jumlah Pendapatan Usaha / **Total Operating Revenues** (dalam jutaan Rupiah / *in million Rupiah*)

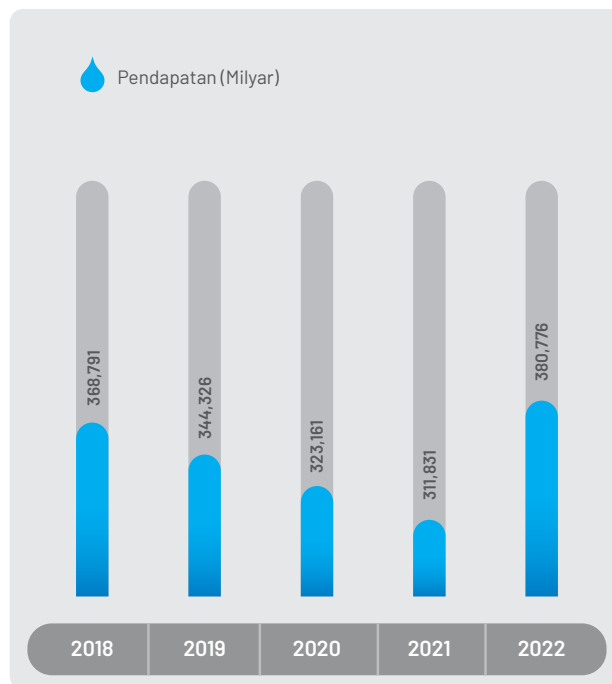




GRAFIK KINERJA KEUANGAN

Financial Performance Graphic

Jumlah Laba Usaha / *Total Operating Profit* (dalam jutaan Rupiah / *in million Rupiah*)







DAFTAR ISI / Table of Contents

PENJELASAN TEMA / Theme Explanation	1	ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN /	120
TENTANG LAPORAN TAHUNAN PERUM JASA TIRTA II /		<i>Management Discussion And Analysis</i>	
<i>About Perum Jasa Tirta II Annual Report</i>	4	Tinjauan Makroekonomi Dan Industri /	
KESINAMBUNGAN TEMA / Continuity of Theme	6	<i>Macroeconomic And Industrial Review</i>	122
IKHTISAR KINERJA KEUANGAN / Summary of financial		Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha / <i>Operation</i>	
<i>performance</i>	8	<i>Review per Business Segment</i>	126
DAFTAR ISI / Table of Content	14	Kinerja Anak Perusahaan / <i>Subsidiary Performance</i>	151
SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP) /		Tinjauan Keuangan / <i>Financial Overview</i>	153
<i>Anti -Breeding Management System (SMAP)</i>	16	Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif	
KILAS KINERJA 2022 / Glas Performance 2022	18	Lain Konsolidasian / <i>Consolidated Statements</i>	
PERISTIWA PENTING 2022 / Important Events 2022	20	<i>Profit of Loss And Other Comprehensive Income</i>	162
PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI / Awards and		Kemampuan Memenuhi Kewajiban, Tingkat	
<i>Certification</i>	36	Kolektibilitas Piutang, Dan Profitabilitas	
PROFIL PERUSAHAAN / Company Profile	40	Perusahaan / <i>The Ability To Meet Obligations,</i>	
Identitas Perusahaan / <i>Company Identity</i>	42	<i>Levels of Collectibility of Receivables, and</i>	
Sekilas Perusahaan / <i>A Glimpse Of The</i>		<i>Company Profitability</i>	166
<i>Company</i>	49	Struktur Modal Dan Kebijakan Manajemen	
Jejak Langkah / <i>Milestone</i>	52	Atas Struktur Modal / <i>Capital Structure And</i>	
Visi, Misi, Motto Dan Kompetensi Inti		<i>Management Policy On Capital Structur</i>	170
Perusahaan / <i>Company Vision, Mission, Motto</i>		Prospek Usaha / <i>Business Prospect</i>	173
<i>And Core Competencies</i>	54	TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK /	
Bidang Usaha Perusahaan / <i>Company</i>		<i>Good Corporate Governance</i>	188
<i>Business Sector</i>	60	Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan /	
LAPORAN MANAJEMEN / Management Report	68	<i>Basic Application Of Corporate Governance</i>	192
LAPORAN DEWAN PENGAWAS / Report of the Supervisory		Struktur Dan Mekanisme Tata Kelola Perum Jasa	
<i>Board</i>	70	Tirta II / <i>Structure and Governance Mechanism of</i>	
LAPORAN DIREKSI / Board Of Directors Report	80	<i>Perum Jasa Tirta II</i>	198
PERNYATAAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI TENTANG		Struktur Organ Perum Jasa Tirta II / <i>Organs</i>	
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2022		<i>Structure Of Perum Jasa Tirta II</i>	199
PERUM JASA TIRTA II / Statement of the Supervisory Board		Penilaian Penerapan GCG / <i>GCG Implementation</i>	
<i>and Directors regarding responsibility for Annual Report</i>		<i>Assessment</i>	206
<i>2022 Perum Jasa Tirta II</i>	88	Rapat Pembahasan Bersama (RPB) / <i>Joint</i>	
Struktur Organisasi / <i>Organizational Structure</i>	89	<i>Discussion Meeting (RPB)</i>	209
Profil Dewan Pengawas / <i>Profile of The Supervisory</i>		Dewan Pengawas / <i>Supervisory Board</i>	212
<i>Board</i>	90	Direksi / <i>Directors' Board</i>	232
Profil Direksi / <i>Directors Profile</i>	100	Kebijakan Remunerasi Dewan Pengawas Dan Direksi	
Profil Pejabat Eksekutif/		<i>The Supervisory Board's Remuneration Policy</i>	251
<i>Executive Officer Profile</i>	111	Organ Pendukung Dewan Pengawas / <i>Supporting</i>	
		<i>Organs Of The Supervisory Board</i>	254



Komite Audit / <i>Audit Committee</i>	258	TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN /	
Komite Nominasi Dan Remunerasi / <i>Nomination and Remuneration Committee</i>	266	<i>Social and Environmental Responsibility</i>	400
Komite Pemantau Manajemen Risiko / <i>Risk Management Monitoring Committee</i>	268	Komitmen Pada Tanggung Jawab Sosial /	
Sekretaris Perusahaan / <i>Company Secretary</i>	271	<i>Commitment to social responsibility</i>	403
Satuan Pengawasan Internal /		7 Prinsip Utama CSR Berdasarkan ISO 26000 /	
<i>Internal Supervision Unit</i>	278	<i>7 Main Principles Of CSR Based On ISO 26000</i>	404
Struktur Organisasi Karyawan Satuan		Lingkup Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	
Pengawasan Intern Perum Jasa Tirta II / <i>Employee Organizational Structure Perum Jasa Tirta II Supervision Unit</i>	279	Baik Yang Merupakan Kewajiban Maupun Yang Melebihi Kewajiban / <i>The scope of corporate social responsibility both which is an obligation and that exceeds obligations</i>	412
Manajemen Risiko / <i>Risk Management</i>	307	Strategi Dan Program Kerja Dalam Dalam Upaya	
Pedoman Pengendalian Gratifikasi / <i>Gratification Control Guidelines</i>	332	<i>Stakeholders Engagement</i> Dan Meningkatkan	
Program Anti Korupsi / <i>Anti-Corruption Program</i>	348	Nilai Stakeholders / <i>Work strategies and programs in the Stakeholders Engagement effort and increase the value of stakeholders</i>	413
TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS /		Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait	
<i>Business Support Review</i>	356	Dengan Hak Asasi Manusia / <i>Corporate Social Responsibility Related To Human Rights</i>	415
Sumber Daya Manusia / <i>Human Resources</i>	358	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	
Struktur Pengelola SDM / <i>HR Management Structure</i>	359	Terkait Dengan Operasi Yang Adil / <i>Corporate Social Responsibility Related To Fair Operations</i>	418
Komposisi Dan Jumlah Karyawan Perum Jasa Tirta II / <i>Composition and number of employees of Jasa Tirta II</i>	360	Komitmen Dan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Lingkungan Hidup / <i>Commitment and Policy of Corporate Social Responsibility for Environment</i>	421
Pendidikan Dan Pelatihan Tahun 2022 / <i>Education and training in 2022</i>	374	Pelaksanaan Inisiatif Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Lingkungan Hidup /	
Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi Jasa Tirta II Tahun 2022		<i>Implementation Of Corporate Social Responsibility Initiatives In The Environmental Sector</i>	427
<i>Remuneration of Supervisory Board and Board of Directors of Jasa Tirta II in 2022</i>	384		
TEKNOLOGI INFORMASI / Information Technology	386	LAPORAN KEUANGAN / Financial Report	436
Peta Strategi TI / <i>IT Strategy Map</i>	391		
Rantai Nilai Pengelolaan Bisnis / <i>Business Management Value Chain</i>	391		



SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)

Anti-Bribery Management System (Smap)



Perum Jasa tirta II telah mengukuhkan komitmennya untuk menegakan Integritas dan transparansi melalui Implementasi dan Sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di beberapa divisi dan unit Kerja Perum Jasa Tirta juga telah mempunyai Peraturan Direksi Perum Jasa Tirta II nomor: KBS-11 DIR/05/2022 tentang Pijakan Anti Penyuapan PJT II yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dalam mengimplementasikan dan meningkatkan keefektifan Sistem Manajemen anti Penyuapan guna mencegah, medekteksi dan menangani penyuapan dilingkungan Perum Jasa Tirta II telah dilaksanakan pula Assesment kedua untuk tahun 2022 oleh Sucofindo International Certification Service.

Perum Jasa Tirta II has confirmed its commitment to uphold integrity and transparency through the implementation and certification of ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (SMAP) in several divisions and work units Perum Jasa Tirta has also had Perum Jasa Tirta II Board of Directors Regulation number: KBS-11 DIR/05/2022 concerning PJT II Anti-Bribery Policy which aims to provide a comprehensive overview in implementing and improving the effectiveness of the Anti-Bribery Management System in order to prevent, detect and handle bribery within Perum Jasa Tirta II has also carried out the second assessment for 2022 by Sucofindo International Certification Service.



SIPPID MOBILE MEMPERMUDAH INFORMASI DALAM GENGAMAN

SIPPID Mobile Easy Information In The Hands

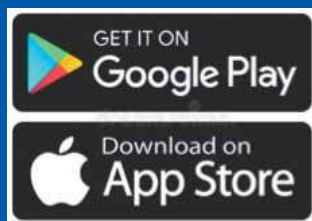
Perum Jasa Tirta II menghadirkan aplikasi yang membantu sebagai sarana layanan *online* bagi pemohon informasi public guna memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi secara cepat, mudah, tepat dan transparan dan sebagai salah satu inovasi pelaksanaan keterbukaan informasi public di PJT II.

Perum Jasa Tirta II presents an application that helps as an online service facility for applicants for public information to make it easier for the public to access information quickly, easily, precisely and transparently and as one of the innovations in implementing public information disclosure at PJT II.

Aplikasi SIPPID di rancang dengan tampilan yang mudah dipahami dan digunakan bagi pengunduhnya, tersedia berbagai menu yang diperuntukan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi publik perusahaan. Aplikasi ini pun berkolaborasi dengan *influencer* local yang tersebar di beberapa kota.

The SIPPID application is designed with a display that is easy to understand and use for downloaders, there are various menus that are intended for the public to obtain company public information. This application also collaborates with local influencers spread across several cities.

Scan disini / [Scan here:](#)

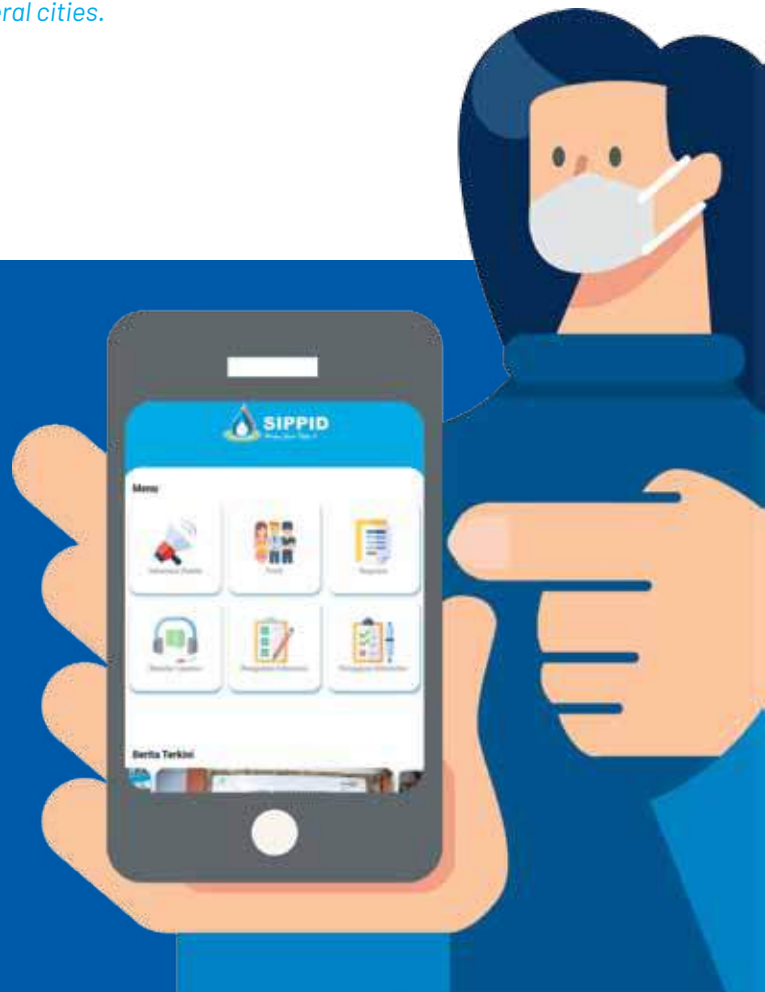


Seluruh pertanyaan dan masukan yang terangkum dalam lembar umpan balik dapat disampaikan kepada:

Seluruh pertanyaan dan masukan yang terangkum dalam lembar umpan balik dapat disampaikan kepada:

PERUM JASA TIRTA II

Sekretariat Perusahaan
Jl. Lurah Kawa No.1
Jatiluhur, Purwakarta
Jawa Barat 41152
Tel (0264) 201972
Email : pjt2@jasatirta2.co.id





KILAS KINERJA 2022

2022 Performance Overview



PERISTIWA PENTING 2022

2022 Event Highlights

FEBRUARI / February



03 Februari 2022 / *February 03, 2022*

Penanaman Bersama Bupati Purwakarta di Bojong.
Joint Planting with the Regent of Purwakarta in Bojong.



11 Februari 2022 / *February 11, 2022*

Konsultasi Publik BJPSDA / *BJPSDA Public Consultation.*



24 Februari 2022 / *February 24, 2022*

Vaksin Booster PJT II / *Vaksin Booster PJT II.*



24 Februari 2022 / *February 24, 2022*

Penjurian BUMN Track / *BUMN Track judging.*

MARET / March



07 Maret 2022 / [March 07, 2022](#)

Kaji Banding SDM PJT 1 ke PJT II / [Study HR Comparison of PJT 1 to PJT II.](#)



14 Maret 2022 / [March 14, 2022](#)

MoC Dengan K-Water guna mengembangkan pengelolaan dan pengusahaan sumber daya air di Indonesia. / [MoC with K-Water to develop water resources management and exploitation in Indonesia.](#)



15 Maret 2022 / [March 15, 2022](#)

Kunjungan Menko Marvest ke Waduk Jatiluhur dalam rangka progres pelaksanaan program Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum (PPK DAS Citarum) / [Coordinating Minister Marvest's visit to Jatiluhur Reservoir in the context of the progress of the implementation of the Citarum Watershed Pollution and Damage Control Acceleration program \(PPK DAS Citarum\).](#)



23 Maret 2022 / [March 23, 2022](#)

MoU dengan Bank Mandiri untuk memfasilitasi layanan perbankan seperti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Integrated Mandiri Cash Management (MCM), pengelolaan dana dalam bentuk produk-produk deposito dan giro, pinjaman, utilitas, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), payroll, asuransi kesehatan dan lainnya. / [MoU with Bank Mandiri to facilitate banking services such as Non-Tax State Revenue \(PNBP\), Integrated Mandiri Cash Management \(MCM\), fund management in the form of deposit and current account products, loans, utilities, Pension Fund for Financial Institutions \(DPLK\), payroll, health insurance and others.](#)



24 Maret 2022 / [March 24, 2022](#)

Uji Konsekuensi Informasi Publik / [Public Information Consequences Test.](#)



24 Maret 2022 / [March 24, 2022](#)

Jasa Tirta II memperoleh capaian membanggakan dengan memperoleh penghargaan pada acara BUMN Award ke-11 dengan kategori "Driving Transformation" / [Jasa Tirta II obtained a proud achievement by obtaining an award at the 11th BUMN Award event with the category "Driving Transformation".](#)

PERISTIWA PENTING 2022

2022 Event Highlights

APRIL / April



07 April 2022 / April 07, 2022

MoU dengan Kejati berkaitan dengan bantuan penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara.
MoU with Kejati regarding assistance in handling legal issues in the field of civil and state administration.



21 April 2022 / April 21, 2022

Kartini Srikandi BUMN



27 April 2022 / April 27, 2022

Penyerahan Sembako dan Bazar Ramadhan
Food delivery and Ramadhan Bazaar



MEI / May



11 Mei 2022 / [May 11, 2022](#)

Halal Bihalal



12 Mei 2022 / [May 12, 2022](#)

Rapat Koordinasi SDA / [SDA Coordination Meeting](#)



24 Mei 2022 / [May 24, 2022](#)

Jasa Tirta II meraih tiga penghargaan sekaligus dalam bidang keselamatan kerja yaitu Sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) tingkat Lanjutan dengan pencapaian Kategori Emas, dan Bendera Emas dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, dan Penghargaan Zero Accident tiga tahun berturut turut.

Jasa Tirta II won three awards at once in the field of occupational safety, namely the Advanced level Occupational Safety and Health Management System Certification (SMK3) with the achievement of the Gold Category, and the Gold Flag from the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia, and the Zero Accident Award for three consecutive years.

PERISTIWA PENTING 2022

2022 Event Highlights

JULI / July



8 July 2022 / *July 8, 2022*

Qurban Idul Adha 1444 H / *Eid al-Adha 1444 H*



15 Juli 2022 / *July 15, 2022*

Jasa Tirta II melakukan kerjasama pemanfaatan layanan jasa dan produk perbankan syariah dengan Bank Syariah Indonesia.
Jasa Tirta II collaborates in the utilization of Islamic banking services and products with Bank Syariah Indonesia.



20 July 2022 / [July 20, 2022](#)

Penjurian BUMN Track TJSL Award / [BUMN Track TJSL Award Judging](#)



21 July 2022 / [July 21, 2022](#)

Studi Banding PT Kawasan Industri Medan dalam rangka mengetahui implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Perum Jasa Tirta II. / [Comparative Study of PT Kawasan Industri Medan in order to determine the implementation of Public Information Openness at Perum Jasa Tirta II.](#)



27 - 28 July 2022 / [July 27 - 28, 2022](#)

Rapat Kerja Perum Jasa Tirta II / [Perum Jasa Tirta II Work Meeting](#)

PERISTIWA PENTING 2022 2022 Event Highlights

HUT 55 Jasa Tirta II
55th Anniversary of Jasa Tirta II



AGUSTUS / August



8 Agustus 2022 / August 8, 2022

Pembukaan HUT 55 Jasa Tirta II / Opening Ceremony HUT 55 Jasa Tirta II





PERISTIWA PENTING 2022

2022 Event Highlights

AGUSTUS / August



4-8 Agustus 2022 / [August 4-8, 2022](#)
Pembekalan Cakar / [Pembekalan Cakar](#)



11 Agustus 2022 / [August 11, 2022](#)
Jasa Tirta II meraih penghargaan spesial sebagai Perusahaan yang konsisten dalam mendukung Pilar Lingkungan TJSL dalam Manfaat Program Olah Limbah dalam BUMN Track TJSL & CSR Award Tahun 2022 dan penghargaan kepada Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko Jasa Tirta II Indriani Widiastuti Kategori *Committed Leader to TJSL Initiative on Natural Resources*. / [Jasa Tirta II received a special award as a company that consistently supports the TJSL Environmental Pillar in the Benefits of Waste Management Program in the BUMN Track TJSL & CSR Award Year 2022 and an award to the Director of Finance, HR and Risk Management of Jasa Tirta II Indriani Widiastuti in the Committed Leader to TJSL Initiative on Natural Resources category.](#)



17 Agustus 2022 / [August 17, 2022](#)
Upacara 17 Agustus 2022 / [August 17, 2022 ceremony](#)



22 Agustus 2022 / [August 22, 2022](#)
Gathering Jasa Tirta II / [Gathering Jasa Tirta II](#)



24 Agustus 2022 / [August 24, 2022](#)
Sunatan Masal / [Mass Circumcision](#)



25 Agustus 2022 / [August 25, 2022](#)

Kunjungan Direksi ke Pendopo Bupati Purwakarta dalam rangka meningkatkan kolaborasi program dengan Pemerintah Daerah. / [Board of Directors visit to Purwakarta Regent Hall in order to improve program collaboration with the Regional Government.](#)



27 Agustus 2022 / [August 27, 2022](#)

Charity in Diversity Golf dalam rangka meningkatkan kepedulian sosial dan dukungan terhadap masyarakat, dari BUMN untuk Indonesia. / [Charity in Diversity Golf in order to increase social awareness and support for the community, from BUMN for Indonesia.](#)

SEPTEMBER / September



7 September 2022 / [September 7, 2022](#)

HUT Sekar / [Sekar's birthday](#)



12 September 2022 / [September 12, 2022](#)

Sosialisasi PP 25 tahun 2022 / [Socialization of PP 25 of 2022](#)



PERISTIWA PENTING 2022

2022 Event Highlights

SEPTEMBER / September



23 September 2022 / *September 23, 2022*

Pasar Murah bersama BUMN / *Cheap Market with BUMN*





28 September 2022 / [September 28, 2022](#)

Pisah Sambut Dewan Pengawas

Anggota Dewas Moh Sofwan yang berakhir masa jabatannya, diganti dengan FATKHUROHMAN TAUFIK.

[Farewell to the Supervisory Board](#)

[Dewas member Moh Sofwan, whose term of office ended, was replaced with FATKHUROHMAN TAUFIK.](#)



30 September 2022 / [September 30, 2022](#)

Pelatihan Limbah Ternak Menjadi Biogas / [Livestock Waste Turning into Biogas Training](#)

PERISTIWA PENTING 2022

2022 Event Highlights

OKTOBER / Oktober



17-18 Oktober 2022 / *October 17-18, 2022*

SOE International Conference / *SOE International Conference*



24 Oktober 2022 / *October 24, 2022*

Kunjungan Kerja Direksi dan Dewan Pengawas ke BBWS Cidanau Ciujung Cidurian dalam rangka koordinasi pengembangan wilayah kerja di WS 3Ci / *Working Visit of the Board of Directors and Supervisory Board to BBWS Cidanau Ciujung Cidurian in order to coordinate the development of working areas in WS 3Ci.*

PERISTIWA PENTING 2022

2022 Event Highlights

NOVEMBER / November



9 November 2022 / [November 9, 2022](#)

Jasa Tirta II meraih penghargaan brand strategy pada ajang 10th BUMN Branding & Marketing Award Tahun 2022.
Jasa Tirta II won the brand strategy award at the 10th BUMN Branding & Marketing Award in 2022.



30 November 2022 / [November 30, 2022](#)

Pelepasan Umrah / [Umrah Departure](#)



DESEMBER / December



1 Desember 2022 / [December 1, 2022](#)

Bantuan Air Bersih Cianjur / [Clean Water Aid Cianjur](#)



14 Desember 2022 / [December 14, 2022](#)

Anugerah Keterbukaan Informasi Publik /
[Public Information Disclosure Award](#)



20 Desember 2022 / [December 20, 2022](#)

MoU dengan IFG terkait rencana kerja sama pengelolaan aset investasi dana pensiun dengan PT Bahana TCW Investment Management dan 8 BUMN pendiri dana pensiun manfaat pasti. / [The MoU with IFG is related to the plan to cooperate in managing pension fund investment assets with PT Bahana TCW Investment Management and 8 SOEs founding defined benefit pension funds.](#)



23 Desember 2022 / [December 23, 2022](#)

Jasa Tirta II bersama dengan PT. Destinasi Tirta Nusantara (Panorama Destinasi) - Penorama Grop Sepakat untuk pengembangan Destinasi Wisata Jatiluhur dan penataan pengembangan Wisata kawasan Pantai Timur yang akan dibukanya kawasa Modern Camping Ground yang memenuhi standar Destinasi di kawasan D'bay Jatiluhur Valley & Resort. [Jasa Tirta II together with PT Destinasi Tirta Nusantara \(Panorama Destinations\) - Penorama Grop Agreed to develop Jatiluhur Tourism Destinations and structuring the development of East Coast Tourism which will open a Modern Camping Ground that meets Destination standards in the D'bay Jatiluhur Valley & Resort area.](#)





PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

Awards and Certifications



Jasa Tirta II memperoleh capaian membanggakan dengan memperoleh penghargaan pada acara BUMN Award ke-11 dengan kategori "Driving Transformation". / *Jasa Tirta II obtained a proud achievement by obtaining an award at the 11th BUMN Award event with the category "Driving Transformation".*



Jasa Tirta II meraih tiga penghargaan sekaligus dalam bidang keselamatan kerja yaitu Sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) tingkat Lanjutan dengan pencapaian Kategori Emas, dan Bendera Emas dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, dan Penghargaan Zero Accident tiga tahun berturut turut. / *Jasa Tirta II won three awards at once in the field of occupational safety, namely the Advanced level Occupational Safety and Health Management System Certification (SMK3) with the achievement of the Gold Category, and the Gold Flag from the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia, and the Zero Accident Award for three consecutive years.*

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

Awards and Certifications



Jasa Tirta II meraih penghargaan spesial sebagai Perusahaan yang konsisten dalam mendukung Pilar Lingkungan TJSL dalam Manfaat Program Olah Limbah dalam BUMN Track TJSL & CSR Award Tahun 2022 dan penghargaan kepada Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko Jasa Tirta II Indriani Widiastuti Kategori *Committed Leader to TJSL Initiative on Natural Resources*. / Jasa Tirta II won three awards at once in the field of occupational safety, namely the Advanced level Occupational Safety and Health Management System Certification (SMK3) with the achievement of the Gold Category, and the Gold Flag from the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia, and the Zero Accident Award for three consecutive years.



Jasa Tirta II meraih penghargaan brand strategy pada ajang 10th BUMN Branding & Marketing Award Tahun 2022. *Jasa Tirta II won the brand strategy award at the 10th BUMN Branding & Marketing Award in 2022.*



Sustainability Report Award



Penghargaan Mananajemen Risiko

PROFIL PERUSAHAAN

Company Profile







IDENTITAS PERUSAHAAN Company Identity

NAMA PERUSAHAAN <i>Company Name</i>	: PERUM JASA TIRTA II
TANGGAL PENDIRIAN <i>Date of Establishment</i>	: 26 Agustus 1967 <i>August 26, 1967</i>
DASAR HUKUM PENDIRIAN <i>Legal Basis of Establishment</i>	: Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2022 <i>Government Regulation No. 25 of 2022</i>
BENTUK BADAN HUKUM <i>Legal Entity</i>	: Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perusahaan Umum. <i>State Owned Enterprise (SOE) in the form of Public Utility Company.</i>
NPWP <i>Tax Identification Number</i>	: 010000552-409.003
STATUS PERUSAHAAN <i>Company Status</i>	: Perusahaan Umum (Perum) <i>Public Utility Company</i>
BIDANG USAHA <i>Line of Business</i>	: Pengelolaan dan Pengusahaan Sumber Daya Air (SDA). <i>Management and Exploitation of Water Resources (SDA).</i>
MODAL DASAR <i>Authorized Capital</i>	: Rp164.547.635.935,00
JUMLAH KARYAWAN <i>Total Employee</i>	: 1.046 Karyawan (Tidak termasuk karyawan anak perusahaan, Pegawai Waktu Tertentu, dan Outsource) <i>1.046 employees (Excluding subsidiary employees, Specific Time Employees, and Outsourcers)</i>



ENTITAS ANAK
Subsidiary Entity

: **PT. Jasa Tirta Luhur**

KEPEMILIKAN
Ownership

: 100% milik Negara Republik Indonesia
100% Indonesia owned by the Republic of Indonesia

ALAMAT KANTOR PUSAT
Head Office Address

: Jl. Lurah Kawi No. 1 Jatiluhur – Purwakarta, Jawa Barat

KANTOR LAYANAN
Service Offices

: 1 Kantor Pusat / *Head Office*
1 Kantor Perwakilan / *Representative Office*
2 Kantor Unit Usaha / *Business Unit Offices*
4 kantor Wilayah / *Regional offices*

LAYANAN INFORMASI / *Informatin Service*

✉ pjt2@jasatirta2.co.id

☎ (0264) 201972

📠 (0264) 201971

📘 Jasa Tirta II

📷 [jasatirta.2](https://www.instagram.com/jasatirta.2)

▶ Perum Jasa Tirta II

📺 [jasatirta 2](https://www.youtube.com/channel/UCv3v3v3v3v3v3v3v3v3v3v3)

🏠 www.jasatirta2.co.id



KANTOR PUSAT / Head Office

Jalan Lurah Kawi No. 1 Jatiluhur
Purwakarta - Jawa Barat
Telp & Fax (0264) 201 971-72



KANTOR PERWAKILAN

Representative Office

Jalan H. Agus Salim No. 69, Jakarta Pusat
Telp. (021) 314 5827



KANTOR UNIT WILAYAH I

Regional Unit Office I

Jalan Ir. Djuanda No. 124D Bekasi
Jawa Barat
Telp & Fax. (021) 880 1884



KANTOR UNIT WILAYAH II

Regional Unit Office II

Jalan Curug Klari, Karawang Jawa Barat
Telp. (0264) 200 487
Fax. (0264) 203 580



KANTOR UNIT WILAYAH III

Regional Unit Office III

Jalan Arief Rahman Hakim No. 16,
Subang-Jawa Barat
Telp. (0260) 411510 & Fax. (0260) 415 684



KANTOR UNIT WILAYAH IV

Regional Unit Office IV

Jalan Rasamala Raya, Bendungan Jatiluhur,
Purwakarta-Jawa Barat
Telp. / Fax. (0264) 822 2537



KANTOR UNIT PLTA

Hydropower Unit Office

Jalan Rasamala Raya, Bendungan
Jatiluhur, Purwakarta-Jawa Barat
Telp. (0264) 200 565 & Fax. (0264) 200 060



KANTOR UNIT USAHA PARIWISATA DAN HOTEL

Hotel Business Unit Office

Jatiluhur Valley & Resort
Jl. Rasamala No. 1, Jatiluhur - Purwakarta, Jawa Barat
Telp. (0264) 201087, 201989



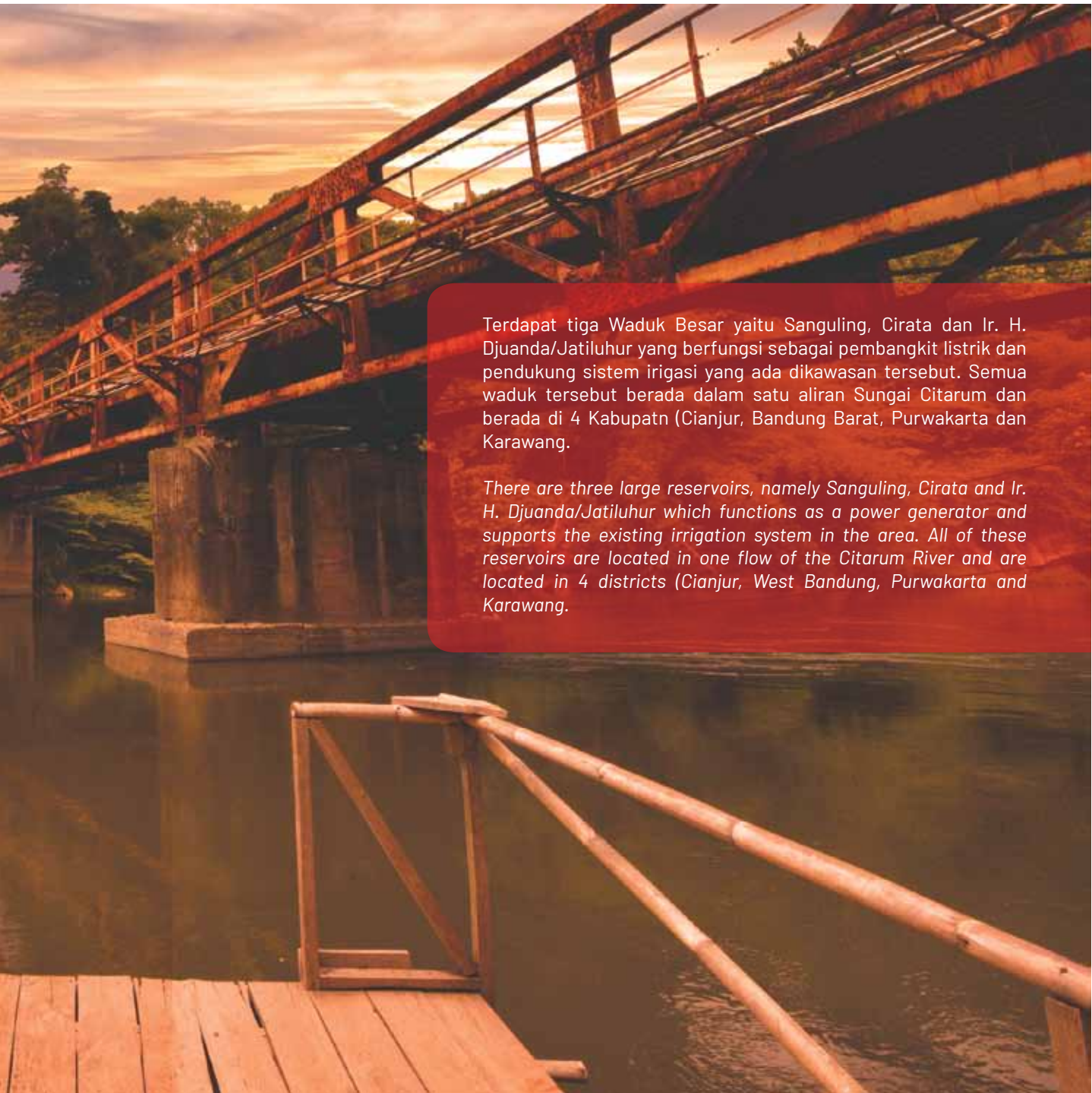
PROFIL WILAYAH SUNGAI CITARUM

Citarum River Basin Profile



Sungai Citarum mengalir dari hulu yang berada di daerah Gunung Wayang, disebelah Selatan Kota Bandung, menuju ke Utara dan bermuara di Laut Jawa. Dengan Panjang sekitar 297 km. Citarum merupakan sungai terpanjang dan terbesar di Provinsi Jawa Barat. Air sungai Citarum digunakan untuk memenuhi kebutuhan irigasi, perikanan, air baku untuk air minum, air baku untuk industri, serta untuk membangkitkan listrik tenaga air yang terhubung dengan jaringan Jawa Madura Bali.

The Citarum River flows from its headwaters in the Gunung Wayang area, south of Bandung City, to the north and empties into the Java Sea. It is approximately 297 km long. Citarum is the longest and largest river in West Java Province. Citarum river water is used to meet the needs of irrigation, fisheries, raw water for drinking water, raw water for industry, as well as to generate hydroelectric power connected to the Java Madura Bali network.



Terdapat tiga Waduk Besar yaitu Sanguling, Cirata dan Ir. H. Djuanda/Jatiluhur yang berfungsi sebagai pembangkit listrik dan pendukung sistem irigasi yang ada dikawasan tersebut. Semua waduk tersebut berada dalam satu aliran Sungai Citarum dan berada di 4 Kabupatn (Cianjur, Bandung Barat, Purwakarta dan Karawang).

There are three large reservoirs, namely Sanguling, Cirata and Ir. H. Djuanda/Jatiluhur which functions as a power generator and supports the existing irrigation system in the area. All of these reservoirs are located in one flow of the Citarum River and are located in 4 districts (Cianjur, West Bandung, Purwakarta and Karawang).

Sungai Citarum merupakan sungai yang memiliki Daerah Aliran Sungai (DAS) terbesar di Provinsi Jawa Barat. WS Citarum Seluas kurang lebih 12.000 km² mencakup 12 wilayah administrasi kabupaten/kota di lingkungan Provinsi Jawa Barat, yaitu: Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kota Bandung, Kota Bekasi dan Kota Cimahi. Curah Hujan tahunan di WS Citarum rata-rata sebesar 2.358 mm.

Citarum River is a river that has the largest watershed (DAS) in West Java Province. Citarum WS has an area of approximately 12,000 km² covering 12 administrative districts/cities in West Java Province, namely: Bandung Regency, West Bandung Regency, Bekasi Regency, Cianjur Regency, Indramayu Regency, Karawang Regency, Purwakarta Regency, Subang Regency, Sumedang Regency, Bandung City, Bekasi City and Cimahi City. The average annual rainfall in the Citarum River Basin is 2,358 mm.



Jumlah sungai besar yang ada di Wilayah Sungai Citarum Kurang Lebih 19 sungai yang bermuara di laut utara maupun bergabung dengan sungai lainnya. Sungai utama yang ada di WS Citarum adalah Sungai Citarum. Sungai Citarum bermuara di Muara Gembong (Kabupaten Bekasi). Berdasarkan keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penetapan wilayah sungai, wilayah sungai Citarum terdiri dari 19 DAS.

Bendungan Jatiluhur adalah Bendungan terbesar di Indonesia. Bendungan itu dinamakan oleh Pemerintah Waduk Ir. H. Djuanda dengan panorama danau yang luasnya 8.300 ha. Bendungan ini mulai dibangun sejak tahun 1957 oleh kontraktor asal Perancis, dengan potensi air yang tersedia sebesar 12,9 miliar m³/tahun dan merupakan waduk serbaguna pertama di Indonesia yang dikelola oleh Perum Jasa Tirta II yang memiliki fungsi penyedia air irigasi untuk 242.000 ha sawah (dua kali tanam setahun), air baku, air minum, budidaya perikanan dan pengendali banjir. Bendungan juga memiliki 6 unit turbin dengan daya terpasang 187.5 MW dengan produksi tenaga listrik rata-rata 1.000 juta kwh setiap tahun.

The number of large rivers in the Citarum River Basin is approximately 19 rivers that empties into the north sea or joins other rivers. The main river in the Citarum River Basin is the Citarum River. The Citarum River empties into Muara Gembong (Bekasi Regency). Based on Presidential Decree No. 12 of 2021 regarding the determination of river areas, the Citarum river area consists of 19 watersheds.

Jatiluhur Dam is the largest dam in Indonesia. The dam was named by the Reservoir Government Ir. H. Juanda with a panoramic view of the lake which covers an area of 8,300 ha. This dam was built in 1957 by a French contractor, with an available water potential of 12.9 billion m³/year and is the first multipurpose reservoir in Indonesia managed by Perum Jasa Tirta II which has the function of providing irrigation water for 242,000 ha of rice fields (planting twice a year), raw water, drinking water, aquaculture and flood control. The dam also has 6 turbine units with an installed power of 187.5 MW with an average electricity production of 1,000 million kwh per year.



SEKILAS PERUSAHAAN *Company at a Glance*



Sejarah perusahaan kami bermula dari proyek nasional Pemerintah Republik Indonesia untuk pembangunan Bendungan Ir. H. Djuanda tahun 1957 dan selesai tahun 1967. Pembangunan Bendungan Ir. H. Djuanda merupakan bagian dari tahap Pengembangan Sumber Daya Air di Wilayah Sungai Citarum, dan berfungsi sebagai pendukung ketahanan pangan nasional melalui penyediaan air irigasi pertanian di sebagian wilayah Jawa Barat, penyediaan air baku untuk PDAM, Industri dan Pembangkitan Listrik. Bendungan Ir. H. Djuanda juga berfungsi untuk pengendalian banjir di sebagian wilayah Karawang, Bekasi dan daerah subur di sekitarnya, serta sebagai salah satu tujuan wisata dan olahraga air di wilayah Jawa Barat.

Dengan selesainya pembangunan tersebut, maka berdasarkan PP No. 8 tanggal 24 Juli 1967, Pemerintah Republik Indonesia membentuk Badan Pengelola dan Pembina Danau Jatiluhur dengan nama Perusahaan Negara Jatiluhur yang selanjutnya disebut PN Jatiluhur, berkedudukan di Jatiluhur. Badan ini bertugas menyelenggarakan Eksploitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Bendungan/Waduk dan PLTA Ir. H. Djuanda serta merintis pengembangan proyek-proyek selanjutnya.

The history of our company began with the national project of the Government of the Republic of Indonesia for the construction of the Ir. H. Djuanda Dam in 1957 and was completed in 1967. The construction of the Ir. H. Djuanda Dam is part of the Water Resources Development phase in the Citarum River Basin, and serves as a supporter of national food security through the provision of agricultural irrigation water in parts of West Java, raw water supply for PDAM, Industry and Electricity Generation. The Ir. H. Djuanda Dam also serves to control flooding in parts of Karawang, Bekasi and surrounding fertile areas, as well as one of the tourist and water sports destinations in the West Java region.

With the completion of the development, in conform to Government Regulation No.8 on July 24, 1967, the Government of the Republic of Indonesia established the Jatiluhur Board of Management and Supervisory under the name of Jatiluhur State Company, hereinafter referred to as PN Jatiluhur, domiciled in Jatiluhur. This agency is in charge of carrying out Exploitation and Maintenance of Facilities and Infrastructure of Dams/Reservoirs and PLTA Ir. H. Djuanda as well as pioneering the development of subsequent projects.



Dengan bertambah luasnya ruang lingkup tugas Perusahaan serta sejalan dengan usainya sebagian besar pembangunan Proyek Nasional Serba Guna Jatiluhur yang meliputi Waduk, Bendungan Utama, Stasiun PLTA serta sarana-sarana Sistem Pengairan dan Irigasi, menjadi dasar pertimbangan Pemerintah untuk membentuk Perum Otorita Jatiluhur (POJ) yang didirikan berdasarkan PP No. 20 tanggal 23 Mei 1970 yang kemudian disesuaikan dengan PP No. 35 Tahun 1980, PP No. 42 Tahun 1990 serta PP No. 13 Tahun 1998. POJ diberi mandat oleh Pemerintah untuk mengelola sumber-sumber pendapatan Otorita, dan harus diusahakan pemasukannya semaksimal mungkin untuk dipergunakan bagi biaya rehabilitasi, perbaikan berat dan pembangunan jaringan.

RIWAYAT PERUBAHAN NAMA

Turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, terutama di bidang pengusahaan dan pengelolaan Sumber Daya Air serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan, untuk menghasilkan barang dan jasa berdasarkan prinsip pengelolaan Perusahaan yang sehat, maka berdasarkan PP No. 94 tanggal 13 Oktober 1999, Pemerintah mengubah dan menyesuaikan nama Perum Otorita Jatiluhur menjadi Perum Jasa Tirta II yang kemudian disesuaikan kembali ruang lingkup tugas dan kegiatan usahanya dengan PP No. 7 Tahun 2010.

Dengan adanya perubahan-perubahan tersebut, diharapkan Perum Jasa Tirta II bertransformasi menjadi lebih dinamis, responsif, dan mampu meningkatkan perannya sebagai perusahaan yang terkemuka di bidang pengelolaan Sumber Daya Air.

With the expansion of the Company's scope of work, in line with the majority of the construction of the Jatiluhur Multipurpose Project which includes the Reservoir, the Main Dam, the Hydroelectric Station, and the Irrigation System facilities, this became the basis of Government Consideration to form the established Jatiluhur Authority (POJ) based on PP No.20 on May 23, 1970, which was then adjusted with Government Regulation No.35 of 1980, PP No.42 of 1990, and PP No.13 of 1998. POJ is mandated by the Government to manage the sources of income of the Authority, and must cultivate as much as possible to be used for rehabilitation, heavy repair, and network construction.

History Of Company's Name

To assist the implementation and support of the government policies and programs in the field of economy and national development in general, especially in the field of water resources management and utilization and optimization of resources utilization of the Company, to produce goods and services based on sound management principles of the Company. Therefore, based on Government Regulation No.94 on October 13, 1999, the Government changed and adjusted the name of Perum Otorita Jatiluhur to Perum Jasa Tirta II, which then re-adjusted the scope of its duties and business activities with PP No.7 of 2010.

With these changes, Perum Jasa Tirta II is expected to transform into a more dynamic, responsive and able to improve its role as a leading company in the field of water resources management.



Sesuai dengan tujuan didirikannya Perum JasaTirta II, manajemen tetap berkomitmen terhadap misi yang diemban Perum Jasa Tirta II yaitu menyelenggarakan pengelolaan Sumber Daya Air dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan inovatif melalui penyediaan air baku.

Pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik kepada PT PLN (Persero) dan/atau selain PT PLN (Persero), pengembangan kepariwisataan dan pemanfaatan lahan yang bertujuan memberikan kontribusi dalam menunjang ketahanan pangan nasional dan keuntungan bagi Negara, turut melaksanakan kebijakan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, terutama di bidang pengusahaan dan pengelolaan Sumber Daya Air serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.

In accordance with the purpose of the establishment of Perum Jasa Tirta II, management remains committed to the mission carried out by Perum Jasa Tirta II, namely organizing the management of Water Resources with Good Corporate Governance and innovation through the provision of raw water.

Generation and distribution of electricity to PT PLN (Persero) and / or other than PT PLN (Persero), tourism development and land use aimed at contributing to supporting national food security and benefits for the State, participating in implementing Government program policies in the economic sector and national development in general, especially in the field of exploitation and management of Water Resources and optimizing the use of Company resources to produce goods and services based on sound corporate management principles.



JEJAK LANGKAH Milestone

1997-1999

Pemerintah membentuk Perum Otorita Jatiluhur yang didirikan berdasarkan PP No. 20 tanggal 23 Mei 1970, yang kemudian disesuaikan dengan PP No. 35 tahun 1980, PP No. 42 tahun 1990 serta PP No. 13 Tahun 1998.

The government established the Perum Otorita Jatiluhur under Govt. Reg. No.20 on May 23, 1970, which was then adjusted with Govt. Reg. No.35 of 1980, Govt. Reg. No.42 of 1990, and Govt. Reg. No.13 of 1998.

2010

Berdasarkan PP No. 94 tanggal 13 Oktober 1999, Pemerintah mengubah dan menyesuaikan nama Perum Otorita Jatiluhur menjadi Perum Jasa Tirta II, yang kemudian disesuaikan kembali ruang lingkup tugas dan kegiatan usahanya dengan PP No. 7 Tahun 2010.

Based on Govt. Reg. No.94 on October 13, 1999, the Government changed and adjusted the name of Perum Otorita Jatiluhur to Perum Jasa Tirta II, which then re-adjusted the scope of its tasks and business activities with Govt. Reg. No. 7 of 2010.

1957-1967

Proyek pembangunan Bendungan Serbaguna Jatiluhur dinyatakan selesai dibangun pada tahun 1967 dan diresmikan Pemerintah Republik Indonesia dengan nama Bendungan Ir. H. Djuanda.

Construction of Jatiluhur Multipurpose Dam project was declared completed in 1967 and inaugurated by the Government of the Republic of Indonesia under the name of Ir. H. Djuanda Dam.

1967-1970

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 1967 tanggal 24 Juli 1967, Pemerintah membentuk Badan Pengelola dan Pembina Danau Jatiluhur dengan nama Perusahaan Negara Jatiluhur yang selanjutnya disebut PN Jatiluhur, berkedudukan di Jatiluhur.

Based on Govt. Reg. No.8 of 1967, on July 24, 1967, the Government established the Board of Management and Advisory of Jatiluhur Lake under the name of Jatiluhur State Company, hereinafter referred to as PN Jatiluhur, domiciled in Jatiluhur.

1999

Pegawai/Pekerja dari Proyek PLTA Jatiluhur beserta bangunan Waduk, PLTA serta Gardu Induknya diserahkan kepada PN Jatiluhur untuk menyelenggarakan Pengelolaan dan Pengusahaan potensi-potensi yang timbul setelah selesainya sebagian Proyek PLTA Jatiluhur.

Officers/Workers from Jatiluhur Hydroelectric Project and Reservoir building, hydropower, and substation were handed over to PN Jatiluhur to organize the Management and Exploitation of potentials that arise after the completion of part of Jatiluhur Hydroelectric Project.



2018

Perusahaan mendirikan anak perusahaan yakni PT Jasa Tirta Luhur didirikan berdasarkan Akta Notaris Putranto Nur Utomo, S.H., M.Kn, dengan Akta nomor 46 tanggal 29 Agustus 2018. Perseroan bergerak dalam bidang jasa Sistem Penyediaan Air Minum dan Konstruksi. Pendirian tersebut telah mendapatkan persetujuan dari pemilik modal.

The company established a subsidiary, namely PT Jasa Tirta Luhur which was established based on the Notary Deed of Putranto Nur Utomo, S.H., M.Kn, by Deed number 46 dated August 29, 2018. The Company is engaged in Drinking Water Supply System and Construction services. The establishment has obtained the approval of the owner of the capital.

2022

Pada Tahun 2022, Perum Jasa Tirta II telah genap 55 tahun telah hadir sebagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) memberikan dedikasi dan dukungan terhadap ketahanan pangan dan energi nasional sebagaimana Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2022.

In 2022, Perum Jasa Tirta II has completed 55 years of existence as a State-Owned Enterprise (BUMN) company engaged in Water Resources Management (SDA) providing dedication and support for national food and energy security as per Government Regulation No. 25 of 2022.

2017

Perusahaan melakukan perubahan logo sebagai bentuk implementasi transformasi. Logo terbaru telah disahkan berdasarkan Peraturan Direksi Perum Jasa Tirta II Nomor 1/DIR/35/PRD-PED/2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Direksi Perum Jasa Tirta II Nomor 1/01/PRT/2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Perum Jasa Tirta II.

The company changes the logo as a form of implementing transformation. The latest logo has been ratified pursuant to Regulation of Board of Directors of Perum Jasa Tirta II Number: 1/DIR/35/PRD-PED/2017 concerning the Fifth Amendment to Regulation of Board of Directors of Perum Jasa Tirta II Number: 1/01/PRT/2014 concerning the Guideline of Service Manuscript of Perum Jasa Tirta II.

2021

Perusahaan kini tergabung kedalam sub klaster holding Danareksa-PPA Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.113 tanggal 10 November tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No 25 tahun 1976 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) "Danareksa". Dimana PT Danareksa ditunjuk sebagai holding perusahaan lintas sektor salah satunya sebagai Holding Perusahaan Sumber Daya Air.

The company is now incorporated into the Danareksa-PPA holding sub-cluster. Based on Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 113 dated November 10, 2021 concerning amendments to Government Regulation No. 25 of 1976 concerning State Equity Participation of the Republic of Indonesia for the Establishment of a Limited Liability Company (Persero) "Danareksa". Where PT Danareksa was appointed as a holding company across sectors, one of which was as a Holding Company for Water Resource.



VISI, MISI, MOTTO DAN KOMPETENSI INTI PERUSAHAAN

*Company Vision,
Mission, Motto and Core Competencies*

VISI / Vision

Menjadi Perusahaan Pengelolaan dan Pengusahaan Sumber Daya Air Terkemuka di Asia Tenggara Tahun 2030.

Being the Reputable Water Resource Management and Enterprise Company in Southeast Asia 2030.



MISI

- Pengoptimalan pengusahaan Sumber Daya Air dengan cara yang efisien, efektif, inovatif dan berkelanjutan dengan tujuan menjaga kelestarian dan pengelolaan Sumber Daya Air dan turunannya.
- Menciptakan Sumber Daya Manusia yang mempunyai daya kreativitas dan inovasi serta berdaya saing tinggi dalam pengelolaan Sumber Daya Air dan turunannya.
- Penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan dalam Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT).
- Visi dan Misi Perusahaan telah ditetapkan berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2022.

Mission

- *Optimizing the utilization of Water Resources in an efficient, effective, innovative and sustainable manner with the objective of maintaining the sustainability and management of Water Resources and derivatives.*
- *Creating Human Resources that have the power of creativity and innovation and high competitiveness in the management of Water Resources and derivatives.*
- *Implementing appropriate technology and environmentally friendly, especially in the Development of New and Renewable Energy (EBT).*
- * *The Company's Vision and Mission have been determined based on the 2022 Corporate Work Plan and Budget (RKAP).*



MOTTO PERUSAHAAN *Company Motto*

Air Untuk Menghidupi Negeri *Water for Wellness*

Motto Perum Jasa Tirta II tersebut telah ditetapkan melalui Peraturan Direksi No. 01/DIR/27/PRT/2016. / *Perum Jasa Tirta II Motto has been established through Board of Directors Regulation No. 01/DIR/27/PRT/2016.*

KOMPETENSI INTI PERUSAHAAN *Company Core Competencies*



- Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
Management of Water Resources (SDA).

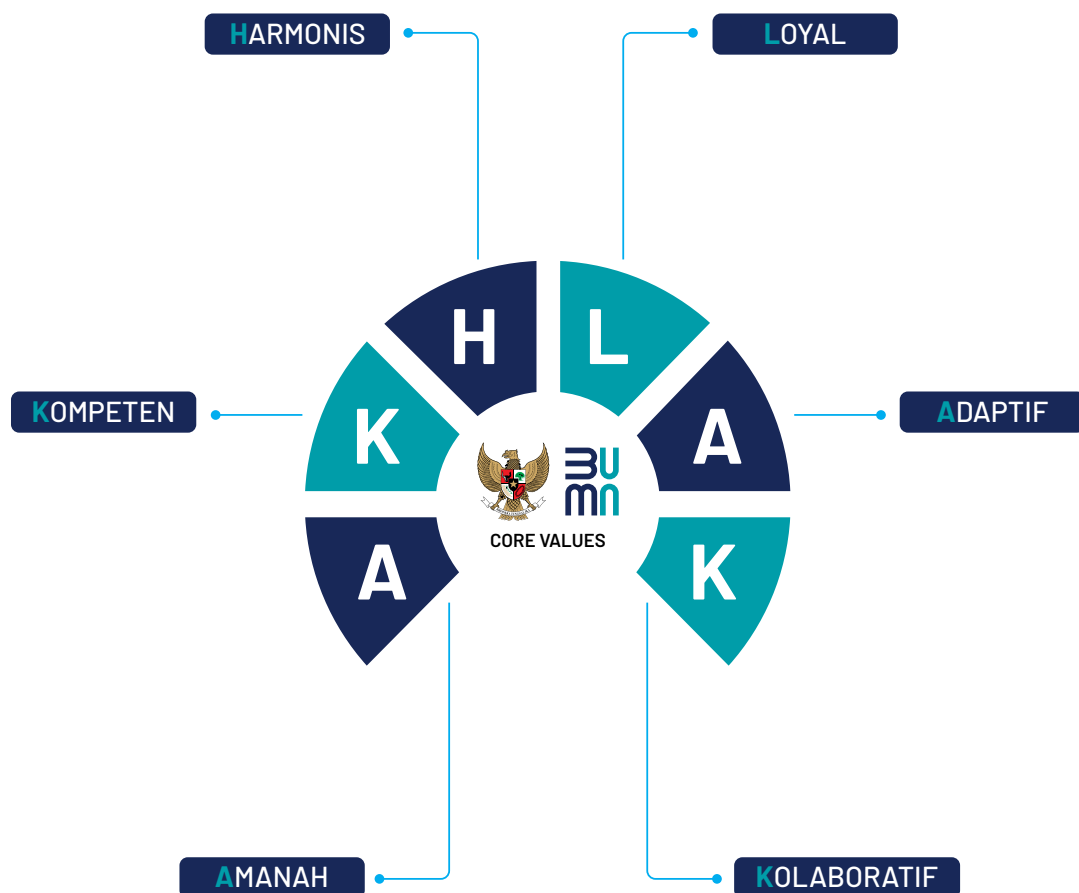
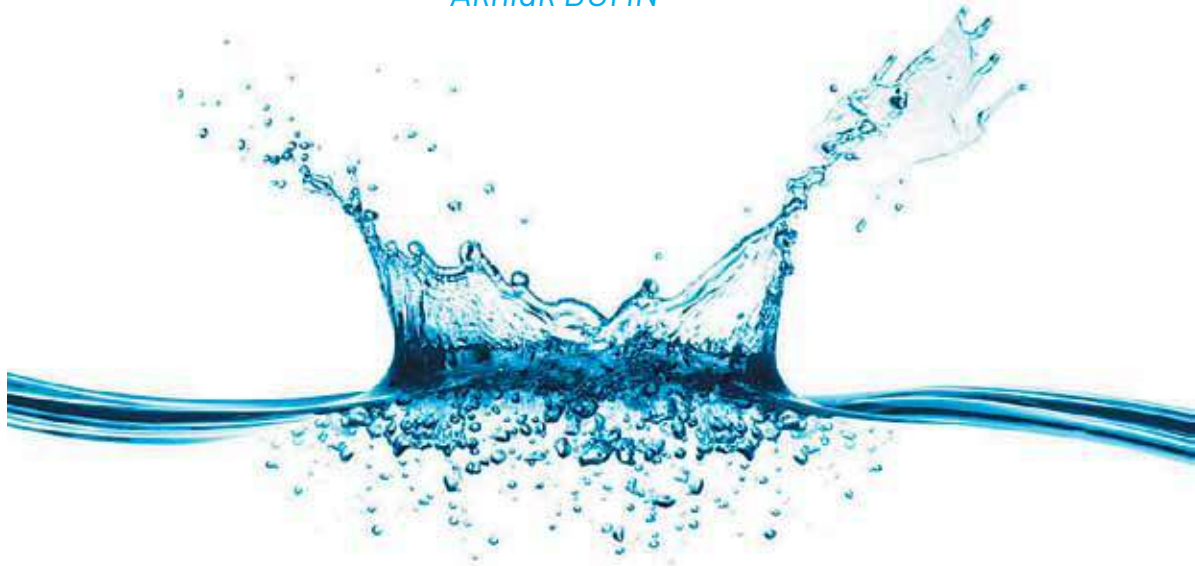


- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan dengan memanfaatkan potensi Sumber Daya Air (SDA).
Development of New and Renewable Energy by utilizing the potential of Water Resources (SDA).



AKHLAK BUMN

Akhlak BUMN





NILA-NILAI UTAMA Core Values



AMANAH / TRUST

adalah memegang teguh kepercayaan yang diberikan.
Hold on to the trust.

KOMPETEN / COMPETENT

adalah terus belajar dan mengembangkan kapasitas.
Continue to learn and develop capacity.

HARMONIS / HARMONY

adalah saling peduli dan menghargai perbedaan.
Care for each other and respect differences.

LOYAL / LOYAL

adalah berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara.
Dedicated and prioritizing the interests of the Nation and the State.

ADAPTIF / ADAPTIVE

adalah terus berinovasi dan antusias dalam mengerjakan ataupun menghadapi perubahan.
Continue to innovate and enthusiastic in moving or facing change.

KOLABORATIF / COLLABORATIVE

adalah membangun kerjasama yang sinergis.
Build synergistic cooperation.

FILOSOFI LOGO

Logo Philosophy

Logo Perusahaan telah berubah sebanyak 1 (satu) kali sejak berdirinya Perum Jasa Tirta II. Logo terbaru telah disahkan berdasarkan Peraturan Direksi Perum Jasa Tirta II No. 1/DIR/35/PRD-PED/2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Direksi Perum Jasa Tirta II No. 1/01/PRT/2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Perum Jasa Tirta II.

Logo Perusahaan merupakan representasi dari bentuk tetesan air, sebagai manifestasi filosofi air yang mengajarkan kerendahan hati, kebaikan, kegigihan, fleksibilitas, dan keseimbangan.

Company logo has changed once since the establishment of Perum Jasa Tirta II. The latest logo has been ratified pursuant to the Regulation of the Board of Directors of Perum Jasa Tirta II No.1/DIR/35/PRD-PED/2017 concerning the Fifth Amendment to Regulation of the Board of Directors of Perum Jasa Tirta II No.1/01/PRT/2014 on Guidelines for Manuscript of Perum Jasa Tirta II.

The Company logo is a representation of the shape of water droplets, as a manifestation of water philosophy that teaches humility, kindness, tenacity, flexibility, and balance.



Perum Jasa Tirta II
Air Untuk Menghidupi Negeri

TAGLINE

Tagline tersebut memberikan pemahaman bahwa Perusahaan sebagai Perusahaan Pengelola Sumber Daya Air (SDA) berkomitmen untuk selalu memberikan kontribusi dan manfaat untuk kesejahteraan dan kemakmuran negeri dan menjaga SDA tersebut untuk keberlangsungan negeri.

Tagline

The tagline provides an understanding that the Company as a Water Resources Management Company (SDA) is committed to always contribute and benefit to the welfare and prosperity of the country and maintain the water resources for the sustainability of the country.

WARNA

Gradasi warna menunjukkan Langkah Besar yang diambil PJT II dan Aspirasi Perusahaan terhadap masa depan yang lebih Positif dan Dinamis.

- **Warna Biru** mencerminkan Perusahaan yang andal, dapat dipercaya, dan bertanggung jawab;
- **Warna Putih** melambangkan kesucian amanah yang diemban Perusahaan dalam ikut berkontribusi membangun kemakmuran bangsa lintas generasi.
- **Warna Merah** mencerminkan keuletan dan ketegasan serta keberanian Perusahaan dalam menghadapi berbagai macam tantangan.
- **Warna Hijau** mencerminkan pengelolaan sumber daya air yang berwawasan lingkungan.

Color

The color gradation shows the Big Step taken by PJT II and the Company's Aspiration towards a more Positive and Dynamic future.

- *The Blue reflects a reliable, trustworthy, and responsible Company;*
- *The white symbolizes the sanctity of the trust that the Company carries in contributing to build the nation's prosperity across generations*
- *The red reflects the resilience, firmness, and courage of the Company in the face of various challenges*
- *The green reflects the management of water resources that are environmentally sound.*



PANDUAN WARNA

Color Guide



Biru Muda / Light Blue

R=0, G=157, B=224
C=78, M=23, Y=0, K=0



Hijau / Green

R=153, G=204, B=51
C=47, M=0, Y=100, K=0



Abu-abu / Grey

R=102, G=102, B=102
C=62, M=53, Y=53, K=25



Navy

R=0, G=74, B=169
C=100, M=83, Y=5, K=0



Merah / Red

R=255, G=0, B=0
C=0, M=100, Y=100, K=0

LOGOGRAM



Perum Jasa Tirta II

Struktur logo terdiri dari logo gram (bentuk tetesan air) maupun *logotype* (Perum Jasa Tirta II) dan *tagline* (Air untuk Menghidupi Negeri).

The logo structure consists of logogram (water droplets), logotype (Perum Jasa Tirta II), and tagline (Water for Wellness).

Logotype Perum Jasa Tirta II, font Diavlo Black.otf dan Tagline Air untuk Menghidupi Negeri, font Amperzand.

Logotype Perum Jasa Tirta II, font: Diavlo Black.otf Tagline Air untuk menghidupi negeri, font: Amperzand

TUJUAN PERUSAHAAN

Company's Objectives

Maksud dan tujuan Perusahaan adalah turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan Nasional pada umumnya, terutama di bidang Pengusahaan dan Pengelolaan Sumber Daya Air, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa berdasarkan prinsip pengelolaan Perusahaan yang sehat.

The purpose and objective of the Company is to participate in implementing and supporting Government policies and programs in the field of national economy and development in general, particularly in the field of Water Resources Enterprise and Management, as well as optimizing the use of Company resources to produce goods and services based on sound corporate management principles.

BIDANG USAHA PERUSAHAAN *Company's Line of Business*

Bidang dan Kegiatan Usaha

Profile Perum Jasa Tirta II sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II.

Penguasaan SDA / *Natural Resources Control*

Penyediaan Air Baku, Air Bersih, PLTA dan PLTMH, Pengembangan SPAM, Hotel & Pariwisata, Laboratorium, Sewa Lahan. / *Raw Water Supply, Clean Water, Hydropower and MHP, SPAM Development, Hotel & Tourism, Laboratory, Land Lease.*

5 Wilayah Sungai / *5 River Areas*

Wilayah Sungai Citarum sebagai wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane, Cimanuk-Cisanggarung, Ciujung-Cidurian, Way Sekampung-Way Seputih. / *Citarums River Basin as Ciliwung-Cisadane, Cimanuk-Cisanggarung, Ciujung-Cidurian, Way Sekampung-Way Seputih River Basins.*



Pengelolaan SDA / *Natural Resources Control*

Penyediaan Air Irigasi, Pelayanan & Penjaminan Ketersediaan Air, Konservasi, Pelaksanaan OP Prasarana SDA, Pengendalian Banjir. / *Irrigation Water Supply, Services & Water Availability Assurance, Conservation, Implementation of Natural Resources Infrastructure OP, Flood Control.*

Wilayah Kerja / *5 River Areas*

Prov. DKI Jakarta, Prop. Jawa barat meliputi: Kab/kota Bandung, Kab. Indramayu, Kab. Subang, Kab. Purwakarta, Kab. Karawang, Kab/ Kota Bekasi, Kab/Kota Bogor, Kab. Sumedang, Kab. Cirebon, Prop. Banten dan Prop. Lampung. / *Prov. DKI Jakarta, Prop. West Java includes: Bandung district, Indramayu district, Subang district, Purwakarta district, Karawang district, Bekasi district, Bogor district, Sumedang district, Cirebon district, Banten province and Banten province. Banten and Prop. Lampung.*

Kegiatan Usaha

Dalam melaksanakan maksud dan tujuan Perusahaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2022, Perusahaan melakukan kegiatan usaha utama dan dapat melakukan kegiatan usaha berupa:

- Pelayanan air baku untuk air minum, industri, pertanian, penggelontoran, pelabuhan, pembangkit tenaga listrik dan pemenuhan kebutuhan air lainnya;

Business Fields and Activities

Profile of Perum Jasa Tirta II in accordance with Government Regulation (PP) No. 25 Year 2022 on Public Company (Perum) Jasa Tirta II.

Pengelolaan SDA / *Natural Resources Control*

Penyediaan Air Irigasi, Pelayanan & Penjaminan Ketersediaan Air, Konservasi, Pelaksanaan OP Prasarana SDA, Pengendalian Banjir. / *Irrigation Water Supply, Services & Water Availability Assurance, Conservation, Implementation of Natural Resources Infrastructure OP, Flood Control.*

Wilayah Kerja / *5 River Areas*

Prov. DKI Jakarta, Prop. Jawa barat meliputi: Kab/kota Bandung, Kab. Indramayu, Kab. Subang, Kab. Purwakarta, Kab. Karawang, Kab/ Kota Bekasi, Kab/Kota Bogor, Kab. Sumedang, Kab. Cirebon, Prop. Banten dan Prop. Lampung. / *Prov. DKI Jakarta, Prop. West Java includes: Bandung district, Indramayu district, Subang district, Purwakarta district, Karawang district, Bekasi district, Bogor district, Sumedang district, Cirebon district, Banten province and Banten province. Banten and Prop. Lampung.*

Business Activities

In carrying out the purposes and objectives of the Company in accordance with Government Regulation No. 25 of 2022, the Company carries out the main business activities and can carry out business activities in the form of:

- Raw water services for drinking water, industry, agriculture, drainage, ports, power plants and fulfilment of other water needs;



- Penyediaan tenaga listrik kepada PT Perusahaan Listrik Negara dan/ atau selain PT Perusahaan Listrik Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Perusahaan menyelenggarakan pengembangan SPAM secara lokal dan / atau regional sampai dengan unit produksi, beserta perlengkapan dan perangkat operasionalnya bagi pemenuhan kebutuhan air minum dan / atau penyelenggara SPAM lainnya, dengan didasarkan pada rencana induk pengembangan SPAM yang ditetapkan Pemerintah Pusat dan / atau pemerintah Daerah;
- Mengembangkan pembangkit listrik melalui Energi Baru Terbarukan (EBT);
- Penyediaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dan usaha minuman dalam kemasan lainnya;
- Perikanan budi daya pada Sumber Air;
- Usaha air bersih untuk kebutuhan industri termasuk tetapi tidak terbatas pada membantu proses Produksi, seperti air untuk sistem pendingin mesin; dan
- Melakukan eksplorasi, eksploitasi, dan pemurnian bahan tambang dari Sumber Air;
- Melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki Perusahaan.

Produk Dan Jasa

Pembangkitan dan Penyaluran Tenaga Listrik

Perum Jasa Tirta II mengelola Pembangkit Listrik Tenaga Air Ir. H. Djuanda di Jatiluhur. Hingga saat ini, daya terpasang pada PLTA Ir. H. Djuanda telah meningkat menjadi 187,5 MW. Produksi listrik rata-rata dalam setahun adalah sebesar 830 juta kWh yang sebagian digunakan untuk pemakaian sendiri dan penugasan Pemerintah, sedangkan selebihnya dipasok ke PT PLN (Persero) melalui jaringan tegangan 150 kV dan 70 kV.

Penyediaan Air Baku

Sebagai pengelola bendungan Ir. H. Djuanda, Perum Jasa Tirta II bertugas mendistribusikan air baku, di mana saat ini memiliki kapasitas produksi hingga 1 miliar meter kubik per tahun yang disalurkan ke 15 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di wilayah DKI Jakarta, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Indramayu, Bogor, dan Bandung. Selain itu juga disalurkan ke sejumlah industri yang ada di wilayah Bekasi, Karawang, Purwakarta, dan Bandung.

- *Provision of electricity to PT Perusahaan Listrik Negara and/or other than PT Perusahaan Listrik Negara in accordance with the provisions of laws and regulations;*
- *The company organises the development of SPAM locally and / or regionally up to the production unit, along with its operational equipment and devices for the fulfilment of drinking water needs and / or other SPAM providers, based on the SPAM development master plan stipulated by the Central Government and / or Regional government;*
- *Developing power plants through New Renewable Energy (EBT);*
- *Provision of Bottled Drinking Water (AMDK) and other bottled beverage businesses;*
- *Aquaculture fisheries on Water Sources;*
- *Clean water business for industrial needs including but not limited to assisting the Production process, such as water for engine cooling systems; and*
- *Conducting exploration, exploitation, and refining of mining materials from Water Sources;*
- *Conducting business activities in order to optimise the benefits of the potential resources owned by the Company.*

Products and Services

Electricity Generation and Distribution

Perum Jasa Tirta II manages the Ir. H. Djuanda Hydroelectric Power Plant in Jatiluhur. To date, the installed power of the Ir. H. Djuanda Hydropower Plant has increased to 187.5 MW. The average electricity production in a year is 830 million kWh which is partly used for own use and Government assignments, while the rest is supplied to PT PLN (Persero) through the 150 kV and 70 kV voltage networks.

Raw Water Supply

As the manager of the Ir. H. Djuanda dam, Perum Jasa Tirta II is in charge of distributing raw water, which currently has a production capacity of up to 1 billion cubic metres per year which is distributed to 15 Regional Drinking Water Companies (PDAMs) in the DKI Jakarta, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Indramayu, Bogor and Bandung areas. It is also distributed to a number of industries in Bekasi, Karawang, Purwakarta, and Bandung.



Kepariwisataaan

Untuk memanfaatkan potensi wisata, Perum Jasa Tirta II telah membangun berbagai fasilitas seperti hotel, resort, bungalow, restoran, dan wahana rekreasi air. Fasilitas pariwisata di kawasan Bendungan Ir. H. Djuanda Jatiluhur telah dilengkapi bangunan hotel bintang tiga dengan nama Jatiluhur Valley and Resort yang beroperasi sejak 1967.

Di kawasan hotel ini, terdapat 33 bungalow dengan 30 kamar Hotel, dan 7 ruang pertemuan yang 5 diantaranya berada di Gedung Graha Vidya (terdiri dari 1 ruang pertemuan utama berkapasitas maksimum 60 orang), serta 2 ruang pertemuan terpisah berada di kawasan Restoran Istora dengan kapasitas masing-masing 80 orang. Kawasan pariwisata dilengkapi juga dengan fasilitas kolam renang dan rekreasi air berupa waterboom dengan nama Jatiluhur Water World (JWW), kapal pesiar, ski air boating, dan lain sebagainya.

Pemanfaatan Lahan

Sebagai upaya optimalisasi dan pengamanan aset Perusahaan, Perum Jasa Tirta II melakukan pemanfaatan lahan yang berupa lahan pertanian dan non pertanian seluas 689,18 ha melalui sistem sewa dan kerja sama usaha dengan berbagai instansi baik BUMN (Badan Usaha Milik Negara) atau swasta.

Jasa Laboratorium Kualitas Air

Perum Jasa Tirta II (PJT II) juga menyediakan Jasa Pelayanan Laboratorium untuk pengujian kualitas air yang merupakan salah satu laboratorium rujukan "Komite Akreditasi Nasional" Jawa Barat. Beberapa perusahaan besar industri makanan dan minuman di Indonesia seperti ABC dan Indofood telah menggunakan jasa laboratorium milik PJT II. Kemudian Rumah Sakit, perhotelan, dan pabrik tekstil dan kertas berskala besar juga telah menggunakan jasa pelayanan laboratorium milik PJT II selama ini.

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Sepanjang tahun 2020, Perusahaan telah menyusun rencana strategis, di antaranya adalah diversifikasi usaha dengan berinvestasi di bidang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). PJT II menjalankan proyek SPAM Regional Jatiluhur I serta pengembangan SPAM Non Regional yang akan memperkuat posisi PDAM.

Tourism

To utilise the tourism potential, Perum Jasa Tirta II has built various facilities such as hotels, resorts, bungalows, restaurants, and water recreation rides. Tourism facilities in the Ir. H. Djuanda Jatiluhur Dam area have been equipped with a three-star hotel building with the name Jatiluhur Valley and Resort which has been operating since 1967.

In this hotel area, there are 33 bungalows with 30 hotel rooms, and 7 meeting rooms, 5 of which are located in the Graha Vidya Building (consisting of 1 main meeting room with a maximum capacity of 60 people), and 2 separate meeting rooms located in the Istora Restaurant area with a capacity of 80 people each. The tourism area is also equipped with swimming pool and water recreation facilities in the form of a waterboom under the name Jatiluhur Water World (JWW), cruise ships, water ski boating, and so on.

Land Utilisation

As an effort to optimise and safeguard the Company's assets, Perum Jasa Tirta II utilises land in the form of agricultural and non-agricultural land covering an area of 689.18 ha through a lease system and business cooperation with various agencies, both State-Owned Enterprises (BUMN) or private.

Water Quality Laboratory Services

Perum Jasa Tirta II (PJT II) also provides Laboratory Services for water quality testing which is one of the reference laboratories of the West Java "National Accreditation Committee". Several large food and beverage industry companies in Indonesia such as ABC and Indofood have used PJT II's laboratory services. Hospitals, hotels, and large-scale textile and paper factories have also used PJT II's laboratory services over the years.

Development of Drinking Water Supply System

Throughout 2020, the Company has developed strategic plans, including business diversification by investing in the Drinking Water Supply System (SPAM). PJT II is running the Jatiluhur I Regional SPAM project as well as the development of Non-Regional SPAM which will strengthen the position of PDAM.



Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)

Seiring peningkatan kebutuhan akan air minum, Perum Jasa Tirta II berkomitmen untuk menyediakan air minum bagi masyarakat yang berada di daerah pelayanan Perusahaan. Komitmen ini diwujudkan dalam penyediaan air baku untuk air minum dan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dengan merek "Jatiluhur Demineral". AMDK Jatiluhur termasuk air minum Demineral dengan pH antara 5 -7,5 dan TDS di bawah 10 mg/liter. AMDK Jatiluhur diproses dengan sistem Reverse Osmosis (RO), disterilisasi dengan ozon (O3) dan ultraviolet. Target pasar Air Demineral Jatiluhur antara lain karyawan Perusahaan dan keluarganya, masyarakat yang berada di wilayah kerja Perusahaan serta mitra/stakeholders Perusahaan. Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) "Jatiluhur Demineral" di produksi dengan beberapa variant kemasan, sebagai berikut:

Bottled Drinking Water (AMDK)

Along with the increasing need for drinking water, Perum Jasa Tirta II is committed to providing drinking water for people in the Company's service area. This commitment is realised in the provision of raw water for drinking water and Bottled Drinking Water (AMDK) under the brand "Jatiluhur Demineral". Jatiluhur AMDK includes Demineral drinking water with pH between 5 -7.5 and TDS below 10 mg/litre. Jatiluhur Demineral Water is processed with Reverse Osmosis (RO) system, sterilised with ozone (O3) and ultraviolet. The target market of Jatiluhur Demineralised Water includes the Company's employees and their families, the community in the Company's working area and the Company's partners/stakeholders. Bottled Drinking Water (AMDK) "Jatiluhur Demineral" is produced with several variants of packaging, as follows:

KEMASAN DAN ISI BERSIH Packaging And Net Contents	NO PENDAFTARAN PANGAN Number Food Registration	SERTIFIKAT HALAL Halal Certificate	SERTIFIKAT SNI SNI Certificate	KAPASITAS PRODUKSI Production Capacity
Gelas Plastik (240 ml)	BPOM RI MD 265228001325	No. 01121081261212	01-3553-2006 Nomor 597/LSIPB/ SNIPr/2015SNI ISO 9001:2008	6.500
Botol Plastik (330 ml)				Gelas/jam
Botol Plastik (600 ml)	BPOM RI MD 265228003325			1.500 Botol/ jam
Galun Plastik (19 Ltr)	BPOM RI MD 256228002325			1.200 Botol/jam
				200 Galon/ jam



Selain itu, pada sistem pengairan milik Perusahaan juga terdapat banyak bangunan terjunan dengan potensi minihidro yang banyak menghasilkan listrik mulai dari 50 kVa hingga 5.000 kVa.

Penyediaan Air Baku

Sebagai pengelola bendungan Ir. H. Djuanda, Perum Jasa Tirta II bertugas mendistribusikan air baku, di mana saat ini memiliki kapasitas produksi hingga 1 miliar meter kubik per tahun yang disalurkan ke 15 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di wilayah DKI Jakarta, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Indramayu, Bogor, dan Bandung. Selain itu juga disalurkan ke sejumlah industri yang ada di wilayah Bekasi, Karawang, Purwakarta, dan Bandung.

Kepariwisataaan

Keberadaan bendungan Ir. H. Djuanda Jatiluhur dengan pemandangan alam yang indah dipadukan dengan kemegahan bendungan merupakan daya tarik tersendiri bagi para wisatawan dan menjadi salah satu tujuan Pariwisata di Jawa Barat. Demi memanfaatkan potensi wisata di kawasan ini, Perum Jasa Tirta II telah membangun berbagai fasilitas seperti hotel, resort, bungalow, restoran, dan wahana rekreasi air.

In addition, there are numerous spillway constructions with minihidro potential on the Company's irrigation systems that can generate electricity ranging from 50 kVA to 5,000 kVA.

Raw Water Supply

As the manager of Ir. H. Djuanda dam, Perum Jasa Tirta II is in charge of distributing raw water, which currently has the production capacity of up to 1 billion cubic meters per year which is distributed to 15 Municipal Water Companies (PDAM) in Jakarta, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Indramayu, Bogor and Bandung. It is also channeled to a number of industries in the region of Bekasi, Karawang, Purwakarta, and Bandung.

Tourism

The existence of Ir. H. Djuanda Jatiluhur dam with its beautiful scenery, combined with the splendor of the dam building is a special attraction for tourists and become one of the destinations of tourism in West Java. In order to take advantage of tourism potential in this area, Perum Jasa Tirta II has built various facilities such as hotels, resorts, bungalows, restaurants, and water recreation rides.



Fasilitas pariwisata di kawasan Bendungan Ir. H. Djuanda Jatiluhur telah dilengkapi bangunan hotel bintang tiga dengan nama Jatiluhur Hotel Resort yang beroperasi sejak 1967. Di kawasan hotel ini, terdapat 33 bungalow dengan 30 kamar Hotel, dan 7 ruang pertemuan yang 5 di antaranya berada di Gedung Graha Vidya (terdiri dari 1 ruang pertemuan utama berkapasitas maksimum 60 orang), serta 2 ruang pertemuan terpisah berada di kawasan Restoran Istora dengan kapasitas masing-masing 80 orang. Kawasan pariwisata dilengkapi juga dengan fasilitas kolam renang dan rekreasi air berupa waterboom dengan nama Jatiluhur Water World (JWW), kapal pesiar, ski air boating, dan lain sebagainya.

Pemanfaatan Lahan

Sebagai upaya optimalisasi dan pengamanan aset Perusahaan, Perum Jasa Tirta II melakukan pemanfaatan lahan yang berupa lahan pertanian dan non pertanian seluas 689,18 ha melalui sistem sewa dan kerja sama usaha dengan berbagai instansi baik BUMN (Badan Usaha Milik Negara) atau swasta, seperti PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PDAM Kabupaten/Kota, dan industri serta masyarakat perorangan yang melakukan sewa lahan untuk pertanian.

Tourism facilities in the area of Ir.H.Danda Jatiluhur Dam has been equipped with three-star hotel building under Jatiluhur Hotel Resort which operated since 1967. There are 33 bungalows with 30 hotel rooms in the area of this hotel. Also, seven meeting rooms, five of which are located in Graha Vidya Building (consisting of one main meeting room with the capacity of 800 people, and 4 meeting rooms with a maximum capacity of 60 people), and 2 separate meeting rooms located in the Istora Restaurant with the capacity of 80 people, each. The tourism area is also equipped with a swimming pool and water recreation facilities such as waterboom Jatiluhur Water World (JWW), cruises, water ski boating, and so forth.

Land Utilization

As an effort to optimize and safeguard the Company's assets, Perum Jasa Tirta II utilizes land in the form of agricultural and non-agricultural land covering 689.18 ha through leasing system and business cooperation with various agencies, either state-owned (SOE) or private sector such as PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), Regency/Municipal Water Company, industry, and individual communities that rent land for agriculture.



Jasa Laboratorium Kualitas Air

Perum Jasa Tirta II (PJT II) juga menyediakan Jasa Pelayanan Laboratorium untuk pengujian kualitas air yang merupakan salah satu laboratorium rujukan “Komite Akreditasi Nasional” Jawa Barat. Beberapa perusahaan besar industri makanan dan minuman di Indonesia seperti ABC dan Indofood telah menggunakan jasa laboratorium milik PJT II. Kemudian Rumah Sakit besar, perhotelan, dan apartemen hingga pabrik tekstil dan kertas berskala besar juga telah menggunakan jasa pelayanan laboratorium milik PJT II selama ini.

Water Quality Laboratory Services

Perum Jasa Tirta II (PJT II) also provides Laboratory Services for water quality testing, which is one of the reference laboratories for West Java's National Accreditation Committee. Some major food and beverage industries in Indonesia, such as ABC and Indofood, have used this laboratory service owned by PJT II. Then large hospitals, hotels and apartments, to large-scale textile and paper factories have also used the services owned by PJT II to date.



Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Sepanjang tahun 2022 Perusahaan telah menyusun rencana strategis, di antaranya adalah pengembangan usaha Sumber Daya Air (SDA) dengan berinvestasi di bidang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). PJT II mendukung pengembangan proyek-proyek SPAM untuk mendukung kecukupan penyediaan kebutuhan air bersih bagi masyarakat dengan bekerjasama dengan stakeholder terkait.

Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)

Seiring peningkatan kebutuhan akan air minum, Perum Jasa Tirta II berkomitmen untuk menyediakan air minum bagi masyarakat yang berada di daerah pelayanan Perusahaan. Komitmen ini diwujudkan dalam penyediaan air baku untuk air minum dan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dengan merek "Jatiluhur Air Demineral" dengan keterangan sebagai berikut:

KEMASAN DAN ISI BERSIH / Packaging And Net Content	NOMOR PENDAFTARAN PANGAN Food Registration Number	SERTIFIKAT HALAL Halal Certification	SERTIFIKAT SNI SNI Certification	KAPASITAS PRODUKSI Production Capacity
Gelas Plastik 240 ml <i>Plastic Glass 240 ml</i>	BPOM RI MD 265228001325	No. 01121081261212	01-3553-2006 nomor 597/LSIPB /SNIPr/2015 SNI ISO 9001:2008	6.500 gelas/jam cup/hour
Botol Plastik 330 ml <i>Plastic Bottle 330 ml</i>	BPOM RI MD 265228003325	No. 01121081261212	01-3553-2006 nomor 597/LSIPB /SNIPr/2015 SNI ISO 9001:2008	1.500 botol/jam bottle/hour
Botol Plastik 600 ml <i>Plastic Bottle 600 ml</i>	BPOM RI MD 256228002325	No. 01121081261212	01-3553-2006 nomor 597/LSIPB /SNIPr/2015 SNI ISO 9001:2008	1.200 botol/jam bottle/hour
Galon Plastik <i>Plastic Gallon</i>	BPOM RI MD 256228002325	No. 01121081261212	01-3553-2006 nomor 597/LSIPB /SNIPr/2015 SNI ISO 9001:2008	200 galon/jam gallon/hour

AMDK Jatiluhur termasuk air minum Demineral dengan PH antara 5 -7,5 dan TDS di bawah 10 mg/liter. AMDK Jatiluhur diproses dengan sistem Reverse Osmosis (RO), disterilisasi dengan ozon (O₃) dan ultraviolet serta diproses lagi dengan Biomagnetic serta Far Infrared untuk mengubah ke molekul Hexagonal. Air Hexagonal adalah air dengan rangkaian molekul Hexagonal 6 (H₂O) yang identik dengan molekul cairan dalam sel tubuh manusia sehingga lebih mudah diserap sel-sel tubuh dan nutrisi serta oksigen akan lebih mudah terangkut. Target pasar Air Demineral Jatiluhur antara lain karyawan Perusahaan dan keluarganya, masyarakat yang berada di wilayah kerja Perusahaan serta mitra/stakeholders Perusahaan.

Development of Drinking Water Supply System

In 2022, the company has developed strategic plan, among them is the development of the Water Resources (SDA) business by investing in the Drinking Water Supply System (SPAM). PJT II supports the development of SPAM projects to support the adequacy of providing clean water for the community in collaboration with relevant stakeholders.

Bottled Drinking Water

Along with the increasing demand for drinking water, Perum Jasa Tirta II is committed to provide drinking water to communities in the Company's service areas. This commitment is realized in the provision of raw water for drinking water and Bottled Drinking Water (AMDK) under the brand "Jatiluhur Air Demineral" with the following information:

AMDK Jatiluhur is demineralized drinking water with PH between 5 - 7.5 and TDS below 10 mg/liter. AMDK Jatiluhur is processed by Reverse Osmosis (RO) system, sterilized with ozone (O₃) and ultraviolet, and processed again with Biomagnetic and Far Infrared to convert to Hexagonal molecule. Hexagonal water is water with a series of Hexagonal 6 (H₂O) molecules that are identical to fluid molecules in human body cells to be more easily absorbed to the body that drives the nutrients and oxygen to be more easily transported. Target market of Air Demineral Jatiluhur, among others, are employees of the Company and their families, communities in the Company's work area and our partners/stakeholders.

LAPORAN
MANAJEMEN
Management Report





LAPORAN DEWAN PENGAWAS

Supervisory Board Report



**Kelik Wirawan Wahyu
Widodo**

Ketua Dewan Pengawas
Chairman of Supervisory Board



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Pemilik Modal dan para pemangku kepentingan yang kami hormati,

Pertama, perkenankan kami memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan karunia-Nya dalam menghadapi tantangan pandemi Covid-19 dari Tahun 2019 sampai tahun 2022. Perum Jasa Tirta II (untuk selanjutnya disebut "Perusahaan" atau PJT II) dapat menjawab tantangan yang dihadapi dengan terus merangkul perubahan, membangun daya tahan untuk menyongsong tantangan ke depan.

Uraian mengenai kinerja keuangan ini disusun berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & rekan dengan opini wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perum Jasa Tirta II dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2022 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Pada tahun 2022, Aset Perusahaan tercatat sebesar Rp1.913.416 juta, meningkat Rp223.662 juta atau 13,24% bila dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp1.689.754 juta. Liabilitas Perusahaan tercatat sebesar Rp530.691 juta, meningkat Rp122.144 juta atau 29,90% dari sebelumnya sebesar Rp408.547 juta pada tahun 2021. Ekuitas Perusahaan tercatat sebesar Rp1.382.726 juta, meningkat Rp101.519 juta atau 7,92% bila dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp1.281.207 juta.

Laporan Tugas pengawasan periode Januari - Desember 2022 merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat terhadap jalannya perusahaan, sekaligus perwujudan GCG. Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dan pemberian nasihat, Dewan Pengawas berpedoman kepada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta didukung penuh oleh Komite Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas. Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II berupaya menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat secara lebih efektif dan efisien.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Our respected Capital Owners and stakeholders, Firstly, please allow us to offer praise and gratitude to the Almighty God for His abundance of grace in facing the challenges of the Covid-19 pandemic from 2019 to 2022. Perum Jasa Tirta II (hereinafter referred to as "the Company" or PJT II) can answer the challenges faced by continuing to embrace change, building resilience to meet the challenges ahead.

This description of financial performance is prepared based on the Company's Consolidated Financial Statements which have been audited by Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & partners with a fair opinion in all material respects, the consolidated financial position of Perum Jasa Tirta II and its subsidiaries as of 31 December 2022 and its consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

In 2022, the Company's assets were recorded at Rp1,913,416 million, an increase of Rp223,662 million or 13.24% when compared to 2021 of Rp1,689,754 million. The Company's liabilities were recorded at IDR530,691 million, an increase of IDR122,144 million or 29.90% from the previous IDR408,547 million in 2021. The Company's equity was recorded at Rp1,382,726 million, an increase of Rp101,519 million or 7.92% when compared to the realisation in 2021 of Rp1,281,207 million.

The Supervisory Task Report for the period January - December 2022 is a form of accountability of the Supervisory Board of Perum Jasa Tirta II in carrying out its supervisory and advisory duties on the running of the company, as well as a manifestation of GCG. In carrying out supervisory and advisory activities, the Supervisory Board is guided by the provisions of the applicable laws and regulations and is fully supported by the Supervisory Board Committee and the Secretary of the Supervisory Board. The Supervisory Board of Perum Jasa Tirta II endeavours to perform its supervisory and advisory duties more effectively and efficiently.

Dewan Pengawas berupaya aktif dalam membantu Direksi untuk menyelesaikan setiap masalah yang terjadi di perusahaan. Beberapa permasalahan yang menurut Dewan Pengawas strategis selama bulan Januari 2022 - Desember 2022 yang dapat dilaporkan antara lain: Tindak Lanjut Rekomendasi BPK yang berpengaruh pada pendapatan BJPSDA, Antisipasi perusahaan dalam menghadapi pandemi Covid-19, Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kelola dan *monitoring* berkala pencapaian realisasi investasi.

Perkembangan tindaklanjut permasalahan strategis dibahas secara intensif dalam kesempatan rapat Dewan Pengawas dan rapat gabungan Dewan Pengawas dan Direksi. Dewan Pengawas memberikan saran/masukan kepada Direksi guna percepatan penyelesaian permasalahan strategis dimaksud.

Berbagai keberhasilan kinerja yang telah dicapai kiranya dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang, sementara itu, untuk program yang capaian kinerjanya belum mencapai target, Dewan Pengawas akan mendorong dalam peningkatannya. Ke depan, Dewan Pengawas akan terus berusaha melakukan perbaikan dan peningkatan dalam pelaksanaan tugas pengawasan perusahaan.

Pengawasan Terhadap Implementasi Strategi

Sepanjang tahun 2022, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas tercermin dari sejumlah program kerja yang direalisasikan, di antaranya kunjungan kerja untuk melihat proses operasi secara langsung, meninjau kesesuaian prosedur yang diterapkan, dan menyelaraskan proses kerja dengan prinsip-prinsip GCG. Dewan Pengawas berupaya mengawasi dan meninjau seluruh langkah strategi yang diambil Direksi dengan memberikan arahan atau rekomendasi yang disampaikan melalui mekanisme rapat gabungan maupun penerbitan surat/tanggapan baik kepada Direksi maupun Pemilik Modal. Pelaksanaan rapat Dewan Pengawas secara rutin dilaksanakan setiap bulannya, baik rapat internal maupun gabungan. Agenda rapat Dewan Pengawas membahas hal-hal yang bersifat rutin yang meliputi pelaksanaan dan evaluasi kegiatan Dewan Pengawas beserta Organ serta melakukan reviu kinerja berkala perseroan (baik operasional produksi maupun keuangan) dan permasalahan yang perlu mendapat klarifikasi dari manajemen serta membahas hal-hal yang memerlukan persetujuan Dewan Pengawas. Selama periode Tahun 2022, Dewan Pengawas telah menyelenggarakan 15 (lima belas) Rapat Internal Dewan Pengawas dan 12 (dua belas) Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Pengawas,

The Supervisory Board makes an active effort to assist the Board of Directors in resolving any problems that occur in the company. Some of the issues that the Supervisory Board considers strategic during January 2022 - December 2022 that can be reported include: Follow-up of BPK Recommendations that affect BJPSDA's revenue, the company's anticipation in facing the Covid-19 pandemic, Changes in Organizational Structure and Governance and periodic monitoring of investment realisation achievements.

The progress of follow-up on strategic issues is discussed intensively in the Supervisory Board meetings and joint meetings of the Supervisory Board and the Board of Directors. The Supervisory Board provides advice/input to the Board of Directors to accelerate the resolution of these strategic issues.

Various performance successes that have been achieved should be maintained and even improved in the coming years, while for programmes whose performance achievements have not yet reached the target, the Supervisory Board will encourage their improvement. In the future, the Supervisory Board will continue to strive to make improvements and improvements in the implementation of the company's supervisory duties.

Supervision of Strategy Implementation

Throughout 2022, the supervisory function carried out by the Supervisory Board was reflected in a number of work programs that were realised, including working visits to see the operating process firsthand, reviewing the suitability of the procedures implemented, and aligning work processes with GCG principles. The Supervisory Board endeavours to supervise and review all strategic steps taken by the Board of Directors by providing direction or recommendations delivered through the mechanism of joint meetings and the issuance of letters/responses to both the Board of Directors and the Capital Owners. Supervisory Board meetings are regularly held every month, both internal and joint meetings. The agenda of the Supervisory Board meetings discusses matters of a routine nature which include the implementation and evaluation of the activities of the Supervisory Board and its Organs as well as reviewing the company's periodic performance (both production and financial operations) and issues that need clarification from management and discussing matters that require the approval of the Supervisory Board. During the 2022 period, the Supervisory Board held 15 (fifteen) Internal Meetings of the Supervisory Board and 12 (twelve) Joint Meetings of the Board of Directors and Supervisory Board,



Dewan Pengawas telah menyelenggarakan rapat gabungan dengan Direksi sebanyak 13 kali dan menerbitkan 15 surat/tanggapan kepada Direksi dan Pemilik Modal. Rangkuman pokok-pokok arahan atau rekomendasi yang disampaikan Dewan Pengawas kepada Direksi selama tahun 2022 antara lain sebagai berikut:

1. Penguatan Sistem Pengendalian Internal, Tata Kelola Aset Dan Audit Internal
2. Penguatan Manajemen Risiko
3. Pelaksanaan Investasi

Prospek Usaha

Dewan Pengawas telah melakukan peninjauan atas rancangan target usaha yang diajukan oleh Direksi dalam Rancangan Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2022. Meninjau RKAP tersebut, Dewan Pengawas menanggapi secara positif prospek usaha yang telah disusun Direksi yang mana pada prosesnya telah disandarkan pada analisis yang komprehensif mengenai asumsi-asumsi ekonomi makro tahun 2022 dan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi kinerja Perusahaan.

Penilaian Atas Kinerja Komite Di Bawah Dewan Pengawas

Dewan Pengawas secara periodik (tahunan) melakukan penilaian atas efektivitas kinerja komite dibawah Dewan Pengawas. Sepanjang tahun 2022, komite-komite yang dibentuk oleh Dewan Pengawas tersebut telah menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawab dengan baik. Hal tersebut tercermin dari pelaksanaan seluruh rencana kerja masing-masing komite sesuai dengan yang telah ditetapkan pada awal tahun 2022.

Pelaksanaan rencana kerja komite-komite tersebut dapat dilakukan dilakukan melalui forum rapat komite dengan mengundang Direktorat, Divisi maupun Unit kerja terkait maupun secara tidak langsung dengan melakukan evaluasi terhadap laporan yang telah diterima untuk kemudian seluruhnya dilakukan penelaahan secara mendalam oleh masing-masing komite dan kemudian hasilnya disampaikan secara tertulis kepada Dewan Pengawas.

Selama tahun 2022, Komite Dewan Pengawas telah menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik dan melaksanakan rapat selama tahun 2022.

Selain itu Dewan Pengawas dan Komite telah menyusun berbagai Kebijakan dan Tata Tertib Kerja, yang selalu disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku serta tantangan yang dihadapi. Kebijakan dan Tata Tertib

The Supervisory Board held 13 joint meetings with the Board of Directors and issued 15 letters/responses to the Board of Directors and Capital Owners. A summary of the main directions or recommendations submitted by the Supervisory Board to the Board of Directors during 2022 includes the following:

- 1. Strengthening the Internal Control System, Asset Governance and Internal Audit.*
- 2. Strengthening Risk Management*
- 3. Investment Implementation*

Business Outlook

The Supervisory Board has reviewed the draft business targets proposed by the Board of Directors in the Company Budget Work Plan (RKAP) for 2022. In reviewing the RKAP, the Supervisory Board responded positively to the business outlook which in the process has been based on a comprehensive analysis of macroeconomic assumptions for 2022 and other factors affecting the Company's performance.

Assessment of the Performance of the Committees Under the Supervisory Board

The Supervisory Board periodically (annually) assesses the effectiveness of the performance of the committees under the Supervisory Board. Throughout 2022, the committees established by the Supervisory Board have performed their functions, duties and responsibilities well. This is reflected in the implementation of all work plans of each committee in accordance with those set at the beginning of 2022.

The implementation of the work plans of these committees can be carried out through the committee meeting forum by inviting the Directorate, Division and related work units or indirectly by evaluating the reports that have been received and then all of them are reviewed in depth by each committee and then the results are submitted in writing to the Supervisory Board.

During 2022, the Supervisory Board Committees have carried out their duties and responsibilities well and held meetings during 2022.

In addition, the Supervisory Board and Committees have developed various Policies and Work Rules, which are always adjusted to the applicable provisions and challenges faced. These policies and procedures are



Kerja tersebut digunakan sebagai pedoman dalam melakukan setiap tindakan dan kepastian pertanggungjawaban. Struktur dan komposisi keanggotaan Dewan Pengawas dan Komite telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dewan Pengawas memberikan apresiasi atas pencapaian program maupun rencana kerja dan berharap kinerja Komite dapat lebih ditingkatkan lagi sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih dalam menjaga Perusahaan agar lebih resilient dalam menghadapi segala tantangan dan memperoleh kinerja terbaik dalam industri di Indonesia.

Penilaian Atas Kinerja Manajemen

Penilaian Dewan Pengawas mengenai kinerja Manajemen Perusahaan Tahun 2022 terdiri dari aspek kuantitatif maupun kualitatif atas realisasi dari Rencana Kerja Tahunan yang sebelumnya telah disampaikan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas. Dewan Pengawas menilai kinerja

Perusahaan masih baik terlihat dari Perusahaan tetap dapat membukukan laba dan merealisasikan strategi inisiatif untuk mendukung pencapaian target tahun 2022 meskipun di tengah

used as guidelines in carrying out every action and ensuring accountability. The structure and composition of the Supervisory Board and Committee membership are in accordance with applicable regulations.

The Supervisory Board appreciates the achievement of the programme and work plan and hopes that the Committee's performance can be further improved so that it can contribute more in maintaining the Company to be more resilient in facing all challenges and obtain the best performance in the industry in Indonesia.

Assessment of Management Performance

The Supervisory Board's assessment of the Company's Management performance in 2022 consists of both quantitative and qualitative aspects of the realisation of the Annual Work Plan previously submitted by the Board of Directors and approved by the Supervisory Board. The Supervisory Board assesses the performance of

The Supervisory Board assesses that the Company's performance is still good as seen from the fact that the Company can still book profits and realise strategic initiatives to support the achievement of the 2022 target even in the midst of

Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Peran dan amanat dalam menjaga dan mengelola Sumber Daya Air bagi kepentingan sosial dan komersial mendorong Perum Jasa Tirta II untuk senantiasa menempatkan praktik usaha yang bertanggung jawab dan etis sebagai sebuah nilai yang harus terpelihara dengan baik. Komitmen tersebut kemudian diwujudkan melalui pengelolaan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan secara berkelanjutan dan pemeliharaan hubungan yang sinergis dan harmonis dengan pemangku kepentingan dalam integrasi program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*). Sebagai salah satu aspek prioritas, Dewan Pengawas berupaya memastikan bahwa Perusahaan menaruh komitmen dalam memerhatikan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan sebagai modal

Implementation of Corporate Social Responsibility

The role and mandate in maintaining and managing Water Resources for social and commercial interests encourages Perum Jasa Tirta II to always place responsible and ethical business practices as a value that must be well maintained. The commitment is then realised through sustainable management of social, economic and environmental impacts and the maintenance of synergistic and harmonious relationships with stakeholders in the integration of Corporate Social Responsibility programmes. As one of the priority aspects, the Supervisory Board endeavours to ensure that the Company is committed to the welfare of the community and environmental sustainability as capital.

Pengawasan Dewan Pengawas Terhadap Strategis Perusahaan

Dewan Pengawas telah menjalankan tugasnya sebagai fungsi pengawasan kepada Perusahaan antara lain dengan memberikan nasihat maupun pendapat kepada Direksi dalam menetapkan kebijakan dan

Supervisory Board's Strategic Supervision of the Company

The Supervisory Board has carried out its duties as a supervisory function to the Company, among others, by providing advice and opinions to the Board of Directors in determining policies and in carrying out



dalam melaksanakan pengurusan Perusahaan selama tahun 2022. Dewan Pengawas juga memfokuskan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan-kebijakan strategis Perusahaan, terutama pada hal-hal yang menjadi perhatian Dewan Pengawas selama tahun 2022, yaitu beberapa aspek namun tidak terbatas pada aspek perkreditan, operasional, perkembangan teknologi informasi, tata kelola terintegrasi dan budaya perusahaan.

Penerapan Good Corporate Governance (GCG)

Dewan Pengawas menyadari bahwa komitmen internal dalam mewujudkan prinsip-prinsip dan praktik terbaik Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) harus senantiasa dipelihara untuk mendukung budaya sadar GCG yang menyeluruh dan berkelanjutan. Dalam hal ini, Dewan Pengawas sebagai organ manajemen utama memegang peranan penting dalam mengawasi dan menjamin bahwa setiap aktivitas usaha telah menerapkan prinsip GCG dan kepatuhan sebagai fondasinya. Hal ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan peran dan tujuan GCG dalam menciptakan iklim bisnis yang sehat, meningkatkan daya saing, serta menghindari segala praktik kecurangan (*fraud*) yang dapat menimbulkan dampak buruk bagi reputasi Perusahaan

Dilatarbelakangi kesadaran akan pentingnya GCG dalam mendukung usaha yang berkelanjutan, Dewan Pengawas mendorong optimalisasi penerapan GCG melalui penguatan berbagai kebijakan dan manual GCG demi menjamin praktik terbaik, sistem dan prosedur yang andal, serta relevan dengan perkembangan bisnis dan regulasi Perusahaan. Perum Jasa Tirta II telah memiliki Buku Pedoman Tata Kelola Perusahaan sebagai acuan pedoman dasar bagi seluruh insan PJT II dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip Untuk menggenapkan komitmen Perum Jasa Tirta II terhadap optimalisasi penerapan GCG, Perusahaan telah membentuk road map GCG yang berperan sebagai kerangka acuan arah implementasi dan pengembangan GCG 5 tahun ke depan. Road map GCG Perum Jasa Tirta II merupakan *grand strategy* dan milestone implementasi GCG berkelanjutan dengan mengintegrasikan aspek kepatuhan, pengendalian internal, manajemen risiko, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Adapun sasaran akhir *road map* GCG adalah terciptanya tata kelola yang berkelanjutan pada seluruh proses bisnis oleh seluruh organ perusahaan.

the management of the Company during 2022. The Supervisory Board also focused its supervision on the implementation of the Company's strategic policies, especially on matters of concern to the Supervisory Board during 2022, namely several aspects but not limited to lending, operations, information technology development, integrated governance and corporate culture.

Implementation of Good Corporate Governance (GCG)

The Supervisory Board recognises that internal commitment in realising the principles and best practices of Good Corporate Governance must always be maintained to support a comprehensive and sustainable GCG-aware culture. In this regard, the Supervisory Board as the main management organ plays an important role in overseeing and ensuring that every business activity has implemented GCG principles and compliance as its foundation. This is intended to optimise the role and purpose of GCG in creating a healthy business climate, increasing competitiveness, and avoiding any fraudulent practices that may adversely affect the Company's reputation.

Motivated by the awareness of the importance of GCG in supporting sustainable business, the Supervisory Board encourages the optimisation of GCG implementation through strengthening various GCG policies and manuals to ensure best practices, reliable systems and procedures, and relevance to business developments and Company regulations. To fulfil Perum Jasa Tirta II's commitment to the optimisation of GCG implementation, the Company has established a GCG road map which acts as a reference framework for the direction of GCG implementation and development for the next 5 years. Perum Jasa Tirta II GCG road map is a grand strategy and milestone for sustainable GCG implementation by integrating aspects of compliance, internal control, risk management, and corporate social responsibility. The ultimate goal of the GCG road map is the creation of sustainable governance in all business processes by all company organs.



Strategi Anti Fraud

Perum Jasa tirta II telah mengukuhkan komitmennya untuk menegakan Integritas dan transparansi melalui Implementasi dan Sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di beberapa divisi dan unit Kerja Perum Jasa Tirta juga telah mempunyai Peraturan Direksi Perum Jasa Tirta II nomor: KBS-11 DIR/05/2022 tentang Pijakan Anti Penyuapan PJT II yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dalam mengimplementasikan dan meningkatkan keefektifan Sistem Manajemen anti Penyuapan guna mencegah, mendeteksi dan menangani penyuapan dilingkungan Perum Jasa Tirta II Pengawas sangat mendukung upaya yang dilakukan Perusahaan dalam pemberantasan KKN Khususnya terkait strategi dan manajemen anti penyuapan.

Pengendalian Gratifikasi

Perusahaan melarang pemberian dan penerimaan gratifikasi dalam bentuk apapun dan dengan siapapun sesuai undang-undang yang berlaku. Komitmen Perusahaan terhadap larangan gratifikasi terus digaungkan, antara lain dengan menerbitkan kebijakan mengenai Ketentuan Anti Penyuapan dan Pengendalian Gratifikasi yang dijadikan pedoman seluruh insan PJT II dalam mencegah terjadinya praktik gratifikasi dan penyuapan yang dapat merugikan kepentingan PJT II dan bertentangan dengan prinsip GCG sehingga tercipta lingkungan pengendalian yang kondusif sesuai dengan Keputusan bersama Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II Nomer: KBS-01/DIR/06/2021 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Lampiran VII): Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi.

Pengelolaan Whistle Blowing System (WBS)

Dewan Pengawas memandang WBS memiliki peran penting dalam mendorong pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik. Penerapan pelaporan pelanggaran WBS merupakan bagian dari upaya pencegahan terjadinya pelanggaran dan publikasi negatif terhadap Perusahaan yang berpengaruh terhadap reputasi Perusahaan yang sejalan dengan salah satu pilar pada Strategi Anti Fraud yaitu pilar deteksi sebagaimana ketentuan yang di atur oleh regulator. Dalam pelaksanaannya, Perusahaan telah memiliki sarana pelaporan pelanggaran yang bersifat independen dan rahasia serta memiliki mekanisme perlindungan pelapor.

Anti Fraud Strategy

Perum Jasa Tirta II has confirmed its commitment to uphold integrity and transparency through the implementation and certification of ISO 37001: 2016 Anti-Bribery Management System (SMAP) in several divisions and work units Perum Jasa Tirta has also had Perum Jasa Tirta II Board of Directors Regulation number: KBS- 11 DIR/05/2022 concerning PJT II Anti-Bribery Policy which aims to provide a comprehensive overview in implementing and improving the effectiveness of the Anti-Bribery Management System to prevent, detect and handle bribery within Perum Jasa Tirta II Supervisors strongly support the efforts made by the Company in the eradication of KKN, especially related to anti-bribery strategies and management.

Gratification Control

The Company prohibits the giving and receiving of gratuities in any form and with anyone in accordance with applicable laws. The Company's commitment to the prohibition of gratuities continues to be echoed, among others, by issuing a policy on Anti-Bribery Provisions and Gratuities Control which is used as a guideline for all PJT II personnel in preventing gratuities and bribery practices that can harm the interests of PJT II and conflict with GCG principles so as to create a conducive control environment in accordance with the Joint Decree of the Board of Supervisors and Directors of Public Company (Perum) Jasa Tirta II Number: KBS-01/ DIR/06/2021 on Good Corporate Governance Guidelines (Appendix VII): About Gratification Control Guidelines.

Whistle Blowing System (WBS) Management

The Supervisory Board views that the WBS has an important role in encouraging the implementation of good corporate governance. The implementation of WBS violation reporting is part of efforts to prevent violations and negative publications against the Company that affect the Company's reputation, which is in line with one of the pillars in the Anti Fraud Strategy, namely the detection pillar as regulated by the regulator. In its implementation, the Company has a means of reporting violations that is independent and confidential and has a whistleblower protection mechanism.



Pengaduan Pelanggaran

Dewan Pengawas berpendapat bahwa secara umum penerapan WBS di Perusahaan telah berjalan dengan baik. Dewan Pengawas menyarankan agar sosialisasi dan penerapan WBS dilakukan secara berkesinambungan sehingga dapat mewujudkan lingkungan kerja yang bersih, profesional dan berintegritas.

Rencana Kerja 2023

Dewan Pengawas telah memberikan tanggapan atas Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2023 yang telah disusun oleh Direksi terkait Kinerja keuangan, Kinerja Operasional, Rencana Investasi, Manajemen Resiko dan hal-hal yang harus menjadi perhatian. Untuk peningkatan efektivitas anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian manajemen serta sebagai media akuntabilitas, Dewan Pengawas menyampaikan beberapa catatan

Komposisi Dewan Pengawas

Sesuai Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Pemilik Modal Perum Jasa Tirta II Nomor: SK-4/MBU01/2020 tanggal 3 Januari 2020, SK- 092/MBU/03/2020 tanggal 23 Maret 2020, SK-340/MBU/10/2020 tanggal 21 Oktober 2020, SK-214/MBU/09/2022 tanggal 21 September 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II, maka susunan Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II adalah sebagai berikut:

1. **Kelik Wirawan Wahyu Widodo** - Ketua Dewan Pengawas
2. **Nuning Sri Rejeki Wulandari** - Anggota Dewan Pengawas
3. **Romy Marcandi** - Anggota Dewan Pengawas
4. **Fakhturohman Taufik** - Anggota Dewan Pengawas Independen

Penutup

Atas nama Dewan Pengawas, kami memberikan apresiasi kepada Direksi yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan mampu menghadapi tantangan di masa pandemi Covid-19 dengan tetap menjalankan prinsip tata kelola secara konsisten sehingga Perusahaan masih dapat terus berjalan berkesinambungan dan optimal.

Whistle Blowing System

The Supervisory Board is of the opinion that in general the implementation of WBS in the Company has been running well. The Supervisory Board recommends that the socialisation and implementation of WBS be carried out on an ongoing basis so as to create a clean, professional and integrity work environment.

Work Plan 2023

The Supervisory Board has responded to the proposed 2023 Company Work Plan and Budget (RKAP) prepared by the Board of Directors regarding financial performance, operational performance, investment plans, risk management and matters of concern. To increase the effectiveness of the budget as a management planning and control tool and as a medium of accountability, the Supervisory Board submitted several notes

Composition of the Supervisory Board

In accordance with the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as the Capital Owner of Perum Jasa Tirta II Number: SK-4/MBU01/2020 dated 3 January 2020, SK- 092/MBU/03/2020 dated 23 March 2020, SK-340/MBU/10/2020 dated 21 October 2020, SK-214/MBU/09/2022 dated 21 September 2022 concerning the dismissal and appointment of Members of the Supervisory Board of Perum Jasa Tirta II, the composition of the Supervisory Board of Perum Jasa Tirta II is as follows:

1. **Kelik Wirawan Wahyu Widodo** - Chairman of the Supervisory Board
2. **Nuning Sri Rejeki Wulandari** - Member of the Supervisory Board
3. **Romy Marcandi** - Member of the Supervisory Board
4. **Fatkhurohman Taufik** - Independent Supervisory Board Member

Cover

On behalf of the Supervisory Board, we express our appreciation to the Board of Directors for being able to carry out their duties well and being able to face challenges during the Covid-19 pandemic by consistently implementing governance principles so that the Company can still continue to run sustainably and optimally.



Dewan Pengawas menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Direksi yang telah mampu menjalankan kepengurusan Perusahaan dengan baik di tengah kondisi pandemi COVID-19.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh stakeholder atas kepercayaan dan dukungannya kepada Perusahaan. Kepada seluruh pekerja PJT II dan Perusahaan Anak kami memberikan penghargaan disertai ungkapan terima kasih atas dedikasi dan kerja keras yang telah ditunjukkan sepanjang tahun 2022 walau dalam kondisi yang sulit, seluruh pekerja memberikan seluruh daya upayanya dan menjadi tangguh demi memajukan Perusahaan agar tetap tumbuh.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

The Supervisory Board expresses its highest appreciation to the Board of Directors who have been able to carry out the management of the Company well in the midst of the COVID-19 pandemic.

Our gratitude also goes to all stakeholders for their trust and support to the Company. To all employees of PJT II and its subsidiaries, we would like to express our appreciation and gratitude for the dedication and hard work that has been shown throughout 2022. Despite the difficult conditions, all employees gave all their efforts and became resilient in order to advance the Company to continue to grow.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Jatiluhur, Juni 2023

Jatiluhur, June, 2023

Atas nama Dewan Pengawas
Supervisory Board

Kelik Wirawan Wahyu Widodo





LAPORAN DIREKSI

Board of Directors Report

Imam Santoso

Direktur Utama
President Director



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pemilik Modal dan Para Pemangku Kepentingan yang Terhormat,
Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat kerja keras seluruh jajaran Perusahaan, PJT II kembali mencatat kinerja yang menggembirakan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Pada Tahun 2022, Perum Jasa Tirta II telah genap 55 tahun telah hadir sebagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) memberikan dedikasi dan dukungan terhadap ketahanan pangan dan energi nasional.

Annual Report Perum Jasa Tirta II Tahun 2022 mengusung tema “MOVING BEYOND” - Eskalasi Kinerja Berkelanjutan dengan terus bergerak optimis, dinamis dan bersinergi dalam Pengelolaan SDA untuk dapat melampaui harapan visi dan misi serta target Perusahaan yang telah ditetapkan.

Tema tersebut dipilih mempertimbangkan kondisi dan situasi yang telah terjadi selama tahun 2022 serta masa keberlanjutan bisnis Perusahaan.

Bahwasanya seiring dengan penambahan wilayah kerja baru Perum Jasa Tirta II di Wilayah Sungai (WS) Cimanuk-Cisanggarung (Cirebon), Sebagian WS Cidanau-Ciujung-Cidurian (Prov. Banten), dan Sebagian WS Seputih-Sekampung (Prov. Lampung), Perusahaan dituntut untuk bergerak cepat, optimis, bersinergi, beradaptasi dan meningkatkan kinerja dan peluang bisnis usaha khususnya di wilayah kerja baru serta terus konsisten memberikan pelayanan yang berkualitas dalam pengelolaan, pengoperasian dan pemeliharaan SDA, serta pengusahaan SDA yang sehat.

Sepanjang 2022 perekonomian global menghadapi berbagai gejolak. Salah satu yang sangat berpengaruh yakni tingginya volatilitas harga komoditas. Gejolak harga komoditas tersebut disebabkan adanya disrupsi rantai pasok global serta kenaikan permintaan. Perang Rusia dengan Ukraina yang terjadi sejak awal tahun lalu pun terus menekan disrupsi rantai pasok, sehingga kondisi ekonomi dunia semakin tidak pasti.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dear Capital Owners and Stakeholders,
Praise be to God Almighty, thanks to the hard work of all levels of the Company, PJT II has again recorded an encouraging performance for the year ending 31 December 2022. In 2022, Perum Jasa Tirta II has been present for 55 years as a State-Owned Enterprise (BUMN) company engaged in Water Resources Management (SDA) providing dedication and support for national food and energy security.

Perum Jasa Tirta II Annual Report 2022 carries the theme “MOVING BEYOND” - Sustainable Performance Escalation by continuing to move optimistically, dynamically and synergize in Natural Resources Management to be able to exceed the expectations of the Company’s vision and mission and targets that have been set.

The theme was chosen considering the conditions and situations that have occurred during 2022 and the Company’s business sustainability period.

That along with the addition of new working areas of Perum Jasa Tirta II in the Cimanuk - Cisanggarung River Basin (Cirebon), Part of the Cidanau-Ciujung-Cidurian River Basin (Banten Province), and Part of the Seputih-Sekampung River Basin (Lampung Province), the Company is required to move quickly, optimistically, synergise, adapt and improve business performance and business opportunities, especially in new working areas and continue to consistently provide quality services in the management, operation and maintenance of natural resources, as well as healthy natural resource exploitation.

Throughout 2022 the global economy faced various turmoil. One of the most influential was the high volatility of commodity prices. The commodity price volatility was caused by global supply chain disruptions and increased demand. Russia’s war with Ukraine, which has been going on since the beginning of last year, continues to suppress supply chain disruptions, making the world economy even more uncertain.

Tidak hanya terjadi antara Rusia dan Ukraina tetapi juga antara Tiongkok dan Taiwan, kenaikan inflasi global yang memicu agresifnya kebijakan moneter, serta potensi stagflasi yaitu risiko lambatnya pertumbuhan ekonomi yang dibarengi dengan laju inflasi yang tinggi. Risiko stagflasi (bahkan menuju resesi) diperkirakan dapat terjadi pada tahun 2023 didorong oleh kenaikan suku bunga acuan secara global yang berdampak pada melemahnya konsumsi dan investasi. Peningkatan suku bunga acuan secara global dilakukan untuk memerangi tingkat inflasi yang tinggi dan cenderung meningkat.

“Saat awal terjadi perang yang menyebabkan kenaikan harga minyak, seperti *crude palm oil (CPO)* dan *sunflower oil*. Itu karena pasokan dari Ukraina tidak ada, tapi setelah itu terjadi penurunan yang sangat drastis ke 720,5 dolar AS per ton, CPO sekarang sudah naik lagi pada level 907,1 dolar AS per ton,” kata Sri menjelaskan dalam konferensi pers virtual, Selasa (3/1/2023). Gejolak harga komoditas tersebut berdampak pada inflasi global. Contohnya inflasi di Amerika Serikat yang sempat di atas delapan persen, walau sekarang sudah melandai ke level 7,1 persen.

Penyebab awal pemicu kondisi ekonomi global berawal dari pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Dampaknya, mengubah secara total dan mendasar struktur serta sifat perekonomian global dan Indonesia. Bahkan ekonomi dunia anjlok -3,1% karena adanya gangguan dari sisi permintaan dan suplai. Salah satu akibat dari pandemi COVID-19, di kawasan Asia Pasifik, kesempatan kerja turun 3,2% (yoy) atau sekitar 61.8 juta orang yang kehilangan pekerjaan. Pengangguran di negara-negara G20 juga cukup tinggi, rata-rata 8,5% di tahun 2020, lebih tinggi dari tahun sebelumnya 7,2%. Pada tahun 2021, pengangguran di negara-negara ini sekitar 7,9% dan diperkirakan menurun tahun 2022 sekitar 6,97%.

Pada tahun 2022, Aset Perusahaan tercatat sebesar Rp1.913.416 juta, meningkat Rp223.662 juta atau 13,24% bila dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp1.689.754 juta. Liabilitas Perusahaan tercatat sebesar Rp530.691 juta, meningkat Rp122.144 juta atau 29,90% dari sebelumnya sebesar Rp408.547 juta pada tahun 2021. Ekuitas Perusahaan tercatat sebesar Rp1.382.726 juta, meningkat Rp101.519 juta atau 7,92% bila dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp1.281.207 juta.

Not only between Russia and Ukraine but also between China and Taiwan, rising global inflation that triggers aggressive monetary policy, and the potential for stagflation, which is the risk of slow economic growth coupled with high inflation rates. The risk of stagflation (even leading to recession) is expected to occur in 2023, driven by the increase in global benchmark interest rates, which has an impact on weakening consumption and investment. The increase in global benchmark interest rates is done to combat the high and rising inflation rate.

“At the beginning of the war, there was an increase in the price of edible oils, such as crude palm oil (CPO) and sunflower oil. That was because there was no supply from Ukraine, but after that there was a very drastic decline to 720.5 US dollars per tonne, CPO has now risen again at the level of 907.1 US dollars per tonne,” Sri explained in a virtual press conference, Tuesday (3/1/2023). The commodity price fluctuations have an impact on global inflation. For example, inflation in the United States was above eight per cent, although now it has slipped to a level of 7.1 per cent.

The initial cause of the trigger of global economic conditions began with the COVID-19 pandemic that hit the whole world. The impact has totally and fundamentally changed the structure and nature of the global economy and Indonesia. In fact, the world economy fell by -3.1 per cent due to disruptions in the demand and supply side. One of the consequences of the COVID-19 pandemic, in the Asia Pacific region, employment opportunities fell by 3.2% (yoy) or around 61.8 million people lost their jobs. Unemployment in G20 countries is also quite high, averaging 8.5% in 2020, higher than the previous year's 7.2%. In 2021, unemployment in these countries was around 7.9% and is expected to decline in 2022 to around 6.97%.

In 2022, the Company's Assets were recorded at Rp1,913,416 million, an increase of Rp223,662 million or 13.24% when compared to 2021 of Rp1,689,754 million. The Company's liabilities were recorded at IDR530,691 million, an increase of IDR122,144 million or 29.90% from the previous IDR408,547 million in 2021. The Company's Equity was recorded at Rp1,382,726 million, an increase of Rp101,519 million or 7.92% when compared to the realisation in 2021 of Rp1,281,207 million.



Pada tahun 2022, jumlah Liabilitas Perusahaan tercatat sebesar Rp530,691 juta yang terdiri dari 43,61% Liabilitas Jangka Pendek dan 56,39% Liabilitas Jangka Panjang. Nilai Jumlah Liabilitas ini meningkat Rp122.144 juta atau 29,90% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp408.547 juta. Peningkatan Liabilitas tersebut terutama berasal dari liabilitas imbalan pasca kerja.

Pada tahun 2022, Beban Usaha Perusahaan sebesar Rp600.271 juta, meningkat Rp55.584 juta atau setara dengan 10,20% bila dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp544.687 juta. Peningkatan ini berasal dari kenaikan Air Baku, Laboratorium dan Usaha Lainnya.

Pada tahun 2022, Laba Komprehensif Tahun Berjalan sebesar Rp101.519 juta, meningkat Rp37.247 juta atau 57,95% bila dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp64.272 juta. Peningkatan ini sejalan dengan naiknya Pendapatan Usaha sebesar 14,54% atau setara dengan Rp124.529 juta dan peningkatan Penghasilan Komprehensif Lain sebesar 1,28% atau setara dengan Rp554 juta.

Prospek Usaha

Perusahaan optimis bahwa prospek usaha industri listrik dan industri air masih terjaga dengan baik hingga tahun-tahun mendatang. Optimisme ini didukung oleh proyeksi pertumbuhan ekonomi global, nasional, dan industri yang sejalan pula dengan pertumbuhan jumlah penduduk.

Sejalan dengan proyeksi pertumbuhan penduduk tiap tahunnya, maka kebutuhan akan air bersih, air minum dalam kemasan, dan air untuk pertanian cenderung meningkat sehingga mendorong terciptanya penyaluran air yang lebih besar dan luas. Data Proyeksi Penduduk Tahun 2010 - 2035 milik Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa jumlah penduduk diprediksi naik antara 3% - 7% setiap lima tahun. Dalam laporan tersebut, penduduk Indonesia pada tahun 2015 diprediksi berjumlah 256 juta jiwa, meningkat 6% hingga tahun 2020 menjadi 271 juta jiwa, meningkat 5% hingga tahun 2025 menjadi 285 juta jiwa, meningkat lagi 4% hingga tahun 2030 menjadi 296 juta jiwa, dan kembali meningkat 3% hingga akhir tahun 2035 menjadi 306 juta jiwa.

In 2022, the Company's total liabilities were recorded at IDR530,690 million consisting of 43.61% short-term liabilities and 56.39% long-term liabilities. This Total Liabilities value increased by IDR122,144 million or 29.90% compared to 2021 of IDR408,547 million. The increase in liabilities mainly came from post-employment benefit liabilities.

In 2022, the Company's Operating Expenses amounted to IDR600,271 million, an increase of IDR55,584 million or equivalent to 10.20% when compared to 2021 of IDR544,687 million. This increase came from an increase in Raw Water, Laboratory and Other Businesses.

In 2022, Comprehensive Income for the Year was IDR101,519 million, an increase of IDR37,247 million or 57.95% when compared to 2021 of IDR64,272 million. This increase is in line with the increase in Operating Income by 14.54% or equivalent to IDR124,529 million and an increase in Other Comprehensive Income by 1.28% or equivalent to IDR554 million.

Business Outlook

The Company is optimistic that the business prospects of the electricity and water industry will remain favourable in the coming years. This optimism is supported by the projected growth of the global, national, and industrial economies, which is in line with population growth.

In line with the projected population growth each year, the need for clean water, bottled drinking water, and water for agriculture tends to increase, thus encouraging the creation of larger and wider water distribution. The Central Bureau of Statistics' 2010-2035 Population Projection Data reports that the population is predicted to increase between 3% - 7% every five years. In the report, Indonesia's population in 2015 is predicted to be 256 million, increasing by 6% through 2020 to 271 million, increasing by 5% through 2025 to 285 million, increasing another 4% through 2030 to 296 million, and increasing another 3% through the end of 2035 to 306 million.



Pengembangan Organisasi

Penyesuaian dan perubahan struktur organisasi dan tata kerja Perusahaan untuk mengefektifkan proses bisnis dan meningkatkan sistem pengendalian internal. Dalam rangka Pengembangan Bisnis dan Wilayah Kerja Perusahaan, perusahaan melakukan upaya untuk mempersiapkan SDM untuk Pengembangan Wilayah dan Usaha serta Penguatan.

Program pengembangan sumber daya manusia berupa sertifikasi dan pelatihan bagi karyawan yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan tugas dan tanggung jawab yang diberikan Perusahaan.

Dalam rangka mempersiapkan talent-talent internal Perusahaan serta talent-talent BUMN, telah dilakukan *Fit And Proper Test*, sebagai upaya untuk mendapatkan talent-talent yang profesional, berintegritas, berdedikasi dan memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas pengurusan Badan Usaha Milik Negara.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Perum Jasa Tirta II memahami bahwa *Good Corporate Governance* merupakan acuan standar yang wajib diterapkan oleh BUMN sebagai landasan operasional kegiatan usaha perusahaan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dalam jangka panjang, penerapan GCG mempunyai relevansi terhadap kinerja atau *performance* suatu perusahaan karena nilai akhir (*ultimate value*) penerapan GCG adalah meningkatkan kinerja (*high performance*) serta citra perusahaan yang baik (*good corporate image*).

Aktualisasi GCG di PJT dilakukan secara menyeluruh di tingkatan dan jenjang organisasi dengan berpedoman pada ketentuan dan persyaratan terkait dengan pelaksanaan GCG bagi perusahaan. Optimalisasi penerapan GCG PJT II terus dilakukan dengan penguatan infrastruktur untuk mencapai praktik terbaik, penyesuaian sistem dan prosedur yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan GCG yang semakin efektif.

Organisational Development

Adjustments and changes to the Company's organizational structure and work procedures to streamline business processes and improve internal control systems. In order to develop the Company's business and working areas, the Company made efforts to prepare human resources for regional and business development and strengthening.

Human resource development programme in the form of certification and training for employees required to meet the demands of the duties and responsibilities given by the Company.

In order to prepare the Company's internal talents as well as the talents of SOEs, a Fit And Proper Test has been conducted, as an effort to obtain talents who are professional, have integrity, dedication and competence in carrying out the task of managing State-Owned Enterprises.

Implementation of Good Corporate Governance

Perum Jasa Tirta II understands that Good Corporate Governance is a standard reference that must be applied by SOEs as the basis for the operation of the company's business activities as stipulated in the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Regulation Number: PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in State-Owned Enterprises (SOEs).

In the long term, the implementation of GCG has relevance to the performance of a company because the ultimate value of GCG implementation is to improve performance (high performance) and a good corporate image.

The actualisation of GCG in PJT is carried out thoroughly at all levels and levels of the organization by referring to the provisions and requirements related to the implementation of GCG for the company. Optimisation of PJT II's GCG implementation continues to be carried out by strengthening the infrastructure to achieve best practices, adjusting the systems and procedures needed to support the implementation of GCG that is increasingly effective.



Dalam rangka memperoleh gambaran mengenai kondisi penerapan GCG terhadap praktik terbaik yang menjadi acuan maupun untuk mengidentifikasi bidang-bidang yang memerlukan perbaikan (*areas of improvement*) terhadap Pedoman Pelaksanaan GCG.

PJT II secara rutin melaksanakan *Assessment* terhadap penerapan GCG. Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN. Selain melakukan penilaian GCG berlandaskan kriteria tersebut, Perusahaan juga mempertimbangkan *Key Performance Indikator* (KPI) dalam menilai kualitas dan keberhasilan implementasi selama tahun buku. Adapun skor penilaian GCG pada tahun 2022 sebesar 84,98.

Direksi berpedoman pada Pedoman Kerja Dewan Pengawas dan Direksi (*Board Manual*). *Board Manual* berisi tentang petunjuk tata laksana kerja Dewan Pengawas dan Direksi serta menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten, dapat menjadi acuan bagi Dewan Pengawas dan Direksi dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai Visi dan Misi Perusahaan, sehingga diharapkan akan tercapai standar kerja yang tinggi selaras dengan prinsip-prinsip GCG. Selama tahun 2022 Direksi telah mengadakan rapat, baik Rapat Internal Direksi maupun Rapat Gabungan Dewan Pengawas dengan Direksi.

Penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Sejalan dengan visi misinya untuk meningkatkan kualitas hidup dan ekonomi masyarakat sekitar, PJT II terus berkomitmen untuk memberikan kontribusi terhadap masyarakat, di sekitar wilayah operasi perusahaan melalui pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Saat ini berupaya terus untuk membangun sistem keamanan dan menerapkan SMK3 untuk mencapai zero accident serta berusaha untuk memperhatikan aspek lingkungan dalam menjalankan setiap kegiatannya. PJT II telah dan akan terus mengupayakan pengurangan pencemaran terhadap lingkungan, dan upaya ini dilakukan pada semua kegiatan usaha baik di pelabuhan, kapal, maupun kantor.

In order to obtain an overview of the condition of GCG implementation against best practices as a reference and to identify areas that require improvement (areas of improvement) to the GCG Implementation Guidelines.

PJT II routinely carries out assessments of the implementation of GCG. Good Corporate Governance in SOEs. In addition to conducting GCG assessments based on these criteria, the Company also considers Key Performance Indicators (KPI) in assessing the quality and success of implementation during the fiscal year. The GCG assessment score in 2022 is 84.98.

The Board of Directors is guided by the Board Manual. The Board Manual contains instructions for the work procedures of the Supervisory Board and the Board of Directors and explains the stages of activities in a structured, systematic, easy to understand and can be carried out consistently, can be a reference for the Supervisory Board and the Board of Directors in carrying out their respective duties to achieve the Company's Vision and Mission, so that it is expected to achieve high work standards in line with GCG principles. During 2022, the Board of Directors held meetings, both internal meetings of the Board of Directors and joint meetings of the Supervisory Board with the Board of Directors.

Implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) In line with its vision and mission to improve the quality of life and economy of the surrounding community, PJT II continues to be committed to contributing to the community, around the company's operating area through the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) programmes.

Currently, it continues to build a safety system and implement SMK3 to achieve zero accident and strives to pay attention to environmental aspects in carrying out each of its activities. PJT II has and will continue to strive to reduce pollution to the environment, and this effort is carried out in all business activities both at the port, ship, and office.



Perubahan Komposisi Direksi

Selama tahun 2022 tidak terdapat perubahan komposisi direksi.

Apresiasi Kepada Pemangku Kepentingan

Pada kesempatan yang baik ini, mewakili Direksi, saya menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan oleh Pemilik Modal, Dewan Pengawas pemangku kepentingan dan seluruh pegawai yang telah berkontribusi terhadap pencapaian ini.

Kami juga berterima kasih kepada mitra usaha, pelanggan, serta para pemangku kepentingan lainnya atas kepercayaan yang telah diberikan selama ini. Dukungan Anda semua sangat besar artinya bagi keberhasilan PJT II dalam melanjutkan pertumbuhan dan ekspansi bisnis yang berkesinambungan di masa depan.

Changes in the Composition of the Board of Directors

During 2022 there were no changes in the composition of the board of directors.

Appreciation to Stakeholders

On this auspicious occasion, on behalf of the Board of Directors, I would like to express my gratitude for the support and trust given by the Capital Owners, the Board of Supervisors, stakeholders and all employees who have contributed to this achievement.

We would also like to thank our business partners, customers and other stakeholders for their trust over the years. Your support means a lot to PJT II's success in continuing its sustainable growth and business expansion in the future.

Jatiluhur 22 Juni 2023 /

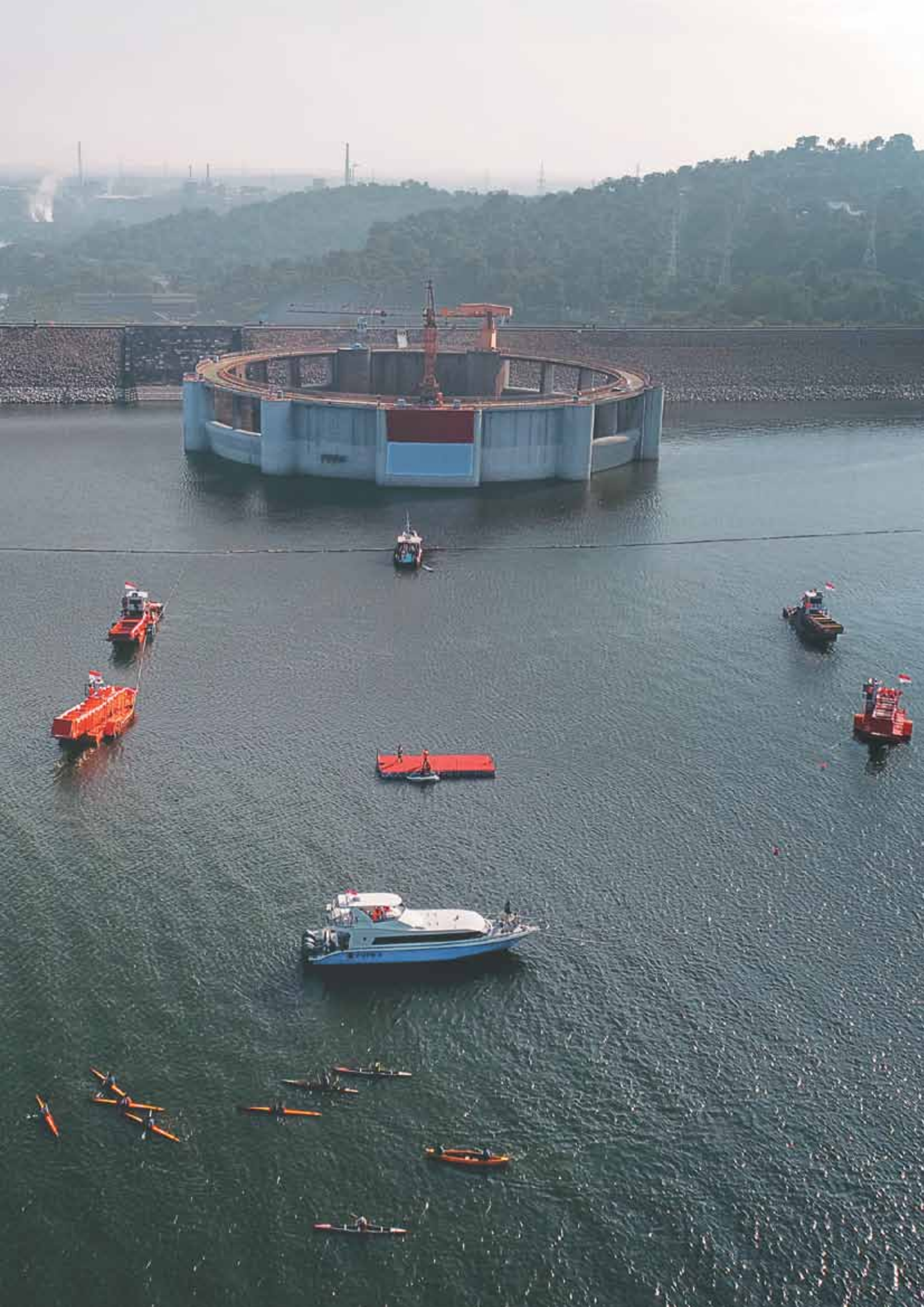
Jatiluhur 22 June 2023

Atas Nama Direksi /

For the benefit of the Board of Directors



Imam Santoso





PERNYATAAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2022 PERUM JASA TIRTA II *Responsibility Statement Of Supervisory Board And Board of Directors For 2022 Annual Report Of Perum Jasa Tirta II*

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan Perum Jasa Tirta II Tahun 2022 telah dimuat secara lengkap dan kami bertanggung jawab atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned, declare that every information contained in Perum Jasa Tirta II Annual Report 2022 has been fully disclosed and take full responsibility for the authenticity of the annual report content. This statement has been made truthfully.

Jatiluhur, 22 Juni 2023 / *Jatiluhur, June 22, 2023*

Dewan Pengawas /
Supervisory Board

Kelik Wirawan Wahyu Widodo
Ketua Dewan Pengawas /
Chairman of Supervisory Board

Dewan Pengawas /
Supervisory Board

Fatkhurohman Taufik
Anggota Dewan Pengawas Independen
Member Independent Supervisory Board

Dewan Pengawas /
Supervisory Board

Nuning Sri Rejeki Wulandari
Anggota Dewan Pengawas /
Member of Supervisory Board

Dewan Pengawas /
Supervisory Board

Romy Marcandi
Anggota Dewan Pengawas /
Member of Supervisory Board

Direksi /
Board of Directors

Imam Santoso
Direktur Utama /
President Director

Direksi /
Board of Directors

Indriani Widiastuti
Direktur Keuangan, SDM dan
Manajemen Risiko / *Director of Business
Development of Supervisory Board*

Direksi /
Board of Directors

Anton Mardiyono
Direktur Operasi dan Pemeliharaan /
*Operation and Maintenance Director of
Supervisory Board*

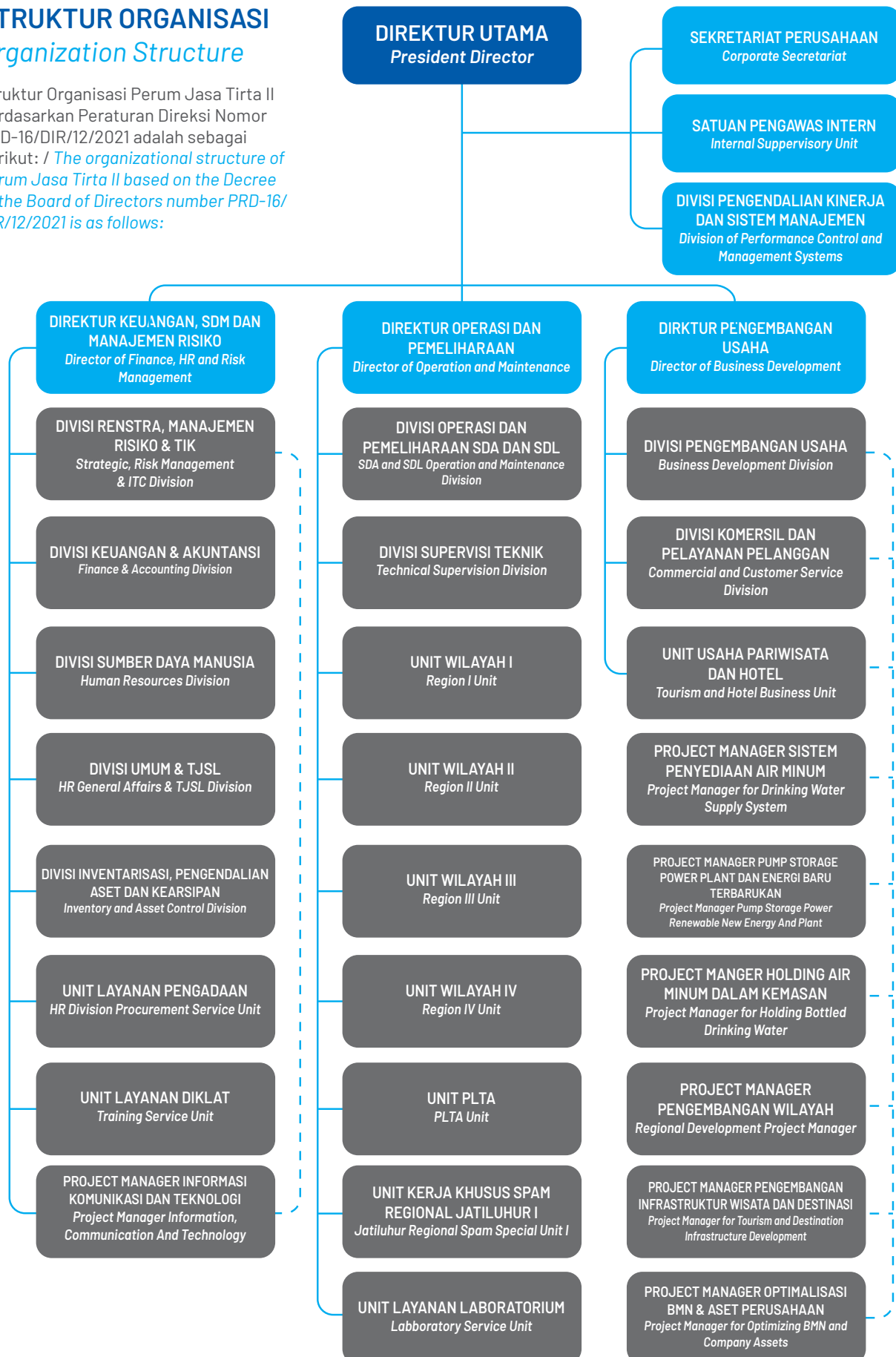
Direksi /
Board of Directors

Dikdik Permadi Yoffana
Direktur Pengembangan Usaha /
Director of Business Development



STRUKTUR ORGANISASI Organization Structure

Struktur Organisasi Perum Jasa Tirta II berdasarkan Peraturan Direksi Nomor PRD-16/DIR/12/2021 adalah sebagai berikut: / *The organizational structure of Perum Jasa Tirta II based on the Decree of the Board of Directors number PRD-16/DIR/12/2021 is as follows:*



DEWAN PENGAWAS

Board of Supervisors







KELIK WIRAWAN WAHYU WIDODO

Ketua Dewan Pengawas
Chairman of the Supervisory Board



Tempat dan Tanggal lahir / : Solo, 5 Desember 1969
Place and date of birth : *Solo, December 5, 1969*
Usia / Age : 52 Tahun / *52 Years*
Kewarganegaraan / Citizenship : Indonesia
Domisili / Domicile : Jakarta / *Jakarta*

Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment

Beliau menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II berdasarkan SK-340/MBU/10/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II Tanggal 21 Oktober 2020. / *He has served as Chairman of the Supervisory Board of Perum Jasa Tirta II based on SK-340 / MBU / 10/2020 Regarding Dismissal and Appointment of Members of the Supervisory Board of Perum Jasa Tirta II on 21 October 2020.*

Riwayat Pendidikan / Educational Background

Beliau memperoleh gelar Sarjana Fakultas Ilmu Sosial Politik (Jurusan Administrasi Negara) pada tahun 1994. / *He obtained a Bachelor's degree from the Faculty of Social and Political Sciences (Department of State Administration) in 1994.*

Riwayat Karier / Employment History

Dalam perjalanan kariernya, beliau Staf Khusus Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI (2019-Sekarang), dan Ketua Umum PP PERPANI (Persatuan Panahan Seluruh Indonesia)(2018-2019). / *In the course of his career, he is the Special Staff of the Indonesian Minister of Environment and Forestry (2019-Present), and Chairman of PP PERPANI (Indonesian Archery Association) (2018-2019).*

Rangkap Jabatan / Concurrent Position

Selain menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II, beliau menjabat Staf Khusus Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. / *In addition to serving as Chairman of the Supervisory Board of Perum Jasa Tirta II, he also serves as Special Staff to the Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia.*

Hubungan Afiliasi / Affiliation

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Pengawas lainnya, Direksi dan Pemilik Modal. / *He has no affiliation with other members of the Supervisory Board, Directors and Capital Owners.*

Pelatihan yang Diikuti / Trainings Participated

- Workshop Komisaris Profesional (PT Intipesan Pariwara – 2019)
Professional Commissioner Workshop (PT Intipesan Pariwara – 2019)
- Enterprise Risk Management (PT PP Properti Tbk – 2019)
Enterprise Risk Management (PT PP Properti Tbk – 2019)
- Corporate Social Responsibility (CSR) Workshop (PT PP Properti Tbk – 2018)
Corporate Social Responsibility (CSR) Workshop (PT PP Properti Tbk – 2018)



NUNING SRI REJEKI W

Anggota Dewan Pengawas
Member Supervisory Board



Tempat dan Tanggal lahir / : Bogor, 6 Juli 1963
Place and date of birth *Bogor, July 6, 1963*
Usia / Age : 59 tahun / 59 years
Kewarganegaraan / *Citizenship* : Indonesia
Domisili / *Domicile* : Depok, Jawa Barat / *Depok, West Java*

Dasar Pengangkatan / *Basis of Appointment*

Beliau menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II berdasarkan SK- 4/MBU/01/2020 Tanggal 3 Januari 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II. / *He serves as a Member of the Supervisory Board of Perum Jasa Tirta II based on SK- 4/MBU/01/2020 Dated 3 January 2020 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Supervisory Board of Perum Jasa Tirta II.*

Riwayat Pendidikan / *Educational Background*

Beliau memperoleh gelar sarjana dari IPB pada tahun 1987, Master dari Universitas Detroit Mercy Tahun 1994. / *She obtained a bachelor's degree from IPB in 1987, a Master from Detroit Mercy University in 1994.*

Riwayat Karier / *Employment History*

Dalam perjalanan kariernya, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Kekayaan Negara, Tenaga Pengkaji Harmonisasi, Strukturisasi, Privatisasi dan Efektivitas Kekayaan Negara pada Direktorat Jendral Kekayaan Negara. / *In the course of his career, Head of the Regional Office of the Directorate General of State Assets, Reviewers of the Harmonization, Structure, Privatization and Effectiveness of State Assets at the Directorate General of State Assets.*

Rangkap Jabatan / *Concurrent Position*

Selain menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II, beliau menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Kekayaan Negara Banten sekaligus sebagai Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Banten. / *In addition to serving as a Member of the Supervisory Board of Perum Jasa Tirta II, he serves as the Head of the Banten Regional Office of the Directorate General of State Assets as well as the Head of the Banten Province Representative of the Ministry of Finance.*

Hubungan Afiliasi / *Affiliation*

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Pengawas lainnya, Direksi dan Pemilik Modal. / *He has no affiliation with other members of the Supervisory Board, Directors and Capital Owners.*

Pelatihan yang Diikuti / *Trainings Participated*

- Diklat Perencanaan Anggaran Bagi Pejabat Eselon II (Direktorat Jendral Kekayaan Negara - 2016)
Budget Planning Training for Eclon II Officials (Directorate General of State Assets - 2016)
- Diklat Kepemimpinan Tk. II Angkatan XL Kelas A (Kementerian Keuangan - 2014)
Leadership Training Tk. II Batch XL Class A (Ministry of Finance - 2014)
- *Achieving Outstanding Performance* (Kementerian Keuangan - 2013)
Achieving Outstanding Performance (Ministry of Finance - 2013)
- *Executive Coaching* Kementerian Keuangan (Kementerian Keuangan - 2012)
Executive Coaching Ministry of Finance (Ministry of Finance - 2012)



ROMY MARCANDI

Anggota Dewan Pengawas
Member Supervisory Board



Tempat dan Tanggal lahir / : Malang, 17 Januari 1976
Place and date of birth : *Malang, January 17, 1976*
Usia / Age : 46 tahun / 45 years
Kewarganegaraan / Citizenship : Indonesia
Domisili / Domicile : Tangerang Selatan / *South Tangerang*

Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment

Beliau menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Perum JasaTirta II berdasarkan SK-92/MBU/03/2020 tanggal 23 Maret 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II. / *He serves as a Member of the Supervisory Board of Perum Jasa Tirta II based on SK-92/MBU/03/2020 dated 23 March 2020 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Supervisory Board of Perum Jasa Tirta II.*

Riwayat Pendidikan / Educational Background

Beliau memperoleh gelar Magister dari Universitas Pembangunan Nasional. / *He obtained his Master's degree from National Development University.*

Riwayat Karier / Employment History

Dalam perjalanan kariernya, beliau pernah menjabat sebagai Sekretaris Dewan Komisaris PT. Djakarta Lloyd (Persero) Tahun 2015-2017, Komisaris PT. PANN (Persero) Tahun 2017-2020, Kepala Bidang PMN, PSO dan Penerusan Pinjaman Kementerian BUMN. / *In the course of his career, he has served as Secretary of the Board of Commissioners of PT Djakarta Lloyd (Persero) in 2015-2017, Commissioner of PT PANN (Persero) in 2017-2020, Head of PMN, PSO and Loan Forwarding of the Ministry of SOEs.*

Rangkap Jabatan / Concurrent Position

Selain menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II, beliau memiliki jabatan sebagai Kepala Bidang PMN, PSO dan Penerusan Pinjaman Kementerian BUMN. / *In addition to serving as a Member of the Supervisory Board of Perum Jasa Tirta II, he has a position as Head of PMN, PSO and Loan Forwarding Division of the Ministry of SOEs.*

Hubungan Afiliasi / Affiliation

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Pengawas lainnya, Direksi dan Pemilik Modal. / *He has no affiliation with other members of the Supervisory Board, Directors and Capital Owners.*

Pelatihan yang Diikuti / Trainings Participated

- Pemeriksaan Piutang Negara (Diklat Polri-Tahun 2001) / *State Receivables Checker (Diklat Polri - Year 2001)*
- Restrukturisasi Piutang Negara (UGM-Tahun 2002) / *State Receivables Restructuring (UGM-Year 2002)*
- Asset Appraisal for Financial Restructuring&Regional Autonomy (Queensland University of Technology -Tahun 2007) / *Asset Appraisal for Financial Restructuring & Regional Autonomy (Queensland University of Technology- 2007)*
- Stenghtening Private Sector Involvement in Public Asset Creation&Management (Queensland University of Technology-Tahun 2015) / *Strengthening Private Sector Involvement in Public Asset Creation & Management (Queensland University of Technology-2015).*



FATKHUROHMAN TAUFIK

Anggota Dewan Pengawas
Independen
*Member Independent
Supervisory Board*



Tempat dan Tanggal lahir / : Trenggalek, 10 April 1980
Place and date of birth : *Trenggalek, April 10, 1980*
Usia / Age : 42 tahun / *42 years*
Kewarganegaraan / Citizenship : Indonesia
Domisili / Domicile : Surabaya, Jawa Timur / *Surabaya, East Java*

Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment

Beliau menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II berdasarkan SK-214/MBU/09/2022 tanggal 21 September 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II. / *He serves as a Member of the Supervisory Board of Perum Jasa Tirta II based on SK-214/MBU/09/2022 dated 21 September 2022 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Supervisory Board of Public Company (Perum) Jasa Tirta II.*

Profil / Profile

Beliau pernah menjadi jurnalis di Tempo media (Majalah Tempo, Koran Tempo dan Tempo.co) selama 10 tahun dan sempat menjadi wartawan di Suara Surabaya selama 5 tahun. Pengalaman pekerjaan juga pernah dilalui dengan menjadi Staf Khusus Komisaris Utama PTPN X dan PTPN III (Holding). / *He has been a journalist at Tempo media (Tempo Magazine, Tempo Newspaper and Tempo.co) for 10 years and was a journalist at Suara Surabaya for 5 years. His work experience has also been passed by being a Special Staff to the President Commissioner of PTPN X and PTPN III (Holding).*

Riwayat Karier / Employment History

- Reporter Tempo Media 2004-2014
Tempo Media Reporter 2004-2014
- Editor Suara Surabaya 2014-2018
Editor of Suara Surabaya 2014-2018
- Redpel Ngopibareng.id 2017-2021
Redpel Ngopibareng.id 2017-2021
- Staf Khusus Komisaris Utama PTPN X 2019-2020
Special Staff to the President Commissioner of PTPN X 2019-2020
- Staf Khusus Komisaris Utama PTPN III (Holding) 2020-2021
Special Staff to the President Commissioner of PTPN III (Holding) 2020-2021

DEWAN DIREKSI

Board of Directors







IMAM SANTOSO

Direktur Utama
President Director



Tempat dan Tanggal lahir / : Yogyakarta 8 Maret 1958 /
Place and date of birth : *Yogyakarta March 8, 1958*
Usia / Age : 64 tahun / *64 years*
Kewarganegaraan / Citizenship : Indonesia
Domisili / Domicile : Jakarta

Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment

Beliau menjabat sebagai Direktur Utama berdasarkan SK-350/MBU/10/2020 tanggal 27 Oktober 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II. / *He served as President Director based on SK-350/MBU/10/2020 dated 27 October 2020 regarding the Dismissal and Appointment of the President Director of Jasa Tirta II Public Company (Perum).*

Riwayat Pendidikan / Educational Background

Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Sipil UGM pada tahun 1982, Master Sains dari Institute of Irrigation And Water Resources Southampton University pada tahun 1990, dan Doktor dari Universitas Diponegoro pada tahun 2018. / *He earned a Bachelor's degree in Civil Engineering from UGM in 1982, Master of Science from the Institute of Irrigation And Water Resources Southampton University in 1990, and a Doctorate from Diponegoro University in 2018.*

Riwayat Karier / Employment History

Dalam perjalanan kariernya, beliau pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Wijaya Karya (Persero), dan Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR. / *In the course of his career, he has served as President Commissioner of PT Wijaya Karya (Persero), and Director General of Water Resources, Ministry of PUPR.*

Pelatihan yang Diikuti / Trainings Participated

- Workshop Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) secara Blended Learning (LAN & BPSDM PUPR Jakarta - 2020) / *Blended Learning Administrator Leadership Training Workshop (LAN & BPSDM PUPR Jakarta - 2020)*
- Peningkatan Kompetensi Teknis Pengajar Bidang SDA (LAN & BPSDM PUPR Jakarta - 2020) / *Technical Competence Improvement for Natural Resources Sector Teachers (LAN & BPSDM PUPR Jakarta - 2020)*
- Pelatihan Pengembangan Kapasitas Fasilitator (LAN & BPSDM PUPR Jakarta - 2020) / *Facilitator Capacity Building Training (LAN & BPSDM PUPR Jakarta - 2020)*
- Pelatihan Asesor Kompetensi Tenaga Kerja (AKTK) LPJKN Jakarta - 2018) / *Training for Labour Competency Assessors (AKTK) LPJKN Jakarta - 2018)*
- Training on Design and Construction of Dry Dam (JICA Tokyo, Jepang - 2016) / *Training on Design and Construction of Dry Dam (JICA Tokyo, Japan - 2016)*
- Integrated Water Resources Management Training And On Site Lesson (IHE-Delt, Nederland - 2010) / *Integrated Water Resources Management Training and On Site Lesson (IHE-Delt, Nederland - 2010)*



INDRIANI WIDIASTUTI

Direktur Keuangan, SDM
dan Manajemen Risiko
*Director of Finance, HR
and Risk Management*





Tempat dan Tanggal lahir / : Klaten, 13 Desember 1968
Place and date of birth : *Klaten, December 13, 1968*
Usia / Age : 53 tahun / *53 years*
Kewarganegaraan / Citizenship : Indonesia
Domisili / Domicile : Jakarta

Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment

Beliau menjabat sebagai Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko berdasarkan SK-420/MBU/12/2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II. / *He serves as Director of Finance, Human Resources and Risk Management based on SK-420/MBU/12/2021 dated 29 December 2021 concerning Dismissal, Transfer of Duties, and Appointment of Members of the Board of Directors of Public Company (Perum) Jasa Tirta II.*

Riwayat Pendidikan / Educational Background

Beliau memperoleh gelar Sarjana Sains dari UGM tahun 1993, Master Teknologi Informasi dari UI tahun 2007, dan MBA dari UGM tahun 2019. / *He obtained his Bachelor of Science degree from UGM in 1993, Master of Information Technology from UI in 2007, and MBA from UGM in 2019.*

Riwayat Karier / Employment History

Dalam perjalanan kariernya, beliau pernah menjabat Dewan Pengawas Perum Perhutani sampai dengan September 2019-Juni 2020, Asdep Konstruksi Sarana dan Prasarana Perhubungan II Kementerian BUMN, Komisaris PT Asuransi Jiwasraya. *In the course of his career, he served on the Supervisory Board of Perum Perhutani until September 2019-June 2020, Deputy Assistant for Transportation Facilities and Infrastructure Construction II Ministry of SOEs, Commissioner of PT Asuransi Jiwasraya.*

Pelatihan yang Diikuti / Trainings Participated

- *Business Model Canvas, PPM Manajemen.*
Business Model Canvas, PPM Management.
- *Certified Management Accountant (CMA) Review Course, PPA Universitas Indonesia.*
Certified Management Accountant (CMA) Review Course, PPA University of Indonesia.



ANTON MARDIYONO

Direktur Operasi
dan Pemeliharaan
*Operation and
Maintenance Director*



Tempat dan Tanggal lahir / : Semarang, 02 Maret 1975
Place and date of birth : *Semarang, March 02, 1975*
Usia / Age : 47 tahun / *47 years*
Kewarganegaraan / Citizenship : Indonesia
Domisili / Domicile : Bandung

Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment

Beliau menjabat sebagai Direktur Operasi dan Pemeliharaan Jasa Tirta II sejak 11 Juni 2020 berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK - 196/MBU/06/2020 tentang Pemberhentian Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum/Perum Jasa Tirta II. / *He has served as Director of Operations and Maintenance of Tirta II Services since June 11, 2020 based on the Decree of the Minister of SOEs No. SK - 196/MBU/06/2020 concerning Termination of Changes in Position Nomenclature and Appointment of Directors of Public Companies/Perum Jasa Tirta II.*

Riwayat Pendidikan / Educational Background

Beliau Memperoleh gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Diponegoro (1998) dan Magister WRDM di IIT Roorkee New Delhi, India (2006). / *He obtained a Bachelor of Civil Engineering degree from Diponegoro University (1998) and a Masters in WRDM at IIT Roorkee New Delhi, India (2006).*

Riwayat Karier / Employment History

Dalam perjalanan kariernya di Perum Jasa Tirta II, beliau pernah menjabat sebagai Kepala Biro Pengendalian dan Pengelolaan Data & Alokasi Air (2014), Kepala Divisi Pengelolaan Air II (2015), Kepala Divisi Rencana Strategis & Litbang (2016), General Manajer Wilayah III (2017), General Manajer Unit Usaha Wilayah I (2018), Kepala Divisi Pengembangan Usaha (2019), dan Komisaris PT Jasa Tirta Luhur (2020 sd sekarang). / *In his career at Perum Jasa Tirta II, he served as Head of Data & Water Allocation of Controlling and Management Bureau, 2014; Head of Water Manajement Division II, 2015; Head of Planning and Research & Development Bureau, 2016; General Manager of Wilayah III, 2017; General Manager of Wilayah I, 2018, Head of Business Development, 2019 and Commisioner of PT Jasa Tirta Luhur (since 2020 until now).*

Pelatihan yang Diikuti / Trainings Participated

- Peserta Twinning Program on Integrated Water Resources Management (Beasiswa NARBO-2007),
Participants of the Twinning Program on Integrated Water Resources Management (NARBO-2007 Scholarship)
- Peserta Dam Operation and Maintenance Expert Training (Beasiswa JICA-2010)
Participants of Dam Operation and Maintenance Expert Training (JICA-2010 Scholarships)
- Pembicara di Hydro International Conference and Exhibition, Italy (2014)
Speakers at the Hydro International Conference and Exhibition, Italy (2014)
- Peserta Webinar KNIBB tentang waduk dan PLTA dan Pembangunan Bendungan (2020).
Participants of the KNIBB Webinar on reservoirs and hydropower and Dam Construction (2020)



DIKDIK PERMADI YOFFANA

Direktur Pengembangan Usaha
Director of Business Development





Tempat dan Tanggal lahir / : Bandung, 18 Juni 1972
Place and date of birth : *Bandung, June 18, 1972*
Usia / Age : 49 tahun / *49 years*
Kewarganegaraan / Citizenship : Indonesia
Domisili / Domicile : Jakarta

Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment

Beliau menjabat sebagai Direktur Pengembangan Usaha Jasa Tirta II sejak 29 Desember 2021 berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-420/MBU/12/2021 tentang Pemberhentian Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum/Perum Jasa Tirta II. / *He has served as Director of Operations and Maintenance of Tirta II Services since 29 December, 2021 based on the Decree of the Minister of SOEs No. SK - 196/MBU/06/2020 concerning Termination of Changes in Position Nomenclature and Appointment of Directors of Public Companies/Perum Jasa Tirta II.*

Riwayat Pendidikan / Educational Background

Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Padjadjaran (1995) dan Master of Business Administration (MBA) dari Universitas Gadjah Mada (2019). / *He obtained his Bachelor of Economics from Universitas Padjadjaran (1995) and Master of Business Administration (MBA) from Universitas Gadjah Mada (2019).*

Riwayat Karier / Employment History

Dalam perjalanan kariernya, beliau pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT. Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero). Direktur Business Advisory & Asset Management PT. Perusahaan Pengelola Asset (Persero), Komisaris Utama PT. PPA Finance Anak Perusahaan PT. PPA (Persero). / *In the course of his career, he has served as President Director of PT Batam Island Industrial Area (Persero). Director of Business Advisory & Asset Management of PT Asset Management Company (Persero), President Commissioner of PT PPA Finance, a subsidiary of PT PPA (Persero).*

Pelatihan yang Diikuti / Trainings Participated:

Mengikuti Pendidikan dan mendapat sertifikasi dengan gelar Qualified Risk Governance Professional (QRGP) dari Lembaga Sertifikasi Profesi MKS Indonesia (2021) dan Certified in Enterprise Risk Governance (CERG) dari Enterprise Risk Management Academy (ERMA) Singapore (2021), Pelatihan Supply Chain Management Training yang diselenggarakan oleh Supply Chain Indonesia (2020), Pelatihan Pengembangan Kepemimpinan - Executing Business Strategy (2015), Pendidikan Profesi Lanjutan Penilai di bidang Pasar Modal yang diselenggarakan Masyarakat Asosiasi Profesi Penilai MAPPI (2014), dan Workshop Feasibility Study MAPPI (2014). /

Attended Education and received certification with the title of Qualified Risk Governance Professional (QRGP) from the Professional Certification Institute MKS Indonesia (2021) and Certified in Enterprise Risk Governance (CERG) from Enterprise Risk Management Academy (ERMA) Singapore (2021), Supply Chain Management Training organised by Supply Chain Indonesia (2020), Leadership Development Training - Executing Business Strategy (2015), Advanced Professional Education for Appraisers in the Capital Market sector organised by the MAPPI Appraisal Professional Association Society (2014), and MAPPI Feasibility Study Workshop (2014).



Daftar Nama Pengurus dan Organ Dewan Pengawas

List of Names of Management and Organs of the Supervisory Board

NO.	NAMA Name	JABATAN Position	KEP. MENTERI TENTANG PENGANGKATAN / Decision Of The Minister On Appointment	KETERANGAN Description
1.	KELIK WIRAWAN WAHYU WIDODO	Ketua Dewan Pengawas Chairman of the Supervisory Board	SK - 340/MBU/10/2020 21 Oktober 2020 / October 21, 2020	Sejak 21 Oktober 2020 sampai dengan sekarang / Since 21 October 2020 until now
2.	FATKHUROHMAN TAUFIK	Anggota Dewan Pengawas Independen Independent Supervisory Board Member	SK-214/MBU/09/2022 tanggal 21 September 2022 / September 21, 2022	Sejak 21 September 2022 sampai dengan sekarang / Since September 21, 2022 until now
3.	NUNING SRI REJEKI WULANDARI	Anggota Dewan Pengawas Member of the Supervisory Board	SK - 4/MBU/01/2020 3 Januari 2020 / January 3, 2020	Sejak 3 Januari 2020 sampai dengan sekarang / Since January 3, 2020 until now
4.	ROMY MARCANDI	Anggota Dewan Pengawas Member of the Supervisory Board	SK - 92/MBU/03/2020 23 Maret 2020 / March 23, 2020	Sejak 23 Maret 2020 sampai dengan sekarang / Since March 23, 2020 until now
5.	IMAM SANTOSO	Direktur Utama President Director	SK-350/MBU/10/2020 27 Oktober 2020 / October 27, 2020	Sejak 27 Oktober 2020 sampai dengan sekarang Since October 27, 2020 until now
6.	ANTON MARDIONO	Direktur Operasi dan Pemeliharaan Director of Operations and Maintenance	SK-196/MBU/06/2020 Tanggal 11 Juni 2020 / June 11, 2020	Sejak 11 Juni 2020 sampai dengan sekarang / Since June 11, 2020 until now
7.	INDRIANI WIDIASTUTI	Direktur Keuangan , Sumber Daya Manusia & Manajemen Risiko Director of Finance, Human Resources & Risk Management	SK 420/MBU/12/2021 Tanggal 29 Desember 2021 Tentang Pemberhentian Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota- anggota Direksi Perusahaan / December 29, 2021 Regarding Dismissal, Transfer of Duties and Appointment of Members of the Company's Board of Directors	Sejak tanggal 29 Desember 2021 s/d Sekarang / Since December 29, 2021 until now
8.	DIKDIK PERMADI YOFFANA	Direktur Pengembangan Usaha Director of Business Development	SK 420/MBU/12/2021 Tanggal 29 Desember 2021 Tentang Pemberhentian Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota2 Direksi Perusahaan Umum(Perum) Jasa Tirta II / December 29, 2021 Regarding the Dismissal of the Transfer of Duties and the Appointment of Members of the Board of Directors of Jasa Tirta II Public Company (Perum)	Sejak tanggal 29 Januari 2021 s/d Sekarang Since January 29, 2021 until now



PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF

Executive Officer Profile



UDIEN YULIANTO, ST., M.TECH
Sekretaris Perusahaan /
Corporate Secretary

Warga Negara Indonesia Lahir di Sidoarjo 10 Juli 1970. Memperoleh gelar sarjana pengairan dari Universitas Brawijaya, Master Teknik Pengairan dari University Of Roorkee India. / *Indonesian citizen Born in Sidoarjo July 10, 1970. Obtained a bachelor's degree in irrigation from the University of Brawijaya, Master of Water Engineering from the University of Roorkee India.*



NANDANG MUNANDAR, SE, M. AKT
Kepala Satuan Pengawasan Intern /
Head of Internal Audit Unit.

Warga Negara Indonesia, lahir di Purwakarta, 12 Februari 1972. Memperoleh gelar Sarjana dari STIE YPKP dan Magister Akuntansi dari Universitas Budi Luhur Jakarta (2010). / *Indonesian citizen, born in Purwakarta, February 12, 1972. He obtained his Bachelor's degree from STIE YPKP and Master's Degree in Accounting from Budi Luhur University, Jakarta (2010).*



ANDRIYANTO, SE., M.M
Kepala Divisi Pengendalian Kinerja dan Sistem Manajemen/
Head of the Division of Performance Control, Risk and Management Systems.

Warga Negara Indonesia, lahir di Subang, 15 Februari 1971. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen dari Universitas Pasundan, Bandung (1994) dan gelar Magister Manajemen dari Universitas Widyatama, Bandung (2017). / *Indonesian citizen, born in Subang, on February 15, 1971. He pursued his undergraduate degree in Economics majoring in Management from Pasundan University, Bandung in 1994 and a Master Management degree from Widyatama University, Bandung (2017).*



DINDIN HENDRIANA, ST
Special Expertise Tingkat I, Bidang Pemeriksaan, Satuan Pengawasan Intern / *Special Expertise Levell, Field of Examination, Internal Audit Unit*

Warga Negara Indonesia, lahir di Karawang, 19 Januari 1971. Memperoleh gelar Sarjana Teknik dari ITENAS Bandung (1997). / *Indonesian citizen, born in Karawang on January 19, 1971. Obtained a Bachelor's degree in Engineering from ITENAS (1997).*



DIREKTORAT KEUANGAN, SDM & MANAJEMEN RISIKO

Directorate of Finance, Human Resources & Risk Management



HERI HERMAWAN, SE

Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi /
Head of Finance and Accounting Division

Warga Negara Indonesia, lahir di Purwakarta, 7 April 1972. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen dari Universitas Islam Bandung (1997). / *Indonesian citizen born in Purwakarta, on April 7, 1972. He pursued his undergraduate degree in Economics majoring in Management from the Islamic University, Bandung (1997).*



EUIS RINA RISMAYANTI, SE., MM

Kepala Divisi Sumber Daya Manusia /
Head of Human Resources Division

Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung, 19 November 1972. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Unisba dan Master Manajemen dari Universitas Tama Jagakarsa. / *Indonesian citizen, born in Bandung, November 19, 1972. Obtained a Bachelor's degree in Economics from Unisba and Master Management from Tama Jagakarsa University.*



RIMPUN RAJAB HARAHAHAP, SE., MM

Kepala Divisi Renstra, Manajemen Risiko dan TIK /
Head of Strategic Plan, Risk Management and ICT Division

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, 31 Agustus 1972. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Manajemen dari Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) (1997) dan Magister Manajemen dari Universitas Budi Luhur (2012). / *Indonesian citizen, born in Jakarta, August 31, 1972. Obtained a Bachelor's degree in Management Economics from the Univers Prof. Dr. Moestopo (Beragama) (1997) and Master of Management from Budi Luhur University (2012).*



I.S BUDI SATRIJO, SH., MH

Kepala Divisi Umum dan TJSL /
Head of General Division and TJSL

Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung, 27 April 1968. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Katolik Parahyangan, Bandung (1983) dan gelar Magister Hukum Bisnis dari Universitas Padjadjaran. / *Indonesian citizen, born in Bandung on April 27, 1968. He obtained Bachelor of Laws degree from Parahyangan Catholic University, Bandung in 1983, and Business Law Masters Degree from Padjajaran University.*



DERI DAMANHURI, SE., MM

Kepala Divisi Inventarisasi, Pengendalian Aset dan Kearsipan / *Head of Inventory, Asset Control and Archives Division*

Warga Negara Indonesia, lahir di Purwakarta, 23 Februari 1971. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Manajemen dari UNPAS. Gelar Magister Management dari Universitas Widyatama. / *Indonesian citizen, born in Purwakarta, February 23, 1971. Obtained a Bachelor's degree in Management Economics from UNPAS. Master's Degree in Management from Widyatama University.*



BUDY GUNADY, ST., MPSDA

Project Manager Information Communication & Tehcnology / Project Manager Information Communication & Tehcnology

Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung, 11 November 1969. Memperoleh gelar Sarjana dari Universitas Padjadjaran (1995) dan Magister dari Institut Teknologi Bandung (2010). / *Indonesian citizen, born in Bandung on November 11, 1969. Obtained Bachelor's degree from UNPAD in 1995 and Masters from ITB (2010).*

DIREKTORAT OPERASI & PEMELIHARAAN

Operations & Maintenance Directorate



HERRY RACHMADYANTO, ST., MM., MSC

Kepala Divisi Operasi dan Pemeliharaan SDA dan SDL / *Head of Operation and Maintenance Division of SDA and SDL*

Warga Negara Indonesia, Lahir di Langsa pada 12 Juni 1977. Memperoleh gelar sarjana teknik dari ITB tahun 2000, Master Manajemen dari UGM, dan Master Teknik Pengairan dari Institute For Water Education, Netherlands. / *Indonesian citizen, born in Langsa on June 12, 1977. Obtained a bachelor's degree in engineering from ITB in 2000, Master of Management from UGM, and Master of Water Engineering from Institute For Water Education, Netherlands.*



BUDIYO, ST

Kepala Divisi Supervisi Teknik / *Head of Technical Supervision Division*

Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung, 12 April 1972. Memperoleh gelar Sarjana Teknik dari ITENAS (1998). / *Indonesian citizen, born in Bandung on April 12, 1972. Obtained a Bachelor's degree in Engineering from ITENAS (1998).*



DIREKTORAT OPERASI & PEMELIHARAAN

Operations & Maintenance Directorate



BIMA KAWINDRA, ST

Kepala Unit Kerja Khusus SPAM regional Jatiluhur I /
Head of the Jatiluhur Regional SPAM Special Work Unit I

Warga Negara Indonesia, lahir di Yogyakarta, 28 Mei 1974. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Diponegoro (1998). / *Indonesian citizen, born in Yogyakarta, on May 28, 1974. He obtained Bachelor's degree in Civil Engineering from Diponegoro University (1998).*



JOHN RICO, ST., MT

General Manajer Unit Wilayah I /
General Manager Unit Region I

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada 19 April 1971. Memperoleh gelar Sarjana Teknik sipil dari Universitas Andalas (1996), dan Master Teknik Pengairan dari ITB Bandung pada tahun 2003. / *Indonesian citizen, born in Jakarta on April 19, 1971. Obtained a Bachelor's degree in Civil Engineering from Andalas University (1996), and a Master of Water Engineering from ITB Bandung in 2003.*



RESKY HERAVENO, ST

General Manajer Unit Wilayah II /
General Manager Unit Region II

Negara Indonesia lahir di Tanjung Pandan pada 22 Februari 1971. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Sipil dari ITB pada tahun 1995. / *The State of Indonesia was born in Tanjung Pandan on February 22, 1971. Obtained a Bachelor's degree in Civil Engineering from ITB in 1995.*



FEMBRI SETYAWAN, ST

General Manajer Unit Wilayah III /
General Manager of Region III Unit

Warga Negara Indonesia, lahir di Nganjuk, 3 November 1975. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Pengairan dari Universitas Brawijaya, Malang (2000). / *Indonesian citizen, born in Nganjuk on November 3, 1975. He obtained Bachelor's degree in Water Engineering from Brawijaya University, Malang (2000).*



MARIO MORA PANGESTU, ST., MM
General Manajer Unit Wilayah IV /
General Manager of Regional Unit IV



AGUS KUSNADI, ST., ME
General Manajer PLTA /
General Manager of Hydroelectric Power

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, 13 Februari 1969. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Mesin dari Universitas Merdeka Malang (1996) dan gelar Magister Manajemen dari STIE-IPWIJA (2004). / *Indonesian citizen, born in Jakarta on February 13, 1969. He pursued his undergraduate degree in Mechanical Engineering from the Merdeka University of Malang (1996), and Master of Management from STIE- IPWIJA Jakarta (2004).*

Warga Negara Indonesia, lahir di Tasikmalaya, 5 Februari 1970. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Mesin dari Universitas Pasundan (1996) dan gelar *Master Engineering* dari Universitas Padjadjaran (2009). / *Indonesian citizen, born in Tasikmalaya, on February 5, 1970. He pursued his undergraduate degree in Mechanical Engineering from Pasundan University (1996), and a Master Engineering degree from Universitas Padjadjaran (2009).*



ANOM SOAL HERUDJITO, ST., MT
Special Expertise Tk. I, Bidang Pemantauan dan/ atau Analisis Kinerja Direktorat Operasi dan Pemeliharaan / *Special Expertise Tk. I, Division of Monitoring and / or Performance Analysis of the Directorate of Operations and Maintenance*



DEWI SYAFITRI, ST.
Special Expertise Tk. I, Bidang Pemantauan dan/atau Analisis Kinerja Direktorat Operasi dan Pemeliharaan / *Special Expertise Tk. I, Division of Monitoring and/or Performance Analysis of the Directorate of Operations and Maintenance*

Warga Negara Indonesia, lahir di Sukabumi, 25 Februari 1974. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung (1997) dan gelar Magister Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung (2007). / *Indonesian citizen, born in Sukabumi, on February 25, 1974. He obtained his undergraduate degree in Civil Engineering from Bandung Institute of Technology (1997) and a Master degree in Civil Engineering from the Bandung Institute of Technology (2007).*

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, 12 Desember 1969. Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik jurusan Teknik Sipil dari Universitas Pancasila (1995). / *Indonesian citizen, born in Jakarta on December 12, 1969. She obtained a Bachelor of Engineering degree in Civil Engineering from the University of Pancasila (1995).*



DIREKTORAT PENGEMBANGAN USAHA *Directorate of Business Development*



ADE FERRY FIRMANSYAH, SE., MM

Kepala Divisi Pengembangan Usaha /
Head of Business Development Division



DADAN HIDAYAT, ST., ME

General Manajer Unit Usaha Pariwisata dan Hotel /
General Manager of the Tourism and Hotel Business Unit

Warga Negara Indonesia, lahir di Ciamis, 29 Desember 1974. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Islam Indonesia (1998) dan Magister Manajemen dari Universitas Indonesia (2004). / *Indonesian citizen, born in Ciamis on December 29, 1974. He earned a bachelor's degree in economics from the Islamic University of Indonesia (1998) and a Masters in Management from the University of Indonesia (2004).*

Warga Negara Indonesia, lahir di Cirebon, 19 November 1973. Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Elektro dari ITENAS(1998) dan gelar Magister Ekonomi dari Universitas Padjadjaran (2010). / *Indonesian citizen, born in Cirebon, 19 November 1973. He obtained a Bachelor's degree in Electrical Engineering from ITENAS(1998) and a Master's degree in Economics from Padjadjaran University (2010).*



DADANG HIDAYAT, ST., MT

Project Manager SPAM /
Project Manager SPAM



EMIL MUHAMMAD NUR, ST

Special Expertise Tk. I Bidang Pengembangan Wilayah pada Direktorat Pengembangan Usaha / *Special Expertise Tk. I for Regional Development at the Directorate of Business Development*

Warga Negara Indonesia, lahir di Ciamis, 6 November 1970. Memperoleh gelar Sarjana Teknik jurusan Teknik Mesin dari Universitas Pasundan (1997) dan gelar Magister Teknik Mesin dari Universitas ISTN (2012). / *Indonesian citizen, born in Ciamis, November 6, 1970. He holds a Bachelor of Engineering degree majoring in Mechanical Engineering from the University of Pasundan (1997) and a Master's degree in Mechanical Engineering from the University of ISTN (2012).*

Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung pada 29 November 1976. Memperoleh gelar Sarjana Elektro dari Universitas Jenderal Ahmad Yani pada 1998. / *Indonesian citizen, born in Bandung on November 29, 1976. Obtained a Bachelor's degree in Electrical Engineering from Univ General Ahmad Yani in 1998.*



IMAS AAN, SE., MM

Project Manager Holding Air Minum Dalam Kemasan /
Project Manager Holding Bottled water



CUCU HARNANTO, ST., MM

Project Manager Pengembangan Wilayah /
Regional Development Project Manager

Warga Negara Indonesia, lahir di Garut, 13 November 1972. Memperoleh gelar Sarjana dari Ikopin Jatinangor (1996) dan gelar Magister Keuangan dari Universitas Tama Jagakarsa (2005). / *Indonesian citizen, born in Garut on November 13, 1972. He obtained a bachelor's degree from Ikopin Jatinangor (1996) and a Masters in Finance from the University of Tama Jagakarsa (2005).*

Warga negara Indonesia Lahir di Majalengka 13 Desember 1971. Memperoleh gelar Master dari Universitas Bhayangkara Jakarta dan Sarjana Teknik Elektro dari STTNas Yogyakarta. / *Indonesian citizen Born in Majalengka December 13, 1971. He obtained a Master's degree from Bhayangkara University, Jakarta and a Bachelor's degree in Electrical Engineering from STTNas Yogyakarta.*



RENI MAYASARI, ST., M.Si

Project Manager Pengembangan Infrastruktur Wisata dan Destinasi / *Project Manager for Tourism and Destination Infrastructure Development*

Warga Negara Indonesia, lahir di Purwakarta, 9 Agustus 1975. Memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Universitas Islam Bandung (2000) dan gelar Master Kebijakan Publik dari Universitas Krisnadwipayana Jakarta (2006). / *Indonesian citizen, born in Purwakarta on August 9, 1975. She obtained Bachelor degree in engineering from Bandung Islamic University (2000) and Master degree from Krisnadwipayana University, Jakarta (2006).*



DIREKTORAT PENGEMBANGAN USAHA

Directorate of Business Development



Ir. AGUS SURANTO, MM

Project Manager Optimalisasi BMN dan Aset Perusahaan /
Project Manager for Optimizing BMN and Company Assets

Warga Negara Indonesia, lahir di Semarang, 27 April 1967. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Sebelas Maret (1991) dan gelar Magister Manajemen dari STIE Widya Jayakarta (2003). / *Indonesian citizen, born in Semarang, Central Java on April 27, 1967. He pursued his undergraduate degree in Civil Engineering from Sebelas Maret University, Solo (1991) and a Master degree in Management from STIE Widya Jayakarta, Jakarta (2003).*



ESTHI PAMBANGUN, SE

Kepala Divisi Komersil dan Pelayanan Pelanggan / *Head of Commercial and Customer Service Division*

Warga Negara Indonesia, lahir di Semarang, 2 Juli 1976. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Diponegoro (1998). / *Indonesian citizen, born in Semarang, July 2, 1976. Obtained a Bachelor's degree in Economics from Diponegoro University (1998).*



PEJABAT ANAK PERUSAHAAN & DANA Pensiun

Officers of Subsidiaries & Pension Funds



HERRISON TOGATOROP, SE., AK

Direktur Utama merangkap Direktur Investasi Dana Pensiun
Perum Jasa Tirta II / *President Director concurrently
Investment Director of Perum Jasa Tirta II Pension Fund*

Warga Negara Indonesia, lahir di Medan, 2 Juni 1972. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Sumatera Utara (1999). / *Indonesian citizen, born in Medan on June 2, 1972. He earned a Bachelor of Economics degree at the University of North Sumatra (1999).*



Ir. ANDRIJANTO, MT

Direktur Utama PT. Jasa Tirta Luhur /
President Director of PT. Jasa Tirta Luhur

Warga Negara Indonesia, lahir di Pangkal Pinang, 5 Maret 1968. Memperoleh gelar Insinyur dari Institut Teknologi Bandung (1993) dan gelar Magister Manajemen SDA dari Institut Teknologi Bandung (2007). / *Indonesian citizen, born in Pangkal Pinang, March 5, 1968 He obtained a degree in Engineering from Bandung Institute of Technology (1993) and Masters of Water Resources Management from the Bandung Institute of Technology (2007).*



EEF SYAEFUL AMIEN, SE.

Direktur Investasi Dana Pensiun Jasa Tirta II /
Investment Director of Jasa Tirta II Pension Fund

Warga Negara Indonesia, lahir di Purwakarta, 7 April 1972. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen dari Universitas Islam Bandung (1997). / *Indonesian citizen born in Purwakarta, on April 7, 1972. He pursued his undergraduate degree in Economics majoring in Management from the Islamic University, Bandung (1997).*

Management Discussion and Analysis

Management Discussion and Analysis







TINJAUAN MAKROEKONOMI DAN INDUSTRI

Macroeconomic And Industrial Review



Sepanjang 2022 perekonomian global menghadapi berbagai gejolak. Salah satu yang sangat berpengaruh yakni tingginya volatilitas harga komoditas. Gejolak harga komoditas tersebut disebabkan adanya disruptsi rantai pasok global serta kenaikan permintaan. Perang Rusia dengan Ukraina yang terjadi sejak awal tahun lalu pun terus menekan disruptsi rantai pasok, sehingga kondisi ekonomi dunia semakin tidak pasti.

Tidak hanya terjadi antara Rusia dan Ukraina tetapi juga antara Tiongkok dan Taiwan, kenaikan inflasi global yang memicu agresifnya kebijakan moneter, serta potensi stagflasi yaitu risiko lambanya pertumbuhan ekonomi yang dibarengi dengan laju inflasi yang tinggi. Risiko stagflasi (bahkan menuju resesi) diperkirakan dapat terjadi pada tahun 2023 didorong oleh kenaikan suku bunga acuan secara global yang berdampak pada melemahnya konsumsi dan investasi. Peningkatan suku bunga acuan secara global dilakukan untuk memerangi tingkat inflasi yang tinggi dan cenderung meningkat.

"Saat awal terjadi perang yang menyebabkan kenaikan harga minyak makan, seperti crude palm oil (CPO) dan sunflower oil. Itu karena pasokan dari Ukraina tidak ada, tapi setelah itu terjadi penurunan yang sangat drastis ke 720,5 dolar AS per ton, CPO sekarang sudah naik lagi pada level 907,1 dolar AS per ton," kata Sri menjelaskan dalam konferensi pers virtual, Selasa (3/1/2023). Gejolak harga komoditas tersebut berdampak pada inflasi global. Contohnya inflasi di Amerika Serikat yang sempat di atas delapan persen, walau sekarang sudah melandai ke level 7,1 persen.

Penyebab awal pemicu kondisi ekonomi global berawal dari pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Dampaknya, mengubah secara total dan mendasar struktur serta sifat perekonomian global dan Indonesia. Bahkan ekonomi dunia anjlok -3,1% karena adanya gangguan dari sisi permintaan dan suplai. Salah satu akibat dari pandemi COVID-19, di kawasan Asia Pasifik, kesempatan kerja turun 3,2% (yoy) atau sekitar 61.8 juta orang yang kehilangan pekerjaan. Pengangguran di negara-negara G20 juga cukup tinggi, rata-rata 8,5% di tahun 2020, lebih tinggi dari tahun sebelumnya 7,2%. Pada tahun 2021, pengangguran di negara-negara ini sekitar 7,9% dan diperkirakan menurun tahun 2022 sekitar 6,97%.

Selain itu, The Fed mengambil kebijakan menaikkan suku bunga acuan dengan melakukan kebijakan *quantitative easing* (suku bunga rendah) untuk menjaga pertumbuhan dan tingkat pengangguran yang rendah di Amerika Serikat. Ketika AS menaikkan suku bunga, tentunya akan berdampak pada perekonomian Indonesia terutama dari sisi nilai tukar, inflasi yang tinggi karena kenaikan harga pangan dan energi.

Throughout 2022, the global economy faced various turmoil. One of the most influential is the high volatility of commodity prices. The volatility of commodity prices is due to the disruption of global supply chains and increased demand. The war between Russia and Ukraine, which has been going on since the beginning of last year, continues to suppress supply chain disruptions, making the world economy more uncertain.

Not only between Russia and Ukraine but also between China and Taiwan, rising global inflation that triggers aggressive monetary policy, and the potential for stagflation, which is the risk of slow economic growth coupled with high inflation rates. The risk of stagflation (even leading to recession) is expected to occur in 2023, driven by the increase in global benchmark interest rates, which has an impact on weakening consumption and investment. The global increase in benchmark interest rates is done to combat the high and rising inflation rate.

"At the beginning of the war, the price of edible oils, such as crude palm oil (CPO) and sunflower oil, increased. That was because there was no supply from Ukraine, but after that there was a very drastic decline to 720.5 US dollars per tonne, CPO has now risen again at the level of 907.1 US dollars per tonne," Sri explained in a virtual press conference, Tuesday (3/1/2023). The commodity price fluctuations have an impact on global inflation. For example, inflation in the United States was above eight per cent, although now it has slipped to a level of 7.1 per cent.

The initial cause of the trigger of global economic conditions began with the COVID-19 pandemic that hit the whole world. The impact has totally and fundamentally changed the structure and nature of the global economy and Indonesia. In fact, the world economy fell by -3.1 per cent due to disruptions in the demand and supply side. One of the consequences of the COVID-19 pandemic, in the Asia Pacific region, employment opportunities fell by 3.2% (yoy) or around 61.8 million people lost their jobs. Unemployment in G20 countries is also quite high, averaging 8.5% in 2020, higher than the previous year's 7.2%. In 2021, unemployment in these countries was around 7.9% and is expected to decline in 2022 to around 6.97%.

In addition, the Fed took the policy of raising the benchmark interest rate by conducting a quantitative easing policy (low interest rates) to maintain growth and low unemployment in the United States. When the US raises interest rates, it will certainly have an impact on the Indonesian economy, especially in terms of the exchange rate, high inflation due to rising food and energy prices.



Inflasi global diperkirakan masih akan meningkat seiring dengan meningkatnya global supply chain disruption di tengah tensi geopolitik yang cukup tinggi serta pandemi Covid-19 yang masih belum usai. Perekonomian Tiongkok, sebagai negara ekonomi terbesar kedua dunia dan merupakan salah satu sumber utama rantai pasok dunia, juga perlu dicermati seiring dengan kebijakan *zero-Covid policy*-nya yang berpotensi memperburuk rantai pasok global serta penurunan permintaan perdagangan internasional secara global.

Meski terkena dampak pertumbuhan negatif di tahun 2020 akibat pandemi Covid-19, perekonomian negara tetap menunjukkan ketahanan dan pulih lebih cepat. Pada saat yang sama, situasi ekonomi dunia mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Sehubungan dengan ekspektasi pengetatan kebijakan suku bunga, beberapa lembaga internasional telah merevisi prakiraan ekonomi mereka untuk tahun 2023 ke atas, sehingga kemungkinan resesi ekonomi terus berkurang. Harga komoditas global utama juga menjadi normal karena rantai pasokan melemah dan iklim menjadi lebih sejuk. Optimisme juga muncul dari China yang telah membuka kembali perbatasan dan kegiatan ekonominya setelah sebelumnya menerapkan kebijakan *zero-Covid*.

Didukung oleh fundamental ekonomi domestik yang kuat, perekonomian domestik tetap tumbuh dengan baik meskipun kondisi global naik turun. Perpaduan berbagai kebijakan dan strategi konstruktif yang ditempuh pemerintah, salah satunya melalui program PC-PEN, terbukti menjadi kunci sukses percepatan laju perekonomian nasional. Hal ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal akhir 2022 yang tumbuh solid sebesar 5,01% (year-on-year). Selama setahun penuh, pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2022 juga mencatatkan pertumbuhan yang mengesankan sebesar 5,31% (ctc). Angka tersebut melampaui target pemerintah sebesar 5,2% (ctc) dan kembali ke level sebelum pandemi sebesar 5%.

Secara spasial, seluruh wilayah di Indonesia terus mengalami penguatan. Pulau Jawa sebagai kontributor perekonomian nasional mampu tumbuh tinggi 56,48% (yoy) dan diikuti oleh Pulau Sumatera 22,04% (yoy) dan Kalimantan 9,23% (yoy). Lebih lanjut, Pulau Sulawesi 7,03% (yoy) serta Maluku dan Papua juga tumbuh 2,50% (yoy) beriringan dengan tingginya ekspor yang terjadi terutama akibat tingginya permintaan produk-produk komoditas unggulan di luar negeri.

Global inflation is expected to increase along with the increasing global supply chain disruption amidst high geopolitical tension and the ongoing Covid-19 pandemic. China's economy, as the world's second largest economy and one of the main sources of the world's supply chain, also needs to be watched closely along with its zero-Covid policy which has the potential to worsen the global supply chain as well as a decline in global international trade demand.

Despite being affected by negative growth in 2020 due to the Covid-19 pandemic, the country's economy showed resilience and recovered faster. At the same time, the world economic situation is beginning to show signs of improvement. In light of expectations of interest rate policy tightening, several international institutions have revised their economic forecasts for 2023 and beyond, so the likelihood of an economic recession continues to diminish. Prices of key global commodities are also normalising as supply chains weaken and the climate becomes milder. Optimism also arises from China which has reopened its borders and economic activities after previously implementing a zero-covid policy.

Supported by strong domestic economic fundamentals, the domestic economy continues to grow well despite the ups and downs of global conditions. The combination of various constructive policies and strategies pursued by the government, one of which is through the PC-PEN programme, has proven to be the key to successfully accelerating the pace of the national economy. This is reflected in Indonesia's economic growth in the final quarter of 2022 which grew solidly by 5.01% (year-on-year). For the full year, Indonesia's economic growth in 2022 also recorded an impressive growth of 5.31% (ctc). This figure exceeded the government's target of 5.2% (ctc) and returned to the pre-pandemic level of 5%.

Spatially, all regions in Indonesia continued to strengthen. Java Island as a contributor to the national economy was able to grow at a high rate of 56.48% (yoy), followed by Sumatra Island 22.04% (yoy) and Kalimantan 9.23% (yoy). Furthermore, Sulawesi Island 7.03% (yoy) and Maluku and Papua also grew 2.50% (yoy) in line with the high exports that occurred mainly due to the high demand for superior commodity products abroad.



Sektor industri pengolahan nonmigas Indonesia tetap memainkan peranan penting bagi perekonomian nasional. Peran ini dapat dilihat dari kinerja makro sektor industri pengolahan nonmigas di beberapa indikator.

Menperin menyebutkan, pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas pada tahun 2022 sebesar 5,01%, naik dibandingkan dengan pertumbuhan industri pada tahun 2021 yang mencapai 3,67%. Selain itu, sumbangsih sektor industri pengolahan nonmigas pada tahun 2022 sebesar 16,48%. Kontribusi ini masih merupakan yang tertinggi di antara sektor ekonomi lainnya.

Realisasi investasi di sektor pengolahan nonmigas tahun 2022 menembus Rp457,6 triliun atau memberikan andil sebesar 37,91% dari total investasi nasional. Angka tersebut melampaui nilai investasi sektor industri tahun 2021 sebesar Rp307,58 triliun.

Laju ekspansi sektor perdagangan sejalan dengan sektor manufaktur dengan mencatatkan pertumbuhan 5,5 persen (yoy). Pencapaian ini sejalan dengan indikator dini seperti pada pertumbuhan penjualan kendaraan dan indikator indeks penjualan ritel (IPR).

Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebagai sektor yang terhantam paling dalam oleh tekanan pandemic, tumbuh signifikan. Sektor ini berkontraksi 15,1 persen (yoy) di tahun 2020 dan mulai pulih secara bertahap di tahun 2021 dengan tumbuh 3,2 persen (yoy). Ditahun 2022 seiring dengan restriksi mobilitas dan tingkat penyebaran kasus pandemic yang terkendali, sektor ini mampu melonjak dengan tumbuh 19,9 persen (yoy).

Indonesia's non-oil and gas processing industry sector continues to play an important role in the national economy. This role can be seen from the macro performance of the non-oil and gas processing industry sector in several indicators.

The Minister of Industry said that the growth of the non-oil and gas processing industry sector in 2022 was 5.01%, an increase compared to industrial growth in 2021 which reached 3.67%. In addition, the contribution of the non-oil and gas processing industry sector in 2022 was 16.48%. This contribution is still the highest among other economic sectors.

Investment realisation in the non-oil and gas processing sector in 2022 reached IDR 457.6 trillion or contributed 37.91% of total national investment. This figure exceeds the investment value of the industrial sector in 2021 of IDR 307.58 trillion.

The expansion rate of the trade sector is in line with the manufacturing sector by recording a growth of 5.5 per cent (yoy). This achievement is in line with early indicators such as vehicle sales growth and retail sales index (IPR) indicators.

The provision of accommodation and food and beverages sector, the sector hardest hit by the pandemic, grew significantly. This sector contracted by 15.1 per cent (yoy) in 2020 and started to recover gradually in 2021 by growing by 3.2 per cent (yoy). In 2022, with mobility restrictions and the spread of pandemic cases under control, the sector was able to surge by growing 19.9 per cent (yoy).

TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

Operational Overview Per Business Segment



Perum Jasa Tirta II bertugas menyelenggarakan pemanfaatan umum atas air dan sumber-sumber air yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat serta melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan Pemerintah dalam pengelolaan daerah aliran sungai. Untuk menjalankan tugas tersebut, Perusahaan melakukan 5 (lima) kegiatan usaha utama, meliputi:

1. Pelayanan air baku untuk air minum, industri, pertanian, penggelontoran, pelabuhan, pembangkit tenaga listrik dan pemenuhan kebutuhan air lainnya;
2. Penyediaan tenaga listrik kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan/atau Perusahaan pengelolaan tenaga listrik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pembangkitan, penyaluran listrik tenaga air, air minum, usaha jasa konsultasi di bidang teknologi Sumber Daya Air, penyewaan alat besar dan jasa laboratorium kualitas air;
4. Pengembangan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum); dan
5. Menyelenggarakan usaha optimalisasi potensi

Perum Jasa Tirta II has the duty to organize the general utilization of the high quality and viability of water and water sources for the fulfillment of the livelihood of the people and to carry out certain tasks assigned by the government in the management of the Watershed. To carry out these duties the Company carries out 5 business activities:

1. Raw water services for drinking water, industry, agriculture, flushing, ports, power plants and, fulfillment of other water needs;
2. Provision of electricity to PT Perusahaan Listrik Negara and/or other power management companies in accordance with the provisions of legislation;
3. Generation, distribution of hydroelectric power, drinking water, business consulting services in the field of water resources technology, rental of large equipment and water quality laboratory services;
4. Development of DWSS (Drinking Water Supply System); and
5. Conducting efforts to optimize the potential of the



sumber daya yang dimiliki Perusahaan untuk perkantoran, pergudangan, pariwisata, perhotelan dan resort, olah raga dan rekreasi, rumah sakit, prasarana telekomunikasi dan sumber daya energi, jasa penyewaan dan perusahaan sarana dan prasarana yang dimiliki Perusahaan.

Seluruh kegiatan usaha tersebut dikelompokkan menjadi 6 (enam) segmen sebagai berikut:

1. Pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik;
2. Penyediaan air;
3. Kepariwisata;
4. Pemanfaatan lahan;
5. Jasa laboratorium kualitas air;
6. Air minum dalam kemasan (AMDK).

Kegiatan wilayah/usaha tersebut dijalankan oleh 7 (tujuh) unit usaha yang terdiri dari, Unit Wilayah I (UW I), Unit Wilayah II (UW II), Unit Wilayah III (UW III), Unit Wilayah IV (UW IV), Unit PLTA, Unit Usaha Pariwisata dan Hotel, Unit Layanan Laboratorium dan 1 (satu) anak Perusahaan yaitu PT. Jasa Tirta Luhur.

Seluruh unit wilayah/usaha yang berada di Wilayah I, II, III, dan IV utamanya bertugas mengembangkan usaha-usahajasa air; menyelenggarakan kegiatan pelestarian, perlindungan air, pengelolaan SDA serta pelaksanaan konstruksi; Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (OPSDA) dan monitoring kualitas air; penyediaan air baku; pembinaan hubungan dengan pemerintah daerah, swasta, dan komunitas masyarakat lainnya.

Perusahaan juga memiliki Unit PLTA yang bertugas di bidang pengembangan dan pengoperasian PLTA serta perusahaan non Sumber Daya Air (nonSDA). Uraian lebih lanjut mengenai tinjauan operasi, produktivitas, pendapatan usaha, serta profitabilitas per segmen usaha disajikan dalam deskripsi sebagai berikut;

Pembangkitan dan Penyaluran Tenaga Listrik

Deskripsi Usaha

Pembangkit Tenaga Listrik Tenaga Air (PLTA) Ir. H. Djuanda Jatiluhur yang dikelola oleh PJT II memiliki 6 (enam) turbin dengan kapasitas total daya terpasang sebesar 187,5 Mega Watt (MW). PLTA Ir. H. Djuanda dapat memproduksi listrik dengan rata-rata dalam setahun sebesar 900 juta kWh untuk didistribusikan ke PT PLN (Persero) serta industri di sekitar kawasan Jatiluhur – Purwakarta melalui jaringan transmisi 150 kV dan 70 kV.

Company's resources for offices, warehousing, tourism, hotels and resorts, sports and recreation, hospitals, telecommunications infrastructure and energy resources, rental and business services of facilities and infrastructure owned by the Company.

All business activities are grouped into the following 6 segments;

- 1. Generation and distribution of electricity*
- 2. Water supply*
- 3. Tourism*
- 4. Land use*
- 5. Water quality laboratory services*
- 6. Bottled drinking water (bottled water).*

The six segment business activities are carried out by 7 (seven) business units consisting of, Area I (UW I) Units, Region II (UW II) Units, Region III (UW III) Units, Region IV (UW IV) Units, PLTA, Tourism and Hotel Business Unit, Laboratory Service Unit and 1 (one) subsidiary, namely PT. Tirta Luhur Services.

All the Company's business units that operate in Region I, II, III, and IV are primarily in charge of developing water services, conducting conservation activities on water protection, Water Resources Management and construction implementation, OPSDA and water quality monitoring, raw water supply, maintaining relationships with local government, private establishments, and other elements in the communities.

The company also has a hydropower unit in charge of developing and operating hydropower plants and exploiting non-water resources (non-SDA). Further details regarding the operational review, productivity, operating income, and profitability per business segment are presented in the following descriptions;

Power Generation and Distribution

Business Description

Ir. H. Djuanda Jatiluhur Hydro Power Plant, which is managed by PJT II, has 6 (six) turbines with a total installed power capacity of 187.5 Mega Watt. PLTA Ir. H. Djuanda can produce an average of 900 million kWh electricity in a year to be distributed to PT PLN (Persero) and Industry around Jatiluhur-Purwakarta Area through 150 kV and 70 kV transmission lines.



Sesuai dengan karakteristiknya, PLTA Ir. H. Djuanda juga merupakan PLTA serbaguna, di mana selain berfungsi sebagai Pembangkit Tenaga Listrik, PLTA ini juga berfungsi untuk menyediakan air irigasi, pengendalian banjir, perikanan dan pariwisata, sehingga dalam pembangkitan tenaga listriknya perlu dikoordinasikan dengan keperluan irigasi dan musim tanam padi.

Di samping PLTA Ir. H. Djuanda, PJT II juga mengoperasikan dan memelihara PLTA Mini Hydro yang bertempat di Curug – Klari – Karawang, sehingga lebih dikenal dengan nama PLTA Mini Hydro Curug. PLTA Mini Hydro Curug dibangun pada tahun 2000 dengan kapasitas daya terpasang pada tahun 2000 dengan kapasitas daya terpasang sebesar 2x3,2 Mega Watt dan mulai dioperasikan pada tahun 2002 untuk memenuhi kebutuhan listrik di Pompa Tarum Barat dan Tarum Timur guna menaikkan level air baku agar dapat disalurkan ke wilayah irigasi dan sekitarnya. Selain itu, penyaluran daya listrik juga ditujukan untuk memenuhi kebutuhan listrik di Bendung Curug serta area perkantoran dan perumahan di sekitar Bendung tersebut.

Produktivitas Segmen Pembangkitan dan Penyaluran Tenaga Listrik

Pada tahun 2022, Perusahaan merealisasikan produksi listrik sebesar 1.011,91 juta kWh atau 109,70 dari RKAP 2022 sebesar 922,41 juta kWh. Bila dibandingkan dengan capaian produksi listrik tahun 2021, capaian ini naik 14,18% atau setara dengan 125,65 juta kWh dari sebelumnya sebesar 886,26 juta kWh.

In accordance with its characteristics, PLTA Ir. H. Djuanda is also a versatile hydropower plant, which in addition to functioning as a Power Plant, hydropower also serves to provide irrigation water, flood control, fisheries and tourism, so that in generating power it needs to be coordinated with irrigation needs and rice growing season.

Besides PLTA Ir. H. Djuanda, PJT II also operates and maintains the Mini Hydro hydropower plant located at Curug-Klari-Karawang, which is familiarly known as PLTA Mini Hydro Curug. The Mini Hydro Curug Hydro Power Plant was built in 2000 with an installed power capacity of 2x3,2 Mega Watt and commenced in 2002 to meet the electricity needed by the pumps at East and West Tarum in order to raise the water level standard to be channeled to irrigation and surrounding areas and to meet the needs of electricity in Bendung Curug, Office and Housing area around the Bendung.

Productivity of Power Generation and Distribution Segment

In 2022, the Company realized electricity production of 1,011.91 million kWh or 109.70 from the 2022 RKAP of 922.41 million kWh. Compared to the achievement of electricity production in 2021, this figure increase by 14.18% or equivalent to 125.65 million kWh from the previous year of 886,26 million kWh.

Tabel Realisasi Produksi Listrik Tahun 2021-2022
Table of Electricity Production Realization in 2021-2022

(dalam juta kWh / in million kWh)

URAIAN Description	RKAP 2022	REALISASI 2022 Realization 2022	REALISASI 2021 Realization 2021	% REALISASI TERHADAP % Realization to	
				RKAP 2022	REALISASI 2021 Realization 2021
1	2	3	4	5=3:2	6=3:4
Produksi listrik / Electricity Production	922.41	1.011,91	886.26	109,70	114,18

Informasi mengenai realisasi produksi listrik per unit pembangkit tahun 2022 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Information on the realization of electricity production per plant unit in 2022 is presented in the following table:



Tabel Realisasi Produksi Listrik per Unit Pembangkit Tahun 2022
Table of Realization of Electricity Production per Plant Unit in 2022

(dalam ribu kWh / *in thousand kWh*)

BULAN Mont	PEMBANGKIT UNIT / Plant Unit							JUMLAH Total
	I	II	III	IV	V	VI	Mini Hydro	
Januari / January	8.485	7.154	15.935	11.759	13.756	1.554	837	59.480
Februari / February	14.209	7.900	15.715	8.373	1.582	0	46	47.825
Maret / March	17.189	13.540	9.523	4.959	8.409	27	429	54.076
April / April	12.934	3.132	15.679	16.872	4.333	0	576	53.526
Mei / May	12.237	5.387	13.280	18.667	11.161	5.027	1.070	66.829
Juni / June	11.560	14.488	18.542	6.380	11.837	17.775	1.075	91.657
Juli / July	19.358	20.054	19.532	11.161	15.827	16.436	1.440	103.808
Agustus / August	1.317	19.398	19.680	18.963	19.352	18.754	1.540	99.004
September / September	0	20.121	19.468	18.551	18.600	16.945	1.393	95.078
Oktober / October	2.247	22.476	22.351	22.170	20.729	18.153	1.289	109.415
November / November	19.308	21.391	21.363	21.267	21.465	18.008	485	123.287
Desember / December	21.200	20.477	21.688	21.203	21.793	540	1.019	107.920
Jumlah / Total	140.044	175.518	212.756	190.325	168.844	113.219	11.199	1.011.905

Kenaikan dan penurunan produksi listrik per unit pembangkit dari bulan ke bulan karena PLTA Ir. H. Djuanda harus beroperasi mengikuti pola operasi pemberian air untuk irigasi dan program pemeliharaan rutin. Dalam operasional PLTA tidak terjadi limpas ataupun pembuangan air dari hollow jet.

Pada bulan Februari dan April 2022 Unit VI tidak berproduksi karena adanya pengeringan pada tailrace. Pada bulan September 2022 Unit I tidak berproduksi dikarenakan adanya pemeliharaan pemasangan Governor Free. Pada bulan Februari 2022 Mini Hydro mengalami penurunan produksi dikarenakan ketersediaan air tidak sesuai dengan rencana (dibawah normal).

The increase and decrease in electricity production per generating unit from month to month due to PLTA Ir. H. Djuanda must operate according to the pattern of operation of providing water for irrigation and routine maintenance programs. In hydropower operations there is no runoff or discharge of water from the hollow jet.

In February and April 2022 Unit VI did not produce due to tailrace drying. In September 2022 Unit I was not in production due to the maintenance of the Governor Free installation. In February 2022 Mini Hydro experienced a decrease in production due to water availability not according to plan (below normal).

Informasi mengenai penyaluran listrik untuk PT PLN, swasta, dan pemakaian sendiri pada tahun 2022 dimuat dalam tabel berikut:

Information regarding the distribution of electricity for PT PLN, private sector, and own use in 2022 are listed in the following table:

Tabel Perbandingan Realisasi Produksi Listrik Tahun 2022 dengan RKAP Tahun 2022 dan Realisasi Tahun 2021
Table of Comparison between Realization of Electricity Production in 2022 with RKAP 2022 and Realization in 2021

(dalam juta kWh / in million kWh)

URAIAN Description	RKAP 2022	REALISASI 2022 Realization 2022	REALISASI 2021 Realization 2021	% REALISASI TERHADAP % Realization to		
				RKAP 2022	REALISASI 2021 Realization 2021	PORSI TAHUN 2022 (Dalam %) Share in 2022 (in%)
1	2	3	4	5=3:2	6=3:4	7
PT PLN (Persero)	536.34	641.96	494.17	199,69	129,91	63.44
Ke Non PLN/Swasta / To Non PLN/Private	347.17	329.46	353.62	94,90	93,17	32.56
Pemakaian Sendiri / Own Usage	38.89	40.48	38.48	104,10	105,21	4.00
JUMLAH / Total	922.41	1.011,91	886.26	109,70	886.26	100.00

Listrik hasil produksi Perusahaan disalurkan kepada PT PLN (Persero) dan swasta serta sebagian lainnya digunakan sendiri oleh Perusahaan. Pada tahun 2022, penyaluran listrik ke PT PLN (Persero) sebesar 641.96 juta kWh atau 63,44% dari total produksi. Penyaluran ke PT PLN (Persero) tahun 2022 ini mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 29,91% atau setara dengan 147.79 juta kWh dari sebelumnya sebesar 494,16 juta kWh.

Electricity produced by the Company is distributed to PT PLN (Persero) and the private sector, and some are used by the Company itself. In 2021, the distribution of electricity to PT PLN (Persero) amounted to 641.96 million kWh or 63.44% of total production. Distribution to PT PLN (Persero) in 2022 increased from 2021 by 29.91% or equivalent to 147.79 million kWh from the previous year of 494.16 million kWh.

Penyaluran listrik kepada Non PT.PLN (Persero)/ Swasta pada tahun 2022 adalah sebesar 329,46 juta kWh atau 32,56% dari total produksi. Jumlah ini menurun 24,16 juta kWh atau 6,83% bila dibandingkan tahun 2021 sebesar 353,62 juta kWh.

The distribution of electricity to Non PT.PLN (Persero)/ Private in 2022 amounted to 329.46 million kWh or 32.56% of total production. This amount decreased by 24,16 million kWh or 6.83% compared to 2021 at 353.62 million kWh.

Adapun penyaluran listrik untuk pemakaian sendiri di tahun 2022 sebesar 40,48 juta kWh atau 4,0% dari total produksi. Jumlah ini naik 2.0 juta kWh atau 5,21% bila dibandingkan tahun 2021 sebesar 38,48 juta kWh.

The distribution of electricity for electricity use in 2022 amounted to 49,48 million kWh or 4.00% of total production. This amount increased by 2.0 million kWh or 5.21% compared to 2021 which was 38.48 million kWh.

Pendapatan Segmen Pembangkitan dan Penyaluran Tenaga Listrik

Revenue from Power Generation and Distribution

Realisasi pendapatan listrik tahun 2022 sebesar Rp. 493.119 juta, jika dibandingkan dengan Pendapatan Listrik tahun 2021 sebesar Rp. 454.556 juta mengalami peningkatan 8,48%.

The realisation of electricity revenue in 2022 was IDR 493,119 million, when compared to Electricity Revenue in 2021 of IDR 454,556 million, an increase of 8.48%.



Profitabilitas Segmen Pembangkitan dan Penyaluran Tenaga Listrik

Profitability of Power Generation and Distribution Segment

Tabel Profitabilitas Segmen Pembangkitan dan Penyaluran Tenaga Listrik Tahun 2021 – 2022

Table of Profitability of Power Generation and Distribution Segment in 2021 – 2022

(dalam juta Rupiah / in million rupiah)

URAIAN / Description	2022	2022	PERTUMBUHAN 2021 – 2022 Growth in 2021 – 2022	
			NOMINAL Nominal	%
Pendapatan Listrik / Electricity Revenue	493.119	454.556	38.56	8,48
Beban Listrik / Electricity Expenses	(112.300)	(94.475)	17.83	18,87

Pendapatan dari penyaluran listrik tahun 2022 berjumlah Rp493.119 juta dengan beban operasi sebesar Rp 112.300 juta. Bila dibandingkan dengan tahun 2021, pendapatan listrik tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp38.56 juta atau 8,48%, beban listrik meningkat sebesar Rp17.83 juta atau 18,87%.

Revenues from electricity distribution in 2022 amounted to Rp493.119 million with operating expense of Rp112,300 million. Compared to 2021, electricity revenues in 2022 increase by Rp38,56 million or 8.48%, electricity expenses INcrease by Rp17,83 million or 18.87%.

JASA AIR Water Services



Deskripsi Usaha

Segmen operasi penyediaan air meliputi air baku, air bersih, dan air irigasi. Perusahaan tergabung dalam Tim Koordinasi Pengoperasian Bendungan Kaskade Citarum (TKPBKC) yang berpedoman pada Rencana Operasi Waduk Kaskade Citarum tahun 2021.

Sebagai BUMN yang berbentuk Perusahaan Umum (PERUM), pelaksanaan tugas PJT II terdiri dari 2 (dua) aspek, yaitu aspek sosial dan aspek komersial. Berdasarkan volume air yang disalurkan serta ditinjau dari aspek komersial, penyediaan air baku yang dipasok ke Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten/ Kota, Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya serta Air Bersih hanya sebesar 13%. Selebihnya merupakan kontribusi PJT II dalam membantu Pemerintah terkait dengan pengelolaan irigasi, penanganan banjir, konservasi, penyuluhan, serta dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional di bidang pertanian, khususnya untuk pertanian di daerah irigasi utara dan selatan Jatiluhur yang mendapatkan supply/pasokan air dari sumber setempat dan Bendungan Ir. H. Djuanda (Jatiluhur).

Business Description

The water supply operation segment includes raw water, clean water and irrigation water. The Company includes in Tim Koordinasi Pengoperasian Bendungan Kaskade Citarum (TKPBKC) which is guided by the 2021 Citarum Cascade Reservoir Operation Plan.

As a state-owned enterprise in the form of Perusahaan Umum (PERUM), there were 2 (two) aspects of duty of PJT II, namely commercial and social aspects. Based on the volume of water supplied, from the commercial aspect of the provision of raw water supplied to the Regency/Municipal Water Supply Company (PDAM), the Water Supply Company (PAM) Jaya and Water Supply only gained profit for PJT II of 13%, the rest is the contribution of PJT II in assisting the Government, related to irrigation management, flood handling, conservation, counseling and support to national food security program in agriculture, especially for agriculture in north and south parts of Jatiluhur that get water supply from local sources and Ir. H. Djuanda (Jatiluhur) Reservoir.



Produktivitas Segmen Jasa Air

1. Air Baku

Realisasi penyaluran air baku tahun 2022 sebesar 1.083,83 juta m³ atau 102,10 % dari RKAP tahun 2022 sebesar 1.061,54 juta m³ dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 1.134,87 juta m³ menurun 3,97 %. Perbandingan realisasi penyaluran air baku tahun 2022 dengan RKAP tahun 2022 dan realisasi tahun 2021 disajikan pada Tabel - 4 berikut:

Tabel Penyaluran Air Baku

Table of Raw Water Distribution

(dalam juta m³ / in million m³)

URAIAN Description	RKAP 2022	REALISASI 2022 Realization 2022	REALISASI 2021 Realization 2021	% REALISASI TERHADAP % Realization to		
				RKAP 2022	REALISASI 2021 Realization 2021	PORSI TAHUN 2022 (Dalam %) Share in 2022 (in%)
1	2	3	4	5=3:2	6=3:4	7
PAM Jaya	528,95	536,21	531,23	101,37	100,94	49,20
PDAM Kabupaten/Kota	201,89	238,42	221,67	118,09	107,56	21,88
Industri / Industry	293,81	283,56	345,00	96,51	82,19	26,02
PT Sang Hyang Seri	36,89	31,64	36,96	85,77	85,61	2,90
JUMLAH / Total	1.061,54	1.089,83	1.134,87	102,66	96,03	100,00

Dari tabel di atas, realisasi penyaluran air baku ke PAM Jaya pada tahun 2022 sebesar 536,21 juta m³ atau 101,37% dari RKAP 2022 sebesar 528,95 juta m³. Realisasi ini meningkat 4,98 juta atau 0,94% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 1.134,87 juta m³.

Realisasi penyaluran air baku ke PDAM Kabupaten/Kota tahun 2022 sebesar 238,42 juta m³ atau 118,09 % dari RKAP tahun 2022 sebesar 201,89 juta m³ dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 221,67 juta m³ naik 7,55 %. Menurunnya produksi air baku dibandingkan dengan tahun 2019 disebabkan oleh belum terbitnya Surat Ijin Pengusahaan Sumber Daya Air (SIPSDA) dari Instansi Pemerintah yang berwenang karena masih dalam proses. Proses SIPSDA tersebut dalam tahun 2020 terkendala percepatannya karena dampak pandemi Covid-19.

Realisasi penyaluran air baku ke Industri tahun 2022 sebesar 283,56 juta m³ atau 96,51 % dari RKAP tahun 2022 sebesar 293,81 juta m³ dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 345,00 juta m³ turun 17,81%. Meningkatnya produksi air baku industri dibandingkan dengan tahun 2020 dikarenakan terbitnya SIPSDA.

Water Service Segment Productivity

1. Raw Water

The realization of raw water distribution in 2022 is 1,083.83 million m³ or 10210% of the 2022 RKAP of 1,061.54 million m³ and when compared to the realization in 2021 of 1,050.01 million m³, an increase of 3.22%. The comparison of the realization of raw water distribution in 2022 with the RKAP in 2022 and the realization in 2021 is presented in Table - 4 below:

From the above table, the realization of the distribution of raw water to PAM Jaya in 2022 was 536,21 million m³ or 101,37% of the 2022 RKAP of 528,95.10 million m³. This realization increased by 4.98 million or 0.94% compared to the realization in 2021 of 1,134.87 million m³.

The realization of raw water distribution to Regency/ City PDAMs in 2021 is 238.42 million m³ or 118.09% of the 2022 RKAP of 201.89 million m³ and when compared to the realization in 2021 of 221.67 million m³, an increase of 7.55%. The decrease the raw water production plan compared in 2019 was because the Water Resources Utilization Permit (SIPSDA) has not been issued yet from authorized Government Agencies and/or is still on process. Process accerelation is constrained in 2020 due to the impact of the Covid-19 pandemic.

The realization of raw water distribution to Industry in 2022 is 283.56 million m³ or 96.51% of the 2022 RKAP of 293.81 million m³ and when compared to the realization in 2021 of 345.00 million m³, a decrease of 17.81%. The increase in industrial raw water production compared to 2020 is due to the publication of SIPSDA.

Realisasi penyaluran air baku ke PT Sang Hyang Seri tahun 2022 sebesar 31,64 juta m³ atau 85,77 % dari RKAP tahun 2022 sebesar 36,89 juta m³ dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 36,96 juta m³ turun 14,38 %.

The realization of raw water distribution to PT Sang Hyang Seri in 2022 is 31.64 million m³ or 85.77% of the 2022 RKAP of 36.89 million m³ and when compared to the realization in 2021 of 39.96 million m³, a decrease of 14.38%.

2. Air Baku ke PLTA

Realisasi penyaluran air baku ke PLTA Ir. H. Djuanda tahun 2022 sebesar 641,96 juta kWh atau 119,69 % dari RKAP tahun 2022 sebesar 536,34 juta kWh dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 494,17 juta kWh naik 29,91 %. Disebabkan belum ada perjanjian pemanfaatan sumber daya air bagi pembangkitan ke PT Pembangkitan Jawa Bali (PLTA Cirata) dan PT Indonesia Power (PLTA Saguling).

2. Raw water to Hydropower Plant

Realization of raw water distribution to PLTA Ir. H. Djuanda in 2022 of 641.96 million kWh or 119.69% of the 2022 RKAP of 536.34 million kWh and when compared to the realization in 2021 of 494.17 million kWh, an increase of 29.91%. This is because there is no agreement on the use of water resources for generation to PT Pembangkitan Jawa Bali (PLTA Cirata) and PT Indonesia Power (PLTA Saguling).

Perbandingan realisasi penyaluran air baku ke PLTA tahun 2022 dengan RKAP tahun 2022 dan realisasi tahun 2021 disajikan pada Tabel - 5 berikut:

Comparison of the realization of raw water distribution to PLTA in 2021 with RKAP in 2021 and realization in 2020 is presented in Table - 5 below:

Tabel Perbandingan dan Realisasi Penyaluran Air Baku ke PLTA Tahun 2022

Table of Comparison and Realization of Raw Water Distribution to Hydropower Plant in 2022

(dalam juta kWh / in million kWh)

URAIAN Description	RKAP 2022	REALISASI 2022 Realization 2022	REALISASI 2021 Realization 2021	% REALISASI TERHADAP % Realization to	
				RKAP 2022	REALISASI 2021 Realization 2021
1	2	3	4	5=3:2	6=3:4
PLTA Ir. H. Djuanda	536,34	641,96	494,17	119,69	129,91
PLTA Saguling	-	-	-	-	-
PLTA Cirata	-	-	-	-	-
PLTA Rajamandala	-	-	-	-	-
JUMLAH / Total	536,34	641,96	494,17	119,69	129,91

Berdasarkan tabel tersebut, realisasi penyaluran air baku ke PLTA Ir. H. Djuanda tahun 2022 sebesar 641,96 juta kWh atau 119,69 % dari RKAP tahun 2022 sebesar 536,34 juta kWh dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 494,17 juta kWh naik 29,91%.

Based on the table, the realization of raw water distribution to PLTA Ir. H. Djuanda in 2022 of 641.96 million kWh or 119.69% of the 2022 RKAP of 536.34 million kWh and when compared to the realization in 2021 of 494.17 million kWh, a decrease of 29.91%.

3. Air Bersih

Realisasi penyaluran air bersih tahun 2022 sebesar 2.819.201 m³ atau 79,36 % dari RKAP tahun 2022 sebesar 3.552.453 m³ dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 2.406.458 m³ naik 17,15 %. Tidak tercapainya penyaluran air bersih terhadap rencana produksi disebabkan oleh belum terealisasinya penyaluran ke SPAM Marunda.

3. Clean water

The realization of clean water distribution in 2022 was 2,819,201 m³ or 79.36% of the 2022 RKAP of 3,552,453 m³ and when compared to the realization in 2021 of 2,406,458 m³, it increased by 17.15%. The clean water distribution target was not achieved according to the production plan because distribution to SPAM Marunda was not yet realized.

Perbandingan realisasi penyaluran air bersih tahun 2022 dengan RKAP tahun 2021 dan realisasi tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Comparison of the realization of clean water distribution in 2021 with the 2021 RKAP and the realization in 2020 is presented in the following table:



Tabel Penyaluran Air Bersih Tahun 2022
Table of Clean Water Distribution in 2022

(dalam m³ / in m³)

URAIAN Description	RKAP 2022	REALISASI 2022 Realization 2022	REALISASI 2021 Realization 2021	% REALISASI TERHADAP % Realization to		
				RKAP 2022	REALISASI 2021 Realization 2021	PORSI TAHUN 2022 (Dalam %) Share in 2022 (in%)
1	2	3	4	5=3:2	6=3:4	7
Industri / Industry	159.904	179.902	111.310	112,51	161,62	6.38
Pemakaian Sendiri / Own Usage	778.766	1.092.461	640.346	140,28	170,60	38.75
Penduduk / Occupant	1.180.063	711.069	849.889	60,26	83,67	25.22
Air Bersih Curah / Bulk Clean Water	1.433.720	835.769	804.913	58,29	103,83	29.65
JUMLAH / Total	3.552.453	2.819.201	2.406.458	79,36	117,15	100.00

Berdasarkan tabel tersebut, realisasi penyaluran air bersih ke Industri pada tahun 2022 sebesar 179.902 m³ atau 112,51% dari RKAP 2022 sebesar 159.904 m³. Capaian tersebut naik 68.592 m³ atau 61,62% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 111.310 m³.

Based on the table, the realization of clean water distribution to the industry in 2022 was 179,920 m³ or 112.51% of the 2022 RKAP of 159,904 m³. This achievement decreased by 68,592 m³ or 61.62% compared to the realization in 2021 of 111,310 m³.

Realisasi penyaluran air bersih pemakaian sendiri untuk wilayah Jatiluhur dan Curug pada tahun 2022 sebesar 1.092.461 m³ atau 140,28% dari RKAP 2022 sebesar 778.766 m³. Capaian tersebut meningkat 425.115 m³ atau 70,60% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 640.346 m³.

The realization of the distribution of clean water for own usage for the Jatiluhur and Curug areas in 2022 was 1,092,461 m³ or 140.28/% of the 2022 RKAP of 778,766 m³. This achievement increased by 425,115 m³ or 70.60% compared to the realization in 2021 of 640,8346 m³.

Realisasi penyaluran air bersih ke penduduk pada tahun 2022 sebesar 711.069 m³. Capaian tersebut menurun 138.820 m³ atau 16,33% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021.

The realization of the distribution of clean water to the occupants in 2022 amounted to 711,069 m³. This achievement decreased by 138,820 m³ or 16.33% compared to the realization in 2021.

Realisasi penyaluran air bersih curah tahun 2022 sebesar 835.769 m³ atau 58,29% dari RKAP 2022 sebesar 1.433.453 m³. Jumlah tersebut meningkat 30.856 m³ atau 3,83% dibandingkan dengan realisasi 2021.

The realization of bulk clean water distribution in 2022 was 835,769 m³ or 58.29% of the 2022 RKAP of 1,433,453 m³. This amount increased 30,856 m³ or 3.83% compared to the realization of 2021.

4. Air Irigasi

Realisasi penyaluran air irigasi untuk tanam padi Musim Tanam (MT) Rendeng dan MT Gadu berjumlah 569,679 Ha atau 49.87% dari RKAP 2022 sebesar 516,377 Ha. Capaian ini terdiri dari 49.87% total Rendeng DI. Utara dan Selatan Jatiluhur sebesar 276,612 Ha dan 50.13% total Gadu DI. Utara dan Selatan Jatiluhur sebesar 270,484 Ha.

4. Irrigation Water

The realization of irrigation water distribution for the planting season of Rendeng and Gadu is 569,679 Ha or 110.32% of the 2021 RKAP of 516,377 Ha. This achievement consisted of 49.87% of the total Rendeng of DI of North and South Jatiluhur at 276,612 hectares and 50.13% of the total Gadu of DI of North and South Jatiluhur at 270,484 Ha.

Tabel Musim Tanam (MT) Rendeng Tahun 2021/2022 dan MT Gadu Daerah Irigasi (DI) Jatiluhur Tahun 2022
Table of Wet Season Plantation in 2020-2021 and Dry Season Plantation in Jatiluhur Irrigation Area 2022

(dalam Ha, kecuali dinyatakan lain / in Ha, except stated otherwise)

NO.	DAERAH IRIGASI Irrigation Area	REALISASI 2022 Realization 2022	RENCANA Plan	% REALISASI TERHADAP % Realization to
1.	MT Rendeng DI Utara Jatiluhur / Wet Season Plantation in North Jatiluhur			
	Dalam Target / Within Target	216.669	218.787	99.03
	Luar Target / Beyond Target	6.373	-	-
	Jumlah / Total	223.042	218.787	101,94
2.	MT Rendeng DI Selatan Jatiluhur / Wet Season Plantation in South Jatiluhur			
	Dalam Target / Within Target	52.348	52.349	100
	Luar Target / Beyond Target	14.839	-	-
	Jumlah / Total	67.187	52.349	128,34
	Total Rendeng / Total Rendeng	290.229	271.136	107.04
3.	MT Gadu DI Utara Jatiluhur / Dry Season Plantation in North Jatiluhur			
	Dalam Target / Within Target	205.301	214.559	95.93
	Luar Target / Beyond Target	7.748	-	-
	Jumlah / Total	213.754	214.559	99,54
4.	MT Gadu DI Selatan Jatiluhur / Dry Season Plantation in South Jatiluhur			
	Dalam Target / Within Target	31.157	31.210	99.83
	Luar Target / Beyond Target	34.152	-	-
	Jumlah / Total	65.309	31.210	209,26
	Total Gardu / Total Substations	278.883	245.769	113.47
	Total Rendeng + Gardu	569.112	516.905	110.09

Berdasarkan tabel di atas, realisasi tanam padi MT. Rendeng DI. Utara Jatiluhur tahun 2021/2022 seluas 223.042 Ha atau 101,94 % dari rencana produksi tahun 2021/2022 seluas 218.787 Ha (terdiri dari dalam target dan luar target). Sedangkan untuk realisasi tanam padi MT. Rendeng DI. Selatan Jatiluhur seluas 67.187 Ha atau 128,34 % dari rencana produksi tahun 2021/2022 seluas 52.349 Ha (terdiri dari dalam target dan luar target).

Realisasi tanam padi MT. Gadu DI. Utara Jatiluhur sampai dengan Desember 2022 seluas 213.754 Ha atau 99,54 % dari rencana produksi tahun 2022 seluas 214.559 Ha (terdiri dari dalam target dan luar target). Sedangkan untuk realisasi tanam padi MT. Gadu DI. Selatan Jatiluhur seluas 65.309 Ha atau 209,26 % dari rencana produksi tahun 2022 seluas 31.210 Ha (terdiri dari dalam target dan luar target).

Based on the table above, the realization of MT. Rendeng DI. North Jatiluhur in 2021/2022 covering an area of 223,042 Ha or 101.94% of the production plan for 2021/2022 covering an area of 218,787 Ha (consisting of within the target and outside the target). As for the realization of rice planting MT. Rendeng DI. South of Jatiluhur covering an area of 67,187 Ha or 128.34% of the production plan for 2021/2022 covering an area of 52,349 Ha (consisting of within the target and outside the target).

Realization of rice planting MT. Gadu DI. North Jatiluhur until December 2022 covers an area of 213,754 Ha or 94.54% of the 2022 production plan covering an area of 214,559 Ha (consisting of within the target and outside the target). As for the realization of rice planting MT. Gadu DI. South of Jatiluhur covering an area of 65,309 Ha or 209.26% of the planned production in 2022 covering an area of 31,210 Ha (consisting of within the target and outside the target).



Rencana produksi tanam padi MT. Rendeng tahun 2021/2022 DI. Jatiluhur berdasarkan pembagian golongan air dimulai 1 Oktober 2021, sedangkan MT. Gadu tahun 2022 dimulai 1 Oktober 2022.

Rice production plan for MT. Rendeng in 2021/2022 DI. Jatiluhur based on the division of water groups starting October 1, 2021, while MT. Gadu 2022 begins October 1, 2022.

Realisasi pemberian air untuk Musim Tanam Rendeng 2021/2022 dan MT. Gadu 2022 sebesar 7.870,70 juta m³ atau 150,73 % dari RKAP tahun 2022 sebesar 6.662,98 juta m³ yang airnya berasal dari sumber setempat dan Waduk Ir. H. Djuanda.

Realization of water supply for the 2021/2022 Rendeng Planting Season and MT. Gadu 2022 is 7,870.70 million m³ or 150.73% of the 2022 RKAP of 6,662.98 million m³ whose water comes from local sources and Ir. H. Juanda.

5. Pengelolaan 3 Waduk

Rencana dan realisasi pengelolaan Waduk Saguling, Cirata dan Ir. H. Djuanda berpedoman pada Rencana Operasi Waduk Kaskade Citarum tahun 2022 yang merupakan hasil kesepakatan bersama institusi dalam rangka Tim Koordinasi Pengoperasian Bendungan Kaskade Citarum (TKPBKC).

5. Management of 3 reservoirs

Plan and realization of the management of the Saguling, Cirata and Ir. H. Djuanda Reservoirs refer to the 2021 Citarum Reservoir Operation Plan which is the result of an agreement with the institution as part of Tim Koordinasi Pengoperasian Bendungan Kaskade Citarum (TKPBKC).

Data yang menggambarkan realisasi dan rencana Air Masuk, Air Keluar dan Tinggi Muka Air 3 Waduk pada tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut:

Data describing the realization and plan of Incoming Water, Outgoing Water, and Water Level of 3 Reservoirs in 2021 is presented in the following table:

Tabel Air Masuk, Air Keluar, dan Tinggi Muka Air Waduk Saguling Tahun 2022

Table of Incoming Water, Outgoing Water, and Water Level of Saguling Reservoir in 2022

BULAN Mont	AIR KELUAR (Juta m ³) Outgoing Water (Million m ³)		AIR KELUAR (Juta m ³) Outgoing Water (Million m ³)		TINGGI MUKA AIR (mdpl) Water Level (masl)	
	RENCANA Plan	REALISASI Realization	RENCANA Plan	REALISASI Realization	RENCANA Plan	REALISASI Realization
Januari / January	308,43	173,60	235,27	201,71	634,04	633,49
Februari / February	326,01	175,06	235,27	117,46	636,92	636,82
Maret / March	416,37	260,07	330,02	241,14	639,26	638,39
April / April	417,57	486,01	318,32	395,20	641,65	640,49
Mei / May	195,33	288,74	204,39	301,52	641,31	640,61
Juni / June	96,24	248,12	162,61	226,70	639,51	641,38
Juli / July	53,00	118,28	141,17	177,90	636,90	640,60
Agustus / August	31,76	66,42	128,81	171,26	633,51	638,27
September / September	29,45	131,08	116,41	219,03	629,62	636,21
Oktober / October	97,08	152,32	145,84	386,76	626,57	638,83
November / November	249,35	364,60	236,43	377,01	627,33	638,35
Desember / December	325,17	490,89	260,72	523,20	630,69	637,01
Jumlah / Total	2.545,76	2.955,18	2.515,36	3.338,88	7617,31	7660,45
Rata-rata / Average	212,15	246,27	209,61	278,24	634,78	638,37
% Realisasi : Rencana % Realization : Plan	116,08		132,74		100,57	

Berdasarkan tabel di atas, realisasi air masuk Waduk Saguling dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2022 rata-rata sebesar 246,27 juta m³ atau 116,08% dari rencana sebesar 212,15 juta m³.

Based on the table above, the realisation of Saguling Reservoir inflow from January to December 2022 averaged 246.27 million m³ or 116.08% of the plan of 212.15 million m³.

Realisasi air keluar Waduk Saguling dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2022 rata-rata sebesar 278,24 juta m³ atau 132,74% dari rencana sebesar 209,61 juta m³.

The realisation of Saguling Reservoir outflow from January to December 2022 averaged 278.24 million m³ or 132.74% of the plan of 209.61 million m³.

Realisasi TMA Waduk Saguling pada tanggal 31 Desember 2022 berada pada elevasi +638,37 mdpl atau lebih tinggi 3,59 m dari rencana pada elevasi + 634,78 mdpl.

The realisation of Saguling Reservoir TMA on 31 December 2022 was at an elevation of +638.37 masl or 3.59 m higher than the plan at an elevation of + 634.78 masl.

Tabel Air Masuk, Air Keluar, dan Tinggi Muka Air Waduk Cirata Tahun 2022

Table of Incoming Water, Outgoing Water, and Water Level of Cirata Reservoir in 2022

BULAN Mont	AIR KELUAR (Juta m ³) Outgoing Water (Million m ³)		AIR KELUAR (Juta m ³) Outgoing Water (Million m ³)		TINGGI MUKA AIR (mdpl) Water Level (masl)	
	RENCANA Plan	REALISASI Realization	RENCANA Plan	REALISASI Realization	RENCANA Plan	REALISASI Realization
Januari / January	522,81	391,56	420,60	386,66	211,22	211,03
Februari / February	531,25	291,37	405,52	190,46	213,76	213,17
Maret / March	664,50	454,99	545,14	424,54	216,03	213,80
April / April	628,23	697,17	491,59	481,68	218,53	217,98
Mei / May	373,97	515,02	386,93	480,04	218,16	217,75
Juni / June	237,04	504,44	328,79	405,70	216,29	218,50
Juli / July	179,80	318,04	307,20	409,26	213,74	216,64
Agustus / August	151,95	302,59	290,03	375,26	210,79	215,04
September / September	145,73	504,61	272,88	623,06	207,98	212,77
Oktober / October	271,06	720,86	336,05	599,66	206,31	215,24
November / November	476,17	671,97	455,73	623,79	206,68	216,20
Desember / December	578,11	937,07	486,86	940,14	208,69	216,14
Jumlah / Total	4.760,61	6.309,69	4.727,31	5.937,24	2548,18	2584,26
Rata-rata / Average	396,72	525,81	393,94	494,77	212,35	215,36
% Realisasi : Rencana % Realization : Plan	132,54		125,59		101,42	

Berdasarkan tabel di atas, realisasi air masuk Waduk Cirata dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2022 rata-rata sebesar 525,81 juta m³ atau 132,54% dari rencana sebesar 396,72 juta m³.

Based on the table above, the realization of water entering the Cirata Reservoir from January to December 2022 averaged 525.81 million m³ or 132.54% of the planned 396.72 million m³.

Realisasi air keluar Waduk Cirata dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2022 rata-rata sebesar 494,77 juta m³ atau 125,59% dari rencana sebesar 393,94 juta m³.

The realization of the water coming out of the Cirata Reservoir from January to December 2022 is on average 494.77 million m³ or 125.69% of the planned 393.94 million m³.

Realisasi TMA Waduk Cirata pada tanggal 31 Desember 2022 berada pada elevasi +215,36 mdpl atau lebih tinggi 3,01 m dari rencana pada elevasi +212,35 mdpl.

The realization of the Cirata Reservoir TMA on December 31, 2022 is at an elevation of +215.36 m above sea level or 3.01 m higher than the planned elevation +212.35 m asl.



Tabel Air Masuk, Air Keluar, dan Tinggi Muka Air Waduk Ir. H. Djuanda Tahun 2022

Table of Incoming Water, Outgoing Water, and Water Level of Ir. H. Djuanda Reservoir in 2022

BULAN Mont	AIR KELUAR (Juta m ³) Outgoing Water (Million m ³)		AIR KELUAR (Juta m ³) Outgoing Water (Million m ³)		TINGGI MUKA AIR (mdpl) Water Level (masl)	
	RENCANA Plan	REALISASI Realization	RENCANA Plan	REALISASI Realization	RENCANA Plan	REALISASI Realization
Januari / January	485,26	422,10	297,69	350,98	95,90	95,03
Februari / February	477,26	217,32	245,94	281,04	99,18	93,90
Maret / March	619,57	461,97	400,42	317,84	102,06	95,87
April / April	568,11	554,67	316,97	295,40	105,18	99,68
Mei / May	424,79	581,60	451,75	352,99	104,73	102,77
Juni / June	350,12	536,87	523,27	472,37	102,39	103,60
Juli / July	319,35	460,34	547,73	534,62	99,15	102,22
Agustus / August	297,62	395,92	547,73	525,92	95,34	100,01
September / September	269,65	626,98	492,48	510,89	91,61	101,21
Oktober / October	358,60	663,40	482,11	587,70	89,32	102,26
November / November	502,12	694,68	466,56	758,71	89,83	101,36
Desember / December	544,18	1.015,02	377,12	964,91	92,56	101,64
Jumlah / Total	5.216,64	6.630,87	5.149,77	5.953,37	1167,25	1199,55
Rata-rata / Average	434,72	552,57	429,15	496,11	97,27	99,96
% Realisasi : Rencana % Realization : Plan	127,11		115,60		102,77	

Berdasarkan tabel di atas, realisasi air masuk Waduk Ir. H. Djuanda dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2022 rata-rata sebesar 552,57 juta m³ atau 127,11% dari rencana sebesar 434,72 juta m³.

Realisasi air keluar Waduk Ir. H. Djuanda dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2022 rata-rata sebesar 496,11 juta m³ atau 115,60% dari rencana sebesar 429,15 juta m³.

Realisasi TMA Waduk Ir. H. Djuanda pada tanggal 31 Desember 2022 berada pada elevasi +99,96 mdpl atau lebih tinggi 2,69 m dari rencana pada elevasi +97,27 mdpl.

Pendapatan Segmen Jasa Air

Pada tahun 2022, Segmen Jasa Air mencatatkan Pendapatan sebesar Rp 810.782 juta, meningkat Rp54.871 juta atau 7,26% bila dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp755.911 juta. penurunan pendapatan ini terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan air baku pada tahun 2021.

Based on the table above, the realization of water entering the Ir. H. Djuanda from January to December 2022 an average of 552.57 million m³ or 127.11% of the planned 434.72 million m³.

The realization of the water coming out of the Ir. H. Djuanda from January to December 2022 an average of 496.11 million m³ or 115.60% of the planned 429.15 million m³.

Realization of TMA Reservoir Ir. H. Djuanda on December 31, 2022 is at an elevation of +99.96 m above sea level or 2.69 m higher than the plan at an elevation of +97.27 m above sea level.

Water Services Segment Revenues

In 2022, the Water Services Segment recorded Revenue of Rp. 810.782 million, an increase of Rp. 54.871 million or 7.26% compared to 2021 of Rp. 755.911 million. This decrease in revenue was mainly due to a decrease in raw water revenue in 2021.

**Profitabilitas Segmen Jasa Air****Profitability of Water Service Segment****Tabel Profitabilitas Segmen Jasa Air Tahun 2021 - 2022**
Table of Profitability of Water Services Segment in 2021 - 2022

(dalam juta Rupiah / in million rupiah)

URAIAN Description	2022	2021	PERTUMBUHAN 2021-2022 Growth in 2021-2022	
			NOMINAL Nominal	%
Pendapatan Air Baku / Raw Water Revenue	810.782	755.911	54.871	7.26
Beban Air Baku / Raw Water Load	(527.707,35)	(487.645,87)	(40.061,48)	8.22
Laba/(Rugi) Operasi / Profit/(Loss) Operation	283.074,65	268.265,13	14.809,52	5.52
Profitabilitas / Profitabili	34.91	36,01%	-1.10	-3.04

Pendapatan dari jasa air tahun 2022 berjumlah Rp810.782 juta dengan beban operasi sebesar Rp 527.707,35 juta sehingga menghasilkan laba operasi sebesar Rp283.074,65 juta dan profitabilitas sebesar 34,91%. Bila dibandingkan dengan tahun 2021, pendapatan jasa air tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp54.871 juta atau 7,26%, beban jasa air meningkat Rp40.061,48 juta atau 8,22%, dan laba operasi meningkat Rp14.809,52 juta atau 5,52%. Hal tersebut menyebabkan profitabilitas tahun 2022 menurun -1,10% dari sebelumnya 36,01% pada tahun 2021 menjadi 34,91% pada tahun 2022. Penurunan ini terutama dikarenakan Surat Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (SIPSDA) beberapa perusahaan belum diterbitkan.

Revenues from water services in 2022 amounted to Rp810,782 million with operating expenses of Rp527,707.35 million resulting in an operating profit of Rp283,074.65 million and profitability of 34.91%. Compared to 2021, water service revenue in 2022 increased by Rp54,871 million or 7.26%, water service expenses increased by Rp40,061.48 million or 8.22%, and operating profit increased by Rp14,809.52 million or 5.52%. This caused profitability in 2022 to decrease by 1.10% from 36.01% in 2021 to 34.91% in 2022. This decrease was mainly due to the fact that several companies' Water Resources Concession Permits (SIPSDA) had not been issued



KEPARIWISATAAN

Tourism

Deskripsi Usaha

Keberadaan Bendungan Ir. H. Djuanda Jatiluhur dengan pemandangan alam yang indah dipadukan dengan kemegahan bangunan bendungan merupakan daya tarik tersendiri bagi para wisatawan dan menjadi salah satu tujuan Pariwisata di Jawa Barat. Demi memanfaatkan potensi wisata di kawasan ini, Perusahaan telah membangun berbagai fasilitas seperti hotel, resort, bungalow, restoran, *playground*, lapangan tenis, perkemahan, dan wahana rekreasi air serta sarana olahraga air.

Fasilitas pariwisata di kawasan Bandung Ir. H. Djuanda Jatiluhur telah dilengkapi dengan bangunan hotel bintang tiga dengan nama kawasan Jatiluhur *Hotel Resort* yang beroperasi sejak 1967. Di kawasan ini, terdapat 33 bungalow dan 30 kamar hotel, juga terdapat 7 (tujuh) ruang pertemuan yang 5 (lima) di antaranya berada di Gedung Graha Vidya (terdiri dari satu ruang utama berkapasitas 800 orang dan empat ruang pertemuan berkapasitas maksimum 60 orang),

Business Description

The existence of the Ir. H. Djuanda Jatiluhur Reservoir that is equipped with beautiful natural scenery combined with the splendor of the reservoir building makes a tourist attraction and become one of the Tourism destinations in West Java. In taking advantage of the tourism potential in the region, the Company has built various facilities such as hotels, resorts, bungalows, restaurants, playgrounds, tennis courts, campsites, and water recreation rides and sports facilities.

Tourism facilities in the Ir. H. Djuanda Jatiluhur Reservoir area are complemented with a three-star hotel building called the Jatiluhur Hotel Resort area which has been operating since 1967. 33 bungalows and 30 hotel rooms were built within the premises, including 7 (seven) meeting rooms, 5 (five) of which are located in the Graha Vidya Building (consisting of one main room with a capacity of 800 people and four meeting rooms with a maximum capacity of 60 people), and 2 (two)

serta 2 (dua) ruang pertemuan terpisah berada di kawasan Restoran Istora dengan kapasitas masing-masing 80 orang. Kawasan pariwisata dilengkapi juga dengan fasilitas kolam renang dan rekreasi air berupa waterboom dengan nama Jatiluhur Water World (JWW), kapal pesiar, ski air boating, dan fasilitas rekreasi lainnya.

Produktivitas Segmen Pariwisata

Optimalisasi produktivitas pariwisata yang tersedia di tahun 2022 telah dilaksanakan walaupun kunjungan tamu masih didominasi pada akhir pekan dan pada saat libur nasional. Upaya peningkatan sarana dan prasarana tetap diterapkan di samping atraksi-atraksi guna meningkatkan tingkat kunjungan wisatawan. Selama tahun 2022, Perusahaan telah menggelar beberapa event dalam rangka mendongkrak kinerja segmen pariwisata, antara lain Eksibisi Jatiluhur Paddle Board Festival, Fun and Family Run 10K, dan The 1st International Jatiluhur Jazz Festival.

Informasi mengenai perbandingan realisasi produksi pariwisata tahun 2022 dengan RKAP 2022 dan realisasi tahun 2021 dimuat dalam tabel berikut:

separate meeting rooms in the Istora Restaurant area with a capacity of 80 people each. The tourism area is also equipped with swimming pool and water recreation facilities in the form of a water park with the name Jatiluhur Water World (JWW), cruise ships, water skiing, and other recreational facilities.

Tourism Segment Productivity

Productivity optimization of tourism available in 2022 were carried out even though guest traffic was mostly high on weekends and during national holidays. Efforts to improve facilities and infrastructure, as well as attractions itself, are continuously implemented in order to increase tourist visit rate. During 2022, the Company held several events in order to boost the performance of the tourism segment, including the Jatiluhur Paddle Board Festival Exhibition, 10K Fun and Family Run, and The 1st International Jatiluhur Jazz Festival.

Information regarding the comparison of the realization of tourism production in 2022 and the 2022 RKAP and the realization in 2021 is described in the following table:

Tabel Produktivitas Segmen Pariwisata Tahun 2022
Table of Productivity of Tourism Segment in 2022

URAIAN Description	SATUAN Unit	RKAP 2022	REALISASI 2022 Realization 2022	REALISASI 2021 Realization 2021	% REALISASI TERHADAP % Realization to	
					RKAP 2022	REALISASI 2021 Realization 2021
1	2	3	4	5=3:2	6=3:4	7=4:5
Hotel & Bungalow						
Hotel Istora / Pesanggrahan & Bungalow	Kamar	9.103	9.708	7,975	106,65	121,73
Rekreasi / Recreational						
Kapal Motor / Motor Boat	trip	221	51	94	23,08	54,26
Tiket / Ticketing	Orang / Person	158.250	65.762	73,222	41,56	89,81
Water World						
Tiket / Ticketing	Orang / Person	20.714	1.428	6,641	55,17	172,08
Gedung Konversi / Conversion Building						
Food & Beverage (Banquet)	Porsi / Portion	78.617	57.125	51,949	72,66	109,96



Realisasi Hotel Istora, Pesanggrahan dan Bungalow tahun 2022 sebanyak 9.708 kamar atau 106,65 % dari RKAP tahun 2022 sebanyak 9.103 unit dan dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebanyak 7.975 unit naik 121,73 %.

Realisasi Kapal Motor dalam Tahun 2022 sebanyak 51 trip atau 23,08 % dari RKAP tahun 2022 sebanyak 221 trip dan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebanyak 94 trip turun 54,26 %. Pendapatan Kapal Motor tidak tercapai karena banyaknya pesaing yang bermunculan pada wisata air dengan harga yang kompetitif dan sarana penunjang yang lengkap, menjadikan wisata air *Jatiluhur Water World* kalah bersaing dan tidak dapat mencapai target yang ditetapkan.

Realisasi pengunjung Rekreasi (*Ticketing*) tahun 2022 sebanyak 11.428 orang atau 55,17 % dari RKAP tahun 2022 sebanyak 20.714 orang dan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebanyak 6.641 orang naik 72,08 %.

Tidak tercapainya Pendapatan *Ticketing* Rekreasi karena tidak adanya perubahan sarana dan prasarana pada Kawasan rekreasi, sehingga menimbulkan kejenuhan bagi wisatawan JVR.

Realisasi pengunjung *Water World* tahun 2022 sebanyak 11.428 orang atau 55,17 % dari RKAP tahun 2022 sebanyak 20.704 orang dan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebanyak 6.641 orang naik 72,08%. Tidak tercapainya rencana produksi karena adanya beberapa pesaing kolam renang di wilayah Purwakarta dengan konsep terkini dan tidak ada wahana tambahan di *Water World*.

Realisasi *Food & Beverage (Banquet)* gedung konvensi tahun 2022 sebanyak 16.824 kali atau 94,94 % dari RKAP tahun 2022 sebanyak 17.721 kali dan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebanyak 14.205 kali naik 18,44 %. Tidak tercapainya rencana produksi karena tingkat kunjungan Room Rental gedung konvensi rendah sehingga berpengaruh terhadap Penjualan *Food & Beverage (Banquet)* gedung konvensi.

Realisasi pengunjung Pariwisata tahun 2022 sebanyak 65.762 orang, turun 10,19 % dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021 sebanyak 73.222 orang disajikan pada berikut:

The realization of Istora Hotels, Pesanggrahans and Bungalows in 2022 was 9,708 rooms or 106.65% of the 2022 RKAP of 9,103 units and compared to the realization in 2021 of 7,975 units, an increase of 121.73%.

The realization of Motor Ships in 2022 was 51 trips or 23.08% of the 2022 RKAP of 221 trips and when compared to the realization in 2021 of 94 trips, it decreased by 54.26%. Motorboat revenue was not achieved because of the many competitors that appeared in water tourism with competitive prices and complete supporting facilities, making Jatiluhur Water World water tourism unable to compete and unable to achieve the set target.

The realization of Recreational Visitors (Ticketing) in 2022 was 11,428 people or 55.17% of the 2022 RKAP as many as 20,714 people and when compared to the realization in 2022 as many as 6,641 people, down 72.08%.

Recreational ticketing revenue is not achieved because there is no change in facilities and infrastructure in the recreation area, thus causing saturation for JVR tourists.

The realization of Water World visitors in 2022 was 11,428 people or 55.17% of the 2022 RKAP as many as 20,704 people and when compared to the realization in 2021 as many as 6,641 people, up 72.08%. The production plan was not achieved due to several swimming pool competitors in the Purwakarta area with the latest concept and no additional rides at Water World.

The realization of Food & Beverage (Banquet) of the convention building in 2022 was 16,824 times or 94.94% of the 2022 RKAP of 17,721 times and when compared to the realization in 2021 as many as 14,205 times, it increased by 18.44%. The production plan was not achieved due to the low level of Room Rental visits to the convention building so that it affected the Food & Beverage (Banquet) sales of the convention building.

Realization of Tourism visitors in 2022 as many as 65,762 people, a decrease of 10.19% compared to the same period in 2021 as many as 73,222 people are presented below:

Pendapatan Segmen Pariwisata

Pada tahun 2022 Segmen Pariwisata mencatatkan Pendapatan sebesar Rp11.015 juta, meningkat Rp361 juta atau 3,39% bila dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp10.655 juta. Peningkatan pendapatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan layanan, sarana dan prasarana, promosi, dan event-event kepariwisataan lainnya.

Profitabilitas Segmen Pariwisata

Tabel Profitabilitas Pariwisata Air Tahun 2021 - 2022
Table of Profitability of Tourism Segment in 2021 - 2022

(dalam juta Rupiah / in million rupiah)

URAIAN Description	2022	2021	PERTUMBUHAN 2021-2022 Growth in 2021-2022	
			NOMINAL Nominal	%
Pendapatan Pariwisata / Tourism Revenue	11.015	10.654	361	3.28
Beban Pariwisata / Tourism Expenses	(26.488)	(18.687)	7801	29.45
Rugi Operasi / Operating Loss	(15.473)	(8.033)	7440	48.08
Profitabilitas / Profitability	(140,47%)	(75,40%)	-	65.07

Pendapatan dari segmen Pariwisata tahun 2022 berjumlah Rp11.015 juta dengan beban operasi sebesar Rp26.488 juta sehingga menghasilkan rugi operasi sebesar Rp15.473 juta dan profitabilitas sebesar minus 140,47%. Bila dibandingkan dengan tahun 2021, pendapatan pariwisata tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp361 juta atau 3,28%, beban pariwisata naik Rp7.801 juta atau 29,45%, dan rugi operasi naik Rp7.440 juta atau 48,08%. Hal tersebut menyebabkan profitabilitas tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 65,07% dari sebelumnya minus 75,40% pada tahun 2021 menjadi minus 140,47% pada tahun 2022.

Pemanfaatan Lahan

Deskripsi Usaha

Sebagai upaya optimalisasi dan pengamanan aset Perusahaan, Perum Jasa Tirta II melakukan pemanfaatan lahan berupa pertanian darat maupun pertanian sawah, dan non pertanian seperti perikanan kolam, lahan komersil, jalan, halaman pabrik, lahan parkir, hingga jalur pipa & kabel, jalur hijau, jembatan, serta lahan untuk tower komunikasi dan listrik seluas 7.788,37 m³. Kegiatan usaha ini dijalankan melalui sistem sewa dan kerja sama usaha dengan berbagai instansi baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Gas Negara

Tourism Segment Revenue

In 2022, the Tourism Segment recorded Revenue of Rp11,015 million, an increase of Rp361 million or 3.39% compared to 2021 of Rp10,102 million. This increase in revenue was mainly due to improvements in services, facilities and infrastructure, promotions, and other tourism events.

Profitability of Tourism Segment

Revenue from the Tourism segment in 2022 amounted to Rp11.015 million with operating expense of Rp26.488 million resulting in an operating loss of Rp15,473 million and profitability of minus 140.47%. Compared to 2021, tourism revenue in 2022 increased by Rp361 million or 3.28%, tourism expenses increased by Rp7.801 million or 29.45%, and operating losses increased by Rp7.440 million or 48.08%. This caused profitability in 2022 to decreased by 65,07% from minus 75.40% in 2021 to minus 140.47% in 2022.

Land Utilization

Business Description

As an effort to optimize and safeguard the Company's assets, Perum Jasa Tirta II carries out land use in the form of land agriculture and rice farming, and non-agriculture such as pond fisheries, commercial land, roads, factory yards, parking lots, pipelines & cables, green lines, bridges and land for communication and electricity towers covering an area of 7,788.37 m³ through a system of leasing and business cooperation with various agencies either BUMN (State-Owned Enterprises) such as PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (Persero), PT Perusahaan



(Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten/Kota, instansi swasta, serta masyarakat perorangan yang melakukan sewa lahan untuk pertanian. Pemanfaatan lahan ini dikelola oleh unit wilayah I, II, III, dan IV.

Produktivitas Segmen Pemanfaatan Lahan

Realisasi atas pemanfaatan lahan untuk disewakan tahun 2022 seluas 625,48 ha atau 100,61 % dari RKAP tahun 2022 seluas 621,69 ha dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 seluas 598,27 ha naik 4,55%.

Tidak tercapainya pemanfaatan lahan dikarenakan terdapatnya sejumlah luasan lahan petani yang beralih fungsi menjadi fasilitas/jalan umum yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga luasan lahan petani menjadi berkurang sedangkan untuk lahan non petani akibat dampak pandemik Covid-19.

Perbandingan realisasi terhadap rencana produksi pemanfaatan lahan tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Listrik Negara (Persero), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) of Regency/City level, private institutions, and individual that lease land for agriculture. The use of this land is managed by business units I, II, III, and IV.

Productivity of Land Utilization Segment

The realization of land use for lease in 2022 is 625.48 ha or 100.61% of the 2022 RKAP of 621.69 ha and when compared to the realization in 2021 it is 598.27 ha, an increase of 4.55%.

The failure to achieve land use was due to the fact that a number of farmers' land areas were converted into public facilities/roads used by the Central Government and Regional Governments so that the area of farmers' land was reduced while for non-farmers' land due to the impact of the Covid-19 pandemic.

Comparison of realization against land use production plan in 2022 is presented in the following table:

URAIAN Description	RKAP 2022	REALISASI 2022 Realization 2022	REALISASI 2021 Realization 2021	% REALISASI TERHADAP % Realization to		
				RKAP 2022	REALISASI 2021 Realization 2021	PORSI TAHUN 2022 (Dalam %) Share in 2022 (in%)
1	2	3	4	5=3:2	6=3:4	7
Lahan Pertanian / Agricultural Land	358.08	339.61	285.88	94,84	118,79	54,32
Lahan Non Pertanian / Non Agricultural Land	263.61	285.59	312.4	108,34	91,42	45,68
JUMLAH / Total	621.69	625.2	598.27	100,56	104,50	100,00

Profitabilitas Segmen Pemanfaatan Lahan

Profitability of Land Utilization Segment

Tabel Profitabilitas Segmen Pemanfaatan Lahan Tahun 2021 - 2022

Table of Profitability of Land Utilization Segment in 2021 - 2022

URAIAN Description	2022	2021	PERTUMBUHAN 2021-2022 Growth in 2021-2022	
			NOMINAL Nominal	%
1	2	3	4	5=4:3
Pendapatan Lahan / Land Income	67.511	60.801	6.710	11,04
Beban Lahan / Land Load	(10.943)	(8.447)	2.496	29,55
Laba/(Rugi) Operasi / Profit/(Loss) Operation	56.568	52.354	4.214	8,05
Profitabilitas / Profitability	83.79%	86.11%	-	-2,32



Pendapatan dari segmen Pemanfaatan Lahan tahun 2022 berjumlah Rp67.511 juta dengan beban operasi sebesar Rp10.943 juta sehingga menghasilkan laba operasi sebesar Rp56.568 juta dan profitabilitas sebesar 83,79%. Bila dibandingkan dengan tahun 2021, pendapatan pemanfaatan lahan tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp6.710 juta atau 11,04%, beban pemanfaatan lahan meningkat Rp2.496 juta atau 29,55%, dan laba operasi meningkat Rp4.214 juta atau 8,05%. Hal tersebut menyebabkan profitabilitas tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 2,32% dari sebelumnya 86,11% pada tahun 2021 menjadi 83,79% pada tahun 2022.

Jasa Laboratorium

Deskripsi Usaha

Laboratorium Perum Jasa Tirta II merupakan salah satu laboratorium rujukan di Jawa Barat yang sudah terakreditasi ISOIEC 17025: 2017 oleh Komite Akreditasi Nasional sejak tahun 2003, dengan Nomor Akreditasi: LP-174-IDN serta telah teregister Lingkungan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2016, dengan Nomor Registrasi 00108 / LPJAABLING-1/LRK/KLHK.

Jumlah parameter yang masuk ke dalam Ruang Lingkup Akreditasi ISONEC 17025:2017 adalah sebanyak 114 parameter terakreditasi meliputi parameter fisika, kimia, dan mikrobiologi dari 9 (Sembilan) komoditi produk, yaitu: Air Limbah, Air Sungai/Danau, Air untuk keperluan Higiene Sanitasi, Air Minum, Udara Ambien, Emisi Sumber Tidak Bergerak, Kebisingan Lingkungan Kerja, Kebisingan Lingkungan dan Sampling. Sedangkan parameter yang masuk ke dalam Ruang Lingkup Registrasi Labling KLHK adalah sebanyak 68 parameter dari 6 (enam) komoditi produk, yaitu: Air Limbah, Air Sungai/Danau, Udara Ambien, Emisi Sumber Tidak Bergerak, Kebisingan Lingkungan dan Sampling.

Peningkatan kualitas jasa pelayanan yang diberikan laboratorium kepada para pengguna jasa didukung oleh tenaga analis yang kompeten (dilengkapi dengan sertifikasi dan pelatihan terkait), alat instrumen yang lengkap serta penggunaan bahan kimia dan pemilihan metode pengujian yang sesuai dengan standar internasional/regional dan nasional. Pengguna jasa laboratorium meliputi pengguna internal dan eksternal seperti industri/kegiatan usaha, kawasan industri, rumah sakit/klinik kesehatan, hotel/apartemen/mall, instansi dan perorangan yang tersebar di Jakarta, Bekasi, Karawang, Subang, Purwakarta, dan sekitarnya.

Revenue from the Land Utilization segment in 2022 amounted to Rp67,511 million with operating expenses of Rp10,943 million resulting in an operating profit of Rp56,568 billion and profitability of 83.79%. When compared to 2021, land use revenue in 2022 increased by Rp6,710 million or 11.04%, land use expenses increased by Rp2.496 million or 29.55%, and operating profit increased by Rp4,214 million or 8.05%. This caused profitability in 2022 going down by 2.32% from the previous 86.11% in 2019 to 83.79% in 2022.

Laboratory Services

Business Description

Perum Jasa Tirta II Laboratory is one of the reference laboratories in West Java that has been accredited to ISOIEC 17025: 2017 by the National Accreditation Committee since 2003, with Accreditation Number: LP-174-IDN and has been registered with the Environment at the Ministry of Environment and Forestry (KLHK) in 2016, with Registration No. 00108 / LPJAABLING-1/LRK/KLHK.

The number of parameters included in the Scope of Accreditation of ISONEC 17025:2017 are 114 accredited parameters including physical, chemical, and microbiological parameters of 9 (Nine) product commodities, namely: Wastewater, River/Lake Water, Water for Sanitary Hygiene, Drinking Water, Ambient Air, Fixed Source Emissions, Work Environment Noise, Environmental Noise and Sampling. Meanwhile, the parameters included in the Scope of the KLHK Labling Registration are 68 parameters from 6 (six) product commodities, namely: Wastewater, River/Lake Water, Ambient Air, Emissions from Immovable Sources, Environmental Noise and Sampling.

Improving the quality of services provided by laboratories to service users is supported by competent analysts (supplemented by certification and related training), complete instruments and the use of chemicals and selection of test methods in accordance with international/regional and national standards. Laboratory service users include internal and external users. Such as industry/business activities, industrial areas, hospitals/health clinics, hotels/apartments/malls, agencies and individuals spread across Jakarta, Bekasi, Karawang, Subang, Purwakarta and its surroundings.



Produktivitas Segmen Jasa Laboratorium Kualitas Air

Realisasi jasa analisa laboratorium sebanyak 9.181 sampel atau 127,06 % dari RKAP tahun 2022 sebanyak 8.280 sampel dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebanyak 8.859 sampel naik 3, 63 %.

Pendapatan Segmen Jasa Laboratorium Kualitas Air

Pada tahun 2022, Segmen Jasa Laboratorium Kualitas Air mencatatkan Pendapatan sebesar Rp6.984 juta, meningkat Rp927 juta atau 15,30% bila dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp6.057 juta. Peningkatan pendapatan ini equivalent dengan penurunan produksi sebesar 0,29% serta adanya perubahan tarif dasar jasa analisa pada semester II tahun 2020. Selain itu, komoditas jasa pengujian kualitas udara dan lingkungan kerja juga memiliki kontribusi yang cukup baik dalam peningkatan pendapatan.

Profitabilitas Segmen Jasa Laboratorium Kualitas Air

Productivity of Water Quality Laboratory Service Segment

The realisation of laboratory analysis services was 9,181 samples or 127.06% of the 2022 RKAP of 8,280 samples and when compared to the realisation in 2021 of 8,859 samples, it increased by 3.63%.

Water Quality Laboratory Service Segment Revenues

In 2022, the Water Quality Laboratory Service Segment recorded Revenues of Rp6,984 million, an increase of Rp927 million or 15.30% compared to 2021 of Rp6,057 million. This increase in revenue is equivalent to an decreased production of 0.29% and a change in the base rate of analytical services in the second semester of 2020. In addition, air quality testing services and work environment also had a fairly good contribution to revenue increase.

Profitability of Water Quality Laboratory Service Segment

Tabel Profitabilitas Segmen Jasa Laboratorium Kualitas Air Tahun 2021 - 2022

Table of Water Quality Laboratory Service Segment in 2021 - 2022

(dalam satuan sampel / in sample unit)

URAIAN Description	2022	2021	PERTUMBUHAN 2021-2022 Growth in 2021-2022	
			NOMINAL Nominal	%
Pendapatan Laboratorium / Laboratory Income	7.999	6.984	1.015	14,53
Beban Laboratorium / Laboratory Load	(9.155)	(7.268)	(1.887)	25,96
Laba/(Rugi) Operasi / Profit/(Loss) Operation	(1.156)	(284)	(872)	307,04
Profitabilitas / Profitability	(14,45%)	(4,07%)	-	(10,38%)



Pendapatan dari segmen Jasa Laboratorium Kualitas Air tahun 2022 berjumlah Rp7.999 juta dengan beban operasi sebesar Rp9.155 juta. Hal ini masih menunjukkan kerugian operasi sebesar 1.156 juta dengan profitabilitas minus 14,45%. Bila dibandingkan dengan tahun 2021, pendapatan Jasa Laboratorium Kualitas Air tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp1.015 juta atau 14,53%, meskipun beban Jasa Laboratorium Kualitas Air meningkat sebesar Rp1.887 juta atau 25,96%, setara dengan rugi operasi yang menurun sebesar Rp872 miliar atau 307,04%. Hal tersebut menyebabkan profitabilitas tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 10,38% dari sebelumnya minus 4,07% pada tahun 2021 menjadi minus 14,45% pada tahun 2022.

Air Minum dalam Kemasan (AMDK)

Deskripsi Usaha

Seiring peningkatan kebutuhan akan air minum, Perum Jasa Tirta II berkomitmen untuk menyediakan air minum bagi masyarakat yang berada di daerah pelayanan Perusahaan. Komitmen ini diwujudkan dalam penyediaan air baku untuk air minum dan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dengan merek "Jatiluhur Air Demineral".

Lokasi pengolahan AMDK dibangun pada Oktober 2009, kemudian pindah ke Desa Jatimekar, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada Juni 2012. Lokasi pengolahan AMDK diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan pada 29 Mei 2013.

AMDK Jatiluhur termasuk air minum Demineral dengan pH antara 5 – 7,5 dan TDS di bawah 10 mg/liter. AMDK Jatiluhur diproses dengan sistem *Reverse Osmosis* (RO), disterilisasi dengan *Ozon* (O₃) dan ultraviolet serta diproses lagi dengan *Biomagnetic* serta *Far Infrared* untuk mengubah ke molekul Hexagonal. Air Hexagonal adalah air dengan rangkaian molekul Hexagonal 6 (H₂O) yang identik dengan molekul cairan dalam sel tubuh manusia sehingga lebih mudah diserap sel-sel tubuh dan nutrisi serta oksigen akan lebih mudah terangkut. Target pasar Air Demineral Jatiluhur antara lain karyawan Perusahaan dan keluarganya, masyarakat yang berada di wilayah kerja Perusahaan, serta mitra/*stakeholders* Perusahaan.

Revenue from the Water Quality Laboratory Services segment in 2022 amounted to Rp7,999 million with an operating expense of Rp9,155 million. This still shows an operating loss of 1.156 million with a profitability of minus 14.45%. When compared to 2021, the revenue of Water Quality Laboratory Services in 2022 increased by Rp1.015 million or 14.53%, although the expenses for Water Quality Laboratory Services increased by Rp1,887 million or 25.96%, equal to operating losses decreased by Rp.872 billion or 307.04%. This caused profitability in 2022 to increase by 10.38% from minus 4.07% in 2021 to minus 14.45% in 2022.

Bottled Drinking Water

Business Description

Along with the increasing demand for drinking water, Perum Jasa Tirta II is committed to providing drinking water to communities in the Company's service areas. This commitment is realized in the provision of raw water for drinking water and Bottled Drinking Water (AMDK) under the brand "Jatiluhur Air Demineral".

AMDK processing location was built in Oc-tober 2009 before being relocated to Jatimekar Village, Jatiluhur District, Pur-wakarta Regency, West Java in June 2012. The location of AMDK processing was rati-fied by West Java Governor, Ahmad Heryawan, on May 29, 2013.

*AMDK Jatiluhur includes Demineral drinking water with PH between 5 - 7.5 and TDS below 10 mg/liter. AMDK Jatiluhur is processed by Reverse Osmosis (RO) system, sterilized with ozone (O₃) and ultraviolet and processed again with Biomagnetic and Far Infrared to convert to Hexagonal molecule. Hexagonal water is water with a series of Hexagonal 6 (H₂O) molecules that are identical to fluid molecules in humans' cells so that the water would be easier to absorb, and nutrients and oxygen would be easier to transport. Target markets of Air Demineral Jatiluhur, among others, are employees of the Company and their families, communities in the Company's work area and our partners/*stakeholders*.*



Produktivitas Segmen Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)

Realisasi produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) masih dibawah rencana produksi karena melemahnya kegiatan di sektor riil, adanya penerapan WFH di industri dan BUMN yang menjadi pelanggan AMDK.

Informasi perbandingan realisasi produksi AMDK tahun 2022 dengan RKAP 2022 dan realisasi tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel Produksi AMDK Tahun 2022
Table of AMDK Production in 2022

URAIAN <i>Description</i>	SATUAN <i>Unit</i>	RKAP 2022	REALISASI 2022 <i>Realization 2022</i>	REALISASI 2021 <i>Realization 2021</i>	% REALISASI TERHADAP <i>% Realization to</i>	
					RKAP 2022	REALISASI 2021 <i>Realization 2021</i>
1	2	3	4	5=3:2	6=3:4	7=4:5
Galon 19 Liter / 19 Liter Gallon	Galon / Gallon	193.853	147.484	151.097	76,08	-23,90
Botol 600 ml / 600 ml Bottle	Botol / Bottle	12.781	8.977	7.692	70,24	16,71
Botol 330 ml / 330 ml Bottle	Botol / Bottle	53.351	45.661	33.428	85,59	36,60
Gelas 240 ml / 240 ml Glass	Gelas / Glass	29.410	21.772	17.728	74,03	22,81

Realisasi produksi galon 19 liter tahun 2022 sebanyak 147.484 galon atau 76,08 % dari RKAP tahun 2022 sebanyak 193.853 galon dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebanyak 151.097 galon turun 23,90%. Tidak tercapainya produksi AMDK selain dikarenakan performa mesin yang belum maksimal juga sebagian besar pelanggan terkena dampak Covid-19.

Realisasi produksi botol 600 ml tahun 2022 sebanyak 8.977 dus atau 70,24 % dari RKAP tahun 2022 sebanyak 53.351 dus dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebanyak 7.692 dus naik 16,71 %.

Realisasi produksi botol 330 ml tahun 2022 sebanyak 45.661 dus atau 85,59 % dari RKAP tahun 2022 sebanyak 53.351 dus dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebanyak 33.428 dus naik 36,60%.

Realisasi produksi gelas 240 ml pada tahun 2022 sebanyak 21.772 dus atau 74,03 % dari RKAP tahun 2022 sebanyak 29.410 dus dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebanyak 17.728 dus naik 22,81 %.

Productivity of Bottled Drinking Water (AMDK) Segment

The realization of bottled drinking water production (bottled water) was still below the target due to less optimum machine's performance that was affected by uncomplete rehabilitation work of bottled water production machine.

Information on comparison of the realization of AMDK production in 2022 with the 2022 RKAP and the realization in 2021 is presented in the following table:

The realization of 19 liter gallon production in 2022 was 147,484 gallons or 76.08% of the 2022 RKAP of 193,853 gallons and when compared to the realization in 2021 of 151,097 gallons, it decreased by 23.90%. The unattainable production was not only due to engine performance that had not been maximized, but most of the customers were also affected by Covid-19.

The realization of 600 ml bottle production in 2022 was 8,977 boxes or 70.24% of the 2022 RKAP of 53,351 boxes and when compared to the realization in 2021 as many as 7,692 boxes, it increased by 16.71%.

The realization of 330 ml bottle production in 2022 was 45,661 boxes or 85.59% of the 2022 RKAP of 53,351 boxes and when compared to the realization in 2021, 33,428 boxes increased by 36.60%.

The realization of 240 ml glass production in 2022 was 21,772 boxes or 74.03% of the 2022 RKAP of 29,410 boxes and when compared to the realization in 2021 as many as 17,728 boxes, it increased by 22.81%.

Pendapatan Segmen Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)

Pada tahun 2022, Segmen Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) mencatatkan Pendapatan sebesar Rp2.732 juta, menurun Rp196 juta atau 6,68% bila dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp2.927 juta.

Revenue from Bottled Drinking Water (AMDK)

In 2022, the Bottled Drinking Water Segment (AMDK) recorded revenues of Rp2,732 million, a decrease of Rp196 million or 6.68% compared to 2021 of Rp2,927 million.

Profitabilitas Segmen Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)

Profitability of Bottled Drinking Water (AMDK) Segment

Tabel Profitabilitas Segmen Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Tahun 2021 – 2022
Table of Profitability of Bottled Drinking Water (AMDK) Segment in 2021 – 2022

(dalam juta Rupiah / in million rupiah)

URAIAN Description	2022	2021	PERTUMBUHAN 2021 - 2022 Growth in 2021 - 2022	
			NOMINAL Nominal	%
Pendapatan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) / Bottled Drinking Water (AMDK) Revenue	2.732	2.928	(196)	(6,69)
Beban Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) / Bottled Drinking Water (AMDK) Expenses	(4.688)	(5.690)	(1.002)	(17,61)
Rugi Operasi / Operating Loss	(1.956)	(2.762)	806	(29,18)
Profitabilitas / Profitability	(71,60%)	(94,33%)	-	22,73

Pendapatan dari segmen Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) tahun 2022 berjumlah Rp2.732 juta dengan beban operasi sebesar Rp4.688 juta sehingga menghasilkan rugi operasi sebesar Rp1.956 juta dan profitabilitas sebesar minus 71,60%. Bila dibandingkan dengan tahun 2021, pendapatan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp196 juta atau 6,69%, beban Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) menurun Rp1.002 juta atau 17,61%, dan rugi operasi menurun Rp806 juta atau 29,18%. Hal tersebut menyebabkan profitabilitas tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 22,73% dari sebelumnya minus 94,33% pada tahun 2021 menjadi minus 71,60% pada tahun 2022.

Revenues from the Bottled Drinking Water (AMDK) segment in 2022 amounted to Rp2,732 million with operating expenses of Rp4,688 billion, resulting in an operating loss of Rp1,956 million and profitability of minus 71.60%. Compared to 2021, the revenues of Bottled Drinking Water (AMDK) in 2022 decreased by Rp196 million or 6.69%, Bottled Drinking Water (AMDK) expenses decreased by Rp1.002 million or 17.61%, and operating losses decreased by Rp806 million or 29.18%. This caused profitability to increase in 2022 by 22.73% from minus 94.33% in 2021 to minus 71.60% in 2022.



KINERJA ANAK PERUSAHAAN

Subsidiary Performance

PT Jasa Tirta Luhur

PT Jasa Tirta Luhur bergerak dalam bidang jasa sistem penyediaan air minum dan konstruksi. Perusahaan ini telah beroperasi sejak 2018, berlokasi di Bekasi, dengan kepemilikan PJT II sebesar 99,00%.

PT Jasa Tirta Luhur

PT Jasa Tirta Luhur is engaged in the provision of water supply and construction services. The Company has been operating since 2018, located in Bekasi, with PJT II ownership of 99.00%.

Kinerja PT Jasa Tirta Luhur Tahun 2021

Performance of PT Jasa Tirta Luhur in 2021

(dalam juta Rupiah / in million rupiah)

URAIAN Description	2022	2021	PERTUMBUHAN 2021 - 2022 Growth in 2021 - 2022	
			NOMINAL Nominal	%
Jumlah Aset / Total Assets	60.461	49.603	10.858	122,89
Jumlah Liabilitas / Total Liabilities	43.509	28.464	15.045	152,86
Jumlah Ekuitas / Total Equity	17.112	21.139	(4.027)	(80,95)
Pendapatan Usaha / Revenues	33.899	25.102	8.797	135,05
Beban Pokok Pendapatan / Cost of Revenues	(32.554)	(23.179)	(9.375)	(140,45)
Laba (Rugi) Bruto / Gross Profit (Loss)	1.344	1.923	(579)	69,89
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan / Net Profit (Loss) for the Year	(4.005%)	(808%)	(3.197%)	(495,67%)

Pada tahun 2022, Pendapatan Usaha PT Jasa Tirta Luhur sebesar Rp33.899 juta meningkat 135.05% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp25.102 juta. Kenaikan Pendapatan Usaha diiringi dengan kenaikan Beban Pokok Pendapatan sebesar Rp32.554 juta, sehingga menghasilkan Laba Bruto dan Rugi Bersih Tahun Berjalan masing-masing sebesar Rp1.344 juta dan -Rp4.005 juta.

Jumlah Aset PT Jasa Tirta Luhur tahun 2022 tercatat sebesar Rp60.461 juta, Jumlah Liabilitas sebesar Rp43.509 juta, dan Jumlah Ekuitas sebesar Rp17.112 juta.

In 2022, Revenues of PT Jasa Tirta Luhur amounted to Rp33.899 million increased 135.05% compared to 2021 of Rp25.102 million. The increase in Revenues was accompanied by an increase in Cost of Revenues of Rp32.554 million, resulting in Gross Gain and Net Loss for the Year amounting to Rp1,344 million and -Rp4.005 million respectively.

Total Assets of PT Jasa Tirta Luhur in 2022 were recorded at Rp60,461 million, Total Liabilities amounted to Rp43,509 million, and Total Equity amounted to Rp17,112 million.



PT Tegar Mandiri Cemerlang

PT Tegar Mandiri Cemerlang merupakan entitas cucu yang bergerak di bidang jasa konsultan teknik (desain konstruksi fasilitas umum) dan telah beroperasi komersial sejak tahun 2018.

Kinerja PT Tegar Mandiri Cemerlang Tahun 2022 *Performance of PT Tegar Mandiri Cemerlang in 2022*

PT Tegar Mandiri Cemerlang

PT Tegar Mandiri Cemerlang is a second-tier subsidiary engaged in engineering consulting services (public facility construction design) and has been operating commercially since 2018.

(dalam juta Rupiah / *in million rupiah*)

URAIAN <i>Description</i>	2022	2021	PERTUMBUHAN 2021 - 2022 <i>Growth in 2021 - 2022</i>	
			NOMINAL <i>Nominal</i>	%
Jumlah Aset / <i>Total Assets</i>	52.421	49.603	2.818	5.68
Jumlah Liabilitas / <i>Total Liabilities</i>	35.382	28.463	6.919	24.31
Jumlah Ekuitas / <i>Total Equity</i>	52.421	49.603	2.818	5.68

Jumlah Aset PT Tegal Mandiri Cemerlang tahun 2022 tercatat sebesar Rp52.421 juta, Jumlah Liabilitas sebesar Rp35.382 juta, dan Jumlah Ekuitas sebesar Rp52.421 juta.

Total assets of PT Tegal Mandiri Cemerlang in 2022 was recorded at Rp52.421 million, total liabilities amounted to Rp35,382 million, and total equity amounted to Rp52,421 million.



TINJAUAN KEUANGAN

Financial Overview

Uraian mengenai kinerja keuangan ini disusun berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & rekan dengan opini wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perum Jasa Tirta II dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

This description of the financial performance was prepared based on the Company's Consolidated Financial Statements which have been audited by Amir Abadi Jusuf, Aryanto, n Mawar & rekan Public Accounting Firm with a fair opinion in all material respects, the consolidated financial position of Perum Jasa Tirta II and its subsidiaries dated December 31, 2020 and its financial performance and consolidated cash flows for the year ended on that date, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Laporan Posisi Keuangan

Financial Position Statements

Tabel Posisi Keuangan Tahun 2020 - 2022

Table of Financial Position in 2020 - 2022

(dalam juta Rupiah / in million rupiah)

URAIAN Description	2022	2021	2020	PERTUMBUHAN 2021 - 2022 Growth in 2021 - 2022	
				NOMINAL Nominal	%
Aset / Assets	1.913.416	1.689.754	1.539.735	223.662	13,24
Aset Lancar / Current Assets	939.123	747.880	774.163	191.243	25,57
Aset Tidak Lancar / Non Current Assets	974.294	941.874	765.572	32.420	3,44
Liabilitas / Liabilities	530.691	408.547	312.236	122.144	29,90
Liabilitas Jangka Pendek / Current Liabilities	231.385	169.711	147.645	61.674	36,34
Liabilitas Jangka Panjang / Non Current Liabilities	299.306	238.837	175.154	60.469	25,32
Ekuitas / Equity	1.382.726	1.281.207	1.216.935	101.519	7,92

Pada tahun 2022, Aset Perusahaan tercatat sebesar Rp1.913.416 juta, meningkat Rp223.662 juta atau 13,24% bila dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp1.689.754 juta. Liabilitas Perusahaan tercatat sebesar Rp530.691 juta, meningkat Rp122.144 juta atau 29,90% dari sebelumnya sebesar Rp408.547 juta pada tahun 2021. Ekuitas Perusahaan tercatat sebesar Rp1.382.726 juta, meningkat Rp101.519 juta atau 7,92% bila dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp1.281.207 juta.

In 2022, the Company's assets were recorded at Rp. 1,913,416 million, an increase of Rp. 223,662 million or 13.24% compared to 2021 of Rp. 1,689,754 million. The Company's liabilities were recorded at Rp.530,691 million, an increase of Rp.122,144 million or 29.90% from the previous Rp.408,547 million in 2021. The Company's equity was recorded at Rp.1,382,726 million, an increase of Rp.101,519 million or 7.92% compared to the realization in 2021 amounting to Rp1,281,207 million.

Aset

Pada tahun 2022, jumlah Aset Perusahaan tercatat sebesar Rp1.913.416 juta yang terdiri dari 49,08% Aset Lancar dan 50,92% Aset Tidak Lancar. Nilai Jumlah Aset ini meningkat Rp223.662 juta atau 13,24% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp1.689.755 juta. Peningkatan Aset tersebut disebabkan karena kenaikan aset tidak lancar dari peningkatan aset tetap dan pajak dibayar di muka.

Aset Lancar

Tabel Aset Lancar Tahun 2020 - 2022
Table of Current Assets in 2020 - 2022

(dalam juta Rupiah / in million rupiah)

URAIAN Description	2022	2021	2020	PERTUMBUHAN 2021 - 2022 Growth in 2021 - 2022	
				NOMINAL Nominal	%
Kas dan Setara Kas / Cash and Cash Equivalents	567.815	452.331	518.162	115.484	25,53
Piutang Usaha / Trade Receivables	98.950	72.230	64.532	26.720	36,99
Aset Keuangan Lancar Lainnya / Other Current	701	781	2.901	(80)	(10,24)
Persediaan / Inventories	1.928	1.903	2.074	25	1,31
Biaya Dibayar di Muka dan Uang Muka / Prepaid Fees and Down Payment	7.155	8.467	20.915	(1.312)	(15,50)
Jumlah Aset Lancar / Total Current Assets	939.123	747.880	770.443	191.243	25,57%

Pada tahun 2022, Aset Lancar Perusahaan sebesar Rp939.123 juta, meningkat 25,57% atau setara dengan Rp191.243 juta bila dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp747.880 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya pos jumlah kas dan setara kas sebesar 25,53% atau setara dengan Rp115.484 juta dan piutang usaha sebesar 27,12% atau setara dengan Rp77.125 juta.

Asset

In 2022, the total assets of the Company were recorded at Rp1,913,416 million, consisting of 49.08% of Current Assets and 50.92% of Non-Current Assets. The value of these Assets increased by Rp223,662 million or 13.24% compared to 2021 amounting to Rp1,689,755 million. The increase in assets was due to an increase in non-current assets from an increase in fixed assets and prepaid taxes.

Current Assets

In 2022, the Company's Current Assets reached Rp939,123 million, an increase of 25.57% or equivalent to Rp191,243 million compared to 2021 of Rp747,243 million. The increase was mainly due to increase in the amount of cash and cash equivalents by 25.53% or equivalent to Rp115,484 million and trade receivables by 27.12% or equivalent to Rp77.125 million.



Kas dan Setara Kas

Cash and Cash Equivalent

Tabel Kas dan Setara Kas Tahun 2021 - 2022
Table of Cash and Cash Equivalent in 2021 - 2022

(dalam juta Rupiah / in million rupiah)

URAIAN Description	2022	2021	PERTUMBUHAN 2021 - 2022 Growth in 2021 - 2022	
			NOMINAL Nominal	%
Kas dan Bank / Cash and Bank	107.815	42.331	65.484	154,70
Deposito Berjangka / Time Deposit	460.000	410.000	50.000	12,20
Jumlah / Total	567.815	452.331	115.484	25,53%

Kas dan Setara Kas pada tahun 2022 sebesar Rp567.815 juta, meningkat Rp115.484 juta atau 25,53% bila dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp452.331 juta. Meningkatnya kas dan setara kas disebabkan oleh kenaikan pos Kas dan Bank sebesar Rp65.484 juta atau 154,70%. Adapun deposito yang digunakan merupakan deposito yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehan.

Cash and Cash Equivalents in 2022 amounted to Rp567,815 million, an increase of Rp115,484 million or 25.53% compared to 2021 of Rp452,331 million. The increase in cash and cash equivalents was attributed to a increase in Cash and Bank account by Rp65,484 million or 154,70%. The deposits used are deposits that are due within three months or less from the date of acquisition.

Piutang Usaha

Pada tahun 2022, Piutang Usaha sebesar Rp98.950 juta, meningkat Rp26.720 juta atau 36,99% bila dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp72.230 juta. Disebabkan oleh kenaikan piutang usaha yang belum difakturkan.

Trade Receivables

In 2022, Trade Receivables amounted to Rp98,950 million, an increase of Rp26,720 million or 36.99% compared to 2021 amounting to Rp72,230 million. Caused by an increase in unbilled trade receivables.

Aset Keuangan Lancar Lainnya

Other Current Financial Assets

Tabel Aset Keuangan Lancar Lainnya Tahun 2021 - 2022
Table of Other Current Financial Assets in 2021 - 2022

(dalam juta Rupiah / in million rupiah)

URAIAN Description	2022	2021	PERTUMBUHAN 2021 - 2022 Growth in 2021 - 2022	
			NOMINAL Nominal	%
Entitas Induk / Holding	701	430	271	63.02
Entitas Anak / Subsidiary	-	350	(350)	(100.00)
Jumlah / Total	701	780	(79)	(10.13%)

Aset Keuangan Lancar Lainnya pada tahun 2022 sebesar 701 juta, menurun Rp79 juta atau 10,13% bila dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp780 juta. Penurunan ini disebabkan oleh piutang bunga deposito entitas induk perusahaan.

Other Current Financial Assets in 2022 amounted to 701 million, decreased by Rp79 million or 10.13% compared to 2021 of Rp780 million. This decrease was due to receivable interest of parent.

• Persediaan

• Inventories

Tabel Persediaan Tahun 2021 - 2022
Table of Inventories in 2021 - 2022

(dalam juta Rupiah / in million rupiah)

URAIAN Description	2022	2021	PERTUMBUHAN 2021 - 2022 Growth in 2021 - 2022	
			NOMINAL Nominal	%
Suku Cadang / Spareparts	747	747	0	0,00
Bahan Baku – AMDK / Raw Material – AMDK	610	449	161	35,86
Bahan Kimia / Chemicals	307	268	39	14,55
Bahan & Perlengkapan Lain / Material & Other Supplies	154	215	(61)	(28,37)
Bahan Farmasi / Pharmaceuticals	161	230	(69)	(30,00)
Barang Jadi – AMDK / Finished Goods – AMDK	32	120	(88)	(73,33%)
Bahan Makanan & Minuman / Food & Beverage	57	37	20	54,05
Bahan Perlengkapan Perhotelan / Hospitality Supplies	32	14	18	128,57
Bahan Perlengkapan Bar & Restoran / Bar & Restaurant Supplies	17	11	6	54,55
Provisi Penurunan Nilai / Provision of Impairment Value	(189)	(189)	0	0,00
Jumlah / Total	1.928	1.903	25	1,31%

Pada tahun 2022, Persediaan tercatat sebesar Rp1.928 juta, menurun Rp25 juta atau 1,31% bila dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp1.903 juta. Penurunan tersebut berasal pada bahan jadi AMDK, bahan kimia dan bahan perlengkapan lain, sisanya mengalami peningkatan. Manajemen berkeyakinan bahwa persediaan Perusahaan terletak pada beberapa lokasi, sehingga kemungkinan timbulnya kerugian dalam waktu yang bersamaan untuk beberapa lokasi adalah sangat kecil.

In 2022, Inventories were recorded at Rp1,928 million, a decrease of Rp25 million or 1.31% compared to 2021 which was Rp1,903 million. The decrease came from finished goods for bottled water, chemicals and material other supplies, the rest experienced an increase. Management believes that the Company's inventories are located in several locations, so the possibility of incurring losses at the same time for several locations is very small.

• Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka

• Prepaid Expenses and Advances

Tabel Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka Tahun 2021 - 2022
Table of Prepaid Expenses and Advances in 2021 - 2022

(dalam juta Rupiah / in million rupiah)

URAIAN Description	2022	2021	PERTUMBUHAN 2021 - 2022 Growth in 2021 - 2022	
			NOMINAL Nominal	%
Biaya Dibayar Dimuka / Prepaid Expenses	6.650	6.593	57	0,86
Uang Muka / Advances	505	1.874	(1.369)	(73,05)
Jumlah / Total	7.155	8.467	(1.312)	(15,50%)



Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka tahun 2022 tercatat sebesar Rp7.155 juta, menurun Rp1.312 juta atau 15,50% bila dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp8.467 juta.

Prepaid Expenses and Advances in 2022 were recorded at IDR 7,155 million, a decrease of IDR 1,312 million or 15.50% compared to 2021 of IDR 8,467 million.

Aset Tidak Lancar

Non-Current Assets

Tabel Aset Tidak Lancar Tahun 2020 - 2022

Table of Non Current Assets in 2020 - 2022

(dalam juta Rupiah / in million rupiah)

URAIAN Description	2022	2021	2020	PERTUMBUHAN 2021 - 2022 Growth in 2021 - 2022	
				NOMINAL Nominal	%
Aset Hak Guna / Rights of Used Assets	15.057	12.544	6.253	2.513	20,03
Aset Tetap / Fixed Assets	804.197	752.743	599.693	51.454	6,84
Aset Pajak Tangguhan / Deferred Tax Assets	97.494	74.712	57.433	22.782	30,49
Aset Tidak Lancar Lainnya / Other non Current Asset	221	221	221	0	0,00
Jumlah Aset Tidak Lancar / Total Other non Current Asset	974.294	941.874	762.633	32.420	3,44%

Pada tahun 2022, Aset Tidak Lancar tercatat sebesar Rp974.294 juta, meningkat Rp32.420 juta atau 3,44% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp941.874 juta. Peningkatan tersebut terutama berasal dari kenaikan seluruh komponen, yaitu Aset Hak Guna sebesar 20,03% atau setara dengan Rp2.513 juta, dan Aset Pajak Tangguhan sebesar 30,49% atau setara dengan Rp22.782 juta.

In 2022, Non Current Assets were recorded at Rp974.294 million, an increase of Rp32.420 million or 3.44% compared to 2021 of Rp941.874 million. The increase mainly came from the increase in all components, namely Rights of Used Assets of 20,03% or equivalent to Rp2,513 million, and Deferred Tax Assets of 30.49% or equivalent to Rp22,782 million.

• Aset Hak Guna

Aset hak guna merupakan dampak penerapan PSAK 73 yang berasal dari kegiatan sewa pembiayaan anak dan cucu perusahaan. Hal tersebut secara lebih rinci diungkapkan didalam catatan atas laporan keuangan kami.

• Right of Use Assets

Right to use assets is the impact of the implementation of PSAK 73 which is derived from the finance lease activities of the company's children and grandchildren. This is disclosed in more detail in the notes to our financial statements.

• Aset Tetap

Pada tahun 2022, Aset Tetap tercatat sebesar Rp804.197 juta, meningkat Rp51.454 juta atau 6,84% bila dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp752.743 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh penambahan sarana, suku cadang, instalasi & jaringan, alat angkut & alat berat, serta peralatan. Manajemen memiliki liabilitas dan aset kontijensi berupa tanah milik Perum Jasa Tirta II yang berlokasi di Ciganea dengan tanah pengganti yang terletak di Kampung Bongas yang hingga saat ini telah diselesaikan, sehingga tanah pengganti yang terletak di Kampung Bongas tercatat sebagai aset Perusahaan.

• Fixed Assets

In 2022, Fixed Assets were recorded at Rp804.197 million, an increase of Rp54.454 million or 6.84% compared to 2021 amounting to Rp752.743 million. The increase was due to the addition of facilities, spare parts, installations & networks, transportation & heavy equipment, and equipment. Management has contingent liabilities and assets in the form of land owned by Perum Jasa Tirta II, located in Ciganea with a replacement land located in Kampung Bongas, which currently has been settled, so that the replacement land located in Kampung Bongas was recorded as a Company asset.

• Aset Pajak Tangguhan

Pada tahun 2022, Aset Pajak Tangguhan sebesar Rp97.494 juta, meningkat Rp22.782 juta atau 30,49% bila dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp74.712 juta.

• Aset Tidak Lancar Lainnya

Pada tahun 2022, Aset Tidak Lancar Lainnya sebesar Rp221 juta, tidak ada perubahan bila dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp221 juta.

• Deferred Tax Assets

In 2021, Deferred Tax Assets amounted to Rp97,494 million, an increase of Rp22,782 million or 30.49% compared to 2021 amounting to Rp74,712 million.

• Other Non-Current Assets

In 2022, Other Non-Current Assets amounted to IDR 221 million, there was no change when compared to 2021 of IDR 221 million.

Liabilitas

Pada tahun 2022, jumlah Liabilitas Perusahaan tercatat sebesar Rp530,690 juta yang terdiri dari 43,61% Liabilitas Jangka Pendek dan 56,39% Liabilitas Jangka Panjang. Nilai Jumlah Liabilitas ini meningkat Rp122.043 juta atau 29,87% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp408.547 juta. Peningkatan Liabilitas tersebut terutama berasal dari liabilitas imbalan pasca kerja.

Liabilities

In 2022, the Company's liabilities were recorded at Rp530,690 million, consisting of 43.61% Current Liabilities and 56.39% Non Current Liabilities. Total Liabilities increase by Rp122,043 million or 29.87% compared to 2021 amounting to Rp408,547 million. The increase in liabilities mainly came from the post retirement liabilities.

Liabilitas Jangka Pendek

Current Liabilities

Tabel Liabilitas Jangka Pendek Tahun 2020 - 2022
Table of Current Liabilities in 2020 - 2022

(dalam juta Rupiah / in million rupiah)

URAIAN Description	2022	2021	2020	PERTUMBUHAN 2021 - 2022 Growth in 2021 - 2022	
				NOMINAL Nominal	%
Utang Usaha / Trade Payables	13.473	10.409	46.542	3.064	29,44
Beban Akrua / Accrued Expenses	71.777	37.483	21.378	34.294	91,49
Utang Pajak / Tax Payables	58.886	26.306	25.987	32.580	123,85
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya / Other Current Financial Liabilities	44.702	57.859	51.517	(13.157)	(22,74)
Liabilitas Kontrak Jangka Pendek / Short-term Contract Liabilities	6.160	6.023	356	137	2,27
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek / Total Current Liabilities	231.385	168.017	145.78	63.368	37,72%

Pada tahun 2022, Liabilitas Jangka Pendek Perusahaan sebesar Rp231.385 juta, meningkat 37,72% atau setara dengan Rp63.368 juta bila dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp168.017 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pada pos beban akrual sebesar 91,49% atau setara dengan Rp34.294 juta dan utang pajak sebesar 123,85% atau setara dengan Rp32.580 juta.

In 2022, the Company's Short-Term Liabilities amounted to Rp.231,385 million, an increase of 37.72% or equivalent to Rp.63,368 million compared to that of 2021 which was Rp.168,017 million. The increase was mainly due to an increase in accrued expenses liabilities by 91.49% or equivalent to Rp. 34,294 million and tax payables by 123.85% or equivalent to Rp. 32,580 million..



• Utang Usaha

• Trade Payables

Tabel Utang Usaha Tahun 2021 - 2022
Table of Trade Payables in 2021 - 2022

(dalam juta Rupiah / in million rupiah)

URAIAN Description	2022	2021	PERTUMBUHAN 2021 - 2022 Growth in 2021 - 2022	
			NOMINAL Nominal	%
Pihak Ketiga / Third Parties	8.361	8.361	3.507	72,25
Pihak Berelasi / Related Parties	5.112	5.112	(443)	(7,97)
Jumlah / Total	13.473	13.473	3.064	29,44%

Pada tahun 2022, Utang Usaha sebesar Rp13.473 juta, meningkat Rp3.064 juta atau 71,48% bila dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp10.409 juta. Kenaikan tersebut terutama berasal dari kenaikan utang usaha kepada pihak ketiga sebesar 72,25% atau setara dengan Rp3.507 juta.

In 2022, Trade Payables amounted to Rp13,473 million, an increase of Rp3,064 million or 29.44% compared to 2021 amounting to Rp10,409 million. The increase was mainly derived from an increase in trade payables to related parties by 72.25% or equivalent to Rp3,507 million.

• Beban Akrua

• Accrued Expenses

Tabel Beban Akrua Tahun 2021 - 2022
Table of Accrued Expenses in 2021 - 2022

(dalam juta Rupiah / in million rupiah)

URAIAN Description	2022	2021	PERTUMBUHAN 2021 - 2022 Growth in 2021 - 2022	
			NOMINAL Nominal	%
Beban Pegawai / Employee Expenses	61.254	22.505	(38.749)	172,18
Beban Non Pegawai / Non Employee Expenses	10.523	15.133	(4.610)	(30,46)
Jumlah / Total	71.777	37.638	(34.139)	90,70%

Pada tahun 2022, Beban Akrua sebesar Rp71.777 juta, meningkat Rp34.139 juta atau 90,70% bila dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp37.638 juta. Peningkatan tersebut terutama berasal dari bertambahnya beban pegawai yang masih harus dibayarkan per 31 Desember 2022.

In 2022, Accrued Expenses amounted to Rp71,777 million, an increase of Rp34,139 million or 90.70% compared to 2021 of Rp37,638 million. The increase was mainly due to the increase in employee expenses that was payable at December 31, 2022.

• Utang Pajak

Pada tahun 2022, Utang Pajak sebesar Rp58.886 juta, meningkat Rp32.580 juta atau 123,85% bila dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp26.306 juta. Peningkatan ini terutama berasal dari kenaikan Titipan PPN.

• Tax Payable

In 2022, tax payable amounted to Rp58,886 million, an increase of Rp32.580 million or 123.85% compared to 2021 amounting to Rp26,306 million. This increase was mainly derived from the increase in VAT.

• Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya

• Other Short-Term Financial Liabilities

Tabel Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya Tahun 2021 - 2022

Table of Other Short-Term Financial Liabilities in 2021 - 2022

(dalam juta Rupiah / in million rupiah)

URAIAN Description	2022	2021	PERTUMBUHAN 2021 - 2022 Growth in 2021 - 2022	
			NOMINAL Nominal	%
Utang Lain-lain / Other Payables	44.702	57.859	57.859	(22,74)
Pendapatan Diterima Dimuka / Prepaid Income	25.213	26.794	26.794	(5,90)
Jumlah / Total	69.915	84.653	84.653	(17,41%)

Pada tahun 2022, Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp69.915 juta, menurun Rp14.738 juta atau 17,41% bila dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp84.653 juta. Penurunan ini disebabkan dari Utang Lain-Lain sebesar -22,74%.

In 2022, Other Current Financial Liabilities amounted to Rp69.915 million, a decrease of Rp14,738 million or 17.41% compared to 2021 amounting to Rp84,653 million. This decrease was due to Other Debt of -22.74%.

Liabilitas Jangka Panjang

Non Current Liabilities

Tabel Liabilitas Jangka Panjang Tahun 2021 - 2022

Table of Non Current Liabilities in 2021 - 2022

(dalam juta Rupiah / in million rupiah)

URAIAN Description	2022	2021	PERTUMBUHAN 2021 - 2022 Growth in 2021 - 2022	
			NOMINAL Nominal	%
Utang Sewa Jangka Panjang / Long term lease debt	8.921	6.697	2.224	33,21
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja / Post Employment Benefits	280.486	211.054	69.432	32,90
Liabilitas Jangka Panjang Lainnya / Other Non Current Liabilities	10.830	11.930	(1.100)	(9,22)
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang / Total of Long-Term Liabilities	299.306	238.837	60.469	25,32%

Pada tahun 2022, Liabilitas Jangka Panjang Perusahaan sebesar Rp299.306 juta, meningkat 25,32% atau setara dengan Rp60.469 juta bila dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp238.837 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh liabilitas imbalan pasca kerja tahun 2022.

In 2022, the Company's Non Current Liabilities amounted to Rp299,306 million, an increase of 25.32% or equivalent to Rp60,469 million compared to 2021 amounting to Rp238,837 million. The increase was mainly due to the post employment benefits in 2022.



• Liabilitas Imbalan Pasca Kerja

Pada tahun 2022, Liabilitas Imbalan Pasca Kerja sebesar Rp280.486 juta, meningkat Rp69.432 juta atau 32,90% bila dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp211.054 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan kerugian aktuaria pembayaran imbalan yang digunakan aktuaris dalam menghitung liabilitas imbalan kerja.

• Liabilitas Jangka Panjang Lainnya

Pada tahun 2022, Liabilitas Jangka Panjang Lainnya sebesar Rp10.830 juta. Pencatatan Liabilitas Jangka Panjang Lainnya merupakan saldo reklasifikasi atas saldo utang usaha yang belum terselesaikan dan dilunaskan dalam siklus operasi normal.

• Post-Employment Benefits Liabilities

In 2022, Post-Employment Benefits Liabilities amounted to Rp280,486 million, increase by Rp69,432 million or 32.90% compared to 2021 of Rp211,054 million. This increase was mainly due to the increase in benefit payment loss used by actuaries in calculating employee benefit liabilities.

• Other Non Current Liabilities

In 2022, Other Non Current Liabilities amounted to Rp10,830 million. The recording of Other Non-Current Liabilities is a reclassification of the outstanding balance of trade payables that was not yet settled and paid in normal operating cycle.

Ekuitas

Equity

Tabel Ekuitas Tahun 2020 - 2022

Table of Equity in 2020 - 2022

(dalam juta Rupiah / in million rupiah)

URAIAN Description	2022	2021	2020	PERTUMBUHAN 2021 - 2022 Growth in 2021 - 2022	
				NOMINAL Nominal	%
Modal Pemerintah / Government Capital	164.548	164.548	164.548	0	0
Cadangan Umum / General Reserves	13.943	1.3943	13.943	0	0
Cadangan Bertujuan / Appropriated Reserves	102.7001	1.027.001	1.027.001	0	0
Komponen Ekuitas Lainnya / Other Equity Components	193.963	193.963	193.963	0	0
Saldo Laba / Retained Earnings	349.068	203.264	95.619	145.804	71,73
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk / Total Equity Attributable to Owners of Parent Entity	1.375.209	1.273.134	1.210.919	102.075	8,02
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non Pengendali / Total Equity Attributable to Non Controlling Interest	7.517	8.073	8.272	(556)	-6,89
Jumlah Ekuitas / Total Equity	1.382.726	1.281.207	1.220.840	101.519	7,92%

Pada tahun 2022, jumlah Ekuitas sebesar Rp1.382.726 juta, menurun Rp101.519 juta atau 7,92% bila dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp1.281.207 juta. Peningkatan tersebut berasal dari kenaikan Saldo Laba sebesar 71,73% atau setara dengan Rp145.804 juta dan kenaikan Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk sebesar 8,02% atau setara dengan Rp102.075 juta.

In 2022, total Equity is Rp1,382,726 million, an increase of Rp101,519 million or 7.92% when compared to 2021 which was Rp1,281,207 million. The increase came from an increase in retained earnings by 71.73% or equivalent to Rp145,804 million and an increase in Equity Attributable to Owners of the Parent Entity by 8.02% or equivalent to Rp102,075 million.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

Consolidated Statements Profit of Loss and Other Comprehensive Income

Tabel Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Tahun 2020 - 2022

Table of Consolidated Income and Other Comprehensive Income in 2020 - 2022

(dalam juta Rupiah / in million rupiah)

URAIAN Description	2022	2021	2020	PERTUMBUHAN 2021 - 2022 Growth in 2021 - 2022	
				NOMINAL Nominal	%
Pendapatan Usaha / Revenues	981.047	856.518	839.387	124.529	14,54
Beban Pokok / Cost of Goods Sale	(600.271)	(544.687)	(516.225)	55.584	10,20
Laba Kotor / Gross Profit	380.776	311.831	323.161	68.945	22,11
Laba Sebelum Pajak Penghasilan / Profit Before Income Tax	191.855	144.582	157.629	47.273	32,70
Beban Pajak / Tax Expenses	(46.607)	(37.135)	(44.394)	9.472	25,51
Laba Bersih Tahun Berjalan / Net Profit for the Year	145.248	107.446	113.235	37.802	35,18
Penghasilan Komprehensif Lain / Other Comprehensive Income	43.729	43.175	(62.055)	554	1,28
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan / Total Comprehensive Income for the Year	101.519	64.272	51.180	37.247	57,95%

Pada tahun 2022, Pendapatan Usaha sebesar Rp981.047 juta, meningkat Rp124.529 juta atau 14,54% bila dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp856.518 juta.

In 2022, Revenues amounted to Rp981,047 million, an increase of Rp124,529 million or 14.54% compared to 2021 amounting to Rp856,518 million.

Beban Pokok di tahun 2022 meningkat Rp55.564 juta atau 10,20% dari sebelumnya Rp544.687 juta pada tahun 2021 menjadi Rp600.271 juta pada tahun 2022.

Cost of Goods Sale in 2022 increased by Rp55,564 million or 10.20% from Rp544,687 million in 2021 to Rp600,271 million in 2022.

Sementara itu, Laba Bersih Tahun Berjalan di tahun 2022 sebesar Rp145.248 juta, naik Rp37.802 juta atau 35,18% bila dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp107.446 juta. Laba Komprehensif Tahun Berjalan tercatat sebesar Rp101.519 juta, meningkat 57,95% atau setara dengan Rp37.247 juta bila dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp64.272 juta.

Meanwhile, Net Profit for the Year in 2022 was Rp145,248 million, an increase of Rp37,802 million or 35.18% compared to 2021 amounting to Rp107,446 million. Comprehensive Income for the Year was recorded at Rp101,519 million, an increase of 57.95% or equivalent to Rp37,247 million compared to 2021 amounting to Rp64,272 million.



Pendapatan Usaha

Revenues

Tabel Pendapatan Usaha Tahun 2021 - 2022

Table of Revenues in 2021 - 2022

(dalam juta Rupiah / in million rupiah)

URAIAN Description	2022	2021	PERTUMBUHAN 2021 - 2022 Growth in 2021 - 2022	
			NOMINAL Nominal	%
Pendapatan Listrik / Electricity Revenues	493.119	454.556	38.563	8,48
Pendapatan Air Baku / Raw Water Revenues	368.008	292.436	75.572	25,84
Pendapatan Air Bersih / Clean Water Revenues	9.054	8.918	136	1,53
Pemanfaatan Lahan / Land Utilization	67.511	60.802	6.709	11,03
Pariwisata / Tourism	11.016	10.655	361	3,39
Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) / Bottled Drinking Water (AMDK)	2.732	2.928	(196)	(6,69)
Pendapatan Sewa / Rent revenues	38	128	(90)	(70,31)
Pendapatan Konstruksi / Construction Revenues	21.193	17.475	3.718	21,28
Laboratorium / Laboratory	7.999	6.984	1.015	14,53
Usaha Lainnya / Other Businesses	378	1.635	(1.257)	(76,88)
Jumlah / Total	981.047	856.518	124.529	14.54%

Beban Usaha

Operating Expenses

Tabel Beban Usaha Tahun 2021 - 2022

Table of Operating Expenses in 2021 - 2022

(dalam juta Rupiah / in million rupiah)

URAIAN Description	2022	2021	PERTUMBUHAN 2021 - 2022 Growth in 2021 - 2022	
			NOMINAL Nominal	%
Beban Listrik / Electricity Expenses	112.300	94.475	17.825	18,87
Beban Air Baku / Raw Water Expenses	404.471	383.371	21.100	5.50
Beban Air Bersih / Clean Water Expenses	10.936	9.800	1.136	11,59
Beban Pemanfaatan Lahan / Land Utilization Expenses	10.944	8.447	2.497	29,56
Beban Pariwisata / Tourism Expenses	26.489	18.687	7.802	41,75
Beban Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) / Bottled Drinking Water Expenses	4.688	5.690	(1.002)	(17,61)
Beban Laboratorium / Laboratory Expenses	9.155	7.268	1.887	25,96
Beban Konstruksi / Construction expenses	20.381	15.963	4.418	27,68
Beban Usaha Lainnya / Other Operating Expenses	906	987	(81)	(8,21)
Jumlah / Total	600.271	544.687	55.584	(10,20%)



Pada tahun 2022, Beban Usaha Perusahaan sebesar Rp600.271 juta, meningkat Rp55.584 juta atau setara dengan 10,20% bila dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp544.687 juta. Peningkatan ini berasal dari kenaikan Air Baku, Laboratorium dan Usaha Lainnya.

Laba Kotor

Pada tahun 2022, Perusahaan mencatatkan Laba Kotor sebesar Rp380.776 juta, naik Rp68.945 juta atau 22,11% bila dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp311.831 juta. Kenaikan ini sejalan dengan meningkatnya Pendapatan Usaha sebesar Rp124.529 juta atau 14,54% di tahun 2022.

Laba Sebelum Pajak Penghasilan

Pada tahun 2022, Perusahaan mencatatkan Laba Sebelum Pajak Penghasilan sebesar Rp191.855 juta, meningkat Rp47.273 juta atau 32,70% bila dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp144.582 juta.

Beban Pajak

Pada tahun 2022, Beban Pajak sebesar Rp46.607 juta, meningkat Rp9.472 juta atau 25,51% bila dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp37.135 juta.

Laba Bersih Tahun Berjalan

Pada tahun 2022, Laba Bersih Tahun Berjalan sebesar Rp145.248 juta, meningkat Rp37.802 juta atau 35,18% bila dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp107.446 juta.

Penghasilan Komprehensif Lain

Pada tahun 2022, Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan sebesar minus Rp43.729 juta, naik Rp554 juta atau 1,28% bila dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp-43.175 juta. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan keuntungan aktuarial tahun 2022 dan kenaikan pajak penghasilan terkait.

Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Pada tahun 2022, Laba Komprehensif Tahun Berjalan sebesar Rp101.519 juta, meningkat Rp37.247 juta atau 57,95% bila dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp64.272 juta. Peningkatan ini sejalan dengan naiknya Pendapatan Usaha sebesar 14,54% atau setara dengan Rp124.529 juta dan peningkatan Penghasilan Komprehensif Lain sebesar 1,28% atau setara dengan Rp554 juta.

In 2022, the Company's Operating Expenses amounted to Rp600,271 million, an increase of Rp55,584 million or equivalent to 10.20% when compared to 2021 which was Rp544,687 million. This increase came from the increase in Raw Water, Laboratories and Other Businesses.

Gross Profit

In 2022, the Company recorded Gross Profit of Rp380,776 million, an increase of Rp68,945 million or 22.11% compared to 2021 of Rp311,831 million. This increase was in line with the increasing in Revenues of Rp124,529 million or 14.54% in 2022.

Profit Before Income Tax

In 2022, the Company recorded Profit Before Income Tax of Rp191,855 million, an increase of Rp13,047 million or 32.70% compared to 2021 of Rp144,582 million.

Tax Expenses

In 2022, Tax Expense was Rp46,607 million, a increase of Rp9,472 million or 25.51% compared to 2021 which was Rp37,135 million.

Net Profit for the Year

In 2022, Net Profit for the Year amounted to Rp145,248 million, an increase of Rp37,802 million or 35.18% compared to 2021 amounting to Rp107,446 million.

Other Comprehensive Income

In 2022, Other Comprehensive Income for the Year amounted to minus Rp43,729 million, an increase of Rp554 million or 1.28% compared to 2021 of Rp43,175 million. This decrease was due to a decrease in actuarial gains in 2022 and an increase in the related income tax.

Comprehensive Income for the Year

In 2022, Comprehensive Income for the Year amounted to Rp101,519 million, an increase of Rp37,247 million or 57.95% compared to 2021 amounting to Rp64,272 million. This increase was in line with the increase in Revenues of 14.54% or equivalent to Rp124,529 million and Other Comprehensive Income of 1.28% or equivalent to Rp554 million.



LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

Consolidated Cash Flow Statements

Tabel Arus Kas Konsolidasian Tahun 2021 - 2022

Table of Consolidated Cash Flow in 2021 - 2022

(dalam juta Rupiah / in million rupiah)

URAIAN Description	2022	2021	PERTUMBUHAN 2021 - 2022 Growth in 2021 - 2022	
			NOMINAL Nominal	%
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi / Net Cash Flows from Operating Activities	236.735	112.562	12.173	110.32
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi / Net Cash Flows Used for Investing Activities	(113.663)	(169.713)	56.050	(33.03)
Arus Kas Bersih (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan / Net Cash Flows (Used for) Financing Activities	(7.587)	(8.681)	1.094	(12.60)
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas / Net Increase (Decrease) of Cash and Cash	115.484	(65.831)	(49.653)	75.42
Kas dan Setara Kas - Saldo Awal / Cash and Cash Equivalent - Beginning Balance	452.331	518.162	(65.831)	(12.70)
Kas dan Setara Kas - Saldo Akhir / Cash and Cash Equivalent - Ending Balance	567.815	452.331	115.484	25.53%

Pada tahun 2022, Perusahaan memperoleh arus kas bersih dari aktivitas operasional sebesar Rp236.735 juta, meningkat Rp12.173 juta atau 110,32% bila dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp.112.562 juta. Kenaikan ini disebabkan oleh faktor penurunan jumlah penerimaan dari pelanggan dan peningkatan pembayaran ke dewasa, direksi dan karyawan.

Arus kas bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi tahun 2022 tercatat sebesar Rp113.663 juta, menurun Rp56.050 juta atau 33,03% dari tahun 2021 sebesar Rp169.713 juta. Hal ini disebabkan oleh perolehan aset tetap.

Sementara Arus Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan sebesar Rp7.587 juta, menurun Rp1.094 juta atau 12,60% bila dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp8.681 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh pembayaran dividen yang diberikan kepada pemilik modal.

In 2022, the Company obtained net cash flow from operating activities of Rp236,735 million, an increase of Rp12,173 million or 110.315% compared to 2021 of Rp112,562 million. This increase was due to a decrease in total receipts from customers and an increasing payment to comisioners, directors, employees.

Net cash flow used for investing activities in 2022 was recorded at Rp113,663 million, decreased by Rp56,050 million or 33.03% from 2021 of Rp169,713 million. This was caused by a acquisition of fixed assets.

Meanwhile, Net Cash Flows Used for Financing Activities amounted to Rp7.587 million, an decrease of Rp1,094 million or 12.60% compared to 2021 amounting to Rp8,681 million. This increase was due to a dividend payments given to investors.



KEMAMPUAN MEMENUHI KEWAJIBAN, TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG, DAN PROFITABILITAS PERUSAHAAN

Ability To Meet Obligations, Receivables Collectibility Level, And Company Profitability

Selama tahun 2022, Perusahaan memiliki tingkat kemampuan untuk memenuhi kewajiban dengan baik. Hal ini terlihat dari rasio likuiditas dan solvabilitas Perusahaan. Tingkat kolektibilitas piutang meningkat dengan lebih cepatnya piutang tertagih, sedangkan profitabilitas perusahaan menurun dari tahun sebelumnya.

In 2022, the Company showed good ability to fulfill its obligations. This can be seen from the company's liquidity and solvency ratios. Receivables collectibility level increased in line with fast receivables collection, while the profitability of the company decreased from the previous year.

Kemampuan Memenuhi Kewajiban

Kemampuan memenuhi kewajiban Perusahaan untuk jangka pendek tercermin dalam rasio-rasio keuangan yang dimiliki. Likuiditas adalah rasio yang mencerminkan tentang kemampuan Perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset lancar yang dimiliki. Tingkat likuiditas tercermin dalam Rasio Kas dan Rasio Lancar. Sementara kemampuan untuk memenuhi kewajiban secara keseluruhan dicerminkan melalui rasio solvabilitas, yaitu Rasio Liabilitas terhadap Aset (DAR) dan Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (DER).

Ability to Meet Obligations

The ability to meet the Company's short-term obligations is reflected on its financial ratios. Liquidity is a ratio that reflects the Company's ability to meet short-term obligations with current assets owned. The level of liquidity is reflected on the Cash Ratio and Current Ratio. Meanwhile, generally, the ability to meet obligations is reflected on the solvency ratio, namely the Debt to Assets Ratio (DAR) and Debt to Equity Ratio (DER).

Rasio Likuiditas

Liquidity Ratio

Tabel Rasio Likuiditas Tahun 2020 – 2022

Table of Liquidity Ratio in 2020 – 2022

(dalam % / in %)

URAIAN / Description	2022	2021	2020
Rasio Kas / Cash Ratio	245,40	269,22	394,70
Rasio Lancar / Current Ratio	405,87	445,12	591,66



• Rasio Kas

Rasio Kas merupakan rasio yang menunjukkan posisi kas yang dapat menutupi utang lancar, dengan kata lain rasio kas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan kas yang dimiliki dalam manajemen kewajiban lancar pada tahun buku yang bersangkutan. Rasio Kas tahun 2022 sebesar 245,40%, menurun dibandingkan tahun 2021 sebesar 269,22%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan Perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan Kas dan Setara Kas menurun di tahun 2022.

• Rasio Lancar

Rasio merupakan perbandingan antara aktiva lancar dan kewajiban lancar dan merupakan ukuran yang paling umum digunakan untuk mengetahui kesanggupan suatu Perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio Lancar tahun 2022 sebesar 405,87%, lebih rendah dibandingkan tahun 2021 sebesar 445,12%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan Perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan Aset Lancar yang tersedia menurun di tahun 2022.

• Cash Ratio

Cash Ratio is a ratio that shows cash position that can cover current debt, in other words cash ratio is a ratio that illustrates the ability of cash held in the management of current liabilities in the financial year concerned. Cash Ratio in 2022 was recorded at 245.40%, an decrease compared to 2021 which was 269.22%. This shows that the Company's ability to settle its short-term obligations using Cash and Cash Equivalents decreased in 2022.

• Current Ratio

The ratio is the ratio between current assets and current liabilities and is the most commonly used measure to determine the ability of a company to meet its short-term liabilities. The Current Ratio in 2022 was 405.87%, lower than in 2021 of 445.12%. This shows that the Company's ability to pay its short-term obligations using available Current Assets decreased in 2022.

Rasio Solvabilitas

Perusahaan menggunakan Rasio Solvabilitas untuk mengukur jumlah Aset Perusahaan yang dibiayai oleh utang. Rasio Solvabilitas yang dipakai adalah Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (DER) dan Rasio Liabilitas terhadap Jumlah Aset (DAR).

Solvency Ratio

The Company uses Solvency Ratio to measure total Company Assets financed by debt. The solvency ratio used is Debt to Equity (DER) ratio and Debt to Total Assets (DAR) ratio.

Tabel Rasio Solvabilitas Tahun 2020 – 2022

Table of Solvability Ratio in 20120 – 2022

(dalam % / in %)

URAIAN / Description	2022	2021	2020
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (DER) / Liabilities/Debt to Equity Ratio	36,00	31,89	25,57
Rasio Liabilitas terhadap Jumlah Aset (DAR) / Liabilities /Debt to Asset Ratio	26,47	24,18	20,37



• Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (DER)

Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (DER) sampai dengan akhir tahun 2022 tercatat sebesar 36,00%, lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2022 yang tercatat sebesar 31,89%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan untuk membayar kewajiban perusahaan dengan menggunakan Ekuitas yang tersedia meningkat dari tahun 2022 dikarenakan risiko gagal bayar utang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya.

• Rasio Liabilitas terhadap Aset (DAR)

Rasio Liabilitas terhadap Aset (DAR) tahun 2022 tercatat sebesar 26,47%, lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 sebesar 24,18%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan membayar kewajiban perusahaan dengan menggunakan aset meningkat dari tahun 2022 dikarenakan risiko gagal bayar utang lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya.

• Liabilities/Debt to Equity (DER) ratio

The Liability/Debt to Equity (DER) ratio until the end of 2022 was recorded at 36.00%, higher compared to 2022 which was recorded at 31.89%. This shows that the Company's ability to pay company liabilities using available Equity is better than 2022 as default risk was higher than the previous year.

• Liabilities/Debt to Assets Ratio (DAR)

The Liability/Debt to Assets (DAR) ratio in 2022 was recorded at 26.47%, higher than in 2022 of 24.18%. This shows that the ability to pay company liabilities using assets is better than 2022 as default risk was smaller than the previous year.

Tingkat Kolektibilitas Piutang

Pengukuran tingkat kolektibilitas piutang Perum Jasa Tirta II dilakukan menggunakan rasio Perputaran Persediaan, Periode Penagihan, dan Perbandingan Modal Sendiri terhadap Total Ekuitas.

Receivable Collectability Rate

Measurement of receivables collectability rate of Perum Jasa Tirta II is carried out using Inventory Turnover ratio, Collection Period, and Ratio of Owned Capital to Total Equity.

Tabel Tingkat Kolektibilitas Piutang Tahun 2020 – 2022

Table of Receivables Collectability Rate in 2020 – 2022

(dalam % / in %)

URAIAN / Description	2022	2021	2020
Perputaran Persediaan (dalam satuan kali) / Inventory Turnover (in times)	1	1	1
Periode Penagihan (dalam satuan hari) / Collection Period (in day)	127	121	91
Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset (dalam %) / Equity to Total Assets Ratio (in %)	72,26	53,19	42,54

Perputaran Persediaan

Perputaran Persediaan adalah rasio yang digunakan untuk mengukur periode yang diperlukan dalam menjual persediaan Perusahaan. Rasio Perputaran Persediaan tahun 2022 adalah 1, sama dengan tahun 2021 dan 2020.

Inventory Turnover

Inventory Turnover is the ratio used to measure the period required to sell the Company's inventory. The Inventory Turnover Ratio in 2022 was 1, the same as 2021 and 2020.



Periode Penagihan

Periode Penagihan adalah rasio yang mengukur periode rata-rata yang diperlukan untuk mengumpulkan piutang (dalam satuan hari). Rasio Periode Penagihan tahun 2022 adalah 127 hari, lebih lambat dibandingkan tahun 2021 yang memakan waktu selama 121 hari.

Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset

Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset adalah rasio yang menunjukkan tingkat total aset yang dibiayai oleh modal sendiri. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset tahun 2022 adalah 54,43%, meningkat dari tahun 2021 sebesar 53,19%.

Profitabilitas Usaha

Profitabilitas usaha dihitung untuk mengukur kemampuan Perusahaan dalam meningkatkan keuntungan, juga untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai Perusahaan. Adapun perhitungan profitabilitas usaha menggunakan Rasio Imbalan kepada Pemilik Modal (*Return on Equity*), Imbalan Investasi (*Return on Investment*), dan Laba terhadap Aset (*Return on Asset*).

Collection Period

Collection Period is a ratio that measures the average period needed to collect receivables (in day). Collection Period Ratio in 2022 was 127 days, slower than in 2021 which was recorded at 121 days.

Equity to Total Assets Ratio

Equity to Total Assets ratio is a ratio that shows the level of total assets financed by equity. Equity to total assets ratio in 2022 was 54.43%, an increase from 2021 of 42.54%.

Profitability

Profitability is calculated to measure the Company's ability to increase profits as well as the level of business efficiency and profitability achieved by the Company. The calculation of profitability uses the Return on Equity, Return on Investment, and Return on Assets.

Tabel Profitabilitas Usaha Tahun 2020 – 2022

Table of Profitability in 2020 – 2022

(dalam % / in %)

URAIAN / Description	2022	2021	2020
Imbalan kepada Pemilik Modal (ROE) / <i>Return on Equity</i>	12,28	10,50	8,78
Imbalan Investasi (ROI) / <i>Return on Investment</i>	15,23	13,04	11,16
Imbalan Aset (ROA) / <i>Return on Asset</i>	10,03	8,56	9,32

Imbalan Kepada Pemilik Modal

Return on Equity (ROE) menunjukkan kemampuan dari modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan bagi seluruh Pemilik Modal. Pada tahun 2022, nilai ROE sebesar 12,28%, naik dibandingkan tahun 2021 sebesar 10,50%.

Return on Equity

Return on Equity (ROE) shows the ability of equity to generate profits for all Investorss. In 2022, the ROE value was 12.28%, a decrease compared to 2021 of 10.50%.

Imbalan Investasi

Return on Investment (ROI) menunjukkan kemampuan Perusahaan dalam mengelola investasi untuk menghasilkan laba. Pada tahun 2022, nilai ROI sebesar 15,23%, naik dibandingkan tahun 2021 sebesar 13,04%.

Return on Investment

Return on Investment (ROI) shows the ability of the Company to manage investments to generate profits. In 2022, the value of ROI was 15.23%, a increase compared to 2021 of 13.04%.



Imbalan Aset

Return on Asset (ROA) menunjukkan kemampuan Perusahaan dalam mengelola aset untuk menghasilkan laba. Pada tahun 2022, nilai ROA sebesar 10,03%, naik dibandingkan tahun 2021 sebesar 8,56%.

Dampak Perubahan Harga Terhadap Penjualan, Pendapatan Bersih dan Kinerja Perusahaan

Perusahaan tidak dipengaruhi oleh volatilitas harga-harga komoditas global dan perusahaan juga belum menerapkan kebijakan lindung nilai (*hedging*).

Oleh karena itu dampak perubahan harga komoditas tidak berpengaruh terhadap penjualan, pendapatan bersih dan kinerja perusahaan.

Return on Assets

Return on Assets (ROA) shows the ability of the Company to manage assets to generate profits. In 2021, the value of ROA was 8.56%, a decrease compared to 2020 of 9.32%.

Impact of Price Change on Sales, Net Revenue and Company Performance

The company is not affected by the volatility of global commodity prices and the company has not implemented a hedging policy.

Therefore, the impact of changes in commodity prices has no effect on sales, net income and company performance.

STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

Capital Structure and Management Policy on Capital Structure

Rincian Struktur Modal

Permodalan yang kuat sangat diperlukan untuk menunjang ekspansi bisnis dan mempertahankan pangsa pasar yang dimiliki. Struktur modal Perum Jasa Tirta II untuk tahun 2022 dapat terlihat dari jumlah Aset yang dibiayai melalui Liabilitas sebesar 27,74%. Porsi liabilitas dalam struktur modal Perusahaan mengalami peningkatan dari semula sebesar 24,18% pada tahun 2021 menjadi 27,74% pada tahun 2022.

Details of Capital Structure

Strong capital is required to support business expansion and maintain market share owned. The capital structure of Perum Jasa Tirta II for 2022 can be seen from the amount of assets financed through liabilities at 27.74%. The portion of liabilities in the Company's capital structure increased from originally 24.18% in 2021 to 27.74% in 2022.

Tabel Struktur Modal Tahun 2020 – 2022

Table of Capital Structure in 2020 – 2022

(dalam % / in %)

URAIAN / Description	2022	2021	2020
Liabilitas / Liabilities	27,74	24,18	20,37
Ekuitas / Equity	72,26	75,82	79,63
Aktiva / Assets	100,00	100,00	100,00

Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Manajemen secara aktif dan rutin menelaah dan mengelola permodalannya untuk memastikan struktur modal dan pengembalian yang optimal bagi Pemilik Modal dengan senantiasa mempertimbangkan efisiensi penggunaan modal berdasarkan arus kas operasi dan belanja modal serta mempertimbangkan kebutuhan modal di masa yang akan datang.

Management Policy on Capital Structure

The management actively and routinely reviews and manages its capital to ensure optimal capital structure and returns for the Investors by always considering the efficiency of capital use based on operating cash flow and capital expenditure as well as future capital requirements.



IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

Material Commitments for Capital Goods Investment

Berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Ekuitas, transaksi material diklasifikasikan sebagai transaksi yang bernilai di atas 20% ekuitas. Selama tahun 2019, Perusahaan tidak memiliki ikatan material untuk investasi barang modal dengan pihak mana pun.

Based on Bapepam-LK Regulation No. IX.E.2 concerning Material Transactions and Changes in Equity Activities, material transactions are classified as transactions with of above 20% of equity. During 2019, the Company did not have a material commitment for investment in capital goods with any party.

INVESTASI BARANG MODAL TAHUN 2022

Capital Goods Investment In 2022

Untuk meningkatkan kapasitas dan pelayanan konsumen, Perusahaan melakukan pengadaan barang modal yang dibukukan sebagai aset tetap. Sepanjang tahun 2022, Perusahaan memiliki investasi barang modal sebesar Rp1.451.642 juta yang terdiri dari tanah, sarana, bangunan, suku cadang, instalasi & jaringan, alat angkut & alat berat, perabot & peralatan, dan aset tanaman konservasi.

To improve capacity and customer service, the Company procures capital goods which are recorded as fixed assets. During 2022, the Company had capital goods investment of Rp1,451,642 million consisting of land, facilities, buildings, spare parts, installations & networks, transportation & heavy equipment, furniture & equipment, and conservation plant assets.

Tabel investasi Barang Modal Tahun 2022

Table of Capital Goods Investment in 2022

(dalam Juta Rupiah / in million Rupiah)

URAIAN / Description	SUMBER DANA Fund Source	MATA UANG Currency	NILAI Value *
Tanah / Land	Internal	Rupiah	23.491
Sarana / Facilities	Internal	Rupiah	22.337
Bangunan / Building	Internal	Rupiah	235.005
Suku Cadang / Spare Parts	Internal	Rupiah	3.828
Instalasi & Jaringan / Installation & Network	Internal	Rupiah	839.464
Alat Angkut & Alat Berat / Transportation & Heavy Equipment	Internal	Rupiah	121.404
Perabot & Peralatan / Furniture & equipment	Internal	Rupiah	206.113
Aset Tanaman Konservasi / Conservation Plant Assets	Internal	Rupiah	-
Nilai Buku / Book value			1.451.642

*) Catatan: Nilai Buku merupakan hasil biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
Note : Book Value is the result of acquisition cost less accumulated depreciation.

Tujuan investasi barang modal ini adalah untuk meningkatkan operasional layanan dan fasilitas pendukung guna mewujudkan layanan prima bagi pelanggan. Seluruh pengadaan barang modal tersebut menggunakan mata uang Rupiah sebagai alat pembayaran sehingga Perusahaan tidak memiliki risiko mata uang asing.

The purpose of this capital goods investment is to improve operational services and supporting facilities in order to provide excellent service for customers. All capital goods procurement uses the Rupiah currency as a means of payment so that the Company does not have foreign currency risk.



INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Material Information and Facts Subsequent To Reporting Date

Tidak ada peristiwa/kejadian penting setelah tanggal laporan posisi keuangan (neraca) konsolidasian yang berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

There are no important events / events after the date A consolidated statement of financial position (balance sheet) has a significant effect on financial statements consolidated as a whole.

KONTRIBUSI KEPADA NEGARA

Contribution to The Country

Selama tahun 2022, Perusahaan telah memenuhi seluruh kewajibannya sebagai wajib pajak badan. Adapun kontribusi pajak dari Perusahaan di tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

During 2021, the Company has fulfilled all of its obligations as a corporate taxpayer. The tax contributions from the Company in 2022 and 2021 are as follows:

Tabel Kontribusi Kepada negara (Pembayaran Pajak) Tahun 2021 – 2022

Table of Contribution to the Country (Tax Payment) in 2021 – 2022

URAIAN / Description	2022	2021
Kontribusi Pada negara (Pajak) / Contribution to the Country (Tax)		
Pajak Penghasilan (PPh) / Income Tax		
PPh Pasal 21 / Income Tax Article 21	21.468.455.316	18.762.597.331
PPh Pasal 22 / Income Tax Article 22	634.667.343	1.829.682.780
PPh Pasal 23 / Income Tax Article 23	1.389.876.416	1.987.330.955
PPh Pasal 4 ayat 2 / Income Tax Article 4 paragraph 2	4.738.048.414	3.246.370.859
PPh Pasal 25 / Income Tax Article 25	37.776.257.868	75.139.487.628
	72.007.305.357	100.965.469.553
Pajak Pertambahan nilai (PPn) / Value Added Tax (VAT)		
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) / Value Added Tax (VAT)	34.421.080.689	38.842.217.823
PPN Wajib Pungut / VAT Taxpayer	19.398.925.320	26.343.769.487
	53.820.006.009	65.185.987.310
Pajak Daerah / Regional Tax		
Pajak Penerangan Jalan (PPJ) / Street Lighting Tax	6.822.268.877	8.278.972.784
Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Pemakaian Sendiri / Self-use street lighting tax (PPJ)	246.111.010	227.817.806
Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Penduduk / Resident street lighting tax	38.481.049	35.875.439
Pajak Air Permukaan / Surface Water Tax	3.513.102.429	2.666.677.300
Pajak Hotel & Restoran / Hotel & Restaurant Tax	1.043.992.797	1.037.913.584
Pajak Bumi & Bangunan (PBB) / Land & Building Tax	8.560.505.205	8.449.560.759
	21.377.829.902	20.696.817.672



PROSPEK USAHA

Business Prospect

Perusahaan optimis bahwa prospek usaha industri listrik dan industri air masih terjaga dengan baik hingga tahun-tahun mendatang. Optimisme ini didukung oleh proyeksi pertumbuhan ekonomi global, nasional, dan industri yang sejalan pula dengan pertumbuhan jumlah penduduk.

Telah disepakatinya kesepakatan awal Fase I antara Amerika Serikat dan Tiongkok untuk menghentikan perang dagang diprediksi akan menjadi salah satu indikator global bagi Indonesia dalam menyambut prospek pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di tahun 2020. Hal tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang kemudian menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional di kisaran 5,4% - 6,0%. Pemerintah optimis bahwa target tersebut akan tercapai didorong oleh beberapa hal, seperti revitalisasi industri pengolahan, transformasi sektor pertanian, hilirisasi pertambangan, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan transformasi sektor jasa.

Sementara itu, prospek pertumbuhan industri listrik didukung oleh proyeksi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagaimana tertuang dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional Tahun 2019-2038 yang memproyeksikan rata-rata pertumbuhan kebutuhan energi listrik sekitar 6,9% per tahun. Hal tersebut diperkuat oleh pertumbuhan penjualan listrik oleh PT PLN (Persero) selaku pihak tersalur utama Perusahaan kepada pelanggan. Pertumbuhan ini diperkirakan akan tetap terjaga seiring dengan proyeksi pertumbuhan penduduk tiap tahun dan adanya potensi *demand* untuk sektor industri, rumah tangga, bisnis, publik, dan transportasi.

Sejalan dengan proyeksi pertumbuhan penduduk tiap tahunnya, maka kebutuhan akan air bersih, air minum dalam kemasan, dan air untuk pertanian cenderung meningkat sehingga mendorong terciptanya penyaluran air yang lebih besar dan luas. Data Proyeksi Penduduk Tahun 2010 - 2035 milik Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa jumlah penduduk diprediksi naik antara 3% - 7% setiap lima tahun. Dalam laporan tersebut, penduduk Indonesia pada tahun 2015 diprediksi berjumlah 256 juta jiwa, meningkat 6% hingga tahun 2020 menjadi 271 juta jiwa, meningkat 5% hingga tahun 2025 menjadi 285 juta jiwa, meningkat lagi 4% hingga tahun 2030 menjadi 296 juta jiwa, dan kembali meningkat 3% hingga akhir tahun 2035 menjadi 306 juta jiwa.

The Company is optimistic that business prospects of the electricity industry and the water industry continue to be bright for the upcoming years. This optimism is supported by projections of global, national and industrial economic growth that are in line with population growth.

The initial Phase I agreement between the United States and China to cease the trade war is predicted to be one of the global indicators for Indonesia in welcoming prospects for better economic growth in 2020. This is stated in the National Medium-Term Development Plan (RPJMN) 2020 - 2024 which targets national economic growth in the range of 5.4% - 6.0%. The government is optimistic that the target will be achieved as driven by several factors, such as revitalization of the manufacturing industry, transformation of the agricultural sector, downstream mining, sustainable infrastructure development and service sector transformation.

Meanwhile, growth prospects of the electricity industry are supported by the projections of the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) as stipulated in the 2019-2038 National Electricity General Plan which projects an average growth in electricity demand of approximately 6.9% per year. This is strengthened by the growth in electricity sales by PT PLN (Persero) as the Company's main channel to customers. This growth is expected to be maintained in line with the projected population growth each year and the potential demand for the industrial, household, business, public, and transportation sectors.

In line with the projected population growth each year, the needs for clean water, bottled drinking water, and water for agriculture tend to increase so that water is distributed in much greater amount and widely. According to Population Projection Data for 2010 - 2035 by the Statistics Indonesia, the population is predicted to increase between 3% - 7% every five years. In the report, Indonesia's population in 2015 is predicted to be 256 million people, increasing 6% until 2020 to 271 million people, increasing 5% until 2025 to 285 million people, increasing again 4% until 2030 to 296 million people, and again increasing 3% until the end of 2035 to 306 million people.

Data Proyeksi Penduduk 2010 – 2035

Population Projection Data for 2010 – 2035

DATA PENDUDUK / Population Data	2010	2015	2020	2025	2030	2035
Proyeksi Penduduk (dalam jutaan) Population Projection (in million)	239	256	271	285	296	306
Persentase Penduduk Daerah Perkotaan (%) Population Percentage in Urban Areas (%)	49,8	53,3	56,7	60,0	63,4	66,6

Data: Badan Pusat Statistik / Data: Statistics Indonesia)

Kenaikan persentase pertumbuhan penduduk daerah perkotaan turut mendukung kenaikan permintaan air bersih dan air minum. Selain didorong oleh pertumbuhan jumlah penduduk, tingkat ketersediaan air bersih di lingkungan sekitar, dan gaya hidup yang mengutamakan kepraktisan mendukung permintaan air minum dari perusahaan air minum (PAM) maupun permintaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) karena alasan kebersihan. Faktor pendukung lainnya seperti momen Ramadhan, Natal, dan Tahun Baru diprediksi menjadi momen andalan untuk menggenjot penjualan AMDK di setiap tahunnya. Meninjau faktor-faktor tersebut, Manajemen menilai bahwa prospek usaha Perusahaan di tahun 2022 dan tahun-tahun mendatang masih terjaga dengan baik.

The increase in the percentage of urban population growth contributed to the increase in demand for clean water and drinking water. Besides being supported by population growth, the level of availability of clean water in the surrounding environment, and lifestyles that prioritize practicality, support the demand for drinking water from drinking water companies (PAM) as well as requests for Bottled Drinking Water (AMDK) for hygiene reasons. Other supporting factors such as the moment of Ramadan, Christmas, and The New Year are predicted to be a mainstay moment to boost sales of bottled drinking water each year. In light of these factors, the Management considers that the Company's business prospects in 2022 and the coming years will continue to be bright.

PERBANDINGAN ANTARA PROYEKSI DAN REALISASI TAHUN 2022

Comparison Between 2022 Projection and Realization

Perusahaan telah menetapkan target yang ingin dicapai pada tahun buku 2022, khususnya untuk kinerja operasional dan keuangan pokok. Dalam pencapaiannya, Perusahaan senantiasa melakukan review terhadap target yang ditetapkan sesuai dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal Perusahaan.

The Company has set targets to be achieved in fiscal year 2022, particularly for operational and financial performance. In its achievement, the Company always reviews the targets set in accordance with the development of internal and external conditions of the Company.

Aspek Produksi

Capaian aspek produksi di sepanjang tahun 2022 menunjukkan hasil yang positif. Beberapa aspek produksi dapat mencapai 100% atau lebih, antara lain penyaluran air baku mencapai 103,08% dari target, produksi listrik mencapai 109,70 dari target, penyaluran air irigasi 150,73 dari target dan sampel laboratorium mencapai 110,88% dari target.

Production Aspects

Achievements of production aspects throughout 2022 showed positive results. Some aspects of production can reach 100% or more, i.e. raw water distribution reaching 103.08% of the target, electricity production reach 109,70 of the target, irrigation water distribution 150.73 of the target and laboratory samples reaching 110.88% of the target.

Informasi mengenai pencapaian aspek produksi dengan target RKAP tahun 2022 disajikan dalam tabel berikut:

Information on production aspect achievement against the 2022 RKAP target is presented in the following table:



Tabel Perbandingan antara Target dan Realisasi Aspek Produksi Tahun 2022
Table of Comparison between Target and Realization of Production Aspect in 2022

URAIAN Description	SATUAN Unit	REALISASI TAHUN 2022 / Realization in 2022	RKAP 2022	% PENCAPAIAN / % Achievement
Produksi listrik / Electricity production	kWh	1.011.905.000	922.406.389	109,70
Penyaluran air baku / Raw water distribution	Juta m ³	1.094.274.209	1.061.535.95	103,08
Penyaluran air baku ke PLTA / Raw water distribution to hydropower plant	kWh	5.271.014.902	1.538.213.858	342,67
Penyaluran air bersih / Clean water distribution	m ³	2.819.201	3.552.453	79,36
Penyaluran air irigasi / Irrigation water distribution	Juta m ³	7.870,70	5.221,83	150,73
Sampel laboratorium / Laboratory sample	Sampel	9.181	8.280	110,88
Pemanfaatan lahan / Land utilization				
Pertanian / Agriculture	Ha	3.396.125	3.580.823	94,84
Non Pertanian / Non Agriculture	Ha	2.855.941	2.636.075	108,34
Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) / Bottled Drinking Water				
Galon 19 liter / 19 liter Gallon	Galon	147.484	193.853	76,08
Botol 600 ml / 600 ml bottle	Dus	8.977	12.781	70,24
Botol 330 ml / 330 ml bottle	Dus	45.661	53.351	85,59
Gelas 240 ml / 240 ml bottle	Dus	21.772	53.351	74,03

Aspek Keuangan

Dari sisi Laporan Laba Rugi Konsolidasian, hampir seluruh komponennya belum mampu mencapai target RKAP tahun 2022. Perusahaan membukukan Pendapatan Usaha sebesar Rp1.012 miliar, terealisasi 110,84% dari RKAP Tahun 2022 sebesar Rp913,961,92 juta, laba kotor mencapai 106,20% dari target RKAP 2022, dan Laba Bersih Tahun Berjalan mencapai 100,92% dari target yang ditetapkan.

Dari sisi Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, realisasi Aset dan Liabilitas per 31 Desember 2022 masing-masing mencapai 106,71% dan 167,78% dari target RKAP tahun 2022. Sedangkan jumlah Ekuitas yang berhasil direalisasikan mencapai 93,63% dari target RKAP tahun 2022.

Financial Aspect

In terms of the Consolidated Income Statement, almost all of its components have not been able to achieve the 2022 RKAP target. The company posted Operating Revenues of Rp1.012 million, realized 110.84% of the 2022 RKAP of Rp913,961,92 million, gross profit reaching 106.20% of the 2022 RKAP target, and the Current Year Net Profit reaches 100.92% of the target set.

In terms of the Consolidated Financial Position Statements, the realization of Assets and Liabilities as of December 31, 2022 reached 106.71% and 167.78% of the 2022 RKAP target, respectively. Meanwhile the total realized Equity reached 93.63% of the 2022 RKAP target.



Tabel Perbandingan antara Target dan Realisasi Aspek Keuangan Tahun 2022
Table of Comparison between Target and Realization of Financial Aspect in 2022

URAIAN Description	REALISASI TAHUN 2022 / Realization in 2022	RKAP 2022	% PENCAPAIAN / % Achievement
Pendapatan Usaha / Revenue	981,05	902,76	108,67
Beban Pokok / Cost of Revenues	600,27	544,23	110,20
Laba Kotor / Gross Profit	380,76	358,53	106,20
Laba Sebelum Pajak / Profit Before Tax	191,86	164,48	116,64
Laba Tahun Berjalan / Profit for the Year	145,25	143,92	100,92
Jumlah Aset / Total Assets	1.913,42	1.793,15	106,71
Aset Lancar / Current Assets	939,12	570,98	164,47
Aset Tidak Lancar / Non Current Assets	974,29	1.222,17	79,72
Jumlah Liabilitas / Total Liabilities	530,69	316,29	167,78
Liabilitas Jangka Pendek / Current Liabilities	231,38	151,19	153,04
Liabilitas Jangka Panjang / Non Current Liabilities	299,31	165,10	181,29
Jumlah Ekuitas / Total Equity	1.382,73	1.476,15	93,63

PROYEKSI TAHUN 2023

Projection For 2023

Perusahaan telah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2023 sebagai acuan pokok Perusahaan dalam menjalankan aktivitas usahanya. Pencapaian target finansial untuk tahun 2023 didasarkan oleh berbagai asumsi kondisi internal dan eksternal yang dapat memengaruhi aktivitas Perusahaan.

The Company has prepared the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for 2023 as the main reference for the Company in carrying out its business activities. The achievement of financial targets for 2023 is based on various assumptions of internal and external conditions that may affect the Company's activities.

Kondisi internal

1. Stagnasi penerapan air baku oleh PDAM dan Industri, disebabkan oleh kegiatan pengembangan investasi IPA maupun jaringan pipa distribusi yang sangat rendah karena keterbatasan APBD, bukan berarti permintaan air bersih dari para pelanggan PDAM rendah.
2. Peningkatan pendapatan penjualan listrik PLTA Ir. H. Djuanda melalui porsi penjualan kepada pelanggan Non PLN diharapkan dapat tercapai di tahun 2022.
3. Tarif Jual Tenaga Listrik ke PT PLN (Persero) rata-rata sebesar Rp338,00/kWh (atau naik 2,42% dari asumsi tarif tahun 2020).
4. Tarif Jual Tenaga Listrik ke Pemakaian Sendiri rata-rata sebesar Rp825,00/kWh.
5. Tarif Jual Tenaga Listrik ke Industri/Swasta rata-rata sebesar Rp825,00/kWh (atau turun rata-rata sebesar 7% dari asumsi tarif 2019).

Internal conditions

1. *Stagnation in the application of raw water by PDAMs and industry, due to the very low WTP investment development activities and distribution pipelines due to budget constraints, does not mean that the demand for clean water from PDAM customers is low.*
2. *Increase in sales revenue of HEPP Ir. H. Djuanda through the portion of sales to Non PLN customers is expected to be achieved in 2022.*
3. *The average selling rate of electricity to PT PLN (Persero) is IDR 338.00/kWh (or an increase of 2.42% from the 2020 tariff assumption).*
4. *The average selling rate of electricity for own use is IDR 825.00/kWh.*
5. *The average selling rate of electricity to industry/private is IDR 825.00/kWh (or an average decrease of 7% from the 2019 tariff assumption).*



6. Tarif/Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air:
 - PAM Jaya sebesar Rp280,68/m³;
 - PDAM Kabupaten/Kota sebesar Rp130,81/m³;
 - Industri dan PT Sang Hyang Seri sebesar Rp224,71/m³;
7. Tarif/Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air ke PLTA:
 - BPJSDA PLTA Djuanda sebesar Rp85,28/kWh;
 - BPJSDA PLTA Saguling sebesar Rp14,01/kWh;
 - BPJSDA PLTA Cirata sebesar Rp45,69/kWh;
 - BPJSDA PLTA Rajamandala sebesar Rp5/kWh;
8. Tarif jual rata-rata Air Bersih adalah sebagai berikut:
 - Air Bersih Industri Rp7.311,45/m³;
 - Air Bersih Penduduk/Perumahan Rp1.818,00/m³;
 - Air Bersih curah Rp3.276,00/m³;
9. Tarif Jasa Laboratorium rata-rata sebesar Rp740.900/ sampel
10. Air Minum Dalam Kemasan (AMDK):
 - Galon 19 liter sebesar Rp12.000,00/galon;
 - Botol 600 ml sebesar Rp37.500,00/dus;
 - Botol 330 ml sebesar Rp32.000,00/dus;
 - Gelas 240 ml sebesar Rp20.000,00/dus.

Kondisi eksternal

1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2022 mengikuti asumsi ekonomi makro pada RAPBN tahun 2022 beserta Nota Keuangan yang disampaikan tanggal 16 Agustus 2021 dan perubahan asumsi kurs RAPBN 2021 dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI tanggal 16 Agustus 2021 serta tercantum dalam Aspirasi Pemegang Saham Tahun 2022, adalah sebagai berikut:
 - Pertumbuhan ekonomi 5,50%;
 - Tingkat laju inflasi kisaran 3,00%;
 - Nilai Tukar Rupiah sebesar Rp14.600/US\$;
 - Suku bunga SPN 3 bulan rata-rata 7,90%.
2. Menurut Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika (BMKG) bahwa awal musim hujan 2021 pada 36 Zona Musim (ZOM) Jawa, diperkirakan umumnya berkisar pada bulan Januari dan Februari 2022 dengan curah Bawah Normal (N) hingga Normal (N). Berdasarkan prakiraan tersebut, Simulasi Operasi Waduk Seri Citarum untuk tahun 2022 sebagaimana lampiran RKAP ini, dibuat dengan menggunakan asumsi- asumsi sebagai berikut:
 - Tingkat keandalan debit diklasifikasikan dalam kondisi normal, sehingga ditetapkan untuk pemberian air dari waduk Ir. H. Djuanda tahun 2020 pada posisi TMA awal ±93,19 dpl, dengan

6. *Tariffs/Fees for Water Resources Management Services:*
 - *PAM Jaya Rp280.68/m³;*
 - *Regency/City PDAMs amounting to Rp130.81/m³;*
 - *Industry and PT Sang Hyang Seri Rp224.71/m³;*
7. *Tariffs/Fees for Water Resources Management Services to HEPP:*
 - *BPJSDA PLTA Djuanda Rp85.28/kWh;*
 - *BPJSDA PLTA Saguling as much as Rp14.01/kWh;*
 - *BPJSDA PLTA Cirata amounting to Rp45.69/kWh;*
 - *BPJSDA PLTA Rajamandala amounting to Rp5/kWh;*
8. *The average selling rate of Clean Water is as follows:*
 - *Industrial Clean Water Rp.7,311.45/m³;*
 - *Residential/Housing Clean Water Rp.1,818.00/m³;*
 - *Clean water in bulk Rp3,276.00/m³;*
9. *The average laboratory service rate is IDR 740,900/ sample*
10. *Bottled Drinking Water (AMDK):*
 - *19 liter gallon of Rp. 12,000.00/gallon;*
 - *600 ml bottle for Rp.37,500.00/box;*
 - *330 ml bottle for IDR 32,000.00/box;*
 - *240 ml glass Rp. 20,000.00/box.*

External Conditions

1. *The preparation of the 2022 Work Plan and Corporate Budget (RKAP) follows the macro economic assumptions in the 2022 RAPBN along with the Financial Note submitted on 16 August 2021 and the change in the 2021 RAPBN exchange rate assumption at the Working Meeting of the Budget Board of the Republic of Indonesia on 16 August 2020 and is stated in the Aspirations of the Shareholders. Shares in 2022, are as follows:*
 - *5.50% economic growth;*
 - *The inflation rate is around 3.00%;*
 - *Rupiah Exchange Rate of Rp.14,600/US\$;*
 - *The average 3-month SPN interest rate is 7.90%.*
2. *According to the Meteorology, Climatology and Geophysics Agency (BMKG) that the start of the 2022 rainy season in the 36 Seasonal Zones (ZOM) of Java, it is generally predicted to range from January and February 2021 with Below Normal (N) to Normal (N) rainfall. Based on these forecasts, the Citarum Series Reservoir Operation Simulation for 2021 as attached to this RKAP was made using the following assumptions:*
 - *The level of discharge reliability is classified under normal conditions, so it is determined to provide water from the Ir. H. Djuanda in 2020 at the initial TMA position of ±93.19 above sea level,*



produksi listrik PLTA Ir. H. Djuanda sebesar 948,89 juta kWh dan 19,00 juta kWh untuk PLT Mini Hidro.

- Kebutuhan pengairan 2021 terpenuhi.
- Kebutuhan ketenagalistrikan di atas 80 MW setiap bulannya.
- Volume ketiga waduk menganut Equal Sharing.

with hydropower production of Ir. H. Djuanda of 948.89 million kWh and 19.00 million kWh for Mini Hydro PLT.

- 2021 irrigation needs are met.
- Electricity needs above 80 MW per month.
- The third volume of the reservoir adheres to Equal Sharing.

Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut, Perusahaan telah menetapkan target finansial untuk tahun buku 2022 sebagai berikut:

Based on these conditions, the Company has set financial targets for the 2022 financial year as follows:

Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dan Proyeksi Tahun 2023 Comparison between Realization in 2022 and Projection for 2023

URAIAN Description	REALISASI TAHUN 2022 / Realization in 2022	RKAP 2022	% PENCAPAIAN / % Achievement
Pendapatan Usaha / Revenue	981,05	929,70	105,52
Laba Bruto / Gross Profit	380,78	376,19	101,22
Laba Sebelum Pajak / Profit Before Tax	191,86	169,37	113,28
Laba Bersih Tahun Berjalan / Profit for the Year	145,25	132,11	109,95
Aset / Assets	1.913,42	1.969,50	97,15
Liabilitas / Liabilities	530,69	440,57	120,46
Ekuitas / Equity	1.382,75	1.528,93	90,44

ASPEK PEMASARAN Marketing Aspect

Pangsa Pasar

Listrik

Sampai dengan tahun 2022, pembeli listrik PLTA masih didominasi oleh PT PLN (Persero). Namun, Perusahaan terus berupaya memberikan pasokan listrik kepada pelanggan non-PLN di sekitar wilayah Jatiluhur sebagai upaya diversifikasi pelanggan dengan memperhatikan serta mengupayakan perijinan baru sesuai ketentuan yang berlaku.

Air Baku dan Air Bersih

Sampai dengan tahun 2022, pertumbuhan permintaan pemanfaatan Air Baku dari industri mengalami stagnasi, tetapi di sisi lain permintaan pemenuhan kebutuhan air bersih terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan terbukanya peluang kerja sama dengan pihak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai penyedia Air Bersih.

Market Share

Electricity

Until 2022, Hydropower Plant power buyers were still dominated by PT PLN (Persero), but the Company continued providing electricity to non-PLN customers around the Jatiluhur as customer diversification effort by paying attention and seeking new licenses according to the provisions.

Raw Water and Clean Water

Until 2022, demand growth for Raw Water Utilization from industry has stagnated but on the other hand demand for water supply kept increasing along with population growth and the opening of opportunity to cooperate with PDAM as a provider of Clean Water.



Jasa Laboratorium

Pengguna Jasa Laboratorium adalah industri, PDAM dan Instansi Pemerintah di wilayah kerja PJT II. Perusahaan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas Laboratorium dan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah setempat. Sampai dengan tahun 2022, penetrasi pasar untuk segmen jasa laboratorium dikhususkan ke beberapa industri guna menambah pengguna jasa laboratorium. Adapun sampai dengan akhir tahun 2022, terdapat 7.999 sampel yang diuji di Laboratorium PJT II, meningkat 14,53% dibandingkan tahun 2022 sebanyak 6.984 sampel.

Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)

Pangsa pasar produk AMDK adalah Industri, Perorangan dan Instansi Pemerintah di wilayah kerja PJT II. Perusahaan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas AMDK dan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah setempat. Pada tahun 2022, penetrasi pasar untuk segmen AMDK dilakukan melalui penguatan sinergi BUMN untuk membuka pasar di tengah maraknya merek-merek AMDK yang terlebih dahulu beredar di masyarakat.

Kepariwisata

Pengguna jasa Pariwisata di kawasan waduk Jatiluhur adalah Industri, masyarakat umum, dan Instansi Pemerintah di wilayah kerja PJT II. Perusahaan terus berupaya untuk meningkatkan daya tarik kawasan pariwisata Jatiluhur dengan mengikutsertakan peran pihak-pihak swasta dalam pemasarannya.

Pemanfaatan Lahan

Sampai dengan tahun 2022, pangsa pasar pemanfaatan lahan dibagi ke dalam dua kategori, yaitu pemanfaatan lahan untuk pertanian dan pemanfaatan lahan untuk kegiatan non pertanian. Pengguna lahan milik PJT II masih didominasi oleh Industri, PDAM, Perorangan, dan Instansi Pemerintah di wilayah kerja PJT II. Perusahaan terus berupaya untuk meningkatkan penatagunaan lahan sesuai peruntukan, seperti optimalisasi pengusahaan dan peruntukan lainnya.

Strategi Pemasaran

Perusahaan melakukan berbagai kegiatan pemasaran menyesuaikan dengan kondisi pandemi covid-19 dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan (untuk paragraf pembuka) serta bekerja sama dengan instansi terkait. Berikut adalah strategi dan kegiatan pemasaran yang dilakukan selama tahun 2022:

1. Pariwisata
 - a. Digital Marketing
 - b. Kolaborasi dengan ekosistem pariwisata
 - c. Infrastruktur IT untuk Pariwisata
 - d. Upgrading bisnis proses Pariwisata berbasis IT

Laboratory Services

Users of Laboratory Services were industry, PDAM and Government Institutions in PJT II working area. However, the Company continuously managed to improve the quality of laboratory and cooperate with local government. Until 2022, market penetration conducted by laboratories to several industrial areas could increase laboratory service users. As of the end of 2022, there were 7,999 samples tested in the Laboratory of PJT II, an increase of 14.53% compared to 6,984 in 2022.

Bottled Drinking Water (AMDK)

The market share of AMDK products are Industry, Individual and Government Institution in PJT II working area. However, the Company has continuously worked to improve the quality of AMDK and worked with local governments. Until 2022, the market penetration made by AMDK segment through the synergy of SOEs was an effort to open the market amid the rise of AMDK brands that have been circulating in the community.

Tourism

Users of Tourism Services in Jatiluhur reservoir area are Industry, general public, and Government Institution in PJT II working area. However, the Company continues to increase the attractiveness of Jatiluhur tourism area by involving the private sector in its marketing activities.

Land Utilization

Until 2022, the market share of land use was divided into two categories: land use for agriculture and land use for non-agricultural activities. Land users belonging to PJT II were still dominated by Industrial, PDAM, Individual, and Government Institution in PJT II working area. However, the Company managed to continuously improve the stewardship of the land according to designation such as for the optimization of the business.

Marketing Strategy

The company carries out various marketing activities with presentations, promotions, exhibitions, making booklets and leaflets or information to various parties and cooperating with relevant agencies. The following are strategies and marketing activities carried out during 2022 :

1. Tourism
 - a. Digital Marketing
 - b. Collaboration with the tourism ecosystem
 - c. IT Infrastructure for Tourism
 - d. IT-based Tourism business process upgrading



- e. Penerapan *Cashless Payment*
- f. Pemenuhan Sertifikasi kesiapan *New Normal (Safeguard)*
- g. Standarisasi Hospitality (SDM & Infrastruktur)
- h. Sertifikasi Hotel Bintang
2. AMDK
 - a. Pemasaran akan dilakukan dengan menambah/ meningkatkan target pemasaran yang sudah ada (intensifikasi) di kab. Purwakarta, Subang dan Karawang (Purwasuka) dan Jabodetabek dengan pendekatan agen-agen loyal.
 - b. Melakukan ekspansi pemasaran ke pelanggan-pelanggan baru (ekstensifikasi) antar lain Pemda Kab. Purwakarta, Subang Karawang, Bekasi dan Kota Bekasi yang menjadi jalur distribusi eksisting.
 - c. Melakukan ekspansi ke BUMN-BUMN Karya (Konstruksi) dan lainnya, serta Kementrian/ Lembaga/Badan di Jakarta. Mengingat terdapat agen/gudang milik PJT II di Jakarta (Cempaka Putih).
3. Laboratorium
Mengembangkan pasar dengan melakukan pendekatan ke Lab-Lab milik Pemda. Kab/Koat untuk menerima kelebihan/limpasan *sample* yang tidak dapat dilaksanakan antara lain Lab. Dinas LH Kab. Purwakarta, Subang, Karang, Bekasi, Kota Bekasi dan DKI yang satu jalur dengan pelanggan yang ada saat ini (untuk efisiensi beban sampling).
4. Penfaatan lahan
 - a. Mengadakan evaluasi atas perpanjangan izin pemanfaatan lahan;
 - b. Pemasangan patok dan papan larangan;
 - c. Mengadakan pengukuran, pemetaan, dan pencatatan lahan;
 - d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk reinventarisasi;
 - e. Membuat skala prioritas penyelesaian masalah;
 - f. Selektif dengan memperhatikan lingkungan; dan
 - g. Pembuatan sertifikat lahan.

- e. *Application of Cashless Payment*
- f. *Fulfillment of New Normal readiness certification (Safeguard)*
- g. *Hospitality Standardization (HR & Infrastructure)*
- h. *Star Hotel Certification*
2. AMDK
 - a. *Marketing will be done by adding/increasing the existing marketing targets (intensification) in the district. Purwakarta, Subang and Karawang (Purwasuka) and Jabodetabek with loyal agents approach.*
 - b. *Expansion of marketing to new customers (extensification) including the Regional Government of Kab. Purwakarta, Subang Karawang, Bekasi and Bekasi City which are the existing distribution channels.*
 - c. *Expansion to BUMN-BUMN Karya (Construction) and others, as well as Ministries/Institutions/ Agencies in Jakarta. Considering that there is an agent/warehouse owned by PJT II in Jakarta (Cempaka Putih).*
3. Laboratory
Develop Padar by approaching the Labs owned by the Regional Government. District/Koat to receive excess/runoff samples that cannot be implemented include Lab. District LH Department. Purwakarta, Subang, Karang, Bekasi, Kota Bekasi and DKI are in the same line with existing customers (for sampling load efficiency).
4. Land use
 - a. *Conduct an evaluation of the extension of the land use permit;*
 - b. *Installation of stakes and prohibition boards;*
 - c. *Carry out land measurement, mapping, and recording;*
 - d. *Carry out coordination with relevant agencies for reinventory;*
 - e. *Making a priority scale for problem solving;*
 - f. *Selective with regard to the environment; and*
 - g. *Making land certificates.*

KEBIJAKAN DIVIDEN

Dividends Policy

Maksud dan tujuan Perusahaan adalah turut melaksanakan dan menunjang kebijakan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, terutama di bidang Pengusahaan dan Pengelolaan Sumber Daya Air serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.

The purpose and objectives of the Company are to participate in implementing and supporting Government program policies in the field of economy and national development in general, especially in the field of Business and Water Resources Management and optimizing the utilization of Company resources to produce goods and services based on the principles of sound company management.



Berdasarkan maksud dan tujuan tersebut, operasi Perusahaan turut diorientasikan pada perolehan laba guna meningkatkan nilai bagi Pemilik Modal dengan tetap memperhatikan efektivitas operasi dan efisiensi beban sehingga dapat menghasilkan laba yang dapat didistribusikan kepada Pemilik Modal dalam bentuk dividen.

Based on the said aims and objectives, the Company's operations are also oriented towards earning profits in order to increase the value of the Capital Owners while still taking into account the effectiveness of operations and expenses efficiency to generate profits that can be distributed to the Capital Owners in the form of dividends.

Tabel Dividen 5 (Lima) Tahun Terakhir
Dividend Table for the Last 5 (Five) Years

DATA PENDUDUK / Population Date	2020	2019	2018	2017	2016
Laba Bersih (Rp juta) / Net Profit (Rp million)	145,25	107.446	113.235	166.596	174.551
Dividen (Rp juta) / Dividends (Rp million)	-	-	20.764	41.649	17.455
Rasio Dividen / Dividend Ratio	-	-	13,5%	40%	10%
Tanggal Pengumuman Dividen / Dividend Announcement Date	-	-	26 Juni 2020 / June 26, 2020	07 Mei 2019 / May 07, 2019	04 Mei 2018 / May 30, 2017
Tanggal Pembayaran Dividen / Dividend Payment Date	-	-	22 Juli 2020 / July 22, 2020	29 Mei 2019 / May 16, 2018	16 Mei 2018 / June 08, 2017

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN MANAJEMEN (MESOP)

Management and Employee Share Ownership Program (Mesop)

Perusahaan Umum yang selanjutnya disebut PERUM adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 di mana seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham. Oleh karena itu, Perum Jasa Tirta II tidak memiliki program tersebut.

Public Company, hereinafter referred to as PERUM, is a State-Owned Enterprise as regulated in Law No. 19 of 2003 in which the entire capital is owned by the State and not divided into shares. Therefore, Perum Jasa Tirta II does not have such program.

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Realization of The Use of Proceeds From Public Offering

Sebagai Perusahaan Umum, Perum Jasa Tirta II tidak melakukan aktivitas terkait penawaran umum di Bursa Efek Indonesia sehingga tidak ada informasi terkait dengan perolehan dana, rencana penggunaan dana, saldo dana, dan tanggal persetujuan RUPS atas penggunaan dana dari hasil penawaran umum.

As a Public Company, Perum Jasa Tirta II does not conduct activities related to public offerings on the Indonesia Stock Exchange, therefore, there is no information related to the acquisition of funds, planned use of funds, balance of funds, and the date of AGMS approval for the use of funds from the public offering.



INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN/PELEBURAN USAHA, AKUISISI DAN RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL

Material Information Regarding Investment, Expansion, Divestment, Business Merger/Consolidation, Acquisition and Restructuring of Debt/Capital

Investasi

Sampai dengan 31 Desember 2022, investasi Perusahaan diwujudkan melalui pendirian Anak Perusahaan dan Cucu Perusahaan, dengan rincian kepemilikan sebagai berikut:

NO.	ANAK PERUSAHAAN / Subsidiary	KEPEMILIKAN / Ownership	LEMBAR SAHAM / Shares
1.	PT Jasa Tirta Luhur	99% (Kepemilikan Langsung)	Rp19.800.000.000
2.	PT Tegar Mandiri Cemerlang	51% (Kepemilikan Tidak Langsung)	Rp10.800.000.000

Investment

As of December 31, 2022, the Company's investment was realized through the establishment of Subsidiaries, with ownership details as follows:

Ekspansi

Sampai dengan 31 Desember 2022, Perusahaan tidak melakukan ekspansi sehingga tidak terdapat informasi terkait ekspansi yang relevan untuk diungkapkan.

Expansion

As of December 31, 2022, the Company did not conduct an expansion, thus, there was no relevant expansion-related information to be disclosed.

Divestasi

Sampai dengan 31 Desember 2022, Perusahaan tidak melakukan divestasi sehingga tidak terdapat informasi terkait divestasi yang relevan untuk diungkapkan.

Divestment

As of December 31, 2022, the Company did not conduct a divestment, thus, there was no relevant divestment-related information to be disclosed.

Penggabungan/Peleburan usaha

Sampai dengan 31 Desember 2022, Perusahaan tidak melakukan penggabungan/peleburan usaha sehingga tidak terdapat informasi terkait penggabungan/peleburan usaha yang relevan untuk diungkapkan.

Business Merger/Consolidation

As of December 31, 2022 the Company did not conduct a business merger/consolidation, thus, there was no relevant business merger/consolidation-related information to be disclosed.

Akuisisi

Sampai dengan 31 Desember 2022, Perusahaan tidak melakukan akuisisi sehingga tidak terdapat informasi terkait akuisisi yang relevan untuk diungkapkan.

Acquisition

As of December 31, 2022, the Company did not conduct an acquisition, thus, there was no relevant acquisition-related information to be disclosed.



Restrukturisasi utang/Modal

Sampai dengan 31 Desember 2022, Perusahaan tidak melakukan restrukturisasi utang/modal sehingga tidak terdapat informasi terkait restrukturisasi utang/modal yang relevan untuk diungkapkan.

Debt/Capital Restructuring

As of December 31, 2022, the Company did not conduct debt/capital restructuring, thus, there was no relevant debt/ capital restructuring-related information to be disclosed

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI/ PIHAK BERELASI

Information On Material Transactions That Contain Conflict of Interest and / or Transactions with Affiliated Parties / Related Parties

Sepanjang tahun 2022, Perusahaan telah melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK No. 7 (Penyesuaian 2015), tentang Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi. Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

- a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor, jika orang tersebut:
 - 1) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - 2) Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - 3) Personal manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
- b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - 1) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya).
 - 2) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - 3) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - 4) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - 5) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.

Throughout 2022 the Company has conducted transactions with related parties as defined in PSAK No. 7 (2015 improvement), concerning Disclosure of Related Parties. A related party is a person or entity that is related to the reporting entity:

- a. *A person or a close member of that person's family is related to the reporting entity if that person:*
 - 1) *Has control or joint control over the reporting entity;*
 - 2) *Has significant influence over the reporting entity;*
 - 3) *Is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.*
- b. *An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:*
 - 1) *The entity, and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).*
 - 2) *One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).*
 - 3) *Both entities are joint venture of the same third party.*
 - 4) *One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.*
 - 5) *The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity, or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.*

- 6) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam butir a.
- 7) Orang yang diidentifikasi dalam butir a, angka 1) memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
- 8) Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

6) *The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).*

7) *A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity)*

8) *The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.*

Transaksi signifikan yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan konsolidasian.

Significant transactions with related parties, whether or not made at similar terms and conditions as those done with third parties, are disclosed in the consolidated financial statements.

Nama Pihak, Sifat hubungan, dan Jenis Transaksi Berelasi

Name of Party, nature of Relationship and Type of Related Transaction

NO.	PIHAK-PIHAK BERELASI / Related Parties	SIFAT HUBUNGAN / Nature of Relationship	JENIS TRANSAKSI / Type of Transaction
1.	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Institusi keuangan yang dikendalikan Pemerintah RI / Financial institution controlled by The Government R. I	Giro / Bank Account
2.	PT Bank BRI (Persero) Tbk	Institusi keuangan yang dikendalikan Pemerintah RI / Financial institution controlled by The Government R. I	Giro / Bank Account
3.	PT Bank BNI (Persero) Tbk	Institusi keuangan yang dikendalikan Pemerintah RI / Financial institution controlled by The Government R. I	Giro / Bank Account
4.	PT Bank BTN (Persero) Tbk	Entitas Lainnya yang dikendalikan oleh Pemerintah RI / Other entities controlled by the Government of the R. I	Giro / Bank Account
5.	PT PLN (Persero)	Entitas Lainnya yang dikendalikan oleh Pemerintah RI / Other entities controlled by the Government of the R. I	Piutang Usaha / Account Receivable
6.	PT Pertamina (Persero)	Entitas Lainnya yang dikendalikan oleh Pemerintah RI / Other entities controlled by the Government of the R. I	Piutang Usaha / Account Receivable
7.	PT Sang Hyang Seri (Persero)	Entitas Lainnya yang dikendalikan oleh Pemerintah RI / Other entities controlled by the Government of the R. I	Piutang Usaha / Account Receivable
8.	PT Indra Karya (Persero)	Entitas Lainnya yang dikendalikan oleh Pemerintah RI / Other entities controlled by the Government of the R. I	Utang Usaha / Accounts Payable
9.	PT BUMN Hijau Lestari	Entitas Lainnya yang dikendalikan oleh Pemerintah RI / Other entities controlled by the Government of the R. I	Utang Usaha / Accounts Payable
10.	Care LPPM IPB	Entitas Lainnya yang dikendalikan oleh Pemerintah RI / Other entities controlled by the Government of the R. I	Utang Usaha / Accounts Payable
11.	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)	Entitas Lainnya yang dikendalikan oleh Pemerintah RI / Other entities controlled by the Government of the R. I	Utang Usaha / Accounts Payable
12.	Hotel Indonesia Group	Entitas Lainnya yang dikendalikan oleh Pemerintah RI / Other entities controlled by the Government of the R. I	Utang Usaha / Accounts Payable



Rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi tahun 2022 dan 2022 adalah sebagai berikut:

The details of balances and transactions with related parties in 2022 and 2022 are as follows:

URAIAN Description	2022		2021	
	Rp (juta) / Rp (million)	% TERHADAP JUMLAH ASET % to Total Assets	Rp (juta) / Rp (million)	% TERHADAP JUMLAH ASET % to Total Assets
Kas dan Setara Kas / Cash and Cash Equivalents	567.815	29,68	452.331	26,77
Piutang Usaha / Trade Receivables	98.950	5,17	72.321	4,28
Piutang Usaha yang Belum Difakturkan / Unbilled Receivables	237.031	12,39	211.008	12,49
Utang Usaha / Accounts Payable	14.653	0,77	12.296	0,73

Manajemen menganalisis bahwa seluruh transaksi dengan Pihak Berelasi diperlukan guna mendukung kelancaran kegiatan operasional Perusahaan yang dapat mendorong kinerja finansial pada tahun buku 2022 dan 2022.

Management analyzes that all transactions with Related Parties are needed to support the efficiency of the Company's operational activities which can propel financial performance in the 2022 and 2022 fiscal year.

PERUBAHAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN

Amendment to Statutory Provisions That Has Significant Impact

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG Amendment of Law	PERIHAL Subject	DAMPAK TERHADAP PERUSAHAAN Impact on the Company
Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2022 / Government Regulation No 25 Year 2022	Perum Jasa Tirta II	Penambahan Wilayah Kerja

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Changes in Accounting Policies

Perubahan kebijakan akuntansi disajikan pada Catatan 2 dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Audit Konsolidasian Perum Jasa Tirta II dan Entitas Anaknya.

Changes in accounting policies are presented in Note 2 in the Notes to the Consolidated Audited Financial Statements of Perum Jasa Tirta II and Subsidiaries.

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

Information On Business Continuity

Hal-hal yang Berpotensi Berpengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan usaha Perusahaan Tahun 2022

Sepanjang tahun 2022, Manajemen menilai bahwa Perusahaan tidak memiliki hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usahanya. Hal tersebut dapat dilihat dari stabilitas kinerja operasional dan keuangan setiap tahunnya.

Assessment Manajemen akan Kelangsungan usaha Tahun 2022

Analisis terhadap kelangsungan usaha Perusahaan dilakukan melalui assessment terhadap beberapa indikator, yaitu :

1. Laporan keuangan yang diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP);
2. Penilaian tingkat kesehatan perusahaan berdasarkan kriteria Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara;
3. Hasil perhitungan Z-score model tahun 2022; dan
4. Gugatan atau tuntutan hukum yang dihadapi.

Asumsi yang Digunakan Manajemen dalam Melakukan assessment

Asumsi kelangsungan usaha terutama didasarkan pada upaya internal Perusahaan dalam memperkuat kinerja operasionalnya. Uraian mengenai analisa tingkat kesehatan Perusahaan dan penilaian Key Performance Indicator (KPI) tahun 2022 untuk mendukung keberlangsungan usaha Perusahaan di masa yang akan datang adalah sebagai berikut.

Laporan Keuangan yang Diterbitkan KAP

Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan menyatakan bahwa laporan keuangan Perusahaan telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material baik pada posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas. KAP tersebut memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas Laporan Keuangan Perusahaan tahun 2022.

Potential Matters that have a Significant effect on the Company's Business Continuity in 2022

Throughout 2022, Management considers that the Company does not have matters that have the potential to significantly influence its business continuity. This can be seen from the stability of operational and financial performance each year.

Management Assessment on Business Continuity in 2022

Analysis on the Company's business continuity is carried out through an assessment of several indicators, namely:

1. Financial statements issued by the Public Accounting Firm (KAP);
2. The evaluation of the soundness of the Company based on the criteria of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number: KEP-100/MBU/2002 dated June 4, 2002 concerning the Assessment on the Health Level of the State-Owned Enterprises;
3. The results of the 2022 model Z-score calculation; and
4. Lawsuits faced.

Assumptions used by Management in Conducting Assessments

The assumption of business continuity is mainly based on the Company's internal efforts in strengthening its operational performance. A description of the Company's soundness analysis and the 2022 Key Performance Indicator (KPI) assessment to support the Company's business sustainability in the future is as follows.

Financial Statements Issued by KAP

Financial Statements issued by the Public Accounting Firm (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & partner stated that the Company's financial statements have fairly presented in all material matters both in the financial position, results of operations and cash flow. The KAP provided an unqualified opinion on the 2022 Company Financial Statement.



Tingkat Kesehatan Perusahaan

Penilaian tingkat kesehatan Perusahaan berdasarkan pada kriteria dalam Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara. Berdasarkan penilaian tersebut, Perum Jasa Tirta II dalam tahun buku 2022 termasuk dalam kategori SEHAT dengan klasifikasi AA dengan total skor 87,25.

Company Health Level

The company's health level assessment based on the criteria of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number: KEP-100/MBU/2002 dated June 4, 2002 concerning the Assessment on the Health Level of the State-Owned Enterprises; Based on this assessment, Perum Jasa Tirta II in 2022 fiscal year is included in the HEALTHY category with AA classification with a total score of 87.25.

Tabel Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun 2022

Table of Company Health Level in 2022

URAIAN / Description	2022
Aspek Keuangan / Financial Aspects	
Return on Equity (ROE)	12,00
Return on Investment (ROI)	9,00
Cash Ratio	3,00
Current Ratio	4,00
Collection Period (CP)	2,50
Perputaran Persediaan (PP) / Inventory Turnover	4,00
Total Assets Turn Over (TATO)	1,50
Rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Aset / Total Own Capital to Total Assets Ratio	4,25
Jumlah Aspek Keuangan / Total Financial Aspects	40,25
Aspek Operasional / Operational Aspects	
Pelayanan Kepada Masyarakat / Services to the Public	15,00
Hasil Pelaksanaan Penugasan Pemerintah / Results of the Implementation of Government Assignments	10,00
Efisiensi Produksi & Produktivitas / Production Efficiency & Productivity	5,00
Kepedulian terhadap Lingkungan / Concern for the Environment	5,00
Jumlah Aspek operasional / Total operational Aspects	35,00
Aspek Administrasi / Administration Aspects	
Laporan Perhitungan Tahunan / Annual Calculation Report	0,00
Rancangan RKAP / RKAP draft	3,00
Laporan Periodik / Periodic Report	3,00
Kinerja PKBL / PKBL Performance	
Efektivitas Penyaluran / Distribution Effectiveness	3,00
Kolektibilitas Pengembalian / Return Collectibility	3,00
Jumlah Aspek Administrasi / Total Administration Aspects	12,00
Total Skor / Total Score	87,25
Tingkat Kesehatan / Health Level	Sehat / healthy ("AA")

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

*Good Corporate
Governance*







TATA KELOLA PERUSAHAAN *Corporate Governance*

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance /GCG*) telah menjadi landasan yang kuat bagi Perum Jasa Tirta II untuk menghadapi perubahan lingkungan bisnis di masa depan. Segala keputusan strategis yang dilakukan oleh Dewan Pengawas dan Direksi selalu mempertimbangkan prinsip-prinsip GCG, yaitu *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness* yang merupakan komitmen kuat Perum Jasa Tirta II, bukan hanya demi kepentingan Pemilik Modal (*shareholders*) namun bagi seluruh Pemilik Modal (*stakeholders*). Oleh karenanya Perum Jasa Tirta II selalu menjaga kepercayaan, kredibilitas serta upaya kontinuitas terkait produk dan jasa perPerusahaan an yang mana menjadi faktor yang sangat menentukan bagi perkembangan dan kelangsungan usaha Perusahaan .

PJT II berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dengan tujuan sebagai berikut:

- Mengendalikan dan mengarahkan hubungan yang baik antara Pemegang Saham, Dewan Pengawas, Direksi, dan seluruh Pemilik Modal Perusahaan;
- Meningkatkan pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan;
- Mencapai pertumbuhan dan imbal hasil yang maksimal sehingga meningkatkan kemakmuran Perusahaan, serta mewujudkan nilai Pemilik Modal dalam jangka panjang tanpa mengabaikan kepentingan para Pemilik Modal lainnya;
- Mendukung aktivitas pengendalian internal dan pengembangan Perusahaan;
- Memperbaiki budaya kerja Perusahaan ; dan
- Menjadikan Perusahaan bernilai tambah yaitu meningkatkan kesejahteraan seluruh Karyawan Perusahaan berikut peningkatan kemanfaatan bagi Pemilik Modal Perusahaan.

Penerapan GCG di lingkungan Perusahaan berlandaskan pada komitmen bersama dari seluruh jajaran manajemen dan staf untuk taat dan patuh pada seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di bidang perPerusahaan.

Good Corporate Governance (GCG) implementation has established a solid platform for Perum Jasa Tirta II to deal with future changes in the business environment. The principles of GCG—Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, and Fairness—are consistently taken into account by the Supervisory Board and the Board of Directors when making strategic decisions. GCG represents a strong commitment by Perum Jasa Tirta II to protect all owners' interests, not just those of the Capital Owners (shareholders). Capital (stakeholders). As a result, Perum Jasa Tirta II consistently upholds credibility, trust, and continuity efforts in relation to the Company's goods and services, all of which are crucial for the growth and continuation of the Company's commercial enterprise.

PJT II is dedicated to applying GCG principles in accordance with the following goals:

- Managing and directing good relations between the Supervisory Board, Board of Directors, and all of the Company's Capital Owners;*
- Increasing accountability to stakeholders;*
- Achieve maximum growth and returns to boost the company's prosperity and realize the value of the capital owners over time without sacrificing the interests of other capital owners;*
- Support the company's internal control and development activities;*
- Improving the work culture; and*
- Making the company value-added, which includes enhancing the welfare of all company employees and raising the benefits for the company's shareholders.*

GCG is implemented in the Firm's environment based on a shared commitment from all levels of management and staff to follow and comply with all applicable rules and regulations as well as generally recognized ethical standards in the industry per company.



Dalam melaksanakan implementasi GCG, Perum Jasa Tirta II melakukan sosialisasi secara terus-menerus yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya GCG, mengkomunikasikan dan menginternalisasikan berbagai kebijakan, program dan pelaksanaan kegiatan terkait GCG.

Perusahaan telah menerapkan prinsip dan praktik GCG dalam manajemen dan pengelolaan bisnis usahanya, sehingga dapat melindungi Para Pemilik Modal dengan efektif. Prinsip-prinsip GCG meliputi Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi dan Kewajaran.

1. Perum Jasa Tirta II memiliki rumusan visi dan misi yang jelas dan realistis.
2. Perum Jasa Tirta II mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Perum Jasa Tirta II memiliki nilai-nilai Perusahaan yang menggambarkan sikap moral Perusahaan yang baik dalam pelaksanaan usahanya.
4. Perum Jasa Tirta II memiliki rumusan etika bisnis dan pedoman perilaku Perusahaan. Etika bisnis dan pedoman perilaku dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten, sehingga membentuk budaya Perusahaan yang merupakan manifestasi dari nilai-nilai Perusahaan.
5. Perum Jasa Tirta II memiliki tata kelola hubungan antar organ Perusahaan yaitu Rapat Pembahasan Bersama dengan Pemilik Modal dan Dewan Pengawas serta Direksi.
6. Perum Jasa Tirta II memiliki pedoman tata kerja Dewan Pengawas dan Direksi dalam menjalankan peran dan tugasnya.
7. Perum Jasa Tirta II memiliki tata kelola hubungan dengan stakeholders.
8. Perum Jasa Tirta II dalam fungsinya sebagai lembaga intermediasi dan sebagai bagian dari dunia bisnis harus peduli dan berperan aktif dalam menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

In order to implement GCG, Perum Jasa Tirta II engages in ongoing socialization that tries to convey and internalize numerous policies, programs, and GCG-related activity implementation in order to help people understand how important GCG is.

To successfully protect the Capital Owners, the Company has incorporated GCG concepts and practices into the management and operation of its business. Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, and Fairness are among the GCG's guiding ideals.

1. *The vision and objectives of Perum Jasa Tirta II are crystal clear and grounded in reality.*
2. *Perum Jasa Tirta II abides with all relevant laws and rules.*
3. *Perum Jasa Tirta II has core values that characterize the organization's upright conduct in conducting business.*
4. *Perum Jasa Tirta II has developed a code of conduct and corporate ethics. Continuous and consistent observance of the company's code of conduct and business ethics results in the development of a corporate culture that embodies those ideals.*
5. *The Joint Discussion Meeting with the Capital Owners, the Supervisory Board, and the Board of Directors have a governance connection with Perum Jasa Tirta II.*
6. *Perum Jasa Tirta II contains instructions for the Supervisory Board and the Board of Directors' work practices in carrying out their responsibilities.*
7. *Stakeholders and Perum Jasa Tirta II have a governance connection.*
8. *Perum Jasa Tirta II must be concerned about protecting the environment and natural resources as part of its duty as an intermediary organization and a member of the business community.*



DASAR PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Basic Application Of Corporate Governance

Perum Jasa Tirta II senantiasa berkomitmen menerapkan tata kelola Perusahaan dengan mengacu pada berbagai regulasi yang relevan. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan tata Kelola Perusahaan sebagai berikut:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Pemerintah

- PP No 25 Tahun 2022 Tentang Perum Jasa Tirta II;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Menteri BUMN

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;

- Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
- Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Pengawas/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
- Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara

By making use of numerous pertinent laws, Perum Jasa Tirta II is constantly devoted to adopting strong corporate governance. The following laws and rules form the foundation for achieving excellent corporate governance:

- *Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises;*
- *Law of the Republic of Indonesia Number 14 of 2008 on Public Information Disclosure;*
- *Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 1974 concerning Irrigation;*
- *Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 2010 on Prevention and Eradication of Money Laundering Crime;*
- *Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 Concerning the Amendment to Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 Concerning the Eradication of the Crime of Corruption;*
- *Law of the Republic of Indonesia Number 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition.*

Governmental Regulations

- *Government Regulation No 25 Year 2022 on Perum Jasa Tirta II*
- *Governmental Regulation Number 7 of 2010 concerning Perum Jasa Tirta II.*

Regulations for the Minister of State for State-Owned Enterprises include:

PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises;

- *PER-09/MBU/2012 concerning Amendments to Regulations for the Minister of State for State-Owned Enterprises Number PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance*
- *Regulation of the Minister of State for State-Owned Enterprises Number: PER-12/MBU/2012 concerning Supporting Organs of the Supervisory Board/Supervisory Board of State-Owned Enterprises;*
- *Regulation of the Minister of State for State-Owned*



Nomor: PER-03/MBU/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara;

- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara;
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara;
- Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor S-16/S.MBU/2012 tentang Indikator Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Lainnya

- Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Pengawas Nomor: KBS-2/DIR/06/2022 tanggal 29 Juni 2022 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Perum Jasa Tirta II
- Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance;
- Pedoman Governansi Korporat dalam Badan Usaha Milik Negara OECD.

Perum Jasa Tirta II berkomitmen menerapkan GCG dalam mewujudkan visi dan misinya, serta mewujudkan pertumbuhan dan akselerasi bisnis diseluruh segmen untuk menjadi Leading Regional Perusahaan di masa mendatang. Manajemen Perum Jasa Tirta II selalu memberikan dorongan agar semua karyawan konsisten dalam melaksanakan prinsip GCG untuk setiap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab untuk pencapaian tujuan Perusahaan.

Enterprises Number: PER-03/MBU/2015 concerning Requirements, Procedures for Appointment and Dismissal of Members of the Board of Directors of State-Owned Enterprises;

- *Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: KEP-100/MBU/2002 concerning Assessment of the Health Level of State-Owned Enterprises;*
- *Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-08/MBU/12/2019 concerning General Guidelines for the Implementation of Procurement of Goods and Services for State-Owned Enterprises;*
- *Decree of the Secretary of the Ministry of SOEs Number S-16/S.MBU/2012 concerning Assessment and Evaluation Indicators on the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises.*

Other Regulations

- *Joint Decree of the Board of Directors and Supervisory Board Number: KBS-2/DIR/06/2022 dated 29 June 2022 on Good Corporate Governance Guidelines of Perum Jasa Tirta II*
- *General Guidelines for Indonesian Corporate Governance issued by the National Governance Policy Committee;*
- *Guidelines for Corporate Governance in OECD State-Owned Enterprises.*

Perum Jasa Tirta II is committed to implementing GCG in realizing its vision and mission, as well as realizing business growth and acceleration in all segments to become the Company's Leading Regional in the future. The management of Perum Jasa Tirta II always provides encouragement so that all employees are consistent in implementing GCG principles for each task and responsibility implementation to achieve the Company's goals.



PRINSIP-PRINSIP UTAMA PENERAPAN GCG

Main Principles of GCG Implementation

Perum Jasa Tirta menilai pentingnya penerapan dan pelaksanaan best practices GCG dengan berlandaskan pada kepatuhan dan standar yang berlaku. Memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola yang Baik pada BUMN, penerapan tata kelola Perusahaan berprinsip pada prinsip-prinsip dasar, yaitu Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Kemandirian (*Independency*), Kewajaran (*Fairness*), dan Sikap Kepedulian (*Social Awareness*) dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi mulai dari Dewan Pengawas dan Direksi sampai pada seluruh karyawan Perum Jasa Tirta II.

Based on compliance and applicable standards, Perum Jasa Tirta evaluates the significance of implementing and applying GCG best practices. The implementation of corporate governance is based on the fundamental principles, namely Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, Fairness, and Social Awareness in every business activity. Comply with the provisions of the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-09/MBU/2012 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of State No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 concerning the Implementation of Good Governance in BUMN.



PRINSIP GCG GCG Principles	DEFINISI Definition	BENTUK IMPLEMENTASI Implementation
Transparansi / <i>Transparency</i>	Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, Perusahaan menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan mengambil inisiatif mengungkapkan tidak hanya masalah yang diatur dalam regulasi, tetap juga hal penting lainnya dalam pengambilan keputusan oleh Pemilik Modal dan pemangku kepentingan lainnya. <i>To maintain objectivity in conducting business, the Company provides material and relevant information in a way that is easily accessible and understood by stakeholders. The company takes the initiative to disclose not only the problems required by laws and regulations, but also matters that are important for decision making by Capital Owners and other stakeholders.</i>	- Laporan Tahunan Perum Jasa Tirta II memuat informasi penting dalam pengelolaan Perum Jasa Tirta II, antara lain tetapi tidak terbatas kepada: <i>Perum Jasa Tirta II Annual Report contains important information in the management of Perum Jasa Tirta II, including but not limited to:</i> - Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Usaha, dan Strategi Perum Jasa Tirta II; <i>Vision, Mission, Objectives, Business Objectives, and Strategy of Perum Jasa Tirta II;</i> - Kondisi keuangan hasil audit oleh eksternal auditor; <i>Financial condition of audit results by external auditors;</i> - Susunan pengurus (Direksi dan Dewan Pengawas); <i>Management composition (Board of Directors and Supervisory Board);</i> - Informasi Pemilik Modal Pengendali; <i>Information on Controlling Capital Owners.</i> - Kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan Dewan Pengawas beserta anggota keluarganya dan Perum Jasa Tirta II lainnya memiliki benturan kepentingan; <i>Share ownership by members of the Board of Directors and the Supervisory Board and their family members and Perum Jasa Tirta II who have a conflict of interest;</i> - Sistem manajemen risiko; <i>Risk Management System</i> - Sistem pengawasan dan pengendalian internal; <i>Internal supervision and control system;</i> - Sistem dan pelaksanaan GCG dan tingkat kepatuhannya; <i>System and implementation of GCG and the level of compliance;</i> - Kejadian-kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi; <i>Important events that can affect the condition;</i> - Biodata anggota Direksi dan Dewan Pengawas; <i>Profile of members of the Board of Directors and Supervisory Board;</i> - Remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; <i>Remuneration of members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board;</i> - Rapat-rapat yang diadakan oleh Direksi dan Dewan Pengawas. <i>Meetings held by the Directors and Supervisory Board.</i> - Informasi penting kepada stakeholders, antara lain: <i>Important information to stakeholders, including:</i> - Laporan triwulanan yang berisi laporan rutin manajemen, disampaikan kepada Pemilik Modal; <i>Quarterly reports containing routine management reports, submitted to the Capital Owners;</i> - Prosedur pengadaan dan hubungan dengan rekanan; <i>Procurement procedures and relations with partners;</i> - Ketaatan dalam pembayaran pajak; <i>Compliance with tax payments;</i> - Mekanisme manajemen SDM, sesuai dengan PKB. <i>HR management mechanism, in accordance with PKB.</i>



PRINSIP GCG GCG Principles	DEFINISI Definition	BENTUK IMPLEMENTASI Implementation
Kewajaran / <i>Fairness</i>	Keadilan dan kesetaraan dalam pemenuhan hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perum Jasa Tirta II menjamin bahwa setiap pihak yang berkepentingan mendapatkan perlakuan yang adil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. / <i>Fairness is justice and equality in fulfilling the rights of stakeholders that arise based on agreements and applicable laws and regulations. Perum Jasa Tirta II guarantees that every party concerned has fair treatment in accordance with the applicable laws and regulations.</i>	1. Pemilik Modal berhak menghadiri dan memberikan suara dalam RPB sesuai dengan ketentuan yang berlaku; <i>The Capital Owner has the right to attend and vote in the RPB in accordance with the applicable provisions;</i> 2. Perum Jasa Tirta II akan memperlakukan semua rekanan secara adil dan transparan; <i>Perum Jasa Tirta II will treat all partners fairly and transparently;</i> 3. Perum Jasa Tirta II akan memberikan kondisi kerja yang baik dan aman bagi setiap karyawan sesuai dengan kemampuan Perum Jasa Tirta II dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; <i>Perum Jasa Tirta II will provide good and safe working conditions for each employee in accordance with Perum Jasa Tirta II capabilities and applicable laws and regulations.</i> 4. Perum Jasa Tirta II akan memperlakukan setiap pegawai secara adil dan bebas dari bias karena perbedaan suku, agama, asal usul, jenis kelamin, atau hal-hal yang tidak berkaitan dengan kinerja. <i>Perum Jasa Tirta II will treat every employee fairly and be free from bias due to differences in ethnicity, religion, origin, gender or other matters that have no relation to performance.</i>
Akuntabilitas / <i>Accountability</i>	Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ dan seluruh jajaran Perum Jasa Tirta II sehingga pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif. Perum Jasa Tirta II meyakini bahwa akuntabilitas berhubungan dengan keberadaan sistem yang mengendalikan hubungan antara individu dan/atau organ yang ada di Perusahaan maupun hubungan antara Perusahaan dengan pihak yang berkepentingan. / <i>Accountability is the clarity of functions, implementation and accountability of the Organ and the entire ranks of Perum Jasa Tirta II so that the management of Perum Jasa Tirta II is carried out effectively. Perum Jasa Tirta II believes that accountability is related to the existence of a system that controls relations between individuals and or organs in Perum Jasa Tirta II and the relationship between Perum Jasa Tirta II and interested parties.</i>	1. Menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ Perum Jasa Tirta II (Direksi, Dewan Pengawas, SPI, Sekper, dan organ struktural lainnya) dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan (<i>Corporate Values</i>), dan strategi Perum Jasa Tirta II; <i>Sets out the details of the duties and responsibilities of each organ of Perum Jasa Tirta II (Directors, Supervisory Board, SPI, CORSEC and other Structural Organ) and all employees clearly and in harmony with Perum's vision, mission, values Jasa Tirta II (corporate values), and the strategy of Perum Jasa Tirta II;</i> 2. Berupaya agar semua organ Perusahaan dan seluruh karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG; <i>Strive to ensure that all organs of the Company and all employees have the ability in accordance with their duties, responsibilities and roles in the implementation of GCG;</i> 3. Menciptakan sistem pengendalian yang efektif dalam pengelolaan Perusahaan; <i>Creates an effective internal control system in managing the Company.</i> 4. Menyelenggarakan RPB untuk mengesahkan rencana jangka panjang, rencana anggaran tahunan, persetujuan laporan tahunan, penetapan pembagian keuntungan dan dividen yang dibayarkan; <i>Carrying out RPB to ratify long-term plans, annual budget plans, approval of annual reports, determination of profit sharing and dividends paid;</i> 5. Pemenuhan check and balances Direksi dan Dewan Pengawas yang sesuai dengan prinsip GCG. <i>Fulfilment of checks and balances of the Board of Directors and the Supervisory Board in accordance with GCG principles.</i>



PRINSIP GCG GCG Principles	DEFINISI Definition	BENTUK IMPLEMENTASI Implementation
Pertanggung jawaban / <i>Responsibility</i>	Kesesuaian di dalam pengelolaan Perum Jasa Tirta II dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat. Perum Jasa Tirta II bertanggungjawab untuk mematuhi hukum dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, perpajakan, persaingan usaha yang tidak sehat, keselamatan dan kesehatan kerja, serta aspek lainnya. <i>Compliance in the management of Perum Jasa Tirta II with applicable laws and regulations and sound corporate principles. Perum Jasa Tirta II is responsible for complying with applicable laws and regulations, including provisions relating to employment, taxation, unfair business competition, occupational safety and health, and other aspects.</i>	1. Melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik; <i>Carry out tax obligations properly;</i> 2. Mematuhi ketentuan undang-undang keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan; <i>Comply with the provisions of the laws on occupational safety and health and the environment;</i> 3. Melaksanakan kewajiban pembinaan masyarakat sekitar, misalnya dengan ikut melakukan pembinaan usaha kecil dan koperasi; <i>Carry out the obligation of fostering the surrounding community, for example by participating in fostering small businesses and cooperatives.</i> 4. Melaksanakan UU Tenaga Kerja, UU Jasa Konstruksi, pedoman GCG, dan regulasi lainnya; <i>Implement the Manpower Act, Construction Services Law, GCG guidelines, and other regulations;</i> 5. Community Development (0,3% dari anggaran) sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat tidak mampu. <i>Community Development (0.3% of the budget) as a form of concern for the community in improving the welfare of the lives of disadvantaged people.</i>
Kemandirian / <i>Independence</i>	Pengelolaan Perusahaan yang profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat. Implementasi prinsip kemandirian secara optimal mampu mengoptimalkan pelaksanaan tugas seluruh organ Perusahaan dan pengelolaan terbaik bagi Perum Jasa Tirta II. <i>Professional company management without conflict of interest and influence or pressure from any party that is not in accordance with applicable laws and regulations and sound corporate principles. The optimal implementation of the principle of independence is able to optimize the implementation of the duties of all Company organs and the best management for Perum Jasa Tirta II.</i>	1. Saling menghormati hak, kewajiban, tugas, wewenang, serta tanggung jawab masing-masing organ dan tidak saling mendominasi satu sama lain; <i>Mutual respect for the rights, obligations, duties, authority, and responsibilities of each organ and not dominating each other;</i> 2. Tidak mencampuri pengurusan Perusahaan selain organ yang berkepentingan; <i>Do not interfere in the management of the Company other than organs of interest;</i> 3. Selalu menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas, Direksi, dan seluruh karyawan Perum Jasa Tirta II. <i>Always avoid conflicts of interest in making decisions made by the Supervisory Board, Board of Directors, and all employees of Perum Jasa Tirta II.</i>
SikapKepedulian / <i>Social Awareness</i>	Rasa peduli kepada masyarakat dan lingkungan melalui kegiatan kemanusiaan dan sosial. / <i>A sense of caring for the community and the environment through humanitarian and social activities.</i>	Pelaksanaan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) setiap tahunnya dengan membidik isu-isu lingkungan dan sosial yang relevan dengan kebutuhan pemangku kepentingan. <i>The implementation of Corporate Social Responsibility activities every year by targeting environmental and social issues that are relevant to the needs of stakeholders.</i>

STRUKTUR DAN MEKANISME TATA KELOLA PERUM JASA TIRTA II

Structure And Governance Mechanism Of Perum Jasa Tirta II

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas (UU PT), Organ Perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemilik Modal (RPM), Dewan Pengawas dan Direksi. Sistem kepengurusan menganut sistem dua badan (*two tier system*), yaitu Dewan Pengawas dan Direksi, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.

Perum Jasa Tirta II telah menetapkan Road Map GCG tahun 2010-2017 sebagai *grand strategy* dan *milestone* implementasi GCG sampai tahun 2022 menuju tata kelola Perusahaan berkelanjutan dengan mengintegrasikan aspek kepatuhan, pengendalian internal, manajemen risiko dan tanggung jawab sosial Perusahaan. Tahapan *Road Map GCG* Perum Jasa Tirta II adalah sebagai berikut:

The General Meeting of Capital Owners (GMS), the Supervisory Board, and the Board of Directors are the Company's organs according to Law of the Republic of Indonesia number 40 of 2007 regulating Limited Liability Companies (UU PT). The Supervisory Board and the Board of Directors, who have specific powers and duties in accordance with their respective roles as prescribed by the articles of association and applicable laws and regulations, make up the two-tier management structure.

The 2010-2017 GCG Road Map, designed by Perum Jasa Tirta II, serves as the overarching strategy and cornerstone for GCG implementation up until 2018 in the direction of sustainable corporate governance by integrating elements of compliance, internal control, risk management, and CSR. The following are the stages of the Perum Jasa Tirta II GCG Road Map:



Perum Jasa Tirta II merancang dan terus menyempurnakan model yang selaras serta saling melengkapi antara struktur GCG, kebijakan (*soft structure*) dan mekanisme implementasi GCG Perusahaan. Hal tersebut diharapkan mampu mendukung dan memenuhi berbagai aspek khususnya yang terkait dengan kepatuhan, pencapaian kinerja dan tanggung jawab kepada lingkungan serta masyarakat.

Models that align and complement GCG structure, policy (soft structure), and GCG execution method Company were created and refined by Perum Jasa Tirta II. This is anticipated to be able to support and address a variety of needs, including those linked to compliance, performance attainment, and social and environmental responsibility.



STRUKTUR ORGAN PERUM JASA TIRTA II

Organs Structure Of Perum Jasa Tirta II

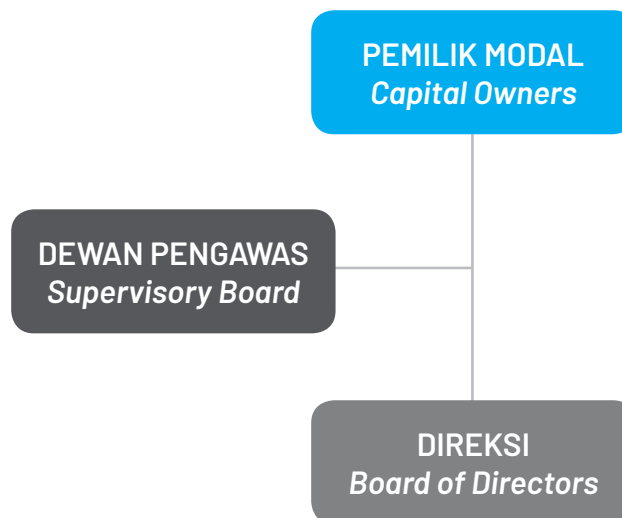
Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola di Perum Jasa Tirta II berlandaskan pada komitmen bersama dari seluruh jajaran manajemen dan karyawan untuk tunduk dan patuh pada seluruh peraturan dan perundangan yang berlaku. Hal ini dimulai dari puncak kepengurusan Perum Jasa Tirta II yang dilakukan oleh Dewan Pengawas dan Direksi yang independen dan profesional.

Secara umum, kegiatan Perusahaan dilakukan oleh Direksi. Dewan Pengawas mewakili pemilik modal mengkaji kebijakan-kebijakan dan melaksanakan pengawasan serta memberikan saran terhadap pengelolaan Perusahaan, sedangkan Direksi memimpin pelaksanaan kebijakan, prosedur, dan pengelolaan sehari-hari.

All levels of management and staff of Perum Jasa Tirta II have a shared commitment to uphold and uphold all applicable rules and regulations, which serves as the foundation for the execution of good corporate governance. This began during the height of Perum Jasa Tirta II's management, which was carried out by an impartial and competent Supervisory Board and Board of Directors.

In general, the Company's activities are carried out by the Board of Directors. The Supervisory Board, representing the owners of capital, reviews policies and carries out supervision and provides advice on the management of the Company, while the Board of Directors leads the implementation of policies, procedures, and day-to-day management.

Struktur Organ Utama Perusahaan / Company Main Organ Structure





KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUM JASA TIRTA II

Perum Jasa Tirta II Governance Policy

Untuk meningkatkan kualitas dan cakupan implementasi tata kelola secara berkelanjutan, Perum Jasa Tirta II telah menyusun dan menerapkan kebijakan-kebijakan operasional bagi seluruh unit kerja sejalan dengan prinsip tata kelola Perusahaan.

Perum Jasa Tirta II has developed and implemented operational policies for all work units in accordance with corporate governance principles in order to improve the quality and scope of sustainable governance implementation.

Kebijakan Tata Kelola

Penerapan GCG Perum Jasa Tirta II secara optimal dilakukan dengan penguatan berbagai kebijakan dan manual GCG untuk mencapai praktik-praktik terbaik, system dan prosedur yang andal sesuai dengan perkembangan bisnis dan regulasi perPerusahaan an. Perum Jasa Tirta II melengkapi pelaksanaan GCG dengan berbagai kebijakan dan *Standard Operating Procedures (SOP)* antara lain:

- Penyusunan Buku Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*);
- *Charter* Dewan Pengawas
- *Charter* Direksi
- *Charter* Komite Audit
- *Charter* Komite Pemantau Resiko
- *Charter* Komite Remunerasi dan Nominasi
- Piagam Koordinasi Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan dengan Dewan Pengawas
- *Charter* Internal Audit
- *Code of Conduct*
- Kebijakan dan SOP Lainnya

Policy on Governance

Perum Jasa Tirta II is carried out optimally by strengthening various GCG policies and manuals to achieve best practices, reliable systems, and procedures in accordance with company business developments and regulations. Perum Jasa Tirta II supplements GCG implementation with various policies and Standard Operating Procedures (SOP), including:

- *Preparation of Good Corporate Governance Guidelines;*
- *Supervisory Board Charter*
- *Board of Directors Charter*
- *Audit Committee Charter*
- *Risk Monitoring Committee Charter*
- *Charter of the Remuneration and Nomination Committee*
- *Charter of the Director in Charge of Compliance Function and Compliance Work Unit with the Supervisory Board*
- *Charter of Internal Audit*
- *Code of Conduct*
- *Other Policies and SOPs*

ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN

The Corporate Governance Roadmap

Roadmap Tata Kelola Perusahaan Perum Jasa Tirta II merupakan grand strategy dan millstone implementasi GCG sampai tahun 2022 menuju tata kelola Perusahaan berkelanjutan dengan mengintegrasikan aspek kepatuhan, pengendalian internal, manajemen risiko dan tanggung jawab sosial Perusahaan

Perum Jasa Tirta II is a grand strategy and cornerstone of GCG implementation until 2022 that integrates aspects of compliance, internal control, risk management, and corporate social responsibility. The following are the stages of Perum Jasa Tirta II's Corporate Governance Roadmap:



Soft Structure dan Kelengkapan Kebijakan GCG

Penerapan GCG di lingkungan Perum Jasa Tirta II secara optimal dilakukan dengan penguatan berbagai kebijakan dan manual GCG untuk mencapai praktik-praktik terbaik, sistem dan prosedur yang andal sesuai dengan perkembangan bisnis dan regulasi Perusahaan. Perum Jasa Tirta II melengkapi pelaksanaan GCG dengan berbagai pedoman dan *Standard Operating Procedures (SOP)* antara lain:

- Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*)
- *Board Manual*
- Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*)
- Pedoman Manajemen Risiko
- SPI Charter
- Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran (*Whistleblowing System*)
- Pedoman Gratifikasi
- Pedoman Benturan Kepentingan
- Pedoman Tata Kelola Teknologi Informasi
- Pedoman Pengendalian Intern
- Komite Audit Charter

GCG Policies' Soft Structure and Completeness

The optimal implementation of GCG in Perum Jasa Tirta II is accomplished by strengthening various GCG policies and manuals in order to achieve best practices, dependable systems, and procedures in accordance with business developments and Company regulations.

- *Code of Corporate Governance*
- *Board Manual*
- *Guidelines for Business Ethics and Code of Conduct*
- *Risk Management Guidelines*
- *SPI Charter*
- *Guidelines for Management of Complaints of Violations (Whistleblowing System)*
- *Guidelines for Gratification*
- *Guidelines for Conflicts of Interest*
- *Guidelines for Information Technology Governance*
- *Internal Control Guidelines*
- *Audit Committee Charter*

TUJUAN PENERAPAN GCG

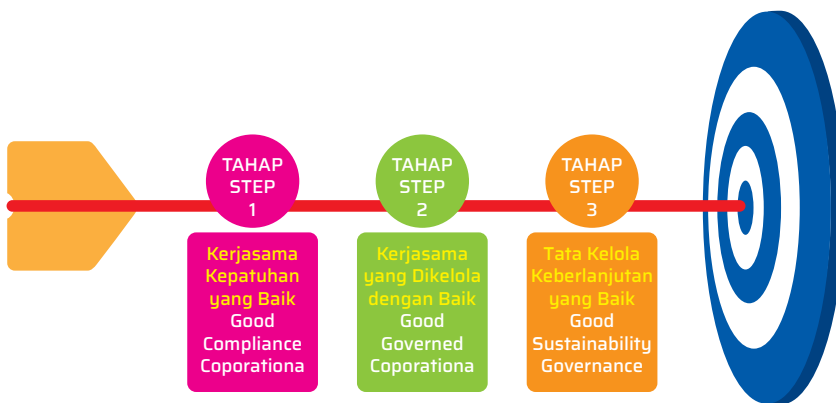
Targets Of GCG Implementation

Perum Jasa Tirta II berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mencapai pertumbuhan dan imbal hasil yang maksimal sehingga meningkatkan kemakmuran Perusahaan, serta mewujudkan nilai Pemilik Modal dalam jangka panjang tanpa mengabaikan kepentingan para Pemilik Modal lainnya;
2. Mengendalikan dan mengarahkan hubungan yang baik antara Pemilik Modal, Dewan Pengawas, Direksi, dan seluruh Pemilik Modal Perusahaan ;
3. Mendukung aktivitas pengendalian internal dan pengembangan Perusahaan ;
4. Mengelola sumber daya secara lebih amanah;
5. Meningkatkan pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan;
6. Memperbaiki budaya kerja Perusahaan ; dan
7. Menjadikan Perusahaan bernilai tambah, yaitu meningkatkan kesejahteraan seluruh insan Perusahaan berikut peningkatan kemanfaatan bagi Pemilik Modal Perusahaan.

Perum Jasa Tirta II is committed to implementing GCG principles in accordance with the following goals:

1. *To achieve maximum growth and returns in order to increase the Company's prosperity and to realize the long-term value of the Capital Owners without sacrificing the interests of other Capital Owners;*
2. *Managing and directing good relations among Capital Owners, the Supervisory Board, the Board of Directors, and all Capital Owners of the Company;*
3. *Assisting with internal control and development activities at the company;*
4. *Improved resource management;*
5. *Increase stakeholder accountability;*
6. *Improving the Company's work culture; and*
7. *Adding value to the Company by improving the welfare of all people.*
The company strives for greater convenience for Company Capital Owners.



Governance Structure

Governance structure mencakup struktur dan infrastruktur tata kelola Perusahaan demi menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan. Perum Jasa Tirta II melengkapi struktur organisasinya sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan untuk mendukung kegiatan operasionalnya, mulai dari level tertinggi sampai level terendah. Perum Jasa Tirta II memenuhi jumlah Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. Selain itu, Perum Jasa Tirta II juga membentuk Satuan Pengawasan Intern dan Pengendalian Kinerja Sistem Manajemen. Struktur organisasi yang dimiliki didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, antara lain ketersediaan sarana Informasi dan Teknologi (IT) hingga aturan yang mengatur kegiatan operasional Perum Jasa Tirta II seperti kebijakan, SOP, surat edaran internal harus dipatuhi semua organ Perusahaan.

Governance Process

Governance process merupakan cara atau mekanisme yang dilakukan organ Perusahaan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Adapun proses yang dilakukan dapat berupa rapat koordinasi Dewan Pengawas, Direksi, Komite-komite, penerapan sistem *reward* dan *punishment* secara konsisten, serta kebijakan-kebijakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya *fraud*.

Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang tertuang dalam Pedoman *Good Corporate Governance* disosialisasikan kepada seluruh karyawan dengan tujuan agar seluruh jajaran Perum Jasa Tirta II dapat memahami dan

Structure of Governance

Governance structure refers to the structure and infrastructure of corporate governance used to produce results that meet stakeholder expectations. Perum Jasa Tirta II has completed its organizational structure in accordance with the provisions and requires support for its operational activities, beginning at the highest level and working down. The number of Supervisory Boards at Perum Jasa Tirta II is in accordance with the applicable laws and regulations. Furthermore, Perum Jasa Tirta II established an Internal Control Unit as well as Management System Performance Control. Its organizational structure is supported by adequate facilities and infrastructure, including the availability of Information and Technology (IT) facilities to the rules governing Perum Jasa Tirta II's operational activities such as policies, SOPs, internal circulars that must be followed by all Company organs.

Process of Governance

The governance process is a method or mechanism used by the organs of the company to carry out their functions and duties. The process can take the form of coordinating meetings of the Supervisory Board, Board of Directors, and Committees, as well as the consistent application of reward and punishment systems and policies to prevent fraud. The implementation of the GCG principles contained in the Good Corporate Governance Guidelines is disseminated to all employees with the goal of understanding and implementing GCG principles in carrying out their duties at all levels of Perum Jasa Tirta II. Meanwhile, every semester, the evaluation



melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam menjalankan tugas. Sedangkan proses evaluasi dilakukan melalui proses penilaian sendiri (*Self Assessment*) atas pelaksanaan GCG Perum Jasa Tirta II setiap semester.

Governance Outcome

Governance outcome merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan dan infrastruktur tata kelola Perusahaan. Dalam menilai dan mengevaluasi *governance outcome*, Perusahaan melakukan penilaian penerapan GCG secara internal melalui *self assessment* dan secara eksternal oleh pihak independen. Merangkum ketiga kerangka utama tersebut, penerapan GCG kemudian diimplementasikan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

process for the implementation of Perum Jasa Tirta II GCG is carried out through a self-assessment process.

Governance Outcome

The governance outcome is the result of the process of implementing GCG principles, which is supported by corporate governance adequacy and infrastructure. The Company assesses the implementation of GCG internally through self-assessment and externally by independent parties when assessing and evaluating governance outcomes. After summarizing the three main frameworks, GCG implementation proceeds through the following stages:



Strategi Implementasi GCG

Strategi implementasi GCG dirancang agar mampu mendorong penerapan GCG Perusahaan yang konsisten dan efektif serta sesuai dengan *business plan* maupun *strategic plan* yang dimiliki Perusahaan. Strategi implementasi GCG Perum Jasa Tirta II selama tahun 2017 sampai 2022 dilaksanakan dengan inisiatif sebagai berikut:

Strategy for GCG Implementation

The GCG implementation strategy is intended to encourage the consistent and effective implementation of the Company's GCG in accordance with the business plan and strategic plan owned by the Company. The following initiatives were implemented as part of Perum's GCG implementation strategy Jasa Tirta II from 2017 to 2022.



1. Perlindungan terhadap hak pemegang saham;
2. Optimalisasi peran dan fungsi Dewan Pengawas , Direksi dan Komite;
3. Peningkatan fungsi manajemen risiko dan pengendalian internal;
4. Efektivitas penanganan pengaduan konsumen ;
5. Peningkatan fungsi kepatuhan;
6. Peningkatan Teknologi Informasi yang memadai.

GCG Awareness

Tahapan *Awareness GCG* bertujuan untuk memperkenalkan dan memberikan pemahaman mengenai pentingnya implementasi GCG dalam proses bisnis Perum Jasa Tirta II sehingga dapat menumbuhkan kesadaran bersama insan Perum Jasa Tirta II dalam penerapan tata kelola Perusahaan yang berkelanjutan. Kegiatan *awareness GCG* dilakukan mulai dari karyawan baru melalui Pendidikan Dasar Perusahaan an sampai dengan dilaksanakannya *GCG refreshment* bagi karyawan. Selain itu, Perum Jasa Tirta II melakukan sosialisasi GCG melalui berbagai media baik cetak maupun elektronik dan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam aktivitas sosialisasi GCG. Pelaksanaan *awareness GCG* tersebut didokumentasikan dalam bentuk laporan formal sebagai bukti yang diperlukan dalam kegiatan *assessment GCG* maupun penyusunan Laporan Tahunan (*Annual Report*).

Implementasi GCG

Implementasi GCG secara umum diformulasikan dalam bentuk revitalisasi proses bisnis, serta kegiatan lain yang diwujudkan dalam beberapa aktivitas, antara lain:

1. Menata struktur organisasi yang sejalan dengan praktek terbaik dalam tata kelola Perusahaan untuk meningkatkan kinerja Perusahaan;
2. Menyusun dan menyempurnakan berbagai kebijakan dan prosedur pengelolaan Perusahaan, mencakup bidang dana, bidang kredit dan pengendalian internal;
3. Melaksanakan tindak lanjut rekomendasi *Self Assessment GCG* dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi *Self Assessment* sebelumnya; dan
4. Menciptakan dan membangun iklim budaya kerja yang etis dan bertanggung jawab, seperti menyusun dan meng-*update* secara berkala Surat Pernyataan Independensi Direksi dan Dewan Pengawas , serta

1. *Safeguarding shareholder rights;*
2. *Optimizing the roles and functions of the Supervisory Board, Board of Directors, and Committees;*
3. *Enhancements to risk management and internal control functions;*
4. *Increased efficiency in handling consumer complaints;*
5. *Improved compliance function;*
6. *Adequate information technology advancement.*

GCG Awareness

The GCG Awareness stage aims to introduce and explain the importance of GCG implementation in Perum Jasa Tirta II's business processes in order to raise awareness among Perum Jasa Tirta II personnel about the importance of implementing sustainable corporate governance. GCG awareness activities are carried out beginning with new employees and progressing to the implementation of GCG refreshment for employees through the Company's Basic Education. Furthermore, Perum Jasa Tirta II disseminates GCG through various print and electronic media and coordinates with parties interested in GCG socialization activities. The implementation of GCG awareness is documented in the form of a formal report as evidence for GCG assessment activities and the Annual Report (Annual Report).

Implementation of GCG

GCG implementation is generally formulated in the form of revitalizing business processes, as well as other activities manifested in several activities, such as:

1. *Organizing an organizational structure that is in line with best practices in corporate governance to improve the Company's performance;*
2. *Developing and improving various policies and procedures for the Company's management, covering the areas of funds, credit, and internal control;*
3. *Implement the GCG Self Assessment recommendations and evaluate the implementation of the previous Self Assessment recommendations; and*
4. *Creating and maintaining an ethical and responsible work culture climate, such as compiling and updating the Statement of Independence of the Board of Directors and the Supervisory Board,*



mengkoordinasikan penandatanganan Pernyataan Kepatuhan terhadap Pedoman Etika Perusahaan (*Code of Conduct*). Disamping itu Perum Jasa Tirta II telah merancang kebijakan sistem pengendalian kecurangan, termasuk di dalamnya sistem perlindungan terhadap pelaporan pelanggaran.

and coordinating the signing of the Statement of Compliance with the Code of Conduct. Furthermore, Perum Jasa Tirta II has created a fraud control system policy, which includes a reporting violation protection system.

Monitoring Implementasi GCG

Dewan Pengawas secara aktif melakukan pengawasan atas efektivitas implementasi GCG yang dilaksanakan oleh Direksi dengan dibantu Komite Audit. Selain itu, Direksi secara terus-menerus memastikan dan memonitor implementasi GCG berjalan sesuai dengan strategi yang ditetapkan, mulai dari tahapan *awareness* sampai dengan pelaporan. Proses *monitoring* atas implementasi tersebut dilakukan guna memastikan keberhasilan pelaksanaannya dengan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, pelaksanaan *monitoring* GCG ini didokumentasikan dalam bentuk laporan formal sebagai bukti yang nantinya akan diperlukan dalam kegiatan *assessment* GCG maupun penyusunan *Annual Report*.

GCG Implementation Monitoring

The Supervisory Board actively monitors the effectiveness of GCG implementation by the Board of Directors, with assistance from the Audit Committee. Furthermore, the Board of Directors continuously ensures and monitors GCG implementation in accordance with the established strategy, from awareness to reporting. The implementation monitoring process is carried out to ensure the success of its implementation by coordinating with interested parties. Furthermore, GCG monitoring implementation is documented in the form of a formal report as evidence that will later be required in GCG assessment activities and the preparation of the Annual Report.

Assessment Monitoring GCG

Dalam Upaya Menjaga Dan Meningkatkan Kualitas Penerapan GCG, Perum Jasa Tirta II Secara Berkala Melakukan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Untuk Mengukur Pelaksanaan GCG Yang Mendasar Perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Perusahaan Umum.

GCG Monitoring Evaluation

Perum Jasa Tirta II Conducts Periodic Self-Assessment to Measure Basic GCG Implementation Regarding the Implementation of Good Corporate Governance for Public Companies in an Effort to Maintain and Improve the Quality of GCG Implementation.

Pelaporan dan Disclosure

Laporan Implementasi GCG Perusahaan merujuk pada ketentuan, pelaksanaan kegiatan GCG Perum Jasa Tirta II selama 1(satu) tahun juga terdapat dalam Laporan Tahunan, dengan cakupan informasi GCG sesuai dengan standar pengungkapan informasi.

Disclosure and Reporting

The GCG Implementation Report of the Company refers to the provisions, the implementation of GCG activities of Perum Jasa Tirta II for 1(one) year is also contained in the Annual Report, with the scope of GCG information in accordance with information disclosure standards.



PENILAIAN PENERAPAN GCG

GCG Implementation Assessment

Sebagai bagian dari tujuan penerapan GCG yang berkelanjutan, Perum Jasa Tirta II melakukan mekanisme penilaian penerapan GCG guna menilai kualitas penerapan GCG, memperoleh rekomendasi perbaikan kinerja dan implementasi di masa mendatang, serta memelihara kredibilitas dan akuntabilitas Perusahaan di mata Pemilik Modal dan pemangku kepentingan.

Penilaian (Assessment) GCG dilakukan setiap dua tahun oleh konsultan independen dengan mengacu kepada kriteria dalam Keputusan Sekretaris Kementerian Negara BUMN No. SK-16/S-MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola.

Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN. Selain melakukan penilaian GCG berdasarkan kriteria tersebut, Perusahaan juga mempertimbangkan capaian Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) dan Key Performance Indikator (KPI) dalam menilai kualitas dan keberhasilan implementasi selama tahun buku.

Perum Jasa Tirta II conducts a GCG implementation assessment mechanism to assess the quality of GCG implementation, obtain recommendations for future performance improvement and implementation, and maintain the Company's credibility and accountability in the eyes of Capital Owners and stakeholders.

An independent consultant conducts GCG Assessment every two years in accordance with the criteria in the Decree of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises No. SK16/S-MBU/2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of Governance Implementation.

BUMN has a good company (good corporate governance). In addition to conducting GCG assessments based on these criteria, the Company evaluates the quality and success of implementation during the fiscal year based on the accomplishments of the Superior Performance Assessment Criteria (KPKU) and Key Performance Indicators (KPI).

KPI

KPI

TAHUN Year	2022	2021	2020	2019	2018
Target / Target	100	100	100	100	100
Realisasi / Realization	100,96	83,6013	80,33	86,85	85,94

Penilaian GCG berdasarkan kriteria yang diatur dalam Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK-16/S. MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan GCG pada BUMN terdiri dari 6 (enam) Faktor/Aspek Penerapan GCG yang meliputi:

1. Komitmen terhadap Penerapan Tata
2. Pemilik Modal dan RPB/Pemilik Modal;
3. Dewan Pengawas /Dewan Pengawas;
4. Direksi;
5. Pengungkapan Informasi dan Transparansi; dan
6. Aspek Lainnya

GCG assessment based on regulated criteria in the Secretary of the Ministry BUMN Number SK-16 / S. MBU/ 2012 Decree on Indicators/Assessment and Evaluation of GCG implementation in SOEs consists of 6 (six) factors/aspects of GCG implementation, which are as follows:

1. Commitment to Governance Implementation
2. Capital Owner and GMS/Capital Owner;
3. Board of Trustees/Board of Directors;
4. Board of Directors;
5. Information Disclosure and Transparency; and
6. Other Factors



Pengukuran terhadap penerapan praktik-praktik tata kelola perusahaan yang baik merupakan implementasi dari Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) BAB XII Pasal 44. Indikator /parameter penilaian (*assesment*) sesuai yang termuat dalam Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: 16 Tahun 2012 tentang Indikator dan Parameter Penilaian Penerapan GCG BUMN.

Evaluasi penerapan GCG tahun 2022 di Perum JAsta Tirta II dilakukan oleh tim internal Perusahaan yang ditetapkan berdasarkan Surat Penugasan direktur Utama PJT II Nomor: SPN-34/DU/01/2022 tanggal 27 Oktober 2022 tentang Tim Evaluasi/Self Assesment Implementasi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik/*Good Corporate Governance (GCG)* tahun 2022 di Lingkungan Peru Jasa Tirta II.

Hasil Evaluasi/penilaian mandiri terhadap GCG tahun 2022 di lingkungan Perum Jasa Tirta II mencapai predikat **Baik** dengan capaian skor **84,98**.

Secara garis besarnya capaian untuk masing-masing aspek adalah sebagai berikut:

Measurement of the implementation of good corporate governance practices is an implementation of the Regulation of the Minister of SOEs Number: PER-01 / MBU / 2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises (BUMN) CHAPTER XII Article 44. The indicators / parameters of assessment are in accordance with those contained in the Decree of the Secretary of the Ministry of SOEs Number: 16 of 2012 concerning Indicators and Parameters of Assessment of GCG Implementation of SOEs.

The evaluation of the implementation of GCG in 2022 at Perum JAsta Tirta II was carried out by the Company's internal team which was determined based on the Assignment Letter of the President Director of PJT II Number: SPN-34/DU/01/2022 dated 27 October 2022 concerning the Evaluation / Self-Assessment Team for the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in 2022 within Peru Jasa Tirta II.

*The results of the evaluation / self-assessment of GCG in 2022 within Perum Jasa Tirta II achieved a **Good** predicate with a score of **84.98**.*

Broadly speaking, the achievements for each aspect are as follows:

ASPEK PENGUJIAN Testing Aspects		BOBOT Benefits	CAPAIAN SKOR Score Achievement	% CAPAIAN % Capacity
I	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang baik Secara Berkelanjutan / <i>Commitment to the Sustainable Implementation of Good Corporate Governance</i>	7,00	6,6335	94,76
II	Pemilik Modal / <i>Capital Owner</i>	9,00	8,1924	91,02
III	Dewan Pengawas / <i>Supervisory Board</i>	35,00	30,4095	86,88
IV	Direksi / <i>Board of Directors</i>	35,00	31,0294	88,65
V	Pengungkapan Informasi dan Transparansi / <i>Information Disclosure and Transparency</i>	9,00	8,7236	96,92
VI	Aspek Lainnya / <i>Other Aspects</i>	5,00	0,0000	0,00
SKOR PERUSAHAAN / <i>COMPANY SCORE</i>		100,00	84,9883	84,98

Tabel diatas menggambarkan kecukupan infrastruktur dan praktik GCG di lingkungan Perum Jasa Tirta II dibandingkan dengan praktik yang dianggap terbaik (*best practices*) sebagaimana yang terdapat pada indikator/parameter penilaian.

The table above illustrates the adequacy of GCG infrastructure and practices within Perum Jasa Tirta II compared to best practices as contained in the assessment indicators/parameters.



PEMILIK MODAL DAN PENGENDALI *Capital Owner And Control*

Perum Jasa Tirta II merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perusahaan Umum (Perum), yang 100% modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia oleh karena itu Menteri BUMN sebagai wakil Pemerintah selaku pemilik modal merupakan pengendali Perusahaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2010. Besarnya modal Perusahaan adalah seluruh nilai penyertaan modal Negara pada Perum Jasa Tirta II, jumlahnya sebesar Rp164.547.635.935,-

Perum Jasa Tirta II is a State-Owned Enterprise (BUMN) in the form of a Public Company (Perum), with the Republic of Indonesia owning the entire capital. According to Government Regulation Number 7 of 2010, the Minister of BUMN, as the representative of the Government and the owner of capital, is the controller of the Company. The total value of the State's equity participation in Perum Jasa Tirta II is Rp. 164,547,635,935,-, which is the amount of the Company's capital.

RAPAT PEMBAHASAN BERSAMA (RPB) *Joint Discussion Meeting (RPB)*

Perum Jasa Tirta II yang berstatus sebagai Perusahaan Umum (Perum) membuat Perum Jasa Tirta II tidak memiliki Rapat Umum Pemegang Saham. Namun demikian, Perum Jasa Tirta II tetap melaksanakan pertemuan dengan Pemilik Modal yakni Negara yang diwakili oleh Kementerian BUMN setiap tahunnya dalam Rapat Pembahasan Bersama (RPB).

Perum Jasa Tirta II is a Public Company (Perum), so it does not have a General Meeting of Shareholders. However, every year in the Joint Discussion Meeting, Perum Jasa Tirta II continues to meet with the Capital Owners, namely the State, which is represented by the Ministry of SOEs (RPB).

Selama tahun 2022, Perum Jasa Tirta II melaksanakan 1 (satu) kali RPB Tahunan dan 1 (satu) RPB yakni RPB Pengesahan Laporan Keuangan 2021 dan 1 (satu) RPB Revisi RKAP 2022.

Perum Jasa Tirta II implements 1 (one) Annual RPB, 1 (one) RPB for Ratification of 2020 Financial Statements, and 1 (one) RPB Revised RKAP 2021 in 2022.



RISALAH RAPAT PEMBAHASAN BERSAMA (RPB) PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP) TAHUN 2022

Problems of The Joint Discussion Meeting (RPB) of The General Company Jasa Tirta II On The Approval of The Company's Working Plan And Budget (RKAP) Year 2022

1. Rapat Pembahasan Bersama (RPB) Perusahaan Umum Jasa Tirta II atau Perum Jasa Tirta II, diselenggarakan pada: / *Joint Discussion Meeting (RPB) of Perusahaan Umum Jasa Tirta II or Perum Jasa Tirta II, held on:*

Hari/Tanggal : Jumat, 21 Januari 2022
Day/Date : Friday January 21, 2022

Waktu : 13.30 s.d Selesai
Time : 13.30 to Finish

Tempat : Teleconference Zoom Meeting

- Acara : 1. Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2022;
Events : Ratification of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) Year 2022;
2. Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Tahun 2022;
Ratification of the Work Plan and Budget for the Social and Environmental Responsibility (CSR) Programme for 2022;
3. Pembacaan Catatan Hasil Pembahasan Rapat Teknis sebelum Rapat Pembahasan Bersama (RPB);
Reading of the Discussion Notes of the Technical Meeting before the Joint Discussion Meeting (RPB);
4. Usulan Keputusan RPB Kepada Menteri BUMN /
Proposed RPB Decision to the Minister of SOEs

2. Hadir dalam Rapat Pembahasan Bersama: / *Present at the Joint Discussion Meeting:*

a. Perwakilan Pemilik Modal / Capital Owner's Representative

Asisten Deputi Bidang Jasa Telekomunikasi dan Media : YB. Priyatmo Hadi
Assistant Deputy for Telecommunication and Media Services

b. Danareksa

Direktur Investasi / *Director of Investment* : Chris Soemijantoro
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko / *Director of Finance and Risk Management* : M. Teguh Wirahadikusumah

c. Dewan Pengawas / Supervisory Board

Ketua Dewan Pengawas / *Chairman of the Supervisory Board* : Kelik Wirawan

Anggota Dewan Pengawas / *Chairman of the Supervisory Board* : 1. Romy Marcandi
2. Nuning Sri Rejeki W
3. Mohamad Sofwan

d. Direksi / Directors

Direktur Utama / *President Director* : Imam Santoso
Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko / *Director of Finance, Human Resources and Risk Management* : Indriani Widiastuti
Direktur Operasi dan Pemeliharaan / *Director of Operations and Maintenance* : Anton Mardiyono
Direktur Pengembangan Usaha / *Director of Business Development* : Dikdik Permadi Yoffana



3. Jalannya Rapat Pembahasan Bersama / *Conduct of the Joint Discussion Meeting*
 - a. Rapat dipimpin oleh Asisten Deputi Bidang Jasa Telekomunikasi dan Media Bapak YB. Priyatmo Hadi / *The meeting was chaired by Assistant Deputy for Telecommunication and Media Services Mr YB. Priyatmo Hadi*
 - b. Pemaparan Direktur Utama dan Direksi Perum Jasa Tirta I mengenai RKAP Tahun 2022 dan RKA TJSL Tahun 2022 / *Presentation of President Director and Board of Directors of Perum Jasa Tirta I regarding RKAP Year 2022 and RKA TJSL Year 2022*
 - c. Tanggapan dari Dewan Pengawas PUT I mengenai RKAP Tahun 2022 dan RKA TJSL Tahun 2022 / *Responses from the Supervisory Board of Perum Jasa Tirta I regarding the 2022 RKAP and the 2022 TJSL RKA*
 - d. Tanggapan dari Danareksa mengenai RKAP Tahun 2022 dan RKA TJSL Tahun 2022 / *Responses from Danareksa regarding the 2022 RKAP and 2022 TJSL RKA*
 - e. Pembacaan Catatan Hasil Rapat Pembahasan Teknis sebelum Rapat Pembahasan Bersama (RPB) / *Reading of Notes on the Results of the Technical Discussion Meeting before the Joint Discussion Meeting (RPB)*
 - f. Pembacaan Usulan Keputusan Rapat Pembahasan Bersama / *Reading of the Proposed Decision of the Joint Discussion Meeting*
4. Catatan Hasil Pembahasan Rapat Teknis sebelum Rapat Pembahasan Bersama (RPB) / *Notes on the Discussion Results of the Technical Meeting before the Joint Discussion Meeting (RPB)*
 - a. Penyusunan RKAP 2022 secara garis besar sesuai KEP-101/MBU/2002, yaitu memuat: / *The preparation of the 2022 RKAP is broadly in accordance with KEP-101/MBU/2002, which contains:*
 - 1) Rencana Kerja Perusahaan; / *Company Work Plan;*
 - 2) Anggaran Perusahaan; / *Company Budget;*
 - 3) Proyeksi Keuangan Pokok Perusahaan; / *Company's Basic Financial Projections;*
 - 4) Proyeksi Keuangan Pokok Anak Perusahaan; / *Principal Financial Projections of Subsidiaries;*
 - 5) Hal-hal lain yang memerlukan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). / *Other matters that require a resolution of the General Meeting of Shareholders (GMS).*
 - b. Asumsi sudah sesuai APBN Tahun 2022 dan Surat Menteri BUMN No: S-787/MBU/10/2021 tentang Aspirasi Pemegang Saham. / *Assumptions are in accordance with the 2022 State Budget and SOE Minister's Letter No. S-787/MBU/10/2021 on Shareholders' Aspirations: S-787/MBU/10/2021 regarding Shareholder Aspirations.*
 - c. Pemenuhan APS Tahun 2022, baik dari Fungsi Keuangan, Fungsi Manajemen Risiko dan Kepatuhan, Fungsi SDM, Fungsi Hukum, Fungsi TI, dan Fungsi TJSL, seluruhnya telah terpenuhi/sesuai. / *Fulfilment of APS in 2022, both from the Finance Function, Risk Management and Compliance Function, HR Function, Legal Function, IT Function, and TJSL Function, have all been fulfilled / appropriate.*
 - d. KPI sudah Inline dengan APS dan KPI Turunan Danareksa / *KPIs have been Inline with APS and Danareksa Derived KPIs.*
 - e. Angka target: / *Target numbers:*
 - 1) Pendapatan Usaha naik 12,17% dari prognosa 2021, utamanya berasal dari pendapatan listrik, yaitu sebesar Rp475,82 Miliar dan pendapatan Air Baku sebesar Rp320,85 Miliar. / *Operating Revenue increased by 12.17% from 2021 prognosis, mainly derived from electricity revenue, which amounted to IDR475.82 Billion and Raw Water revenue of IDR320.85 Billion.*
 - 2) Pada tahun 2022 terdapat asumsi kenaikan tarif PAM Jaya yang semula Rp272,50 menjadi Rp294,00 sehingga pendapatan Air Baku mengalami kenaikan dari prognosa 2021. / *In 2022, there is an assumption of an increase in PAM Jaya tariff from Rp272.50 to Rp294.00 so that Raw Water revenue has increased from the 2021 prognosis.*
 - 3) Di tahun 2022, terdapat target pendapatan Air Baku dari PLTA Saguling, Cirata dan Rajamandala. Perlu dilakukan koordinasi dengan PLN Group, BPKP dan pihak terkait agar permasalahan BJPSDA dengan PLN Group dapat bisa diselesaikan. / *In 2022, there are Raw Water revenue targets from Saguling, Cirata and Rajamandala hydropower plants. It is necessary to coordinate with PLN Group, BPKP and related parties so that BJPSDA's problems with PLN Group can be resolved.*



- 4) Pada RKAP 2022, semua unit bisnis (kecuali Air Baku) ditargetkan dapat memberikan margin positif pada perusahaan, namun di prognosa 2021, unit usaha Air Baku, Air Bersih, Pariwisata dan AMDK masih memberikan margin negatif. Kiranya perlu disusun langkah strategis agar target RKAP 2022 dapat tercapai. / *In the 2022 RKAP, all business units (except Raw Water) are targeted to provide positive margins to the company, but in the 2021 prognosis, the Raw Water, Clean Water, Tourism and AMDK business units still provide negative margins. It is necessary to develop strategic steps so that the 2022 RKAP target can be achieved.*
 - 5) Laba Bersih naik 15,53% dari prognosa 2021 / *Net Profit increased by 15.53% from 2021 prognosis*
 - 6) Total Aset naik 7,8% dari prognosa 2021 / *Total Assets increased by 7.8% from 2021 prognosis*
 - 7) Cash Flow Operation positif sebesar Rp188,85 Miliar / *Positive Cash Flow Operation of IDR188.85 Billion*
 - 8) Investasi hanya 97,96% dari prognosa 2021. Namun demikian investasi untuk pengembangan usaha meningkat 249% dari prognosa 2021. Diharapkan investasi tersebut dapat memberikan kontribusi positif pada pendapatan. / *Investment is only 97.96% of 2021 prognosis. However, investment for business development increased 249% from 2021 prognosis. It is expected that the investment can make a positive contribution to revenue.*
5. Usulan Keputusan RPB Kepada Menteri BUMN / *Proposed RPB Decision to the Minister of SOEs*
- Setelah dilakukan pembahasan terhadap RKAP dan RKA TJSL Tahun Buku 2022 serta memperhatikan tanggapan Dewan Pengawas maka Rapat Pembahasan Bersama akan mengusulkan kepada Menteri BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jasa Tirta II terkait: / *After discussion of the RKAP and RKA TJSL for the 2022 Financial Year and taking into account the responses of the Supervisory Board, the Joint Discussion Meeting will taking into account the responses of the Supervisory Board, the Joint Discussion Meeting will propose to the Minister of SOEs as the Capital Owner of Perum Jasa Tirta II related to:*
- a. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2022 termasuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dewan Pengawas Tahun 2022 / *Ratify the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for 2022, including the Work Plan and Budget (RKA TJSL) for the Financial Year 2022 including the Work Plan and Budget (RKA) of the Supervisory Board for 2022.*
 - 1) Laporan Posisi Keuangan per tanggal 31 Desember 2022 ditargetkan mencapai Total Aset sebesar Rp1.793,15 Miliar dan Total Ekuitas sebesar Rp1.476,86 Miliar. / *The Financial Position Report as of 31 December 2022 is targeted to reach Total Assets of Rp1,793.15 Billion and Total Equity of Rp1,476.86 Billion.*
 - 2) Laba Bersih tahun 2022 sebesar Rp143,92 Miliar / *Net Profit in 2022 of Rp143.92 Billion*
 - 3) Total Capex ditargetkan sebesar Rp206,66 Miliar / *Total Capex is targeted at Rp206.66 Billion*
 - 4) Total Skor Tingkat Kesehatan perusahaan sebesar 87,75 dengan kriteria Sehat AA" / *Total company Health Level Score of 87.75 with Healthy AA criteria"*
 - b. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA-TJSL) Tahun Buku 2022 dengan pokok-pokok sebagai berikut: / *To approve the Work Plan and Budget for Social and Environmental Responsibility Programme (RKA-TJSL) for Financial Year 2022 with the following points:*
 - 1) Program TJSL non PUMK yang dijalankan oleh Unit TJSL Perum Jasa Tirta II dan bersumber dari anggaran yang diperhitungkan sebagai beban pada laporan RKAP Tahun 2022 sebesar Rp7.525.000.000,00. / *The non-PUMK TJSL programme run by the TJSL Unit of Perum Jasa Tirta II and sourced from the budget that is calculated as an expense in the 2022 RKAP report amounting to Rp7,525,000,000.00.*
 - 2) Program TJSL Pendanaan UMK yang bersumber dari dana bergulir Program Pendanaan UMK Tahun 2022 sebesar Rp1.600.000.000,00. / *MSE Funding TJSL Programme sourced from revolving funds of MSE Funding Programme in 2022 amounting to Rp1,600,000,000.00.*
 - c. Menetapkan Key Performance Indicator (KPI) yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2022 antara Direksi dan Dewan Pengawas dengan Pemilik Modal. / *Determine the Key Performance Indicator (KPI) of the Supervisory Board in 2022 as stated in the Management Contract in 2022 between the Supervisory Board and the Capital Owner.*
 - d. Menetapkan Key Performance Indicator (KPI) Dewan Pengawas Tahun 2022 yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2022 antara Dewan Pengawas dan Pemilik Modal. / *Establishing the Key Performance Indicator (KPI) of the Supervisory Board for 2022 as set out in the Management Contract for 2022 between the Supervisory Board and the Capital Owner*
 - e. Menetapkan Indikator Aspek Operasional untuk Pengukuran Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun 2022. / *Determining the Operational Aspect Indicators for the Measurement of the Company's Health Level in 2022.*



NO.	URAIAN Description	BOBOT Benefits
1.	Pelayanan Kepala Pelanggan/Masyarakat / Customer/Community Head Service	15.00
2.	Hasil Pelaksanaan Penugasan Pemerintah untuk Pelayanan Umum (Aspek Non Komersial) / Results of Implementation of Government Assignments for Public Services (Non-Commercial Aspects)	10.00
3.	Efisiensi Produksi dan Produktifitas / Production Efficiency and Productivity	5.00
4.	Kepedulian Terhadap Lingkungan / Concern for the Environment	5.00
TOTAL / Total		35.00

6. Penutup / Closing

Asisten Deputy Bidang Jasa Telekomunikasi dan Media Bapak YB. Priyatmo Hadi menutup Rapat Pembahasan Bersama untuk kemudian menunggu keputusan Menteri BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jasa Tirta II atas agenda-agenda yang diusulkan dalam Rapat Pembahasan Bersama ini. / Assistant Deputy for Telecommunication and Media Services Mr YB. Priyatmo Hadi closed the Joint Discussion Meeting to then await the decision of the Minister of SOEs as the Capital Owner of Perum Jasa Tirta II on the agendas proposed in this Joint Discussion Meeting.

Tindak Lanjut Hasil Keputusan RPB Tahun Sebelumnya

Perum Jasa Tirta II telah menindaklanjuti dan merealisasikan seluruh keputusan RPB tahun sebelumnya dan tidak terdapat keputusan RPB yang belum dilaksanakan.

Follow-up on the RPB Decision from the Previous Year

Perum Jasa Tirta II has followed up on and implemented all RPB decisions made in the previous year, and no RPB decisions have not been implemented.

DEWAN PENGAWAS Supervisory Board

Dewan Pengawas melakukan fungsi pengawasan, sedangkan Direksi bertanggung jawab atas penentuan dan penerapan strategi untuk mencapai sasaran dan tujuan usaha Perusahaan.

The Supervisory Board serves as a watchdog, whereas the Board of Directors is in charge of developing and implementing strategies to achieve the Company's business goals and objectives.

Jumlah dan Komposisi Dewan Pengawas

Komposisi Dewan Pengawas terdiri dari satu orang ketua dan beberapa anggota yang jumlahnya disesuaikan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat, dan cepat sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.

Supervisory Board Size and Composition

The Supervisory Board is composed of one chairman and several members, the number of whom is adjusted to allow for effective, precise, and timely decision making in accordance with the needs of the Company.

Sesuai Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Pemilik Modal Perum Jasa Tirta II Nomor: SK-4/MBU/01/2020 tanggal 3 Januari 2020, SK-092/MBU/03/2020 tanggal 23 Maret 2020, SK-340/MBU/10/2020 tanggal 21 Oktober 2020, SK- 392/

In accordance with the Minister of State-Owned Enterprises' Decree Number: SK-4/MBU/01/2020 dated January 3, 2020, SK-092/MBU/03/2020 dated March 23, 2020, SK-340/MBU/10/2020 dated October 21, 2020, \



MBU/12/2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II. Jumlah dan komposisi Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

SK-392/MBU/12/2020, dated December 15, 2020, regarding the dismissal and appointment of members of Perum Jasa Tirta II's Supervisory Board. The number and composition of Perum Jasa Tirta II's Supervisory Board in 2020 are as follows:

NO.	PESERTA UNDANGAN <i>Invited Participants</i>	JABATAN <i>Position</i>	TUGAS <i>Job</i>
1.	Kelik Wirawan Wahyu Widodo	Ketua Dewan Pengawas <i>Chairman of the Supervisory Board</i>	Mengkoordinasikan seluruh tugas dan fungsi seluruh Dewan Pengawas serta memberikan arahan kepada Direksi terhadap pengurusan usaha perusahaan. <i>/ Coordinate all duties and functions of the entire Supervisory Board and provide direction to the Board of Directors on the management of the company's business.</i>
	Nuning Sri Rejeki Wulandari	Anggota Dewan Pengawas <i>Member of the Supervisory Board</i>	Melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian arahan kepada Direksi terhadap pengurusan usaha perusahaan bidang Hukum, SDM dan Hubungan Antar Lembaga. / Carry out supervisory duties and provide direction to the Board of Directors on the management of the company's business in the fields of Law, Human Resources and Inter-Institutional Relations.
	Romy Marcandi	Anggota Dewan Pengawas <i>Member of the Supervisory Board</i>	Melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian arahan kepada Direksi terhadap pengurusan usaha perusahaan bidang Aset dan Keuangan. / Carry out supervisory duties and provide direction to the Board of Directors on the management of the company's business in the field of Assets and Finance.
	Fatkhurohman Taufik	Anggota Dewan Pengawas Independen <i>Independent Supervisory Board Member</i>	Melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian arahan kepada Direksi terhadap pengurusan usaha perusahaan bidang Pengembangan Usaha dan Pemantauan Risiko. / Carry out supervisory duties and provide direction to the Board of Directors on the management of the company's business in the field of Business Development and Risk Monitoring.

Selanjutnya sesuai dengan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Pemilik Modal Perum Jasa Tirta II Nomor: SK-214/MBU/09/2022 tanggal 21 September 2022, maka susunan Dewan Pengawas menjadi:

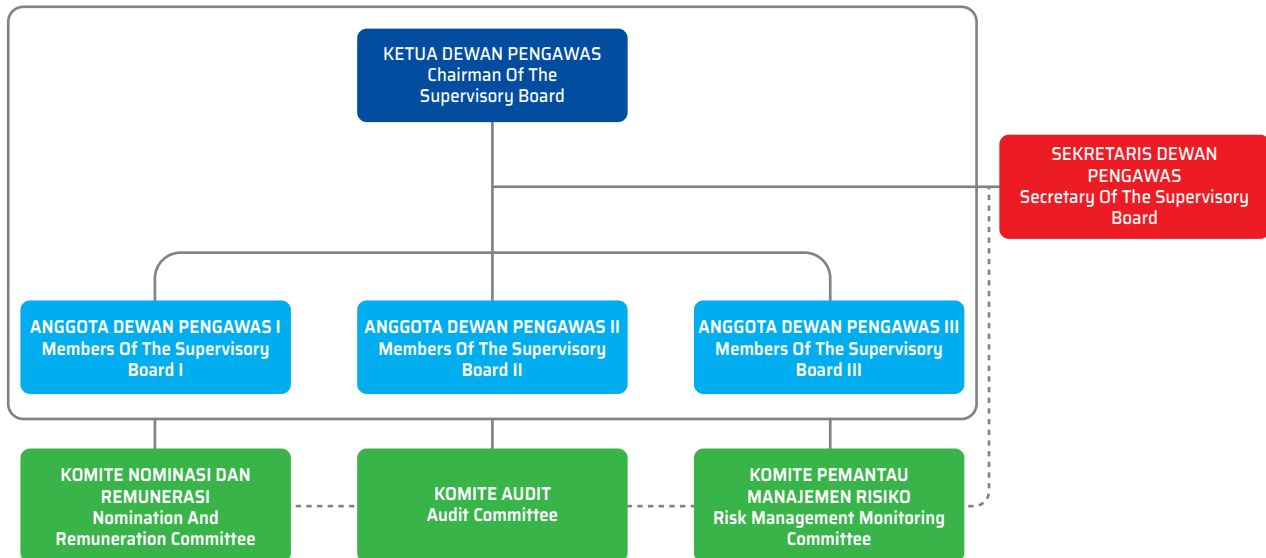
- a. **Kelik Wirawan Wahyu Widodo**
- Ketua Dewan Pengawas
- b. **Nuning Sri Rejeki Wulandari**
- Anggota Dewan Pengawas
- c. **Romy Marcandi**
- Anggota Dewan Pengawas
- d. **Fatkhurohman Taufik**
- Anggota Dewan Pengawas Independen

Furthermore, in accordance with the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as the Capital Owner of Perum Jasa Tirta II Number: SK-214/MBU/09/2022 dated 21 September 2022, the composition of the Supervisory Board becomes:

- a. **Kelik Wirawan Wahyu Widodo**
- Chairman of the Supervisory Board
- b. **Nuning Sri Rejeki Wulandari**
- Member of the Supervisory Board
- c. **Romy Marcandi**
- Member of the Supervisory Board
- d. **Fatkhurohman Taufik**
- Independent Supervisory Board Member



STRUKTUR ORGANISASI DEWAN PEGAWAS *Organizational Structure Of The Supervisory Board*



Kriteria Dewan Pengawas

Kendati Pemilik Modal memiliki wewenang untuk mengangkat anggota Dewan Pengawas, pengangkatan dan penetapan Dewan Pengawas wajib memperhatikan kriteria-kriteria yang diatur dalam Pedoman Kerja, Anggaran Dasar, maupun peraturan dan regulasi lain yang berlaku.

Kriteria Dewan Pengawas antara lain meliputi:

1. Perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan atau Perum dinyatakan pailit;
2. Orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara;
3. Mantan anggota Direksi BUMN yang sudah tidak menjabat anggota Direksi BUMN yang bersangkutan sekurang-kurangnya satu tahun, kecuali dengan pertimbangan tertentu yang diputuskan oleh Menteri dalam rangka menjaga kesinambungan program penyehatan BUMN yang bersangkutan, sepanjang tidak ada ketentuan perundang-undangan lain yang melarangnya;
4. Memiliki integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen Perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perusahaan dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;

Supervisory Board Evaluation Criteria

Although the Capital Owner has the authority to appoint Supervisory Board members, the appointment and determination of the Supervisory Board must adhere to the criteria outlined in the Work Guidelines, Articles of Association, and other applicable rules and regulations.

The following are the Supervisory Board criteria:

1. *A person who is legally capable and has never been declared bankrupt, or a member of the Board of Directors or Supervisory Board who is found guilty of causing a company or public corporation to be declared bankrupt;*
2. *People who have never been punished for committing a financial crime against the state;*
3. *A former member of the BUMN's Board of Directors who has not served as a member of the BUMN's Board of Directors for at least one year, except for certain considerations decided by the Minister in order to maintain the sustainability of the BUMN's restructuring program, as long as no other statutory provisions prohibit it;*
4. *Have integrity, dedication, understand the Company's management issues related to one of the management functions, have sufficient knowledge in the Company's business field and can provide sufficient time to carry out their duties;*



5. Komposisi Dewan Pengawas paling sedikit 20% (dua puluh persen) merupakan anggota Dewan Pengawas Independen;
 6. Komposisi Dewan Pengawas harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, cepat, serta dapat bertindak secara independen;
 7. Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur-unsur pejabat di bawah Menteri Teknis, Menteri Keuangan, maupun kementerian dan pimpinan departemen/lembaga lain yang kegiatannya berhubungan langsung dengan Perusahaan ;
 8. Antar anggota Dewan Pengawas dan Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sedarah atau hubungan karena perkawinan sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping. Dalam hal terjadi kondisi demikian, maka Menteri berwenang memberhentikan salah seorang dari Dewan Pengawas tersebut;
 9. Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangka sebagai:
 1. Anggota Direksi pada BUMN, BUMD, dan Badan Usaha Milik Swasta;
 2. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
 10. Anggota Dewan Pengawas dilarang menjadi pengurus partai politik, calon anggota legislatif, anggota legislatif, calon Kepala Daerah, calon Wakil Kepala Daerah, Kepala Daerah, dan/atau Wakil Kepala Daerah;
 11. Anggota Dewan Pengawas dilarang mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Perusahaan , selain penghasilan yang diterima sebagai anggota Dewan Pengawas;
 12. Masa jabatan Dewan Pengawas diatur sebagai berikut:
 1. Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
 2. Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir berdasarkan keputusan Menteri dengan menyebutkan alasannya;
 3. Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:
 - (i) Meninggaldunia;
 - (ii) Masa jabatan berakhir;
 - (iii) Diberhentikan berdasarkan keputusan Menteri;
 - (iv) Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas berdasarkan ketentuan Peraturan
5. *The composition of the Supervisory Board includes at least 20% (twenty percent) members of the Independent Supervisory Board;*
 6. *The Supervisory Board's composition must be such that it can make effective, timely decisions and act independently;*
 7. *Members of the Supervisory Board may include elements from the Technical Minister, the Minister of Finance, and other ministries and heads of departments/institutions whose activities are directly related to the Company;*
 8. *Members of the Supervisory Board and the Board of Directors are prohibited from having family or marital relations up to the third degree, either straight or sideways. In such a case, the Minister has the authority to dismiss one of the Supervisory Boards.*
 9. *Members of the Supervisory Board are not permitted to hold the following positions:*
 1. *Board of Directors in BUMN, BUMD, and Private Owned Enterprises;*
 2. *Other positions in accordance with the provisions of the legislation;*
 3. *Other positions that may cause a conflict of interest;*
 10. *Members of the Supervisory Board are not permitted to serve as administrators of political parties, candidates for legislative members, legislative members, candidates for Regional Heads, candidates for Deputy Regional Heads, Regional Heads, and/or Deputy Regional Heads;*
 11. *Members of the Supervisory Board are not permitted to benefit personally from the Company's activities, other than the income received as a member of the Supervisory Board.*
 12. *The Supervisory Board's term of office is governed as follows:*
 1. *Members of the Supervisory Board are appointed for a five-year term and may be reappointed for a one-year term.*
 2. *Members of the Supervisory Board may be dismissed before their term expires based on the Minister's decision, which must be justified;*
 3. *The position of a member of the Supervisory Board terminates when:*
 - (i) *the member dies;*
 - (ii) *the term of office expires; or*
 - (iii) *the member is dismissed by the Minister.*
 - (iv) *No longer meets the requirements for membership on the Supervisory Board under Government Regulation*



Pemerintah Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II dan peraturan perundang-undangan lainnya; Dalam hal terjadi kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya masa jabatan tersebut, Menteri sudah harus mengisi kekosongan jabatan tersebut.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas

Dewan Pengawas sebagai organ Perusahaan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan saran serta rekomendasi kepada Direksi atas pengelolaan Perusahaan serta memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan prinsip-prinsip GCG dengan baik. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Pengawas adalah sebagai berikut:

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Menteri, dan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan;
2. Melakukan pemantauan efektivitas pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang diterapkan di Perusahaan;
3. Bertanggung jawab penuh atas pengawasan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan;
4. Bertanggung jawab penuh kepada Pemilik Modal;
5. Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perusahaan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perusahaan.

Wewenang Dewan Pengawas

1. Memperoleh akses yang cukup atas informasi Perusahaan, dalam hal ini melihat buku-buku, surat berharga, serta memeriksa kekayaan Perusahaan;
2. Meminta penjelasan Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan;

Number 25 of 2022 concerning Public Company (Perum) Jasa Tirta II and other laws and regulations; In the event of a vacancy on the Supervisory Board, the Minister must fill the vacancy within 30 (thirty) days at the latest from the end of the term of office.

Supervisory Duties and Responsibilities

The Supervisory Board, as an organ of the Company, is collectively responsible for supervising and advising the Board of Directors on the management of the Company, as well as ensuring that GCG principles are properly implemented. The Supervisory Board's duties, responsibilities, and authorities are as follows:

Responsibilities and Duties

1. *Oversee management policies, the general course of management for the Company and the Company's business carried out by the Board of Directors, and provide advice to the Board of Directors, including supervision of the implementation of the Term Plan Company Length (RJPP), Company Work Plan and Budget (RKAP), provisions of the Articles of Association and Ministerial Decrees, and laws and regulations in accordance with the Company's purposes and objectives;*
2. *Monitoring the effectiveness of the Company's implementation of Good Corporate Governance;*
3. *Fully responsible for the supervision of the Company in the interests and objectives of the Company;*
4. *Fully responsible to the Capital Owner;*
5. *Each member of the Supervisory Board is personally liable for the Company's loss if the person is guilty or negligent in carrying out his duties in the interests and business of the Company.*

The Supervisory Board's Authority

1. *Obtain adequate access to Company information, in this case by reviewing the books, securities, and assets;*
2. *Obtaining an explanation from the Board of Directors and/or other officials on all issues concerning the Company's management;*



3. Melakukan penilaian atas akurasi informasi yang disiapkan untuk pihak lain, khususnya dalam laporan keuangan dan laporan tahunan;
4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas;
6. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan, dengan menyebutkan alasannya;
7. Membentuk komite-komite lain selain komite audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan;
8. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perusahaan, jika dianggap perlu;
9. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan keputusan RPB.

Pedoman dan Tata Tertib Dewan Pengawas

Dalam rangka memastikan pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas berjalan dengan baik, Perum Jasa Tirta II telah menyusun Board Manual yang disahkan dalam Keputusan Bersama Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik No. 1/DP/68/KBS/10/2019 tanggal 30 Oktober 2019. Pedoman kerja dan tata tertib Dewan Pengawas merupakan hasil modifikasi dari berbagai peraturan yang berlaku dan praktik-praktik terbaik GCG, hukum korporasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku, arahan Pemilik Modal, serta ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan.

Pedoman kerja dan tata tertib Dewan Pengawas memuat petunjuk tata laksana kerja Dewan Pengawas bagi masing-masing anggota Dewan Pengawas dalam menjalankan tugas yang selaras dengan visi dan misi Perusahaan, sehingga dapat terciptanya standar kerja yang tinggi dan selaras dengan prinsip-prinsip GCG. Adapun hal-hal yang diatur dalam pedoman kerja dan tata tertib Dewan Pengawas meliputi penjelasan fungsi, tugas, kewajiban, dan tanggung jawab serta hak dan wewenang Dewan Pengawas, keanggotaan Dewan Pengawas, komposisi Dewan Pengawas dan masa jabatannya, standar penilaian kinerja Dewan Pengawasan, kebijakan independensi bagi Pengawas Independen, mekanisme rapat Dewan Pengawas, penjelasan komite-komite di bawah Dewan Pengawas, dan tata laksana kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Supervisory Guidelines and Rules

To ensure the proper implementation of the Supervisory Board's functions, duties, and responsibilities, Perum Jasa Tirta II compiled a Board Manual, which was ratified in the Joint Decree of the Supervisory Board and the Board of Public Company (Perum) Jasa Tirta II on Governance Principles Dated 30 October 2019, Good Corporate Governance No. 1/DP/68/KBS/10/2019. The Supervisory Board's work guidelines and rules are a modification of various applicable regulations and GCG best practices, corporate law, applicable laws and regulations, capital owner directives, and provisions of the Company's Articles of Association.

The Supervisory Board's work guidelines and rules contain instructions for the Supervisory Board's work procedures for each member of the Supervisory Board in carrying out their duties in accordance with the Company's vision and mission, so that high work standards can be established and in accordance with GCG principles. The Supervisory Board's work guidelines and rules include an explanation of the functions, duties, obligations, and responsibilities, as well as the Supervisory Board's rights and authorities, the membership of the Supervisory Board, the composition of the Supervisory Board and the term of office, standards for evaluating the Supervisory Board's performance, policies independence for the Independent Supervisor, and the mechanism.



Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas

Prosedur mengenai pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas di lingkungan Perum Jasa Tirta II dilaksanakan oleh Kementerian BUMN dengan mengacu pada ketentuan dalam yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas adalah sebagai berikut:

1. Pengangkatan Dewan Pengawas

1. Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Menteri BUMN;
2. Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan yang sama dengan anggota Direksi dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
3. Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi;
4. Apabila dipandang perlu, dalam rangka pengangkatan Dewan Pengawas, Menteri BUMN dapat meminta masukan dari Menteri Teknis.

2. Pemberhentian Dewan Pengawas

1. Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh Menteri BUMN, apabila berdasarkan kenyataan anggota Dewan Pengawas :
 - Tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - Tidak melaksanakan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan ;
 - Dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai ketentuan hukum tetap;
 - Meninggal dunia atau berhalangan tetap;
 - Mengundurkan diri.
2. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam poin a diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri :
 - Pembelaan diri dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada Menteri BUMN dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberitahu secara tertulis oleh Menteri BUMN tentang rencana pemberhentian tersebut;
 - Selama rencana pemberhentian masih dalam proses maka anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan tetap menjalankan tugasnya; Jika dalam jangka waktu 2 (dua)

Supervisory Board Appointment and Removal

The Ministry of SOEs handles the appointment and dismissal of the Supervisory Board within Perum Jasa Tirta II in accordance with the provisions stipulated in the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-02/MBU/02/2015 concerning Requirements and Procedures. Members of the Supervisory Board and Supervisory Board of State-Owned Enterprises are appointed and dismissed. The following is the procedure for appointing and dismissing the Supervisory Board:

1. Formation of the Supervisory Board

1. The Minister of SOEs appoints and dismisses members of the Supervisory Board;
2. Members of the Supervisory Board are appointed for the same term of office as members of the Board of Directors and may be reappointed for one (one) term of office;
3. The appointment of members of the Supervisory Board does not coincide with the appointment of members of the Board of Directors;
4. If deemed necessary, the Minister of SOEs may request input from the Technical Minister in the context of appointing the Supervisory Board.

2. Dissolution of the Supervisory Board

1. Members of the Supervisory Board may be dismissed by the Minister of SOEs before the end of their term of office if they:
 - Fail to carry out their duties properly;
 - Failure to comply with current laws and regulations;
 - Engaging in actions that are detrimental to the Company;
 - Being found guilty by a court decision with permanent legal consequences;
 - Death or permanent disability;
 - Resign.
2. The decision to dismiss, as mentioned in point a, is made after the person in question has been given the opportunity to defend himself:
 - Self-defense is carried out in writing and submitted to the Minister of BUMN within 1 (one) month of the date the member of the Supervisory Board concerned is notified in writing by the Minister of BUMN regarding the planned termination;
 - The member of the Supervisory Board concerned will continue to carry out his/her duties as long as the dismissal plan is still in process; If the Minister of SOEs does not



bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri Menteri BUMN tidak memberikan keputusan pemberhentian anggota Dewan Pengawas tersebut, maka rencana pemberhentian tersebut menjadi batal;

- Kedudukan sebagai Dewan Pengawas berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian dari Menteri BUMN.

make a decision to dismiss the member of the Supervisory Board within 2 (two) months of the date of submission of the self-defense, the planned dismissal will be cancelled;

- *His position as a member of the Supervisory Board ends with the issuance of a decision on the dismissal of the Minister of SOEs.*

Program Orientasi bagi Anggota Dewas Baru

Anggota Dewan Pengawas yang diangkat untuk pertama kalinya diberikan program orientasi/ pengenalan mengenai Perum Jasa Tirta II. Pelaksanaan program orientasi dilaksanakan oleh Sekretaris Perusahaan. Materi program orientasi yang telah diberikan kepada Dewan Pengawas baru antara lain sebagai berikut:

1. Gambaran mengenai Perum Jasa Tirta II berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis.
2. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perum Jasa Tirta II
3. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit.
4. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas.

Program orientasi yang dilaksanakan dapat disampaikan melalui presentasi, pertemuan, kunjungan ke kantor cabang dan pengkajian dokumen serta program lainnya sesuai dengan kebijakan Perusahaan. Selama tahun 2022, terdapat penggantian Dewan Pengawas yaitu Bapak M. Sofwan digantikan oleh Fatkhurrahman Taufik dan telah dilaksanakan program pengenalan/orientasi.

Kebijakan Suksesi Dewan Pengawas

Dalam menjamin kecukupan jumlah dan komposisi Dewan Pengawas, Perum Jasa Tirta II menjalankan kebijakan suksesi Dewan Pengawas yang dilaksanakan dengan tunduk pada regulasi yang berlaku dan ketentuan internal yang disusun Perusahaan. Mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, sumber bakal calon Dewan Pengawas berasal dari:

New Board Member Orientation Program

New members of the Supervisory Board are given an orientation/introduction program to Perum Jasa Tirta II. The Corporate Secretary is in charge of putting the orientation program into action. The following are the orientation program materials provided to the new Supervisory Board:

1. *A summary of Perum Jasa Tirta II's objectives, nature and scope of activities, financial and operational performance, strategies, short-term and long-term business plans, competitive position, strategic risks, and issues.*
2. *Perum Jasa Tirta II's application of GCG principles*
3. *Details on delegated authority, internal and external audits, internal control systems and policies, and the Audit Committee.*
4. *Information on the Supervisory Board's duties and responsibilities.*

The orientation programme can be delivered through presentations, meetings, visits to branch offices and document review as well as other programmes in accordance with Company policy. During 2022, there was a replacement of the Supervisory Board, namely Mr. M. Sofwan replaced by Fatkhurrahman Taufik and an introduction/orientation programme was implemented..

Supervisory Board Succession Policy

Perum Jasa Tirta II implemented a succession policy for the Supervisory Board to ensure the adequacy of the number and composition of the Supervisory Board, which was carried out in accordance with the applicable regulations and internal regulations prepared by the Company. According to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-02/MBU/02/2015 concerning the Requirements and Procedures for Appointment and Dismissal of Members of the Supervisory Board and Supervisory Board of State-Owned Enterprises, candidates for the Supervisory Board shall come from the following sources:



1. Mantan Direksi BUMN;
2. Dewan Pengawas /Dewan Pengawas BUMN;
3. Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Pemerintah; dan/atau
4. Sumber lain.

Dalam mendukung kebijakan suksesi tersebut, Perum Jasa Tirta II tetap memperhatikan pemenuhan persyaratan kualifikasi calon anggota Dewan Pengawas, hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*), program pengenalan dan orientasi bagi anggota Dewan.

Hubungan Afiliasi Dewan Pengawas

Kriteria hubungan afiliasi antara anggota Dewan Pengawas, Direksi, dan Pemilik Modal Pengendali meliputi:

1. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Pengawas dengan anggota Dewan Pengawas lainnya.
2. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Pengawas dengan anggota Direksi.
3. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Pengawas dengan Pemilik Modal Utama dan/atau Pengendali.
4. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Pengawas; dan
5. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemilik Modal Utama dan/atau Pengendali.

Uji Kelayakan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) Dewan Pengawas

Perum Jasa Tirta II berupaya memastikan bahwa seluruh anggota Dewan Pengawas memiliki integritas, kompetensi, reputasi dan pengalaman, serta keahlian yang dibutuhkan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing. Untuk menjamin kesesuaian antara latar belakang kompetensi, keahlian, reputasi dan pengalaman kerja terhadap kebutuhan posisi, seluruh anggota Dewan Pengawas telah melalui Uji Kelayakan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*).

Kepemilikan Saham Dewan Pengawas

Hingga 31 Desember 2022 Perum Jasa Tirta II tidak pernah melakukan penawaran umum saham di bursa efek manapun dan tidak pernah melakukan program kepemilikan saham untuk manajemen (*Management Stock Option Program / MSOP*) maupun program kepemilikan saham oleh karyawan (*Employee Stock Option Program / ESOP*). Sehingga tidak ada saham yang dimiliki oleh anggota Dewan Pengawas.

1. *Former SOE Directors;*
2. *Supervisory Board / Supervisory Board of SOEs;*
3. *Structural Officials Perum Jasa supports the succession policy.*
4. *Additional sources*

In order to support the succession policy, Perum Jasa Tirta II continues to focus on meeting the qualification requirements of prospective Supervisory Board members, the results of the Fit and Proper Test, and introduction and orientation programs for Board members.

Supervisory Board Affiliation

Affiliate relationships between members of the Supervisory Board and other members of the Supervisory Board are among the criteria for :

1. *Relationships of affiliation between members of the Supervisory Board, the Board of Directors, and the Owners of Controlling Capital.*
2. *Relationship of affiliation between members of the Supervisory Board and the Board of Directors.*
3. *Affiliation relationship between Supervisory Board members and Main and/or Controlling Capital Owners.*
4. *Affiliation relationship between Board of Directors members and Supervisory Board members; and*
5. *Affiliation relationship between Board of Directors members and the Main and/or Controlling Capital Owner.*

Fit and Proper Testing The Supervisory Board

Perum Jasa Tirta II strives to ensure that all Supervisory Board members have the integrity, competence, reputation, and experience required to carry out their respective functions and duties. All members of the Supervisory Board have passed the Fit & Proper Test to ensure that their background of competence, expertise, reputation, and work experience is appropriate for the needs of the position.

Supervisory Board for Share Ownership

*As of December 31, 2022 Perum Jasa Tirta II had never conducted a public offering of shares on any stock exchange, nor had it ever conducted a share ownership program for management (*Management Stock Option Program / MSOP*) or an employee stock option program (*Employee Stock Option Program / ESOP*). As a result, no shares are owned by members of the Supervisory Board.*



Dewan Pengawas Independen

Dewan Pengawas Independen Perum Jasa Tirta II telah memenuhi persyaratan jumlah yang diatur dalam ketentuan GCG Perusahaan yang menyatakan bahwa jumlah Dewan Pengawas Independen sekurang-kurangnya 20% dari seluruh anggota Dewan Pengawas yang ada. Jumlah Dewan Pengawas Independen Perum Jasa Tirta II adalah 1 (satu) orang. Masing-masing Dewan Pengawas telah menandatangani Surat Pernyataan untuk menunjukkan independensi Dewan Pengawas.

Kriteria Penentuan Dewan Pengawas Independen

Seluruh anggota Dewan Pengawas tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Pengawas lainnya, Direksi, dan/atau Pemilik Modal Pengendali atau hubungan dengan Perusahaan menerapkan kriteria pemilihan Dewan Pengawas sesuai dengan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang meliputi:

- Tidak menjabat sebagai Direksi di Perusahaan terafiliasi;
- Tidak bekerja pada Pemerintah termasuk di departemen, lembaga, dan kemiliteran dalam kurun waktu tiga tahun terakhir;
- Tidak bekerja di BUMN yang bersangkutan atau afiliasinya dalam kurun waktu tiga tahun terakhir;
- Tidak memiliki keterkaitan finansial baik langsung maupun tidak langsung dengan BUMN yang bersangkutan atau Perusahaan yang menyediakan jasa dan produk kepada BUMN yang bersangkutan dan afiliasinya, yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Pernyataan Independensi Dewan Pengawas

Dalam memenuhi persyaratan independensi Dewan Pengawas yang disyaratkan, Dewan Pengawas dipastikan telah memenuhi kriteria kualifikasi dalam hal administratif dan kepatuhan serta dinyatakan dalam kondisi sesungguhnya terkait pribadi anggota Dewan Pengawas sesuai dengan kriteria yang ditentukan.

Independent Supervisory Board

The Independent Supervisory Board of Perum Jasa Tirta II has met the number requirements stipulated in the Company's GCG, which states that the number of Independent Supervisory Board must be at least 20% of all existing Supervisory Board members. The number of Independent Supervisory Board appointed by Perum Jasa Tirta II is 1 (one). To demonstrate the Supervisory Board's independence, each member has signed a Statement Letter.

Selection Criteria for the Independent Supervisory Board

All members of the Supervisory Board have no financial, management, share ownership, or family relationships with other members of the Supervisory Board, the Board of Directors, and/or the Company. The Company selects the Supervisory Board in accordance with Decision Minister of State-Owned Enterprises No. KEP-117/M-MBU/2002 concerning the Implementation of Good Corporate Governance Practices in State-Owned Enterprises (BUMN), which includes the following criteria:

- *Not serving as a Board of Directors in an affiliated company;*
- *Not working for the Government, including in departments, institutions, and the military within the last three years;*
- *Not working in the relevant BUMN or affiliate within the last three years;*
- *Has no financial relationship, either directly or indirectly, with the relevant BUMN or the company that provides services and products to the relevant BUMN and its affiliates. which may affect its ability to act independently.*

Supervisory Board Declaration of Independence

In fulfilling the Supervisory Board's required independence requirements, it is ensured that the Supervisory Board has met the qualification criteria in terms of administrative and compliance and is stated in actual conditions regarding the personal of the Supervisory Board members in accordance with the specified criteria.



Kriteria non administratif yang disyaratkan dan dipenuhi anggota Dewan Pengawas yaitu Dewan Pengawas diharuskan untuk bebas dari hubungan keluarga ataupun ikatan perkawinan satu sama lain hingga derajat ketiga secara vertikal maupun horizontal, bebas benturan kepentingan pribadi, dan memenuhi komitmen untuk tidak memanfaatkan Perusahaan demi kepentingan pribadi.

Mengukuhkan kriteria tersebut, Dewan Pengawas menandatangani Pakta Integritas sebagai bentuk pernyataan independensi dan integritas yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hubungan Kerja Dewan Pengawas dan Direksi

Pemeliharaan hubungan kerja Dewan Pengawas dan Direksi dilakukan untuk menjaga agar kedua organ dapat menjalankan check and balances dengan efektif dan efisien demi terciptanya kemajuan Perusahaan . Adapun mekanisme hubungan kerja Dewan Pengawas dan Direksi dilakukan melalui:

- Terlaksananya pengendalian internal dan manajemen risiko yang tepat dan cermat;
- Tercapainya imbal hasil (return) yang wajar bagi Pemilik Modal;
- Terlindunginya kepentingan Pemilik Modal secara wajar;
- Terlaksananya suksesi kepemimpinan dan manajemen di semua lini organisasi;
- Terpenuhinya pelaksanaan GCG.

Keberagaman Komposisi Dewan Pengawas

Pemilik Modal dalam menetapkan komposisi Dewan Pengawas senantiasa memperhatikan unsur keberagaman, baik dari segi latar belakang pendidikan, keahlian, pengalaman kerja, usia, dan jenis kelamin guna menghadirkan pendekatan yang solutif dan beragam dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah di Perusahaan.

Kebijakan penetapan persyaratan komposisi anggota Dewan Pengawas mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Keberagaman komposisi Dewan Pengawas tercermin dari latar belakang pendidikan, keahlian, usia, dan jenis kelamin yang dapat yang terdapat dalam profil dewan pengawas pada bagian profil dalam laporan ini.

Non-administrative criteria that members of the Supervisory Board must meet include being free from family relationships or marital ties with each other up to the third degree vertically or horizontally, being free from personal conflicts of interest, and fulfilling commitments not to use the Company for personal gain.

Confirming these criteria, the Supervisory Board signed an Integrity Pact as a form of independence and integrity statement required by applicable laws and regulations.

Working Relationships of the Supervisory Board and the Board of Directors

The working relationship between the Supervisory Board and the Board of Directors is maintained to ensure that the two organs can carry out checks and balances effectively and efficiently for the creation of the Company's progress. The mechanism of the working relationship between the Supervisory Board and the Board of Directors is carried out through:

- *Implementation of appropriate and careful internal control and risk management;*
- *Achieving a reasonable return for Capital Owners;*
- *Protecting the Capital Owner's interests in a reasonable manner;*
- *Implementation of leadership and management succession across all organizational lines;*
- *Completion of GCG implementation.*

The Diversity of the Capital Owners

Supervisory Board In determining the composition of the Supervisory Board, the elements of diversity, both in terms of educational background, expertise, work experience, age, and gender, are always considered in order to present a solution-oriented and diverse approach in decision making and problem solving in the Company.

The policy for determining the requirements for the composition of the Supervisory Board members refers to the provisions of Minister of SOE Regulation No. PER02/MBU/02/2015 concerning the Requirements and Procedures for Appointment and Dismissal of Members of the Supervisory Board and Supervisory Board of State-Owned Enterprises.

The educational background, expertise, age, and gender of the Supervisory Board's members are reflected in the supervisory board profile in the profile section of this report.



Rapat Dewan Pengawas

Dewan Pengawas secara berkala menyelenggarakan rapat internal Dewan Pengawas maupun rapat gabungan bersama Direksi dan komite-komite. Adapun rapat Dewan Pengawas dimanfaatkan sebagai media pembahasan dan diskusi berbagai keperluan pengawasan, penyusunan saran dan rekomendasi atas kegiatan operasional, serta pengambilan keputusan yang menjadi tanggung jawab Dewan Pengawas.

Dewan Pengawas wajib mengadakan rapat paling sedikit 1(satu) kali dalam 1(satu) bulan dengan dihadiri oleh mayoritas dari seluruh anggota Dewan Pengawas. Setiap anggota Dewan Pengawas wajib menghadiri paling sedikit 75% dari jumlah keseluruhan rapat Dewan Pengawas. Keputusan rapat Dewan Pengawas dilaksanakan dengan menganut prinsip musyawarah untuk mufakat dan dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai maka pengambilan keputusan berdasarkan metode voting. Hasil rapat dituangkan ke dalam risalah rapat, termasuk dalam hal terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinion) disertai alasannya, ditandatangani oleh seluruh peserta yang hadir, dan didokumentasikan dengan baik.

Agenda Rapat Dewan Pengawas

Pelaksanaan rapat Dewan Pengawas secara rutin dilaksanakan setiap bulannya, baik rapat internal maupun gabungan. Agenda rapat Dewan Pengawas membahas hal-hal yang bersifat rutin yang meliputi pelaksanaan dan evaluasi kegiatan Dewan Pengawas beserta Organ serta melakukan reviu kinerja berkala perseroan (baik operasional produksi maupun keuangan) dan permasalahan yang perlu mendapat klarifikasi dari manajemen serta membahas hal-hal yang memerlukan persetujuan Dewan Pengawas. Selama Tahun 2022, Dewan Pengawas telah menyelenggarakan rapat, sebagai berikut:

Meetings of the Supervisory Board

The Supervisory Board holds internal Supervisory Board meetings on a regular basis, as well as joint meetings with the Board of Directors and committees. Meanwhile, the Supervisory Board meeting is used as a medium for discussion and discussion of various supervisory needs, preparing suggestions and recommendations on operational activities, and making Supervisory Board decisions.

The Supervisory Board is required to hold a meeting at least once a month, attended by a majority of all Supervisory Board members. Each Supervisory Board member must attend at least 75% of the total number of Supervisory Board meetings. The Supervisory Board meeting's decisions are carried out in accordance with the principle of deliberation to reach consensus, and if deliberation to reach consensus fails, the decision is made using the voting method. The meeting's results are recorded in the minutes of the meeting, including dissenting opinions and their reasons, signed by all participants present, and properly documented.

Agenda for the Supervisory Board Meeting

Supervisory Board meetings are regularly held every month, both internal and joint meetings. The agenda of the Supervisory Board meetings discusses matters of a routine nature which include the implementation and evaluation of the activities of the Supervisory Board and its Organs as well as reviewing the company's periodic performance (both production and financial operations) and issues that need clarification from management and discussing matters that require the approval of the Supervisory Board. During 2022, the Supervisory Board held the following meetings:



a. Rapat Internal Dewan Pengawas / *Supervisory Board Internal Meetings*

NO.	TANGGAL RAPAT <i>Meeting Date</i>	AGENDA RAPAT <i>Meeting Agenda</i>
1.	20 Januari 2022 <i>January 20, 2022</i>	- Pembahasan Debt to Equity Swap PT JTL <i>PT JTL Debt to Equity Swap Discussion</i> - Lain-lain. <i>Other.</i>
2.	31 Januari 2022 <i>January 31, 2022</i>	- Update Hasil Pertemuan dengan Manajemen PT JTL terkait Usulan Debt to Equity Swap PT JTL / <i>Update on the Meeting with PT JTL Management regarding PT JTL's Debt to Equity Swap Proposal</i> - Update Rekomendasi Temuan BPK <i>Update on Recommendations of BPK Findings</i>
3.	23 Februari 2022 <i>February 23, 2022</i>	- Pembahasan Kinerja Bulan Januari 2022; <i>Discussion of Performance for the Month of January 2022;</i> - Persiapan Pelaksanaan Assessment GCG; <i>Preparation for GCG Assessment Implementation;</i> - Lain-lain. <i>Other.</i>
4.	25 Maret 2022 <i>March 25, 2022</i>	- Pembahasan Kinerja Bulan Februari 2022; <i>Discussion of Performance for the Month of February 2022;</i> - Evaluasi Hasil Assessment GCG; <i>Evaluation of GCG Assessment Results;</i> - Lain-lain. <i>Other.</i>
5.	13 April 2022 <i>April 13, 2022</i>	- Tindak Lanjut BJPSDA PLN Group; <i>Follow-up of BJPSDA PLN Group;</i> - Pengadaan KAP Reissued Lapkeu Konsolidasian Tahun 2020. <i>Procurement of KAP Reissued Consolidated Lapkeu 2020.</i>
6.	26 April 2022 <i>April 26, 2022</i>	- Laporan Masing-masing Komite <i>Report of Each Committee</i> - Kinerja Perusahaan s/d Triwulan I 2022 <i>Company Performance up to the first quarter of 2022</i> - Lain-lain <i>Others</i>
7.	30 Mei 2022 <i>May 30, 2022</i>	- Update Progres Audit KAP; <i>Update on KAP Audit Progress;</i> - Kinerja Perusahaan s/d April 2022; <i>Company Performance until April 2022;</i> - Update Progres Investasi; <i>Update on Investment Progress;</i> - Lain-lain <i>Other</i>
8.	28 Juni 2022 <i>June 28, 2022</i>	- Laporan Manajemen Tahun 2021(Audited) <i>Management Report 2021(Audited)</i> - Pelaksanaan Audit Kantor Akuntan Publik (KAP) Tahun 2021 <i>Audit Implementation of Public Accounting Firm (KAP) in 2021</i> - Lain-lain <i>Other</i>
9.	25 Juli 2022 <i>July 25, 2022</i>	- Kinerja Perusahaan Semester I 2022 <i>Company performance in the first half of 2022</i> - Laporan Pengawasan Dewan Pengawas Semester I 2022 <i>Supervisory Board Supervision Report Semester I 2022</i> - Lain-lain <i>Other</i>



NO.	TANGGAL RAPAT Meeting Date	AGENDA RAPAT Meeting Agenda
10.	25 Agustus 2022 August 25, 2022	- Laporan Komite Audit <i>Audit Committee Report</i> - Laporan Komite Pemantau Manajemen Risiko <i>Risk Management Monitoring Committee Report</i> - Lain-lain <i>Other</i>
11.	20 September 2022 September 20, 2022	- Laporan Komite Audit <i>Audit Committee Report</i> - Laporan Komite Pemantau Manajemen Risiko <i>Risk Management Monitoring Committee Report</i> - Lain-lain <i>Other</i>
12.	27 Oktober 2022 October 27, 2022	- Kinerja Perusahaan s/d Triwulan III <i>Company Performance up to Third Quarter</i> - Update Progres Investasi dan Manajemen Risiko <i>Update on Investment Progress and Risk Management</i> - Lain-lain <i>Other</i>
13.	28 November 2022 November 28, 2022	- Kinerja Perusahaan s/d Bulan Oktober 2022 <i>Company Performance up to October 2022</i> - Laporan Komite <i>Committee Report</i> - Lain-lain <i>Other</i>
14.	23 Desember 2022 December 23, 2022	- Laporan Komite <i>Committee Report</i> - Rencana Pelaksanaan Kunjungan <i>Implementation Plan of the Visit</i> - Lain-lain <i>Other</i>



b. Rapat Gabungan bersama Direksi / *Joint Meeting with the Board of Directors*

NO.	TANGGAL RAPAT <i>Meeting Date</i>	AGENDA RAPAT <i>Meeting Agenda</i>
1.	31 Januari 2022 <i>January 31, 2022</i>	- Laporan Kinerja Tahun 2021 (<i>Unaudited</i>) <i>2021 Performance Report (Unaudited)</i> - Usulan Persetujuan Pinjam Pakai dan Penghapusbukuan Aset PJT II (Lahan untuk PODSI) / <i>Proposal for Approval of Borrowing and Write-off of PJT II Assets (Land for PODSI)</i>
2.	1 Maret 2022 <i>March 1, 2022</i>	- Pembahasan Laporan Kinerja Bulan Januari Tahun 2022 <i>Discussion of January 2022 Performance Report</i> - Pembahasan Progres Audit KAP <i>Discussion of KAP Audit Progress</i> - Pembahasan Update PaDi UMKM <i>Discussion on PaDi UMKM Update</i>
3.	28 Maret 2022 <i>March 28, 2022</i>	- Pembahasan Laporan Kinerja Bulan Februari Tahun 2022; <i>Discussion of Performance Report for the Month of February 2022;</i> - Progress Investasi Tahun 2022, Termasuk Update DES (Debt to Equity Swap); <i>Investment Progress in 2022, Including DES (Debt to Equity Swap) Update;</i> - Update Inisiatif Strategis; <i>Update on Strategic Initiatives;</i> - Lain-lain <i>Other</i>
4.	26 April 2022 <i>April 26, 2022</i>	- Pembahasan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2022 <i>Discussion of Performance Report for the First Quarter of 2022</i> - KPI Korporat Triwulan I Tahun 2022 <i>Corporate KPIs for the first quarter of 2022</i> - Lain-Lain <i>Other</i>
5.	10 Juni 2022 <i>June 10, 2022</i>	- Pembahasan Laporan Kinerja Bulan April Tahun 2022; <i>Discussion of the Performance Report for the Month of April 2022;</i> - Pembahasan Draft Laporan Audit KAP RSM Tahun Buku 2021; <i>Discussion on the Draft Audit Report of KAP RSM for the 2021 Financial Year;</i> - Lain - lain <i>Other</i>
6.	29 Juni 2022 <i>June 29, 2022</i>	- Pembahasan Penugasan PJT II sesuai dengan PP 7 tahun 2010 <i>Discussion of PJT II Assignment in accordance with PP 7 year 2010</i> - Issue TPOP di Wilayah Kerja PJT II <i>TPOP Issue in PJT II Working Area</i> - Lain-lain <i>Other</i>
7.	28 Juli 2022 <i>July 28, 2022</i>	- Pembahasan Evaluasi Kinerja Perusahaan Semester I Tahun 2022 <i>Discussion of Company Performance Evaluation for Semester I of 2022</i> - Pembahasan Rencana Tindak Lanjut Temuan KAP <i>Discussion on Follow-up Plan for KAP Findings</i>
8.	29 Agustus 2022 <i>August 29, 2022</i>	- Pembahasan Laporan Kinerja Bulan Juli Tahun 2022 <i>Discussion of Performance Report for the Month of July 2022</i> - KPI Korporat <i>Corporate KPI</i> - Tindak Lanjut Saran Dewan Pengawas <i>Follow-up on Supervisory Board Suggestions</i> - Lain-lain <i>Other</i>
9.	28 September 2022 <i>September 28, 2022</i>	- Pengenalan Perusahaan bagi Dewan Pengawas baru <i>Company introduction for the new Supervisory Board</i> - Pembahasan Laporan Kinerja Bulan Agustus 2022 <i>Discussion of Performance Report for August 2022</i>



NO.	TANGGAL RAPAT Meeting Date	AGENDA RAPAT Meeting Agenda
		• Prognosa Kinerja Tahun 2022 <i>Prognosis of 2022 Performance</i> • Pembahasan Usulan KAP Tahun 2023 <i>Discussion of KAP Proposal for 2023</i> • Lain-lain <i>Other</i>
10.	28 Oktober 2022 <i>October 28, 2022</i>	• Pembahasan Laporan Kinerja Bulan September 2022 <i>Discussion of Performance Report for the Month of September 2022</i> • Prognosa Kinerja Tahun 2022 <i>2022 Performance Prognosis</i> • Lain-lain <i>Other</i>
11.	30 November 2022 <i>November 30, 2022</i>	• Pembahasan Laporan Kinerja Bulan Oktober 2022 <i>Discussion of October 2022 Performance Report</i> • Realisasi Capaian KPI <i>KPI Achievement Realisation</i> • Realisasi Investasi <i>Investment Realisation</i> • Lain-lain <i>Other</i>
12.	27 Desember 2022 <i>December 27, 2022</i>	• Pembahasan Laporan Kinerja Bulan November 2022 <i>Discussion of Performance Report for the Month of November 2022</i> • Realisasi Capaian KPI <i>KPI Achievement Realisation</i> • Realisasi Investasi <i>Investment Realisation</i> • Lain-lain <i>Other</i>



Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas

Frekuensi dan Tata Cara Pemberian Nasihat kepada Direksi

Pemberian nasihat dari Dewan Pengawas kepada Direksi dilakukan baik secara formal dalam Rapat, maupun secara informal. Rapat formal terdiri dari 3 (tiga) jenis rapat, yaitu:

1. Rapat Komite di bawah pengawasan Dewan Pengawas, yang terdiri dari Rapat Komite Audit, Rapat Komite Pemantau Risiko, dan Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi.
2. Rapat Dewan Pengawas (RAKOM) yaitu rapat internal Dewan Pengawas dan/atau dengan mengundang Direktur bidang yang terkait.
3. Rapat Dewan Pengawas dengan Direksi (RAKOMDIR) yaitu Rapat Dewan Pengawas bersama-sama dengan Direksi.

Pengawasan Dewan Pengawas terhadap Implementasi Strategi Perusahaan.

Pengembangan Kompetensi Dewan Pengawas

Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II berkomitmen untuk dapat menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, oleh karenanya Dewan Pengawas senantiasa berusaha menambah dan memutakhirkan pengetahuan atau kompetensi yang dimiliki. Dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kompetensi Dewan Pengawas, Perusahaan memberikan kesempatan bagi untuk mengikuti berbagai pendidikan khusus, pelatihan, workshop, seminar, dan/ atau conference baik yang diselenggarakan di dalam negeri maupun di luar negeri dengan biaya ditanggung oleh Perum Jasa Tirta II.

Informasi mengenai program pengembangan kompetensi yang diikuti Dewan Pengawas selama tahun 2022 telah disajikan dalam Laporan Tahunan ini, bab "Profil Perusahaan", sub bab "Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Pengawas, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Satuan Pengawasan Intern".

Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas

Penerapan Tata Kelola Bagi Perusahaan Umum, tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas adalah sebagai berikut:

Implementation of the Supervisory Board's Duties and Responsibilities

Advice to the Board of Directors: Frequency and Procedures

The Supervisory Board provides advice to the Board of Directors both formally and informally through meetings. Formal meetings are divided into three types:

1. Committee Meetings, which are overseen by the Supervisory Board and include Audit Committee Meetings, Risk Monitoring Committee Meetings, and Remuneration and Nomination Committee Meetings.
2. Supervisory Board Meeting (RAKOM) is an internal meeting of the Supervisory Board and/or by inviting the relevant field's Director.
3. Meeting of the Supervisory Board with the Board of Directors (RAKOMDIR), i.e. Meeting of the Supervisory Board with the Board of Directors.

Implementation of Corporate Strategy Competency Development Supervisory Board

Supervisory's Board

The Supervisory Board of Perum Jasa Tirta II is committed to carrying out its supervisory duties and providing advice to the Board of Directors, so the Supervisory Board is constantly attempting to add and update its knowledge or competence. To facilitate the implementation of improving the Supervisory Board's competence, the Company provides opportunities for Perum Jasa Tirta II to participate in various special education, training, workshops, seminars, and/or conferences held both domestically and abroad.

This Annual Report, chapter "Company Profile," subchapter "Education and/or Training," contains information about the Supervisory Board's participation in a competency development program during 2022.

Implementation of the Supervisory Board's Duties

For the Implementation of Good Corporate Governance for Public Companies, the Supervisory Board's duties and responsibilities are as follows:



1. Memastikan penerapan Tata Kelola yang baik terselenggara dalam setiap kegiatan usaha Perusahaan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
3. Dewan Pengawas wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perusahaan.

Penilaian Kinerja Dewan Pengawas

Penilaian Kinerja Dewan Pengawas dilakukan melalui *self assessment* atas kinerja Dewan Pengawas dan dilaporkan serta dipertanggungjawabkan dalam RPB.

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dewan Pengawas

Penilaian kinerja Dewan Pengawas dilakukan oleh pemegang saham. Kinerja Dewan Pengawas dievaluasi berdasarkan berbagai aspek sebagaimana diuraikan sebagai berikut,

1. Pengawasan terhadap realisasi Kebijakan Umum Direksi (KUD). Pelaksanaan penilaian dilakukan secara berkala.
2. Hasil *Self Assessment* GCG Penilaian kinerja Dewan Pengawas dapat diukur dari hasil pencapaian *self assessment* GCG khususnya pada penilaian aspek Dewan Pengawas dan organ penunjangnya. Pelaksanaan *self assessment* GCG merujuk pada Peraturan Perusahaan Indonesia.
3. Pertanggungjawaban Laporan Tahunan dan Laporan Kerja Perusahaan:
 - a. Dewan Pengawas dalam fungsinya sebagai pengawas, menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan Perusahaan oleh Direksi. Laporan pengawasan Dewan Pengawas merupakan bagian dari Laporan Tahunan yang disampaikan kepada RPB untuk memperoleh persetujuan.
 - b. Dengan diberikannya persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan atas laporan keuangan, berarti RPB telah memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya kepada masing-masing Anggota Dewan Pengawas sejauh hal-hal tersebut tercermin dari Laporan Tahunan, dengan tidak mengurangi tanggung jawab Anggota Dewan Pengawas dalam hal terjadi tindak pidana atau kesalahan dan/atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang dapat dipenuhi dengan aset Perum Jasa Tirta II.

1. *Ensuring that Good Governance is implemented in all business activities of the Company at all levels or levels of the organization.*
2. *Oversee the execution of the Board of Directors' duties and responsibilities and provide advice to the Board of Directors.*
3. *The Supervisory Board is responsible for directing, monitoring, and evaluating the Company's strategic policies.*

Supervisory Board Performance Evaluation

The Supervisory Board's Performance Assessment is carried out through a self-assessment of the Supervisory Board's performance and is reported and accounted for at the GMS.

Procedure for Carrying Out the Supervisory Board's Performance

Evaluation The shareholders conduct the Supervisory Board's performance evaluation. The Supervisory Board's performance is evaluated based on a number of factors, which are detailed below.

1. *Overseeing the implementation of the Board of Directors' General Policy (KUD). The assessment is done on a regular basis.*
2. *GCG Self-Assessment Findings The Supervisory Board's performance can be assessed using the results of the GCG self-assessment achievement, Particularly in evaluating aspects of the Supervisory Board and its supporting organs. The GCG self-assessment implementation is based on the Indonesian Company Regulations.*
3. *Accountability for the Annual Report and Work Report of the Company:*
 - a. *In its capacity as a supervisor, the Supervisory Board submits a supervisory responsibility report on the Company's management to the Board of Directors. The Supervisory Board's supervisory report is included in the Annual Report, which is submitted to the RPB for approval.*
 - b. *With the approval of the Annual Report and ratification of the financial statements, the RPB has given each Member of the Supervisory Board full release and discharge of responsibilities insofar as these matters are reflected in the Annual Report, without reducing the Members of the Supervisory Board's responsibility in the event of criminal acts or errors and/or omissions that cause losses to third parties, which can be fulfilled with Perum Jasa.*



- c. Pertanggungjawaban Dewan Pengawas kepada RPB merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan Perum Jasa Tirta II dalam rangka pelaksanaan atas GCG.
4. Penilaian Mandiri (Self Assessment) Dewan Pengawas Pengungkapan kebijakan self assessment atas kinerja Dewan Pengawas dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan.

Penilaian Kinerja Dewan Pengawas

Penilaian kinerja Dewan Pengawas dilakukan oleh Pemilik Modal. Evaluasi dan penilaian kinerja Dewan Pengawas dilakukan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan kinerja kolegal maupun individual. Hasil penilaian kinerja Dewan Pengawas oleh Pemilik Modal menjadi bagian tak terpisahkan dalam penentuan skema dan besaran remunerasi dan kompensasi Dewan Pengawas maupun pertimbangan dalam penunjukan kembali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan.

Prosedur Penilaian Kinerja Dewan Pengawas

Prosedur penilaian kinerja Dewan Pengawas oleh Pemilik Modal dilakukan melalui penyelenggaraan RPB, dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Dewan Pengawas dalam fungsinya sebagai pengawas menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan Perusahaan oleh Direksi. Laporan ini merupakan bagian dari Laporan Tahunan yang disampaikan kepada RPB untuk memperoleh persetujuan.
2. Dengan diberikannya persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan atas laporan keuangan, berarti RPB telah memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya kepada masing-masing anggota Dewan Pengawas sejauh hal-hal tersebut tercermin dari Laporan Tahunan, dengan tidak mengurangi tanggung jawab anggota Dewan Pengawas dalam hal terjadi tindak pidana atau kesalahan dan/atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang dapat dipenuhi dengan aset Perum Jasa Tirta II.
3. Pertanggungjawaban Dewan Pengawas kepada RPB merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan Perum Jasa Tirta II dalam rangka pelaksanaan GCG.

- c. *The Supervisory Board's accountability to the RPB is a manifestation of the Supervisory Board's accountability for the management of Perum Jasa Tirta II in the context of implementing GCG.*
4. *Supervisory Board Self-Assessment*
The disclosure of the Supervisory Board's self-evaluation policy is done not only to meet the transparency requirement, but also as a form of accountability for implementation.

Supervisory Board Performance Evaluation

The Capital Owner is in charge of the Supervisory Board's performance evaluation. The Supervisory Board's performance is evaluated and assessed as a whole, taking into account both collegial and individual performance. The results of the Capital Owners' evaluation of the Supervisory Board's performance become an integral part of determining the Supervisory Board's remuneration and compensation scheme and amount, as well as considerations in the re-appointment of the members of the Supervisory Board concerned.

Procedure for Supervisory Board

Performance Evaluation The Capital Owner evaluates the performance of the Supervisory Board through the implementation of RPB, which uses the following mechanism:

1. *The Supervisory Board, in its capacity as a supervisor, submits a report on the Board of Directors' responsibility for supervision of the Company's management. This report is included in the Annual Report, which is forwarded to the RPB for approval.*
2. *With the approval of the Annual Report and ratification of the financial statements, the RPB has granted full release and discharge of responsibilities to each member of the Supervisory Board insofar as these matters are reflected in the Annual Report, without prejudice to the members of the Supervisory Board's responsibility in the event of a criminal act or error and/or negligence that causes losses to third parties that can be met with Perum Jasa Tirta II's assets*
3. *The Supervisory Board's accountability to the RPB is a manifestation of supervision over the management of Perum Jasa Tirta II in the context of implementing GCG.*



Kriteria Penilaian Kinerja Dewan Pengawas

Pemilik Modal menilai dan mengevaluasi kinerja pengawas Dewan Pengawas dengan mempertimbangkan beberapa kriteria, antara lain:

1. Pengawasan terhadap realisasi Kebijakan Umum Direksi (KUD) yang dilakukan secara berkala;
2. Penilaian mandiri (self-assessment) GCG pada aspek Dewan Pengawas dan organ penunjangnya dengan merujuk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pertanggungjawaban Laporan Tahunan dan Laporan Kerja Perusahaan.

Pihak yang Melakukan Assessment

Penilaian kinerja Dewan Pengawas dalam Rapat Pembahasan Bersama (RPB) dilakukan oleh Pemilik Modal.

Hasil Penilaian Kinerja Dewan Pengawas

Berdasarkan hasil keputusan RPB, Pemilik Modal menilai Dewan Pengawas telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Pengawas atas pengawasan yang dilakukan hingga akhir tahun buku.

Penilaian Kinerja Komite Dewan Pengawas

Dewan Pengawas melakukan penilaian kinerja terhadap masing-masing komite Dewan Pengawas secara rutin setiap tahun sebagai bahan pertimbangan dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan tugas organ pendukung Dewan Pengawas. Masing-masing komite Dewan Pengawas dinilai dan dievaluasi berdasarkan kinerja pelaksanaan tugas komite yang mencakup realisasi pelaporan pelaksanaan tugas komite sesuai dengan tanggung jawab masing-masing, frekuensi kehadiran rapat dan rekomendasi yang diberikan dalam tugasnya membantu pelaksanaan fungsi pengawasan dan penasihat Dewan Pengawas yang pada tahun buku 2022 telah dilaksanakan dengan baik.

Criteria for Capital Owners Supervisory Board Performance

Assessment assesses and evaluates the Supervisory Board's supervisory performance by taking into account several criteria, including:

1. Periodic supervision of the implementation of the Board of Directors General Policy (KUD);
2. Self-assessment of GCG on aspects of the Supervisory Board and its supporting organs using the applicable laws and regulations;
3. Accountability for the Annual Report and Work Report of the Company

The Capital Owner is the party conducting

The assessment of the Supervisory Board's performance in the Joint Discussion Meeting (RPB).

Results of the Supervisory Board's Performance Evaluation

Based on the RPB decision, the Capital Owner determined that the Supervisory Board had carried out its duties properly and granted the Supervisory Board full waiver of responsibility for the supervision performed until the end of the fiscal year.

Evaluation of the Supervisory Board Committee's Performance

Every year, the Supervisory Board conducts performance assessments of each committee of the Supervisory Board as a material consideration in order to improve the quality of the Supervisory Board's supporting organs' duties implementation. Each Supervisory Board committee is assessed and evaluated based on the performance of the committee's task implementation, which includes the realization of reporting on the implementation of the committee's duties in accordance with their respective responsibilities, the frequency of meeting attendance, and recommendations given in their duties to assist the implementation of the Supervisory Board's supervisory and advisory functions, which in the fiscal year 2002.



Mekanisme Pengunduran Diri dan Pemberhentian Dewan Pengawas

Seluruh anggota Dewan Pengawas wajib memiliki integritas, kompetensi dan reputasi yang memadai sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar Perum Jasa Tirta II. Pemberhentian anggota Dewan Pengawas dapat dilakukan apabila:

1. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
2. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan dan/atau negara;
4. Melanggar ketentuan anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Mengundurkan diri Selain itu, jabatan anggota Dewan Pengawas juga dapat berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas berdasarkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundangundangan yang berlaku;
 - c. Masa jabatannya berakhir; dan
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RPB.

Mechanism for Supervisory Board Resignation and Dismissal

According to the Articles of Association of Perum Jasa Tirta II, all members of the Supervisory Board must have adequate integrity, competence, and reputation. Members of the Supervisory Board may be dismissed if they:

- 1. Are unable to carry out their duties properly;*
- 2. Are found guilty by a court decision with permanent legal force;*
- 3. Engage in actions that are detrimental to the Company and/or the state;*
- 4. Violate the provisions of the articles of association or applicable laws and regulations.*
- 5. Resigning Furthermore, a member of the Supervisory Board's position may be terminated if they:*
 - a. die;*
 - b. No longer meets the requirements for membership on the Supervisory Board under the provisions of the articles of incorporation and applicable laws and regulations;*
 - c. His term of office expires;*
 - d. Dismissed based on the GMS decision.*

DIREKSI

Board of Directors

Direksi bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan kepengurusan Perusahaan dan penetapan strategi dan kebijakan di lingkungan Perusahaan serta pelaksanaannya sesuai dengan tujuan usaha Perusahaan. Direksi mengelola Perusahaan sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Tertuang dalam anggaran dasar Perusahaan menjelaskan mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi

The Board of Directors is fully responsible for the Company's management, as well as the development and implementation of strategies and policies within the Company in accordance with the Company's business objectives. The Board of Directors manages the Company in accordance with the powers and responsibilities set forth in the Articles of Association as well as the applicable laws and regulations. The Board of Directors' duties and responsibilities are outlined in the Company's articles of incorporation.



Jumlah dan Komposisi Direksi / *Number and Composition of Directors*

NO.	NAMA Name	JABATAN Position	KEP. MENTERI TENTANG PENGANGKATAN Kep. Menteri Tentang Pengangkatan	KETERANGAN Description
	Imam Santoso	Direktur Utama President Director	SK-350/MBU/10/2020 27 Oktober 2020 SK-350/MBU/10/2020 27 October 2020	Sejak 27 Oktober 2020 sampai dengan sekarang / SK-350/MBU/10/2020 27 Oktober 2020 until now
	Anton Mardiyono	Direktur Operasi dan Pemeliharaan Director of Operations and Maintenance	SK-196/MBU/06/2020 11 Juni 2020 SK-196/MBU/06/2020 June 11, 2020	Sejak 11 Juni 2020 sampai dengan sekarang / Since June 11, 2020 until now
	Indriani Widiastuti	Direktur Keuangan ,Sumber Daya Manusia & MANRISK Director of Finance, Human Resources & MANRISK	SK 420/MBU/12/2021 Tanggal 29 Desember 2021 Tentang Pemberhentian Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota2 Direksi Perusahaan / SK 420/MBU/12/2021 Dated December 29, 2021 concerning the Dismissal of the Transfer of Duties and the Appointment of Members of the Board of Directors of Jasa Tirta II Public Company (Perum)	Sejak tanggal 29 Desember 2021 s/d Sekarang / From December 29, 2021 to now
	Dikdik Permadi Yoffana	Direktur Pengembangan Usaha Director of Business Development	SK 420/MBU/12/2021 Tanggal 29 Desember 2021 Tentang Pemberhentian Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota2 Direksi Perusahaan Umum(Perum) Jasa Tirta II / SK 420/MBU/12/2021 Dated December 29, 2021 concerning the Dismissal of the Transfer of Duties and the Appointment of Members of the Board of Directors of Jasa Tirta II Public Company (Perum)	Sejak tanggal 29 Januari 2021 s/d Sekarang / From January 29, 2021 to now

Kriteria Direksi

Seluruh anggota Direksi memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan pedoman tata kelola perusa 1.

Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah:

- Orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan atau Perum dinyatakan pailit atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara.

Board of Directors Evaluation Criteria

All members of the Board of Directors meet the criteria outlined in the applicable laws and regulations, as well as the corporate governance guidelines.

People who can be appointed to the Board of Directors are:

- Individuals who can carry out legal actions and have never been declared bankrupt or become members of the Board of Directors or Supervisory Board who are found guilty of causing a company or Perum to be declared bankrupt or people who have never been convicted of committing a crime that is detrimental to the state's finances.*



- b. Pengangkatan anggota Direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Tim dan/atau lembaga profesional yang dibentuk dan/atau ditunjuk oleh Menteri. Dalam hal pengangkatan kembali pada posisi jabatan yang sama bagi anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, tidak berlaku mekanisme uji kelayakan dan kepatutan.
- c. Calon anggota Direksi yang telah dinyatakan Lulus uji kelayakan dan kepatutan dan anggota Direksi yang diangkat kembali wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Direksi.
- d. Antar anggota dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Pengawas dilarang memiliki hubungan keluarga sedarah atau hubungan karena perkawinan sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping. Dalam hal terjadi kondisi tersebut, maka Menteri berwenang memberhentikan salah seorang dari Dewan Pengawas tersebut.
- e. Anggota Direksi dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 1. Anggota Direksi pada BUMN, BUMD, atau badan usaha milik swasta.
 2. Anggota Dewan Pengawas atau Dewan
 3. Pengawas pada BUMN.
 4. Jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam instansi atau lembaga Pemerintah Pusat atau Daerah.
 5. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
 6. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
 7. Anggota Direksi dilarang menjadi pengurus partai politik, calon anggota legislatif, anggota legislatif, calon Kepala Daerah, calon Wakil Kepala Daerah, Kepala Daerah, dan/atau Wakil Kepala Daerah.
 8. Anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Perusahaan, selain penghasilan yang diterima sebagai anggota Direksi.
- b. *Members of the Board of Directors are appointed using a fit and proper test mechanism administered by a team and/or professional institution established and/or appointed by the Minister. The fit and proper test mechanism does not apply in the case of reappointment to the same position for members of the Board of Directors who are considered capable of carrying out their duties well during their term of office.*
- c. *Candidates for Board of Directors who have been declared to have passed the fit and proper test, as well as members of the Board of Directors who have been reappointed, must sign a management contract before being appointed to the Board of Directors.*
- d. *It is prohibited to have blood relations or marital relations up to the third degree between members and between members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board, either in a straight line or a sideways line. If such circumstances arise, the Minister has the authority to dismiss one of the Supervisory Boards.*
- e. *Board members are not permitted to hold concurrent positions as:*
 1. *Members of the Board of Directors in BUMN, BUMD, or privately owned enterprises.*
 2. *Supervisory Board Member*
 3. *Supervisory Board Member in BUMN*
 4. *Positions in central or regional government agencies or institutions with structural and functional responsibilities.*
 5. *Other positions as defined by applicable laws and regulations*
 6. *Other positions that could lead to conflicts of interest*
 7. *Members of the Board of Directors are not permitted to serve as administrators of political parties, candidates for legislative members, members of the legislature, candidates for regional heads, or members of the legislature, candidates for regional heads, deputy regional heads, and/or regional heads*
 8. *Members of the Board of Directors are not permitted to benefit personally from the Company's activities other than the income received as a member of the Board of Directors.*



Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan kepengurusan Perusahaan dan penetapan strategi dan kebijakan di lingkungan Perusahaan serta pelaksanaannya sesuai dengan tujuan usaha Perusahaan. Direksi mengelola Perusahaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2022.

Adapun tugas dan tanggung jawab Direksi meliputi:

1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Perusahaan;
2. Direksi menyusun rencana kerja jangka panjang (*Corporate Plan*), Rencana Bisnis Perusahaan (*Business Plan*), dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
3. Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada Rapat Umum Pemilik Modal untuk mendapatkan persetujuan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Direksi kepada Pemilik Modal;
4. Direksi melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan Perusahaan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
5. Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (Surat Keputusan AI), auditor eksternal, hasil audit atau hasil audit lain;
6. Direksi menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko Perusahaan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko Perusahaan ;
7. Direksi mempunyai tanggung jawab menciptakan dan memelihara sistem pengendalian intern yang efektif serta memastikan bahwa sistem tersebut berjalan dengan lancar dan sehat;
8. Direksi menyediakan atau memberikan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Pengawas.

Adapun penetapan pembagian tugas dan pelimpahan wewenang Direksi adalah sebagai berikut:

Board of Directors Duties and Responsibilities

The Board of Directors is fully responsible for the Company's management, as well as the development and implementation of strategies and policies within the Company in accordance with the Company's business objectives. The Board of Directors manages the Company in accordance with the authorities and responsibilities outlined in Government Regulation No. 25 of 2022's Articles of Association.

The Board of Directors' duties and responsibilities include the following:

1. *The Board of Directors is fully responsible for the Company's management implementation;*
2. *The Board of Directors develops a long-term work plan (Corporate Plan), a Company Business Plan (Business Plan), and a Corporate Work Plan and Budget (RKAP);*
3. *The Board of Directors submits an annual report to the General Meeting of Capital Owners for approval as a form of accountability for the implementation of the Board of Directors' duties to the Capital Owners;*
4. *The Board of Directors incorporates GCG principles into all aspects of the Company's operations at all levels or levels of the organization;*
5. *The Board of Directors follows up on internal audit findings and recommendations (AI Decision Letter), external auditors, audit findings, or other audit findings;*
6. *The Board of Directors develops the Company's risk management policies and strategies and is responsible for putting those policies and strategies into action.*
7. *It is the responsibility of the Board of Directors to develop and maintain an effective internal control system, as well as to ensure that the system runs smoothly and securely.*
8. *The Board of Directors provides or provides the Supervisory Board with accurate, relevant, and timely data and information.*

The Board of Directors has determined the division of tasks and delegation of authority as follows:



JABATAN / Position	URAIAN TUGAS DAN WEWENANG / Description of Duties and Authorities
Direktur Utama / President Director	Direktur Utama mempunyai tugas untuk melaksanakan kepengurusan Perusahaan yang meliputi pembinaan, pengawasan, pengendalian di Bidang Keuangan, SDM, Operasi dan Pemeliharaan, Pengembangan Usaha, Kesekretariatan, Pengawasan Intern, Pengendalian Kinerja dan Sistem Manajemen Perusahaan dalam rangka memenuhi maksud dan tujuan Perusahaan. / <i>The President Director has the duty to carry out the management of the Company which includes guidance, supervision, control in the fields of Finance, Human Resources, Operations and Maintenance, Business Development, Secretariat, Internal Control, Performance Control and Company Management System in order to fulfill the purposes and objectives of the Company.</i> Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Utama mempunyai fungsi: / <i>In carrying out the duties as referred to in paragraph (1), the President Director has the following functions:</i> - Menetapkan kebijakan kepengurusan Perusahaan dalam Pengelolaan tugas Keuangan dan Manajemen Risiko; / <i>Establish the Company's management policies in the Management of Financial and Risk Management tasks;</i> - Menetapkan kebijakan kepengurusan Perusahaan dalam Pengelolaan tugas Operasi dan Pemeliharaan; / <i>Establishing the Company's management policy in the Management of Operation and Maintenance tasks;</i> - Menetapkan kebijakan kepengurusan Perusahaan dalam Pengelolaan tugas Pengembangan usaha yang meliputi kebijakan: Pengembangan Usaha; / <i>Establishing company management policies in the management of business development tasks which include the following policies: Business Development;</i> - Meningkatkan koordinasi dan hubungan kerja dengan Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko, Direktur Operasi dan Pemeliharaan dan Direktur Pengembangan Usaha; / <i>Improve coordination and working relationships with the Director of Finance, HR and Risk Management, Director of Operations and Maintenance and Director of Business Development;</i> - Menetapkan kebijakan kepengurusan Perusahaan; / <i>Establishing the Company's management policy;</i> - Melakukan pembinaan dan pengendalian tugas Sekretariat Perusahaan, Satuan Pengawasan Intern, Divisi Pengendalian Kinerja dan Sistem Manajemen; / <i>Conducting coaching and controlling the duties of the Corporate Secretariat, Internal Control Unit, Performance Control Division and Management System;</i> - Melakukan pembinaan hubungan dengan instansi pemerintah, swasta dan komunitas masyarakat yang berkaitan dengan tugas Perusahaan; / <i>Conducting relationship development with government agencies, private sector and community related to the Company's duties;</i> - Melakukan penerapan Tata Kelola Perusahaan; dan / <i>Implementing Good Corporate Governance; and</i> - Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Pemerintah dalam hal ini Menteri dan Menteri Teknis. / <i>Submit a report on the results of the implementation of tasks to the Government in this case the Minister and the Technical Minister.</i> Susunan Organisasi / Organization Structure Direktur Utama membina, mengawasi dan mengendalikan para Direktur dan Unit Kerja sebagai berikut: / <i>The President Director fosters, supervises and controls the following Directors and Work Units:</i> - Direktorat Keuangan SDM dan Manajemen Risiko; / <i>Directorate of HR Finance and Risk Management;</i> - Direktorat Operasi dan Pemeliharaan; / <i>Directorate of Operations and Maintenance;</i> - Direktorat Pengembangan Usaha; / <i>Directorate of Business Development;</i> - Sekretariat Perusahaan; / <i>Corporate Secretariat;</i> - Satuan Pengawasan Intern; dan / <i>Internal Control Unit; and</i> - Divisi Pengendalian Kinerja dan Sistem Manajemen. / <i>Performance Control and Management System Division.</i>



JABATAN / Position	URAIAN TUGAS DAN WEWENANG / Description of Duties and Authorities
Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko / Director of Finance, HR and Risk Management	Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko memiliki tugas pokok melaksanakan pembinaan dalam kegiatan merencanakan, menetapkan, mengendalikan, menganalisis dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perencanaan strategis perusahaan yang meliputi RJP, RKAP dan Blue Print Perusahaan serta teknologi informasi komunikasi; keuangan dan akuntansi; sumber daya manusia; umum dan TJSL; inventarisasi; pengendalian aset dan kearsipan; layanan pengadaan; pengelolaan diklat; dan pengembangan ICT untuk memenuhi maksud dan tujuan Perusahaan. / <i>The Director of Finance, HR and Risk Management has the main task of carrying out guidance in planning, determining, controlling, analyzing and evaluating activities as well as reporting on the company's strategic planning activities which include RJP, RKAP and Company Blue Print as well as information and communication technology; finance and accounting; human resources; general and TJSL; inventory; asset control and archives; procurement services; management of education and training; and development of ICT to fulfill the purposes and objectives of the Company.</i> Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko mempunyai fungsi: / <i>In carrying out the duties as referred to in paragraph (1), the Director of Finance, HR and Risk Management has the following functions:</i> - Menyusun, membina, memantau dan mengevaluasi kebijakan kepengurusan Perusahaan dalam bidang perencanaan strategis perusahaan yang meliputi RJP, RKAP dan Blue Print Perusahaan serta teknologi informasi komunikasi; keuangan dan akuntansi; sumber daya manusia; umum dan TJSL; inventarisasi; pengendalian aset dan kearsipan; layanan pengadaan; pengelolaan diklat; dan pengembangan ICT; / <i>Develop, develop, monitor and evaluate the Company's management policies in the field of corporate strategic planning which includes RJP, RKAP and Company Blue Print as well as information and communication technology; finance and accounting; human resources; general and TJSL; inventory; asset control and archives; procurement services; management of education and training; and ICT development;</i> - Membina, mengendalikan dan mengawasi pengelolaan dalam bidang perencanaan strategis perusahaan yang meliputi RJP, RKAP dan Blue Print Perusahaan serta teknologi informasi komunikasi; keuangan dan akuntansi; sumber daya manusia; umum dan TJSL; inventarisasi; pengendalian aset dan kearsipan; layanan pengadaan; pengelolaan diklat; dan pengembangan ICT; / <i>Fostering, controlling and supervising management in the field of corporate strategic planning which includes RJP, RKAP and Company Blue Print as well as information and communication technology; finance and accounting; human resources; general and TJSL; inventory; asset control and archives; procurement services; management of education and training; and ICT development;</i> - Meningkatkan koordinasi dan hubungan kerja dengan Stakeholder dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang perencanaan strategis perusahaan yang meliputi RJP, RKAP dan Blue Print Perusahaan serta teknologi informasi komunikasi; keuangan dan akuntansi; sumber daya manusia; umum dan TJSL; inventarisasi; pengendalian aset dan kearsipan; layanan pengadaan; pengelolaan diklat; dan pengembangan ICT; / <i>Improve coordination and working relationships with Stakeholders in carrying out tasks in the field of corporate strategic planning which includes RJP, RKAP and Company Blue Print as well as information and communication technology; finance and accounting; human resources; general and TJSL; inventory; asset control and archives; procurement services; management of education and training; and ICT development;</i> - Menyampaikan laporan kinerja di bidang perencanaan strategis perusahaan yang meliputi RJP, RKAP dan Blue Print Perusahaan serta teknologi informasi komunikasi; keuangan dan akuntansi; sumber daya manusia; umum dan TJSL; inventarisasi; pengendalian aset dan kearsipan; layanan pengadaan; pengelolaan diklat; dan pengembangan ICT; / <i>Submit a performance report in the field of corporate strategic planning which includes RJP, RKAP and Company Blue Print as well as information and communication technology; finance and accounting; human Resources; general and TJSL; inventory; asset control and archives; procurement services; management of education and training; and ICT development;</i> - Mengkoordinasikan penyusunan Blue Print Perusahaan, Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Direktorat Keuangan dan SDM; dan / <i>Coordinate the preparation of the Company's Blue Print, Company Long Term Plan (RJPP) and Corporate Budget Work Plan (RKAP) of the Directorate of Finance and HR; and</i> - Mengkoordinasikan ketersediaan Blue Print Perusahaan, Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP). / <i>Coordinate the availability of the Company's Blue Print, the Company's Long Term Plan (RJPP) and the Company's Budget Work Plan (RKAP).</i> Susunan Organisasi / Organization Structure Direktur Keuangan dan SDM membina, megawasi dan mengendalikan Unit Kerja sebagai berikut: / <i>The Director of Finance and HR fosters, supervises and controls the following Work Units:</i> - Divisi Rencana Strategis dan Teknologi Informasi Komunikasi; / <i>Division of Strategic Planning and Information and Communication Technology;</i> - Divisi Keuangan dan Akuntansi; / <i>Finance and Accounting Division;</i> - Divisi Sumber Daya Manusia; / <i>Human Resources Division;</i> - Divisi Umum dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan / <i>General Division and Social and Environmental Responsibility;</i> - Divisi Inventarisasi, Pengendalian Aset dan Kearsipan; / <i>Inventory, Asset Control and Archives Division;</i> - Unit Layanan Pengadaan; dan / <i>Procurement Service Unit; and</i> - Unit Layanan Diklat. / <i>Training Service Unit.</i>



JABATAN / Position

Direktur Operasi dan Pemeliharaan / Director of Operation and Maintenance

URAIAN TUGAS DAN WEWENANG / Description of Duties and Authorities

Direktur Operasi dan Pemeliharaan memiliki tugas pokok melaksanakan pembinaan dalam kegiatan merencanakan, menetapkan, mengendalikan, menganalisis dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perencanaan dan pengendalian operasi dan pemeliharaan sumber daya air dan sumber daya listrik; supervisi teknis; pelaksanaan operasi, pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana SDA; pelaksanaan operasi, pemeliharaan, perbaikan dan pengusahaan sarana prasarana ketenagalistrikan; pengelolaan laboratorium; untuk memenuhi maksud dan tujuan Perusahaan. / *The Director of Operations and Maintenance has the main task of carrying out guidance in planning, determining, controlling, analyzing and evaluating activities as well as reporting on planning and controlling activities for the operation and maintenance of water resources and electricity resources; technical supervision; implementation of operation, maintenance and improvement of SDA infrastructure suggestions; implementation of operation, maintenance, repair and exploitation of electricity infrastructure facilities; laboratory management; to fulfill the purposes and objectives of the Company.*

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Operasi dan Pemeliharaan mempunyai fungsi: / *In carrying out the duties as referred to in paragraph (1), the Director of Operations and Maintenance has the following functions:*

- Menyusun, membina, memantau dan mengevaluasi kebijakan kepengurusan Perusahaan dalam bidang perencanaan dan pengendalian operasi dan pemeliharaan sumber daya air dan sumber daya listrik; supervisi teknis; pelaksanaan operasi, pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana SDA; pelaksanaan operasi, pemeliharaan, perbaikan dan pengusahaan sarana prasarana ketenagalistrikan; ; pengelolaan SPAM regional 1, pengelolaan laboratorium; / *Develop, develop, monitor and evaluate the Company's management policies in the field of planning and controlling the operation and maintenance of water resources and electricity resources; technical supervision; implementation of operation, maintenance and repair of natural resources infrastructure; implementation of operation, maintenance, repair and exploitation of electricity infrastructure facilities; ; regional SPAM management 1, laboratory management.*
- Membina, mengendalikan dan mengawasi pengelolaan dalam bidang perencanaan dan pengendalian operasi dan pemeliharaan sumber daya air dan sumber daya listrik; supervisi teknis; pelaksanaan operasi, pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana SDA; pelaksanaan operasi, pemeliharaan, perbaikan dan pengusahaan sarana prasarana ketenagalistrikan; pengelolaan SPAM regional 1 dan laboratorium; / *Fostering, controlling and supervising management in the field of planning and controlling the operation and maintenance of water resources and electricity resources; technical supervision; implementation of operation, maintenance and improvement of SDA infrastructure suggestions; implementation of operation, maintenance, repair and exploitation of electricity infrastructure facilities; SPAM Regional 1 and laboratory management;*
- Meningkatkan koordinasi dan hubungan kerja dengan Stakeholder dalam melaksanakan tugas-tugas dibidang pengelolaan perencanaan dan pengendalian operasi dan pemeliharaan sumber daya air dan sumber daya listrik; supervisi teknis; pelaksanaan operasi, pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana SDA; pelaksanaan operasi, pemeliharaan, perbaikan dan pengusahaan sarana prasarana ketenagalistrikan; SPAM Regional 1 , pengelolaan laboratorium; / *Improve coordination and working relationships with Stakeholders in carrying out tasks in the field of planning and controlling the operation and maintenance of water resources and electricity resources; technical supervision; implementation of operation, maintenance and improvement of SDA infrastructure suggestions; implementation of operation, maintenance, repair and exploitation of electricity infrastructure facilities; SPAM Regional 1 ; laboratory management;*
- Menyampaikan laporan kinerja di bidang pengelolaan perencanaan dan pengendalian operasi dan pemeliharaan sumber daya air dan sumber daya listrik; supervisi teknis; pelaksanaan operasi, pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana SDA; pelaksanaan operasi, pemeliharaan, perbaikan dan pengusahaan sarana prasarana ketenagalistrikan; Pengelolaan SPAM Regional 1; pengelolaan laboratorium; / *Submitting performance reports in the field of planning and controlling the operation and maintenance of water resources and electricity resources; technical supervision; implementation of operation, maintenance and repair of water resources infrastructure; implementation of operation, maintenance, repair and exploitation of electricity infrastructure facilities; management SPAM Regional 1; laboratory management;*
- Mengkoordinasikan penyusunan Blue Print Perusahaan, Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Direktorat Operasi dan Pemeliharaan. / *Coordinate the preparation of the Company's Blue Print, the Company's Long Term Plan (RJPP) and the Corporate Budget Work Plan (RKAP) of the Operations and Maintenance Directorate.*

Susunan Organisasi / Organization Structure

Direktur Operasi dan Pemeliharaan membina, megawasi dan mengendalikan Unit Kerja sebagai berikut: / *The Director of Operations and Maintenance fosters, supervises and controls the following Work Units:*

- Divisi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air dan Sumber Daya Listrik; / *Division of Operation and Maintenance of Water Resources and Electrical Resources;*
- Divisi Supervisi Teknis; / *Technical Supervision Division;*
- Unit Wilayah I; / *Regional Unit I;*
- Unit Wilayah II; / *Region II Units;*
- Unit Wilayah III; / *Regional Unit III;*
- Unit Wilayah IV; / *Region IV Units;*
- Unit PLTA; / *Hydropower Units;*
- Unit Kerja Khusus SPAM Regional Jatiluhur 1 dan / *Jatiluhur Regional SPAM Special Work Unit 1 and*
- Unit Layanan Laboratorium. / *Laboratory Service Unit.*



JABATAN / Position	URAIAN TUGAS DAN WEWENANG / Description of Duties and Authorities
Direktur Pengembangan Usaha / <i>Director of Business Development</i>	Direktur Pengembangan Usaha memiliki tugas pokok melaksanakan pembinaan dalam kegiatan merencanakan, menetapkan, mengendalikan, menganalisis dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan Pengembangan Usaha; Komersil dan Pelayanan Pelanggan; Pengusahaan Pariwisata dan Hotel untuk memenuhi maksud dan tujuan Perusahaan. / <i>The Director of Business Development has the main task of carrying out guidance in planning, determining, controlling, analyzing and evaluating activities as well as reporting on Business Development activities; Commercial and Customer Service; Tourism and Hotel Business to fulfill the purposes and objectives of the Company.</i> Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Pengembangan Usaha mempunyai fungsi: / <i>In carrying out the duties as referred to in paragraph (1), the Director of Business Development has the following functions:</i> - Menyusun, membina, memantau dan mengevaluasi kebijakan kepengurusan Perusahaan dalam bidang Pengembangan Usaha; Komersil dan Pelayanan Pelanggan, Pengusahaan Pariwisata dan Hotel; dan Pengembangan SPAM, pengembangan Pump Storage Power Plant dan EBT pengembangan holding AMDK; Pengembangan Wilayah; Pengembangan Infrastruktur Wisata dan Destinasi; Optimalisasi BMN dan Aset Perusahaan; / <i>Develop, develop, monitor and evaluate the Company's management policies in the field of Business Development; Commercial and Customer Service, Tourism and Hotel Business; and SPAM development, Pump Storage Power Plant development and EBT development of AMDK holding; Area Development; Tourism and Destination Infrastructure Development; Optimization of BMN and Company Assets;</i> - Membina, mengendalikan dan mengawasi pengelolaan dalam bidang Pengembangan Usaha; Komersil dan Pelayanan Pelanggan, Pengusahaan Pariwisata dan Hotel; dan Pengembangan SPAM, pengembangan Pump Storage Power Plant dan EBT pengembangan holding AMDK; Pengembangan Wilayah; Pengembangan Infrastruktur Wisata dan Destinasi; Optimalisasi BMN dan Aset Perusahaan; / <i>Fostering, controlling and supervising management in the field of Business Development; Commercial and Customer Service, Tourism and Hotel Business; and SPAM development, Pump Storage Power Plant development and EBT development for AMDK holding; Area Development; Tourism and Destination Infrastructure Development; Optimization of BMN and Company Assets;</i> - Meningkatkan koordinasi dan hubungan kerja dengan Stakeholder dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang Pengembangan Usaha; Komersil dan Pelayanan Pelanggan, Pengusahaan Pariwisata dan Hotel; dan Pengembangan SPAM, pengembangan Pump Storage Power Plant dan EBT pengembangan holding AMDK; Pengembangan Wilayah; Pengembangan Infrastruktur Wisata dan Destinasi; Optimalisasi BMN dan Aset Perusahaan; / <i>Improve coordination and work relations with Stakeholders in carrying out tasks in the field of Business Development; Commercial and Customer Service, Tourism and Hotel Business; and SPAM development, Pump Storage Power Plant development and EBT development for AMDK holding; Area Development; Tourism and Destination Infrastructure Development; Optimization of BMN and Company Assets;</i> - Menyampaikan laporan kinerja di bidang Pengembangan Usaha; Komersil dan Pelayanan Pelanggan, Pengusahaan Pariwisata dan Hotel; dan Pengembangan SPAM, pengembangan Pump Storage Power Plant dan EBT pengembangan holding AMDK; Pengembangan Wilayah; Pengembangan Infrastruktur Wisata dan Destinasi; Optimalisasi BMN dan Aset Perusahaan; / <i>Submit performance reports in the field of Business Development; Commercial and Customer Service, Tourism and Hotel Business; and SPAM development, Pump Storage Power Plant development and EBT development for AMDK holding; Area Development; Tourism and Destination Infrastructure Development; Optimization of BMN and Company Assets;</i> - Bidang Pengembangan Usaha; Komersil dan Pelayanan Pelanggan, Pengusahaan Pariwisata dan Hotel; dan Pengembangan SPAM, pengembangan Pump Storage Power Plant dan EBT pengembangan holding AMDK; Pengembangan Wilayah; Pengembangan Infrastruktur Wisata dan Destinasi; Optimalisasi BMN dan Aset Perusahaan; / <i>Business Development Sector; Commercial and Customer Service, Tourism and Hotel Business; and SPAM development, Pump Storage Power Plant development and EBT development for AMDK holding; Area Development; Tourism and Destination Infrastructure Development; Optimization of BMN and Company Assets;</i> - Mengkoordinasikan penyusunan Blue Print Perusahaan, Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Direktorat Pengembangan Usaha. / <i>Coordinate the preparation of the Company's Blue Print, the Company's Long Term Plan (RJPP) and the Corporate Budget Work Plan (RKAP) of the Directorate of Business Development.</i> Susunan Organisasi / Organization Structure Direktur Pengembangan Usaha membina, mengawasi dan mengendalikan Unit Kerja sebagai berikut: / <i>The Director of Business Development fosters, supervises and controls the following Work Units:</i> - Divisi Pengembangan Usaha; / <i>Business Development Division;</i> - Divisi Komersil dan Pelayanan Pelanggan; dan / <i>Commercial and Customer Service Division; and</i> - Divisi Usaha Pariwisata dan Hotel. / <i>Tourism and Hotel Business Division.</i>



Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab Direksi berpedoman pada Pedoman Kerja dan Tata Tertib Direksi yang memuat tata laksana kerja Direksi serta tahapan aktivitas secara terstruktur dan sistematis dengan pembagian tugas yang jelas. Pedoman dan tata tertib kerja Direksi tersebut telah dimuat dalam Board Manual yang disahkan dalam Keputusan Bersama Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik Nomor: 1/DP/68/KBS/10/2019 tanggal 30 Oktober 2019. Pokok-pokok yang dimuat dalam pedoman kerja dan tata tertib Direksi telah diselaraskan dengan visi dan misi Perum Jasa Tirta II serta standar kerja yang tinggi sesuai best practices GCG dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum korporasi, ketentuan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta prinsip-prinsip GCG. Pedoman dan tata tertib Direksi antara lain mengatur mengenai:

Ketentuan Umum

- Pembagian tugas dan wewenang Direksi
- Susunan Direksi
- Tugas, wewenang dan tanggung jawab
- Waktu dan Kerja Direksi
- Rapat Direksi
- Etika kerja Direksi
- Perjalanan dinas
- Laporan
- Pengangkatan dan Pemberhentian

Guidelines and Work Rules of the Board of Directors

The implementation of the Board of Directors' functions, duties, and responsibilities is guided by the Board of Directors' Work Guidelines and Code of Conduct, which contain the Board of Directors' work procedures and the stages of activities in a structured and systematic manner with a clear division of tasks. The Board Manual contains the guidelines and work procedures for the Board of Directors, which were ratified in the Joint Decree of the Supervisory Board and the Board of Directors of Jasa Tirta II Public Company regarding Guidelines for Good Corporate Governance Number: 1/DP/68/KBS/10/2019 dated October 30, 2019. The points contained in the Board of Directors' work guidelines and regulations have been harmonized with the vision and mission of Perum Jasa Tirta II, as well as high work standards in accordance with GCG best practices, by taking into account corporate law principles, provisions of the Articles of Association, applicable laws and regulations, and GCG principles. Among other things, the Board of Directors' guidelines and rules of conduct govern:

General Requirements

- Board of Directors' Duties and Authorities
- Board of Directors' Composition
- Board of Directors' Duties, Authorities, and Responsibilities
- Board of Directors' Time and Work
- Board of Directors' Meetings
- Board of Directors' Work Ethics
- Business Trips
- Reports
- Appointment and Rejection

MEKANISME PENGANGKATAN DIREKSI

Board Of Directors Appointment Mechanism

Mekanisme dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Direksi mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Usaha Milik Negara. Ketentuan yang diatur dalam peraturan tersebut kemudian diinternalisasikan ke dalam pedoman kerja dan tata tertib Direksi. Adapun mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Direksi adalah sebagai berikut:

Mechanisms and procedures for the appointment and dismissal of the Board of Directors refer to the Minister of State-Owned Enterprises Regulation Number: PER-03/MBU/02/2015 on the Requirements and Procedures for the Appointment and Dismissal of Members of the Board of Directors and State-Owned Enterprises. The provisions outlined in these regulations are then incorporated into the Board of Directors' work guidelines and rules. The following is the procedure for appointing and dismissing members of the Board of Directors:



Pengangkatan Direksi

- Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Menteri BUMN;
- Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan 5(lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya;
- Apabila dipandang perlu, dalam rangka pengangkatan Direksi, Menteri BUMN dapat meminta masukan dari Menteri Teknis;
- Apabila salah satu atau beberapa anggota Direksi berhalangan tetap untuk menjalankan pekerjaannya atau apabila jabatan itu terluang dan penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka jabatan tersebut dipangku oleh anggota Direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh Dewan Pengawas melalui surat penunjukan yang disampaikan kepada Menteri BUMN paling lambat 14 (empat belas) hari. Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak diterimanya pemberitahuan dari Dewan Pengawas, Menteri BUMN menunjuk anggota Direksi yang baru untuk memangku jabatan yang terluang;
- Apabila semua anggota Direksi berhalangan tetap untuk menjalankan pekerjaannya atau jabatan Direksi terluang seluruhnya dan belum diangkat, maka sementara waktu pengurusan Perusahaan dijalankan oleh Dewan Pengawas.
- Pemberhentian Direksi Anggota Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan alasan bahwa pada kenyataannya anggota Direksi yang bersangkutan:
 - (i) Tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;
 - (ii) Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - (iii) Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan;
 - (iv) Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan ;
 - (v) Dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - (vi) Meninggal dunia; Mengundurkan diri.

Board of Directors Appointment

- Members of the Board of Directors are appointed and dismissed by the Minister of BUMN;
- Members of the Board of Directors are appointed for a term of 5 (five) years and can be appointed again for 1 (one) time the following term of office;
- When deemed necessary, the BUMN Minister can request input from the Technical Minister in the framework of the appointment of the Board of Directors;
- If one or more members of the Board of Directors are permanently unable to carry out their duties, or if a position is vacant and the replacement has not been appointed or has not yet assumed the position, the position is assumed by another member of the Board of Directors who is temporarily appointed by the Board of Supervisors via a letter of appointment submitted to the Minister of BUMN by the latest late 14 (fourteen) days. The Minister of BUMN appoints new members of the Board of Directors to fill vacant positions within 2 (two) months of receiving notification from the Board of Supervisors;
- If all of the members of the Board of Directors are permanently unable to carry out their duties, or if the position of the Board of Directors is completely vacant and has not been filled, the Company's management is temporarily carried out by the Board of Supervisors.
- Board of Directors Dismissal Members of the Board of Directors may be removed from office before the end of their term.
 - (i) The management contract stipulates that he is unable to fulfill his obligations.
 - (ii) Unable to perform his duties well;
 - (iii) Failure to implement legislative and/or regulatory provisions;
 - (iv) Involved in actions detrimental to the Company;
 - (v) Found guilty by a court decision with permanent legal force;
 - (vi) Died; Resigned.



- Keputusan pemberhentian karena alasan (i) sampai (vii) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri. Pembelaan diri disampaikan secara tertulis kepada Menteri BUMN dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Direksi yang bersangkutan diberitahu secara tertulis oleh Menteri BUMN tentang rencana pemberhentian tersebut. Selama rencana pemberhentian masih dalam proses, maka anggota Direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya, dan bila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri kepada Menteri BUMN tidak memberikan keputusannya, maka rencana tersebut menjadi batal;
- Pemberhentian karena alasan (v) tersebut di atas merupakan pemberhentian tidak hormat;
- Kedudukan sebagai anggota Direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Menteri BUMN jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri dengan menyebutkan alasannya;

- *Termination decisions based on reasons I to (vii) are made after the individual has been given an opportunity to defend himself. Self-defense is submitted in writing to the Minister of BUMN within 1 (one) month of the member of the Board of Directors concerned being notified in writing of the termination plan by the Minister of BUMN. Plan termination the member of the Board of Directors concerned can continue his duties, and if he does not provide the decision within 2 (two) months from the date of submission of the self-defense to the Minister of BUMN, then the plan becomes void;*
- *Termination due to reason (v) above is a dishonorable termination;*
- *His position as a member of the Board of Directors ends with the Minister of BUMN issuing a termination decision based on the Minister's Decision stating the reasons;*

Program Orientasi Direksi Baru

Program orientasi atau pengenalan mengenai Perum Jasa Tirta II diberikan kepada anggota Direksi yang diangkat untuk pertama kalinya. Pelaksanaan program orientasi dilaksanakan oleh anggota Direksi yang lebih senior. Adapun materi program orientasi yang diberikan kepada Direksi baru meliputi:

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perum Jasa Tirta II;
2. Gambaran mengenai Perum Jasa Tirta II berkaitan dengan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis;
3. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan;
4. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi.

Program orientasi yang dilaksanakan berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke kantor cabang dan pengkajian dokumen serta program lainnya yang sesuai dengan kebijakan Perusahaan. Selain itu juga diperhatikan tingkat kehadiran dan efektivitas anggota Direksi dalam mengikuti rangkaian program pengenalan Perum Jasa Tirta II kepada Direksi baru. Pada tahun 2022 terdapat 1 pelaksanaan program orientasi Direksi baru yaitu untuk Bapak Dikdik Permadi Yoffana.

New Director Orientation Program

Members of the Board of Directors who are appointed for the first time receive an orientation or introduction program on Perum Jasa Tirta II.

Senior members of the Board of Directors oversee the implementation of the orientation program material. The orientation program for new Board of Directors covers the following topics:

1. *Perum Jasa Tirta II's implementation of GCG principles;*
2. *A summary of Perum Jasa Tirta II's activities, financial and operational performance, strategy, short- and long-term business plans, competitive position, risks, and strategic issues;*
3. *Evidence of delegated authority;*
4. *A description of the Board of Directors' duties and responsibilities.*

The orientation programme was conducted in the form of presentations, meetings, visits to branch offices and document review as well as other programmes in accordance with the Company's policies. In addition, the level of attendance and effectiveness of the members of the Board of Directors in participating in the series of introduction programmes of Perum Jasa Tirta II to the new Board of Directors were also considered.

In 2022, there was 1 implementation of the orientation programme for new Directors, namely for Mr Dikdik Permadi Yoffana.



Kebijakan Suksesi Direksi

Dalam rangka memastikan bahwa Perusahaan dikelola oleh manajemen yang memiliki keahlian dan kompetensi yang disyaratkan, Perusahaan memiliki kebijakan suksesi Direksi di mana penetapan calon Direksi Perum Jasa Tirta II mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara. Sumber bakal calon Direksi berasal dari:

1. Direksi BUMN;
2. Dewan Pengawas /Dewan Pengawas BUMN;
3. Talenta BUMN yang terdiri atas :
 1. a) Pejabat satu tingkat di bawah Direksi atau pejabat yang mempunyai prestasi istimewa;
 2. b) Direksi anak Perusahaan BUMN/Perusahaan patungan BUMN;
4. Talenta Kementerian BUMN;
5. Pejabat BUMN lain dan sumber lainnya.

Adapun proses pemilihan Direksi dilakukan oleh Tim Evaluasi yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan dari Eselon I terkait dan Sekretaris Kementerian. Proses penyeleksian oleh Tim Evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pemanggilan terhadap calon anggota Direksi yang termasuk dalam Daftar Calon yang telah disetujui oleh Menteri untuk mengikuti Uji Kelayakan dan Kematangan (UKK);
2. Melakukan pengujian terhadap calon anggota Direksi, jika pengujian tidak menggunakan lembaga profesional;
3. Melakukan evaluasi terhadap hasil pengujian lembaga profesional, jika pengujian menggunakan lembaga profesional;
4. Mengambil keputusan dan memberikan rekomendasi atas penilaian yang dilakukan;
5. Menetapkan hasil akhir evaluasi yang ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Ketua Tim Evaluasi untuk disampaikan kepada Menteri guna mendapatkan penetapan;
6. Menyampaikan seluruh dokumen Uji Kelayakan dan Kematangan (UKK) kepada Sekretaris Kementerian untuk diadministrasikan;
7. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Menteri dalam rangka memperlancar proses Uji Kelayakan dan Kematangan (UKK).

Succession Policy for the Board of Directors

To ensure that the Company is managed by management with the necessary skills and competencies, the Company has a Board of Directors succession policy in place, with the determination of candidates for the Board of Directors of Perum Jasa Tirta II referring to the provisions stipulated in the Regulation of the Minister of State for SOEs No. PER-03/ MBU/02/2015 concerning Requirements, Procedures for Appointment and Dismissal of Members of the Board of Directors of Stat Candidates for the Board of Directors can be found in the following places:

1. Directors of SOEs;
2. Supervisory Board / Supervisory Board of SOEs;
3. BUMN talents comprised of:
 1. a) Officials one level below the Board of Directors or officials with special accomplishments;
 2. b) Directors of subsidiaries of BUMN/BUMN joint venture companies;
4. Ministry of SOEs talents;
5. Other BUMN officials and sources

The Board of Directors is chosen by an Evaluation Team appointed by the Minister based on proposals from the relevant Echelon I and the Secretary of the Ministry. The Evaluation Team's selection procedure is as follows:

1. Calling for candidates for members of the Board of Directors who are on the Minister-approved Candidate List to take the Fit and Proper Test (UKK);
2. Conduct testing on candidates for Board of Directors members if no professional institution is used;
3. Evaluate the results of testing conducted by professional institutions, if testing is conducted by professional institutions;
4. Make decisions and provide recommendations on the assessments conducted;
5. Determine the final result of the evaluation, which is signed by the Chair and Deputy Chair of the Evaluation Team and submitted to the Minister for stipulation;
6. Submit all Fit and Proper Test (UKK) documents to the Ministry's Secretary for administration;
7. Perform any other tasks assigned by the Minister to expedite the Fit and Proper Test (UKK) process.



Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit & Proper Test)

Direksi Perum Jasa Tirta II berupaya memastikan bahwa seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi, reputasi dan pengalaman, serta keahlian yang dibutuhkan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing. Untuk menjamin kesesuaian antara latar belakang kompetensi, keahlian, reputasi dan pengalaman kerja terhadap kebutuhan posisi, seluruh anggota Direksi telah melalui Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit & Proper Test).

Rapat Direksi

Direksi secara berkala menyelenggarakan rapat internal Direksi maupun rapat gabungan bersama Dewan Pengawas. Adapun rapat Direksi dimanfaatkan sebagai media pembahasan dan diskusi berbagai keperluan pengelolaan Perusahaan, kegiatan operasi, serta pengambilan keputusan yang menjadi tanggung jawab Direksi.

Direksi wajib mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dengan dihadiri oleh mayoritas dari seluruh anggota Direksi. Setiap anggota Direksi wajib menghadiri paling sedikit 75% dari jumlah keseluruhan rapat Direksi. Keputusan rapat Direksi dilaksanakan dengan menganut prinsip musyawarah untuk mufakat dan dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai maka pengambilan keputusan berdasarkan metode voting. Hasil rapat dituangkan ke dalam risalah rapat, termasuk dalam hal terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) disertai alasannya, ditandatangani oleh seluruh peserta yang hadir, dan didokumentasikan dengan baik.

Selama tahun 2022, Direksi telah menyelenggarakan rapat internal secara *offline* maupun online sebanyak 14 kali.

The Fit and Proper Test

Perum Jasa Tirta II's Board of Directors works hard to ensure that all members of the Board of Directors have the integrity, competence, reputation, and experience required to carry out their respective functions and duties. All members of the Board of Directors have passed the Fit & Proper Test to ensure that their background of competence, expertise, reputation, and work experience is appropriate for the needs of the position.

Meetings of the Board of Directors

Directors hold internal Board of Directors meetings as well as joint meetings with the Supervisory Board on a regular basis.

Meanwhile, the Board of Directors' meeting serves as a forum for discussion and debate on a variety of topics related to the Company's management, operational activities, and decision-making authority.

The Board of Directors is required to hold a meeting at least once a month, attended by a majority of all Board of Directors members. Each member of the Board of Directors must attend at least 75% of the total number of Board of Directors meetings. Decisions of the Board of Directors meeting are carried out in accordance with the principle of deliberation to reach consensus, and if consensus is not reached, the decision is made in accordance with the law.

The meeting's results are recorded in the minutes of the meeting, including dissenting opinions and their reasons, signed by all participants present, and properly documented.

The Board of Directors held 14 internal meetings in 2022, both offline and online.



REKAPITULASI KEHADIRAN DIRKSI DAN DEWAN PENGAWAS PERUM JASA TIRTA II DALAM RAPAT GABUNGAN DEWAN PENGAWAS - DIREKSI PERUM JASA TIRTA II PERIODE TAHUN 2022 /

*Recapitulation Of The Attendance Of Directors And Supervisory Board Of Perum Jasa Tirta Ii In The Joint Meeting
Of Supervisory Board - Directors Of Perum Jasa Tirta Ii Period 2022*

NO.	TANGGAL PELAKSANAAN RAGAB <i>Ragab Implementation Date</i>	KEHADIRAN DIREKSI / Presence Of Directors			
		DIREKTUR UTAMA <i>President Director (Bpk Imam Santoso)</i>	DIREKTUR KEUANGAN, SDM DAN MANAJEMEN RISIKO <i>Director Of Finance, Human Resources And Risk Management (Ibu Indriani Widiastuti)</i>	DIREKTUR OPERASI DAN PEMELIHARAAN <i>Director Of Operations And Maintenance (Bpk. Anton Mardiyono)</i>	DIREKTUR PENGEMBANGAN USAHA <i>Director Of Business Development (Bpk. Dikdik Permadi Yoffana)</i>
1.	31 Januari 2022 <i>January 31, 2022</i>	√	√	√	√
2.	2 Maret 2022 <i>March 2, 2022</i>	√	√	√	√
3.	28 Maret 2022 <i>March 28, 2022</i>	√	√	√	√
4.	26 April 2022 <i>April 26, 2022</i>	√	√	√	√
5.	10 Juni 2022 <i>June 10, 2022</i>	√	√	√	√
6.	29 Juni 2022 <i>June 29, 2022</i>	√	√	√	√
7.	28 Juli 2022 <i>July 28, 2022</i>	√	√	√	√
8.	30 Agustus 2022 <i>August 30, 2022</i>	√	√	√	√
9.	28 September 2022 <i>September 28, 2022</i>	√	√	√	√
10.	28 Oktober 2022 <i>October 28, 2022</i>	√	√	√	√
11.	30 November 2022 <i>November 30, 2022</i>	√	√	√	√
12.	27 Desember 2022 <i>December 27, 2022</i>	√	√	√	√



Keberagaman Komposisi Direksi

Perum Jasa Tirta II mengedepankan pentingnya penyesuaian diri di industri dengan mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang andal dan profesional secara komprehensif, termasuk dalam tingkatan manajemen kunci. Dalam hal ini, Perusahaan memperhatikan keberagaman komposisi dan karakteristik Direksi berdasarkan usia, latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, serta keahlian guna meng-hadirkan solusi pemecahan masalah yang beragam dari berbagai perspektif sesuai dengan keahliannya masing-masing.

Hubungan Afiliasi Direksi

Direksi senantiasa bertindak independen, dalam arti tidak mempunyai benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis, baik dalam hubungan satu sama lain maupun hubungan terhadap Dewan Pengawas .

Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Pengawas dan/atau Pemilik Modal Pengendali atau hubungan dengan Perusahaan , sehingga, dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

Direksi tidak memegang jabatan rangkap sebagai Direktur Utama atau Direktur lainnya pada Badan Usaha Milik Negara, Daerah dan Swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan Perusahaan, maupun jabatan struktural, dan jabatan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundangundangan lainnya yang berlaku.

Independensi Direksi dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

The Board of Directors is diverse in its composition

Perum Jasa Tirta II emphasizes the importance of industry adaptation by comprehensively preparing reliable and professional Human Resources (HR), including at key management levels. In this case, the Company emphasizes the diversity of the Board of Directors' composition and characteristics based on age, educational background, work experience, and expertise in order to present various problem-solving solutions from various perspectives based on their respective expertise.

Board of Directors Affiliation

Directors always act independently, in the sense that there are no conflicts of interest that could impair their ability to carry out tasks independently and critically, both in relation to one another and in relation to the Supervisory Board.

The Board of Directors has no financial, management, share ownership, or family relationships with other members of the Board of Directors, Supervisory Board, and/or Controlling Capital Owner, and they can carry out their duties and responsibilities independently.

The Board of Directors does not hold concurrent positions as President Director or other Director in State-Owned, Regional, and Private Enterprises, as well as other positions related to the Company's management, structural positions, and other functional positions, in central and local government agencies/institutions, as well as other positions, in accordance with the provisions of the Articles of Association of the Company and other applicable laws and regulations

The table below shows the independence of the Board of Directors:



NAMA Name	HUBUNGAN KELUARGA DENGAN Family Relations with						HUBUNGAN KEUANGAN DENGAN Financial Relations with						KEPENGURUSAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM DENGAN PERUSAHAAN LAIN Management and Share Ownership with Other Companies					
	DEWAN PENGAWAS Supervisory Board		DIREKSI Board of Director		PEMILIK MODAL Capital Owners		DEWAN PENGAWAS Supervisory Board		DIREKSI Board of Director		PEMILIK MODAL Capital Owners		DEWAN PENGAWAS Supervisory Board		DIREKSI Board of Director		PEMILIK MODAL Capital Owners	
	YA / Yes	TIDAK No	YA / Yes	TIDAK No	YA / Yes	TIDAK No	YA / Yes	TIDAK No	YA / Yes	TIDAK No	YA / Yes	TIDAK No	YA / Yes	TIDAK No	YA / Yes	TIDAK No	YA / Yes	TIDAK No
Imam Santoso	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Dikdik Permadi Yoffana	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Anton Mardiyono	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Indriani Widiastuti	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

Kebijakan Rangkap Jabatan Direksi

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015, anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

1. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Badan Usaha Milik Swasta;
2. Anggota Dewan Pengawas /Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara;
3. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah;
4. Pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif;

Board of Directors Policy on Concurrent Positions

Members of the Board of Directors are prohibited from holding concurrent positions as: According to the provisions stipulated in the Regulation of the Minister of SOE Number PER-02/MBU/02/2015 dated 17 February 2015, members of the Board of Directors are prohibited from holding concurrent positions as:

1. Directors of State-Owned Enterprises, Regional-Owned Enterprises, and/or Private-Owned Enterprises;
2. Members of the Supervisory Board / Supervisory Board of State-Owned Enterprises;
3. Other structural and functional positions in central and/or regional government agencies/institutions;
4. Administrators of political parties and/or legislative candidates/members;



5. Jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan/atau jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
6. Calon legislatif atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah.

Informasi mengenai rangkap jabatan anggota Direksi disajikan dalam tabel berikut:

5. *Positions that may cause conflicts of interest and/or other positions in accordance with the provisions of the laws and regulations;*
6. *Legislative candidates or regional head/deputy regional heads.*

Information regarding the concurrent positions of members of the Directors is presented in the following table:

NAMA Name	JABATAN Position	JABATAN PADA PERSEROAN LAIN Position In Other Companies	NAMA PERSEROAN Name Company
Imam Santoso	Direktur Utama President Director	TIDAK ADA Nothing	TIDAK ADA No Positin
Dikdik Permadi Yoffana	Direktur Pengembangan Usaha Director of Business Development	TIDAK ADA Nothing	TIDAK ADA No Positin
Indriani Widiastuti	Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia & MANRISK Director of Finance, Human Resources & MANRISK	TIDAK ADA Nothing	TIDAK ADA No Positin
Anton Mardiyono	Direktur Operasi dan Pemeliharaan Director of Operations and Maintenance	KOMISARIS Commissioner	PT Jasa Tirta Luhur

Kepemilikan Saham Direksi

Hingga 31 Desember 2022, Perum Jasa Tirta II tidak pernah melakukan penawaran umum saham di bursa efek manapun dan tidak pernah melakukan program kepemilikan saham oleh manajemen (*Management Stock Option Program / MSOP*) maupun program kepemilikan saham oleh karyawan (*Employee Stock Option Program / ESOP*). Sehingga tidak ada saham yang dimiliki oleh Direksi.

Share Ownership of the Board of Directors

As of December 31, 2022, Perum Jasa Tirta II has never conducted a public offering of shares on any stock exchange and has never conducted a share ownership program by management (Management Stock Option Program / MSOP) as well as employee stock ownership program (Employee Stock Option Program / ESOP). So that there are no shares owned by the Board of Directors.



NAMA Name	JABATAN Position	KEPEMILIKAN SAHAM / Share Ownership in	
		Perum Jasa Tirta II	PERUSAHAAN LAIN Other Companies
Imam Santoso	Direktur Utama President Director	TIDAK ADA Nothing	TIDAK ADA No Positin
Dikdik Permadi Yoffana	Direktur Pengembangan Usaha Director of Business Development	TIDAK ADA Nothing	TIDAK ADA No Positin
Indriani Widiastuti	Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia & MANRISK Director of Finance, Human Resources & MANRISK	TIDAK ADA Nothing	TIDAK ADA No Positin
Anton Mardiyono	Direktur Operasi dan Pemeliharaan Director of Operations and Maintenance	TIDAK ADA Nothing	TIDAK ADA Nothing

Keputusan dan Pelaksanaan Tugas Direksi

Keputusan Direksi yang telah dikeluarkan selama tahun 2022, antara lain sebagai berikut.

Laporan Pelaksanaan Tugas Direksi Tahun 2022

Sepanjang tahun 2022, Direksi telah menjalankan pengelolaan Perusahaan dengan berpedoman pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta Rencana Perusahaan Jangka Panjang yang telah ditetapkan dengan senantiasa memperhatikan visi, misi, dan tujuan Perusahaan. Uraian pelaksanaan tugas Direksi selama tahun buku 2022 adalah sebagai berikut :

- Direksi telah menetapkan kebijakan terkait kepengurusan Perusahaan ;
- Direksi telah mengambil keputusan dalam mewakili Perusahaan ;
- Direksi telah melakukan pengembangan Perusahaan dan Entitas Anak melalui keputusan yang dibuat selama tahun 2022.

Decisions and Implementation of Duties of the Board of Directors

Decisions of the Board of Directors that have been issued during 2022, among others, are as follows.

Report on the Implementation of the Duties of the Board of Directors in 2022

Throughout 2022, the Board of Directors has carried out the management of the Company based on the Company's Work Plan and Budget as well as the Long-Term Corporate Plan that has been determined by always paying attention to the Company's vision, mission and goals. The description of the implementation of the duties of the Board of Directors during the 2022 financial year is as follows:

- The Board of Directors has established policies related to the management of the Company;
- The Board of Directors has made a decision to represent the Company;
- The Board of Directors has developed the Company and its Subsidiaries through decisions made during 2022.



Penilaian Kinerja Direksi

Perum Jasa Tirta II melakukan penilaian secara berkala terhadap kinerja Direksi melalui beberapa metode, yaitu mekanisme penilaian GCG, khususnya aspek Direksi dan metode penilaian *Key Performance Indicator (KPI)* yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN.

Penilaian Kinerja Direksi Berdasarkan Assessment GCG

Perusahaan melakukan penilaian atas implementasi GCG aspek Direksi yang dilaksanakan sesuai dengan kerangka acuan pelaksanaan assessment GCG yang dikembangkan oleh Kementerian Negara BUMN berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

Penilaian kinerja Direksi melalui assessment GCG aspek Direksi mempertimbangkan kriteria-kriteria yang relevan, antara lain kontribusi Direksi dalam penyusunan rencana pengembangan Perusahaan jangka pendek dan jangka panjang, penetapan strategi dan inisiatif pengelolaan Perusahaan, pemenuhan target kinerja Perusahaan, penyelenggaraan rapat, pemberian keputusan Direksi, dan sejumlah kriteria lainnya.

Penilaian Kinerja Direksi Berdasarkan Key Performance Indicator (KPI)

Selain melalui assessment GCG, tolok ukur penilaian kinerja Direksi memperhitungkan pencapaian *Key Performance Indicator (KPI)* berbasis Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) dengan berpedoman pada Surat Kementerian BUMN No. S-08/S.MBU/2013 tanggal 16 Januari 2013 tentang Pedoman Penentuan KPI pada BUMN.

Kriteria yang dinilai berdasarkan KPKU mencakup 6 (enam) indikator utama, yaitu Keuangan dan Pasar, Fokus Pelanggan, Efektivitas Produk dan Proses, Fokus Tenaga Kerja, Kepemimpinan Tata Kelola dan Tanggung Jawab Kemasyarakatan, dan *Agent of Development (AOD)*.

Board of Directors Performance Evaluation

Perum Jasa Tirta II conducts periodic assessments of the Board of Directors' performance using several methods, including the GCG assessment mechanism, specifically the Board of Directors' aspects, and the Key Performance Indicator (KPI) assessment method determined by the Ministry of SOEs.

Board of Directors Performance Evaluation Based on the GCG Assessment

The Company evaluates the implementation of GCG aspects of the Board of Directors in accordance with the framework of reference for the implementation of the GCG assessment developed by the Ministry of State-Owned Enterprises based on the Decree of the Secretary of the Ministry of SOEs No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises.

The GCG assessment of the aspects of the Board of Directors takes into account relevant criteria, such as the contribution of the Board of Directors in the preparation of short-term and long-term Company development plans, the determination of strategies and initiatives for managing the Company, meeting the Company's performance targets, holding meetings, making decisions, and a variety of other criteria.

Performance Evaluation of the Board of Directors Using Key Performance Indicators (KPI)

In addition to the GCG assessment, the performance assessment benchmarks of the Board of Directors take into account the achievement of Key Performance Indicators (KPI) based on the Superior Performance Assessment Criteria (KPKU) based on the Ministry of SOE Letter No. S-08/S.MBU/2013 dated January 16, 2013 concerning Guidelines for Determining KPIs in BUMN.

Finance and Markets, Customer Focus, Product and Process Effectiveness, Workforce Focus, Governance Leadership and Community Responsibility, and Agent of Development are among the criteria assessed using the KPKU (AOD).



Mekanisme Pengunduran Diri dan Pemberhentian Direksi

Pemberhentian dapat dilakukan apabila anggota Direksi yang bersangkutan :

1. Mengundurkan diri;
2. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundangundangan yang berlaku;
3. Meninggal dunia;
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan RPB dengan menyebutkan alasan-alasannya.

Kebijakan Remunerasi Dewan Pengawas Dan Direksi

Dewan Pengawas dan Direksi berhak memperoleh remunerasi dan beberapa fasilitas lainnya sebagai bayaran atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Kebijakan penetapan, skema, dan prosedur remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-06/MBU/06/2018 Jo. PER-01/MBU/05/2019 Jo. PER-12/MBU/11/2020 tanggal 25 November 2020 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Pengawas , dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi

Prosedur penetapan remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi mengikuti kaidah sebagai berikut:

1. Dewan Pengawas melakukan kajian mengenai remunerasi yang diterima oleh Dewan Pengawas dan Direksi, baik dilakukan secara mandiri atau dapat meminta bantuan dari pihak independen;
2. Dewan Pengawas mengusulkan penetapan remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi kepada kepada pemilik modal;
3. Pemilik Modal selanjutnya mengkaji dan menelaah usulan dari Dewan Pengawas;
4. Pemilik Modal menetapkan remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi.

Board of Directors Resignation and Dismissal Mechanism

Dismissal can be carried out if the member of the Board of Directors in question:

1. *Resigns;*
2. *No longer meets the requirements of the applicable legislation;*
3. *Dies; or*
4. *Is dismissed based on the RPB's decision, with reasons given.*

The Supervisory Board's Remuneration Policy

The Supervisory Board and the Board of Directors are entitled to remuneration and other benefits in exchange for carrying out their duties and responsibilities. The policy for determining, schemes, and remuneration procedures for the Supervisory Board and the Board of Directors refers to the provisions stipulated in the Minister of State-Owned Enterprises Regulation Number PER-06/MBU/06/2018 Jo. PER-01/MBU/05/2019 Jo. PER-12/MBU/11/2020 dated November 25, 2020 regarding Guidelines for Determining the Income of Directors, Supervisory Boards, and Supervisory Boards of State-Owned Enterprise

Procedure for Determining Supervisory Board and Board of Directors Remuneration

The following rules govern the procedure for determining the remuneration of the Supervisory Board and the Board of Directors:

1. *The Supervisory Board reviews the remuneration received by the Supervisory Board and the Board of Directors, either independently or by requesting assistance from an independent party;*
2. *The Supervisory Board proposes to determine the remuneration of the Supervisory Board and the Board of Directors to the owners of capital;*
3. *The Capital Owner shall further review and review the proposal from the Supervisory Board;*
4. *The Capital Owner shall determine the remuneration of the Supervisory Board and the Board of Directors;*



Indikator Penetapan Remunerasi

Penetapan remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi memperhatikan indikator-indikator sebagai berikut:

1. Kinerja keuangan dan tingkat perolehan keuntungan Perusahaan pada tahun buku;
2. Prestasi dan capaian kinerja Dewan Pengawas dan Direksi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab;
3. Pencapaian prestasi kerja dan KPI individual;
4. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Perusahaan .

Struktur Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi

Ketentuan penentuan struktur Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi adalah sebagai berikut:

1. Gaji Direktur adalah 85% dari Direktur Utama;
2. Honorarium Anggota Dewan Pengawas adalah 90% dari Ketua Dewan Pengawas;
3. Tantiem Direktur dan Ketua Dewan Pengawas masing-masing 85% dan 45% dari tantiem Direktur Utama;
4. Tantiem anggota Dewan Pengawas adalah sebesar 90% dari tantiem Ketua Dewan Pengawas;
5. Tunjangan dan fasilitas bagi Direksi dan Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II Tahun 2021 mengacu pada ketetapan Nomor SR-143/WK2.MBU.C/10/2021 Tanggal 1 Oktober 2021 Tentang penetapan penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II;
6. Pembayaran dihitung dengan memperhitungkan masa kerja efektif pada tahun buku. Pajak penghasilan (PPh) atas tantiem menjadi beban penerima.

Indicators of Remuneration Determination

The following indicators are considered when determining remuneration for the Supervisory Board and the Board of Directors:

1. The Company's financial performance and profitability in the fiscal year;
2. The Supervisory Board's and Board of Directors' achievements and performance achievements in accordance with their duties and responsibilities;
3. Meeting work performance and individual KPIs;
4. Taking into account the Company's long-term goals and strategies.

Structure of the Supervisory Board and the Board of Directors' Remuneration

The following provisions govern the structure of the Remuneration of the Supervisory Board and the Board of Directors:

1. The Director's salary is 85 percent that of the President Director.
2. The Honorarium for Members of the Supervisory Board is 90% of the Chairperson of the Supervisory Board;
3. Bonuses for the Director and Chairman of the Supervisory Board are 85% and 45% of the bonuses for the President Director, respectively.
4. The bonus for Supervisory Board members is 90% of the bonus for the Chairman of the Supervisory Board.
5. Allowances and facilities for the Board of Directors and Supervisory Board of Perum Jasa Tirta II Year 2020 refers to the stipulation Number SR-143/WK2.MBU.C/10/2021 dated October 1, 2021 regarding the determination of the income of the Board of Directors and Supervisory Board of Perum Jasa Tirta II;
6. Payment is calculated by taking the effective working period in the financial year into account of income tax (PPh) on bonuses.



STRUKTUR REMUNERASI DEWAN PENGAWAS <i>Remuneration Structure of Supervisory Board</i>	STRUKTUR REMUNERASI DIREKSI <i>Remuneration Structure of Board of Directors</i>
- Honorarium / <i>Honorarium</i> - Fasilitas / <i>Facilities</i>: a) Transportasi / <i>Transportation</i> b) Tunjangan Hari Raya (THR) / <i>Holiday Allowance</i> c) Tantiem / <i>Tantiem</i> d) Premi Asuransi / <i>Insurance Premium</i> - Bantuan Hukum / <i>Legal Assistance</i>	- Gaji / <i>Honorarium</i> - Fasilitas / <i>Facilities</i>: a) Tunjangan Hari Raya (THR) / <i>Holiday Allowance (THR)</i> b) Tunjangan Asuransi / <i>Insurance Benefits</i> c) Tunjangan Rumah Jabatan / <i>Housing Allowance</i>

Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi Jasa Tirta II Tahun 2022

Remuneration of Supervisory Board and Board of Directors of Jasa Tirta II in 2022

JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN / <i>Types of Remuneration and Others Facilities</i>	JUMLAH DITERIMA / <i>Amount Received</i>			
	DEWAN KOMISARIS / <i>Board of Commissioners</i>		DIREKSI / <i>Board of Directors</i>	
	JUMLAH ORANG / <i>Number of People</i>	NILAI / <i>Amount</i>	JUMLAH ORANG / <i>Number of People</i>	NILAI / <i>Amount</i>
Honorarium/Gaji/ <i>Honorarium/ Salary</i>	Dewan Komisaris (termasuk yang sudah berhenti pada tahun 2022)/ Board of Commissioners (Including those who retired in 2022)	2,763,198,000	Direksi (termasuk yang sudah berhenti pada tahun 2022)/ Board of Directors (Including those who retired in 2022)	5,675,550,000
Tantiem/Insentif Khusus Dewan Komisaris/ <i>Tantiem/ Special Incentive for the Board of Commissioners</i>	Dewan Komisaris (termasuk yang sudah berhenti pada tahun 2022)/ Board of Commissioners (Including those who retired in 2022)	3,112,895,194	Direksi (termasuk yang sudah berhenti pada tahun 2022)/ Board of Directors (Including those who retired in 2022)	3,893,077,135
TUNJANGAN / <i>Allowance</i>				
Tunjangan Hari Raya Keagamaan/ <i>Religious Holiday Allowance</i>	Dewan Komisaris (termasuk yang sudah berhenti pada tahun 2022)/ Board of Commissioners (Including those who retired in 2022)	245,385,000	Direksi (termasuk yang sudah berhenti pada tahun 2022)/ Board of Directors (Including those who retired in 2022)	484,575,000



ORGAN PENDUKUNG DEWAN PENGAWAS

Supporting Organs Of The Supervisory Board

Organ dan Komite di bawah Dewan Pengawas

Dalam melakukan pengawasan terhadap Perusahaan, Dewan Pengawas dibantu oleh Sekretaris Dewan Pengawas dan Komite-komite di bawah Dewan Pengawas. Komite-komite di bawah Dewan Pengawas terdiri dari Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi. Organ dan Komite di bawah Dewan Pengawas tersebut diuraikan sebagai berikut.

Sekretaris Dewan Pengawas

Sekretaris Dewan Pengawas adalah organ Dewan Pengawas yang diangkat oleh Perusahaan yang bertugas membantu kelancaran kegiatan administrasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas. Sekretaris Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas. Sekretaris Dewan Pengawas bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan kegiatan identifikasi, perencanaan dan pelaksanaan strategi pengelolaan kegiatan kesekretariatan dan protokoler Dewan Pengawas demi terciptanya fungsi Kesekretariatan Dewan Pengawas yang berjalan efektif, efisien dan mendukung kelancaran aktivitas Dewan Pengawas.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Dewan Pengawas telah dilengkapi Pedoman Kerja yang disebut dengan *Job Description*. Fungsi Sekretaris Dewan Pengawas dilakukan oleh Sekretariat Dewan Pengawas.

The Supervisory Board's Organs and Committees

The Supervisory Board is assisted in supervising the Company by the Secretary of the Supervisory Board and the Committees under the Supervisory Board. The Supervisory Board's committees are the Audit Committee, the Risk Monitoring Committee, and the Remuneration and Nomination Committee. The Supervisory Board's organs and committees are described below.

The Supervisory Board Secretary

The Secretary of the Supervisory Board is an organ of the Supervisory Board appointed by the Company to assist in the smooth administration of the Supervisory Board's duties and responsibilities. The Secretary of the Supervisory Board is responsible for coordinating the identification, planning, and implementation of strategies for managing the Supervisory Board's secretarial and protocol activities in order to create an effective, efficient, and effective Supervisory Board Secretarial function and to support the smooth operation of the Supervisory Board's activities.

The Secretary of the Supervisory Board has been provided with Work Guidelines known as Job Descriptions to help him carry out his duties. The Secretariat of the Supervisory Board performs the duties of the Secretary of the Supervisory Board.



Profil Sekretaris Dewan Pengawas *Profile of the Secretary of the Supervisory*



YUSUF ABDULLAH MUSTHOFA

Sekretaris Dewan Pengawas
Secretary of Supervisory Board

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Beliau menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II Nomor: KEP-05/DEWAS/III/2021 tanggal 30 Maret 2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II. /

Indonesian citizen, residing in Jakarta. He served as the Secretary of the Supervisory Board of Perum Jasa Tirta II in accordance with the Supervisory Board of Public Company (Perum) Jasa Tirta II's Decree Number: KEP-05/DEWAS/III/2021 dated March 30, 2021 concerning the Dismissal and Appointment of the Secretary of the Supervisory Board of Perum Jasa Tirta II.



Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Pengawas

Kehadiran Sekretaris Dewan Pengawas memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (*briefing sheet*) Dewan Pengawas;
2. Membuat risalah rapat Dewan Pengawas sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan ;
3. Mengadministrasikan dokumen Dewan Pengawas, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya;
4. Menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Pengawas;
5. Menyusun rancangan laporan-laporan Dewan Pengawas;
6. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Pengawas;
7. Memastikan bahwa Dewan Pengawas mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG;
8. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Pengawas secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
9. Mengkoordinasikan anggota Komite, jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Pengawas;
10. Sebagai penghubung (*liaison officer*) Dewan Pengawas dengan pihak lain.

Pedoman Kerja Sekretaris Dewan Pengawas

Penyelenggaraan fungsi dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Sekretaris Dewan Pengawas mengacu pada Pedoman Kerja Sekretaris Dewan Pengawas yang tercantum dalam *Board Manual Board of Commissioners & Board of Directors* yang ditetapkan melalui Keputusan Bersama Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta II tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik .

The Secretary of the Supervisory Board's Duties and Responsibilities

The Secretary of the Supervisory Board's attendance has the following duties and responsibilities:

1. Meeting preparation, including the Supervisory Board's meeting material (*briefing sheet*);
2. Keep minutes of the Supervisory Board meetings in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association;
3. Managing the Supervisory Board's documents, including incoming and outgoing letters, meeting minutes, and other documents;
4. Creating the Supervisory Board's Work Plan and Budget;
5. Writing Supervisory Board reports;
6. Carrying out other Supervisory Board duties;
7. Ensure that the Supervisory Board abides by the laws and regulations, as well as the GCG principles;
8. Provide information requested by the Supervisory Board on a regular basis and/or at any time;
9. Coordinate Committee members as needed to expedite Supervisory Board duties;
10. Serve as the Supervisory Board's liaison officer with other parties.

Work Instructions for the Supervisory Board Secretary

Implementation of functions and duties and responsibilities of the Supervisory Board Secretary refers to the Work Guidelines for the Secretary of the Supervisory Board, which are listed in the Board Manual of the Board of Commissioners & Board of Directors and are stipulated by a Joint Decree of the Supervisory Board and the Board of Directors of Public Companies (PERUM).



Pelaksanaan Tugas Sekretaris Dewan Pengawas

Selama tahun 2022, Sekretaris Dewan Pengawas telah melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung fungsi pengawasan Dewan Pengawas, meliputi:

1. Membantu Dewan Pengawas dalam menjalankan pelaksanaan tata tertib Direksi dan prinsip-prinsip GCG secara tertib dan patuh.
2. Membuat risalah rapat baik internal maupun rapat gabungan Dewan Pengawas dan Direksi dan mendokumentasikannya dengan baik.
3. Menjalankan proses administrasi dokumen Dewan Pengawas, baik surat masuk, surat keluar, dan dokumen lainnya.
4. Menyampaikan dan membuat rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Pengawas selama tahun 2022.
5. Menyusun dan menyampaikan laporan-laporan Dewan Pengawas secara akurat dan tepat waktu.
6. Menyediakan informasi yang dibutuhkan Dewan Pengawas apabila dibutuhkan.
7. Mengkoordinasikan anggota Komite, jika diperlukan, dalam rangka memperlancar tugas Dewan Pengawas.
8. Menjalankan fungsi penghubung (liaison officer) Dewan Pengawas dengan pihak lain yang berkepentingan.

Pengembangan Kompetensi Sekretaris Dewan Pengawas

Selama tahun 2022, dikarenakan oleh pandemic Covid-19 maka Perum Jasa Tirta II tidak melaksanakan pengembangan kompetensi Sekretaris Dewan Pengawas.

Penilaian Kinerja Sekretaris Dewan Pengawas

Dewan Pengawas bertanggung jawab dalam menilai dan mengevaluasi kinerja Sekretaris Dewan Pengawas dengan memperhitungkan capaian tugas dan tanggung jawab sebagai penghubung Dewan Pengawas dengan manajemen Perusahaan dan fungsi kesekretariatan lainnya. Selama tahun 2022, Dewan Pengawas menilai bahwa Sekretaris Dewan Pengawas telah dilakukan dengan baik dan memuaskan.

Implementation of the Supervisory Board Secretary's Duties

During 2022, the Secretary of the Supervisory Board engaged in a variety of activities to support the Supervisory Board's supervisory function, including:

1. Assisting the Supervisory Board in the orderly and obedient implementation of the Board of Directors' governance orderliness and the GCG principles.
2. Take and properly document minutes of all internal and joint meetings of the Supervisory Board and the Board of Directors.
3. Manage the administrative process for the Supervisory Board's documents, including incoming and outgoing letters, as well as other documents.
4. Submit and draft the Supervisory Board's Work Plan and Budget for 2022.
5. Prepare and submit accurate and timely reports to the Supervisory Board.
6. If necessary, provide information to the Supervisory Board.
7. If necessary, coordinate Committee members in order to expedite the Supervisory Board's duties.
8. Serve as the Supervisory Board's liaison officer with other interested parties.

Supervisory Board Secretary Competency Development

Due to the Covid-19 pandemic in 2022, Perum Jasa Tirta II did not carry out the Supervisory Board Secretary competency development.

Evaluation of the Supervisory Secretary's Performance

Board The Supervisory Board is responsible for assessing and evaluating the Secretary of the Supervisory Board's performance, taking into account the accomplishments of the duties and responsibilities as a liaison between the Supervisory Board and the Company's management, as well as other secretarial functions. The Supervisory Board considered the Secretary of the Supervisory Board to have performed well and satisfactorily in 2022.



KOMITE AUDIT

Audit Committee

Komite Audit Perum Jasa Tirta II dibentuk sebagai salah satu organ kelengkapan Dewan Pengawas yang berfungsi untuk memastikan terselenggaranya prinsip-prinsip GCG, pengendalian internal, proses audit, dan pemantauan kepatuhan terhadap hukum dan ketentuan dalam setiap kegiatan usaha di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas.

Dasar Pembentukan Komite Audit

Komite Audit Perum Jasa Tirta II dibentuk sebagai wujud kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yaitu:

1. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas PER-1/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara; dan
2. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Pengawas /Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Jumlah dan Komposisi Komite Audit

Selama tahun 2022, tidak terdapat perubahan dalam keanggotaan Komite Audit Perum Jasa Tirta II. Jumlah anggota Komite Audit Perum Jasa Tirta II pada tahun 2022 sebanyak 3 (tiga) orang, terdiri dari anggota dewan pengawas sebagai Ketua Komite dan 2 (dua) anggota Komite Audit yang berasal dari pihak eksternal independen yang ahli di bidang akuntansi dan keuangan korporasi.

Audit Committee of Perum Jasa Tirta II was established as one of the organs of the Supervisory Board that functions to ensure the implementation of GCG principles, internal control, audit processes, and monitoring compliance with laws and regulations in every business activity at all levels in the Company's organization. In carrying out its duties, the Audit Committee is independent and reports to the Supervisory Board.

Basis for the Establishment of the Audit Committee

Audit Committee of Perum Jasa Tirta II was established as a form of compliance with the laws and regulations, namely:

1. *Regulation of the Minister of State Owned Enterprises No: PER-09/MBU/2012 dated July 6, 2012 concerning Amendments to PER-1/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises; and*
2. *Regulation of the State Minister for State-Owned Enterprises No. PER-12/MBU/2012 dated August 24, 2012 concerning Supporting Organs for the Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises.*

Number and Composition of the Audit Committee

In 2022 there were no changes in the membership of the Audit Committee of Perum Jasa Tirta II. The number of members of the Audit Committee of Perum Jasa Tirta II in 2022 is 3 (three) people, consisting of a member of the supervisory board as the Chairman of the Committee and 2 (two) members of the Audit Committee from independent external parties who are experts in accounting and corporate finance.



Profil Komite Audit Profile of Audit Committee



NUNING SRI REJEKI WULANDARI

Ketua Komite Audit (Anggota Dewan Pengawas)
Head of Audit Committee (Supervisory Board Member)

Profil Ibu Nuning Sri Rejeki Wulandari telah dimuat dalam Laporan Tahunan ini, bab 'Profil Perusahaan', sub bab 'Profil Dewan Pengawas'.
Profile of Mrs. Nuning Sri Rejeki Wulandari has been provided in this Annual Report on 'Company Profile' chapter, 'Profile of Supervisory Board' sub-chapter.

NAMA / Name	JABATAN / Position	DASAR PENETAPAN / Basic of Appointment Position	KEAHLIAN / Expertise	MASA JABATAN / Terms of Office
NUNING SRI REJEKI WULANDARI	Ketua Komite Audit (Anggota Dewan Pengawas) <i>Head of Audit Committee (Supervisory Board Member)</i>	Surat Keputusan Dewan Pengawas Nomor: KEP-83/DEWAS/XI/2020 / Supervisory Board Decree: KEP-83/DEWAS/XI/2020	Pengelolaan Barang Milik Negara / State Property Management	5 tahun 5 years

a. Komite Audit

Untuk membantu kelancaran tugas-tugas pengawasan secara teknis, khususnya dalam hal pengendalian internal, Dewan Pengawas dibantu oleh Komite Audit. Sesuai Surat Keputusan Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II Nomor: KEP-83/DEWAS/XI/2020 tanggal 05 November 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komite Audit Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II dan Nomor: KEP-02/DEWAS/II/2021 tanggal 29 Januari 2021, maka susunan Komite Audit sebagai berikut:

Ketua: Nuning Sri Rejeki Wulandari
Anggota : Wawan Saeful Anwar
Anggota : Agus Waluyo
Selanjutnya sesuai dengan Keputusan Nomor: KEP-04/DEWAS/XI/2022 tanggal 07 November 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II, maka susunan Komite Audit menjadi:
Ketua: Nuning Sri Rejeki Wulandari
Anggota: Agus Waluyo
Anggota: Emirio Fajar

a. Audit Committee

To assist the smooth running of technical supervisory tasks, especially in terms of internal control, the Supervisory Board is assisted by the Audit Committee. In accordance with the Decree of the Supervisory Board of Perum Jasa Tirta II Number: KEP-83/DEWAS/XI/2020 dated 05 November 2020 concerning the Dismissal and Appointment of the Chairman of the Audit Committee of Public Company (Perum) Jasa Tirta II and Number: KEP-02/DEWAS/II/2021 dated 29 January 2021, the composition of the Audit Committee is as follows:

*Chairman: Nuning Sri Rejeki Wulandari
Member: Wawan Saeful Anwar
Member: Agus Waluyo
Furthermore, in accordance with Decree Number: KEP-04/DEWAS/XI/2022 dated 07 November 2022 concerning Dismissal and Appointment of Audit Committee Members of Public Company (Perum) Jasa Tirta II, the composition of the Audit Committee becomes:
Chairman: Nuning Sri Rejeki Wulandari
Member: Agus Waluyo
Member: Emirio Fajar*



Profil Anggota Komite Audit Profile of Audit Committee Member



AGUS WALUYO

Tempat, Tanggal Lahir (Usia): KAB.CILACAP, 23 Agustus 1973 /

Date of Birth (Age): 23 August 1973, KAB. CILACAP

Pangkat:Penata Tk. I III / Rank: Tk. I, III/D

Riwayat Penugasan: / *Assignment History:*

- Anggota Komite PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (Juni 2019 - sekarang) / *Member of the Committee of PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (June 2019 - present).*
- Anggota Komite PT Angkasa Pura I (Persero) (Oktober 2015 - Juni 2019) / *PT Angkasa Pura I (Persero) Committee Member (October 2015 - June 2019) S1 - SE.*

Pendidikan Terakhir / *Last Education:*

S1 - SE / *S1 - SE*

Riwayat Pendidikan: / *Educational Background:*

- S1 STIE Widya Wiwaha (2009, Jalan Sorosutan, Yogyakarta) / *S1 STIE Widya Wiwaha (2009, Jalan Sorosutan, Yogyakarta)*
- D3 Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Jakarta (1994, Jalan Bintaro Utama Sektor V, Tangerang Selatan, Banten 15222) / *D3 State Accounting College Jakarta (1994, Jalan Bintaro Utama Sector V, South Tangerang, Banten 15222)*

Riwayat Jabatan: / *Position History:*

- Auditor Ahli Muda (09 Juni 2020 - sekarang) / *Young Expert Auditor (09 June 2020 - present)*
- Auditor Muda (22 Oktober 2015 - 08 Juni 2020) / *Young Auditor (22 October 2015 - 08 June 2020)*
- Auditor Penyelia (05 Mei 2015 - 21 Oktober 2015) / *Auditor in Charge (05 May 2015 - 21 October 2015)*

Riwayat Pelatihan: / *History of Training:*

- Individual Leadership Training: Workskills - Steps to Your Success - ELEVATE / *Individual Leadership Training: Workskills - Steps to Success - ELEVATE*
- Diklat Sertifikasi Auditor Muda - Pusdiklatwas BPKP / *Pusdiklatwas BPKP Young Auditor Certification Training*
- Diklat SPIP - Pusdiklatwas BPKP / *BPKP Pusdiklatwas SPIP Training*
- Diklat Sertifikasi Auditor Ahli - Pusdiklatwas BPKP / *BPKP TMT Expert Auditor Certification Training*

TMT Pensiun: 23 September 2031 /

Retirement date: September 23rd



EMIRIO FAJAR

Tempat, Tanggal Lahir (Usia): Jakarta, 05 November 1987 /

Date of Birth (Age): 05 November 1987, Jakarta

Pangkat: Anggota Komite Perum Jasa Tirta II /

Committee Member of Perum Jasa Tirta II

Riwayat Penugasan: / *Assignment History:*

- VP Portofolio Management PT Danarekasa /
VP Portfolio Management PT Danarekasa

Pendidikan Terakhir / *Last Education:*

Sarjana Ekonomi Unoversitas Prasetya Mulya (2005-2009) /

Bachelor of Economics Prasetya Mulya University (2005-2009)

Pengangkatan / *Appointment:*

11 Juli 2022 / *July 11, 2022*

Riwayat Jabatan: / *Position History:*

- Senior Manager Business Advisory & Asset Management (2017-2019) PT PPA / *Senior Manager Business Advisory & Asset Management (2017-2019) PT PPA*
- Assistant Vice Presidet Manager Advisory & Asset Managent PT PPA (2019-2021) / *Assistant Vice Presidet Manager Advisory & Asset Management PT PPA (2019-2021)*
- VP Portofolio Management PT Danarekasa (2021 – Sekarang) / *VP Portfolio Management PT Danarekasa (2021 - Present)*



Selama tahun 2022, Komite Audit telah melaksanakan kegiatan dan program sebagai berikut:

1. Evaluasi Kinerja Perusahaan tahun 2022
2. Pertemuan Rutin Triwulanan dan Koordinasi dengan SPI
3. Rapat Internal Dewan Pengawas
4. Rapat Gabungan Dewan Pengawas & Direksi
5. RKAP 2021 dan RJPP 2020-2024 harus sejalan dengan Tugas dalam PP 7 tahun 2010 pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan tentang pengusahaan dan sebagian tugas pengelolaan sumber daya air di wilayah Kerja.
6. Dalam melaksanakan investasi agar dilakukan dengan prinsip efisiensi dan kehati-hatian dan melihat Analisa risiko strategis yang berpengaruh kepada penugasan perusahaan dalam PP 7 tahun 2010.
7. Perlunya melihat kembali urgensi Project Investasi agar dana Investasi yang dilaksanakan dapat memberikan value added bagi perusahaan dan menjadi penunjang dalam rangka Penugasan Pemerintah yang termuat dalam PP 7 tahun 2010.

Kriteria Komite Audit

Kriteria umum untuk diangkat menjadi Komite Audit adalah memiliki independensi, integritas, akhlak, dan moral yang baik. Selain itu, anggota Komite Audit memiliki keahlian di bidang keuangan dan akuntansi.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas, hak, dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas Auditor Eksternal dan auditor internal;
2. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun Auditor Eksternal;
3. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
4. Memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan ;
5. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas serta tugas Dewan Pengawas lainnya;
6. Melaksanakan tugas lainnya dan Dewan Pengawas, berupa namun tidak terbatas pada:

During 2022, the Audit Committee has carried out the following activities and programs:

1. *Evaluation of Company Performance in 2022*
2. *Regular Quarterly Meetings and Coordination with SPI*
3. *Internal Meetings of the Supervisory Board*
4. *Joint Meetings of the Board of Supervisors & Directors*
5. *RKAP 2021 and RJPP 2020-2024 must be in line with the Tasks in PP 7 of 2010 article 4 paragraph (1) and paragraph (2) which states about the exploitation and part of the task of managing water resources in the Work area.*
6. *In carrying out investments, it must be carried out with the principles of efficiency and prudence and look at the strategic risk analysis that affects the company's assignment in PP 7 of 2010.*
7. *The need to reconsider the urgency of the Investment Project so that the Investment funds implemented can add value to the company and serve as a support for the Government Assignments outlined in PP 7 of 2010.*

The Audit Committee

Criteria The general requirements for appointment to the Audit Committee are independence, integrity, good character, and morals. Members of the Audit Committee also have experience in finance and accounting.

Audit Committee Duties and Responsibilities

The Audit Committee has the following duties, rights, and responsibilities in carrying out its functions:

1. *Assisting the Supervisory Board in ensuring the effectiveness of the internal control system and the implementation of the External Auditor's and Internal Auditor's duties;*
2. *Evaluating activity implementation as well as the results of audits conducted by the Internal Audit Unit and the External Auditor;*
3. *Make recommendations for improving the management control system and putting it into action.*
4. *Ensure that all information issued by the Company is subject to a satisfactory review procedure.*
5. *Identifying matters that require the Supervisory Board's attention and other Supervisory Board duties;*
6. *Carry out other Supervisory Board duties, including but not limited to:*



7. Melakukan penelaahan atas informasi mengenai Perusahaan , serta Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan , laporan manajemen dan informasi lainnya;
8. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan ;
9. Melakukan penelaahan atas pengaduan yang berkaitan dengan Perusahaan ;
10. Mengkaji kecukupan fungsi pemeriksaan internal, termasuk jumlah pemeriksa, rencana kerja tahunan, dan penugasan yang telah dilaksanakan;
11. Mengkaji kecukupan pelaksanaan audit eksternal termasuk di dalamnya perencanaan audit dan jumlah auditor;
12. Berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Pengawas, Komite Audit dapat mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya Perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya dan melaporkan secara tertulis hasil penugasan tersebut kepada Dewan Pengawas;
13. Menyusun dan menyampaikan program kerja tahunan kepada Dewan Pengawas untuk ditetapkan sebelum tahun buku berjalan;
14. Melakukan klarifikasi dengan Direksi dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja tahunan dan melaporkan secara tertulis kepada Dewan Pengawas disertai dengan rekomendasi jika diperlukan;
15. Membuat laporan triwulanan dan laporan tahunan kepada Dewan Pengawas yang ditandatangani oleh sekurang-kurangnya Ketua Komite Audit dan salah seorang anggota Komite Audit;
16. Anggota Komite Audit yang bukan Dewan Pengawas berhak mendapatkan honorarium atas beban Perusahaan yang besarnya ditetapkan Dewan Pengawas yang maksimum nilainya 20% (dua puluh persen) dari gaji Direktur Utama.

Pengangkatan dan Pemberhentian Komite Audit

Komite Audit diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas Nomor: 84/DEWAS/XI/2020 tanggal 5 November 2020 tentang pengangkatan Ketua Komite Audit Perum Jasa Tirta II dan Nomor KEP-02/DEWAS/II/2021 Februari 2021 tentang pengangkatan anggota Komite Audit Perum Jasa. Pemberhentian anggota Komite Audit dapat dilakukan apabila yang bersangkutan berakhir masa jabatan keanggotaannya dan berdasarkan keputusan Dewan Pengawas diberhentikan karena tidak memenuhi kinerja yang telah ditetapkan dan/atau tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya.

Auditor Appointment and Removal

Committee The Audit Committee was appointed and dismissed in accordance with Supervisory Board Decision Number: 84/DEWAS/XI/2020 dated November 5, 2020 regarding the appointment of the Chairman of the Audit Committee of Perum Jasa Tirta II and Number KEP-02/DEWAS/II/2021 dated February 20, 2021 regarding the appointment of members of Perum Jasa's Audit Committee. Members of the Audit Committee may be dismissed if they complete their term of office and are dismissed by the Supervisory Board for failing to meet predetermined performance standards and/or being incompetent in carrying out their duties.

Independensi Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit telah memenuhi kriteria independensi, dibuktikan dengan tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham, hubungan keluarga, dan/atau hubungan lainnya yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen dengan anggota Komite Audit lainnya, Dewan Pengawas, Direksi, dan/atau Pemilik Modal Utama/Pengendali.

The Audit Committee's independence

All members of the Audit Committee have met the independence criteria, as evidenced by the absence of financial, management, share ownership, family, and/or other relationships that could impair their ability

ASPEK INDEPENDENSI / Independence Aspect	NUNING SRI REJEKI WULANDARI	WAWAN SAEFUL ANWAR	AGUS WALUYO
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Pengawas dan Direksi dan/atau sesama anggota Komite Audit / No Financial relation with Supervisory Board and Board of Directors and/or with Audit Committee Members	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Pengawas dan Direksi dan/atau sesama anggota Komite Audit / No family relation with Supervisory Board and Board of Directors and/or with Audit Committee Members	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Perum Jasa Tirta II, Anak Perusahaan maupun Perusahaan Patungan / No managerial relation in Perum Jasa Tirta II, subsidiaries or Joint Ventures	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Perum Jasa Tirta II / No shareholding in Perum Jasa Tirta II	√	√	√

Piagam Komite Audit

Perum Jasa Tirta II membekali Komite Audit dengan Piagam (Charter) Komite Audit sebagai pedoman tata laksana kerja Komite Audit sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Bersama Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta II tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik No. 1/ DP/68/KBS/10/2019 tanggal 30 Oktober 2019. Adapun piagam tersebut memuat dan mengatur aspek- aspek pelaksanaan tugas Komite Audit, di antaranya visi dan misi, struktur dan kedudukan, tugas dan tanggung jawab, wewenang, hubungan kerja, kode etik, persyaratan auditor, pelaksanaan rapat, dan mekanisme kerja lainnya.

The Perum Audit Committee's Charter

The Audit Committee Charter is provided by Jasa Tirta II as a guideline for the Audit Committee's work, as stipulated by the Joint Decree of the Supervisory Board and the Board of Directors of Public Company (PERUM) Jasa Tirta II concerning Guidelines for Good Corporate Governance No. 1/ DP/68/KBS/10/2019 dated October 30, 2019. The charter includes and governs aspects of the Audit Committee's duties, such as the vision and mission, structure and position, duties and responsibilities, authority, work relations, code of ethics, auditor requirements, holding meetings, and other working mechanisms.



Rapat Komite Audit

Komite Audit melaksanakan rapat secara berkala dengan auditor eksternal setidaknya satu kali dalam 1 (satu) tahun guna membahas progres pemeriksaan audit. Komite Audit juga dapat mengundang manajemen Perusahaan melalui Satuan Pengawasan Intern untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam menunjang kebutuhan proses audit.

Seluruh keputusan yang diambil dalam rapat dicatat dan didokumentasikan dengan baik dalam risalah rapat, termasuk dalam hal terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinion) dan disebutkan alasannya. Risalah rapat ditandatangani oleh ketua rapat dan didistribusikan kepada semua anggota Komite Audit baik yang hadir maupun yang berhalangan hadir dalam rapat.

Pengembangan Kompetensi Komite Audit

Dalam rangka meningkatkan kompetensi Komite Audit dalam menjalankan fungsi pengawasan audit Perusahaan, Perum Jasa Tirta II memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi Komite Audit untuk mengikuti pelatihan, pendidikan, seminar, dan/atau *workshop* sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Informasi mengenai program pengembangan kompetensi yang diikuti Komite Audit selama tahun 2022 telah dipaparkan dalam bab Profil Perusahaan, sub bab Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Pengawas, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Satuan Pengawasan Intern dalam Laporan Tahunan ini.

Remunerasi Komite Audit

Struktur dan jumlah remunerasi Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Pengawas telah ditetapkan oleh Dewan Pengawas yang terdiri dari honorarium sebesar 20% dari pendapatan Direktur Utama sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Pengawas / Dewan Pengawas BUMN.

Meetings of the Audit Committee

The Audit Committee meets with external auditors on a regular basis at least once a year to discuss the audit examination's progress. The Audit Committee may also request information from the Company's management via the Internal Audit Unit to support the audit process.

All decisions made at the meeting are properly recorded and documented in the meeting minutes, including dissenting opinions, and the reasons are stated. The meeting minutes are signed by the chairman and distributed to all members of the Audit Committee, both present and unable to attend the meeting.

Audit Committee Competency Development

To improve the Audit Committee's competence in carrying out the Company's audit supervisory function, Perum Jasa Tirta II provides the Audit Committee with the most opportunities to attend training, education, seminars, and/or workshops in accordance with the required competencies. In this Annual Report, information about the Audit Committee's competency development program for 2022 is presented in the Company Profile chapter, Education and/or Training sub-chapter for the Supervisory Board, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Audit Unit.

Audit Committee Compensation

The Supervisory Board has determined the structure and amount of the remuneration of the Audit Committee that is not a member of the Supervisory Board, which consists of an honorarium of 20% of the President Director's income in accordance with the Regulation of the Minister of SOEs PER-12/MBU/2012 concerning Supporting Organs of the Supervisory Board/Board SOE Supervisor.



Komite Nominasi dan Remunerasi

Nomination and Remuneration Committee

Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk dengan tujuan untuk membantu dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya di bidang yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi terhadap anggota Direksi dan Dewan Pengawas. Peraturan BUMN mewajibkan Perusahaan untuk membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi sebagai penerapan GCG sehingga Perusahaan dapat dikelola berlandaskan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran.

Dasar Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi

Selanjutnya sesuai Surat Keputusan Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II Nomor: KEP-05/DEWAS/XI/2022 tanggal 10 November 2022 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II, susunan keanggotaan menjadi:

Ketua merangkap Anggota Sekretaris merangkap Anggota Anggota:

- Kelik Wirawan Wahyu Widodo
- Nuning Sri Rejek
- Wulandari
- Fatkhurohman Taufik

Adapun Profil Ketua dan Anggota Komite terdapat dalam profil dewan pengawas dalam laporan tahunan ini.

Terkait dengan fungsi Nominasi:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengawas mengenai:
2. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas;
3. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
4. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas;

Nomination and Remuneration Committee

The Remuneration and Nomination Committee was formed to assist the Board of Directors and the Supervisory Board in carrying out its functions and duties related to the remuneration and nomination of members of the Board of Directors and the Supervisory Board. As part of the implementation of GCG, SOE regulations require the Company to establish a Remuneration and Nomination Committee so that the Company can be managed on the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness.

The Foundation for the Remuneration and Nomination Committee

Furthermore, in accordance with the Decree of the Supervisory Board of Perum Jasa Tirta II Number: KEP-05/DEWAS/XI/2022 dated 10 November 2022 concerning Changes in the Membership Composition of the Nomination and Remuneration Committee of Public Company (Perum) Jasa Tirta II, the membership composition becomes:

Chairman concurrently Member Secretary concurrently Member:

- Kelik Wirawan Wahyu Widodo*
- Nuning Sri Rejek*
- Wulandari*
- Fatkhurohman Taufik*

The Chair's and Committee members' profiles are listed on the supervisory board profile in this annual report.

Concerning the Nomination function:

- 1. Make recommendations to the Supervisory Board on:*
- 2. The composition of positions on the Board of Directors and/or the Supervisory Board;*
- 3. The policies and criteria required in the Nomination process; and*
- 4. performance evaluation policies for members of the Board of Directors and/or the Supervisory Board.*



5. Membantu Dewan Pengawas melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
6. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengawas mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas; dan
7. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas kepada Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Pemilik Modal.

Terkait dengan fungsi Remunerasi:

Memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengawas mengenai struktur Remunerasi;

1. Kebijakan atas Remunerasi; dan
2. Besaran atas Remunerasi;

Membantu Dewan Pengawas melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas.

Realisasi Kegiatan Komite Nominasi Dan Remunerasi Tahun 2022

Komite Nominasi dan Remunerasi selama tahun 2022 mengadakan 4 kali rapat.

5. *Assist the Supervisory Board in evaluating the performance of members of the Board of Directors and/or members of the Supervisory Board using the benchmarks prepared as evaluation material;*
6. *Make recommendations to the Supervisory Board about the capacity building program for members of the Board of Directors and/or members of the Supervisory Board; and*
7. *Make proposals to the Supervisory Board about candidates who meet the requirements for members of the Board of Directors and/or members of the Supervisory Board to be submitted to the Capital Owners.*

Concerning the Remuneration function:

Provide recommendations to the Supervisory Board regarding the structure of the Remuneration;

1. *Remuneration policy; and*
2. *the amount of Remuneration;*

Assist the Supervisory Board in assessing performance in relation to the remuneration received by each member of the Board of Directors and/or members of the Supervisory Board.

Realization of Nomination and Remuneration Committee Activities in 2022

The Nomination and Remuneration Committee met four times in 2022.



KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

Risk Management Monitoring Committee

1. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II Nomor: KEP-84/DEWAS/XI/2020 tanggal 5 November 2020 tentang Pengangkatan Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II I.29 dan Nomor: KEP-85/DEWAS/XI/2020 tanggal 5 November 2020 tentang Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II, maka susunan keanggotaan Komite Pemantau Manajemen Risiko sebagai berikut:

1. *Based on the Supervisory Board of Perum Jasa Tirta II Decree Number: KEP-84/DEWAS/XI/2020 dated November 5, 2020 concerning the Appointment of the Chairperson of the Risk Management Monitoring Committee of Public Company (Perum) Jasa Tirta II I.29 and Number: KEP-85/DEWAS/XI/2020 dated November 5, 2020 concerning the Appointment of Members of the Risk Management Monitoring Committee for Public Company:*



ROMMY MARCANDI

Ketua / *Chairman*

Tempat/Tanggal Lahir: Malang, 17 Januari 1976 /

Date and place of birth: January 17, 1976, Malang

Jabatan Saat Ini / *Current Position:*

Pada tahun 2021 pernah menjabat sebagai PLT Asdep Manajemen Risiko selanjutnya Kabid PMN PSO sampai dengan saat ini. / *In 2021, he served as PLT Assistant for Risk Management and then Head of PMN PSO until now.*

Riwayat Pendidikan / *Educational Background:*

Strata II (S2): Universitas Pembangunan Nasional /
S2 (Strata II): National University of Development

Sertifikasi/Kursus / *Certification/Course:*

- Pemeriksa Piutang Negara (Diklat Polri - Tahun 2001) /
Auditor of State Receivables (Polri Training and Education - 2001)
- Restrukturisasi Piutang Negara (UGM - Tahun 2002) /
Restructuring of State Receivables (UGM - 2002)
- Asset Appraisal for Financial Restructuring & Regional Autonomy (Queensland University of Technology -Tahun 2007) / *Appraisal of Assets for Financial Restructuring and Regional Autonomy (Queensland University of Technology -Year 2007)*
- Stenghtening Private Sector Involvement in Public Asset Creation&Management (Queensland University of Technology - Tahun 2015) / *Increasing Private Sector Participation in Public Asset Creation and Management (Queensland University of Technology -Year 2015)*



KANDIANAWATI

Anggota / Member

Lahir di Jakarta, June 13, 1977. Sarjana dari Universitas Indonesia pada 2000 dan Master dari IPB pada 2019. Memiliki pengalaman kerja di PAM Jaya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Influx, INC dan PT Aetra Air Tangerang. Memiliki Kehalian bidang Manajemen risiko, GCG, Manajemen Air dan lain lain. /

Born in Jakarta, June 13, 1977. In 2000, she received a bachelor's degree from the University of Indonesia, and in 2019, she received a master's degree from IPB. Previously worked for PAM Jaya, the National Development Planning Agency, Influx, INC, and PT Aetra Air Tangerang. Has knowledge of risk management, GCG, water management, and other areas.

Tugas Komite Pemantau Manajemen Risiko

1. Menyusun dan menyampaikan rencana kerja tahunan kepada Dewan Pengawas untuk ditetapkan, serta melaporkan pelaksanaan rencana kerja tahunan tersebut kepada Dewan Pengawas;
2. Memberikan masukan kepada Dewan Pengawas tentang penyusunan dan penyempurnaan Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko;
3. Melakukan evaluasi atas kebijakan dan strategi manajemen risiko yang disusun oleh Direksi, termasuk kesesuaian antara kebijakan dengan pelaksanaannya, serta menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Pengawas atas kebijakan yang telah diambil Direksi terkait dengan manajemen risiko;
4. Melakukan penelaahan atas informasi mengenai Perusahaan, Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
5. Mengevaluasi dan menganalisa laporan profil risiko secara berkala serta memantau potensi risiko yang dihadapi Perusahaan dan implementasi mitigasinya;
6. Melakukan penelaahan atas kebijakan Perusahaan dalam mengelola risiko yang terkait dengan sasaran kinerja dan bidang usaha Perusahaan;
7. Memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Pengawas untuk perbaikan dan penyempurnaan yang diperlukan dalam hal manajemen risiko;
8. Membantu Dewan Pengawas dalam hal pengawasan kepatuhan Direksi terhadap

The Risk Management Monitoring Committee's Responsibilities

1. *Prepare and submit an annual work plan to the Supervisory Board for approval, and report to the Supervisory Board on its implementation.*
2. *Make recommendations to the Supervisory Board on the development and improvement of the Risk Management Monitoring Committee Charter.*
3. *Evaluate the Board of Directors' risk management policies and strategies, including the suitability of policies and their implementation, and make recommendations to the Supervisory Board on risk management policies adopted by the Board of Directors.*
4. *Examining information about the company, the Long Term Plan (RJPP), and the Work Plan and Budget (RKAP)*
5. *Evaluate and analyze risk profile reports on a regular basis, as well as monitor the Company's potential risks and mitigation efforts.*
6. *Reviewing the Company's risk management policies in relation to the Company's performance targets and business fields;*
7. *Make suggestions and/or recommendations to the Supervisory Board for necessary improvements and risk management improvements;*
8. *Assist the Supervisory Board in supervising the Board of Directors' compliance with prevailing laws*



ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, termasuk jika ada potensi benturan kepentingan;

9. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Pengawas sepanjang masih dalam ruang lingkup tugas dan kewajiban Dewan Pengawas, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
10. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas khusus kepada Dewan Pengawas untuk selanjutnya

and regulations, including if there is a potential conflict of interest;

9. Carry out other Supervisory Board duties as long as they are within the scope of the Supervisory Board's duties and obligations as defined by the provisions of the applicable laws and regulations;
10. Submit a report to the Supervisory Board on the implementation of special tasks for further realization

Realisasi Kegiatan Komite Pemantau Manajemen Risiko Tahun 2022

Secara umum, program kegiatan Komite Pemantau Manajemen Risiko dapat berjalan secara optimal. Komite Pemantau Manajemen Risiko secara periodik melakukan pembahasan dengan unit kerja yang membidangi manajemen risiko, dan sudah mengadakan rapat sebanyak 12 kali.

Tata Cara Penggantian Komite Di Bawah Dewan Pengawas

Tata cara penggantian anggota Komite di bawah Dewan Pengawas dari Pihak Independen dijelaskan sebagai berikut,

1. Anggota Komite dipilih dan ditetapkan berdasarkan notulen Rapat Dewan Pengawas ;
2. Pemilihan dan Penetapan Anggota Komite, salah satunya didasarkan pada rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi;
3. Pemilihan dan Penetapan Anggota Komite sebagaimana tertuang dalam Notulen Rapat Dewan Pengawas , diputuskan melalui Keputusan Dewan Pengawas dan disampaikan kepada Direksi untuk dilakukan Pengangkatan sebagai Anggota Komite;
4. Keanggotaan Komite dapat berakhir sesuai dengan masa jabatannya ataupun sebelum akhir masa jabatannya;
5. Terhadap keanggotaan Komite yang berakhir sesuai dengan masa jabatannya, dapat dilakukan pengangkatan kembali oleh Direksi, berdasarkan surat rekomendasi pengangkatan kembali yang disampaikan oleh Dewan Pengawas kepada Direksi;
6. Dalam hal keanggotaan komite berakhir sebelum masa jabatannya, disebabkan salah satu faktor sebagai berikut:
 - a. Anggota Komite berdasarkan evaluasi penilaian kinerja oleh keputusan rapat Dewan Pengawas, dinilai melalaikan tugas dan tanggungjawabnya sehingga dianggap tidak cakap untuk menjadi komite.

Risk Management Monitoring Committee's activities in 2022.

In general, the Risk Management Monitoring Committee's activity program can run smoothly. The Risk Management Monitoring Committee meets 12 times a year to discuss risk management with the work unit in charge of risk management.

Procedures for Committee Substitution in the Supervisory Board

The procedures for replacing members of the Supervisory Board's Committees with independent parties are as follows:

1. Committee members are elected and determined based on the minutes of the Supervisory Board Meeting;
2. Committee Member Selection and Appointment, one of which is based on the Remuneration and Nomination Committee's recommendation;
3. The selection and appointment of Committee Members, as stated in the Supervisory Board Meeting Minutes, shall be decided by a Supervisory Board Decision and submitted to the Board of Directors for appointment as a Committee Member.
4. Committee membership may end in accordance with their term of office or before the end of their term of office;
5. For Committee membership that ends in accordance with their term of office, the Board of Directors may reappointment, based on a letter of recommendation for reappointment submitted by the Supervisory Board to the Board of Directors;
6. If committee membership ends before the end of their term of office, it is due to one of the following reasons:
 - a. Committee members are deemed incompetent to serve on committees based on the evaluation of the performance appraisal by the Supervisory Board meeting.



- b. Melanggar tata tertib kerja komite serta melanggar ketentuan internal Perusahaan lainnya.
- c. Terbukti melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan Perusahaan atau merusak citra Perusahaan.

- b. *Violate the committee's work rules and other internal Company regulations.*
- c. *Proven to take actions that are detrimental to the Company or its image.*

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Corporate Secretary

Sekretaris Perusahaan Perum Jasa Tirta II mengemban misi untuk mendukung terciptanya citra Perusahaan yang baik secara konsisten dan berkesinambungan melalui pengelolaan program komunikasi yang efektif kepada segenap pemangku kepentingan. Sekretaris Perusahaan memiliki fungsi utama dalam rangka membantu tugas Direksi, yaitu sebagai public relation/*Corporate communication, institution relations, GCG implementation, monitoring pencapaian Key Performance Indicator (KPI), monitoring pelaksanaan kegiatan Tanggung Jawab Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR)* serta administrasi dokumen kebijakan dan notulensi rapat Direksi. Sekretaris Perusahaan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama dan mengemban misi untuk mendukung terciptanya citra Perusahaan yang baik secara konsisten dan berkesinambungan melalui program komunikasi yang efektif kepada segenap pemangku kepentingan. Ruang lingkup tugas Sekretaris Perusahaan meliputi Kesekretariatan Direksi, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga, serta Hubungan Internasional.

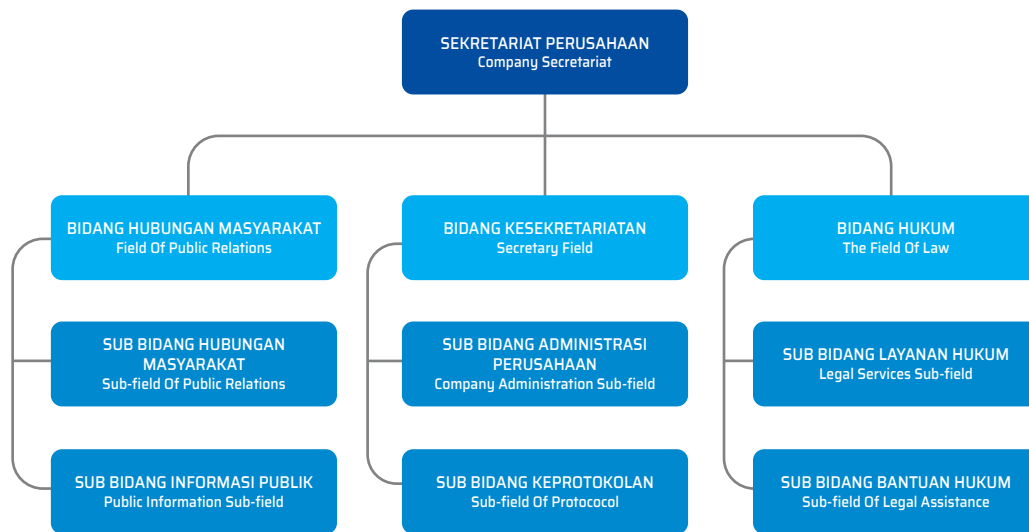
The mission of Perum Jasa Tirta II's Corporate Secretary is to consistently and continuously support the creation of a good corporate image through the management of effective communication programs to all stakeholders. The Corporate Secretary's main function is to assist the Board of Directors' duties, which include public relations/ Corporate communication, institution relations, GCG implementation, monitoring the achievement of Key Performance Indicators (KPI), monitoring the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) activities, and document administration. The Corporate Secretary reports directly to the President Director and is responsible for assisting in the creation of a positive corporate image through effective communication programs with all stakeholders. The Corporate Secretary reports directly to the President Director and is responsible for assisting in the creation of a positive corporate image through effective communication programs with all stakeholders. The Corporate Secretary's responsibilities include Board of Directors Secretariat, Public Relations, Inter-Agency Relations, and International Relations.

Struktur Sekretaris Perusahaan

Sebagaimana ditetapkan pada Struktur Organisasi Peraturan direksi Perusahaan Umum (Perus Jasa Tirta II) Nomor PRD-17/DIR/12/2021, tentang Struktur Organisasi, dan tata kerja Perusahaan umum Jasa Tirta II struktur organisasi Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

Corporate Secretary Organization

As stipulated in the Organizational Structure of the Board of Directors of a Public Company (Perus Jasa Tirta II) Number PRD-17/DIR/12/2021, regarding the Organizational Structure and working procedures of Jasa Tirta II Public Company, the organizational structure of the Corporate Secretary is as follows:



Profil Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary Profile



UDIEN YULIANTO, ST., M.TECH

Sekretaris Perusahaan
Company Secretary

Warga Negara Indonesia Lahir di Sidoarjo 10 Juli 1970. Memperoleh gelar sarjana pengairan dari Iniversitas Brawijaya, Master Teknik Pengairan dari University Of Roorkee India. / Indonesian citizen Born in Sidoarjo July 10, 1970. Obtained a bachelor's degree in irrigation from the University of Brawijaya, Master of Water Engineering from the University of Roorkee India.

Indonesian citizen Born in Sidoarjo 10 July 1970. Obtained a bachelor's degree in irrigation from the University of Brawijaya, Master of Water Engineering from the University of Roorkee India. / Indonesian citizen Born in Sidoarjo July 10, 1970. Obtained a bachelor's degree in irrigation from the University of Brawijaya, Master of Water Engineering from the University of Roorkee India.



Kualifikasi Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan wajib memenuhi kriteria kualifikasi yang disyaratkan, antara lain wajib memiliki pengetahuan mengenai peraturan yang berkaitan dengan Perusahaan, hubungan masyarakat, keterampilan administratif, dan pengalaman yang mendukung pelaksanaan tugasnya. Selain itu, Sekretaris Perusahaan juga harus memiliki kualifikasi akademis, kompetensi yang memadai agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi berdasarkan mekanisme internal Perusahaan dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

1. Menghadiri rapat Direksi dan membuat Risalah Rapat;
2. Menyiapkan Daftar Khusus, yaitu daftar yang berisikan kepemilikan saham anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi beserta keluarganya sebagai sebuah dokumen benturan kepentingan;
3. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan Rapat Pembahasan Bersama (RPB);
4. Mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan berkaitan dengan laporan-laporan atau kegiatan rutin Direksi yang akan disampaikan kepada pihak luar;
5. Mempersiapkan bahan-bahan atau materi yang diperlukan berkaitan dengan hal-hal yang harus mendapatkan keputusan Direksi berkenaan dengan pengelolaan Perusahaan;
6. Memfasilitasi rapat-rapat dalam lingkungan Direksi, baik yang bersifat rutin maupun non-rutin;
7. Menindaklanjuti setiap keputusan rapat Direksi dan memantau tindak lanjut hasil rapat;
8. Memastikan bahwa Perusahaan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG;
9. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Pengawas secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
10. Menatausahakan serta menyimpan dokumen Perusahaan;
11. Menyelenggarakan program pengenalan anggota Dewan Pengawas yang baru diangkat;

Corporate Secretary Qualifications

The Corporate Secretary must meet the required qualification criteria, which include knowledge of Company regulations, public relations, administrative skills, and experience that supports the execution of his duties. Furthermore, in order to carry out his duties and responsibilities, the Corporate Secretary must have academic qualifications and adequate competence.

Corporate Secretary Appointment and Removal

The Board of Directors appoints and dismisses the Corporate Secretary based on the Company's internal mechanism, with the approval of the Supervisory Board.

Corporate Secretary's Duties and Responsibilities

1. *Attend Board of Directors meetings and prepare meeting minutes;*
2. *Create a Special Register, which is a list of the share ownership of members of the Supervisory Board and members of the Board of Directors, as well as their families, as a conflict of interest document.*
3. *In charge of carrying out the Joint Discussion Meeting (RPB);*
4. *Prepare the necessary materials related to Board of Directors reports or routine activities to be submitted to external parties;*
5. *Prepare the necessary materials or materials related to matters requiring a decision from the Board of Directors regarding the Company's management;*
6. *Facilitate both routine and non-routine Board of Directors meetings.*
7. *Follow up on every decision made at the Board of Directors meeting and monitor the meeting's outcomes;*
8. *Ensure that the Company complies with disclosure regulations in accordance with the implementation of GCG principles.*
9. *Provide information requested by the Board of Directors and Supervisory Board on a regular and/or as-needed basis;*
10. *Administering and storing Company documents;*
11. *Organizing an orientation program for newly appointed Supervisory Board members;*



12. Membantu Direksi dalam menetapkan kebijakan strategis pengelolaan Perusahaan serta menyusun program dan pelaksanaannya antara lain di bidang hukum, humas, pendidikan masyarakat;
13. Memastikan tersedianya informasi yang boleh diakses oleh Pemilik Modal sesuai dengan kebutuhan wajar dari pemangku kepentingan;
14. Memastikan bahwa Perum Jasa Tirta II mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan yang berlaku dan wajib memberikan informasi yang berkaitan dengan tugasnya kepada Direksi secara berkala dan kepada Dewan Pengawas apabila diminta oleh Dewan Pengawas;
15. Mengkoordinasikan isu strategis Perusahaan lintas biro/divisi;
16. Menyampaikan Laporan Tahunan atas pelaksanaan tugasnya kepada Direksi.

Fungsi Sekretaris Perusahaan

1. Memastikan bahwa Perusahaan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG;
2. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Pengawas secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
3. Menjadi penghubung (liaison officer); dan
4. Menatausahakan serta menyimpan dokumen Perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemilik Modal, Daftar Khusus dan risalah rapat Direksi, rapat Dewan Pengawas dan RPB.

Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Perum Jasa Tirta II membekali pengetahuan dan kompetensi Sekretaris Perusahaan melalui pengikutsertaan dalam pelatihan dan pendidikan, baik yang diselenggarakan secara formal maupun informal. Informasi mengenai program pelatihan dan pendidikan Sekretaris Perusahaan telah disajikan dalam Laporan Tahunan ini, bab "Profil Perusahaan", sub bab "Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Pengawas, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Satuan Pengawasan Intern".

12. *Assisting the Board of Directors in determining strategic policies for the Company's management, as well as preparing and implementing programs in the fields of law, public relations, and public education;*
13. *Ensuring the availability of information that Capital Owners can access in accordance with the reasonable needs of stakeholders;*
14. *Ensuring that Perum Jasa Tirta II complies with the regulations regarding applicable disclosure requirements and is required to provide information related to its duties to the Board of Directors on a regular basis and to the Supervisory Board if requested by the Supervisory Board;*
15. *Coordinate the Company's strategic issues across bureaus/divisions;*
16. *Submit an Annual Report to the Board of Directors on the implementation of its duties.*

The Corporate Secretary's Duties

1. *Ensure that the Company complies with regulations regarding disclosure requirements in accordance with the implementation of GCG principles;*
2. *Provide information needed by the Board of Directors and Supervisory Board on a regular basis and/or at any time if requested;*
3. *Become a liaison officer; and*
4. *Administer and store Company documents, including but not limited to the Register of Capital Owners, Special Register, and minutes of Board of Directors meetings, Supervisory Board meetings, and Executive Committee meetings.*

Competency Development of the Corporate Secretary

Perum Jasa Tirta II equips the Corporate Secretary's knowledge and competence through participation in formal and informational training and education. This Annual Report includes information about the Corporate Secretary's training and education program in the chapter "Company Profile," subchapter "Education and/or Training of the Supervisory Board, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Audit Unit."



Laporan Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Tahun 2022

Selama tahun 2022, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program kerja, antara lain:

1. Penyelenggaraan Rapat Pembahasan Bersama (RPB);
2. Penyelenggaraan kegiatan Rapat Direksi serta rapat gabungan Dewan Pengawas dan Direksi;
3. Mendokumentasikan dan membuat risalah rapat Direksi dan rapat gabungan Dewan Pengawas dan Direksi;
4. Menyusun pembuatan Annual Report dan Laporan Keberlanjutan untuk tahun buku 2022;
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan assessment GCG;
6. Mendukung sosialisasi penerapan GCG di lingkungan Perusahaan;
7. Penyelenggaraan kegiatan terkait *corporate communication* melalui publikasi, press release, kegiatan *sponsorship*, *corporate branding* dan kegiatan lainnya;
8. Pemeliharaan hubungan Perusahaan dengan *regulator*.

Report on the Execution of the Corporate Secretary's Duties in 2022

Various activities and work programs were carried out by the Corporate Secretary in 2022, including:

1. *Setting up a Joint Discussion Meeting (RPB);*
2. *Organizing the activities of the Board of Directors Meeting, as well as joint meetings of the Supervisory Board and the Board of Directors;*
3. *Documenting and recording the Board of Directors Meeting and joint meetings of the Supervisory Board and the Board of Directors;*
4. *Prepare the Annual Report and the Sustainability Report for the fiscal year 2022;*
5. *Coordination of the GCG assessment implementation;*
6. *Supporting the socialization of GCG implementation within the Company;*
7. *Organizing corporate communication activities such as publications, press releases, sponsorship, corporate branding, and other activities;*
8. *Maintaining the Company's relationship with regulators.*

AKSES DAN KETERBUKAAN INFORMASI Information Access And Disclosure

Komitmen Perum Jasa Tirta II terhadap prinsip transparansi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait keterbukaan informasi diwujudkan melalui penyampaian informasi terkini terkait setiap perkembangan yang terjadi secara akurat, tercatat, diolah, dan dirangkum menjadi sebuah laporan yang disampaikan kepada pemangku kepentingan.

Penyebaran informasi kepada semua Pemilik Modal Perusahaan merupakan bagian penting dari peningkatan prinsip transparansi informasi secara internal dan eksternal, yang diharapkan dapat membantu menjaga dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan persepsi positif dari para Pemilik Modal terhadap kebijakan dan kegiatan Perum Jasa Tirta II. Perum Jasa Tirta II telah menyediakan berbagai akses informasi melalui sarana dan media sebagai berikut:

Perum Jasa Tirta II's commitment to the principle of transparency and compliance with applicable laws and regulations related to information disclosure is manifested in the accurate recording, processing, and summarization of any developments that occur into a report submitted to stakeholders.

The dissemination of information to all Company Capital Owners is an important part of increasing the principle of information transparency both internally and externally, which is expected to help maintain and increase Capital Owners' knowledge, understanding, and positive perceptions of Perum Jasa Tirta II's policies and activities. Perum Jasa Tirta II has made information available through the following channels and media:



Website Perusahaan:

www.jasatirta2.co.id

Kontak Sekretaris Perusahaan:

Telp. : (0264) 201972

Fax. : (0264) 201971

Email : pjt2@jasatirta2.co.id

Media Sosial

Instagram : [jasatirta2](#)

Facebook : [Perum Jasa Tirta](#)

Twitter : [humas_pjt2](#)

YouTube : [Humas PJT II](#)

Company Website:

www.jasatirta2.co.id

Corporate Secretary Contact

Telp. : (0264) 201972

Fax. : (0264) 201971

Email : pjt2@jasatirta2.co.id

Social Media

Instagram : [jasatirta2](#)

Facebook : [Perum Jasa Tirta](#)

Twitter : [humas_pjt2](#)

YouTube : [Humas PJT II](#)

Keterbukaan Informasi dan Data Perusahaan

Sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat, Perum Jasa Tirta II secara berkala menyebarkan informasi material mengenai aktivitas dan kinerja yang sejalan dengan kewajiban pemenuhan keterbukaan informasi yang telah ditetapkan oleh regulator, yakni sebagai berikut:

Company Information and Data Disclosure

As a form of transparency to the public, Perum Jasa Tirta II disseminates material information regarding activities and performance on a regular basis, in accordance with the regulator's obligation to fulfill the established information disclosure requirements, which are as follows:

BENTUK KETERBUKAAN INFORMASI <i>Forms Of Information Disclosure</i>	JUMLAH <i>Total</i>
LAPORAN TAHUNAN / <i>Annual Report</i>	1
LAPORAN BERKELANJUTAN / <i>Sustainability Report</i>	1



Website Perusahaan

Perum Jasa Tirta II memiliki situs website resmi yaitu www.jasatirta2.co.id yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. Situs tersebut menyajikan informasi mengenai profil dan sejarah Perusahaan, informasi mengenai manajemen Perseroa, layanan, informasi kinerja keuangan, berita terkini mengenai Perusahaan, serta sejumlah dokumen keterbukaan informasi lainnya.

Laporan Tahunan

Perum Jasa Tirta II menerbitkan Laporan Tahunan yang merupakan dokumentasi resmi atas pencapaian kinerja Perusahaan di tahun buku. Laporan Tahunan didistribusikan kepada Pemilik Modal dan segenap Pemilik Modal lainnya. Dalam penyusunannya, Laporan Tahunan telah mengikuti kriteria dan ketentuan yang berlaku serta diikutsertakan dalam ajang *Annual Report Awards (ARA)*.

Aktivitas Hubungan Investor

Perum Jasa Tirta II berupaya menjaga hubungan yang sinergis dengan Pemilik Modal dan Pemilik Modal melalui pemenuhan kewajiban pelaporan kinerja Perusahaan secara berkala baik secara formal maupun informal.

Komunikasi Internal

Perum Jasa Tirta II senantiasa menciptakan komunikasi dua arah kepada karyawan melalui berbagai media komunikasi dalam rangka menciptakan iklim komunikasi internal yang kondusif untuk mendukung pencapaian kinerja. Hubungan komunikasi dengan pihak internal Perusahaan dilakukan melalui penyediaan buletin dan penyebaran email blasting internal untuk menyampaikan informasi material bagi internal Perum Jasa Tirta II.

The Company's Website

Perum Jasa Tirta II has an official website, which can be accessed by all stakeholders, namely www.jasatirta2.co.id. The site contains information on the Company's profile and history, information on the Company's management, services, financial performance data, the most recent news about the Company, and a variety of other information disclosure documents.

Report Annual

Perum Jasa Tirta II issues an Annual Report, which serves as official documentation of the Company's performance accomplishments during the fiscal year. The Capital Owners and all other Capital Owners receive the Annual Report. The Annual Report was prepared in accordance with the applicable criteria and conditions, and it was selected for the Annual Report Awards (ARA).

Activities in Investor Relations

Perum Jasa Tirta II seeks to maintain a synergistic relationship with Capital Owners and Capital Owners by formally and informally meeting the Company's performance reporting obligations on a regular basis.

Communication within the organization

Perum Jasa Tirta II always encourages two-way communication with employees via various communication channels in order to foster an environment conducive to performance achievement. Communication with the Company's internal parties is carried out through the distribution of internal email blasts and the distribution of bulletins to convey material information to the internal parties of Perum Jasa Tirta II.



SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

Internal Supervision Unit

Perum Jasa Tirta II telah memiliki Fungsi Audit Internal yang dijalankan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI) sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II. Dalam menjalankan fungsinya, SPI berperan sebagai mitra strategis bagi manajemen yang dapat dipercaya, bertindak profesional, objektif, dan independen sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan Perusahaan melalui upaya peningkatan efektivitas pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan dan tata kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Struktur dan Kedudukan SPI

SPI mempunyai kedudukan langsung di bawah Direktur Utama untuk menjamin sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Penetapan Kepala SPI oleh Direktur Utama harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi serta mendapat persetujuan Dewan Pengawas selaku wakil dari pemilik Perusahaan.

Sebagaimana ditetapkan pada struktur organisasi pada Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II Nomor: PRD-17/DIR/12/2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II, Struktur Organisasi Satuan Pengawasan Intern adalah sebagai berikut:

Perum Jasa Tirta II already has an Internal Audit Function which is carried out by the Internal Audit Unit (SPI) in accordance with the mandate of Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises, Regulation of the Minister of State for State-Owned Enterprises Number: PER-01/MBU/2011 dated 1 August 2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises (BUMN) and Government Regulation Number 7 of 2010 concerning Public Company (Perum) Jasa Tirta II. In carrying out its functions, SPI acts as a strategic partner for trustworthy management, acts professionally, objectively, and independently so that it can provide added value to the achievement of the Company's goals through efforts to increase the effectiveness of risk management, compliance with laws and regulations and good corporate governance. good (Good Corporate Governance).

Structure and Position of SPI

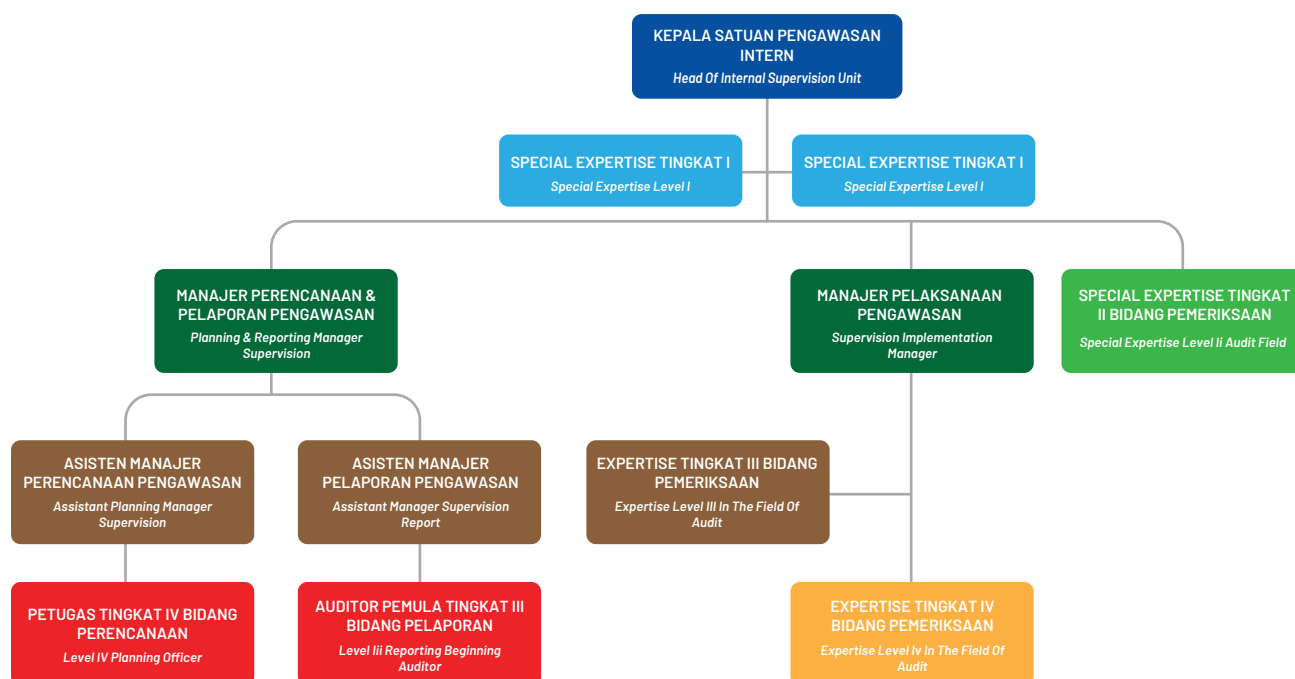
SPI has a direct position under the President Director to guarantee as required by Laws and Government Regulations. The appointment of the Head of SPI by the President Director must meet the qualifications and competencies and obtain the approval of the Supervisory Board as the representative of the owner of the Company.

As stipulated in the organizational structure of the Board of Directors of Jasa Tirta II Public Company (Perum) Regulation Number: PRD-17/DIR/12/2021 concerning the Organizational Structure and Work Procedure of Jasa Tirta II Public Company, the Organizational Structure of the Internal Audit Unit is as follows:



STRUKTUR ORGANISASI KARYAWAN SATUAN PENGAWASAN INTERN PERUM JASA TIRTA II

Employee Organizational Structure Perum Jasa Tirta II Internal Supervision Unit



Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan SPI
SPI dipimpin oleh seorang Kepala SPI yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Pengawas.

Parties Appointing and Dismissing SPI The SPI is led by a Head of SPI, who is appointed and dismissed by the President Director with the Supervisory Board's approval.

Jumlah dan Komposisi Personil SPI

Sampai dengan 31 Desember 2022, personil SPI berjumlah 12 (dua belas) orang dengan 1 (satu) orang Kepala SPI, 10 orang auditor, dan 1 orang petugas Tata Usaha (TU)

SPI Personnel Number and Composition

SPI personnel are 12 (twelve) as of December 31, 2022, with 1(one) Head of SPI, 10 auditors, and 1 Administrative officer (TU)

PROFIL KEPALA SPI *Profile of Head of SPI*



NANDANG MUNANDAR, SE, M. AKT
Kepala Satuan Pengawasan Intern /
Head of Internal Audit Unit.

Warga Negara Indonesia, lahir di Purwakarta, 12 Februari 1972. Memperoleh gelar Sarjana dari STIE YPKP dan Magister Akuntansi dari Universitas Budi Luhur Jakarta (2010). / *Indonesian citizen, born in Purwakarta, February 12, 1972. He obtained his Bachelor's degree from STIE YPKP and Master's Degree in Accounting from Budi Luhur University, Jakarta (2010).*

Sertifikasi Personil SPI

Sampai dengan 31 Desember 2022 Perum Jasa Tirta II memiliki beberapa auditor tersertifikasi.

SPI Personnel Certification

As of 31 December 2022 Perum Jasa Tirta II has several certified auditors.

Piagam SPI

Landasan SPI Perum Jasa Tirta II dalam melaksanakan tugas dan fungsinya telah memiliki Piagam Satuan Pengawasan Intern (*Internal Audit Charter*) didasarkan pada Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara, Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK-16/S. MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*). Internal Audit Charter yang disusun sebagai pedoman standar yang memuat kriteria minimal tentang fungsi Audit Internal yang perlu diselenggarakan oleh Perusahaan dan aspek-aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan Audit Internal, sehingga dapat tercipta kesamaan pemahaman dan landasan mengenai tingkat pemeliharaan kepentingan dan komitmen dari semua pihak yang terkait dengan Perusahaan.

Charter of the SPI

In carrying out its duties and functions, Perum Jasa Tirta II has an Internal Audit Charter based on the Decree of the Minister of SOEs No. Kep-117/M-MBU/2002 concerning the Implementation of Good Corporate Governance Practices in State-Owned Enterprises, Copy of Decree of the Minister of SOEs No. Kep-117/M-MBU/2002 regarding the Adoption of Good Corporate Governance Practices in State-Owned Enterprises, Copy of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises' Decree No. SK16/S. MBU/2012 on Indicators/Parameters for Assessing and Evaluating Good Corporate Governance Implementation. The Internal Audit Charter is prepared as a standard guideline that contains minimum criteria regarding the Internal Audit function that must be carried out by the Company and aspects related to the implementation of Internal Audit, in order to create a common understanding and basis regarding the level of maintenance of all parties related to the Company's interests and commitments.



Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawab sebagaimana yang telah disepakati dalam Keputusan Bersama Dewan Pengawas dan Direksi Perum Jasa Tirta II tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Visi dan Misi SPI

Visi

Menjadi unit kerja dan mitra yang dapat memberikan fungsi pengawasan, konsultansi dan katalisator secara profesional sehingga dapat memberikan kontribusi atas upaya pencapaian target-target Perusahaan.

Misi

- Mengendalikan kegiatan Perusahaan dari aspek kepatuhan terhadap peraturan
 - Memberikan saran konstruktif dan terjangkau atas pelaksanaan kegiatan Perusahaan
 - Membantu memberikan percepatan dalam upaya pelaksanaan alur proses sistem manajemen

Tugas dan Tanggung Jawab, dan Fungsi SPI

Tugas SPI adalah melaksanakan sebagian tugas Perusahaan di bidang pengawasan terhadap operasional Perusahaan berdasarkan Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II SPI mempunyai tanggung jawab dan fungsi sebagai berikut:

1. Pengelolaan risiko, program kerja, dan Key Performance Indicator (KPI) SPI;
2. Penyusunan, review, dan sosialisasi aturan/pedoman/prosedur;
 - 1). Pemeriksaan (audit) operasional dan keuangan, pemeriksaan dengan tujuan tertentu (POTT) dan monitoring evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - 2). Pemeriksaan (audit) internal sistem manajemen mutu;
 - 3). Evaluasi pengendalian internal;

The contents of the SPI charter are as follows in carrying out the duties, functions, and responsibilities as agreed in the Joint Decree of the Supervisory Board and the Board of Directors of Perum Jasa Tirta II concerning Guidelines for Good Corporate Governance

Vision and Mission

Vision

To become a work unit and a partner capable of providing professional supervision, consulting, and catalytic functions in order to contribute to efforts to achieve the Company's goals.

Mission

- *Managing the Company's activities in terms of regulatory compliance;*
 - *Providing constructive and affordable advice on the implementation of the Company's activities; and*
 - *Assisting in the acceleration of efforts to implement the management system process flow.*

SPI's Duties and Responsibilities

The task of SPI is to carry out part of the Company's duties in the field of supervision of the Company's operations based on the Regulation of the Board of Directors of Public Company (Perum) Jasa Tirta II SPI has the following responsibilities and functions:

1. *Risk management, work plans, and SPI Key Performance Indicators (KPI);*
2. *Rules/guidelines/procedures preparation, review, and dissemination;*
 - 1). *Operational and financial audits, audits with a specific purpose (POTT), and monitoring of follow-up evaluations of inspection results;*
 - 2). *Internal audit (audit) of the quality management system;*
 - 3). *Internal control evaluation;*



- 4). Penilaian program jaminan kualitas (*quality assurance*) SPI;
- 5). Piagam SPI (*SPI Charter*)
3. Penyusunan usulan RKAP termasuk kelengkapan dokumen namun tidak terbatas pada Project Dogest Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan RAB untuk pekerjaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan kewenangan;
5. Penyusunan rencana paket pengadaan barang/jasa berdasarkan RKAP;
6. Pembuatan kelengkapan dokumen rencana pengadaan termasuk namun tidak terbatas pada Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan Rancangan Kontrak untuk pekerjaan jasa konsultasi sesuai dengan pedoman pengadaan barang dan jasa yang berlaku;
7. Penyiapan naskah Memorandum of Understanding (MoU) dan/atau Perjanjian Kerja Sama (PKS) sesuai dengan tugas dan fungsi;
8. Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) SPI;
9. Pelaksanaan pemeriksaan operasional dan keuangan, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan pemeriksaan internal sistem manajemen mutu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. Pendampingan kegiatan pemeriksaan/penilaian yang dilakukan oleh pihak eksternal sesuai dengan tugas dan fungsi;
11. Monitoring dan evaluasi atas progres tindak lanjut hasil pemeriksaan auditor internal dan eksternal;
12. Penyelenggaraan pemeriksaan sistem manajemen mutu oleh pihak eksternal;
13. Penyelenggaraan Penilaian atau Assessment Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) yang dilakukan oleh pihak eksternal;
14. Evaluasi (*self assessment*) implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan manajemen risiko;
15. Evaluasi efektivitas pelaksanaan pengendalian internal Perusahaan;
16. Penyelenggaraan penilaian program jaminan kualitas (*quality assurance*) kinerja SPI;

- 4). *Evaluation of SPI's quality assurance program*
- 5). *SPI Charter*
3. *Preparation of RKAP proposal, including but not limited to Project Dogest Terms of Reference (KAK) and RAB for consulting services work in accordance with applicable regulations.*
4. *Execution of goods/services procurement in accordance with authority;*
5. *Development of a package plan for the acquisition of goods/services based on the RKAP;*
6. *Preparation of the procurement plan document, including but not limited to the Terms of Reference (KAK), Self Estimated Price (HPS), and Draft Contract for consulting services work in accordance with the applicable procurement guidelines for goods and services;*
7. *Writing a Memorandum of Understanding (MoU) and/or a Cooperation Agreement (PKS) in accordance with the duties and functions;*
8. *SPI Annual Audit Work Program (PKPT) preparation;*
9. *Conduct operational and financial audits, audits with specific objectives, and internal quality management system audits in accordance with applicable regulations;*
10. *Assisting external parties with inspection/assessment activities in accordance with their duties and functions;*
11. *Monitoring and evaluating the progress of follow-up on the findings of internal and external audits;*
12. *Inspection of the quality management system by third parties;*
13. *Implementation of Good Corporate Governance (GCG) Implementation Assessment or External Assessment;*
14. *Self-assessment of Good Corporate Governance implementation and risk management;*
15. *Evaluation of the effectiveness of the Company's internal control implementation;*
16. *Implementation of a quality assurance program to assess SPI performance;*



17. Fungsi konsultasi perbaikan sistem pengendalian intern, manajemen risiko dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
18. Penyelenggaraan rapat koordinasi bidang pengawasan dengan Komite Audit;
19. Memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan;
20. Pengendalian bukti kerja pelaksanaan tugas dan fungsi;
21. Pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
22. Pengelelolaan dan pertanggungjawaban uang muka kerja unit kerja

Kode Etik SPI

Panduan pelaksanaan tugas SPI senantiasa mengacu pada ketentuan perilaku dan etika pelaksanaan audit yang sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, tujuan serta visi misi Perusahaan. Dalam mendukung tujuan tersebut, SPI memiliki Kode Etik yang mengatur standar etika yang wajib dimiliki oleh setiap auditor internal, antara lain:

1. Jujur, objektif, dan sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawabnya;
2. Loyal terhadap profesi, Perusahaan, dan unit SPI;
3. Tidak boleh terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi internal pemeriksa atau Perusahaan;
4. Menahandiridarikegiatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan Perusahaan, atau kegiatan yang dapat menimbulkan prasangka yang meragukan kemampuan untuk dapat melakukan tugas dan tanggung jawab secara objektif;
5. Tidak menerima imbalan dalam bentuk apa pun dari unit kerja yang diperiksa, pegawai, ataupun mitra bisnis Perusahaan yang patut diduga dapat memengaruhi pertimbangan profesional;
6. Melaksanakan seluruh penugasan dengan menggunakan kompetensi profesional yang dimilikinya;
7. Mematuhi sepenuhnya Standar Profesi Audit Internal, kebijakan dan peraturan Perusahaan;

17. Consultancy function for internal control system improvement, risk management, and Good Corporate Governance.
18. Organizing coordination meetings in the field of supervision with the Audit Committee;
19. Monitoring follow-up on the reported results of the examination;
20. Control of evidence of work implementation of duties and functions;
21. Preparation of reports on the results of work implementation of duties and functions; and
22. Work unit advancement management and accountability

SPI Code of Ethics

Guidelines for carrying out SPI duties always refer to the provisions of conduct and ethics for auditing in accordance with applicable laws and regulations, the Articles of Association, the Company's objectives, vision, and mission. In SPI has a Code of Ethics that regulates ethical standards that must be owned by every internal auditor, including:

1. Honest, objective, and sincere in carrying out their duties and fulfilling their responsibilities;
2. Loyal to the profession, the Company, and the SPI unit;
3. Must not be involved in actions or activities that can bring the internal audit profession or the Company into disrepute.
4. Refrain from activities that may create a conflict of interest with the Company, or activities that may create prejudice that calls into question the ability to carry out tasks and responsibilities objectively;
5. Not accepting any form of compensation from the audited work units, employees, or business partners of the Company that is reasonably suspected of influencing professional judgment;
6. Carrying out all assignments using professional competence;
7. Fully complying with the Internal Audit Professional Standards, Company policies, and regulations;



8. Tidak memanfaatkan informasi yang diperoleh untuk mendapatkan keuntungan pribadi, melanggar hukum, atau menimbulkan kerugian terhadap Perusahaan ;
9. Mengungkapkan semua fakta untuk menghindari distorsi informasi dan praktik-praktik yang melanggar hukum;
10. Senantiasa meningkatkan keahlian, efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya serta mengikuti pendidikan profesi berkelanjutan.

8. *Not using the information obtained for personal gain, violating the law, or causing harm to the Company;*
9. *Disclosing all facts to avoid information distortion and illegal practices;*
10. *Constantly improving their skills, effectiveness, and quality of duty execution and participation in continuing professional education.*

Pengembangan Kompetensi SPI

Dalam mengakomodasi kebutuhan audit internal yang dinamis, Perum Jasa Tirta II memberikan program pengembangan kompetensi bagi Satuan Pengawasan Intern (SPI) secara sistematis dan berjenjang melalui program pengembangan kompetensi yang diselenggarakan secara internal maupun eksternal.

Adapun pengembangan kompetensi pada lembaga eksternal diselenggarakan melalui pelatihan formal dalam bentuk kursus atau seminar/lokakarya yang berkaitan dengan masalah dan perkembangan audit. Sementara perkembangan kompetensi yang dilaksanakan secara internal dikelola oleh Perusahaan sendiri.

Informasi mengenai pelatihan dan pendidikan yang diikuti SPI selama tahun 2022 telah dimuat dalam Laporan Realisasi PKPT Tahun 2022.

SPI Competency Enhancement

Perum Jasa Tirta II offers competency development programs for internal auditors in order to meet the changing needs of the profession. Internal control (SPI) is systematic and tiered, with both internal and external competency development programs.

Meanwhile, competency development in external institutions is accomplished through formal training in the form of audit-related courses or seminars/workshops. Meanwhile, internal competency development is managed by the company itself.

The 2022 PKPT Realization Report includes information about the training and education that SPI received in 2022.

Laporan Pelaksanaan Audit Internal Tahun 2022

Program Monitoring dan Evaluasi

Perum Jasa Tirta II telah memiliki Fungsi Audit Internal yang dijalankan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI) sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II.

Internal Audit Implementation Report 2022

Monitoring and Evaluation

The Internal Audit Unit (SPI) performs the Internal Audit Function of Perum Jasa Tirta II in accordance with the mandate of Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises, Regulation of the Minister of State for State-Owned Enterprises Number: PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises (BUMN), and Government Regulation Number 7 of 2010.



Dalam menjalankan fungsinya, SPI berperan sebagai mitra strategis bagi manajemen yang dapat dipercaya, bertindak profesional, objektif, dan independen sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan Perusahaan melalui upaya peningkatan efektivitas pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan dan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) SPI mempunyai kedudukan langsung di bawah Direktur Utama untuk menjamin sebagaimana Peraturan Pemerintah. Penetapan Kepala SPI oleh Direktur Utama harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi serta mendapat persetujuan Dewan Pengawas selaku wakil dari pemilik Perusahaan.

Sebagaimana ditetapkan pada struktur organisasi pada Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II Nomor: PRD-18/DIR/11/2020 dan PRD-19/DIR/11/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II.

In carrying out its functions, SPI acts as a strategic partner for trustworthy management, acting professionally, objectively, and independently in order to add value to the achievement of the Company's objectives through efforts to improve risk management effectiveness, compliance with laws and regulations, and good corporate governance (Good Corporate Governance) SPI reports directly to the President Director to ensure compliance with government regulations The appointment of the Head of SPI by the President Director must meet the qualifications and competencies, as well as obtain the approval of the Supervisory Board as the Company's representative.

According to the organizational structure specified in the Regulation of the Board of Directors of the Jasa Tirta II Public Company (Perum) Numbers: PRD-18/DIR/11/2020 and PRD19/DIR/11/2020 Concerning the Organizational Structure and Work Procedure of the Jasa Tirta II Public Company (Perum).

Register Risiko SPI

Register Risiko SPI

NO.	KENDALA YANG DIHADAPI <i>Obstacles encountered</i>	MITIGASI <i>Mitigation</i>
1.	Tingkat kepatuhan unit kerja masih rendah terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan perusahaan. <i>The level of compliance of work units is still low with the rules and regulations that apply within the company.</i>	SPI telah melaksanakan Pemeriksaan Operasional & Keuangan I dan II, Audit ISO 37001 : 2016 SMAP Audit ISO 9001 : 2015 SMM, dan Quality Assurance. <i>SPI has conducted Operational & Financial Audit I and II, ISO 37001 Audit: 2016 SMAP Audit ISO 9001: 2015 SMM Audit, and Quality Assurance.</i>
2.	Pelaksanaan kegiatan Audit internal ISO belum dilaksanakan secara maksimal. hasil kegiatan Audit tidak optimal. <i>The implementation of ISO internal audit activities has not been carried out optimally, so the results of audit activities are not optimal.</i>	SPI telah mengusulkan dan melaksanakan Pendidikan & Pelatihan. <i>SPI has proposed and implemented Education & Training.</i>
3.	Rekomendasi temuan hasil pemeriksaan oleh auditor SPI tidak objektif sesuai kondisi temuan. <i>Recommendations for audit findings by SPI auditors are not objective according to the conditions of the findings.</i>	SPI telah melaksanakan monitoring & evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Eksternal dan Internal, Rapat Koordinasi dengan Komite Audit dan Evaluasi Manajemen Risiko. <i>SPI has carried out monitoring & evaluation of follow-up results of External and Internal examinations, Coordination Meetings with the Audit Committee and Risk Management Evaluation.</i>
4.	Pelaksanaan pengendalian internal perusahaan belum berdasarkan pedoman pelaksanaan. <i>The company's internal control implementation is not yet based on implementation guidelines.</i>	SPI telah melaksanakan telaahan/ kajian staf Bidang Pengawasan pada bulan Februari 2022. <i>SPI has conducted a staff review of the Supervision Division in February 2022.</i>
5.	Target budget deviation tidak tercapai. <i>Target budget deviation was not achieved.</i>	Kegiatan Pengawasan berdasarkan ketersediaan anggaran. (Dilaksanakan Tentative apabila sangat diperlukan). <i>Monitoring activities based on budget availability. (Implemented Tentatively if urgently needed).</i>



AUDIT EKSTERNAL

External Audit

Penguatan terhadap independensi dan akuntabilitas pemeriksaan audit dilakukan dengan melibatkan Auditor Eksternal. Auditor eksternal dalam hal ini merupakan pihak independen profesional dalam melakukan audit, baik audit laporan keuangan, audit terkait mutu (Sistem Manajemen Mutu), audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Sistem Manajemen Mutu) ISO 9001:2015 dan ISO 37001:2016, Hatan Kerja (SMK3), maupun kegiatan audit lainnya.

Khusus dalam menangani audit laporan keuangan, Perusahaan menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan memperhatikan prosedur penunjukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kriteria independensi dan bebas benturan kepentingan, standar profesional akuntan publik, dan perjanjian kerja sama serta ruang lingkup audit yang wajib dipenuhi oleh KAP.

Ruang Lingkup Audit Kantor Akuntan Publik

1. Audit atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, bertujuan untuk memberikan pendapat akuntan atas kewajaran laporan keuangan yang meliputi:
 - Laporan Posisi Keuangan
 - Laporan Laba Komprehensif
 - Laporan Perubahan Ekuitas
 - Laporan Arus Kas
 - Catatan atas Laporan Keuangan
2. Memberikan rekomendasi atas kelemahan struktur pengendalian internal yang ditemukan selama audit dalam bentuk Management Letter & laporan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian Internal.
3. Jasa lainnya.

Laporan review penilaian tingkat kesehatan Laporan review atas laporan *key performance indicators*.
Laporan pengelolaan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (TJSL).

The External Auditor is used to strengthen the independence and accountability of audit audits. In this case, the external auditor is a professional independent party who conducts audits, including financial statement audits, quality-related audits (Quality Management System), audits of Safety Management Systems and Quality Management Systems) ISO 9001:2015 and ISO 37001:2016, work safety (SMK3), and other audit activities.

The Company appoints a Public Accounting Firm (KAP) to handle the audit of financial statements, taking into account the appointment procedure in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations, criteria for independence and free of conflict of interest, professional standards of public accountants, and cooperation agreements, as well as the audit scope, must be met by KAP.

Audit of a Public Accounting Firm

1. *The Audit of Financial Statements for the Fiscal Year Ended December 31, 2022 seeks to provide the accountant's opinion on the fairness of financial statements such as:*
 - *Statement of Financial Position*
 - *Statement of Comprehensive Income*
 - *Statement of Changes in Equity*
 - *Statement of Cash Flows*
 - *Financial Statement Notes*
2. *Provide recommendations in the form of Management Letters and reports on compliance with laws and regulations and internal control on weaknesses in the internal control structure discovered during the audit.*
3. *Additional services*

Report on the Health Level Assessment Review Examine reports on key performance indicators.
Report on the Partnership and Community Development Program (TJSL) funds management.



Partisipasi dalam Asosiasi Internal Audit

Membership in the Internal Audit Association

NAMA KEGIATAN/ORGANISASI Name of activity/Organisation	JABATAN Position	WAKTU Time
Ikatan Auditor (BPK) Auditors' Association (CPC)	Anggota Member	-

Kantor Akuntan Publik, Nama Akuntan

The name of Public Accounting Firms

Kantor Akuntan Publik dan nama Akuntan yang bekerja sama dengan Perum Jasa Tirta II untuk melaksanakan audit dan menyajikan laporan keuangan tahunan adalah sebagai berikut,

The public accounting firm's accountant and the name of the accountant who works with Perum Jasa Tirta II to conduct audits and present

TAHUN Year	KANTOR AKUNTAN PUBLIK Public Accounting Firm	AKUNTAN PUBLIK Public Accountant	OPINI Opinion
2022	KAP Amir Abadi Jusuf Mawar & Rekan (RSM Indonesia)	Endang Pramuwati, SE, M.Ak, CA., CPA	Opini tanpa modifikasi / Unmodified opinion
2021	KAP Amir Abadi Jusuf Mawar & Rekan (RSM Indonesia)	Endang Pramuwati, SE, M.Ak, CA., CPA	Opini tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan suatu hal dan paragraf hal lain / Unmodified opinion with emphasizing one matter and other matters paragraph
2020	KAP Djoko, Sidik & Indra	Drs. Abubakar Sidik, MS., CA., CPA.	Opini tanpa modifikasi dengan paragraf lain / Unmodified opinion with other matters paragraph
2019	KAP Djoko, Sidik & Indra	Indra Soesetiawan, Ak., CPA., CA	Opini tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan suatu hal dan paragraf hal lain / Unmodified opinion with emphasizing one matter and other matters paragraph
2018	KAP Djoko, Sidik & Indra	Drs. Djoko Sutardjo, Ak., CA., CPA	Opini tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan suatu hal dan paragraf hal lain / Unmodified opinion with emphasizing one matter and other matters paragraph
2017	KAP S. Mannan, Ardiansyah & Rekan	Drs. Salam Manan, Ak., MM, CPA., CA	Opini tanpa modifikasi dengan paragraf lain / Unmodified opinion with other matters paragraph



Selain Kantor Akuntan Publik, terdapat juga Auditor Eksternal lain yang melakukan audit sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha Perum Jasa Tirta II, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) yang salah satu tugasnya memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara pada bidang kekayaan Negara yang dipisahkan (BUMN) di antaranya melalui audit atas kinerja Perusahaan dan/atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

In addition to the Public Accounting Firm, other External Auditors conduct audits in connection with the implementation of Perum Jasa Tirta II's business activities, namely the Supreme Audit Agency (BPK RI), one of whose duties is to examine the management and responsibility of State finances in the separated State assets (BUMN) sector, including through an audit of the Company's performance.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Internal Control System

Sistem Pengendalian Internal merupakan instrumen penting dalam pengelolaan suatu Perusahaan. Penerapan Sistem Pengendalian Internal yang tepat dapat membantu Direksi dalam mengelola bisnis Perusahaan secara Efisien, Efektif, dan Ekonomi (3E), mengamankan investasi dan aset Perusahaan, menjamin tersedianya pelaporan keuangan yang andal, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian.

The Internal Control System is an important tool in business management. The proper implementation of the Internal Control System can help the Board of Directors manage the Company's business more efficiently, effectively, and economically (3E), secure the Company's investments and assets, ensure the availability of reliable financial reporting, improve compliance with applicable laws and regulations, and reduce the risk of loss.

Ketetapan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) jo. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) mengharuskan Direksi BUMN menetapkan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset BUMN.

Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-01/MBU/2012 concerning Amendments to Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER01/MBU/2011 dated August 1, 2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance jo. Regulation Number: PER-01/MBU/2011 of the Minister of SOEs dated August 1, 2011 Regulation of the Minister of SOEs Number: PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) jo. Regulation of the Minister of SOEs Number: PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) jo.

Berkaitan dengan hal tersebut, Perum Jasa Tirta II sebagai salah satu BUMN strategis di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, berkomitmen menerapkan Sistem Pengendalian Internal yang efektif yang diawali dengan merancang dan menetapkan Pedoman Umum Sistem Pengendalian Internal.

In this regard, Perum Jasa Tirta II, as one of the strategic SOEs in the field of Water Resources Management, is committed to implementing an effective Internal Control System, which begins with the design of a system and establishing General Guidelines for Internal Control Systems.



Tujuan Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang terintegrasi dan melekat pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi Perusahaan melalui kegiatan yang efektif dan efisien, menjamin adanya keamanan atas pengelolaan harta Perusahaan, keandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan Sistem Pengendalian Internal adalah sebagai kerangka organisasi dan prosedur kerja operasional keuangan dan non keuangan yang dapat memberi jaminan bahwa setiap pelaksanaan kegiatan di lingkungan Perusahaan dapat menjaga dan mengamankan aset Perusahaan, mengurangi dampak/kerugian penyimpangan termasuk kecurangan fraud; menjamin pelaksanaan semua kegiatan bisnis Perusahaan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku; menyediakan informasi keuangan dan manajemen yang benar, lengkap, dan tepat waktu; meningkatkan efisiensi, efektivitas dan keekonomisan dalam kegiatan operasional Perusahaan; meningkatkan efektivitas manajemen risiko pada organisasi secara menyeluruh.

Terselenggaranya Sistem Pengendalian Internal yang andal dan efektif menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam manajemen pengelolaan Perusahaan, antara lain Dewan Pengawas, Direksi, Satuan Pengawasan Internal (SPI), Pejabat, dan karyawan Perum Jasa Tirta II, dan pihak eksternal lainnya yang berkepentingan terhadap terlaksananya Sistem Pengendalian Internal Perusahaan yang andal dan efektif, agar tujuan keterlibatan mereka terjaga secara aman, berhasil guna, dan berdaya guna.

Internal Control's Purpose

Internal Control System is an integrated process that is linked to actions and activities that are carried out continuously by the leadership and all employees to provide adequate assurance on the achievement of the Company's organizational goals through effective and efficient activities, ensuring the security of the Company's assets, the reliability of financial reporting, and compliance with laws and regulations.

The purpose of the Internal Control System is as an organisational framework and financial and non-financial operational work procedures that can provide assurance that every implementation of activities within the Company can maintain and secure the Company's assets, reduce the impact/loss of irregularities including fraud; ensure the implementation of all business activities of the Company in accordance with applicable laws and regulations; provide correct, complete and timely financial and management information; improve efficiency, effectiveness and economy in the Company's operational activities; improve the effectiveness of risk management in the organisation as a whole.

The implementation of a reliable and effective Internal Control System is the responsibility of all parties involved in the Company's management, including the Supervisory Board and the Board of Directors, Internal Control Unit (SPI), officers and employees of Perum Jasa Tirta II, and other external parties with an interest in the implementation of a reliable and effective Company Internal Control System, so that their involvement's objectives are met in a safe, effective, and efficient manner.



Kerangka Sistem Pengendalian Internal

Kerangka sistem pengendalian internal PJT II telah sesuai dengan kerangka kerja yang diakui secara internasional, yakni *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)*. Menurut COSO, sistem pengendalian internal merupakan proses yang melibatkan Dewan Pengawas, Direksi, serta personil lainnya. Hal ini sejalan dengan sistem pengendalian internal PJT II dalam membangun sistem kontrol organisasi dengan melibatkan seluruh sumber daya yang ada. Adapun sistem pengendalian internal PJT II terdiri dari lima unsur pengendalian yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian yang diwujudkan dalam bentuk kondisi yang dapat menciptakan suasana kerja yang kondusif, mengembangkan dan melaksanakan kompetensi, independensi, integritas, serta patuh pada peraturan yang berlaku di Perusahaan ;
2. Penilaian Risiko merupakan tindakan untuk menentukan pengaruh negatif suatu peristiwa yang tidak diharapkan dan bila terjadi akan menghalangi pencapaian tujuan Perusahaan ;
3. Kegiatan Pengendalian mencakup penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian serta proses verifikasi untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang ada secara konsisten dipatuhi;
4. Informasi dan Komunikasi yang meliputi unsur pengendalian yaitu penggunaan informasi yang relevan, komunikasi internal, dan eksternal;
5. Pemantauan Sistem Pengendalian Internal untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal pada Perusahaan berjalan dengan baik.

Sistem Pengendalian Keuangan dan Operasional

Sistem pengendalian internal PJT II merupakan kerangka organisasi dan prosedur kerja operasional keuangan dan non keuangan yang dapat memberi jaminan bahwa setiap pelaksanaan kegiatan di lingkungan Perusahaan dapat:

Framework for Internal Control Systems

The internal control system framework of PJT II is based on an internationally recognized framework, namely the Treadway Commission's Committee of Sponsoring Organizations (COSO). The internal control system, according to COSO, is a process that involves the Supervisory Board, the Board of Directors, and other personnel. This is consistent with PJT II's internal control system, which involves all existing resources in the development of an organizational control system. The PJT II internal control system is made up of five control elements:

1. *Control environment, which is realized in the form of conditions that can create a conducive working environment, develop and implement competence, independence, and integrity in the Company, and comply with applicable regulations;*
2. *Risk assessment is an action that determines the negative impact of an unexpected event and how it will impede the achievement of the Company's objectives if it occurs.*
3. *Control activities include the development of control policies and procedures, as well as a verification process to ensure that existing policies and procedures are followed consistently.*
4. *Information and Communication, which includes control elements such as the use of relevant information as well as internal and external communications;*
5. *Inspecting the Internal Control System to ensure that the Company's internal control system is functioning properly.*

System of Financial and Operational Control

The internal control system at PJT II is an organizational framework and work procedures for financial and non-financial operations that can provide assurance that every activity carried out within the Company can:



1. Menjaga dan mengamankan aset Perusahaan ;
2. Mengurangi dampak keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/fraud;
3. Menjamin pelaksanaan semua kegiatan bisnis PJT II sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menyediakan informasi keuangan dan manajemen yang benar, lengkap, dan tepat waktu;
5. Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan keekonomisan dalam kegiatan operasional PJT II;
6. Meningkatkan efektivitas manajemen risiko (risk management) pada organisasi secara menyeluruh.

1. *Maintain and secure the Company's assets;*
2. *Reduce financial impact/losses, irregularities, including fraud/fraud; and*
3. *Ensure the implementation of all PJT II business activities in accordance with applicable laws and regulations.*
4. *Provide accurate, complete, and timely financial and management information;*
5. *Improve efficiency, effectiveness, and economy in PJT II operational activities;*
6. *Improve the overall effectiveness of risk management (risk management).*

Evaluasi atas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Tahun 2022

Dalam pemantauan sistem pengendalian internal, terdapat tiga komponen yaitu evaluasi berkelanjutan, evaluasi terpisah, serta evaluasi dan komunikasi kelemahan untuk perbaikan.

Sepanjang tahun 2022, PJT II telah melaksanakan monitoring evaluasi di mana dilakukan penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern secara terus menerus dan menyatu dalam kegiatan operasional Perusahaan. Evaluasi tersebut mencakup proses penilaian atas capaian kualitas pengendalian intern dalam jangka waktu satu tahun buku. Kemudian dilakukan evaluasi terpisah oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI) PJT II dan pihak eksternal yaitu auditor eksternal serta dilakukan audit atau self assessment yang diidentifikasi oleh SPI dan pihak lain untuk dilaporkan kepada Direksi.

Evaluation of the Internal Development System for 2022

There are three components in the internal system development process: continuous evaluation, separate evaluation, and evaluation and communication of weaknesses for improvement.

PJT II has conducted monitoring and evaluation throughout 2022, in which an assessment of the quality of the internal control system performance is carried out on a continuous basis and integrated into the Company's operational activities. The evaluation process includes assessing the achievement of internal control quality over the course of a fiscal year. The Internal Control Unit (SPI) of PJT II and an external party, namely the external auditor, then conduct a separate evaluation, and an audit or self-assessment is conducted, which is identified by SPI and other parties and reported to the Board of Directors.



HUBUNGAN DENGAN PEMILIK MODAL

Relationship With Capital Owner

Perusahaan berkomitmen untuk selalu tunduk dan patuh terhadap peraturan dan perundangan yang berlaku serta menjunjung tinggi nilai-nilai Perusahaan dalam berinteraksi dan berperilaku sesuai dengan etika guna memenuhi tanggung jawabnya kepada para Pemilik Modal dan Pemilik Modal.

Untuk itu, Perum Jasa Tirta II senantiasa menjaga hubungan baik dengan segenap pemangku kepentingannya dalam rangka menjaga keberlangsungan usaha. Hubungan baik tersebut dilaksanakan dalam kaidah perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Pemilik Modal adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung.

Stakeholder primer merupakan penentu utama dalam proses pengambilan keputusan karena memiliki kaitan kepentingan secara langsung pada suatu kebijakan, program, dan proyek Perusahaan. Tanpa partisipasi berkelanjutan dari stakeholder primer, Perusahaan tidak dapat bertahan. Adapun contoh stakeholder primer yaitu Pemilik Modal (Kementerian BUMN, Kementerian PUPR), kreditor, karyawan, pemasok, konsumen (PDAM DKI Jakarta, PDAM Kabupaten/Kota, PLN, dan konsumen lainnya), penyalur, pesaing atau rekanan.

Stakeholder sekunder tidak memiliki kaitan kepentingan secara langsung terhadap suatu kebijakan, program, dan proyek. Akan tetapi, pihak ini memiliki kepedulian (*concern*) sehingga turut berpengaruh terhadap sikap masyarakat dan keputusan legal Pemerintah. Stakeholder ini juga didefinisikan sebagai pihak yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh Perusahaan tetapi mereka tidak terlibat dalam transaksi dengan Perusahaan. Adapun yang termasuk dalam stakeholder sekunder adalah Pemerintah setempat (Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Jawa Barat, Pemda Kab. Purwakarta, pemerintah

In order to fulfill its responsibilities to Capital Owners and Capital Owners, the Company is committed to always complying with applicable laws and regulations and upholding the Company's values in interacting and behaving in accordance with ethics. As a result, Perum Jasa Tirta II strives to maintain positive relationships with all of its stakeholders in order to ensure business continuity.

For this reason, Perum Jasa Tirta II always maintains good relations with all its stakeholders in order to maintain business continuity. Such good relations are carried out within the rules of applicable laws and regulations. Capital Owners are parties who have an interest in the Company either directly or indirectly.

Primary stakeholders are the most important decision-makers because they have a direct interest in the Company's policies, programs, and projects. The Company cannot survive without the continuous participation of its primary stakeholders. Capital Owners (Ministry of BUMN, Ministry of PUPR), creditors, employees, suppliers, consumers (PDAM DKI Jakarta, PDAM Regency/City, PLN, and other consumers), distributors, competitors, or partners are examples of primary stakeholders.

Secondary stakeholders are those who are not directly involved in a policy, program, or project. This party, however, has a concern (concern), which influences people's attitudes and the government's legal decisions. These stakeholders are also defined as parties who have an influence over or are influenced by the Company but are not involved in transactions with the Company. Secondary stakeholders include local governments (DKI Jakarta Provincial Government, West Java Provincial Government, Purwakarta Regency Government), foreign governments (JICA),



asing (JICA), kelompok sosial (NARBO, KNIBB, INACID, ICOLD), media massa, dan pihak lainnya.

Stakeholder kunci memiliki kewenangan secara legal dalam hal pengambilan keputusan. Stakeholder yang dimaksud adalah unsur eksekutif sesuai levelnya, legislatif dan instansi. Adapun yang termasuk dalam stakeholder kunci adalah Pemerintah Kabupaten (Pemprov DKI Jakarta, Pemda Kota Bekasi, Pemda Kabupaten Bekasi, Pemda Kabupaten Karawang, DPRD, dan dinas yang membawahi langsung proyek yang bersangkutan).

Pola Hubungan dengan Pemangku Kepentingan

Untuk mencapai keseimbangan dalam pengelolaan stakeholders, Perusahaan harus memperhatikan pola hubungannya, antara lain:

- Pola hubungan Perusahaan dengan pemilik Pemilik Modal seperti Pemilik Modal bersifat pola hubungan yang proaktif (proactive), di mana Perusahaan cenderung berusaha untuk mengantisipasi kepentingan-kepentingan para stakeholders. Hal ini diimplementasikan dengan membentuk departemen khusus yang berada di bawah Sekretaris Perusahaan:
 - Bidang Hubungan Masyarakat yang berfungsi untuk menjaga keberlangsungan hubungan Perusahaan dengan para stakeholders, media massa, LSM, dan masyarakat pada umumnya.
 - *Government Relation Officer* yang berfungsi sebagai pejabat yang ditunjuk khusus untuk menjadi penghubung antara Perusahaan dengan stakeholders Pemerintah seperti Kementerian PUPR, Kementerian BUMN maupun instansi Pemerintah lainnya.
 - Perusahaan juga membentuk tim-tim khusus yang berfungsi untuk mengidentifikasi isu-isu yang menjadi para Pemilik Modal utama, contohnya Tim Pengembangan Wilayah, Tim Pembentukan Anak Perusahaan, Tim Percepatan Proyek SPAM Jatiluhur, dan sebagai sebagainya.

Social media groups (NARBO, KNIBB, INACID, ICOLD), mass media, and other parties are involved.

Key stakeholders are legally empowered to make decisions. According to its level, the stakeholder in question is the executive element, the legislature, and the agency. The Regency Government (DKI Jakarta Provincial Government, Bekasi City Government, Bekasi Regency Government, Karawang Regency Government, DPRD, and the agency that directly supervises the project in question) are the key stakeholders.

Relationship Patterns with Stakeholders

To achieve balance in stakeholder management, the Company must pay attention to the pattern of the relationship, among other things:

- *The relationship pattern between the Company and the owners of the Capital Owners, such as the Capital Owners, is a proactive relationship pattern in which the Company tries to anticipate the stakeholders' interests. in the capacity of Corporate Secretary:*
 - *Public Relations, which is responsible for maintaining the Company's relationships with stakeholders, the media, non-governmental organizations, and the general public.*
 - *A Government Relations Officer who serves as a specially appointed official to serve as a public relations officer between the Company and government stakeholders such as the Ministry of PUPR, the Ministry of SOEs, and other government agencies.*
 - *The Company also forms special teams whose function is to identify issues that are important to the Capital Owners, such as the Regional Development Team and Subsidiary Formation, team Jatiluhur SPAM Project Acceleration, and so on.*



- Pola Hubungan yang Interaktif (interactive) tercermin antara hubungan Perusahaan dengan para pelanggannya. Dengan adanya Divisi Komersil dan Pelayanan Pelanggan serta kegiatan survei kepuasan pelanggan yang dilaksanakan setiap semester, Perusahaan menggunakan pendekatan interaktif untuk mendapatkan masukan serta memenuhi kebutuhan para pelanggan.

Perusahaan juga membuka komunikasi dengan para stakeholders melalui berbagai media (surat, telepon, email, media sosial) serta memiliki prosedur untuk menangani keluhan dari para stakeholders khususnya pelanggan, yaitu dengan ditetapkan Prosedur No. 37 tahun 2018. Hal ini bertujuan untuk:

- Mengetahui respons stakeholders maupun pelanggan terhadap produk dan layanan PJT II;
- Menangani dan mengevaluasi keluhan pelanggan terhadap produk dan layanan PJT II;
- Menjadikan umpan balik pelanggan sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen dalam meningkatkan kinerja Perusahaan.

Rincian Program Kerja Pengawasan Tahunan Satuan Pengawasan Intern Perum Jasa Tirta II dengan rincian sebagai berikut:

A. Pemeriksaan/Audit

Program kerja pemeriksaan operasional dan keuangan tahun 2022 adalah kegiatan pemeriksaan kepatuhan pelaksanaan program kerja pada Semester I di lingkungan Perum Jasa Tirta II terhadap ketentuan peraturan internal perusahaan dan perundang-undangan yang berlaku, sesuai etika dan norma-norma Pedoman Pemeriksaan SPI serta pokok-pokok audit internal (SP/ Charter) Perum Jasa Tirta II.

Pemilihan dan penetapan objek pemeriksaan bidang operasional dan keuangan dilaksanakan dalam program audit berdasarkan skala prioritas terhadap risk base audit dengan pertimbangan:

Berdasarkan risiko-risiko Perusahaan yang didapat dari data Sistem Manajemen Risiko tahun 2022.

Fenomena kegiatan perusahaan yang menjadi isu manajemen atas pelaksanaan kegiatan program kerja oleh unit kerja di lingkungan perusahaan.

- *Interactive Relationship Pattern (interactive) is reflected in the Company's relationship with its customers, for example. The Company uses an interactive approach to obtain input and fulfill customer needs, with the Commercial and Customer Service Division and customer satisfaction survey activities conducted every semester.*

The company also initiates communication with stakeholders via various media (letters, phone, email, and social media) and has procedures in place to handle complaints from stakeholders, particularly customers, namely the implementation of Procedure No. 37 of 2018. This aims to:

- *Determine stakeholders' and customers' reactions to PJT II products and services;*
- *Handle and evaluate customer complaints about PJT II products and services;*
- *Use customer feedback to inform management decisions about how to improve the Company's performance.*

Details of the Annual Monitoring Work Programme of the Internal Audit Unit of Perum Jasa Tirta II with the following details:

A. Inspection/Audit

The operational and financial audit work programme in 2022 is an examination of compliance with the implementation of the work programme in Semester I within Perum Jasa Tirta II against the provisions of internal company regulations and applicable laws, in accordance with the ethics and norms of the SPI Audit Guidelines and the principles of internal audit (SP / Charter) Perum Jasa Tirta II.

The selection and determination of operational and financial audit objects are carried out in the audit programme based on the priority scale of the risk base audit with consideration:

Based on Company risks obtained from Risk Management System data in 2022.

The phenomenon of company activities that become management issues for the implementation of work programme activities by work units within the company.



- Dampak risiko secara finansial atau teknik yang akan ditimbulkan terhadap proses bisnis perusahaan dan pelaksanaan kegiatan program kerja oleh unit kerja di lingkungan perusahaan.

1. Pemeriksaan Operasional & Keuangan I

Pemeriksaan Operasional & Keuangan I telah dilaksanakan berdasarkan Surat Penugasan Direktur Utama Nomor SPN-101DU/05/2022 tanggal 20 Mei 2022, SPN-15/DU/06/2022 tanggal 10 Juni 2022 dan SPN-17/DU/06/2022 tanggal 17 Juni 2022 periode pelaksanaan selama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkan tentang Pemeriksaan Operasional & Keuangan I Tahun 2022 Satuan Pengawasan Intern (SPI) di Lingkungan Perum Jasa Tirta II serta Surat Perintah Tugas Pemeriksaan Operasional & Keuangan I Kepala Satuan Pengawasan Intern:

ND.SPTP-119/SPI.DU/PW/05/2022 tgl. 31 Mei 2022 di Unit Wilayah
ND.SPTP-133/SPI.DU/PW/06/2022 tgl. 13 Juni 2022 di Unit Wilayah II
ND.SPTP-141/SPI.DU/PW/06/2022 tgl. 17 Juni 2022 di Unit PLTA
ND.SPTP-145/SPI.DU/PW/06/2022 tgl. 29 Juni 2022 di Unit Wilayah IV
ND.SPTP-156/SPI.DU/PW/06/2022 tgl. 06 Juli 2022 di Unit Wilayah III
ND.SPTP-166/SPI.DU/PW/06/2022 tgl. 06 Juli 2022 di Unit Pariwisata & Hotel
ND.SPTP-175/SPI.DU/PW/07/2022 tgl. 20 Juli 2022 di Kantor Pusat

- The financial or technical impact of risks that will be caused to the company's business processes and the implementation of work programme activities by work units within the company.

1. Operational & Financial Audit I

Operational & Financial Audit I has been carried out based on the Assignment Letter of the President Director Number SPN-101DU/05/2022 dated 20 May 2022, SPN-15/DU/06/2022 dated 10 June 2022 and SPN-17/DU/06/2022 dated 17 June 2022 for an implementation period of 45 (forty five) working days from the date of determination of the Operational & Financial Audit I Year 2022 of the Internal Audit Unit (SPI) within Perum Jasa Tirta II and the Task Order for Operational & Financial Audit I of the Head of Internal Audit Unit:

ND.SPTP-119/SPI.DU/PW/05/2022 dated 31 May 2022 in the Regional Unit
ND.SPTP-133/SPI.DU/PW/06/2022 dated 13 June 2022 in Region II Unit
ND.SPTP-141/SPI.DU/PW/06/2022 dated 17 June 2022 at the Hydropower Unit
ND.SPTP-145/SPI.DU/PW/06/2022 dated 29 June 2022 in Region IV Unit
ND.SPTP-156/SPI.DU/PW/06/2022 dated 06 July 2022 in Region III Unit
ND.SPTP-166/SPI.DU/PW/06/2022 dated 06 July 2022 in Tourism & Hotel Unit
ND.SPTP-175/SPI.DU/PW/07/2022 tgl. 20 July 2022 at Head Office



Rekapitulasi Temuan Hasil Pemeriksaan Operasional & Keuangan I Tahun 2022 /
Recapitulation of Operational & Financial Audit Findings I Year 2022

NO.	UNIT KERJA <i>Working Unit</i>	JUMLAH TEMUAN / <i>Number Of Findings</i>					JUMLAH <i>Total</i>
		PENGADAAN BARANG & JASA / <i>Procurement Goods & Services</i>	PENDAPATAN / <i>Income</i>	PEMBIAYAAN / <i>Financing</i>	INVENTARISASI ASET / <i>Inventory Assets</i>	PENGUSAHAAN / <i>Funding</i>	
1.	Unit Wilayah I <i>Region I Unit</i>	1	0	0	2	0	3
2.	Unit Wilayah II <i>Region Unit II</i>	0	1	0			1
3.	Unit Mayan III <i>Mayan III Unit</i>			1	0		3
4.	Unit Wilayah IV <i>Region IV Unit</i>	2	0	0	0		2
5.	Unit PLTA <i>Hydropower Unit</i>		0	0	0	0	1
6.	Unit Usaha Pariwisata & Hotel <i>Tourism & Hotel Business Unit</i>	2	0	0			
7.	Divisi IPAK <i>IPAK Division</i>	0	0	0			
8.	Divisi RMTIK <i>RMTIK Division</i>		0	0	0	0	
	Total Temuan <i>Total Findings</i>						14

2. Pemeriksaan Operasional & Keuangan II

Pemeriksaan Operasional & Keuangan II telah dilaksanakan berdasarkan Surat Penugasan Direktur Utama Nomor: SPN-32/DU/10/2022 tanggal 19 Oktober 2021 periode pelaksanaan selama 43 (empat puluh tiga) hari kerja sejak tanggal ditetapkan tentang Pemeriksaan Operasional & Keuangan II tahun 2022 di lingkungan Perum Jasa Tirta II, serta Surat Perintah Tugas Pemeriksaan Operasional & Keuangan II Kepala Satuan Pengawasan Intern:

ND.SPTP-270/SPI.DU/PW110/2022 tgl. 21
Oktober 2022 di Unit Wilayah I
ND.SPTP-277/SPI.DU/PW/10/2022 tgl. 31
Oktober 2022 di Unit Wilayah II
ND.SPTP-293/SPI.DU/PW/11/2022 tgl.
08 November 2022 di Unit Wilayah III
ND.SPTP-300/SPI.DU/PW/11/2022 tgl.
14 November 2022 di Unit Wilayah IV
ND.SPTP-308/SPI.DU/PW/11/2022 tgl. 22
November 2022 di Unit PLTA
ND.SPTP-321/SPI.DU/PW/11/2022 tgl. 29
November 2022 di Unit Pariwisata & Hotel
ND.SPTP-330/SPI.DU/PW/07/2022 tgl. 07
Desember 2022 di Kantor Pusat

2. Operational & Financial Audit II

Operational & Financial Audit II has been carried out based on Letter Assignment Letter of the President Director Number: SPN-32/DU/10/2022 dated 19 October 2021 for an implementation period of 43 (forty-three) working days from the date of determination of the Operational & Financial Audit II in 2022 within Perum Jasa Tirta II, as well as the Operational & Financial Audit Task Order II of the Head of the Internal Audit Unit:

*ND.SPTP-270/SPI.DU/PW110/2022 dated 21
October 2022 in Region I Unit
ND.SPTP-277/SPI.DU/PW/10/2022 dated 31
October 2022 in Regional Unit II
ND.SPTP-293/SPI.DU/PW/11/2022 dated 08
November 2022 in Region III Unit
ND.SPTP-300/SPI.DU/PW/11/2022 dated 14
November 2022 in Region IV Unit ND.SPTP-308/
SPI.DU/PW/11/2022 dated 22 November 2022 in
Hydropower Unit
ND.SPTP-321/SPI.DU/PW/11/2022 dated 29
November 2022 in Tourism & Hotel Unit
ND.SPTP-330/SPI.DU/PW/07/2022 dated 07
December 2022 in Head Office*



Rekapitulasi Temuan Hasil Pemeriksaan Operasional & Keuangan II Tahun 2022 /
Recapitulation of Operational & Financial Audit Findings II Year 2022

NO.	UNIT KERJA Working Unit	JUMLAH TEMUAN / Number Of Findings					JUMLAH Total
		PENGADAAN BARANG & JASA / Procurement Goods & Services	PENDAPATAN / Income	PEMBIAYAAN / Financing	INVENTARISASI ASET / Inventory Assets	PENGUSAHAAN / Funding	
1.	Unit Wilayah I Region I Unit	3		0			3
2.	Unit Wilayah II Region Unit II	0	1	0	0		1
3.	Unit Mayan III Mayan III Unit	0	0	0	0	0	0
4.	Unit Wilayah IV Region IV Unit	3	0	0	1	0	4
5.	Unit PLTA Hydropower Unit	3	0	1	0	0	4
6.	Unit Usaha Pariwisata & Hotel Tourism & Hotel Business Unit	0	0		0	0	1
7.	Clivisi Uturn & TJSt. Clivisi Uturn & TJSt.	2	0	0	0	0	2
	Total Temuan Total Findings	12	1	1	1		15

Untuk meningkatkan kualitas Pengendalian Internal dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan Operasional & Keuangan Satuan Pengawasan Intern (SPI) menghimbau kepada setiap Kepala Unit Kerja untuk dapat menindaklanjuti rekomendasi atas temuan dari auditor Internal. Selain itu SPI berupaya untuk meningkatkan pemahaman pelaksanaan Pengendalian Internal dan Kepatuhan Terhadap Peraturan yang sistematis sehingga jika terjadi penggantian karyawan atau pejabat (mutasi/promosi) tidak mengganggu upaya pelaksanaan pengendalian internal unit kerja.

3. Audit Sistem Manajemen

Pelaksanaan Sistem Manajemen adalah kegiatan audit dan penilaian atas konsistensi pelaksanaan Sistem Manajemen di lingkungan Perusahaan sesuai standar yang dipersyaratkan International Standar Organization (ISO).

a. Surveillance ISO 9001:2015

Telah dilaksanakan Surveillance SMM ISO 9001:2015 berdasarkan SPK Nomor: SPK-1/SEKPER.DU/02/2022 tanggal 7 Februari 2022 antara PJT II dengan PT. IKRCS dan

To improve the quality of Internal Control in the implementation of Operational & Financial audit activities, the Internal Audit Unit (SPI) urges each Head of the Work Unit to be able to follow up recommendations on the findings of the Internal auditors. In addition, SPI strives to improve understanding of the implementation of systematic Internal Control and Compliance with Regulations so that if there is a replacement of employees or officials (mutation / promotion) does not interfere with efforts to implement internal control of the work unit.

3. Management System Audit

The implementation of the Management System is an audit and assessment of the consistency of the implementation of the Management System within the Company in accordance with the standards required by the International Standards Organization (ISO).

a. ISO 9001:2015 Surveillance

ISO 9001:2015 SMM Surveillance has been carried out based on SPK Number: SPK-1/SEKPER.DU/02/2022 dated 7 February 2022 between PJT II and PT IKRCS and Assignment



Surat Penugasan Kepala SPI nomor : SPN-01/SPI.DU/02/2022 tanggal 8 Februari 2022 tentang Tim Pendamping Pekerjaan Surveillance SMM ISO 9001:2015.

b. Surveillance Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016.

Telah dilaksanakan Surveillance SMAP ISO 37001:2016 oleh pihak eksternal berdasarkan SPK Nomor: SPK-4/SEKPERDU/02/2022 tanggal 22 Februari 2022 antara PJT II dengan PT. Sucopindo dan Surat Penugasan Kepala SPI nomor SPN-02/SPI.DU/02/2022 tanggal 22 Februari 2022 tentang Tim Pendamping Pekerjaan Surveillance ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).

c. Audit Internal Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015

Telah dilaksanakan Audit Internal Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015 ke-47 pada triwulan III berdasarkan Surat Penugasan Direktur Utama Nomor : SPN-25/DU/08/2022 tanggal 16 Agustus 2022 tentang Tim Audit Internal Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Ke-47 Tahun 2022 di Lingkungan PJT II dan Nota Dinas Kepala SPI Nomor: ND-240/SPI.DU/PW/09/2022 tanggal 16 September 2022 perihal Laporan Audit Internal ke-47 SMM ISO 9001:2015 Tahun 2022.

d. Audit Internal Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001: 2016

Telah dilaksanakan Audit Internal SMAP 37001:2016 pada Triwulan III berdasarkan Surat Penugasan Direktur Utama Nomor: SPN-24/DU/08/2022 tanggal 16 Agustus 2022 tentang Tim Audit Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 ke-3 Tahun 2022 dan Nota Dinas Kepala SPI Nomor: ND-208/SPI.DU/PW/08/2022 tanggal 18 Agustus 2022.

4. Self Assessment Quality Assurance SIN

Program kerja *Quality Assurance* Satuan Pengawasan Intern adalah kegiatan penilaian atas kinerja SPI PJT II berdasarkan kriteria *best practice* yang telah ditetapkan oleh Direksi PJT II melalui Peraturan Direksi I nomor: PRD-31/DIR/11/2019 tanggal 14 November 2019.

Telah dilaksanakan *Self Assessment Quality Assurance* (Penilaian Penjaminan Mutu) SPI di lingkungan PJT II pada Triwulan II, berdasarkan Surat Penugasan Direktur Utama nomor : SPN-08/DU/04/2022 tanggal 25 April 2022 tentang Penilaian Penjaminan Kualitas SPI PJT II Tahun

Letter of the Head of SPI number: SPN-01/SPI.DU/02/2022 dated 8 February 2022 concerning the Assistance Team for ISO 9001:2015 SMM Surveillance Work.

b. *Surveillance of ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System.*

ISO 37001:2016 SMAP Surveillance has been carried out by an external party based on SPK Number: SPK-4/SEKPERDU/02/2022 dated 22 February 2022 between PJT II and PT Sucopindo and Assignment Letter of Head of SPI number SPN-02/SPI.DU/02/2022 dated 22 February 2022 concerning the Assistance Team for ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (SMAP) Surveillance Work.

c. *Internal Audit of ISO 9001:2015 Quality Management System*

ISO 9001:2015 Quality Management System Internal Audit has been conducted: 2015 in the third quarter based on the Assignment Letter of the President Director Number: SPN-25/DU/08/2022 dated 16 August 2022 concerning the 47th ISO 9001:2015 Quality Management System Internal Audit Team in 2022 within PJT II and Memorandum of Service of the Head of SPI Number: ND-240/SPI.DU/PW/09/2022 dated 16 September 2022 regarding the 47th Internal Audit Report of ISO 9001:2015 Quality Management System in 2022.

d. *Internal Audit of ISO 37001 Anti-Bribery Management System: 2016*

Internal Audit of SMAP 37001:2016 has been carried out in the 3rd Quarter based on the Assignment Letter of the President Director Number: SPN-24/DU/08/2022 dated 16 August 2022 concerning the 3rd ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (SMAP) Audit Team of 2022 and Memorandum of Service of the Head of SPI Number: ND-208/SPI.DU/PW/08/2022 dated 18 August 2022.

4. Self Assessment Quality Assurance SIN

The Internal Audit Unit Quality Assurance work programme is an assessment of the performance of the PJT II SPI based on best practice criteria established by the PJT II Board of Directors through Board of Directors Regulation I number: PRD-31/DIR/11/2019 dated 14 November 2019.

Self Assessment Quality Assurance (Quality Assurance Assessment) of SPI within PJT II has been carried out in Quarter II, based on the Assignment Letter of the President Director number: SPN-08/DU/04/2022 dated



2022 dan Nota Dinas Kepala Divisi SDM selaku Assessor/ Ketua Tim Penilaian nomor: ND-410/SDM.DKSMR/TU105/2022 tanggal 31 Mei 2022 perihal Penyampaian Laporan Penilaian Penjaminan Kualitas (Self Assessment Quality Assurance) SPI PJT II Tahun 2022, dengan hasil memenuhi predikat "Bermutu" dengan capaian nilai 84,3.

5. Assessment Good Corporate Governance (GCG)

Program kerja self assessment GCG adalah kegiatan penilaian perusahaan oleh eksternal terhadap implementasi terselenggaranya praktik-praktik Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada proses bisnis perusahaan. Program kerja assessment GCG dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun

Telah dilaksanakan self assessment

a) Pendampingan Penilaian Good Corporate Governance (GCG)

Telah dilaksanakan Assessment GCG pada Triwulan I tahun 2022 berdasarkan Surat Surat BPKP Provinsi Jawa Barat nomor: LGCG-200/PW10/4.2/2022 tanggal 18 Maret 2022 perihal Laporan Hasil Asesmen Penerapan GCG Pada Perum Jasa Tirta II mencapai predikat Baik dengan skor 83,6103 dan Surat Penugasan Direksi Nomor: SPN-3/DKS/1/2022 tanggal 3 Januari 2022, periode tanggal pelaksanaan 3 Januari s.d 25 Februari 2022 tentang Tim Pendamping.

Program kegiatan Assessment COG tahun 2022 dilaksanakan oleh BPKP Provinsi Jawa Barat pada periode bulan November s.d. Desember 2022 yang dilanjutkan pada periode bulan Januari s.d Maret 2022.

b) Evaluasi/Self Assesment Good Corporate Governance (GCG)

Telah dilaksanakan Self Assessment Implementasi GCG Tahun 2022 pada Triwulan IV tahun 2022 berdasarkan Surat Penugasan Direktur Utama PJT II nomor: SPN-34/DU/10/2022 tanggal 27 Oktober 2022 tentang Tim Evaluasi/ Self Assesment Implementasi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik/Good Corporate Governance (GCG) Tahun 2022 di lingkungan PJT 11, mencapai **predikat Baik** dengan skor 84,98.

6. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)

Program kerja Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus diluar pemeriksaan operasional dan keuangan yang dilaksanakan secara khusus dari waktu maupun penugasannya. Program kerja Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu dilaksanakan berdasarkan perintah dan penugasan khusus dari Direktur Utama.

25 April 2022 concerning Quality Assurance Assessment of SPI PJT it Year 2022 and Service Memorandum of the Head of HR Division as Assessor / Assessment Team Leader number: ND-410/SDM. DKSMR/TU105/2022 dated 31 May 2022 regarding Submission of Quality Assurance Assessment Report (Self Assessment Quality Assurance) SPI PJT II Year 2022, with the results meeting the predicate "Excellent" with a score of 84.3.

5. Good Corporate Governance (GCG) Assessment

GCG self-assessment work programme is an external assessment of the company's implementation of Good Corporate Governance practices in the company's business processes. The GCG assessment work programme is carried out 1 (one) time a year. Self assessment has been carried out

a) Assistance for Good Corporate Governance (GCG) Assessment

GCG Assessment has been carried out in the first quarter of 2022 based on the West Java Province BPKP Letter number: LGCG-200/PW10/4.2/2022 dated 18 March 2022 regarding the Report on the Assessment Results of GCG Implementation at Perum Jasa Tirta II achieving a Good predicate with a score of 83.6103 and Board of Directors Assignment Letter Number: SPN-3/DKS/1/2022 dated 3 January 2022, implementation date period 3 January to 25 February 2022 regarding the Assistance Team.

The COG assessment activity programme for 2022 was carried out by BPKP West Java Province in the period November to December 2021 which was continued in the period January to March 2022.

b) Evaluation/Self-Assessment of Good Corporate Governance (GCG)

Self Assessment of GCG Implementation in 2022 has been carried out in the fourth quarter of 2022 based on the Assignment Letter of PJT II President Director number: SPN-34/DU/10/2022 dated 27 October 2022 concerning the Evaluation / Self-Assessment Team for the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in 2022 within PJT 11, achieving a Good predicate with a score of 84.98.

6. Examination with Specific Purpose (PDTT)

The Specific Purpose Examination (PDTT) work programme is an examination carried out with a special purpose outside of operational and financial examinations that are carried out specifically from the time and assignment. The Specific Purpose Audit work programme is carried out based on specific orders and assignments from the President Director. Realisation: There is no implementation of



Realisasi: Tidak ada pelaksanaan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT).

Examination with Specific Purpose (PDTT).

B. Monitoring & Evaluasi

1. Monitoring & Evaluasi Tindak Lanjut Pemeriksaan

Program kerja *monitoring* & evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah kegiatan memonitor & mengevaluasi untuk mengetahui progress tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan auditor internal dan eksternal yang telah dilaksanakan dan hambatan oleh unit kerja dilingkungan perusahaan. Pelaksanaan kegiatan *monitoring* dan evaluasi tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan ditujukan

- Mendorong unit kerja auditan untuk melaksanakan tindak lanjut perbaikan atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan auditor internal dan auditor eksternal.
- Melakukan evaluasi kesesuaian tindak lanjut perbaikan yang telah dilaksanakan oleh unit kerja auditan sesuai dengan rekomendasi temuan hasil pemeriksaan.
- Melakukan evaluasi terhadap kendala atau hambatan tidak dilaksanakannya tindak lanjut perbaikan sesuai rekomendasi temuan hasil pemeriksaan.
- Melakukan evaluasi tingkat ketaatan dan konsistensi penanggungjawab objek audit terhadap pelaksanaan tindak lanjut perbaikan atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan.

a) Realisasi *Monitoring* & Evaluasi Triwulan I Tahun 2022

Telah dilaksanakan *monitoring* & evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Triwulan I berdasarkan Nota Dinas Kepala SPI nomor: ND-90/SPI.DU/PW/04/2022 tanggal 11 April 2022 perihal Laporan Monitoring & Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan periode Triwulan I tahun 2022.

b) Realisasi *Monitoring* & Evaluasi Triwulan II Tahun 2022

Telah dilaksanakan *monitoring* & evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Triwulan II berdasarkan Nota Dinas Kepala SPI nomor: ND-155/SPI.DU/PW/07/2022 tanggal 5 Juli 2022 perihal Laporan Monitoring & Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan periode Triwulan II tahun 2022.

B. Monitoring & Evaluation

1. Monitoring & Evaluation of Follow-up Examination

The work programme for monitoring & evaluation of follow-up on examination results is an activity to monitor & evaluate to determine the progress of follow-up on the findings of internal and external auditors' examinations that have been carried out and obstacles by work units within the company. The implementation of monitoring and evaluation activities for the follow-up of audit findings is aimed at

- *Encouraging the audited work unit to carry out follow-up improvements to the recommendations of the internal and external auditors.*
recommendations on the audit findings of internal and external auditors.
- *Evaluating the suitability of follow-up improvements that have been carried out by the audited work unit in accordance with the recommendations of the internal auditor and external auditor.*
by the audited work unit in accordance with the recommendations of the audit findings.
- *Evaluate the obstacles or barriers to the non-implementation of follow-up improvements in accordance with the recommendations of the audit findings.*
- *Evaluate the level of compliance and consistency of the person in charge of the audit object towards the implementation of follow-up improvements on the recommendations of the audit findings.*

a) Realisation of Monitoring & Evaluation for the first quarter of 2022

Monitoring & evaluation of follow-up on examination results in the first quarter has been carried out based on the Memorandum of Office of the Head of SPI number: ND-90/SPI.DU/PW/04/2022 dated 11 April 2022 regarding the Monitoring & Evaluation Report of Follow-up on Audit Results for the first quarter of 2022.

b) Realisation of Monitoring & Evaluation for the Second Quarter of 2022

Monitoring & evaluation of follow-up examination results in the second quarter has been carried out based on the Memorandum of Office of the Head of SPI number: ND-155/SPI.DU/PW/07/2022 dated 5 July 2022 regarding the Monitoring & Evaluation Report on Follow-up of Audit Results for the second quarter of 2022.



c) Realisasi Monitoring & Evaluasi Triwulan III Tahun 2022

Telah dilaksanakan monitoring & evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Triwulan III berdasarkan Nota Dinas Kepala SPI nomor: ND-254/SPI.DU/PW/10/2022 tanggal 05 Oktober 2022 perihal Laporan Monitoring & Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan periode Triwulan III tahun 2022.

d) Realisasi Monitoring & Evaluasi Triwulan IV Tahun 2022

Telah dilaksanakan monitoring & evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Triwulan IV berdasarkan Nota Dinas Kepala SPI nomor: ND-05/SPI.DU/PW/12/2022 tanggal 06 Januari 2023 perihal Laporan Monitoring & Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan periode Triwulan IV tahun 2022.

c) Realisation of Monitoring & Evaluation for the Third Quarter of 2022

Monitoring & evaluation of follow-up examination results in the third quarter has been carried out based on the Memorandum of Office of the Head of SPI number: ND-254/SPI.DU/PW/10/2022 dated 05 October 2022 regarding the Monitoring & Evaluation Report on Follow-up of Audit Results for the third quarter of 2022.

d) Realisation of Monitoring & Evaluation for the Fourth Quarter of 2022

Monitoring & evaluation of follow-up examination results in the fourth quarter has been carried out based on the Memorandum of Office of the Head of SPI number: ND-05/SPI.DU/PW/12/2022 dated 06 January 2023 regarding the Monitoring & Evaluation Report on Follow-up of Audit Results for the fourth quarter of 2022.

Rekapitulasi Progres Tindaklanjuti Pemeriksaan BPK Ri Tahun 2015 Dan 2018, Kap Tahun 2020, SPI, SMM dan SMAP Periode S.D. Triwulan IV tahun 2022 /

Recapitulation of Follow-up Progress of BPK Ri Audit in 2015 and 2018, Kap in 2020, SPI, SMM and SMAP Period S.D. Quarter IV of 2022

1) Pemeriksaan BPK RI / BPK Ri Inspection

Tahun 2015 / In 2015

URAIAN Description	TEMUAN / REKOMENDASI Findings Recommendations	TINDAKLANJUT TEMUAN REKOMENDASI (TELAH SESUAI) Follow up on the findings Recommendations (Compliant)	SISA TEMUAN / REKOMENDASI Remaining Findings/ Recommendations
a	b	c	e=b-c-d
Temuan / Findings	17	16	1
Rekomendasi / Recommendations	43	42	1

Tahun 2018 / In 2018

URAIAN Description	TEMUAN / REKOMENDASI Findings Recommendations	TINDAKLANJUT TEMUAN REKOMENDASI (TELAH SESUAI) Follow up on the findings Recommendations (Compliant)	SISA TEMUAN / REKOMENDASI Remaining Findings/ Recommendations
a	b	c	e=b-c-d
Temuan / Findings	14	10	4
Rekomendasi / Recommendations	28	23	5



2) Pemeriksaan KAP Tahun 2021 / KAP Examination in 2021

Tahun 2015 / In 2015

URAIAN Description	TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN KAP / Findings Audit KAP	TINDAKLANJUT S.D. TW III DAN BERPOTENSI TUNTAS / Action Taken Up To Quarter III And Potential To Complete	TINDAKLANJUT BERPOTENSI TUNTAS DI TRIWULAN / Follow-Up Potentially Completed In Quarter	SISA TEMUAN S.D. TRIWULAN TRIWULAN IV Remaining Findings Up To Quarter IV
a	b	c	d	d3gb (c+d+e)
Kepatuhan Terhadap Perundang Undangan / Compliance with Legislation	4	2	1	1
Kepatuhan Terhadap Pengendalian Intern / Compliance with Internal Control	6	5		1
Surat Manajemen / Management Letter	10	10		
JUMLAH / Total	20	17	1	2

3) Pemeriksaan SPI / SPI Check

NO.	UNIT KERJA / Working Unit	JUMLAH TEMUAN YANG MASIH OPEN S.D. PERIODE TW III 2022 Number of Findings Open Up to Period Quarter III 2022	PROGRES TINDAK LANJUT TEMUAN PERIODE TW IV TAHUN 2022 Progress of Follow-up of Findings Period Quarter IV Year 2022	
			TERTUTUP Close	TERBUKA Open
a	b	c	d	e=c-d
1.	Unit Wilayah IV / Region IV Unit	1	-	1
2.	Unit PLTA / Hydropower Unit		1	-
3.	Unit Usaha Pariwisata & Hotel / Tourism & Hotel Business Unit		2	2
	JUMLAH / Total	6	3	3



4) Audit Internal Sistem Manajemen Mutu (SMM) - ISO 9001 : 2015 / Internal Audit of Quality Management System (QMS) - ISO 9001: 2015

Tindakan Perbaikan Ketidaksesuaian Minor/ *Corrective Action Minor Nonconformity*

NO.	UNIT KERJA / Working Unit	STATUS KETIDAKSESUAIAN AUDIT INTERNAL KE-47 / 47 th Internal Audit Nonconformance Status		
		JUMLAH TEMUAN / Number Of Findings	TERTUTUP TW IV 2022 / Close Quarter IV 2022	SISA TEMUAN S.D. TW IV 2022 / Remaining Findings upto Quarter IV 2022
a	b	c	d	e = c - d
1.	Unit Wilayah II / Region II Unit	1	1	-
2.	Unit PLTA / Hydropower Unit	1	1	-
3.	Divisi Komersil & Pelayanan Pelanggan / Commercial & Customer Service Division	1	-	
4.	Divisi Inventarisasi, Pengelolaan Aset Kearsipan / Inventory, Asset Management Archives	1	-	1
5.	Divisi Supervisi Teknik / Engineering Supervision Division	1	1	-
JUMLAH / Total		5	3	2

5) Audit Internal Sistem Manajemen Anti Penyuapan (Smapi) - ISO 37001:2016 / Internal Audit of Anti-Bribery Management System (Smapi) - ISO 37001:2016

Tindakan Perbaikan Ketidaksesuaian Temuan / *Corrective Action Non-Conformance Findings*

NO.	UNIT KERJA / Working Unit	STATUS KETIDAKSESUAIAN AUDIT INTERNAL SMAP KE-3 / 3 th Internal Audit Nonconformance Status		
		JUMLAH TEMUAN MINOR / Number Of Minor Findings	TERTUTUP TW IV 2022 / Close Quarter IV 2022	SISA TEMUAN TW IV 2022 / Remaining Findings Quarter IV 2022
a	b	c	d	f=c-(d-f-e)
1.	Divisi Sumber Daya Manusia / Human Resources Division	2	1	1
JUMLAH / Total		2	1	1



2. Rapat Koordinasi Dengan Komite Audit

Program kerja kegiatan rapat koordinasi dengan Komite Audit adalah kegiatan pertemuan antara Satuan Pengawasan Internal dan Komite Audit untuk membahas progres capaian dan hambatan perbaikan tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan auditor internal dan auditor eksternal serta arahan dan kebijakan pengawasan oleh organ Dewan Pengawas terhadap kegiatan program kerja pengawasan oleh unit kerja di lingkungan internal perusahaan.

- a) Realisasi Rapat Koordinasi dengan Komite Audit Triwulan I Tahun 2022 Telah dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2022 berdasarkan Surat Undangan Ketua Komite Audit nomor: Und-01/KA/2022 tanggal 21 Januari 2022 perihal Undangan Rapat Pembahasan Money Triwulan IV Tahun 2021.
- b) Realisasi Rapat Koordinasi dengan Komite Audit Triwulan II Tahun 2022 Telah dilaksanakan pada tanggal 21 April 2022 berdasarkan Surat Undangan Ketua Komite Audit nomor : Und-05/KA/2022 tanggal 18 April 2022 perihal Undangan Rapat Pembahasan Money Triwulan I Tahun 2022.
- c) Realisasi Rapat Koordinasi dengan Komite Audit Triwulan III Tahun 2022 Telah dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2022 berdasarkan Surat Undangan Ketua Komite Audit nomor Und-09/KA/2021 tanggal 20 Juli 2022 perihal Undangan Rapat Pembahasan Money Triwulan II-2022.
- d) Realisasi Rapat Koordinasi dengan Komite Audit Triwulan IV Tahun 2022 Telah dilaksanakan pada tanggal 24 November 2022 berdasarkan Surat Undangan Ketua Komite Audit nomor Und-151KA/2022 tanggal 22 November 2022 perihal Undangan Rapat Pembahasan Money Triwulan III-2022.

3. Evaluasi Manajemen Risiko

Program kerja Evaluasi Manajemen Risiko adalah kegiatan mengevaluasi efektifitas pelaksanaan manajemen risiko termasuk upaya mitigasi risiko terhadap risiko oleh setiap unit kerja di lingkungan perusahaan.

Telah dilaksanakan Evaluasi Manajemen Risiko pada tanggal Triwulan III tahun 2022, berdasarkan Surat Penugasan Direktur Utama nomor: SPN-291DU/09/2022 tanggal 20 September 2022 tentang Tim Evaluasi Manajemen Risiko di lingkungan PJT II.

Kesimpulan hasil Evaluasi Manajemen Risiko PJT II yaitu masih perlu penyesuaian menu/

2. Coordination Meeting with Audit Committee

The work programme of coordination meetings with the Audit Committee is a meeting between the Internal Audit Unit and the Audit Committee to discuss the progress of achievements and obstacles to the improvement of follow-up recommendations on the findings of the examination of internal auditors and external auditors as well as directions and supervisory policies by the Supervisory Board organs on supervisory work programme activities by work units in the company's internal environment.

- a) Realisation of the Coordination Meeting with the Audit Committee for the first quarter of 2022 was held on 25 January 2022 based on the Invitation Letter of the Chairman of the Audit Committee number: Und-01/KA/2022 dated 21 January 2022 regarding the Invitation to the Meeting to Discuss Money for the fourth quarter of 2021.
- b) Realisation of the Coordination Meeting with the Audit Committee for the Second Quarter of 2022 was held on 21 April 2022 based on the Invitation Letter of the Chairman of the Audit Committee number: Und-05/KA/2022 dated 18 April 2022 regarding the Invitation to the Money Discussion Meeting for the First Quarter of 2022.
- c) Realisation of the Coordination Meeting with the Audit Committee for Quarter III of 2022 was held on 25 July 2022 based on the Invitation Letter of the Chairman of the Audit Committee number Und-09/KA/2021 dated 20 July 2022 regarding the Invitation to the Money Discussion Meeting for Quarter II-2022.
- d) Realisation of the Coordination Meeting with the Audit Committee for the 4th Quarter of 2022 has been carried out on 24 November 2022 based on the Invitation Letter of the Chairman of the Audit Committee number Und-151KA/2022 dated 22 November 2022 regarding the Invitation to the Money Discussion Meeting for the 3rd Quarter of 2022.

3. Risk Management Evaluation

The Risk Management Evaluation work programme is an activity to evaluate the effectiveness of risk management implementation including risk mitigation efforts against risks by each work unit within the company.

Risk Management Evaluation has been carried out on the III Quarter of 2022, based on the Assignment Letter of the President Director number: SPN-291DU/09/2022 dated 20 September 2022 concerning the Risk Management Evaluation Team within PJT II.

The conclusion of the PJT II Risk Management Evaluation results is that there is still a need to



fitur antara Aplikasi SimRisk sebagai media informasi manajemen risiko dengan Prosedur/ Instruksi Kerja yang berlaku serta masih perlu dilakukan sosialisasi dan pelatihan/ sertifikasi manajemen risiko kepada karyawan RTU (Risk Taking Unit) wilayah secara berjenjang dan berkesinambungan oleh Unit Pengelola Risiko dan Risk Owner RTU Wilayah.

align the menu / features between the SimRisk Application as a risk management information media with the applicable Procedures / Work Instructions and there is still a need for socialisation and risk management training / certification to RTU (Risk Taking Unit) employees in the region in stages and continuously by the Risk Management Unit and RTU Regional Risk Owner.

C. Peningkatan Wawasan Auditor

1. Pendidikan dan Pelatihan.

Program kerja pendidikan dan pelatihan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan kompetensi dan memenuhi kriteria auditor Satuan Pengawasan Internal dengan mengikutsertakan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan pada lembaga pendidikan & pelatihan secara berjenjang dan berkelanjutan. Program kerja pendidik dan pelatihan dilaksanakan sesuai standarisasi kebutuhan auditor pemeriksaan operasional & keuangan dan pemeriksaan sistem manajemen.

- Telah dilaksanakan Diktat Komunikasi & Psikologi pada 08 s.d.16 Agustus 2022 oleh 2 orang (SE Tk IV dan Auditor Pemula Tk.III)
- Telah dilaksanakan Sertifikasi Auditor Madya pada tanggal 01 September 2022 oleh 2 orang (SE Tk.IV dan Auditor Pemula Tk.III)
- Telah dilaksanakan Pelatihan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 pada tanggal 17-19 Oktober 2022 oleh Kepala SPI.
 - Telah dilaksanakan Pelatihan Finance for Non Finance pada tanggal 08 s.d. 10 November 2022 oleh Manajer Perencanaan & Pelaporan Pengawasan.
 - Telah dilaksanakan Diktat Audit Operasional & Assessment pada tanggal 08 s.d. 16 November 2022 oleh SE Tk. III Bidang Pemeriksaan.
- Telah dilaksanakan Pelatihan Manajemen Risiko pada tanggal 08 s.d. 16 November 2022 oleh Manajer Pelaksanaan Pemeriksaan & SE Tk. III Bidang Pemeriksaan.
 - Telah dilaksanakan Pelatihan Finance for Non Finance pada tanggal 07 s.d. 09 Desember 2022 oleh Asmen Pelaporan & SE Tk.III Bidang Pemeriksaan.

2. Seminar

Program kerja lokakarya/mukemas/seminar adalah kegiatan pengembangan wawasan auditor Satuan Pengawasan Internal dengan terlibat dan mengikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan kegiatan lokakarya/Mukernas FKSPI/ seminar yang diselenggarakan oleh Asosiasi Auditor Intern (AM) dan Asosiasi Sistem

C. Auditor Insight Improvement

1. Education and Training.

Education and training work programme of education and training activities aimed at improving competence and meeting the criteria of the Internal Audit Unit auditors by including in education and training activities at education & training institutions in a tiered and sustainable manner. The education and training work program is carried out in accordance with the standardised needs of operational & financial auditors and management system auditors.

- *Communication & Psychology Diktat has been carried out on 08 to 16 August 2022 by 2 people (SE Tk IV and Beginner Auditor Tk.III).*
- *Intermediate Auditor Certification has been carried out on 01 September 2022 by 2 people (SE Tk.IV and Beginner Auditor Tk.III)*
- *ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System Training has been carried out on 17-19 October 2022 by the Head of SPI.*
 - *Finance for Non Finance Training has been conducted on 08 to 10 November 2022 by the Manager of Supervisory Planning & Reporting.*
 - *Operational Audit & Assessment Diktat has been conducted on 08 to 16 November 2022 by SE Tk. III Audit Division.*
- *Risk Management Training has been conducted on 08 to 16 November 2022 by Manager of Audit Implementation & SE Tk. III of Audit Division.*
 - *Finance for Non Finance Training has been conducted on 07 to 09 December 2022 by Reporting Assistant & SE Tk.III of Examination Division.*

2. Seminars

The workshop/mukemas/seminar work program is an activity to develop the awareness of Internal Audit Unit auditors by engaging and participating in workshop activities / FKSPI National Meeting / seminars held by the Internal Auditor Association (AM) and the Quality Management System Association (ISO) as well as seminar activities held



Manajemen Mutu (ISO) serta kegiatan seminar yang diselenggarakan oleh lembaga lainnya. Tidak ada pelaksanaan seminar selama di tahun 2022.

*by other institutions.
There were no seminars organised in 2022.*

D. Pendukung Kegiatan SPI Lainnya

1. Pengendalian Internal
Telah dilaksanakan evaluasi terhadap pengendalian internal berdasarkan Laporan Sistem Pengendalian Internal nomor: ND-363/SPI.DU/PW/12/2022 tanggal 30 Desember 2022 mencapai predikat Baik dengan nilai 88,83.
2. Telaahan Staf Realisasi. Tidak ada kegiatan telaahan staf di tahun 2022.
3. Pendampingan Audit Eksternal
Program pendampingan Satuan Pengawasan Intern terkait dengan audit yang dilakukan oleh eksternal, antara lain:
 - c) Pendampingan Penilaian *Good Corporate Governance* (GCG)
Telah dilaksanakan Assessment GCG pada Triwulan I tahun 2022 berdasarkan Surat Surat BPKP Provinsi Jawa Barat nomor: LGCG-2001PW10/4.2/2022 tanggal 18 Maret 2022 perihal Laporan Hasil Asesmen Penerapan GCG Pada Perum Jasa.

D. Other SPI Activity Support

1. Internal Control
An evaluation of internal control has been carried out based on the Internal Control System Report number: ND-363/SPI.DU/PW/12/2022 dated 30 December 2022, achieving a Good predicate with a score of 88.83.
2. Staff Review Realisation. *There were no staff review activities in 2022.*
3. External Audit Assistance
The Internal Audit assistance programme is related to audits conducted by external auditors, among others:
 - c) Assistance for *Good Corporate Governance* (GCG) Assessment
GCG Assessment has been carried out in the first quarter of 2022 based on the West Java Province BPKP Letter number: LGCG-2001PW10/4.2/2022 dated 18 March 2022 regarding the Assessment Report on GCG Implementation at Perum Jasa.



MANAJEMEN RISIKO

Risk Management

Pelaksanaan aktivitas bisnis Perum Jasa Tirta II tidak terlepas dari berbagai eksposur risiko yang memiliki potensi dampak terhadap keberlangsungan usaha Perusahaan. Dalam mengantisipasi risiko tersebut, Perum Jasa Tirta II memiliki Sistem Manajemen Risiko yang efektif sebagai salah satu komponen penting dalam manajemen dan memastikan Perusahaan dalam keadaan sehat, aman, dan baik, sehingga seluruh aktivitas usaha dapat membawa Perusahaan pada misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Perum Jasa Tirta II memiliki komitmen kuat yang secara berkelanjutan terus mengembangkan dan meningkatkan kerangka sistem pengelolaan risiko yang terpadu dan komprehensif, yang bertujuan untuk melindungi Perusahaan dari risiko yang berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan dan mengeksplorasi peluang untuk meningkatkan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan.

Kebijakan Manajemen Risiko

Dalam mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi manajemen risiko, Perusahaan dihadapkan pada kebutuhan untuk menerapkan praktik terbaik manajemen risiko di seluruh kegiatan operasional, baik di lingkungan internal maupun eksternal. Seluruh elemen Perusahaan memiliki peran dalam pengelolaan risiko dengan risikonya masing-masing, sehingga dalam mendukung keberhasilannya dibutuhkan kebijakan- kebijakan yang mengatur setiap prosedur dan mekanisme manajemen risiko. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain:

1. Menerapkan Manajemen Risiko secara terpadu sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) untuk mencapai Visi, Misi, dan tujuan Perusahaan ;
2. Menjadikan Manajemen Risiko sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) berbasis risiko untuk mencapai realisasi setiap proses secara efektif dan efisien;
3. Meningkatkan kesadaran budaya risiko dalam keseharian kerja sehingga menjadi bagian yang terintegrasi dengan praktik bisnis Perusahaan dan pengambilan keputusan;
4. Menjadikan hasil identifikasi, analisis, evaluasi, dan penanganan risiko sebagai dasar pemeriksaan dan pengawasan (risk based audit) dalam rangka peningkatan kinerja dan akuntabilitas;

The execution of Perum Jasa Tirta II's business activities is inextricably linked to various risk exposures that may have an impact on the Company's long-term viability. Perum Jasa Tirta II has an effective Risk Management System as an important component in management to anticipate these risks and ensure the Company is in a healthy, safe, and good condition, so that all business activities can bring the Company to the mission and goals that have been set.

Perum Jasa Tirta II is committed to continuously developing and improving the framework of an integrated and comprehensive risk management system, with the goal of protecting the Company from risks that have a negative impact on the achievement of objectives and exploring opportunities to increase benefits for all stakeholders.

Policy on Risk Management

In order to improve the effectiveness and efficiency of risk management, the Company must implement best risk management practices in all operational activities, both internal and external. All elements of the Company play a role in risk management with their respective risks, so policies that regulate each risk management procedure and mechanism are required to support its success. These policies include:

1. *Implementing integrated risk management in accordance with Good Corporate Governance in order to achieve the Company's Vision, Mission, and Objectives; and*
2. *Making Risk Management the foundation for the preparation of financial statements. a risk-based Corporate Budget Work Plan (RKAP) to achieve the realization of each process effectively and efficiently;*
3. *Increase awareness of risk culture in daily work so that it becomes an integrated part of the Company's business practices and decision making;*
4. *Making the results of identification, analysis, evaluation, and risk management the basis for inspection and supervision (risk based audit) in order to improve performance and accountability;*



5. Menginformasikan, mengelola, dan melakukan pengendalian serta penanganan (mitigasi) risiko secara berkala sebagai dasar upaya perbaikan berkesinambungan dalam penerapan manajemen risiko.

Pengelola Manajemen Risiko

Pengelolaan Manajemen Risiko Perum Jasa Tirta II tertuang dalam Pedoman Manajemen Risiko dan STOK

Bidang Manajemen Risiko Perusahaan

- (1) Bidang Manajemen Risiko Perusahaan melaksanakan tugas pokok dalam kegiatan menyiapkan, mengarahkan dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan yang berlaku di bidang manajemen risiko perusahaan sesuai dengan aturan yang berlaku di Perusahaan
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Manajemen Risiko Perusahaan mempunyai fungsi
 - a. Menyiapkan, mengarahkan dan mengevaluasi pengelolaan risiko, program kerja dan KPI Bidang Manajemen Risiko Perusahaan;
 - b. Menyiapkan, mengarah dan mengevaluasi penyusunan road man manajemen risiko Perusahaan;
 - c. Menyiapkan, mengarahkan dan mengevaluasi penyusunan, reviu, dan melaksanakan sosialisasi aturan pedoman/ prosedur terkait manajemen risiko Perusahaan;
 - d. Menyiapkan, mengarahkan dan mengevaluasi penyusunan kelengkapan dokumen usulan RKAP namun tidak terbatas pada Project Digest, Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) untuk pekerjaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan penyusunan RKAP yang berlaku;
 - e. Menyiapkan, mengarahkan dan mengevaluasi penyusunan rencana paket pengadaan barang/ jasa sesuai batas kewenangan Divisi Rencana Strategi, Manajemen Risiko dan teknologi Informasi Komunikasi;
 - f. Menyiapkan, mengarahkan dan mengevaluasi penyusunan kelengkapan dokumen rencana pengadaan termasuk namun tidak terbatas pada Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga

5. *Informing, managing, and controlling and managing (mitigating) risks on a regular basis as the basis for continuous improvement efforts in the implementation of risk management.*

Risk Management Manager

Perum Jasa Tirta II's Risk Management Management is contained in the Risk Management Guidelines and STOK

Corporate Risk Management

- (1) *Field of Corporate Risk Management carrying out the main duties in the activity prepare, direct, evaluate, and report on applicable activities in areas of enterprise risk management in accordance with the Company's rules*
- (2) *In carrying out the tasks as referred to in paragraph (1), the Company's Risk Management Division has the functions of*
 - a. *Prepare, direct and evaluate risk management, work programs and KPIs for the Company's Risk Management Division;*
 - b. *Prepare, direct and evaluate the preparation of the Company's risk management road man;*
 - c. *Prepare, direct, and evaluate the preparation, review, and socialization of risk management guidelines/procedures for the Company*
 - d. *Prepare, direct, and evaluate the completeness of the RKAP proposal document (including, but not limited to, the Project Digest, Terms of Reference (KAK), and Detailed Budget (RAB)) for consulting services work in accordance with the provisions of the applicable RKAP preparation*
 - e. *Prepare, direct, and evaluate the preparation of the package plan for the procurement of goods/services in accordance with the Division of Strategic Planning, Risk Management, and Information Communication Technology's authority limits;*
 - f. *Prepare, direct, and evaluate the completeness of the procurement plan document, including but not limited to the Terms of Reference (KAK), the Estimated Price Sendin / HPS (Owner*



Perkiraan Sendiri/HPS (*Owner Estimate*) dan Rancangan Kontrak untuk pekerjaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku;

- g. Menyiapkan, mengarahkan dan mengevaluasi penyusunan naskah *Memorandum Of Understanding (MoU)* dan/atau Perjanjian Kerja Sama (PKS) sesuai dengan tugas dan fungsi;
- h. Menganalisis konteks internal dan eksternal Perusahaan;
- i. Menyiapkan, mengarahkan dan mengevaluasi penyusunan ruang lingkup dan kriteria risiko Perusahaan;
- j. Menyiapkan, mengarahkan dan mengevaluasi penyusunan daftar risiko Perusahaan;
- k. Menyiapkan, mengarahkan dan mengevaluasi penyusunan rencana pengendalian dan mitigasi risiko Perusahaan;
- l. Menganalisis risiko investasi perusahaan;
- m. Melaksanakan pemantauan dan tinjauan pengelolaan risiko;
- n. Mengkomunikasikan dan mengkonsultasikan pengelolaan risiko Perusahaan;
- o. Menyiapkan, mengarahkan dan mengevaluasi penyusunan *draft* laporan pengelolaan Perusahaan, risiko Perusahaan;
- p. Melaksanakan *assessment maturity* manajemen risiko;
- q. Mengendalikan bukti kerja pelaksanaan tugas dan fungsi, dan menyiapkan, mengarahkan dan mengevaluasi penyusunan laporan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Estimate), and the *Draft Contract* for the work of consulting services in accordance with the provisions of the current procurement of goods and services;

- g. *Draft, direct, and assess a Memorandum of Understanding (MoU) and/or Cooperation Agreement (PKS) in accordance with the duties and functions;*
- h. *Analyze the Company's internal and external context;*
- i. *Prepare, direct, and evaluate the Company's scope and risk criteria;*
- j. *Prepare, direct, and evaluate the risk register for the company;*
- k. *Prepare, direct, and evaluate the Company's risk control and mitigation plan;*
- l. *Examine the investment risk of the company;*
- m. *Carry out risk management monitoring and review;*
- n. *Communicate with and consult with the Company's risk management team;*
- o. *Prepare, direct, and evaluate the preparation of draft reports on Company management, Company risks;*
- p. *Conduct risk management maturity assessment,*
- q. *Control evidence of work implementation of duties and functions, and prepare, direct, and evaluate the preparation of reports in accordance with the duties and functions.*

Sertifikasi Manajemen Risiko

Sampai dengan akhir tahun 2022 sebanyak 7 karyawan Perum Jasa Tirta II telah memiliki Sertifikasi Manajemen Risiko, 2 karyawan bersertifikat *Certified Risk Management Profesional (CRMP)* dan 5 karyawan bersertifikat *Certified Risk Management Organization*.

Roadmap Manajemen Risiko

Perusahaan telah menetapkan arah pengembangan manajemen risiko dengan mengacu pada roadmap manajemen risiko 2015 – 2021.

Infrastruktur Manajemen Risiko

Penyusunan infrastruktur dan proses manajemen risiko menjadi perangkat bagi Perusahaan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan melaporkan potensi-potensi risiko yang dihadapi

Certification in Risk Management

As of the end of 2022 7 Perum Jasa Tirta II employees already have Risk Management Certification, 2 are certified Risk Management Professionals (CRMP), and 5 are certified Risk Management Organizations. By referring to the 2015–2021 risk management roadmap.

Risk Management Roadmap

the Company has determined the direction of risk management development 2015 – 2021.

Infrastructure for Risk Management

The establishment of risk management infrastructure and processes allows the company to identify, measure, monitor, and report on potential risks encountered in each process. Company matters. This aims to provide



dalam setiap proses bisnis Perusahaan . Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif bagi Perusahaan untuk memetakan potensi peluang maupun kerugian, sehingga proses pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan dapat menimbang serta mengefektifkan setiap kebijakan dan keputusan yang diambil.

Penerapan dan pengembangan manajemen risiko di lingkungan Perum Jasa Tirta II berpedoman pada Peraturan Menteri Negara BUMN PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011, tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara. Adapun proses dan penerapan manajemen risiko Perum Jasa Tirta II dibagi menjadi proses dasar, proses inti, dan proses penunjang.

Proses Dasar

Proses dasar manajemen risiko meliputi kegiatan membangun lingkungan intern yang kondusif untuk berlangsungnya proses risiko berikutnya, serta menyusun konteks untuk menempatkan proses inti manajemen risiko. Dalam mendukung proses dasar tersebut, PJT II telah memiliki aplikasi berbasis web simrisk.jasatirta2.co.id. Adapun dalam implementasi proses dasar, hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain:

- Dalam membangun lingkungan manajemen risiko, Direksi menetapkan kebijakan/pedoman manajemen risiko, membangkitkan dan memelihara budaya sadar risiko melalui sosialisasi kepada risk owner, menyiapkan organisasi/fungsi yang menangani manajemen risiko serta menyediakan sumber daya yang menangani manajemen risiko.
- Dalam penyusunan konteks risiko, Divisi PKRSM dan/atau risk owner menyusun dan mempelajari hubungan/kaitan peristiwa risiko yang mungkin terjadi terhadap sasaran kegiatan rutin maupun kegiatan non rutin (proyek/investasi) sebagai dasar kegiatan identifikasi risiko.
- Risiko kegiatan rutin yang mempunyai kaitan dengan strategi Perusahaan dan perlu pengelolaan secara berlanjut terhadap kemungkinan terjadinya, dampak, serta pengaruhnya bagi kelangsungan usaha Perusahaan untuk kemudian dikelompokkan dalam risiko strategis.
- Risiko kegiatan rutin yang mempunyai kaitan dengan kegiatan tertentu dari operasional tahunan Perusahaan dan pengelolaannya diperlukan sesuai dengan tingkat kualitas nilai risikonya, dikelompokkan dalam risiko operasional.

the Company with a comprehensive picture to map potential opportunities and losses, so that the decision-making process and policy formulation can weigh and make every policy and decision taken effective.

The Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises PER01/MBU/2011 dated August 1, 2011, concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises, guides the implementation and development of risk management within Perum Jasa Tirta II. The risk management process and application at Perum Jasa Tirta II are divided into three parts: basic processes, core processes, and supporting processes.

The Fundamental Procedure

The basic risk management process includes activities to create a conducive internal environment for the next risk process to occur, as well as setting up a context for placing risks. Core risk management processes PJT II has a web-based application simrisk.jasatirta2.co.id to help with this basic process.

- *In developing a risk management environment, the Board of Directors establishes risk management policies/guidelines, generates and maintains a risk-aware culture through socialization to risk owners, prepares organizations/functions that handle risk management, and provides risk management resources.*
- *To prepare the risk context, the PKRSM Division and/or risk owner compiles and studies the relationship/linkage of risk events that may occur to the targets of routine and non-routine activities (projects/investments) as the foundation for risk identification activities.*
- *Strategic risks are routine activity risks that are related to the Company's strategy and must be managed continuously on the possibility of occurrence, impact, and impact on the Company's business continuity.*
- *Routine activity risks are associated with certain activities of the Company's annual operations, and their management is required in accordance with the risk value's quality level, and are classified as operational risk. The Risk Register Document compiles written strategic and operational risks.*



- Risiko strategis maupun risiko operasional secara tertulis dikompilasi dalam Dokumen Register Risiko.
- Konteks risiko digunakan untuk menetapkan level kriteria kualitatif maupun kuantitatif yang dikaitkan dengan tingkat dampak dan kemungkinan terjadinya risiko.

Proses Inti

Proses inti manajemen risiko secara garis besar meliputi kegiatan identifikasi risiko, analisis risiko dan evaluasi risiko, serta tanggapan/tindak lanjut terhadap risiko. Setelah melalui tahap analisis dan evaluasi risiko, Perusahaan menyusun rencana tindakan untuk memitigasi risiko yang nilainya tinggi dengan mengacu pada daftar atau register risiko serta risiko strategis Perusahaan. Rencana tindakan ini digunakan sebagai bahan analisis manfaat dan biaya sebelum manajemen memutuskan memberikan tanggapan/perlakuan terhadap risiko. Berikut adalah proses dan penerapan Manajemen Risiko Perum Jasa Tirta II:

1. Pelaksanaan Identifikasi Risiko

- Identifikasi risiko dilaksanakan dengan mengamati indikasi risiko, sumber dan penyebab terjadinya risiko, jenis kegiatan yang terpengaruh risiko, akibat dan konsekuensi (biaya) bila terjadi risiko tersebut, serta pendokumentasian risiko.
- Indikasi risiko dideteksi dari masalah yang timbul di masa lalu atau selama periode berjalan, baik kasus-kasus internal maupun kasus eksternal yang sejenis, tingkat kerumitan proses suatu kegiatan, adanya perubahan peraturan atau perubahan proses kegiatan, serta opini pakar dan masyarakat.
- Sumber risiko secara garis besar dapat berasal dari risiko lingkungan, risiko proses, dan risiko informasi untuk pengambilan keputusan berdasarkan ISO 31000:2018. Risiko proses dan risiko informasi merupakan risiko internal Perusahaan yang umumnya masih dalam kendali manajemen (*controllable*). Risiko lingkungan sebagian besar berasal dari eksternal yang umumnya bersifat di luar kendali manajemen (*uncontrollable*).

- *The risk context is used to determine the level of qualitative and quantitative criteria associated with the level of impact and risk occurring. Fundamental Procedures Risk identification, risk analysis, and risk evaluation, as well as response/follow-up, are the core processes of risk management.*
- *Strategic risks are routine activity risks that are related to the Company's strategy and must be managed continuously on the possibility of occurrence, impact, and impact on the Company's business continuity.*

Fundamental Procedures

Risk identification, risk analysis, and risk evaluation, as well as response/follow-up, are the core processes of risk management. against risk. Following the risk analysis and evaluation stage, the Company develops an action plan to mitigate high-value risks by consulting the risk register or register of risks as well as the Company's strategic risks. Before management decides to respond to/treat risks, this action plan is used as material for an analysis of benefits and costs. The process and implementation of Perum Jasa Tirta II Risk Management are as follows:

1. Risk Identification Implementation

- *Risk identification is accomplished by observing risk indicators, risk occurrence sources and causes, risk-affected activities, consequences and consequences (costs) if the risk occurs, and risk documentation.*
- *Risk indicators are detected from problems that occurred in the past or during the current period, both Internal and external cases, the level of complexity of an activity's process, changes in regulations or changes in the activity process, as well as expert and community opinions*
- *According to ISO 31000:2018, risk sources for decision making can include environmental risk, process risk, and information risk. Process risk and information risk are internal risks to the company that are generally still under management control (controllable). The majority of environmental risks come from outside sources that are generally beyond management's control (uncontrollable).*



- Risiko yang sifatnya *controllable* dapat disusun action plan-nya secara langsung, sedangkan risiko yang sifatnya *uncontrollable* perlu dilaporkan atau dikoordinasikan dengan pejabat eksternal yang terkait.
- Risiko yang diidentifikasi adalah risiko awal (*risiko inherent*) yang belum ditindaklanjuti dengan action plan.

2. Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko

- Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko digunakan untuk mengetahui tingkat besarnya risiko yang dapat menunjukkan besarnya pengaruh risiko terhadap tujuan Perusahaan, serta untuk menyusun prioritas risiko yang memerlukan perlakuan tertentu.
- Besaran nilai risiko merupakan hasil perkalian antara tingkat kemungkinan terjadinya risiko dengan taksiran besarnya nilai dampak bila peristiwa risiko benar-benar terjadi.
- Nilai risiko dinilai melalui perhitungan Nilai Kemungkinan dan Nilai Dampak. Nilai Kemungkinan yang dimaksud adalah probabilitas dari suatu peristiwa yang terjadi, sedangkan Nilai Dampak adalah penilaian dampak dari risiko yang dapat diukur dari sasaran atau tujuan Perusahaan yang ditetapkan dalam *Key Performance Indicator (KPI)*.

3. Penilaian Tingkat Risiko

- Penilaian risiko ditentukan dengan perkalian antara nilai kemungkinan dan nilai dampak. penilaian tingkat risiko tersebut menentukan bagaimana tindak lanjut penanganan risiko.
- Skala rating untuk kolom kemungkinan terjadinya dan kolom dampak dari peristiwa risiko yang paling kecil dimulai dengan level 1 sedangkan yang paling besar dinilai dengan level 5, karena rumus/notasi risiko adalah nilai dampak dikalikan nilai kemungkinan maka nilai peristiwa risiko berkisar antara 1 sampai dengan 25.
- Pengendalian Risiko

4. Proses pengendalian risiko melibatkan komparasi nilai risiko yang muncul dan analisis proses prioritas dan persyaratan yang ada. Berdasarkan hasil penilaian risiko, maka dilakukan pengendalian risiko sesuai dengan tingkat risiko dan menentukan prioritasnya dengan menggunakan ketentuan sebagai berikut:

- *Controllable risks can be directly prepared for action plans, whereas uncontrollable risks must be reported or coordinated with appropriate external officials.*
- *The identified risk is the inherent risk that has not been followed up on with an action plan.*

2. Risk Assessment and Evaluation

- *Risk Analysis and Risk Evaluation are used to determine the level of risk, which can indicate the magnitude of risk's impact on the Company's objectives, as well as to prioritize risks that require specific treatment.*
- *The magnitude of the risk value is the product of the probability of a risk occurring multiplied by the estimated value of the impact if the risk event occurs.*
- *Risk value is calculated using the Likelihood Value and Impact Value. The Likelihood Value is the likelihood of an event occurring, while the Impact Value is an assessment of the risk's impact based on the Company's goals or objectives as stated in the Key Performance Indicators (KPI).*

3. Risk Assessment

- *The risk level is calculated by multiplying the probability value by the impact value.*
- *The rating scale for the probability column and the impact column for the smallest risk event starts at level 1, while the largest is rated at level 5, because the risk formula/notation is the impact value multiplied by the probability value, and the risk event value ranges from 1 to 25.*

• Risk Management

4. The risk management process entails comparing the value of emerging risks as well as analyzing priority processes and existing requirements. Risk control is carried out based on the results of the risk assessment and determines the priority by using the following provisions:



TINGKAT RISIKO <i>Risk Level</i>	PENGENDALIAN RISIKO <i>Risk Control</i>
Ekstrim/Strategis / <i>Extreme/Strategic</i>	Memerlukan tindakan segera karena sebaran potensi risiko memungkinkan kerugian dan hancurnya Perusahaan. <i>Requires immediate action because the distribution of potential risks allows the loss and collapse of the Company.</i>
Tinggi / <i>High</i>	Memerlukan tindakan cepat (maksimal 3 bulan), karena potensi dampaknya melemahkan organisasi. <i>Requires quick action (maximum 3 months) because the potential impact weakens the organization.</i>
Sedang / <i>Moderate</i>	Memerlukan penanganan dengan rencana tindakan (antara 3 – 6 bulan). Risiko tersebut dapat diterima, namun diperlukan usaha untuk menurunkan kemungkinan munculnya kegagalan proses. <i>Requires treatment with an action plan (between 3 – 6 months). This risk is acceptable, but efforts are needed to reduce the likelihood of process failure.</i>
Rendah / <i>Low</i>	Merupakan batas risiko yang dapat diterima oleh Perusahaan, namun selalu memantau dan mengevaluasi risiko tersebut. <i>Risk limit that is acceptable to the Company, but the Company always monitors and evaluates the risk.</i>
Sangat Rendah / <i>Very Low</i>	Dikaji, dipantau, dan dievaluasi minimal setahun sekali. <i>Is reviewed, monitored, and evaluated at least once a year.</i>

Proses Penunjang

Proses penunjang manajemen risiko meliputi kegiatan pemantauan dan pengkajian ulang (*review*), komunikasi, konsultasi, dan pendokumentasian.

1. Pemantauan & Kaji Ulang (*Monitoring & Review*) Pemantauan terhadap risiko yang berprioritas tinggi harus dievaluasi lebih sering.
2. Pemantauan atas efektivitas implementasi pengelolaan risiko pada unit-unit fungsional organisasi (*risk owner*) harus dilakukan secara mandiri (*self assessment*) oleh pimpinan unit yang bertanggungjawab.
3. Pengkajian ulang risiko meliputi pengkajian perubahan status tingkat dampak dan tingkat kemungkinan terjadinya risiko dikaitkan dengan perubahan kondisi internal dan eksternal, serta perubahan rencana tindakan.
4. Pelaporan *monitoring* dan pengkajian ulang disampaikan kepada Direksi, paling tidak setiap tahun, mencakup efektivitas rencana tindakan, analisa manfaat dan biaya mitigasi, perubahan prioritas risiko, dan posisi nilai total risiko saat ini dibandingkan periode yang lalu.
5. Evaluasi penerapan manajemen risiko Perusahaan dapat dilakukan secara mandiri (*self assessment*) atau oleh pihak eksternal.
6. Evaluasi penerapan manajemen risiko secara mandiri dapat dilakukan dengan menggunakan *check list*, *questionnaire*, atau *flowcharting*.

Supporting Processes

Processes that help Monitoring and review activities, communication, consultation, and documentation are examples of risk management support processes.

1. *Monitoring and Review (Monitoring and Review) High-priority risks should be monitored more frequently.*
2. *The responsible unit leader must independently (self-assess) monitor the effectiveness of risk management implementation in the functional units of the organization (risk owner).*
3. *Changes in the status of the impact level and the level of possibility of the occurrence of risks associated with changes in internal and external conditions, as well as changes in action plans, are assessed as part of the risk assessment.*
4. *Monitoring and review reports covering the effectiveness of the action plan, analysis of the benefits and costs of mitigation, changes in risk priorities, and the position of the current total risk value compared to the previous period are submitted to the Board of Directors at least annually.*
5. *The Company's risk management implementation can be evaluated independently (self-assessment) or by third parties.*
6. *Independent evaluation of risk management implementation can be done using a check list, questionnaire, or flowcharting.*



Komunikasi dan Pelaporan

Penerapan manajemen risiko harus disampaikan kepada karyawan operasional meliputi sosialisasi untuk membangkitkan dan memelihara budaya sadar risiko, meliputi pemahaman secara bertahap, membangkitkan partisipasi pengamatan indikasi risiko serta partisipasi dalam usulan rencana tindakan (*action plan*).

- Komunikasi internal manajemen risiko antar risk owner meliputi kemungkinan terjadinya risiko yang sama, kejadian pengulangan atau risiko baru termasuk rencana tindakannya, perbandingan nilai dampak dari risiko yang sejenis serta pelaporan kepada Atasan atau Direksi untuk memperoleh pertimbangan rencana tindakan dan keputusan perlakuan risiko.
 - Komunikasi internal manajemen risiko kepada Divisi PKRSM dan SPI, meliputi proses inti manajemen risiko, sebagai alat pemantauan dan saran pengembangan manajemen risiko serta bahan pelaksanaan audit berbasis risiko.
 - Komunikasi eksternal manajemen risiko kepada Dewan Pengawas meliputi risiko-risiko strategis dalam daftar prioritas risiko Perusahaan, rencana tindakan serta keputusan perlakuan risiko oleh Direksi.
 - Komunikasi eksternal kepada pemilik modal mencakup perlakuan khusus mengenai risiko strategis, serta rencana tindakan dan perlakuan risiko oleh Direksi, maupun pelaporan manajemen risiko sebagai bagian materi RKAP dan laporan tahunan Perusahaan.
 - Dalam hal keterbukaan informasi penerapan manajemen risiko, Direksi harus memperhatikan komunikasi kepada publik, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Kepada Publik.
3. Konsultasi
- Konsultasi dilakukan untuk membantu unit-unit pemilik risiko, terutama dalam mengidentifikasi dan asesmen risiko.
 - Konsultasi internal dilakukan oleh Divisi PKRSM dan/atau SPI.
 - Untuk pertama kali Perusahaan mendesain sistem manajemen risiko, pelaksanaan self assessment serta pengembangan konsep manajemen risiko lebih lanjut (misalnya audit internal berbasis risiko), konsultasi dapat dilaksanakan oleh konsultan eksternal atau pakar bidang khusus yang terkait.

Reporting and communication

Risk management must be communicated to operational employees, including socialization, in order to generate and maintain a risk-aware culture, which includes gradual understanding, increasing participation in observing risk indicators, and participation in proposed action plans.

- *Internal risk management communication among risk owners includes the possibility of the same risk, recurrence or new risks, as well as the action plan, a comparison of the impact value of similar risks, and reporting to superiors or the Board of Directors to obtain consideration of action plans and risk treatment decisions.*
 - *Internal risk management communication to the PKRSM and SPI Division, covering the core risk management process,*
 - *External risk management communication to the Supervisory Board includes strategic risks in the Company's risk priority list, action plans, and risk treatment decisions by the Board of Directors.*
 - *External risk management communication to capital owners includes special treatment of strategic risks, as well as action plans and risk treatment decisions by the Board of Directors.*
 - *In terms of information disclosure on risk management implementation, the Board of Directors must prioritize public communication in accordance with Law Number 14 of 2009 on Information Disclosure to the Public.*
3. Consultation
- *Consultation is carried out to assist risk owner units, particularly in risk identification and assessment.*
 - *The PKRSM and/or SPI Division conduct internal consultations.*
 - *When the company is designing a risk management system for the first time, conducting self-assessment, and developing additional risk management concepts (e.g. risk-based internal audit), external consultants or specialists in the relevant field can provide consultations.*



4. Pendokumentasian

- Pendokumentasi manajemen risiko dilakukan melalui aplikasi simrisk.jasatirta2.co.id.
- Pendokumentasian manajemen risiko dilaksanakan oleh risk owner dan Divisi PKRSM.
- Risk Owner mendokumentasikan identifikasi risiko di unitnya masing-masing, meliputi uraian indikasi risiko, sumber, penyebab dan akibat risiko serta kertas kerja penetapan kriteria skala rating tingkat kemungkinan, tingkat dampak risiko secara ordinal, dan uraian perhitungan secara nominal.
- Divisi PKRSM mendokumentasikan rekapitulasi risiko, kertas kerja penggabungan dan eliminasi risiko, register risiko, prioritas risiko, keputusan Direksi tentang perlakuan risiko, pelaporan/surat-surat internal dan eksternal yang terkait dengan kegiatan manajemen risiko.

Dalam pengelolaan risiko, terdapat 3 (tiga) komponen yang saling terkait, yaitu prinsip-prinsip manajemen risiko, kerangka kerja manajemen risiko, dan proses pengelolaan risiko.

Kerangka manajemen risiko ini dituangkan dalam kebijakan, prosedur, kewenangan dan ketentuan lain serta berbagai perangkat manajemen risiko yang berlaku di seluruh lingkup aktivitas usaha.

Proses Manajemen Risiko

1. Komunikasi dan Konsultasi

Komunikasi dilakukan untuk membangun kesadaran dan pemahaman terhadap risiko sementara, konsultasi dilakukan untuk mendapatkan umpan balik dari informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan. Metode yang digunakan untuk komunikasi dan konsultasi adalah metode matriks RACI (Responsible, Accountable, Consulted, dan Informed) untuk mendeteksi tingkat keterlibatan para pihak dalam setiap tahap proses manajemen risiko.

2. Ruang Lingkup, Konteks, dan Kriteria

Tujuan penetapan ruang lingkup, konteks, dan kriteria adalah untuk menyesuaikan proses manajemen risiko, mengaktifkan penilaian risiko yang efektif dan perlakuan risiko yang memadai.

- Ruang lingkup manajemen risiko meliputi Regular Objective Direktorat/Divisi/Unit Usaha/ Anak Perusahaan dan Specific Objective/khusus
- Konteks risiko meliputi Konteks Eksternal dan Konteks Internal
- Kriteria risiko disesuaikan dengan konteks risiko

4. Documentation

- Risk management documentation is carried out using the simrisk.jasatirta2.co.id.
- Risk management documentation is completed by the risk owner and the PKRSM Division.
- Risk Owners document risk identification in their respective units, including descriptions of risk indicators, risk sources, causes, and effects, as well as working papers for determining rating scale criteria for likelihood level, risk impact level on an ordinal basis, and a description of nominal calculations.
- The PKRSM Division records risk recapitulation, risk combination and elimination working papers, risk registers, risk priorities, Board of Directors decisions on risk treatment, and internal and external risk management reporting/letters.

Risk management consists of three (three) interconnected components: risk management principles, risk management framework, and risk management processes.

This risk management framework is outlined in policies, procedures, authorities, and other provisions, as well as various risk management tools that are applicable throughout the scope of the project.

Process of Risk Management

1. Consultation and communication

Communication is used to raise risk awareness and understanding, while consultation is used to gather feedback from information needed for decision making. The RACI matrix method (Responsible, Accountable, Consulted, and Informed) is used for communication and consultation to determine the level of involvement of the parties in each stage of the risk management process.

2. Criteria, Scope, and Context

The goal of defining the scope, context, and criteria is to adapt the risk management process, allowing for effective risk assessment and risk treatment.

- The scope of risk management includes the Directorate/Division/Business Unit/Subsidiaries' Regular Objectives as well as Specific Objectives/ Special Objectives.
- The risk context includes both the external and internal contexts.
- The risk criteria are tailored to the risk environment.



3. Asesmen/Penilaian Risiko

Penilaian risiko adalah pendekatan terstruktur untuk mengidentifikasi dan menganalisis ketidakpastian yang ada dalam pencapaian sasaran Perusahaan. Penilaian risiko terdiri dari identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko.

4. Perlakuan Risiko

Perlakuan risiko melibatkan proses berulang meliputi:

- Formulasi dan seleksi opsi-opsi perlakuan risiko;
- Perencanaan dan implementasi perlakuan risiko;
- Penilaian keefektifan perlakuan risiko;
- Pengambilan keputusan apakah risiko tersisa dapat diterima.

5. Pemantauan dan Tinjauan

6. Pemantauan dan tinjauan dilakukan secara periodik secara teratur dalam tahun berjalan minimal per triwulan dan sewaktu-waktu jika diperlukan. Adapun mekanisme pemantauan dan tinjauan dilakukan dengan cara self-assessment, audit internal atau eksternal, *Forum Group Discussion/Executive Briefing*, dan/atau umpan balik dari karyawan dan *stakeholder*

7. Pencatatan dan Pelaporan

8. Mekanisme proses pencatatan dan pelaporan identifikasi, analisis dan evaluasi risiko dilakukan secara berkala menggunakan aplikasi berbasis web yang dapat diakses pada manrisk.jasatirta2.co.id.

3. Risk Evaluation/Assessment

Risk assessment is a systematic approach to identifying and analyzing the uncertainties that may exist in achieving the Company's goals. Risk identification, risk analysis, and risk evaluation are all components of risk assessment.

4. Risk Treatment Risk treatment is an iterative process that includes:

- *Formulating and selecting risk treatment options;*
- *Planning and implementing risk treatment;*
- *Assessing risk treatment effectiveness; and*
- *Deciding whether the remaining risk is acceptable.*

5. Monitoring and Evaluation

6. Monitoring and review are conducted on a regular basis in the current fiscal year, at least quarterly, and at any time if necessary. Self-assessment, internal or external audits, *Forum Group Discussion/Executive Briefing*, and/or feedback from employees and stakeholders are used to carry out the monitoring and review mechanism.

7. Documentation and reporting

8. The mechanism of recording and reporting processes for risk identification, analysis, and evaluation is carried out on a regular basis using a web-based application accessible via manrisk.services.tirta2.co.id.

Register Risiko dan Profil Risiko Strategis Perusahaan

Risk Appetite, Risk Tolerance, dan Key Risk Indicators

• Risk Appetite

Perusahaan hanya mengelola risiko strategis dan risiko tinggi, karena memerlukan tindakan segera, sebaran potensi risiko memungkinkan kerugian, hancurnya Perusahaan, potensi dampaknya melemahkan organisasi. Risiko tersebut dapat dialihkan ke pihak lain.

• Risk Tolerance

Perusahaan menetapkan risk tolerance, yaitu batasan kuantitatif untuk menentukan kelompok risiko yang dapat ditoleransi serta yang tidak dapat ditoleransi. Risiko sedang merupakan batas toleransi risiko yang dapat diterima oleh Perusahaan. Namun diperlukan usaha untuk menurunkan kemungkinan munculnya penyebab kegagalan proses, atau menurunkan potensi dampak kegagalan proses. Memerlukan penanganan dengan rencana tindakan [antara 3 – 6 bulan]. Pengendalian / mitigasi risiko oleh Risk Owner / Kepala Unit Kerja

Risk Register and Company's Strategic Risk Profile

Risk Appetite, Risk Tolerance, and Key Risk Indicators

• Appetite for Risk

Because it requires immediate action, the company only manages strategic and high risks. The spread of potential risks allows loss and destruction of the company, the potential impact of which weakens the organization. The risk can be passed on to a third party.

• Tolerance for Risk

The company determines risk tolerance, which is a quantitative limit that determines which risk groups can and cannot be tolerated. The risk tolerance limit that the Company can accept is moderate risk. However, efforts must be made to reduce the likelihood of the emergence of process failure causes or the potential impact of process failure. Treatment with an action plan is required [between 3 and 6 months]. Risk management/mitigation is the responsibility of the Risk Owner/Head of Work Units.

Key Risk Indicator adalah indikator risiko utama Perusahaan yang dipilih dan dipantau sebagai pemberitahuan dini terhadap adanya perubahan yang dapat menimbulkan risiko bagi Perusahaan.

Profil Risiko

Profil Risiko adalah gambaran mengenai risiko utama yang ada dalam aktivitas perusahaan yang bertujuan untuk menginformasikan risiko-risiko yang melekat (*inherent risk*) pada setiap aktivitas Perusahaan dan *system control* terhadap risiko -risiko tersebut (*risk control system*).

Peta Risiko

Peta risiko (*risk map*) adalah teknik untuk memperagakan dan menyusun tingkat risiko dengan menggambarkannya pada sumbu dampak dan kemungkinan.

Peta Risiko Utama Perusahaan tahun 2022 tertuang seperti gambar di bawah.

- *Important Risk Indicators Key*

Risk Indicators are the Company's primary risk indicators, which are chosen and monitored to provide early warning of any changes that may pose a risk to the Company.

Profile of Risk

The Risk Profile is a description of the main risks in the company's activities that aims to inform the inherent risks in each of the Company's activities as well as the risk control system (risk control system).

Risk Mapping

A risk map is a method of displaying and compiling risk levels by depicting them on the impact and likelihood axes.

The image below depicts the Company's Main Risk Map for 2022.

KORPORATE PERUSAHAAN						Pilih Parameter Risiko		2022		
TINGKAT KEMUNGKINAN	Sangat Besar	Besar	Sedang	Kecil	Sangat Kecil	1	2	3	4	5
	5	4	3	2	1	E	D	C	B	A
	5	10	15	20	20					
	4	8	12	16	20					
	3	6	9	12	15	1 Risiko				
	2	4	6	8	10	2 Risiko				
1	2	3	4	5						
						1	2	3	4	5



Analisis Risiko

Tujuan dari analisis risiko adalah memahami sifat, perilaku risiko dan peringkat risiko. Analisis risiko adalah proses untuk memahami sifat risiko dan untuk menentukan peringkat risiko, analisis risiko merupakan dasar untuk evaluasi risiko dan landasan keputusan perlakuan risiko. Analisis risiko untuk menentukan nilai Kemungkinan (K) / Probabilitas dan nilai Dampak (D).

Risk Assessment

The goal of risk analysis is to comprehend the nature, behavior, and rating of risk. Risk analysis is a process for understanding the nature of risk and ranking risk; it serves as the foundation for risk evaluation and risk treatment decisions. The risk analyst will calculate the Likelihood (K) / Probability value and the Impact (D) value.



Hasil Penanganan Risiko Utama Key Risk Handling Results





Berdasarkan Rencana Strategis di atas, aktivitas kegiatan yang akan dilakukan di tahun 2022, antara lain:

- a. Memperkuat infrastruktur manajemen risiko, yaitu:
 - Merevisi dan menyelaraskan Pedoman Manajemen Risiko dengan kebijakan Pemilik Modal dan peraturan yang berlaku;
 - Merevisi Prosedur Pengelolaan Risiko dan Peluang Perusahaan;
 - Mengintegrasikan Sistim Manajemen Risiko ISO 31000:2018, Sistim Manajemen Mutu ISO 9001:2015, Sistim Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016, Sistim Manajemen K3 dan ISO 17025 dalam proses asesmen risiko.
 - Upgrading Sistim Informasi Manajemen Risiko (SIMRisk.jasatirta2.co.id), mempertimbangkan risk appetite, tolerance, probability, impact didefinisikan dan diukur secara jelas dan konsisten. Analisis biaya dan manfaat dengan tujuan memanfaatkan peluang untuk meningkatkan nilai Perusahaan, (integrasi SMAP, SMK3, SMM, ISO 17025)

- b. Sertifikasi Kompetensi Manajemen Risiko sebanyak 14 karyawan, yaitu; 3 karyawan Certified Risk Management Professional (CRMP/BNSP), 10 karyawan Certified Risk Management Officer (CRMO/BNSP) dan 1 karyawan Enterprise Risk Management Certified Profesional/Enterprise Risk Management Associated Profesional (ERMCP/ERMAP/Internasional).

- c. Executive Briefing, Focus Group Discussion, Sosialisasi dan Workshop Manajemen Risiko.

- d. Mempertahankan Nilai Tingkat Kematangan Manajemen Risiko pada Level Baik (Level 4 Terkelola secara Kuantitatif, skor 62,50 – 87,49).

- e. Konsolidasi dengan PT Danareksa (Persero) selaku Champion Klaster BUMN.

Berdasarkan Rencana Strategis pada Tabel III. di atas, Perusahaan telah melaksanakan Manajemen Risiko sesuai dengan Rencana Kerja tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

1. Update Register Risiko Unit Kerja dan Risiko Utama Perusahaan Tahun 2022. Kegiatan ini dilakukan secara bertahap dengan seluruh unit kerja secara online dan offline, dengan pembahasan identifikasi, analisis, evaluasi risiko dan rencana pengendalian/mitigasi risiko unit kerja dan Perusahaan melalui RKAP;
2. Revisi Prosedur 56 tentang Pengelolaan Risiko dan Peluang Perusahaan dan Pedoman Manajemen Risiko sesuai dengan Pedoman Strategis Manajemen Risiko Holding Danareksa;

According to the Strategic Plan, the following activities will be carried out in 2022:

- a. Strengthening risk management infrastructure, specifically:

- Revising and aligning Risk Management Guidelines with Capital Owner policies and regulations;
- Revision of the Company's Risk and Opportunity Management Procedures;
- Incorporation of the ISO 31000:2018 Risk Management System, ISO 9001:2015 Quality Management System, ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System, OHS Management System, and ISO 17025 into the risk assessment process.
- Improving the Risk Management Information System (SIMRisk.jasatirta2.co.id), so that risk appetite, tolerance, probability, and impact are clearly and consistently defined and measured. Analysis of costs and benefits with the goal of capitalizing on opportunities to increase the Company's value (integration of SMAP, SMK3, QMS, ISO 17025)

- b. Risk Management Competency Certification for 14 employees, including 3 Certified Risk Management Professionals (CRMP/BNSP), 10 Certified Risk Management Officers (CRMO/BNSP), and 1 Enterprise Risk Management Certified Professional/Enterprise Risk Management Associated Professional (ERMCP/ERMAP/International).

- c. Executive Briefing, Focus Group Discussion, Socialization, and Risk Management Workshop

- d. Maintaining a good level of risk management maturity (Level 4 Quantitatively Managed, score 62.50 – 87.49).

- e. Consolidation with PT Danareksa (Persero) as the BUMN Cluster Champion. The Company has implemented Risk Management in accordance with the 2022 Work Plan, based on the Strategic Plan in Table III. above, with the following details:

1. Update the Work Units' Risk Register and the Company's Main Risks for 2022. This activity is carried out in stages with all work units both online and offline, beginning with a discussion of risk identification, analysis, evaluation, and risk control/mitigation plans for work units and companies via RKAP.
2. Revision of Procedure 56 concerning the Management of Company Risks and Opportunities, as well as Risk Management Guidelines, in accordance with Danareksa Holdings' Strategic Risk Management Guidelines;



3. Forum Diskusi Manajemen Risiko / *Risk Officer*, dengan mengikuti *Kick Off Monitoring* Penerapan Manajemen Risiko anggota *Holding Danareksa*, diskusi dengan Tim Teknis *Holding Danareksa* dan mengikuti *International Conference on Contemporary Risk Studies (ICONIC-RS)* dengan tema *Analysis of Risk Management and Corporate Governance to Corporate Performance* di Universitas Pertamina;
4. Melakukan Sosialisasi Manajemen Risiko yang diikuti oleh seluruh Unit Kerja di Perum Jasa Tirta II secara *online* melalui *media zoom meeting*.
5. Melakukan Asesmen Tingkat Kematangan dan Efektivitas Manajemen Risiko tahun 2022.
6. Melaksanakan *Executive Briefing Governance and Risk Management* untuk meningkatkan kompetensi di bidang Manajemen Risiko yang diikuti oleh seluruh Unit Kerja.
7. Penyusunan Road Map Manajemen Risiko 2021 - 2024
8. Melakukan monitoring pengendalian/ mitigasi risiko unit kerja menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMRisk <http://simrisk.pjt2.co.id/>) dan rapat *Monitoring Pengendalian Mitigasi Risiko* dengan Komite Pemantau Manajemen Risiko (KPMR) yang dilakukan sekali setiap bulan.

3. *Risk Management Discussion Forum / Risk Officer, by participating in the Kick Off Monitoring of Risk Management Implementation for Danareksa Holding members, discussions with the Danareksa Holding Technical Team, and participation in the International Conference on Contemporary Risk Studies (ICONIC-RS) at Pertamina University with the theme Analysis of Risk Management and Corporate Governance to Corporate Performance;*
4. *Conducting Risk Management Socialization, which was attended online by all Work Units at Perum Jasa Tirta II via a media zoom meeting.*
5. *Assessing Risk Management Maturity and Effectiveness in 2022*
6. *Conducting an Executive Briefing on Governance and Risk Management to improve risk management competence, which is attended by all Work Units.*
7. *Development of a Risk Management Road Map for the Years 2021-2024*
8. *Monitoring work unit risk control/mitigation with the Risk Management Information System application (SIMRisk <http://simrisk.pjt2.co.id/>) and Risk Mitigation Control Monitoring meetings with the Monitoring Committee Risk Management (KPMR) once a month.*

Laporan Implementasi Manajemen Risiko Tahun 2022

Selama tahun 2022 Perusahaan telah melaksanakan Manajemen Risiko sesuai dengan Pedoman, Prosedur, Kebijakan manajemen risiko dan Roadmap Manajemen Risiko dengan kegiatan (dokumentasi kegiatan terlampir), antara lain:

1. Memperkuat infrastruktur manajemen risiko, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Revisi Pedoman Manajemen Risiko, Prosedur Pengelolaan dan Peluang Perusahaan sesuai dengan Pedoman Strategis Manajemen Risiko Holding Danareksa;
 - b. Menetapkan Piagam Manajemen Risiko sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-5/MBU/09/2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada BUMN;
2. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bidang Manajemen Risiko dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. *In House Training* Manajemen Risiko secara on-

Risk Management Implementation Report 2022

During 2022 the Company has implemented Risk Management in accordance with Guidelines, Procedures, Risk Management Policies and Risk Management Roadmap with activities (documentation of activities is attached), among others:

1. *Strengthening risk management infrastructure, with details as follows:*
 - a. *Revision of Risk Management Guidelines, Management Procedures and Corporate Opportunities in accordance with the Holding Danareksa Risk Management Strategic Guidelines;*
 - b. *Establish a Risk Management Charter in accordance with the Regulation of the Minister of SOEs Number PER-5/MBU/09/2022 on the Implementation of Risk Management in SOEs;*
2. *Increase the capacity of Human Resources (HR) in the field of Risk Management by carrying out the following activities:*
 - a. *Online and offline Risk Management In House*



- line dan offline dengan peserta 159 karyawan;
 - b. Sertifikasi Manajemen Risiko : CERG, ERMCP, QRMP dan QRMO;
 - c. Master Class Governance Risk and Compliance.
3. Integrasi Manajemen Risiko dengan proses bisnis Perusahaan yaitu dengan membangun aplikasi E-GRC, yang merupakan integrasi antara *Key Performance Indicators (KPI)*, ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu, ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), Sistem Manajemen Keselamatan Keselamatan Kerja (SMK3), ISO 17025:2017 Standar Pengujian dan Kalibrasi Laboratorium;
4. Memperkuat komitmen kepemimpinan dan membangun serta meningkatkan awareness/budaya sadar risiko dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. Kegiatan monitoring manajemen risiko Komite Pemantau Risiko setiap bulan;
 - b. Penyampaian laporan implementasi manajemen risiko dari Direksi kepada Dewan setiap triwulan;
 - c. Sosialisasi Manajemen Risiko;
 - d. Focus Group Discussion Manajemen Risiko;
 - e. Seminar Internasional Manajemen Risiko.
5. Banding kaji implementasi *Governance, Risk, and Compliance (GRC)* ke PT. Nindya Karya dalam rangka sinergi dan penguatan implementasi GRC pada Holding Danareksa;
6. Penilaian tingkat kematangan manajemen risiko oleh PT RAP Asia Consulting dengan skor *Risk Maturity Level (RML)* 4,43 (*Managed*), dengan rincian penilaian sebagai berikut:

- Training with 159 employees as participants;*
 - b. Risk Management Certification: CERG, ERMCP, QRMP and QRMO;*
 - c. Master Class Governance Risk and Compliance.*
3. *Integration of Risk Management with the Company's business processes by building the E-GRC application, which is an integration of Key Performance Indicators (KPI), ISO 9001: 2015 Quality Management System, ISO 37001: 2016 Anti-Bribery Management System (SMAP), Occupational Safety Health Management System (SMK3), ISO 17025: 2017 Laboratory Testing and Calibration Standards;*
4. *Strengthening leadership commitment and building a risk awareness/conscious culture by carrying out the following activities:*
- a. Risk Monitoring Committee risk management monitoring activities every month;*
 - b. Submission of risk management implementation reports from the Board of Directors to the Board of Directors on a quarterly basis;*
 - c. Risk management socialisation;*
 - d. Risk Management Focus Group Discussion;*
 - e. International Seminar on Risk Management.*
5. *Appeal review of Governance, Risk, and Compliance (GRC) implementation to PT Nindya Karya in order to synergise and strengthen GRC implementation at Holding Danareksa;*
6. *Risk management maturity level assessment by PT RAP Asia Consulting with a Risk Maturity Level (RML) score of 4.43 (Managed), with assessment details as follows:*

NO.	ATRIBUT / Attributes	SKOR/ATRIBUT / Scores/Attributes
1.	Pendekatan ERM / ERM Approach	4,47
2.	Proses RTM / RTM Process	4,48
3.	Manajemen delera Risiko / Risk delera management	4,48
4.	Disiplin Akar Masalah / Root Cause Discipline	4,46
5.	Pengungkapan Risiko / Risk Disclosure	4,48
6.	Manajemen Kinerja / Performance Management	4,30
7.	Ketahan dan Kelangsungan / Resilience and Sustainability	4,35
Risk Maturity Level/Index / Risk Maturity Level/Index		4,43



Pemberian Dana Sosial dan Kegiatan Politik

Perusahaan berkomitmen untuk memenuhi tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Perusahaan memiliki keyakinan kuat bahwa sinergi antara kegiatan CSR dan kinerja bisnis berperan penting untuk mencapai pertumbuhan yang berkesinambungan. Dalam pelaksanaan CSR Perusahaan berpedoman kepada Keputusan Direksi tentang Pengelolaan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (*Corporate Social Responsibility*) dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dalam RPB untuk penggunaannya.

Sedangkan untuk pemberian dana kegiatan politik, selama tahun 2022 Perum Jasa Tirta II tidak melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik atau kepada partai politik.

Perkara Penting

Selama Tahun 2022 Perusahaan menghadapi sejumlah perkara penting berupa permasalahan hukum perdata dan pidana yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) dan yang masih dalam proses penyelesaian dengan rincian sebagai berikut,

NO.	PERMASALAHAN HUKUM / Legal Problems	JUMLAH PERKARA / Number Of Cases
1.	Status Terbuka / Status Open	4
2.	Status Tertutup / Status Closed	11

Permasalahan Hukum

Perum Jasa Tirta II terus berupaya dalam menjalankan kegiatan usaha yang berprinsip pada kepatuhan dan prinsip korporasi yang sehat guna menghindari potensi atau dampak negatif terlibat dalam perkara hukum. Selama tahun 2022, Perusahaan terlibat perkara hukum, baik yang bersifat perdata maupun pidana.

Permasalahan Hukum Dewan Pengawas dan Direksi

Selama tahun 2022, Dewan Pengawas dan Direksi tidak terlibat atau menghadapi gugatan atau perkara hukum di lembaga peradilan dan/atau badan arbitrase mana pun.

Political Activities and the Provision of Social Funds

The Company is dedicated to meeting its social responsibilities to the community and the environment. The Company is convinced that the synergy between CSR activities and business performance is critical to achieving long-term growth. The Company follows the Decision of the Board of Directors regarding the Management of Corporate Social Responsibility (CSR) activities in implementing CSR by first obtaining approval in the RPB for its use.

As for the provision of funds for political activities, during 2022 Perum Jasa Tirta II does not provide funds for political activities or to political parties.

Cases of Importance

During 2022, the Company faced a number of significant cases in the form of civil and criminal law issues that have been resolved (have permanent legal force) or are still being resolved, as detailed below.

Legal Concerns

Perum Jasa Tirta II continues to strive to conduct business in accordance with compliance and sound corporate principles in order to avoid the potential or negative impact of being involved in legal cases. During 2022, the Company was involved in both civil and criminal legal cases.

Legal Concerns for the Supervisory Board and Board of Directors

Neither the Supervisory Board nor the Board of Directors were involved in or faced any lawsuits or legal cases in any judicial institution and/or arbitration body in 2022.



Permasalahan Hukum

Perum Jasa Tirta II terus berupaya dalam menjalankan kegiatan usaha yang berprinsip pada kepatuhan dan prinsip korporasi yang sehat guna menghindari potensi atau dampak negatif terlibat dalam perkara hukum. Selama tahun 2022, Perusahaan terlibat perkara hukum, baik yang bersifat perdata maupun pidana.

Permasalahan Hukum Dewan Pengawas dan Direksi

Selama tahun 2022, Dewan Pengawas dan Direksi tidak terlibat atau menghadapi gugatan atau perkara hukum di lembaga peradilan dan/atau badan arbitrase mana pun.

Perkara Hukum di Entitas Anak/ Patungan

Selama tahun 2022, tidak ada perkara hukum yang dihadapi oleh Entitas Anak/Patungan maupun terkait dengan Dewan Pengawas dan Direksi Entitas Anak.

Sanksi Administratif

Selama tahun 2022, tidak terdapat sanksi administratif yang dijatuhkan kepada Perum Jasa Tirta II, Dewan Pengawas, ataupun Direksi yang sedang menjabat oleh regulator dan pihak berwenang lainnya.

Dampak Permasalahan Hukum terhadap Perusahaan

Beberapa dampak yang mungkin timbul yaitu sebagai berikut:

- Risiko Hukum yaitu resiko yang timbul akibat adanya tuntutan hukum yang dapat merugikan Perusahaan;
- Risiko Reputasi, yang dapat menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat atau pihak luar akan berkurang akibat adanya persepsi negatif terhadap Perusahaan;
- Potensi Kerugian berupa kerugian finansial akibat adanya permasalahan/perkara hukum tersebut;

Perkara Penting yang Dihadapi Entitas Anak

Hingga tanggal 31 Desember 2022 Perum Jasa Tirta II tidak memiliki entitas anak, sehingga tidak terapat informasi mengenai perkara penting yang dihadapi oleh entitas anak.

Perkara Penting yang Dihadapi Dewan Pengawas dan Direksi

Selama tahun 2022 tidak terdapat perkara penting apapun yang sedang dihadapi oleh Dewan Pengawas dan Direksi Perum Jasa Tirta II.

Subsidiary/Joint Entity Legal Cases

Perum Jasa Tirta II continues to strive in carrying out business activities that are based on compliance and sound corporate principles in order to avoid the potential or negative impact of being involved in legal cases. During 2022, the Company was involved in legal cases, both civil and criminal in nature.

Administrative Penalties

The regulator and other authorities imposed no administrative sanctions on Perum Jasa Tirta II, the Supervisory Board, or the Board of Directors who are currently serving in 2022.

Legal Issues' Impact on the Company

During the year, there were no legal cases faced by the Subsidiaries/Foundations or related to the Supervisory Board and Directors of the Subsidiaries.

Administrative Sanctions

During 2022, there were no administrative sanctions imposed on Perum Jasa Tirta II, the Supervisory Board, or the incumbent Directors by regulators and other authorities.

Impact of Legal Issues on the Company

The following are some of the potential consequences:

- Legal Risk is the risk posed by a lawsuit that could harm the Company;
- Reputational Risk, which can cause the level of public trust or outside parties to be reduced due to negative perceptions of the Company;
- Potential Losses in the form of financial losses due to the problem/legal case;

Important Cases Facing Subsidiaries

As of December 31, 2022, Perum Jasa Tirta II does not have any subsidiaries, so there is no information regarding important cases faced by subsidiaries.

Important Cases Facing the Supervisory Board and the Board of Directors

During 2022 there were no important cases being faced by the Supervisory Board and the Board of Directors of Perum Jasa Tirta II.



Perkara Hukum di Entitas Anak/ Patungan

Selama tahun 2022, tidak ada perkara hukum yang dihadapi oleh Entitas Anak/Patungan maupun terkait dengan Dewan Pengawas dan Direksi Entitas Anak.

Sanksi Administratif

Selama tahun 2022, tidak terdapat sanksi administratif yang dijatuhkan kepada Perum Jasa Tirta II, Dewan Pengawas, ataupun Direksi yang sedang menjabat oleh regulator dan pihak berwenang lainnya.

Dampak Permasalahan Hukum terhadap Perusahaan

Beberapa dampak yang mungkin timbul yaitu sebagai berikut:

- Risiko Hukum yaitu resiko yang timbul akibat adanya tuntutan hukum yang dapat merugikan Perusahaan;
- Risiko Reputasi, yang dapat menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat atau pihak luar akan berkurang akibat adanya persepsi negatif terhadap Perusahaan;
- Potensi Kerugian berupa kerugian finansial akibat adanya permasalahan/perkara hukum tersebut;

Perkara Penting yang Dihadapi Entitas Anak

Hingga tanggal 31 Desember 2022 Perum Jasa Tirta II tidak memiliki entitas anak, sehingga tidak terapat informasi mengenai perkara penting yang dihadapi oleh entitas anak.

Perkara Penting yang Dihadapi Dewan Pengawas dan Direksi

Selama tahun 2022 tidak terdapat perkara penting apapun yang sedang dihadapi oleh Dewan Pengawas dan Direksi Perum Jasa Tirta II.

Pengungkapan Sanksi Administrasi dari Regulator

Selama periode tahun 2021, tidak terdapat sanksi administratif material yang mempengaruhi kelangsungan usaha Perum Jasa Tirta II dan tidak terdapat sanksi administratif yang dikenakan kepada Dewan Pengawas dan Direksi.

Disclosure of Administrative Sanctions from Regulators

During the 2022 period, there were no material administrative sanctions affecting the business continuity of Perum Jasa Tirta II and no administrative sanctions imposed on the Supervisory Board and the Board of Directors.

Administrative Sanctions

During 2022, there were no administrative sanctions imposed on Perum Jasa Tirta II, the Supervisory Board, or the incumbent Directors by regulators and other authorities.

Impact of Legal Issues on the Company

Some of the impacts that may arise are as follows:

- Legal Risk, which is the risk arising from lawsuits that can harm the Company;*
- Reputational Risk, which may cause the level of public trust or external parties to be reduced due to negative perceptions of the Company;*
- Potential Loss in the form of financial loss due to the legal issues/cases;*

Important Cases Faced by Subsidiaries

As of 31 December 2022 Perum Jasa Tirta II does not have subsidiaries, so there is no information regarding important cases faced by subsidiaries.

Important Cases Faced by the Supervisory Board and Board of Directors

During 2022 there were no important cases faced by the Supervisory Board and Board of Directors of Perum Jasa Tirta II.

Disclosure of Administrative Sanctions from Regulators

During 2021, there were no material administrative sanctions affecting the business continuity of Perum Jasa Tirta II and there were no administrative sanctions imposed on the Supervisory Board and the Board of Directors.



Pengelolaan Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan adalah suatu keadaan di mana terdapat konflik antara kepentingan ekonomi Perusahaan dengan kepentingan ekonomi pribadi Direksi, Dewan Pengawas, dan Pemilik Modal. Selama tahun 2022, tidak terdapat transaksi yang memiliki benturan kepentingan di Perum Jasa Tirta II. Setiap transaksi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan selalu memperhatikan prinsip-prinsip GCG. Setiap individu berkewajiban untuk mendahulukan kepentingan Perusahaan dan menghindari timbulnya benturan kepentingan dalam berbagai bentuk dengan Perusahaan. Dengan demikian, Perum Jasa Tirta II mengharuskan setiap individu untuk:

1. Tidak diperkenankan untuk memegang jabatan rangkap apa pun di luar Perusahaan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan bisnis dengan Perusahaan, kecuali dalam hubungannya dengan koperasi karyawan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Tidak diperkenankan untuk melakukan ikatan bisnis secara pribadi maupun melibatkan keluarga, dengan pihak lain yang dapat menimbulkan keluarga, dengan pihak lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan bisnis dengan Perusahaan;
3. Memahami dan menaati Peraturan Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II.

Management of Conflict of Interest

Conflict of interest is a situation where there is a conflict between the Company's economic interests and the personal economic interests of the Directors, Supervisory Board, and Capital Owners. During 2022, there were no transactions that had a conflict of interest in Perum Jasa Tirta II. Every transaction is carried out in accordance with applicable regulations and always pays attention to GCG principles. Each individual is obliged to prioritise the interests of the Company and avoid conflicts of interest in various forms with the Company. Thus, Perum Jasa Tirta II requires each individual to:

1. *Not allowed to hold any concurrent position outside the Company that may lead to a conflict of business interest with the Company, except in relation to employee cooperatives as stipulated in the prevailing laws and regulations;*
2. *Not allowed to conduct business ties personally or involving family, with other parties that can cause family, with other parties that can cause conflicts of business interests with the Company;*
3. *Understand and comply with the Conflict of Interest Handling Regulations within the Public Company (Perum) Jasa Tirta II.*



KODE ETIK PERUSAHAAN

Code Of Conduct

Perum Jasa Tirta II menempatkan keseragaman etika dan perilaku sebagai bagian tak terpisahkan dalam menunjang integritas dan akuntabilitas dalam setiap individu Perusahaan. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi komitmen atas terciptanya *best practices* GCG dan mendukung keberlangsungan usaha jangka panjang. Untuk itu, Perum Jasa Tirta II telah mempunyai Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) yang dijadikan pedoman dan berlaku bagi seluruh insan Perum Jasa Tirta II mulai dari Dewan Pengawas, Direksi serta seluruh karyawan Perum Jasa Tirta II dalam bekerja dan berinteraksi segenap Pemilik Modal Perusahaan.

Dengan mengacu pada Budaya Perusahaan “Air Untuk Menghidupi Negeri”, segenap insan Perum Jasa Tirta II berkomitmen menerapkan Kode Etik (*Code of Conduct*) secara konsisten selama menjalankan kegiatan usaha serta senantiasa mendukung terlaksananya GCG yang pada akhirnya akan meningkatkan citra Perusahaan (*corporate image*) bagi seluruh pemangku kepentingan.

Isi/Pokok Kode Etik

Pedoman Etik Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) Perum Jasa Tirta II memuat nilai-nilai etika dan tata perilaku sebagai suatu standar beretika dan berperilaku bagi insan Perum Jasa Tirta II yang meliputi:

- Standar Etika Usaha dalam mengatur interaksi Perusahaan dengan karyawan, pelanggan, penyedia barang dan jasa, mitra kerja, pemerintah, auditor, masyarakat, mitra binaan dan lingkungan, Serikat Pekerja, Organisasi Profesi, serta Perguruan Tinggi.
- Standar Tata Perilaku dalam mengatur sikap individu, etika kerja sama insan Perum Jasa Tirta II dengan Perusahaan, etika kerja sesama insan Perum Jasa Tirta II, perilaku sebagai atasan, perilaku sebagai bawahan, menjaga kerahasiaan data dan informasi Perusahaan, menjaga aset Perusahaan, menjaga keselamatan dan kesehatan kerja (K3), mencatat data dan pelaporan, menghindari benturan kepentingan dan penyalahgunaan jabatan, kegiatan berpolitik, hadiah, cendera mata, donasi, komisi dan suap, dan penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang (narkoba) dan minuman keras.

Uniformity of ethics and behavior, according to Perum Jasa Tirta II, is an inseparable part of supporting integrity and accountability in every individual in the Company. This is to fulfill the commitment to develop GCG best practices and to support long-term business sustainability. As a result, Perum Jasa Tirta II has a Code of Conduct that serves as a guide for all personnel of Perum Jasa Tirta II, beginning with the Supervisory Board, the Board of Directors, and all employees of Perum Jasa Tirta II in working and interacting with all employees.

Company Capital's owner. Referring to the Corporate Culture of “Water to Live the Nation,” all personnel of Perum Jasa Tirta II are committed to consistently implementing the Code of Conduct during business activities and always supporting the implementation of GCG, which will ultimately improve the Company's image (corporate image) in the community.

Code of Ethics Guidelines

The Perum Jasa Tirta II Code of Ethics Guidelines for Business Ethics and Code of Conduct contains ethical values and a code of conduct as a standard of ethics and behavior for Perum Jasa Tirta II personnel, which include:

- *Standards of Business Ethics in regulating interactions between companies and their employees, customers, suppliers of goods and services, business partners, government, auditors, communities, fostered partners, and the environment, labor unions, professional organizations, and universities.*
- *Standards of Conduct in regulating individual attitudes, ethics of cooperation between Perum Jasa Tirta II personnel and the Company, work ethics among Perum Jasa Tirta II personnel, behavior as superiors, behavior as subordinates, maintaining confidentiality of Company data and information, safeguarding Company assets, maintaining safety and occupational health (K3), recording data and reporting, avoiding conflicts of interest and abuse of office, political activities, gifts, souvenirs, donations, commissions and bribes, and abuse of narcotics and illegal drugs (drugs) and liquor.*



- Penerapan dan Penegakan Standar Etika Usaha dan Tata Perilaku mengatur tentang organisasi, penegakan etika usaha dan tata perilaku, sanksi pelanggaran etika usaha dan tata perilaku, sosialisasi dan interaksi, serta mekanisme pembaruan/revisi etika usaha dan tata perilaku.

- *Standards of Business Ethics and Code of Conduct Implementation and Enforcement regulates organization, enforcement of business ethics and code of conduct, sanctions for violations of business ethics and code of conduct, socialization and interaction, and mechanisms for updating/revising business ethics and code of conduct.*

Maksud, Tujuan dan Manfaat

Maksud penerapan *Code of Conduct* bagi Perusahaan yaitu:

Setiap insan Perum Jasa Tirta II memahami bahwa segala aktivitas Perusahaan berlandaskan pada prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik;

- Membentuk karakter insan Perum Jasa Tirta II yang disiplin dan beretika dalam bergaul dengan sesama dalam Perusahaan maupun dengan pihak lain di luar Perusahaan;
- Menjadi acuan perilaku bagi individu dalam Perusahaan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing dan berinteraksi dengan stakeholders Perusahaan;
- Menciptakan suasana kerja yang sehat dan nyaman dalam lingkungan Perusahaan;
- Sebagai pedoman yang mengatur, mengawasi sekaligus mencegah penyalahgunaan wewenang dan jabatan setiap individu dalam Perusahaan;
- Meminimalisasi peluang terjadinya penyimpangan atau merupakan bagian dari Sistem Pengendalian Internal yang tepat sehingga dapat membantu Direksi dalam mengelola bisnis Perusahaan secara efisien, efektif, dan ekonomis (3E).

Purpose, Goals, and Benefits

The goal of implementing the Code of Conduct for the Company is to ensure that every employee of Perum Jasa Tirta II understands that all of the Company's activities are based on the principles of Good Corporate Governance;

- *Creating a character for Perum Jasa Tirta II personnel who are disciplined and ethical in their interactions with others within the Company and with other parties outside the Company;*
- *Become a behavioral reference for individuals within the Company to carry out their respective duties and responsibilities and interact with the Company's stakeholders;*
- *Creating a healthy and comfortable working environment within the Company's environment;*
- *As a guideline that regulates, supervises, and prevents the abuse of authority and position of each individual in the Company;*
- *Reduce the likelihood of a deviation or component of a proper internal control system occurring so that the Board of Directors can assist in managing the Company's business in an efficient, effective, and economical manner.(3E).*

Adapun tujuan penerapan *Code of Conduct* bagi Perusahaan adalah sebagai berikut:

- Sebagai komitmen bersama untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Perusahaan secara profesional dan beretika dengan memperhatikan seluruh *stakeholders*, sehingga akhirnya pada akhirnya akan terwujud standar kerja yang maksimal bagi seluruh individu dan dengan tetap berpedoman kepada aturan yang berlaku di Perusahaan;
- Sebagai panduan perilaku bagi seluruh insan Perum Jasa Tirta II yang harus dipatuhi dalam melaksanakan segala aktivitas Perusahaan;
- Sebagai pegangan untuk menghindari benturan kepentingan maupun litigasi akibat kelalaian yang dilakukan oleh insan Perum Jasa Tirta II dalam melaksanakan segala aktivitas Perusahaan.

The following are the goals of implementing the *Code of Conduct* for the Company:

- *As a shared commitment to realize the vision and carry out the Company's mission in a professional and ethical manner by paying attention to all stakeholders, so that in the end, maximum work standards for all individuals are realized, and by adhering to the guidelines for the Code of Conduct's implementation.*
- *As a behavioral guide for all Perum Jasa Tirta II personnel that must be followed in carrying out all Company activities;*
- *As a guide to avoid conflicts of interest or litigation caused by Perum Jasa Tirta II personnel's negligence in carrying out all Company activities.*



Pedoman Perilaku Perum Jasa Tirta II

Perum Jasa Tirta II sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berkomitmen untuk melaksanakan praktik-praktik *Good Corporate Governance* (GCG) atau Tata Kelola Perusahaan yang baik sebagai bagian dari usaha untuk pencapaian visi dan misi Perusahaan. Pedoman Etika dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) yang terdapat pada Lampiran III Keputusan Bersama Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta II nomor: KBS-01/DIR/10/2019 tanggal 30 Oktober 2019 ini merupakan salah satu wujud dari komitmen tersebut yang dituangkan dalam dokumen tertulis atas dasar perilaku etis yang diharapkan Perusahaan dari Insan Perusahaan yang mencakup perilaku yang harus dilakukan dan dilarang dilakukan.

Code of Conduct Perusahaan adalah sekumpulan komitmen yang terdiri dari etika usaha Perusahaan dan etika kerja setiap Insan Perusahaan yang bersifat sukarela yang disusun untuk mempengaruhi, membentuk, mengatur dan melakukan kesesuaian perilaku, sehingga tercapai keluaran yang konsisten yang sesuai dengan budaya kerja Perusahaan dalam mencapai visi dan misinya. Adapun komitmen-komitmen yang dimaksud adalah:

- Komitmen Terhadap Pemilik Modal
- Komitmen Terhadap Insan Perusahaan
- Komitmen Terhadap Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Instansi lainnya
- Komitmen Terhadap Pelanggan
- Komitmen Terhadap Penyedia Barang/Jasa
- Komitmen Terhadap Pesaing
- Komitmen Terhadap Mitra Usaha
- Komitmen Terhadap Masyarakat Sekitar, Mitra Binaan dan Lingkungan
- Komitmen Terhadap Media Massa, LSM dan Organisasi Kemasyarakatan
- Komitmen Terhadap Serikat Pekerja
- Komitmen Terhadap Anak Perusahaan

Pengungkapan Code of Conduct

Untuk memastikan *Code of Conduct* diketahui dan dijalankan oleh seluruh insan Perusahaan, Perum Jasa Tirta II telah melaksanakan sosialisasi dan mendistribusikan buku *Code of Conduct* kepada seluruh insan Perum Jasa Tirta II dalam bentuk Buku Saku. Setelah sosialisasi dilakukan, seluruh insan Perum Jasa Tirta II wajib menandatangani Pakta Integritas yang merupakan komitmen Insan Perum Jasa Tirta II untuk melaksanakan *Code of Conduct* yang diperbaharui sesuai dengan kebutuhan.

Perum Jasa Tirta II's Code of Conduct

Perum Jasa Tirta II, as a State-Owned Enterprise (BUMN), is committed to implementing Good Corporate Governance (GCG) practices as part of its efforts to improve corporate governance.

realize the vision and mission of the company The Code of Conduct (Code of Conduct) contained in Appendix III of the Joint Decree of the Supervisory Board and Directors of Jasa Tirta II Public Company (PERUM) number: KBS-01/DIR/10/2019 dated 30 October 2019 is one manifestation of the commitment stated in a written document on the basis of the ethical behavior expected by the Company from the Company's Personnel, which includes behaviors that must be carried out and behaviors that must not be carried out.

The Company's Code of Conduct is a set of commitments that are structured to influence, shape, regulate, and conform to behavior in order to achieve consistent outputs that are in accordance with the Company's work culture in achieving the vision and mission. The commitments in question are:

- *Commitment to Capital Owners*
- *Commitment to Company Personnel*
- *Commitment to Government, Regional Government, and other Agencies*
- *Commitment to Customers*
- *Commitment to Goods/Services Providers*
- *Commitment to Competitors*
- *Commitment to Business Partners*
- *Commitment to Communities, Fostered Partners, and the Environment*
- *Commitment to the media, non-governmental organizations, and community organizations*
- *Support for Labor Unions*
- *Subsidiary Commitment*

Code of Conduct Disclosure

To ensure that the Code of Conduct is known and implemented by all Company personnel, Perum Jasa Tirta II has carried out socialization and distributed the Code of Conduct book in the form of a Pocket Book to all personnel of Perum Jasa Tirta II. After the socialization process is completed, Perum Jasa Tirta II personnel are required to sign an Integrity Pact, which is a commitment by Perum Jasa Tirta II personnel to implement a code of conduct that is updated as needed.



Penegakan dan Sosialisasi Code of Conduct

Sebagai upaya penegakan atas *Code of Conduct*, Perum Jasa Tirta II akan memberikan sanksi terhadap insan Perusahaan yang melakukan pelanggaran *Code of Conduct*. Bagi setiap insan Perum Jasa Tirta II yang mengetahui suatu situasi yang diyakini berpotensi melanggar *Code of Conduct*, harus segera melaporkan kepada atasan atau pimpinan yang lebih tinggi secara tertulis dengan mencantumkan identitas pelapor berdasarkan bukti-bukti yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan serta tidak mengandung unsur fitnah dan kepentingan pribadi.

Perum Jasa Tirta II akan melindungi kerahasiaan setiap insan Perum Jasa Tirta II yang telah melaporkan pelanggaran dan akan segera menindaklanjutinya kecuali laporannya tidak benar dan kepada pelapor dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelanggaran Code of Conduct

Pelanggaran *Code of Conduct* di Perum Jasa Tirta II merupakan tindakan indisipliner dan ditindaklanjuti oleh Direktur Keuangan & SDM sebagai penanggung jawab implementasi *Good Corporate Governance (GCG)* di Perusahaan. Setiap insan Perum Jasa Tirta II yang mengetahui terjadinya pelanggaran *Code of Conduct* wajib melaporkan kepada unit kerja yang membidangi pengelolaan SDM, atasan langsung, dan kontak pengaduan yang bertanggung jawab untuk:

- Memonitor kepatuhan atas *Code of Conduct*;
- Mencatat semua jenis pelanggaran yang dituduhkan;
- Menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Melaporkan pelanggaran kepada Direksi.

Setiap insan Perum Jasa Tirta II yang menyampaikan pelaporan atas pelanggaran *Code of Conduct* ini tidak perlu merasa khawatir karena Perusahaan akan melindungi identitas pelapor sepanjang pelaporannya dapat dipertanggungjawabkan. Pelanggaran atas *Code of Conduct* ini akan diberikan sanksi atau ganjaran yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Perusahaan. Pelaksanaan *Code of Conduct* merupakan komitmen dan tanggung jawab bersama seluruh insan Perum Jasa Tirta II. Apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan maka insan Perum Jasa Tirta II wajib melaporkan pelanggaran tersebut melalui:

Code of Conduct Enforcement and Dissemination

Perum Jasa Tirta II will impose sanctions on Company personnel who violate the *Code of Conduct* in an effort to enforce it. Every Perum Jasa Tirta II employee who becomes aware of a situation that has the potential to violate the *Code of Conduct* must immediately report it in writing to his superior or higher leadership, including the identity of the reporter, based on complete and accountable evidence that does not contain elements of slander and slander. personal pursuits.

Perum Jasa Tirta II will protect the confidentiality of any employee who reports a violation and will immediately follow up unless the report is incorrect, in which case the whistleblower may face sanctions in accordance with applicable regulations.

Breach of the Code of Conduct

Violations of the *Code of Conduct* at Perum Jasa Tirta II result in disciplinary action, which is overseen by the Director of Finance & Human Resources, who is in charge of implementing *Good Corporate Governance (GCG)* in the Company. Every Perum Jasa Tirta II employee who becomes aware of a violation of the *Code of Conduct* must report it to the work unit in charge of HR management, direct supervisor, and complaint contact, who are responsible for:

- Monitoring compliance with the *Code of Conduct*;
- Recording all types of alleged violations; and
- Following up on violations that occur in accordance with applicable regulations.
- Inform the Board of Directors of any violations.

Every Perum Jasa Tirta II employee who reports a violation of this *Code of Conduct* does not need to be concerned because the Company will protect the reporter's identity as long as the reporting can be accounted for. Violations of this *Code of Conduct* will result in sanctions or rewards in accordance with the Company's rules and regulations. The implementation of the *Code of Conduct* is a shared commitment and responsibility of all Perum Jasa Tirta II personnel. In the event of a violation or deviation, Perum Jasa Tirta II employees must report it to:



- Divisi SDM;
- Atasan Langsung;
- Kotak Pengaduan (*Whistleblowing System*)

Segenap insan Perum Jasa Tirta II dan pihak eksternal Perusahaan (Pelanggan, Mitra Kerja dan Masyarakat) dapat melaporkan pelanggaran *Code of Conduct* yang dilakukan oleh oknum insan Perum Jasa Tirta II dan Perusahaan wajib menindaklanjuti pelaporan yang berpotensi merugikan secara materiil dan dapat merusak citra Perusahaan yang antara lain disebabkan oleh penyimpangan, manipulasi, dan lain sebagainya.

Pelapor wajib mencantumkan identitasnya dengan jelas pada laporan yang dibuat, disertai dengan bukti pendukung yang relevan. Penerima laporan wajib merahasiakan identitas pelapor.

Perusahaan wajib menindaklanjuti setiap laporan yang diterima sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku. Perusahaan menyediakan perlindungan hukum sebagaimana ketentuan perundangan yang berlaku.

Jumlah Pelanggaran dan Sanksi *Code of Conduct* Tahun 2022

Pemberian sanksi atas pelanggaran *Code of Conduct* yang dilakukan oleh karyawan diberikan oleh Direksi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan pemberian sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi dan Dewan Pengawas mengacu sepenuhnya pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perusahaan oleh Pemilik Modal sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila pelanggaran dilakukan oleh mitra kerja atau stakeholders lain maka akan dikenakan ketentuan sebagaimana tertuang dalam kontrak. Apabila pelanggaran terkait dengan tindak pidana, maka diteruskan kepada pihak yang berwajib. Pemberian sanksi dilakukan setelah ditemukan bukti nyata terhadap terjadinya pelanggaran pedoman *Code of Conduct*.

- *HR Division;*
- *Direct Supervisor;*
- *Complaint Box (Whistleblowing System)*

All personnel of Perum Jasa Tirta II and external parties of the Company (Customers, Business Partners, and Community) can report violations of the Code of Conduct committed by personnel of Perum Jasa Tirta II, and the Company is required to follow up on reports that have the potential to harm materially and may damage the Company's image, such as irregularities, manipulation, and so on.

The reporter must clearly state his or her identity on the report, which must be accompanied by relevant supporting evidence. The recipient of the report must keep the identity of the reporter private.

The company is required to follow up on every report received in accordance with the applicable procedures and mechanisms. In accordance with applicable laws and regulations, the company provides legal protection.

Number of *Code of Conduct* Violations and Sanctions in 2022

Sanctions are imposed on employees who violate the Code of Conduct in accordance with applicable regulations, by the Board of Directors or authorized officials. Meanwhile, the imposition of sanctions for violations committed by the Board of Directors and the Supervisory Board refers fully to the Company's Articles of Association and Bylaws in accordance with applicable regulations by the Capital Owners.

If the violation is committed by a partner or other stakeholder, the contract's provisions will be imposed. If the violation is related to a criminal act, it will be reported to law enforcement. Sanctions are imposed when real evidence of violations of the Code of Conduct guidelines is discovered.



PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Gratification Control Guidelines

Gratifikasi merupakan kegiatan pemberian dan/atau penerimaan hadiah/cendera mata dan hiburan (entertainment) kepada insan Perusahaan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik dan/atau tanpa melalui sarana elektronik.

Perum Jasa Tirta II telah menyusun Pedoman Pengendalian Gratifikasi yang menjadi lampiran VII Keputusan Bersama Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta II tentang pedoman tata kelola Perusahaan yang baik Nomor: KBS- 01/DIR/10/2019 tanggal 30 Oktober 2019 mengenai Pedoman Gratifikasi. Pedoman tersebut memuat mengenai:

- Latar Belakang
- Maksud dan Tujuan
- Ruang Lingkup dan Sistematika
- Pengertian
- Dasar Hukum
- Prinsip Dasar Gratifikasi
- Kategori Gratifikasi
- Tim Penanganan Pengaduan Pelanggaran dan Gratifikasi (TP3G)
- Tugas dan Fungsi TP3G
- Koordinasi TP3G
- Pelaporan

Tata Cara Pelaporan Gratifikasi

Dalam menegakkan kebijakan anti gratifikasi, setiap insan Perum Jasa Tirta II dapat melaporkan indikasi pelanggaran gratifikasi dengan mengikuti tata cara sebagai berikut:

1. Setiap penerimaan hubungan dengan Gratifikasi yang dianggap suap wajib dilaporkan kepada Direksi melalui TP3G.
2. Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada angka (1) disampaikan kepada TP3G dengan mengisi formulir yang ditetapkan oleh Direksi secara lengkap dan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan Gratifikasi, baik secara langsung atau melalui pos, e-mail, website yang telah disediakan oleh Perusahaan .
3. Jangka waktu pelaporan melalui TP3G sebagaimana dimaksud pada angka (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi tersebut diterima oleh Insan Perusahaan .

Gratification is the activity of giving and/or receiving gifts/souvenirs and entertainment (entertainment) to Company personnel both at home and abroad, and it can be done electronically or manually.

Perum Jasa Tirta II has compiled Guidelines for Gratification Control, which is attached VII to the Joint Decree of the Supervisory Board and Directors of Public Company (PERUM) Jasa Tirta II regarding guidelines for good corporate governance Number: KBS- 01/DIR/10/2019 dated October 30, 2019. The guidelines include the following sections:

- Background
- Purpose and Objectives
- Scope and Systematics
- Definition
- Legal Basis
- Basic Principles of Gratification
- Gratification Category
- Team for Handling Violations and Gratification Complaints (TP3G)
- TP3G Duties and Functions
- TP3G Coordination
- Reporting Governance

Method of Gratification Reporting

In order to enforce the anti-gratification policy, any employee of Perum Jasa Tirta II may report indications of gratification violations by following the procedures outlined below:

1. Any acceptance of a bribe-like relationship with Gratification must be reported to the Board of Directors via TP3G.
2. The Gratification Report referred to in number (1) is submitted to TP3G by completely filling out the form determined by the Board of Directors and attaching Gratification documents, either in person or by post, e-mail, or website provided by the Company.
3. The reporting period via TP3G, as mentioned in number (1), is no later than 20 (twenty) working days from the date the Gratification is received by Company Personnel.



4. Apabila jangka waktu pelaporan melebihi 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal Gratifikasi tersebut diterima oleh Insan Perusahaan, maka TP3G tidak dapat menerima laporan dimaksud dan Insan Perusahaan melaporkan langsung kepada Direksi dengan mengisi formulir yang ditetapkan oleh Direksi secara lengkap dan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan Gratifikasi.
5. Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada angka (1), TP3G meneliti Gratifikasi yang diterima untuk menentukan apakah Gratifikasi yang diterima dianggap suap atau bukan dengan berdasarkan ketentuan dalam pedoman ini.
6. Apabila hasil penelitian TP3G sebagaimana dimaksud pada angka (5) merupakan Gratifikasi yang dianggap suap, TP3G menyampaikan Gratifikasi tersebut kepada Direksi dalam jangka waktu paling lambat 7 (hari) hari kerja sejak laporan Gratifikasi tersebut diterima.

Pakta Integritas dan Gratifikasi

Perum Jasa Tirta II mewajibkan setiap insan Perum Jasa Tirta II untuk mematuhi ketentuan yang diatur dalam Pedoman Etika Perusahaan. Hal tersebut diterapkan melalui penandatanganan Pakta Integritas yang dilakukan oleh Dewan Pengawas, Direksi, serta karyawan tetap Perum Jasa Tirta II.

Dalam rangka menjaga komitmen secara berkelanjutan, penandatanganan kepatuhan terhadap Pedoman Etika Perusahaan dilakukan setiap tahun.

Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

Menindaklanjuti surat sekretaris kementerian BUMN Nomor: S-17S.MBU/02/2020 tanggal 17 Februari 2020 perihal setifikasi ISO 37001:2016. Sistem manajemen anti penyuapan, Perusahaan telah diaudit oleh pihak eksternal dan pada tanggal 28 Desember 2020. Serta hasilnya PJT II Telah mendapatkan sertifikat ISO 37001:2016. Oleh karena itu Perusahaan telah Menyusun Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang diatur dalam Peraturan Direksi Nomor: PRD-16/DIR/10/2020.

4. If the reporting period exceeds 20 (twenty) working days from the date the Gratification is received by the Company's Personnel, the report cannot be received by TP3G, and the Company's Personnel must report directly to the Board of Directors by completely filling out the form determined by the Board of Directors and attaching the required documents. concerning gratuities
5. Following receipt of the report referred to in number (1), TP3G examines the Gratification received to determine whether the Gratification received is a bribe or not in accordance with the provisions of this guideline.
6. If the results of the TP3G research referred to in number (5) are Gratifications that are considered bribes, TP3G submits the Gratifications to the Board of Directors within 7 (days) of receiving the Gratification report.

The Perum Jasa Tirta II Integrity and Gratification Pact

Requires all employees to follow the provisions outlined in the Company's Code of Ethics. This is accomplished through the signing of the Integrity Pact by Perum Jasa Tirta II's Supervisory Board, Directors, and permanent employees.

Every year, the signing of compliance with the Company's Code of Ethics is performed in order to maintain ongoing commitment.

Management System for Anti-Bribery (SMAP)

Following up on the letter from the Secretary of the Ministry of SOEs dated February 17, 2020, Number: S-17S.MBU/02/2020, regarding ISO 37001:2016 certification. An external party audited the Company's anti-bribery management system on December 28, 2020. As a result, PJT II now has the ISO 37001:2016 certification. As a result, the Company developed the Anti-Bribery Management System Guidelines (SMAP), which are governed by Board of Directors Regulation Number: PRD-16/DIR/10/2020.



SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Violation Reporting System

Tujuan penerapan praktik terbaik dan prinsip-prinsip GCG yang diarahkan pada pemeliharaan kualitas kepatuhan dikukuhkan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) yang berperan sebagai mekanisme deteksi dini (*Early Warning System*) yang mampu mencegah indikasi penyimpangan dan kecurangan (*fraud*) di lingkungan Perusahaan. Perum Jasa Tirta II juga telah membentuk Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) sebagai dasar dalam komitmen untuk memperhatikan dan menjaga kepentingan para Pemilik Modal berdasarkan asasi kewajaran dan kesetaraan.

Dalam hal ini, Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) menjadi media bagi pelapor untuk menyampaikan informasi mengenai tindakan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perusahaan dengan berlandaskan pada kejujuran dan bukan bersifat fitnah dengan disertai bukti yang kuat.

Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran telah ditetapkan melalui Lampiran VI Keputusan bersama Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta II tentang pedoman tata kelola Perusahaan yang baik Nomor: KBS-01/DIR/06/2021 tanggal 30 juni 2021.

Maksud, Tujuan dan Manfaat

Whistleblowing System adalah sistem yang mengelola pengaduan/penyungkapan mengenai perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis atau tidak semestinya secara rahasia, anonim, dan mandiri yang digunakan untuk mengoptimalkan peran serta insan Perum Jasa Tirta II dan pihak lainnya dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perusahaan. Adapun maksud, tujuan dan manfaat *Whistleblowing System*, di antaranya:

- Sebagai dasar atau pedoman dalam menangani Pengaduan Pelanggaran dari para pemangku kepentingan;
- Menjamin terselenggaranya mekanisme penyelesaian Pengaduan Pelanggaran yang efektif dalam jangka waktu memadai oleh para pemangku kepentingan;
- Menghindari publikasi negatif terhadap Perusahaan;

The Whistleblowing System, which acts as an early warning system capable of preventing indications of irregularities and fraud within the Company, confirms the purpose of implementing best practices and GCG principles aimed at maintaining the quality of compliance. Perum Jasa Tirta II has also established a Whistleblowing System Guideline as a foundation for its commitment to pay attention to and protect the interests of Capital Owners in a fair and equal manner.

In this case, the Whistleblowing System serves as a channel for the reporter to convey information about violations that occurred within the Company that is based on honesty rather than slander and is supported by strong evidence.

The Violation Complaint Management Guidelines have been stipulated through Appendix VI of the Joint Decree of the Supervisory Board and the Board of Directors of Public Company (PERUM) Jasa Tirta II regarding good corporate governance guidelines Number: KBS-01/DIR/06/2021 dated 30 June 2021.

Purpose, Goals, and Benefits

The Whistleblowing System is a system that manages complaints/disclosures regarding illegal behavior, unethical or inappropriate actions in a confidential, anonymous, and independent manner, with the goal of increasing the participation of Perum Jasa Tirta II personnel and other parties in disclosing violations that occur within the Company. The Whistleblowing System's goals, objectives, and benefits include the following:

- *As a basis or guideline in dealing with Complaints of Violations from stakeholders;*
- *Ensuring the implementation of an effective Complaints settlement mechanism by stakeholders within an adequate period of time;*
- *Avoid negative publicity towards the Company;*



- Mendukung asas kesetaraan (*fairness*) dalam hubungan antara Perusahaan dengan para Pemilik Modal sebagai pelaku usaha dan mitra Perusahaan ;
- Sebagai salah satu upaya dalam pengungkapan berbagai permasalahan dalam Perusahaan yang tidak sesuai dengan standar etika yang berlaku di Perusahaan.

Ruang Lingkup Pelaporan

Ruang lingkup pengaduan yang dapat disampaikan pada *Whistleblowing System* Perum Jasa Tirta II meliputi hal- hal sebagai berikut:

- Penyimpangan dari peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan lain di luar Perusahaan ;
- Pemerasan;
- Perbuatan curang (*fraud*);
- Benturan kepentingan;
- Gratifikasi

Struktur Pengelola Whistleblowing System

Pengelolaan *Whistleblowing System* dilakukan oleh 3 (tiga) organ, yaitu Dewan Pengawas, Direksi, dan Tim Penanganan Pengaduan Pelanggaran dan Gratifikasi (TP3G). Adapun pembagian tugas dan tanggung jawab organ- organ tersebut dalam pengelolaan *Whistleblowing System* adalah sebagai berikut:

- *Support the principle of equality (fairness) in the relationship between the Company and the owners of capital as business actors and partners of the Company;*
- *As part of the effort to disclose various problems in the Company that do not conform to the Company's ethical standards.*

Reporting Scope

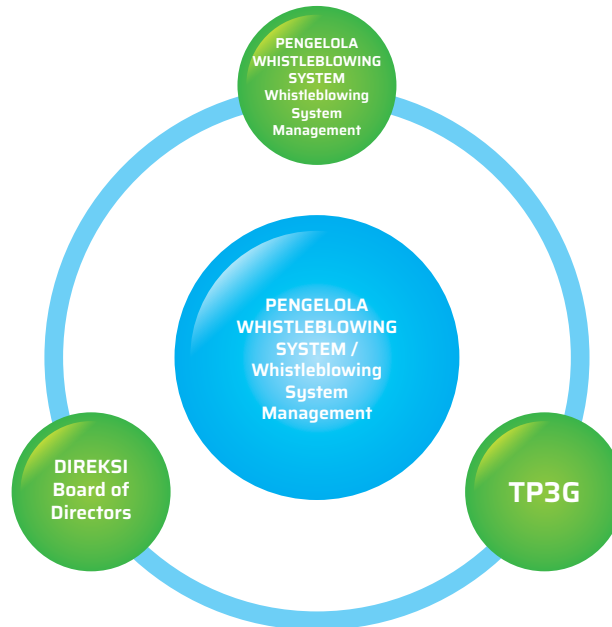
The following are examples of complaints that can be made to Perum Jasa Tirta II's Whistleblowing System:

- *Violations of applicable laws and regulations;*
- *Abuse of position for personal gain;*
- *Blackmail;*
- *Fraud;*
- *Conflict of interest;*
- *Gratifications*

The Structure of Whistleblowing System

The Whistleblowing System is managed by three (three) organs: the Supervisory Board, the Board of Directors, and the Team for Handling Violations and Gratifications (TP3G). These organs' duties and responsibilities in the management of the Whistleblowing System are as follows:

ORGAN PENGELOLA WBS / WBS Management Organs	FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB / Functions and Responsibilities
Dewan Pengawas / <i>Supervisory Board</i>	Bertanggung jawab atas terlaksananya Kebijakan Penanganan Pengaduan Pelanggaran yang diduga dilakukan oknum anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, Organ Penunjang Dewan Pengawas dan Organ Penunjang Direksi. / <i>Responsible in implementing the policies for the violations allegedly committed by members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, Supporting Organs of both the Supervisory Board, and the Board of Directors.</i>
Direksi / <i>Board of Directors</i>	Bertanggung jawab atas terlaksananya kebijakan Penanganan Pengaduan Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh karyawan. / <i>Responsible in implementing the policies for the violations allegedly committed by the Employees.</i>



ORGAN PENGELOLA WBS / WBS Management Organs	FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB / Functions and Responsibilities
Tim Penanganan Pengaduan Pelanggaran dan Gratifikasi (TP3G) / <i>Whistleblowing Handling Team (TP3G)</i>	- TP3G jalur Direksi adalah tim yang dibentuk oleh Direksi dan beranggotakan perwakilan dari Sekretaris Perusahaan, Satuan Pengawasan Internal (SPI), Divisi Sumber Daya Manusia, Divisi PKRSM serta pihak lain yang diperlukan sesuai dengan kompetensi dan keahliannya. Ketua TP3G jalur Direksi adalah Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI). / <i>TP3G Board of Directors is a team formed by the Board of Directors and consists of representatives from the Corporate Secretary, Internal Audit Unit (SPI), Human Resources Division, PKRSM Division, and others required in accordance with their competence and expertise. TP3G of the Board of Directors is headed by the Head of Internal Audit Unit (SPI).</i> - TP3G jalur Dewan Pengawas adalah tim yang dibentuk oleh Dewan Pengawas dan beranggotakan perwakilan dari Anggota Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, Komite Audit serta pihak independen lainnya yang diperlukan sesuai dengan kompetensi dan keahliannya. Ketua TP3G jalur Dewan Pengawas adalah Anggota Dewan Pengawas. / <i>TP3G of the Supervisory Board is a team established by the Supervisory Board and comprising representatives from members of the Supervisory Board, the Secretary of the Supervisory Board, the Audit Committee and other Independent parties required in accordance with their competence and expertise. TP3G of Supervisory Board is headed by the member of Supervisory Board.</i>



Mekanisme Pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran

Mekanisme pengelolaan *Whistleblowing System* yang sedang dikembangkan Perum Jasa Tirta II mengikuti alur sebagai berikut:

1. Pengaduan Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh karyawan ditujukan kepada Direksi Perusahaan .
2. Pengaduan Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh oknum anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, Organ Penunjang Dewan Pengawas dan Organ Penunjang Direksi ditujukan kepada Dewan Pengawas Perusahaan .
3. Pengaduan Pelanggaran dilakukan dalam jam kerja.
4. Apabila penerima Pengaduan Pelanggaran bukan Direksi atau Dewan Pengawas, maka yang bersangkutan wajib meneruskan Pengaduan Pelanggaran tersebut kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5. Perusahaan menerima setiap Pengaduan Pelanggaran yang diajukan oleh para Pemilik Modal dan/ atau Perwakilan para Pemilik Modal baik secara lisan maupun tertulis.
6. Perusahaan memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur pada saat Pemilik Modal dan/atau perwakilan para Pemilik Modal mengajukan Pengaduan Pelanggaran.
7. Pengaduan Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Karyawan dilakukan secara tertulis melalui website resmi Perusahaan dan/atau menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada Perusahaan c.q. Direksi, dengan cara diantar langsung, atau melalui pos ke Perusahaan dengan alamat:
Direksi Perum Jasa Tirta II Jalan Lurah Kawi, Jatiluhur Purwakarta, Jawa Barat
8. Pengaduan Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh oknum anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, Organ Penunjang Dewan Pengawas dan Organ Penunjang Direksi dilakukan secara tertulis dengan menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada Dewan Pengawas, dengan cara diantar langsung, atau melalui pos ke Perusahaan dengan alamat: Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II Jl. H. Agus Salim No. 69 Jakarta Pusat

Management Mechanism of the Violation Reporting System

The management mechanism being developed by Perum Jasa Tirta II for the Whistleblowing System follows the following flow:

1. *Employee complaints about alleged violations are directed to the Company Directors.*
2. *Complaints about alleged violations by members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, members of the Supporting Organs of the Supervisory Board, and members of the Supporting Organs of the Board of Directors are directed to the Company's Supervisory Board.*
3. *Violation complaints are made during working hours.*
4. *If the person receiving the Complaint of Violations is not a member of the Board of Directors or the Supervisory Board, the person must forward the Complaint of Violation to the Board of Directors or the Supervisory Board.*
5. *The Company accepts any Complaints of Violations submitted orally or in writing by Capital Owners and/or Representatives of Capital Owners.*
6. *When Capital Owners and/or representatives of Capital Owners file a Complaint of Violation, the Company explains the policies and procedures.*
7. *Complaints about alleged violations committed by employees are made in writing via the Company's official website and/or by submitting an official letter addressed to the Company c/q the Board of Directors, by direct delivery, or by post to the Company at the following address: Directors of Perum Jasa Tirta II Jalan Lurah Kawi, Jatiluhur Purwakarta, West Java*
8. *Complaints of alleged violations by members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, Supporting Organs of the Supervisory Board, and Supporting Organs of the Board of Directors are made in writing by members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, and Supporting Organs of the Board of Directors, submitting an official letter addressed to the Supervisory Board to the Company at the following address: Supervisory Board of Perum Jasa Tirta II Jl. H. Agus Salim No. 69 Central Jakarta*



9. Pengaduan Pelanggaran secara tertulis beridentitas wajib dilengkapi fotokopi identitas dan bukti pendukung seperti dokumen yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan dan/atau Pengaduan Pelanggaran yang akan disampaikan.
10. Pengaduan Pelanggaran secara tertulis tanpa identitas wajib dilengkapi bukti pendukung dokumen yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan dan/ atau Pengaduan Pelanggaran yang akan disampaikan.
11. Pengaduan Pelanggaran yang disampaikan wajib dilengkapi dengan data (bukti pendukung).
12. Perusahaan memberikan tanda terima, jika Pengaduan Pelanggaran diajukan secara tertulis beridentitas.
13. Apabila Pengaduan Pelanggaran diajukan oleh perwakilan para pemangku kepentingan, maka selain dokumen di atas juga diserahkan dokumen lainnya yaitu:
 - Fotokopi bukti identitas para Pemilik Modal dan perwakilan para pemangku kepentingan;
 - Surat kuasa dari para Pemilik Modal kepada perwakilan para Pemilik Modal yang menyatakan bahwa para Pemilik Modal memberikan kewenangan bertindak untuk dan atas nama para pemangku kepentingan. Jika perwakilan para Pemilik Modal adalah lembaga atau badan hukum, maka harus dilampiri dengan dokumen yang menyatakan bahwa pihak yang mengajukan pengaduan berwenang untuk mewakili lembaga atau badan hukum tersebut.
14. Perusahaan wajib menyampaikan bukti tanda terima Pengaduan Pelanggaran kepada para Pemilik Modal dan/atau perwakilan Pemilik Modal yang mengajukan Pengaduan.

Adapun bagan mekanisme pelaporan pengaduan penanganan pelanggaran digambarkan dalam bagan sebagai berikut:

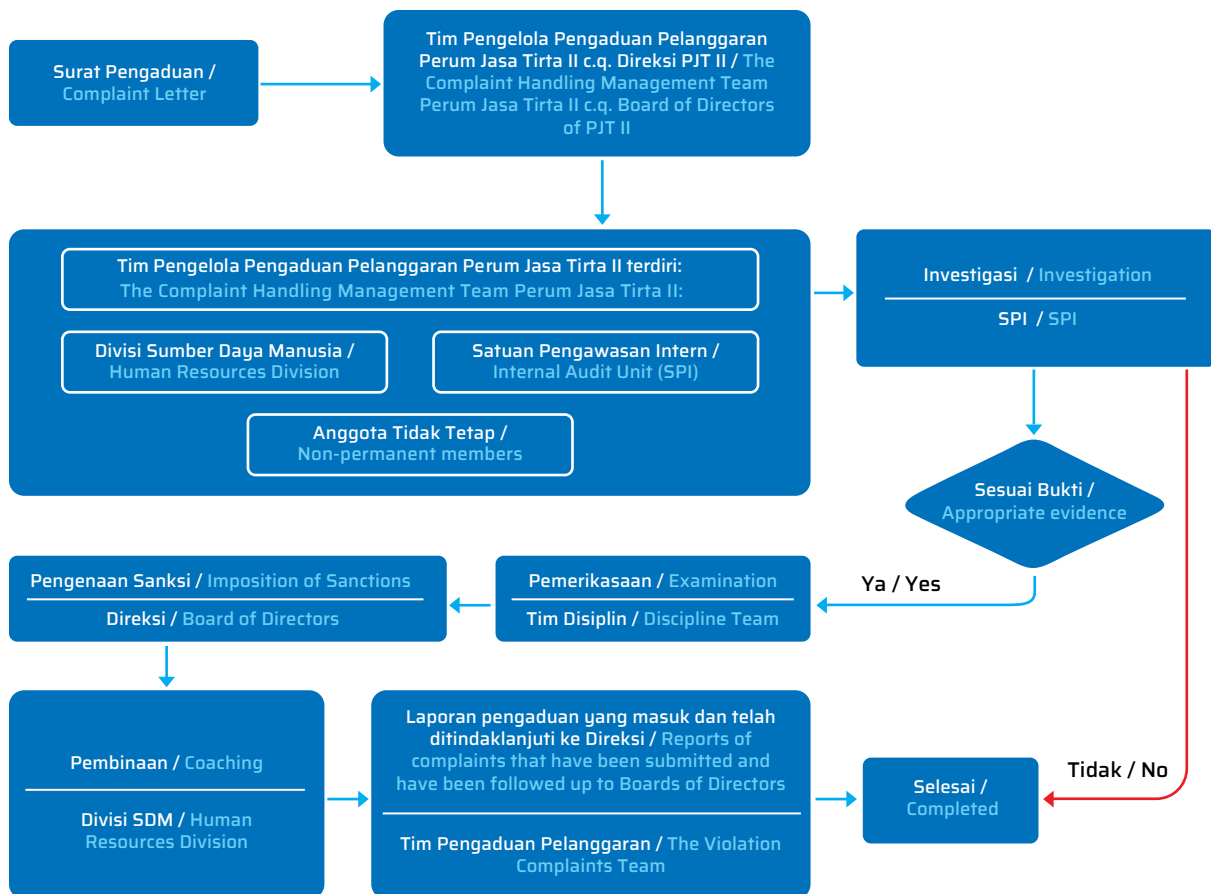
9. *Written complaints of violations must be accompanied by photocopies of identification and supporting evidence, such as documents relating to the transactions carried out and/or the Complaints of Violations that will be submitted.*
10. *Written infringement complaints without identifying information must be accompanied by supporting evidence documents relating to the transactions carried out and/or the infringement complaints that will be submitted.*
11. *Violation complaints must be accompanied by data (supporting evidence).*
12. *If the Complaint of Violation is submitted in writing with an identity, the company issues a receipt.*
13. *If the Complaint of Violations is submitted by representatives of the stakeholders, the following documents must be submitted in addition to the above:*
 - *Photocopies of proof of identity of the Capital Owners and representatives of the stakeholders;*
 - *Power of attorney from the Capital Owners to the representatives of the Capital Owners stating that the Capital Owners have authorized the representatives of the Capital Owners to act for and on behalf of the stakeholders. If the Capital Owners' representative is an institution or legal entity, the complaint must be accompanied by documentation proving that the party filing the complaint is authorized to represent the institution or legal entity.*
14. *The company must provide proof of receipt of the Complaint of Violations to the Capital Owners and/or their representatives who filed the Complaint.*

The following diagram depicts the mechanism for reporting complaints and handling violations:



Mekanisme Pelaporan Penanganan Pelanggaran yang Dilakukan oleh Karyawan Perum Jasa Tirta II

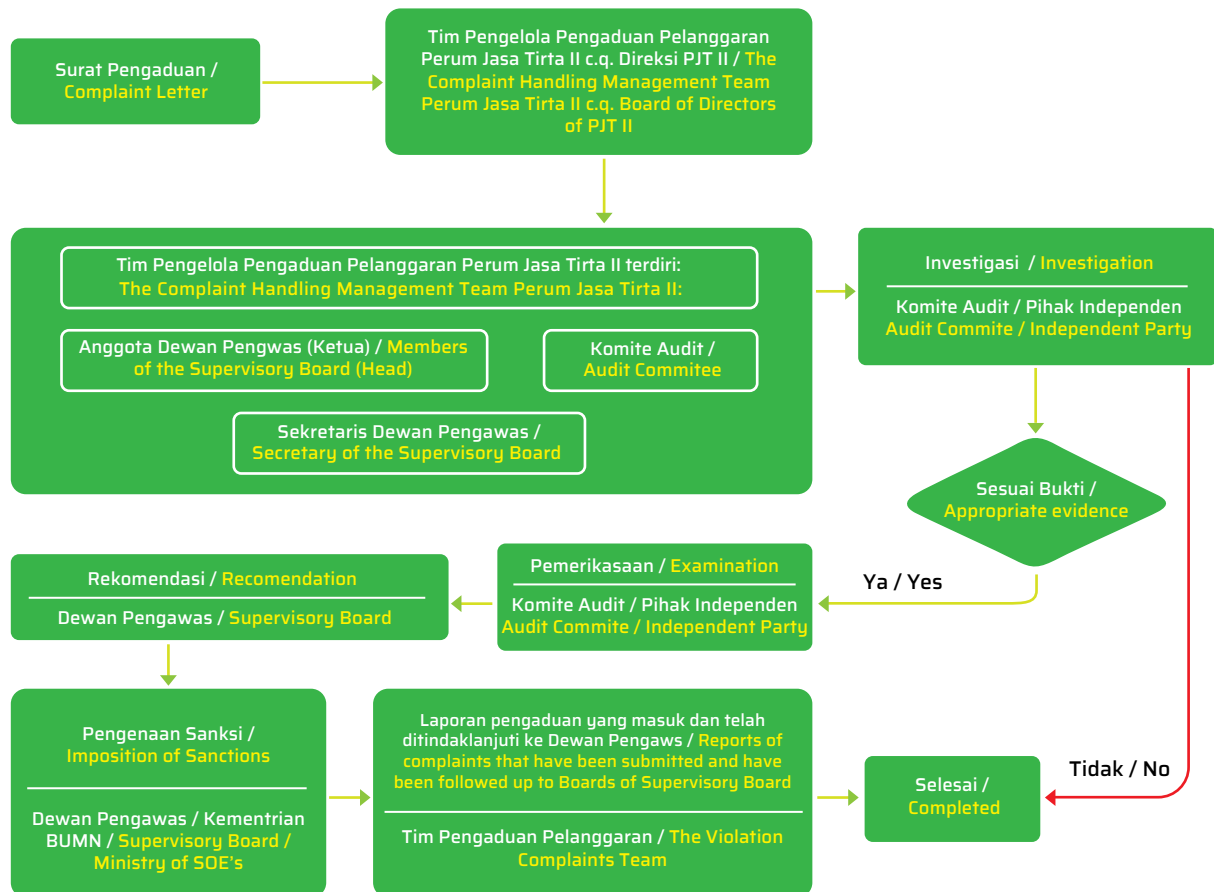
Reporting Mechanism for Violations Committed by Employees





Mekanisme Pelaporan Penanganan Pelanggaran yang Dilakukan oleh Anggota Direksi, Anggota Dewan Pengawas, Organ Penunjang Dewan Pengawas, dan Organ Penunjang Direksi

Whistleblowing Mechanism for Violations Committed by Member of the Board Of Directors, Members of Supervisory Board, Supporting Organs of Supervisory Board and Board of Directors





Perlindungan bagi Pelapor

Perum Jasa Tirta II memberikan perlindungan terhadap pelapor yang melaporkan dugaan pelanggaran melalui mekanisme *Whistleblowing System*. Adapun kebijakan perlindungan bagi pelapor adalah sebagai berikut:

- Identitas Pelapor dijamin kerahasiaannya oleh Perusahaan .
- Perusahaan menjamin perlindungan terhadap Pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak mana pun selama Pelapor menjaga kerahasiaan pelanggaran yang diajukan kepada Perusahaan .
- Perlindungan terhadap Pelapor juga berlaku bagi para pihak yang melaksanakan investigasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan pengaduan/penyingkapan tersebut. Selain perlindungan di atas, Perum Jasa Tirta II juga akan menyediakan perlindungan hukum. Diharapkan dengan adanya jaminan perlindungan ini, akan mendorong setiap insan Perusahaan dan Pelapor lainnya untuk berani melaporkan pelanggaran dan menjamin keamanan Pelapor dan keluarganya.

Penanganan Pelaporan Pelanggaran

- Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran melakukan verifikasi atas laporan yang masuk berdasarkan catatan tim. Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran akan memutuskan perlu tidaknya dilakukan investigasi atas Pengaduan Pelanggaran dalam periode 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- Apabila hasil verifikasi menunjukkan adanya indikasi pelanggaran yang disertai bukti-bukti yang cukup, maka pengaduan dapat diproses ke tahap investigasi.
- Terkait Pengaduan Pelanggaran yang melibatkan oknum karyawan yang memerlukan investigasi wajib ditindaklanjuti oleh Direksi untuk diinvestigasi Satuan Pengawasan Intern (SPI).
- Rekomendasi hasil dari investigasi yang dilakukan oleh SPI tersebut diajukan kepada Tim Disiplin untuk ditindaklanjuti dan dilaporkan ke Direksi.
- Terkait Pengaduan Pelanggaran yang melibatkan oknum anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, Organ Penunjang Dewan Pengawas dan Organ Penunjang Direksi yang memerlukan investigasi wajib ditindaklanjuti oleh Dewan Pengawas untuk diinvestigasi Komite Audit atau melimpahkan kepada pihak independen.

Whistleblower Protection

Whistleblowers who report alleged violations through the Whistleblowing System mechanism are protected under Perum Jasa Tirta II. The following are the whistleblower protection policies:

- *The Company guarantees the whistleblower's identity.*
- *The Company guarantees the Whistleblower's protection from all forms of threats, intimidation, or unpleasant actions from any party as long as the Whistleblower maintains the confidentiality of the reported violation to the Company.*
- *Whistleblower protection also applies to parties conducting investigations and parties providing information related to the complaint/disclosure. In addition to the aforementioned safeguards, Perum Jasa Tirta II will provide legal protection. It is hoped that this guarantee of protection will encourage all Company employees and other Whistleblowers to report violations in order to ensure the safety of the Whistleblower and his or her family.*

Processing of Violation Reports

- *Based on team records, the Violation Complaint Management Team verifies incoming reports. • If the verification results indicate that there are indications of violations accompanied by sufficient evidence, the complaint can be processed to the investigation stage.*
- *If the verification results indicate that there are indications of violations accompanied by sufficient evidence, the complaint can be processed to the investigation stage.*
- *In the case of complaints of money laundering involving unscrupulous employees, the Board of Directors must follow up with them to have them investigated by the Internal Audit Unit (SPI).*
- *Recommendations resulting from the SPI investigation are forwarded to the Disciplinary Team for follow-up and are reported to the Board of Directors.*
- *In the case of Complaints of Violations involving individual members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, Supporting Organs of the Supervisory Board, and Supporting Organs of the Board of Directors, the Supervisory Board must follow up with the Audit Committee to investigate or delegate it to an independent party.*

- Direksi akan memutuskan tindak lanjut atas rekomendasi Tim Disiplin, untuk Dewan Pengawas akan memutuskan tindak lanjut atas rekomendasi Komite Audit/Independen.
- Dalam hal hasil investigasi yang dapat dibuktikan menyangkut karyawan, maka tindak lanjut diselesaikan oleh Direksi tanpa melibatkan pihak-pihak yang terlibat.
- Dalam hal hasil investigasi yang dibuktikan menyangkut anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, Organ Penunjang Dewan Pengawas dan Organ Penunjang Direksi, maka tindak lanjut diselesaikan oleh Dewan Pengawas tanpa melibatkan pihak-pihak yang terlibat.
- Pelaku Pelanggaran yang telah terbukti berdasarkan hasil investigasi, akan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sosialisasi Whistleblowing System

Dalam memudahkan dan memastikan bahwa seluruh insan Perusahaan maupun pihak lain yang berkepentingan mengetahui kebijakan dan mekanisme Whistleblowing System, Perusahaan melakukan sosialisasi dan internalisasi melalui presentasi langsung kepada karyawan dan pemangku kepentingan. Sosialisasi Whistleblowing System didukung juga oleh internalisasi prinsip GCG dan materi Code of Conduct sehingga diharapkan seluruh insan Perusahaan dapat senantiasa patuh dan berlaku etis sesuai dengan peraturan Perusahaan.

Jumlah Pengaduan dan Tindak Lanjut Pengaduan Tahun 2022

Selama tahun 2022, tidak terdapat pelaporan pengaduan pelanggaran yang masuk ke Whistleblowing System Perum Jasa Tirta II.

- In the case of complaints of money laundering involving unscrupulous employees, the Board of Directors must follow up with them to have them investigated by the Internal Audit Unit (SPI).
- Recommendations resulting from the SPI investigation are forwarded to the Disciplinary Team for follow-up and are reported to the Board of Directors.
- In the case of Complaints of Violations involving individual members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, Supporting Organs of the Supervisory Board, and Supporting Organs of the Board of Directors, the Supervisory Board must follow up with the Audit Committee to investigate or delegate it to an independent party.
- Offenders who have been proven guilty based on the findings of the investigation will be dealt with in accordance with the applicable regulations.

Whistleblowing System Socialization

To facilitate and ensure that all Company personnel and other interested parties are aware of the Whistleblowing System policies and mechanisms, the Company Socialization and internalization are carried out through direct presentations to employees and stakeholders. Internalization of GCG principles and Code of Conduct materials also aids in the socialization of the Whistleblowing System, with the hope that all Company personnel will always comply and behave ethically in accordance with Company regulations.

Number of Complaints and Complaint Follow-Up in 2022

There were no reports of complaints of violations that entered the Perum Jasa Tirta II Whistleblowing System in 2022.

Jumlah Pengaduan

TAHUN Year	MEDIA PENYAMPAIAN / Delivery Media					KLASIFIKASI LAPORAN / Report Classification			DITINDAK LANJUTI / Follow up	SELESAI / Done
	SURAT/ Letter	SUREL/ Email	WEB/ Web	WA/ SMS	LAIN-LAIN/ Etc	FRAUD	NON FRAUD	LAINNYA / Other		
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

The quantity of Complaints



PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

Management of Assets Reports of State Providers (LHKPN)

Dukungan Perum Jasa Tirta II terhadap penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari koRPBi, kolusi, dan nepotisme (KKN) diwujudkan melalui pelaksanaan dan pengelolaan kebijakan dan mekanisme penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kewajiban pelaporan harta kekayaan bagi wajib lapor ditujukan untuk mencegah potensi terjadinya penyalahgunaan jabatan dan kewenangan, menanamkan kepatuhan, kejujuran, dan integritas, serta transparansi di kalangan penyelenggara negara.

Dasar Hukum LHKPN

Dasar hukum kebijakan pelaporan LHKPN didasarkan pada peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
3. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Adapun di lingkup internal, kebijakan pelaporan LHKPN di lingkungan Perum Jasa Tirta II telah ditetapkan melalui PRD 18/DIR/03/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Direksi Perum Jasa Tirta II No. I/DIR/02/PRD-DRD/2018 tentang Pedoman Kepatuhan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi Pejabat di Lingkungan Perum Jasa Tirta II.

Wajib Lapor LHKPN

Sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib lapor LHKPN di lingkungan Perusahaan antara lain:

Perum Jasa Tirta II's support for a clean and free state administration free of corruption, collusion, and nepotism (KKN) is realized through the implementation and management of policies and mechanisms for submitting the State Administrators Wealth Report (LHKPN) to the Corruption Eradication Commission (KPK). The requirement for those who are required to report assets is intended to prevent abuse of position and authority by instilling compliance, honesty, and integrity, as well as transparency, among state administrators.

LHKPN's Legal Foundation

The following laws and regulations serve as the legal foundation for LHKPN's reporting policy:

1. *Law Number 28 of 1999 Concerning Clean and Free State Administration from Corruption, Collusion, and Nepotism;*
2. *Law No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises; and*
3. *Law No. 13 of 2003 on Manpower.*

In terms of internal scope, the LHKPN reporting policy within Perum Jasa Tirta II was established via PRD 18/DIR/03/2019 concerning Amendments to the Regulation of the Board of Directors of Perum Jasa Tirta II No. I/DIR/02/PRD-DRD/2018 concerning Compliance Guidelines for Submission of State Administrators Wealth Reports (LHKPN) for Officials in Perum Jasa Tirta II.

LHKPN Mandatory Reporting

According to the applicable laws and regulations, mandatory reporting of LHKPN within the Company includes, among other things:



1. Dewan Pengawas dan Direksi;
2. Pejabat struktur sampai dengan dua tingkat di bawah Direksi;
3. Direksi Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Asosiasi;
4. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara.

Mekanisme Pelaporan LHKPN

Mekanisme pelaporan harta kekayaan pejabat Perusahaan dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, di mana wajib lapor berkewajiban untuk:

1. Diperiksa kekayaan sebelum, selama, dan sesudah menjabat;
2. Melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, dan pensiun;
3. Mengumumkan harta kekayaannya.

Pelaksanaan Lapor LHKPN Tahun 2022

Perum Jasa Tirta II telah menyampaikan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tahun buku 2021 yang dilaporkan di tahun 2022 oleh pejabat Perusahaan dengan jumlah dan rekapitulasi sebagai berikut:

UNIT KERJA/BISNIS/ANAK PERUSAHAAN / Business/Work Unit/Subsidiary	TOTAL WAJIB LAPOR / Total Officials	PELAPORAN 2022 / Reporting in 2022			
		TELAH MELAPORKAN / Have Report	%	BELUM MELAPORKAN / Have not Report	%
- Dewan Pengawas / Supervisory Board - Direksi / Board of Directors - BOD-1 (Struktural) / BOD-1 (Structural) - BOD-2 (Struktural) / BOD-2 (Structural)	86	85	98,84	1	1,16

Sosialisasi LHKPN

Sebagai wujud komitmen terhadap kepatuhan LHKPN, Perusahaan rutin melaksanakan sosialisasi dan pelatihan terkait tata cara penggunaan e-LHKPN untuk menindaklanjuti Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

1. The Supervisory Board and the Board of Directors;
2. Structural officials up to two levels below the Board of Directors;
3. Directors of Subsidiaries and/or Associated Companies; and
4. Other officials with strategic responsibilities in relation to state administrators.

Mechanism for LHKPN Reporting

The mechanism for reporting Company officials' assets is carried out in accordance with Law Number 28 of 1999, which requires reporting obligations to:

1. Check assets before, during, and after serving;
2. Report his assets at the time of first serving, transfers, promotions, and retirements; and
3. Announce his assets.

Implementation of the LHKPN

Report for 2022 Perum Jasa Tirta II reported the following amounts and recapitulation to the Corruption Eradication Commission (KPK) for the 2021 fiscal year, which was reported in 2022 by Company officials:

Socialization of the LHKPN

As part of its commitment to LHKPN compliance, the Company conducts routine socialization and training on procedures for using e-LHKPN to follow up on KPK Regulation Number 07 of 2016 concerning Procedures for Organizing Announcements and Examining State Administrators' Assets.



PENGADAAN BARANG DAN JASA

Procurement Of Goods And Services

Pelaksanaan dan pengelolaan barang dan jasa Perum Jasa Tirta II dilakukan melalui optimalisasi sinergi BUMN sebagai upaya pemberdayaan BUMN dengan prinsip saling menguntungkan dengan tetap berprinsip pada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, transparansi, fleksibilitas, jujur, adil, serta bebas dari benturan kepentingan. Penunjukan penyedia barang dan jasa dilakukan secara terbuka bagi pihak yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat. Seluruh proses pengadaan dilakukan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan, di mana Perusahaan juga telah memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penerapan prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik (GCG) dalam proses pengadaan akan menjadi mudah apabila didukung oleh seluruh komponen yang terlibat dalam proses pengadaan baik Divisi Pengadaan, Unit Kerja terkait dan Penyedia. Semua pihak haruslah bersama memahami dan serentak mengimplementasikan semua etika dan prinsip-prinsip pengadaan (efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel) yang telah terkandung dalam pasal-pasal kebijakan pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan.

Dasar Hukum Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa

Kebijakan yang diterapkan dalam proses pengadaan barang dan jasa mengacu pada peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: PER-08/MBU/12/2019 tentang pedoman umum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Badan Usaha Milik Negara, oleh karena itu manajemen menegluarkan peraturan direksi untuk mengadopsi aturan tersebut melalui Peraturan Direksi Nomor: PRD-21/DIR/11/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direksi PJT II Nomor: PRD-8/DIR/03/2020 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan PJT II.

The implementation and management of Perum Jasa Tirta II goods and services is carried out by optimizing SOE synergy in an effort to empower SOEs with the principle of mutual benefit while adhering to the principles of compliance with applicable laws and regulations, transparency, flexibility, honesty, fairness, and the absence of conflicts of interest. The appointment of providers of goods and services is done openly and through fair competition to parties who meet the requirements. The entire procurement process is carried out in accordance with clear and transparent provisions and procedures, with the Company also having its Own Estimated Price (HPS) calculated with expertise and based on accountable data.

The application of good corporate governance (GCG) principles in the procurement process will be easier if all components involved in the procurement process, including the Procurement Division, related Work Units, and Providers, support it. All parties must understand and implement all procurement ethics and principles (efficient, effective, transparent, open, competitive, fair, and accountable) outlined in the articles of the Company's Goods and Services procurement policy.

Policy Legal Foundation for Goods and Services Procurement

The procurement policy used in the process refers to the regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number: PER-08/MBU/12/2019 concerning general guidelines for the implementation of procurement of goods and services for State-Owned Enterprises. As a result, management issued a board of directors regulation to adopt the regulation via the Board of Directors Regulation Number: PRD-21/DIR/11/2020 concerning the Second Amendment to the PJT II Board of Directors Regulation Number: PRD-8/DIR/03/2020 concerning the guidelines for the implementation of procurement of goods/services in the PJT II environment. As part of

Prosedur dan Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa

Prosedur pengadaan barang dan jasa di lingkungan Perum Jasa Tirta II dilakukan secara sistematis, dimulai dari rencana pengadaan, proses pengadaan, penerimaan dan penyimpanan, serta pemakaian, penggunaan, dan manajemen aset oleh divisi terkait untuk mendapatkan persetujuan. Sebagaimana Peraturan Direksi PJT II No. PRD-10/DIR/10/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Perum Jsa Tirta II.

Perusahaan merencanakan transformasi sistem dalam mengelola dan mengendalikan kebijakan dan kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa dengan target memilih Penyedia Barang dan Jasa yang berpengalaman dan mampu memberikan mutu layanan terbaik, harga kompetitif, garansi purna jual terbaik dan dilaksanakan oleh Perusahaan berpengalaman yang memiliki keahlian sesuai dengan kebutuhan barang dan jasa.

Informasi mengenai realisasi pengadaan barang dan jasa selama tahun 2022 yang direalisasikan adalah sebagai berikut:

Procedures for the Production of Goods and Services Procurement

Procedures for the procurement of goods and services are carried out systematically within Perum Jasa Tirta II, beginning with the procurement plan, procurement process, receipt and storage, as well as the use, use, and management of assets by the relevant divisions for approval. As the PJT II Board of Directors Regulation No. PRD-10/DIR/10/2022 concerning Guidelines for the Implementation of Procurement of Goods / Services within Perum Jsa Tirta II.

The company intends to implement a system transformation in managing and controlling policies and activities related to the procurement of goods and services, with the goal of selecting Goods and Services Providers who are experienced and capable of providing the best service quality, competitive prices, and best after-sales guarantees, and are carried out by experienced companies with the necessary expertise.

The following information is available regarding the procurement of goods and services during 2022:

NO.	NAMA MITRA (BUMN/ANAK) / Partner Name (SOE/Child)	NAMA KEGIATAN/PROYEK / Activity/Project Name	NILAI PROYEK (DALAM RP) / Project Value (in IDR)
1.	PT. Indra Karya (Persero)	Pengawasan Rehabilitasi SCADA dan system Kontrol Utama Unit 6 / Supervision of SCADA Rehabilitation and Unit 6 Main Control System	480.000.000
2.	PT. Indra Karya (Persero)	Kajian Aspek Hukum dan Teknis Pengusahaan Penyaluran Energi Listrik ke PT Pupuk Kujang (Persero) / Review of Legal and Technical Aspects of Electricity Distribution Business to PT Pupuk Kujang (Persero)	147.977.500
3.	PT. Indra Karya (Persero)	Kajian Aspek Financial, Bisnis dan Lingkungan Pengusahaan Penyaluran Energi Listrik ke PT Pupuk Kujang (Persero) / Review of Financial, Business and Environmental Aspects of Electric Energy Distribution Business to PT Pupuk Kujang (Persero)	147.796.500
4.	PT. Yodya Karya (Persero)	Pengawasan Pembangunan Fasad, Interior Meeting Room dan Facelift Gedung Grha Vidya / Supervision of the Construction of Facades, Meeting Room Interiors and Facelift of Grha Vidya Building	410.905.000
5.	PT Surveyor Indonesia	Asset, Land, And Property Management System Enhancement / Asset, Land, and Property Management System Enhancement	851.482.500
6.	PT Surveyor Indonesia	IT Maturity & Transformasi INDI 4.0 Perum Jasa Tirta II / IT Maturity & INDI 4.0 Transformation of Perum Jasa Tirta II	964.502.000
7.	PT. Infomedia Nusantara	Implementasi Platform & Manage Service Global Shared Service (GSS) BUMN pada Modul Human Capital, Finance dan Procurement di Lingkungan Perum Jasa Tirta II / Implementation of SOE Global Shared Service (GSS) Platform & Manage Service on Human Capital, Finance and Procurement Modules in Perum Jasa Tirta II Environment	5.181.836.000
8.	PT. Indra Karya (Persero)	Konsultan FS Pilot Project SPAM Pamanukan (Tim Pilot Project SPAM Pamanukan) / FS Consultant for SPAM Pamanukan Pilot Project (SPAM Pamanukan Pilot Project Team)	499.015.000
9.	PT. Indra Karya (Persero)	Perpanjangan Persetujuan Operasi Waduk Ir. H. Djuanda / Extension of Ir. H. Djuanda Reservoir Operation Approval	143.000.000
10.	PT. Indra Karya (Persero)	DED Pembangunan Jaringan Pasok Listrik ke PT. Pupuk Kujang / DED of Electricity Supply Network Development to PT Pupuk Kujang	248.995.200
11.	PT. Virama Karya (Persero)	Kajian Neraca Ketersediaan Air WS Citarum / WS Citarum Water Availability Balance Study	1.369.262.700



NO.	NAMA MITRA (BUMN/ANAK) / Partner Name (SOE/Child)	NAMA KEGIATAN/PROYEK / Activity/Project Name	NILAI PROYEK (DALAM RP) / Project Value (in IDR)
12.	PT. INDRA KARYA (PERSERO)	Konsultan FS Pilot Project SPAM Pamanukan (Tim Pilot Project SPAM Pamanukan) / FS Consultant for SPAM Pamanukan Pilot Project (SPAM Pamanukan Pilot Project Team)	499.015.000
13.	PT. INDRA KARYA (PERSERO)	DED Pembangunan Jaringan Pasok Listrik ke PT. Pupuk Kujang / DED Development of Electricity Supply Network to PT Pupuk Kujang	248.995.200
14.	PT. VIRAMA KARYA (PERSERO)	Kajian Neraca Ketersediaan Air WS Citarum / WS Citarum Water Availability Balance Study	1.369.262.700
15.	PT. SARINAH	Pakaian Kerja / Workwear	1.448.169.270
16.	PT. VIRAMA KARYA (PERSERO)	Konsultansi Potensi Pengembangan Usaha pada 3 (tiga) Wilayah Sungai Baru / Consultancy on Potential Business Development in 3 (three) New River Basins	472.676.850
17.	PT. VIRAMA KARYA (PERSERO)	Basic Design Penataan Kantor dan DED Modernisasi Network Operation Center (NOC) Room / Basic Design of Office Arrangement and DED of Network Operation Centre (NOC) Room Modernisation	970.234.350
18.	PT. VIRAMA KARYA (PERSERO)	DED Pembangunan Gedung Serba Guna/GOR / DED of Multipurpose Building/GOR Construction	483.140.543
19.	PT. NINDYA BETON	Rehabilitasi Gorong-Gorong (Cross Drain) B.Tb. 38 a / Cross Drain Rehabilitation B.Tb. 38 a	2.653.199.700

Sebagai wujud komitmen terhadap kepatuhan LHKPN, Perusahaan rutin melaksanakan sosialisasi dan pelatihan terkait tata cara penggunaan e-LHKPN untuk menindaklanjuti Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Its commitment to LHKPN compliance, the Company routinely conducts socialization and training related to procedures for using e-LHKPN to ensure compliance with KPK Regulation Number 07 of 2016.

Procedures for Implementing Announcements and Examination of State Administrators' Assets.

Dasar Hukum Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa

Kebijakan yang diterapkan dalam proses pengadaan barang dan jasa mengacu pada peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: PER08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, oleh karena itu manajemen mengeluarkan peraturan direksi untuk mengadopsi aturan tersebut melalui Peraturan Direksi Nomor: PRD-21/DIR/11/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direksi PJT II Nomor: PRD-8/DIR/03/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan PJT II.

Legal Basis of Policy for the Procurement of Goods and Services

The policy applied in the process of procurement of goods and services refers to the regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number: PER08/MBU/12/2019 concerning General Guidelines for the Implementation of Procurement of Goods and Services for State-Owned Enterprises, therefore Therefore, management issued a board of directors regulation to adopt the regulation through the Board of Directors Regulation Number: PRD-21/DIR/11/2020 concerning the Second Amendment to the Regulation of the PJT II Board of Directors Number: PRD-8/DIR/03/2020 concerning Guidelines for the Implementation of the Procurement of Goods/Services in PJT II environment.

Prosedur dan Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa

Prosedur pengadaan barang dan jasa di lingkungan Perum Jasa Tirta II dilakukan secara sistematis, dimulai dari rencana pengadaan, proses pengadaan,

Procedures and Realization of Goods and Services

Procurement Procedures for the procurement of goods and services within Perum Jasa Tirta II are carried out systematically, starting from the procurement plan, procurement process, receipt and storage, as well as



penerimaan dan penyimpanan, serta pemakaian, penggunaan, dan manajemen aset oleh divisi terkait untuk mendapatkan persetujuan. Perusahaan merencanakan transformasi sistem dalam mengelola dan mengendalikan kebijakan dan kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa dengan target memilih Penyedia Barang dan Jasa yang berpengalaman dan mampu memberikan mutu layanan terbaik, harga kompetitif, garansi purna jual terbaik dan dilaksanakan oleh perusahaan berpengalaman yang memiliki keahlian sesuai dengan kebutuhan barang dan jasa.

the use, use, and management of assets by the relevant divisions for approval. The company plans a system transformation in managing and controlling policies and activities related to the procurement of goods and services with the target of selecting Goods and Services Providers who are experienced and able to provide the best service quality, competitive prices, best after-sales guarantees and are carried out by experienced companies that have the appropriate expertise. with the need for goods and services.

PROGRAM ANTI KORUPSI

Anti-Corruption Program

Program anti korupsi dapat menjadi nilai tambah bagi Perusahaan dan memberikan keunggulan dari korporasi lainnya. Dalam menjalankan program ini Perum Jasa Tirta II menerapkan sistem dan prosedur yang transparan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan kesalahan dalam pelaksanaan prosedur serta pengelolaan supplier secara obyektif berdasarkan kualifikasi dan kinerjanya. Disamping itu, Perum Jasa Tirta II mengeluarkan himbuan kepada seluruh vendor untuk tetap menjaga dan mendukung Perum Jasa Tirta II dengan tidak memberikan/ melayani permintaan berupa imbalan atau hadiah dalam bentuk apapun kepada seluruh pejabat maupun karyawan Perum Jasa Tirta II.

Anti-corruption programs can add value to the company and give it an advantage over competitors. In carrying out this program, Perum Jasa Tirta II uses transparent systems and procedures to avoid abuse of authority, errors in procedure implementation, and objectively managing suppliers based on their qualifications and performance. Furthermore, Perum Jasa Tirta II issued an appeal to all vendors to maintain and support Perum Jasa Tirta II by not providing/serving requests in the form of rewards or gifts in any form to all Perum Jasa Tirta II officials and employees.

Kebijakan Gratifikasi

Program Pengendalian Gratifikasi merupakan program kerja sama yang dilakukan antara Perum Jasa Tirta II dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik (KPK). Adapun penerapan Program Pengendalian Gratifikasi diawali dengan penerapan budaya Perusahaan yang didalamnya terdapat tata nilai atau nilai-nilai utama yang menjadi *corporate value* Perum Jasa Tirta II. Program Pengendalian Gratifikasi adalah sekumpulan perangkat dan rangkaian kegiatan serta mekanisme pengendalian gratifikasi secara berkesinambungan guna menjaga integritas pegawai dari praktik gratifikasi yang dilarang.

Policy on Gratification

The Gratification Control Program is a joint initiative of Perum Jasa Tirta II and the Republican Corruption Eradication Commission (KPK). The implementation of the Gratification Control Program begins with the establishment of a corporate culture in which there are core values or values that become Perum Jasa Tirta II's corporate values. The Gratification Control Program is a collection of tools and activities, as well as a continuous gratification control mechanism, designed to protect employees from prohibited gratification practices.

Dalam mewujudkan komitmen Program Pengendalian Gratifikasi maka *corporate value* Perum Jasa Tirta II dijabarkan dalam bentuk *code of conduct* (etika usaha dan tata perilaku) untuk menjadi acuan perilaku bagi

In order to fulfill the commitment of the Gratification Control Program, Perum Jasa Tirta II's corporate values are described in the form of a code of conduct (business ethics and behavior) to serve as a behavioral



Dewan Pengawas, Direksi dan seluruh pegawai Perum Jasa Tirta II dalam mengelola Perusahaan guna mencapai visi, misi dan tujuan Perusahaan. Salah satu etika perilaku yang terdapat pada *code of conduct* yaitu standar etika untuk menghindari benturan kepentingan (penanganan benturan kepentingan/*conflict of interest*) dan penyalahgunaan jabatan serta etika untuk tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan jabatan.

Program pengendalian gratifikasi terdiri dari pembuatan perangkat aturan tentang pengendalian gratifikasi, perluasan harta kekayaan pegawai, tata kerja pelaporan pengaduan (*whistleblowing system*), etika usaha dan tata perilaku (*code of conduct*) pembentukan organisasi yang mengelola pengendalian gratifikasi, kegiatan sosialisasi/ diseminasi tentang aturan pengendalian gratifikasi dan peningkatan kesadaran individu dan organisasi tentang gratifikasi serta implementasi pengelolaan pelaporan penerimaan gratifikasi yang berkoordinasi dengan pihak KPK.

Pakta Integritas

Dalam rangka menegakkan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) di Perusahaan setiap pegawai Perusahaan telah menandatangani pakta integritas untuk berkomitmen sebagai berikut:

1. Senantiasa mematuhi Hukum dan Ketentuan-Ketentuan Peraturan perundang-Undangan;
2. Bertindak objektif dan berpegang teguh pada nilai etika dan moral, adil, transparan, konsisten serta menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen;
3. Berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara amanah dan profesional sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) guna memberikan hasil terbaik bagi Perusahaan;
4. Tidak pernah dan tidak akan pernah membuat keputusan dan/atau memberikan perintah yang bertujuan akan memanfaatkan Perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk menguntungkan saya secara pribadi, keluarga dan/atau golongan tertentu;
5. Berperan aktif dalam upaya pencegahan, pemberantasan *Fraud* serta bersedia melakukan pelaporan dalam hal terjadinya tindakan *Fraud* dilingkungan Perusahaan dan tidak akan melakukan segala bentuk tindakan *Fraud* serta menghindarkan diri dari perbuatan yang mempermudah atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan tindakan *Fraud*;

reference for the Supervisory Board, Board of Directors, and all employees of Perum Jasa Tirta II in managing the Company in order to achieve the Company's vision, mission, and objectives. One of the ethical behaviors outlined in the code of conduct is the requirement to avoid conflicts of interest (handling conflicts of interest) and abuse of office, as well as the prohibition on accepting any form of gratuity related to positions.

The gratification control program consists of developing a set of gratification control rules, expanding employee assets, working procedures for reporting complaints (whistleblowing system), Establishing an organization that manages gratification control, socialization/ dissemination activities on control rules, business ethics and code of conduct gratification and raising awareness among individuals and organizations about gratification, as well as the implementation of management reporting on gratification receipt in collaboration with the KPK.

Pact of Integrity

To enforce Good Corporate Governance in the Company, every employee has signed an integrity pact committing to the following:

1. *Always follow the rules and regulations;*
2. *Act objectively and adhere to ethical and moral values, be fair, transparent, consistent, and uphold honesty and commitment;*
3. *Committed to carrying out duties and responsibilities in a trustworthy and professional manner in accordance with Good Corporate Governance principles in order to provide the best results for the Company;*
4. *I have never and will never make decisions or issue orders with the intent of taking advantage of the Company, either directly or indirectly, to benefit myself, my family, or specific groups.*
5. *Participate actively in fraud prevention and eradication efforts and are willing to report fraudulent actions within the Company; will not engage in all forms of fraudulent behavior; and will avoid actions that facilitate or provide opportunities for others to engage in fraudulent behavior.*



6. Menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
7. Tidak mempunyai jabatan lain pada Badan Usaha lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan;
8. Akan mengajak pelaku-pelaku usaha yang berkaitan di Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk juga melaksanakan Pakta Integritas, serta menyampaikan informasi kepada Perusahaan tentang terjadinya dan ataupun indikasi adanya *Fraud*, pelanggaran atau perbuatan melawan hukum lain yang dilakukan oleh Penguru dan/atau Pekerja Perusahaan;
9. Telah memahami dan bersedia untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya:
 - a. Pedoman *Good Corporate Governance* Perusahaan;
 - b. Standar Etika Perusahaan;
 - c. Budaya Perusahaan;
 - d. Budaya Kepatuhan dan Budaya Risiko serta budaya Anti *Fraud*;
 - e. Demi tercapainya tata kelola Perusahaan yang baik.

6. *Establishing a work environment free of Corruption, Collusion, and Nepotism (KKN);*
7. *Having no other positions in other Business Entities that may cause a direct or indirect conflict of interest with the Company;*
8. *Will invite business actors who are directly or indirectly related to the Company to participate in the implementation of the Integrity Pact, as well as inform the Company of the occurrence and/or indications of fraud, violations, or other illegal acts committed by the teacher and/or Company Workers*
9. *Have comprehended and are willing to carry out as effectively as possible:*
 - a. *Good Corporate Governance Guidelines for the Company;*
 - b. *Ethical Standards for the Company;*
 - c. *Corporate Culture;*
 - d. *Compliance Culture, Risk Culture, and Anti-Fraud Culture;*
 - e. *In order to achieve good corporate governance.*

Pengelolaan Pengendalian Gratifikasi

Mekanisme Pelaporan Gratifikasi

Laporan Gratifikasi Setiap Wajib Lapor Gratifikasi wajib untuk menyampaikan laporan Gratifikasi dalam hal:

1. Telah menerima Gratifikasi;
2. Telah menolak suatu penerimaan dan/atau permintaan Gratifikasi;
3. Telah memberikan Gratifikasi;
4. Sama sekali tidak melakukan praktek Gratifikasi (dalam hal ini Pimpinan/Kepala Unit Kerja tidak menerima Laporan atas penerimaan dan/atau pemberian Gratifikasi, maka wajib melakukan pelaporan paling lambat setiap tanggal 15 Bulan berikutnya).

Pegawai Perusahaan atau Pihak Ketiga yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat pada Pedoman ini, agar segera melaporkan pelanggaran dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan melalui Divisi Kepatuhan. Perusahaan menjamin bahwa proses pelaporan Gratifikasi yang dilakukan oleh Insan Perusahaan maupun Pihak Ketiga akan dijaga kerahasiaannya. Proses pelaporan dalam program pengendalian Gratifikasi antara lain:

1. Setiap Pegawai Perusahaan harus melaporkan atas penerimaan Gratifikasi yang dianggap suap dan Gratifikasi Dalam Kedinasan kepada Divisi Kepatuhan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penerimaan Gratifikasi.

Gratification Management Gratification

Control Mechanism Reporting

Report on Gratification Every Gratification Reporting Compulsory is required to submit a Gratification report in the following circumstances:

1. *Received Gratification;*
2. *Rejected an acceptance and/or request for Gratification;*
3. *Given Gratification;*
4. *Completely not practicing Gratification (If the Head/ Head of Work Unit does not receive a Report on the Acceptance and/or Granting of Gratification, it is required to report it by the 15th of the following month).*

Employees of the Company or Third Parties who become aware of any violation of the provisions of this Code must immediately report the violation to the Compliance Division in accordance with the applicable provisions in the Company. The Company guarantees that the gratification reporting process will be kept confidential by Company Personnel and Third Parties. The reporting process in the Gratification control program includes the following steps:

1. *Every employee of the Company must report the receipt of Gratification which is considered a bribe and Gratification in Service to the Compliance Division no later than 7 (seven) working days after receiving the Gratification.*



2. Setiap Pegawai Perusahaan harus melaporkan penolakan atas Penerimaan Gratifikasi kepada Divisi Kepatuhan.
3. Setiap Pegawai Perusahaan harus melaporkan atas Pemberian kepada Pihak Ketiga yang tidak sesuai dengan ketentuan pemberian.
4. Setiap Pegawai Perusahaan harus melaporkan permintaan dari Pihak Ketiga yang menjerus kepada pemerasan dan/atau pemaksaan yang terkait dengan kelancaran proses Bisnis Perusahaan kepada Unit Kerja terkait untuk selanjutnya disampaikan kepada Divisi Kepatuhan.
5. Divisi Kepatuhan menyampaikan Lembar Penyerahan Penanganan Atas Pelaporan Penerimaan Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
6. Divisi Kepatuhan menyampaikan Lembar Rekapitulasi Penanganan dan Tindak Lanjut Pelaporan Penerimaan yang dikelola setiap bulan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi
7. Divisi Kepatuhan menyampaikan Laporan Rekapitulasi Penanganan dan Tindak Lanjut Pelaporan Penerimaan dan Pemberian Gratifikasi kepada Direksi setiap periode 3 (tiga) bulan.

Sosialisasi Kebijakan Gratifikasi

Perusahaan senantiasa selalu mensosialisasikan terkait penerapan Gratifikasi kepada setiap insan Perusahaan melalui media elektronik seperti pada media social Perusahaan, pamphlet dan melalui penerbitan slogan-slogan anti Gratifikasi.

Laporan Gratifikasi 2022

Selama tahun 2022 pada Perum Jasa Tirta II tidak terdapat laporan gratifikasi.

Sanksi/Tindaklanjut atas Pengaduan tahun 2022

Selama tahun 2022 tidak terdapat sanksi dan *fraud*.

Pelanggaran (*Fraud*) Internal

Pelanggaran (*Fraud*) Internal dilakukan oleh internal Perusahaan maupun internal yang berkolusi dengan eksternal. Pemeriksaan atas pelanggaran (*fraud*) internal dilakukan oleh Internal Audit.

Korupsi Internal

Kecurangan internal dilakukan oleh pihak internal atau internal yang berkolusi dengan pihak eksternal perusahaan. Audit Internal bertanggung jawab untuk menyelidiki kecurangan internal.

2. Every Employee of the Company must report the rejection of Gratification Acceptance to the Compliance Division.
3. Every employee of the company must report on giving to a third party that is not in accordance with the provisions of the gift.
4. Every Company Employee must report requests from Third Parties that lead to extortion and/or coercion related to the smooth running of the Company's Business processes to the relevant Work Units for further submission to the Compliance Division.
5. The Compliance Division submits to the Corruption Eradication Commission a Sheet for Handling of Gratification Acceptance Reports.
6. The Compliance Division submits to the Corruption Eradication Commission the Recapitulation Sheet for Handling and Follow-up on Revenue Reports, which are managed monthly.
7. Every three (three) months, the Compliance Division submits to the Board of Directors a Report on the Recapitulation of Handling and Follow-up on Reporting on Receipt and Granting of Gratification.

Policy of Gratification Socialization

The Company always socializes the implementation of Gratification to all of its employees via electronic media such as social media, pamphlets, and the publication of anti-Gratification slogans.

Gratification Report 2022

There was no gratification report at Perum Jasa Tirta II in 2022.

Sanctions/Complaint Follow-up in 2022

During 2022 there were no sanctions and no *fraud*.

Internal Fraud

Internal Fraud is committed by the Company's internal or external collusion. Examination of internal offences (*fraud*) is carried out by Internal Audit.

Internal Corruption

Internal fraud is committed by the internal or internal in collusion with the external of the company. Internal Audit is in charge of investigating internal fraud.



INTERNAL FRAUD / Internal Fraud	JUMLAH FRAUD YANG DILAKUKAN / Number Of Frauds Permitted					
	ANGGOTA DEWAN PENGAWAS / Members Of The Supervisory Board		PEGAWAI TETAP / Permanent Employee		PEGAWAI TIDAK TETAP / Temporary Employees	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Total Penyimpangan / Total Fraud	0	0	0	1	0	0
Telah diselesaikan / Telah diselesaikan	0	0	0	0	0	0
Dalam proses penyelesaian di Internal Perseroan / In the process of completion in the Company's Internal	0	0	0	1	0	0
Belum diupayakan penyelesaian / No solution yet	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui Proses Hukum / Has been followed up through the Legal Process	0	0	0	0	0	0

BUYBACK SAHAM DAN BUYBACK OBLIGASI

Stock Buyback and Bond Buyback

Buyback Saham

Hingga 31 Desember 2022 Perum Jasa Tirta II tidak pernah menawarkan dan/atau menjual sahamnya kepada pihak manapun, sehingga tidak pernah melakukan pembelian kembali (buyback) sahamnya.

Share Repurchase

Perum Jasa Tirta II has never offered and/or sold its shares to any party as of December 31, 2022, so it has never bought back (buyback) its shares.

Buyback Obligasi

Hingga 31 Desember 2022 Perum Jasa Tirta II tidak pernah menerbitkan obligasi, sehingga tidak pernah melakukan pembelian kembali (buyback) obligasi.

Bond Purchase

Perum Jasa Tirta II had never issued bonds as of December 31, 2022, so it had never bought back (buyback) bonds.

RENCANA STRATEGIS PERUSAHAAN

Company's Strategic Plan

Rencana Strategis Perusahaan, baik jangka panjang maupun menengah telah dijelaskan pada bagian Strategi Perum Jasa Tirta II tahun 2022 Bab Analisis dan Pembahasan Manajemen dalam Laporan Tahunan ini.

The company's strategic plan, including the length and medium term, is described in the Perum Jasa Tirta II Strategy section 2022 Chapter Management Analysis and Language in this Annual Report.
There were no transactions in 2021 that involved a conflict of interest.

TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Transactions Containing Conflict of Interest

Selama tahun 2022, tidak terjadi transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

During 2022, there were no transactions containing conflicts of interest.

NAMA DAN JABATAN PIHAK YANG MEMILIKI BENTURAN KEPENTINGAN / Name And Position Of Parties With Conflict Of Interest	NAMA DAN JABATAN PENGAMBIL KEPUTUSAN / Name And Position Of Decision Makers	JENIS TRANSAKSI / Transaction Type	KETERANGAN / Description
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL



Perselisihan Internal Perusahaan

Selama tahun 2022 tidak pernah terjadi perselisihan internal di dalam Perum Jasa Tirta II, sehingga tidak ada informasi mengenai perselisihan internal Perum Jasa Tirta II.

Pencegahan Transaksi Orang Dalam (Insider Trading)

Perum Jasa Tirta II hingga tanggal 31 Desember 2022 tidak pernah mencatatkan sahamnya ataupun obligasi ke Bursa Efek Indonesia (BEI) ataupun bursa manapun, sehingga tidak ada peristiwa yang berpotensi memunculkan praktik *insider trading*.

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Perusahaan

Perum Jasa Tirta II memenuhi kewajiban transparansi dan publikasi kondisi keuangan dan non-keuangan sesuai ketentuan berlaku, melalui penyampaian dan publikasi informasi baik melalui media cetak maupun situs web Perusahaan sebagaimana berikut ini:

1. Laporan Keuangan Bulanan kepada regulator, yang juga dipublikasikan melalui situs web BI dan Perum Jasa Tirta II.
2. Laporan Keuangan Triwulan kepada regulator, yang juga dipublikasikan melalui media cetak dan situs web Perum Jasa Tirta II.
3. Laporan Tahunan Perum Jasa Tirta II yang disusun dan disajikan sesuai ketentuan dan disampaikan kepada regulator, rating agency, lembaga pengembangan perusahaan, lembaga/institusi riset dan majalah keuangan dan dipublikasikan melalui situs web Perum Jasa Tirta II.
4. Informasi Tata Kelola Perusahaan, yang diantaranya adalah Laporan Tahunan Tata Kelola Perusahaan, Visi, Misi, Nilai Perusahaan, Komposisi dan Profil Dewan Pengawas dan Direksi, serta ketentuan internal terkait tata kelola mulai dari Anggaran Dasar hingga Piagam Komite-komite yang juga dipublikasikan melalui situs web Perum Jasa Tirta II.
5. Informasi Produk dan Layanan Perusahaan termasuk jaringan kantornya dipublikasikan melalui Laporan Tahunan dan situs web Perum Jasa Tirta II, agar konsumen, investor dan masyarakat luas dapat dengan mudah mengakses informasi atas produk dan layanan Perum Jasa Tirta II.
6. Informasi Prosedur Penyampaian Pengaduan, Kebijakan Keamanan Informasi dan Tips bagi Konsumen dalam menggunakan layanan perusahaan yang dipublikasikan melalui situs web Perum Jasa Tirta II untuk pelaksanaan ketentuan perlindungan konsumen.

Disputes within the Company

There was no internal conflict within Perum Jasa Tirta II in 2022, so there is no information regarding the internal conflict of Perum Jasa Tirta II.

Insider Trading Avoidance

Perum Jasa Tirta II has never listed its shares or bonds on the Indonesia Stock Exchange (IDX) or any other exchange as of December 31, 2022, so there are no events that could lead to insider trading practices.

Financial and non-financial condition transparency

The company Perum Jasa Tirta II fulfills its transparency and publication of financial and non-financial conditions in accordance with applicable regulations by submitting and publishing the following information through print media and the Company's website:

1. *Monthly Financial Reports to Regulators, which are also available on the websites of the BI and Perum Jasa Tirta II.*
2. *Quarterly Financial Reports to Regulators, which are also made available in print and on the Perum Jasa Tirta II website.*
3. *Perum Jasa Tirta II Annual Report, which is prepared and presented in accordance with the provisions, and which is submitted to regulators, rating agencies, company development agencies, research institutions/institutions, and financial magazines, as well as being published on the Perum Jasa Tirta II website.*
4. *Corporate Governance Information, which includes the Annual Report on Corporate Governance, Vision, Mission, Corporate Values, Composition and Profile of the Supervisory Board and the Board of Directors, as well as internal governance regulations ranging from the Articles of Association to the Committees Charter, all of which are also available on the Perum Jasa Tirta II website.*
5. *The Annual Report and the Perum Jasa Tirta II website publish information on the Company's products and services, including its office network, so that consumers, investors, and the general public can easily access information on Perum Jasa Tirta II's products and services.*
6. *Information on Complaint Submission Procedures, Information Security Policies, and Consumer Tips for Using the Company's Services published on the Perum Jasa Tirta II website for the implementation of consumer protection provisions*



7. Informasi lainnya yang bertujuan untuk mendukung keterbukaan informasi, edukasi keuangan dan layanan kepada masyarakat.

7. *Other information aimed at assisting with information disclosure, financial education, and public services*

PRAKTIK BAD CORPORATE GOVERNANCE

Bad Corporate Governance Practice

Salah satu komitmen Perum Jasa Tirta II dalam menjalankan praktik terbaik GCG diwujudkan melalui pencegahan dan minimalisasi potensi terjadinya praktik *Bad Corporate Governance* yang mampu membawa dampak negatif terhadap keberlangsungan usaha Perusahaan. Evaluasi atas keberhasilan pencegahan terjadinya praktik *Bad Corporate Governance* dijabarkan dalam uraian sebagai berikut:

Laporan atas Aktivitas Perusahaan yang Mencemari Lingkungan

Selama tahun 2022, tidak terdapat laporan terkait indikasi aktivitas kegiatan usaha Perusahaan yang mencemari lingkungan sekitar.

One of Perum Jasa Tirta II's commitments in implementing GCG best practices is realized through the prevention and minimization of the potential for Bad Corporate Governance practices that can negatively impact the Company's business sustainability. The following description describes the evaluation on the success of preventing the occurrence of Bad Corporate Governance practices:

Report on Environmentally Polluting Company Activities

There were no reports of the Company's business activities polluting the surrounding environment during 2022.

Laporan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Selama tahun 2022 Perusahaan telah memenuhi seluruh kewajiban perpajakan. Hal tersebut juga sejalan dengan tidak terdapatnya teguran kepada Perusahaan terkait permasalahan perpajakan.

Report on Tax Obligation Fulfillment

The Company met all of its tax obligations in 2022. This is also consistent with the absence of a tax warning to the Company.

Kasus Terkait Buruh dan Pegawai

Selama tahun 2022 tidak tercatat adanya kasus yang melibatkan Perusahaan dengan buruh atau pegawai Perusahaan. Rekapitulasi perkara dan gugatan baik yang dilakukan dan/atau ditunjukkan kepada Perusahaan telah dijabarkan dalam pembahasan informasi Permasalahan Hukum dalam Laporan Tahunan ini.

Cases Concerning Workers and Employees

There were no recorded cases involving the Company and its employees or employees of the Company in 2022. The discussion of Legal Issues information in this Annual Report includes a recapitulation of cases and lawsuits that have been made and/or presented to the Company.

Hubungan dengan Pejabat Publik dan Pejabat Pemerintah

Perusahaan memiliki kebijakan yang mengatur hubungan dengan pejabat publik dan pejabat Pemerintah melalui ketentuan hubungan kerja yang dimuat dalam Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) Perusahaan.

Relationships with Public and Government Officials

Through the employment relationship provisions in the Company's Code of Conduct, the Company has a policy that regulates relations with public officials and government officials.



Untuk meningkatkan kualitas dan cakupan implementasi tata kelola secara berkelanjutan, Perum Jasa Tirta II telah menyusun dan menerapkan kebijakan-kebijakan operasional bagi seluruh unit kerja sejalan dengan prinsip tata kelola Perusahaan.

Kebijakan Tata Kelola

Penerapan GCG Perum Jasa Tirta II secara optimal dilakukan dengan penguatan berbagai kebijakan dan manual GCG untuk mencapai praktik-praktik terbaik, system dan prosedur yang andal sesuai dengan perkembangan bisnis dan regulasi perPerusahaan an. Perum Jasa Tirta II melengkapi pelaksanaan GCG dengan berbagai kebijakan dan *Standard Operating Procedures (SOP)* antara lain:

- Penyusunan Buku Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*);
- *Charter* Dewan Pengawas
- *Charter* Direksi
- *Charter* Komite Audit
- *Charter* Komite Pemantau Resiko
- *Charter* Komite Remunerasi dan Nominasi
- Piagam Koordinasi Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan dengan Dewan Pengawas
- *Charter* Internal Audit
- *Code of Conduct*
- Kebijakan dan SOP Lainnya

Perum Jasa Tirta II has developed and implemented operational policies for all work units in accordance with corporate governance principles in order to improve the quality and scope of sustainable governance implementation.

GCG Implementation Governance Policy

Perum Jasa Tirta II is carried out optimally by strengthening various GCG policies and manuals in order to achieve best practices, dependable systems, and procedures in accordance with business developments and company regulations. Perum Jasa Tirta II supplements GCG implementation with a variety of policies and Standard Operating Procedures (SOP), such as:

- *Supervisory Board Charter*
- *Board of Directors Charter*
- *Audit Committee Charter*
- *Risk Monitoring Committee Charter*
- *Remuneration and Nomination Committee Charter*
- *Coordination Charter with Supervisory Board for Director in Charge of Compliance Function and Compliance Work Unit*
- *Internal Audit Charter*
- *Code of Conduct*
- *Other Policies and SOPs*

TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS

*Overview of
Business Support*







SUMBER DAYA MANUSIA

Human Resources



Sumber Daya Manusia memiliki peran penting sebagai katalisator penggerak keberlangsungan usaha Perusahaan, sehingga kehadirannya dimaknai sebagai aset utama Perusahaan yang membutuhkan pengelolaan yang baik. Kehadiran SDM terbaik yang profesional, kompeten, berdedikasi, dan berintegritas akan membuat Perusahaan memiliki dasar yang kuat untuk terus tumbuh dan berkembang mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Dalam rangka memenuhi kepentingan tersebut, Perum Jasa Tirta II telah mengembangkan kebijakan akomodatif dalam pengelolaan SDM dengan berbasis pada strategi dan rencana bisnis Perusahaan, di antaranya Sistem Kinerja Berbasis Kompetensi yang terdiri dari Kamus Kompetensi dan Kebutuhan Kompetensi Jabatan, Sistem Penilaian Kinerja, Pengembangan Kompetensi Karyawan Pembinaan dan Pengembangan Karir Karyawan, Pembentukan Komite Appraisal, dan Sistem Remunerasi Karyawan. Berbekal kebijakan pengelolaan tersebut, Perusahaan optimis dapat mencetak SDM unggul yang mampu membawa Perusahaan pada pencapaian usaha yang lebih baik secara berkelanjutan.

Human Resources have an important role as a catalyst for driving the Company's business continuity, so that its presence is interpreted as the Company's main asset that requires good management. The presence of the best human resources who are professional, competent, dedicated, and with integrity will make the Company have a strong foundation to continue to grow and develop to achieve the vision and mission that has been set. In order to fulfill these interests, Perum Jasa Tirta II has developed an accommodative policy in HR management based on the Company's strategy and business plan, including a Competency-Based Performance System consisting of a Competency Dictionary and Position Competency Needs, Performance Assessment System, Employee Competency Development Coaching and Employee Career Development, Establishment of Appraisal Committee, and Employee Remuneration System. Armed with these management policies, the Company is optimistic that it can produce superior human resources who are able to lead the Company to achieve better business achievements on an on going basis.

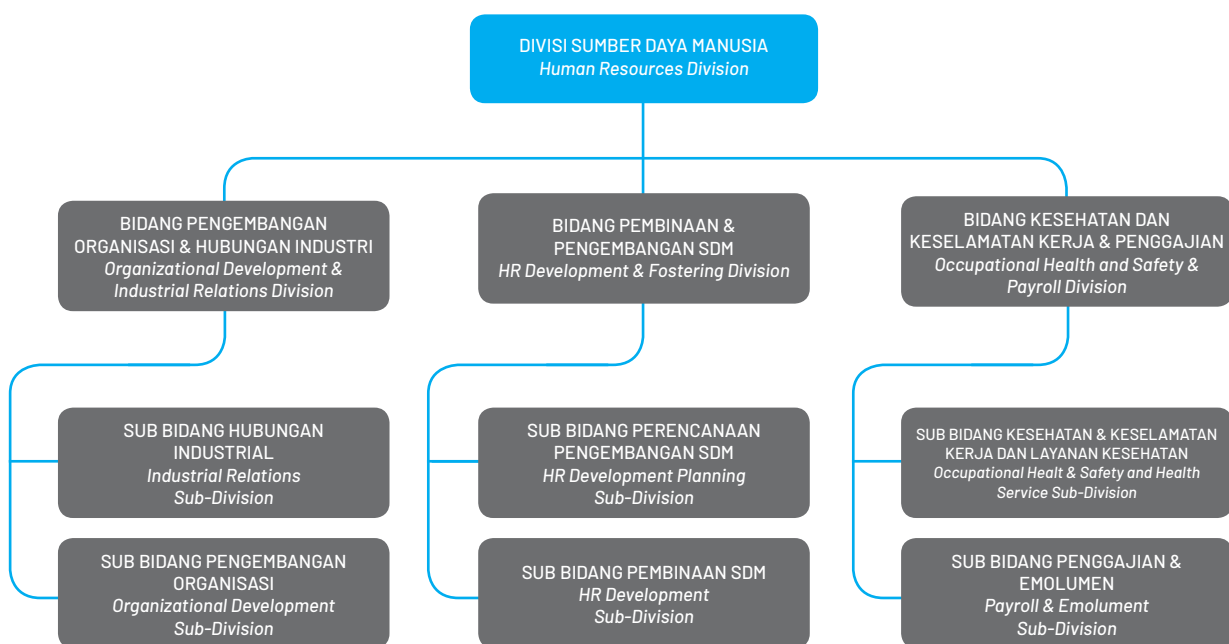


Struktur Pengelola SDM

Pengelolaan SDM di Perum Jasa Tirta II berada di bawah Divisi Sumber Daya Manusia, yang bertanggung jawab kepada Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Resiko. Saat ini, Kepala Divisi SDM dijabat oleh Euis Rina Rismayanti. Profil beliau telah tercantum pada Laporan Tahunan ini, di bagian Profil Kepala Divisi.

HR Management Structure

HR management at Perum Jasa Tirta II is under the Human Resources Division, which reports to the Director of Finance, HR and Risk Management. At present, the Head of the HR Division is held by Euis Rina Rismayanti. His profile is contained in this Annual Report, in the Division Head Profile section.



Tugas Pokok Divisi Sumber Daya Manusia

Divisi Sumber Daya Manusia Perum Jasa Tirta II memiliki tugas pokok dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Pengelolaan organisasi;
- Membuat peraturan kepegawaian dan sumber daya yang meliputi pengembangan organisasi, budaya kerja, dan peraturan dan prosedur kepegawaian;
- Perencanaan karyawan;
- Pengembangan dan pembinaan karyawan, kesejahteraan, kesehatan, dan keselamatan kerja karyawan;
- Pembinaan pengamanan.

Main Duties Of The Human Resources Division

The Human Resources Division of Perum Jasa Tirta II has the following main duties and responsibilities:

- Organizational management;
- Issue staffing and resource regulations covering organizational development, work culture, and staffing rules and procedures;
- Employee planning;
- Employee development and training, employee welfare, health and safety;
- Security training.



Program Divisi Sumber Daya Manusia

Program kerja Divisi Sumber Daya Manusia Perum Jasa Tirta II adalah sebagai berikut:

- Memastikan rencana kerja dan anggaran yang diusulkan telah mempertimbangkan risiko;
- Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan pengembangan organisasi, budaya kerja, peraturan dan prosedur kepegawaian, perencanaan karyawan, pengembangan dan pembinaan karyawan, kesejahteraan, kesehatan dan keselamatan kerja karyawan serta pengamanan;
- Memastikan adanya rencana strategi jangka pendek, menengah, dan panjang mengenai kebijakan dan pengelolaan organisasi, peraturan kepegawaian dan pengelolaan sumber daya manusia;
- Menjamin berjalannya kegiatan pemenuhan dan alokasi karyawan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku serta kebutuhan perusahaan.
- Menjamin terlaksananya program pendidikan, pelatihan, dan pengembangan karyawan sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan potensi karyawan;
- Menjamin pengelolaan data kepegawaian secara terintegrasi dan berbasis sistem informasi;
- Memberi bimbingan teknis dan sosialisasi kepada unit kerja dalam hal pengembangan organisasi, budaya kerja, peraturan dan prosedur kepegawaian, perencanaan karyawan, pengembangan dan pembinaan karyawan, kesejahteraan, kesehatan dan keselamatan kerja karyawan serta pengamanan;
- Melakukan koordinasi dan hubungan kerja dengan unit kerja lain terkait dengan pihak lain dalam melaksanakan tugas-tugasnya;
- Membuat pelaporan kinerja penyelenggaraan tugas-tugas sesuai dengan bidangnya.

Komposisi Dan Jumlah Karyawan Perum Jasa Tirta II

Jumlah pegawai Perum Jasa Tirta II per 31 Desember 2022 berjumlah 1.049 orang, jika dibandingkan dengan jumlah pegawai per 31 Desember 2021 berjumlah 1.046 orang, adanya penambahan calon pegawai sebanyak 3 orang dan pengurangan pegawai sebanyak 39 orang karena meninggal, pensiun dan mengundurkan diri. Adapun rekapitulasi data pegawai Perum Jasa Tirta II Tahun 2022 Audited disajikan berikut:

Human Resources Division Program

The work programs of Perum Jasa Tirta II Human Resources Division are as follows :

- Ensure that the proposed work plan and budget has taken risks into consideration;
- Carry out supervision and training of the implementation of organizational development activities, work culture, staffing regulations and procedures, employee planning, employee development and guidance, employee welfare, health and safety as well as security;
- Ensure that there are short, medium and long term strategic plans regarding organizational policies and management, staffing regulations and human resources management;
- Ensuring the fulfillment and allocation of employee activities in accordance with applicable provisions and procedures and company needs.
- Ensure the implementation of education programs, training, and employee development in accordance with company needs and employee potential;
- Guarantee the management of staffing data in an integrated and information-based system;
- Provide technical guidance and dissemination to work units in terms of organizational development, work culture, staffing regulations and procedures, employee planning, employee development and guidance, employee welfare, health and safety as well as security;
- Coordinate and build work relations with other work units related to other parties in carrying out their duties;
- Prepare a performance report on the implementation of tasks in accordance with their fields.

Composition And Number Of Employees Of Perum Jasa Tirta II

The number of Perum Jasa Tirta II employees as of 31 December 2022 was 1,049 people, when compared to the number of employees as of 31 December 2021 of 1,046 people, there were 3 additional employee candidates and 39 employee reductions due to death, retirement and resignation.

The recapitulation of data on Perum Jasa Tirta II employees in 2022 Audited is presented below:



Rekapitulasi Data Pegawai Perum Jasa Tirta II

Recapitulation of Perum Jasa Tirta II Employee Data

NO.	URAIAN / Description	s.d TAHUN 2021 / up to YEAR 2021	s.d TAHUN 2022 / up to YEAR 2022
A	PEGAWAI BERDASARKAN JABATAN / Employees By Position		
	1. Sekper, Kepala Satuan / Divisi / General Manajer / S.E. Tk.I / PM	33	32
	2. Manajer / Manajer Operasional / S.E. Tk. II	57	65
	3. As. Manajer / As. Manajer Operasional / S.E. Tk. III	133	137
	4. Supervisor / S.E. Tk. IV	283	265
	5. Staf / Pengemudi / Petugas Keamanan / Capeg	540	550
	JUMLAH / Total	1.046	1.049
B	PEGAWAI BERDASARKAN STATUS / Employees By Status		
	1. Pegawai Murni	1.041	1.049
	2. Calon Pegawai	5	0
	JUMLAH / Total	1.046	1.049
C	PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN / Employees By Education		
	1. Pasca Sarjana (S2)	44	45
	2. Sarjana (S1)	244	273
	3. Sarjana Muda (D3)	88	89
	4. SLTP	659	638
	5. SLTA	6	2
	6. SD 52	5	2
	JUMLAH / Total	1.046	1.049
D	PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN / Employees by Class		
	1. Golongan IV	78	77
	2. Golongan III	366	444
	3. Golongan II	602	528
	JUMLAH / Total	1.046	1.049



Hubungan Industrial Yang Harmonis

Perum Jasa Tirta II menyadari bahwa untuk meningkatkan produktivitas dan keterlibatan karyawan, diperlukan hubungan industrial yang harmonis antara karyawan dan Perusahaan. Oleh karena itu, Perum Jasa Tirta II telah membentuk Serikat Karyawan sebagai wadah penyampaian aspirasi karyawan kepada Perusahaan.

Hubungan yang saling mendukung dan terpenuhinya hak serta kewajiban kedua belah pihak dikukuhkan melalui Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Perum Jasa Tirta II yang merupakan hasil perundingan antara kedua belah pihak berdasarkan ketentuan perundang-undangan. PKB Perum Jasa Tirta II telah terdaftar dalam Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP.4/HI.00.01/00.0000.220209001/B/III/2022.

Selain itu, dalam rangka menciptakan suasana lingkungan kerja yang harmonis dan dinamis sekaligus membangun keterikatan karyawan baik lini vertikal maupun horizontal, Perum Jasa Tirta II juga setiap tahunnya menyelenggarakan *Gathering* Perum Jasa Tirta II yang diikuti mulai dari tingkat Pelaksana sampai tingkat Direksi dan Dewan Pengawas.

Guna menjamin kebebasan berserikat bagi karyawan, Perum Jasa Tirta II membentuk Serikat Karyawan Perum Jasa Tirta II berdasarkan Undang-Undang 1945 pasal 4 guna memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya. Seiring dengan perjalanan waktu, Serikat Karyawan Jasa Tirta II selain sebagai wadah berserikat dan penghubung antara pegawai dan manajemen, juga berfungsi sebagai marwah proses bisnis Perusahaan yang sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*).

Struktur organisasi pengurus Serikat Karyawan Perum Jasa Tirta II untuk periode 2021 – 2025 adalah sebagai berikut:

NAMA / Name	JABATAN / Position
Lir Syahril Mubarak	Ketua Umum / Chairman
Sugeng Riyanto	Sekretaris Jenderal / Secretary General
Yedi Apriyadi	Bendahara Umum / General Treasurer

Harmonious Industrial Relations

Perum Jasa Tirta II realizes that to increase employee productivity and involvement, harmonious industrial relations are needed between employees and the Company. Therefore, Perum Jasa Tirta II has formed an Employee Union, as a forum for delivering employee aspirations to the Company.

This mutually supportive relationship between the Employee Union and the Company is set forth in the Perum Jasa Tirta II Collective Labor Agreement (PKB) which is the result of negotiations between the two parties which contain work conditions, rights and obligations of both parties based on statutory provisions. PKB Perum Jasa Tirta II has been registered in the Decree of the Director General of Industrial Relations Development and Workers' Social Security No. KEP.4/HI.00.01/00.0000.220209001/B/III/2022.

In addition, in order to create an atmosphere of a harmonious and dynamic work environment while at the same time building employees' ties both vertically and horizontally, Perum Jasa Tirta II also annually organizes the Perum Jasa Tirta II Gathering which starts from the level Implementing up to the level of Directors and Supervisory Board.

In order to guarantee freedom of association for employees, Perum Jasa Tirta II established the Perum Jasa Tirta II Employee Union based on 1945 Constitution article 4 to provide protection, defense of rights and interests, as well as to improve decent welfare for workers/laborers and their families. Along with the passage of time, the Tirta II Workers Employee Union, aside from being a union and liaison between employees and management, also functions as a part of the Company's business processes in accordance with the principles of good corporate governance.

The organizational structure of the management of the Perum Tirta II Employee Union for the period 2021 - 2025 is as follows:



Rekrutmen Karyawan

Selama tahun 2022, Perusahaan telah merekrut sebanyak 5 orang. Informasi mengenai rekapitulasi tingkat perputaran karyawan Perum Jasa Tirta II tahun 2022 adalah sebagai berikut:

URAIAN / Description	JABATAN / Position
Penambahan Karyawan / Addition Employee	5
Pengurangan Karyawan / Reduction of Employees	34
Pensiun / Retired	27
Pengunduran Diri / Resigned	-
Pemberhentian dengan tidak hormat / Dishonorable Discharge	-
Lain-lain (Meninggal Dunia) / Others (Passed Away)	12
Tingkat Perputaran Karyawan / Turn Over Rate	18

Employee Recruitment

During 2022, the Company recruited 5 people. Information regarding recapitulation of Perum Jasa Tirta II employee turnover in 2022 is as follows:

Manajemen Jenjang Karier

Sebagai bagian dari program pengelolaan dan pengembangan karyawan berkelanjutan, Perum Jasa Tirta II memiliki kebijakan jenjang karier karyawan guna memberikan peluang bagi insan Perusahaan untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan kebutuhan jabatan dalam organisasi dan potensi individual yang dimiliki. Manajemen pengembangan karier ditujukan tidak hanya sebagai perencanaan suksesi dan manpower planning bagi Perusahaan, tetapi juga sebagai salah satu upaya retensi karyawan. Manajemen Perusahaan bertanggung jawab dalam merencanakan dan menyusun proyeksi jenjang yang akan dilalui oleh karyawan selama meniti karier di Perusahaan.

Pengembangan karier karyawan melalui mutasi (promosi dan rotasi) dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek utama, antara lain hasil penilaian kinerja, kebutuhan Perusahaan, kompetensi dan pengalaman kerja. Sesuai dengan kebijakan dasar dalam pengelolaan SDM, Perum Jasa Tirta II menerapkan asas kesetaraan dalam menetapkan mutasi karyawan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, atau kondisi fisik. Pada level jabatan tertentu, Perusahaan juga mempertimbangkan kriteria kepemimpinan dan beberapa kriteria lain yang sesuai dengan kebutuhan jabatan yang memerlukan kebijakan dalam mempertimbangkan sesuatu dan ketepatan dalam pengambilan keputusan.

Career Management

As part of the ongoing employee management and development program, Perum Jasa Tirta II has a career path policy for employees to provide opportunities for Company people to develop themselves in accordance with the needs of positions in the organization and individual potential they possess. Career development management is aimed not only at succession planning and manpower planning for the company, but also as an effort to retain employees. The Company's management is responsible for planning and preparing projected levels that will be passed by employees during their careers at the Company.

Employee career development through mutation (promotion and rotation) is done by taking into account the main aspects, including the results of performance appraisal, company needs, competencies and work experience. In accordance with basic policies in the management of human resources, Perum Jasa Tirta II applies the principle of equality in determining employee mutations without discriminating against ethnicity, religion, race, class, gender, or physical condition. At a certain level of position, the Company also considers leadership criteria and several other criteria that are appropriate to the position needs that require policy in considering something and accuracy in decision making.



Penilaian Kinerja Karyawan

Komitmen Perusahaan terhadap kualitas SDM unggul diwujudkan melalui implementasi penilaian kinerja karyawan secara berkala dan berkelanjutan. Dalam hal ini, Divisi Sumber Daya Manusia Perum Jasa Tirta II telah merancang program penilaian kinerja karyawan yang komprehensif, objektif, dan transparan. Program tersebut telah terintegrasi dan diatur dalam Sistem Manajemen Kinerja (SMK) berdasarkan pada pencapaian dan pemenuhan *Key Performance Indicator* (KPI) yang telah ditetapkan. Implementasi penilaian kinerja karyawan juga memungkinkan Perusahaan untuk menjaga komunikasi dan *controlling* yang tepat dan terukur dari atasan kepada karyawannya.

Penilaian kinerja dilakukan secara online yang terbagi ke dalam beberapa tahapan, antara lain tahapan perencanaan, pemantauan, dan pengukuran kinerja karyawan. Hasil penilaian kinerja karyawan selanjutnya akan menjadi salah satu dasar pertimbangan bagi manajemen untuk menyusun proyeksi pengembangan karier, sistem remunerasi dan penghargaan, hingga sistem pengembangan kompetensi. Adapun kriteria yang turut dipertimbangkan dalam penilaian kinerja antara lain kompetensi teknis, kompetensi perilaku, cara kerja, dan output atau hasil yang dicapai berdasarkan KPI yang telah ditetapkan.

Pengembangan Kompetensi Karyawan

Menggenapi tujuan pengelolaan karyawan berkelanjutan, Perusahaan memastikan bahwa kompetensi dan keahlian karyawan senantiasa sesuai dan relevan dengan perkembangan pengetahuan dan kondisi industri yang dinamis. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Perusahaan memberlakukan program pengembangan kompetensi karyawan. Pengembangan kompetensi menjadi salah satu bagian dari perencanaan bisnis serta kebutuhan jabatan Perusahaan dengan menyesuaikan dengan kebutuhan keahlian dan kompetensi yang disyaratkan.

Adapun program pengembangan kompetensi karyawan yang diberikan berupa pelatihan, pendidikan, seminar, dan/atau workshop baik yang diselenggarakan oleh internal Perusahaan maupun pihak eksternal. Selama tahun 2022, Perusahaan telah merealisasikan biaya sebesar Rp3.935.896.943 untuk membekali karyawan melalui program pendidikan dan pelatihan. Informasi mengenai jenis pelatihan, nama pelatihan, jumlah peserta, serta tanggal pelatihan dimuat dalam tabel sebagai berikut:

Employee Performance Assessment

The Company's commitment to producing excellent quality human resources is realized through the implementation of employee performance appraisals on a regular and ongoing basis. In this case, the Human Resources Division of Perum Jasa Tirta II has designed a comprehensive, objective and transparent employee performance evaluation program. The program has been integrated and regulated in a Performance Management System (SMK) based on the achievement and fulfillment of a Key Performance Indicator (KPI) that has been determined. The implementation of employee performance appraisal also allows the Company to maintain precise and measured communication and control from superiors to their employees.

Performance appraisal is conducted online which is divided into several stages, including the stages of planning, monitoring, and measuring employee performance. The results of the employee performance appraisal will further serve as a basis for management to prepare projections for career development, remuneration and reward systems, and competency development systems. The criteria included in the performance evaluation include technical competencies, behavioral competencies, work methods, and outputs or results achieved based on established KPIS.

Employee Competency Development

Fulfilling the objectives of sustainable employee management, the Company ensures that employee competencies and expertise are always appropriate and relevant to the development of knowledge and dynamic industry conditions. To realize this goal, the Company has implemented an employee competency development program. Competency development is a part of business planning and the needs of the Company's position by adjusting to the required expertise and competency requirements.

The employee competency development program provided is in the form of training, education, seminars, and/or workshops held both by the internal company and external parties. During 2022, the Company has spent Rp3,935,896,943 to provide education and training programs for employees. Information about the type of training, the name of the training, the number of participants, and the date of the training is contained in the following table:



Program Pengembangan Kompetensi Karyawan *Employee Competency Development Program*

INDIKATOR / Indicator	2022	2021	2020	2019
Jumlah Pelatihan / Number of Training		85	79	62
Jumlah Karyawan yang Mengikuti Pelatihan (dalam orang) / Number of Employees Attending Training (in person)		1931	2.575	2.514
Jumlah Jam Pelatihan (dalam jam) / Number of Training (in hours)		34.125	34.230	41.762
Jumlah / Total		4.233.826.955	3.935.896.943	2.916.276.815

Kebijakan Kesejahteraan Karyawan

Remunerasi

Perum Jasa Tirta II senantiasa menjunjung asas kesetaraan (*fairness*) dan kompetitif (*competitiveness*) dengan industri sejenis dalam penyediaan remunerasi karyawan yang disesuaikan dengan faktor internal seperti bobot kerja serta faktor eksternal seperti ketentuan pengupahan yang berlaku. Perusahaan meyakini bahwa penyediaan kompensasi yang kompetitif dan sesuai dengan bobot kerja yang diemban mampu mendorong karyawan untuk menghasilkan kinerja terbaik sekaligus menarik calon karyawan potensial serta mempertahankan karyawan terbaik di Perusahaan.

Sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama dan ketentuan pengupahan yang berlaku, struktur remunerasi yang disediakan meliputi:

Penghasilan tetap yang terdiri dari:

- Gaji Pokok
- Tunjangan Grade
- Tunjangan Posisi
- Tunjangan Keluarga
- Tunjangan Khusus Pajak

Penghasilan tidak tetap berupa:

- Tunjangan kinerja I, yang terdiri dari tunjangan Jasa Produksi (Jasprod) & Insentif.
- Tunjangan hari raya keagamaan
- Tunjangan Kinerja II
- Tunjangan Penempatan Wilayah Kerja

Dalam menentukan besaran penghasilan tetap, yakni gaji pokok, Perum Jasa Tirta II mengacu pada aspek aturan hukum yang mengatur upah minimum dan kelayakan yang didasarkan pada beberapa indikator,

Employee Welfare Policy

Remuneration

Perum Jasa Tirta II always upholds the principle of fairness and competitiveness with similar industries in providing employee remuneration that is adjusted to internal factors such as work weight and external factors such as applicable wage provisions. The Company believes that providing competitive compensation in accordance with the workload carried out can encourage employees to produce the best performance while attracting potential employees and retaining the best employees in the Company.

As stipulated in the Collective Labor Agreement and applicable wage provisions, the remuneration structure provided includes:

Fixed income consisting:

- Basic salary
- Grade allowance
- Position allowance
- Family allowances
- Special Tax Allowance

Non-permanent income in the form of:

- Performance allowance I, which consists of allowances Production Services & Incentive.
- Religious holiday allowance
- Performance Allowance II
- Work Area Placement Allowance

In determining the amount of fixed income, namely basic salary, Perum Jasa Tirta II refers to aspects of the legal rules that regulate minimum wages and feasibility based on several indicators including inflation. Meanwhile the



termasuk inflasi. Sedangkan besaran penghasilan tidak tetap dihitung berdasarkan unjuk kerja perusahaan dan ketentuan yang berlaku serta dengan tetap memperhatikan kemampuan perusahaan.

Pelayanan Kesehatan

Perusahaan mengikutsertakan seluruh karyawan dan keluarganya serta karyawan purnabakti beserta istri/suami dalam program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Karyawan purnabakti beserta istri/suami yang sah juga diikutsertakan dalam program jaminan kesehatan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung setelah memasuki masa pensiun.

Program Imbalan Pasca Kerja

Perum Jasa Tirta II menaruh perhatian kepada karyawan yang telah berkarya dan mengabdikan kontribusinya kepada Perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Selain program jaminan kesehatan dan pelatihan persiapan masa purnabakti, Perusahaan memberikan program pensiun guna menjamin kesejahteraan bagi karyawan setelah memasuki masa kerja. Perusahaan memiliki lembaga pengelola dana pensiun independen bagi karyawan Perum Jasa Tirta II yang pembentukannya telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. KEP.151/KM.17/2000 tanggal 15 Mei 2000 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2000.

Selain Program Pensiun Manfaat Pasti, Perum Jasa Tirta II juga memberikan program imbalan pasca kerja manfaat pasti dalam bentuk Uang Pesangon/Uang Jasa yang diatur dalam peraturan Direksi Perum Jasa Tirta II Nomor PRD-9/DIR/06/2020 dan Perjanjian Kerja Bersama tahun 2019-2021.

Di samping penyediaan pengelolaan imbalan pasca kerja, Perusahaan juga memberikan pembekalan mental dan peluang pasca kerja bagi karyawan yang akan memasuki masa pensiun berupa seminar dan sosialisasi peluang-peluang berwirausaha guna memotivasi karyawan untuk meraih kesejahteraan yang baik di masa pensiun.

Penghargaan Karyawan

Perum Jasa Tirta II memiliki kebijakan pemberian penghargaan yang bertujuan untuk memotivasi karyawan untuk mencetak produktivitas dan kreativitas kerja sekaligus memelihara kebanggaan dan semangat kerja karyawan. Penghargaan diberikan kepada karyawan yang terbukti telah menunjukkan kesetiaan dalam mengabdikan masa kerjanya dalam jangka waktu tertentu, meraih prestasi kerja yang luar biasa, atau telah berjasa kepada Perusahaan.

amount of nonfixed income is calculated based on the company's performance and applicable regulations and by taking into account the company's capabilities.

Health Services

The company includes all employees and their families and retired employees and their wives/ husbands in a health insurance program organized by the Health Social Security Organizing Agency (BPJS). For full-time employees and their legal wives/husbands, they are included in the health insurance program for a period of 2 (two) years after retirement.

Post-employment Rewards Program

Perum Jasa Tirta II pays attention to employees who have worked and dedicated their contributions to the Company within a certain period of time. In addition to the health insurance program and post-retirement preparation training, the Company provides a pension program to ensure the welfare of employees after entering service. The company has an independent pension fund management institution for employees of Perum Jasa Tirta II, the establishment of which has been determined based on the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. KEP.151/KM.17/2000 dated May 15, 2000 starting from January 1, 2000.

In addition to the Defined Benefit Pension Program, Perum Jasa Tirta II also provides defined benefit postemployment benefits in the form of severance pay/ service fees, which are stipulated in the regulation of PJT II Directors' Decree Number PRD- 9/DIR/06/2020 and Collective Labor Agreement 2019-2021.

In addition to providing post-employment benefits management, the Company also provides mental training and post-employment opportunities for employees who are entering retirement in the form of seminars and socialization of entrepreneurial opportunities to motivate employees to achieve good welfare in retirement.

Employee Award

Perum Jasa Tirta II has an award policy that aims to motivate employees to produce work productivity and creativity while maintaining employee pride and enthusiasm. Awards are given to employees who have been shown to show loyalty in dedicating their tenure to a certain period of time, achieving outstanding work performance, or have served the Company.



Jenis penghargaan yang diberikan terdiri atas Satya Karya Sepuluh Tahun, Satya Karya Dua Puluh Tahun, Satya Karya Tiga Puluh Tahun, dan Tunjangan Kinerja II berupa uang tunai dan/atau Natura sebagai bentuk penghargaan dari Direksi. Adapun prestasi yang dikategorikan layak untuk memperoleh penghargaan antara lain pelaksanaan tugas dan kewajiban secara luar biasa, penemuan temuan baru, kontribusi ekstra dari karyawan secara individual maupun kelompok, dan prestasi serta kontribusi lainnya yang dianggap berjasa bagi Perusahaan.

The types of awards that are given consist of Satya Karya Sepuluh Tahun, Satya Karya Dua Puluh Tahun, and Satya Karya Thirty Years and Performance Allowance II in the form of cash and/or Natura which is a Board of Directors award given to employees for carrying out duties and obligations outside usual, finding new findings, extra contributions from employees, both individuals and groups that are considered meritorious for the Company.

Penetapan Penghargaan

Determination of Awards

INDIKATOR / Indicator	BENTUK / Form	WAKTU PEMBERIAN / Time of Awarding	JUMLAH PENERIMA TAHUN 2022 (DALAM ORANG) / Total Awardees in 2022 (in person)
Satya Karya Sepuluh Tahun	Piagam dan uang sejumlah gaji pokok penerima penghargaan / <i>Certificate of Merit and the amount of the basic salary of the award recipient</i>	Karyawan yang telah mempunyai masa kerja secara terus menerus dan tidak terputus sekurang-kurangnya 10 tahun / <i>Employees who had continuous and uninterrupted years of services for at least 10 year</i>	95
Satya Karya Dua Puluh Tahun	Piagam dan uang sejumlah gaji pokok penerima penghargaan / <i>Certificate of Merit and the amount of the basic salary of the award recipient</i>	Karyawan yang telah mempunyai masa kerja secara terus menerus dan tidak terputus sekurang-kurangnya 20 tahun / <i>Employees who had continuous and uninterrupted years of services for at least 20 year</i>	100
Satya Karya Tiga Puluh Tahun	Piagam dan uang sejumlah gaji pokok penerima penghargaan / <i>Certificate of Merit and the amount of the basic salary of the award recipient</i>	Karyawan yang telah mempunyai masa kerja secara terus menerus dan tidak terputus sekurang-kurangnya 30 tahun / <i>Employees who had continuous and uninterrupted years of services for at least 30 year</i>	0



Kebijakan Kesetaraan Gender

Mengintegrasikan tujuan pengelolaan SDM yang adil dan menjunjung prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), Perusahaan menerapkan kebijakan kesetaraan dan keadilan bagi seluruh karyawan tanpa membedakan gender, agama, ras, suku, golongan, maupun kondisi fisik dalam rekrutmen dan seleksi karyawan, penilaian dan evaluasi kinerja, pemberian kesempatan pengembangan karier dan kompetensi, maupun pemenuhan hak remunerasi dan kompensasi.

Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3)

Menjadi bagian dari tanggung jawab Perusahaan, Perum Jasa Tirta II menempatkan pentingnya pemeliharaan aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) karyawan sebagai prioritas. Hal ini ditujukan agar setiap karyawan dapat bekerja secara aman, nyaman, dan sehat serta bebas dari faktor-faktor yang berpotensi mengurangi produktivitas dan membahayakan diri sendiri dan lingkungan. Oleh karena itu, Perum Jasa Tirta II berkomitmen untuk melakukan Continuous Improvement dalam pengelolaan K3 secara menyeluruh dan difokuskan pada terciptanya kinerja K3 yang *zero accident* atau tingkat kecelakaan nihil.

Dalam menjamin pemenuhan aspek keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan di lingkungan operasional, Perum Jasa Tirta telah mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, di salah satu unit kerja yang memiliki high risk atau potensi risiko tinggi yaitu Unit Usaha PLTA.

Selama tahun 2022, Perum Jasa Tirta II telah merealisasikan program pengembangan dan pemeliharaan kualitas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), antara lain:

1. Pelaksanaan Bulan K3 dengan mengadakan seminar "Fire Behaviour" di Triwulan I Tahun 2022.
2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi K3 di Triwulan II, III, dan IV Tahun 2022.
3. Pelaksanaan Medical Check Up (MCU) Risiko Tinggi di Triwulan II Tahun 2022.
4. Pelaksanaan kegiatan Donor Darah di setiap triwulan tahun 2022.
5. Pelaksanaan kegiatan Dokter Keliling di setiap triwulan tahun 2022.
6. Pelaksanaan simulasi kebakaran di unit usaha Wilayah II di Triwulan IV tahun 2022.
7. Pendistribusian kekurangan seragam tahun 2021 dan seragam *wearpack* tahun 2022.
8. Pelaksanaan kegiatan olahraga setiap hari Jumat.

Gender Equality Policy

Integrating the objectives of managing human resources fairly and upholding the principles of Human Rights (HAM), the Company applies a policy of equality and justice for all employees without discriminating gender, religion, race, ethnicity, class, or physical conditions in employee recruitment and selection, assessment and performance evaluation, career opportunity and competency development opportunities, as well as fulfillment of remuneration and compensation rights.

Occupational Health And Safety (Ohs)

Being part of the Company's responsibilities, Perum Jasa Tirta II places importance on maintaining the occupational health and safety (OHS) aspects of employees as a priority. It is intended that every employee can work safely, comfortably, and healthily and free from factors that have the potential to reduce productivity and endanger themselves and the environment. Therefore, Perum Jasa Tirta II is committed to carrying out Continuous Improvement in overall OHS management and is focused on creating OHS performance with zero accident or zero accident rate.

In ensuring the fulfillment of occupational health and safety aspects for employees in the operational environment, Perum Jasa Tirta has implemented Government Regulation Number 50 Year 2012 concerning the Implementation of Occupational Health and Safety Management Systems, in one work unit that has a high risk, namely the Business Unit Hydropower.

During 2022, Perum Jasa Tirta II has implemented a development and maintenance program on Occupational Health and Safety (OHS) quality, including:

1. *Implementation of OHS Month by holding a seminar on "Fire Behavior" in the First Quarter of 2022.*
2. *OHS Monitoring and Evaluation Implementation in Quarter II, III and IV of 2022.*
3. *Implementation of High-Risk Medical Check Up (MCU) in the Second Quarter of 2022.*
4. *Implementation of Blood Donation activities in each quarter of 2022.*
5. *The implementation of Mobile Medical Checkup activities in each quarter of 2022.*
6. *Implementation of fire simulations in Region II business units in Quarter IV of 2022.*
7. *Distribution of 2021 uniform shortages and 2022 uniform wearpack.*
8. *Implementation of sports activities every Friday.*



Laporan Pelaksanaan Manajemen Sdm Berbasis Kompetensi Tahun 2022

Selama tahun 2022, Perusahaan telah melaksanakan Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi (MSDM-BK) oleh Divisi Sumber Daya Manusia. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Penilaian terhadap realisasi Sasaran Kerja Karyawan (SKK) dan Penilaian Kompetensi Individu Karyawan periode Semester I Tahun 2022 dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2022 serta Penilaian terhadap realisasi Sasaran Kerja Karyawan (SKK) dan Penilaian Kompetensi Individu Karyawan periode Semester II Tahun 2022 dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2022.
2. Survei Persepsi Karyawan meliputi Survei Kepuasan Karyawan dan Survei Keterikatan Karyawan periode Semester I Tahun 2022 yang dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2022 serta periode Semester II Tahun 2022 yang dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2022.
3. Inspeksi Mendadak (Sidak) pada Triwulan I, II, dan IV Tahun 2022.
4. *Monitoring* dan Evaluasi Kepegawaian pada Triwulan I dan III Tahun 2022.
5. Pemutakhiran Data Surat Keterangan untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga (SKUMPTK) pada Triwulan I, II dan IV Tahun 2022.
6. Evaluasi Penilaian Calon Karyawan Triwulan II dan IV Tahun 2022.
7. Pelaksanaan Asesmen Calon Direksi pada Triwulan III Tahun 2022.
8. Pelaksanaan Asesmen Calon Manajemen Utama pada Triwulan III dan IV Tahun 2022.
9. Pelaksanaan Uji Portofolio pada Triwulan I Tahun 2022.
10. Pemberian Piagam Satya Karya pada Triwulan II Tahun 2022.
11. Pemberian Logam Mulia kepada Pensiunan PJT II pada Triwulan III dan IV Tahun 2022.

Report On The Implementation Of Competency- Based Hr Management In 2022

During 2022, the Company has carried out Competency Based Human Resources Management (MSDM-BK) by the Human Resources Division. The activities that have been carried out include:

1. *Evaluation of the realization of Employee Work Targets (SKK) and Individual Employee Competency Assessment for Semester I of 2022 was conducted in Quarter III of 2022 and Assessment of the realization of Employee Work Targets (SKK) and Assessment of Employee Individual Competency for Semester II of 2022 carried out in Quarter IV of 2022.*
2. *The Employee Perception Survey covers the Employee Satisfaction Survey and the Employee Engagement Survey for Semester I of 2022 conducted in Quarter III 2022 and Semester II of 2022 which was conducted in Quarter IV of 2022.*
3. *Sudden Inspection (Sidak) in Quarter I, II, and IV of 2022.*
4. *Personnel Monitoring and Evaluation in Quarter I and III of 2022.*
5. *Updating of Certificate Data for Obtaining Family Benefits Payment (SKUMPTK) in Quarter I, II and IV of 2022.*
6. *Evaluation of Employee Candidates for Quarter II and IV of 2022.*
7. *Implementation of Assessment of Prospective Directors in Quarter III of 2022.*
8. *Implementation of the Main Management Candidate Assessment in Quarter III and IV of 2022.*
9. *Implementation of Portfolio Test in the First Quarter of 2022.*
10. *Award of Satya Karya Charter in the Third Quarter of 2022.*
11. *Awarding Logam Mulia to Retired PJT II in Quarter III and IV of 2022.*



LAPORAN SUMBER DAYA MANUSIA

Human Resources Report

PJT II menyadari SDM merupakan aset strategis paling berharga guna mencapai pertumbuhan bisnis Perusahaan yang berkelanjutan.

PJT II realizes that HR is the most valuable strategic asset to achieve sustainable business growth for the Company.

Kami memperlakukan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai partner usaha strategis dalam menjalankan bisnis Perusahaan. Kehadiran Karyawan yang profesional, berkompeten, berdedikasi dan berintegritas akan membuat perusahaan memiliki dasar yang kuat untuk terus tumbuh dan berkembang mencapai tujuannya.

We treat Human Resources (HR) as a strategic business partner in running the Company's business. The presence of employees who are professional, competent, dedicated and with integrity will make the company have a strong foundation to continue to grow and develop to achieve its goals.

Kami senantiasa berkomitmen memiliki kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang produktif, profesional dan berkemampuan dalam menciptakan nilai tambah serta menjawab tantangan baru. Kami terus berupaya mengembangkan program pelatihan khusus dan berkala yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas, kapabilitas dan profesionalisme.

We are always committed to having quality Human Resources (HR) who are productive, professional and capable of creating added value and responding to new challenges. We continuously strive to develop specific and periodic training programs aimed at improving quality, capability and professionalism.

Pimpinan dan sumber daya manusia PJT II, telah memiliki kompetensi dan pengalaman dalam mengelola bisnis Perusahaan. Sejalan dengan tantangan bisnis kedepan, terutama dalam menghadapi persaingan di era digitalisasi, PJT II merespon secara tepat, baik dari aspek bisnis, operasional, maupun dari aspek pengelolaan sumber daya manusia. Oleh sebab itu, PJT II telah menyusun perencanaan strategis pengelolaan sumber daya manusia PJT II, yang sejalan dengan kebutuhan perusahaan, guna menjamin keberlangsungan usaha PJT II kedepan.

The leadership and human resources of PJT II have competence and experience in managing the Company's business. In line with future business challenges, especially in facing competition in the digitalization era, PJT II responds appropriately, both from a business, operational and human resource management aspect. Therefore, PJT II has prepared a strategic plan for managing PJT II's human resources, which is in line with the needs of the company, in order to ensure the continuity of PJT II's business going forward.

Perusahaan senantiasa memperlakukan SDM sebagai aset yang paling berharga secara adil dan menghargai setiap kontribusi yang diberikan tanpa memandang unsur gender maupun ras. Perseroan menjamin hak dan kewajiban setiap Karyawan dengan mematuhi ketentuan Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Undang-Undang No.02 Tahun 2022.

The company always treats HR as the most valuable asset in a fair manner and values every contribution made regardless of gender or race. The Company guarantees the rights and obligations of each employee by complying with the provisions of Law No. 13 of 2003 concerning employment and Law No. 02 of 2022.



Komposisi Karyawan

Jumlah pegawai Perum Jasa Tirta II per 31 Desember 2022 berjumlah 1.049 orang, jika dibandingkan dengan jumlah pegawai per 31 Desember 2021 berjumlah 1.046 orang, adanya penambahan calon pegawai sebanyak 3 orang dan pengurangan pegawai sebanyak 39 orang karena meninggal, pensiun dan mengundurkan diri.

Kegiatan Sumber Daya Manusia

Sepanjang tahun 2022, Perusahaan telah melakukan beragam kegiatan terkait dengan Penyempurnaan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sesuai Perkembangan Perusahaan.

Employee Composition

The number of employees of Perum Jasa Tirta II as of December 31, 2022 was 1,049 people, when compared to the number of employees as of December 31, 2021 there were 1,046 people, there were 3 additional prospective employees and a reduction of 39 employees due to death, retirement and resignation.

Human Resources Activities

Throughout 2022, the Company has carried out various activities related to Improving the Organizational Structure and Work Procedures in Accordance with Company Development.

ROADMAP PENGEMBANGAN SDM HR Development Roadmap

Sistem pengembangan sumber daya manusia di PJT II dikembangkan sesuai dan selaras dengan strategi bisnis Perusahaan menuju kinerja bisnis terbaik di era digital. PJT II menjadikan SDM sebagai tenaga pendukung utama setiap aktivitas operasional. Perencanaan SDM dibuat dengan memperhatikan beberapa faktor yaitu perkiraan beban kerja, rencana pensiun pegawai, dan rencana anggaran yang ditinjau secara periodik.

PJT II menyusun perencanaan SDM jangka panjang untuk mendukung rencana pengembangan bisnis sejalan tuntutan pembangunan daerah dan tuntutan pasar. Perencanaan SDM PJT II dibuat sebelum tahun berjalan sebagai salah satu program kerja Divisi Sumber Daya Manusia. Perencanaan SDM meliputi perencanaan jumlah dan kualifikasi Karyawan yang dibutuhkan pada tahun berjalan, analisis ketersediaan Karyawan, dan analisis pemenuhan kebutuhan SDM.

Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia

Strategi pengelolaan SDM yang diterapkan PJT II merupakan *alignment* terhadap visi dan misi, strategi serta budaya Perusahaan. Untuk itu, PJT II melakukan serangkaian upaya yang berkesinambungan dan terarah dalam melakukan program pengembangan SDM. Untuk mempertahankan kesinambungan dalam pengembangan organisasi, PJT II menerapkan pengelolaan SDM melalui strategi-strategi peningkatan kualitas SDM PJT II sebagai berikut,

The human resource development system in PJT II is developed in accordance and in line with the Company's business strategy towards the best business performance in the digital era. PJT II makes HR as the main supporting force for every operational activity. HR planning is made by considering several factors, namely workload estimates, employee retirement plans, and budget plans that are reviewed periodically.

PJT II prepares long-term HR planning to support business development plans in line with regional development demands and market demands.

PJT II HR planning is made before the current year as one of the work programmes of the Human Resources Division. HR planning includes planning the number and qualifications of employees needed in the current year, analysing the availability of employees, and analysing the fulfilment of HR needs.

Human Resource Management Strategy

The HR management strategy implemented by PJT II is an alignment with the vision and mission, strategy and culture of the Company. For this reason, PJT II makes a series of continuous and directed efforts in conducting HR development programmes. To maintain continuity in organisational development, PJT II implements HR management through strategies to improve the quality of PJT II's human resources as follows,



1. Proses rekrutmen yang selektif baik yang bersifat *replacement* maupun pengisian posisi-posisi vacant sesuai dengan kebutuhan.
2. Program pendidikan, pelatihan, dan pengembangan Karyawan melalui berbagai program baik *in-house* maupun *public training* seiring dengan perkembangan bisnis dan volume usaha Perusahaan.
3. Proses rotasi, mutasi dan promosi Karyawan sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan organisasi Perusahaan sekaligus sebagai jenjang karir Karyawan.
4. Pemeliharaan kesehatan dan kesejahteraan Karyawan secara terus menerus seiring dengan pencapaian dan perkembangan bisnis dan usaha Perusahaan.
5. Penerapan peraturan internal sebagai panduan Perusahaan dan Karyawan agar terjalin hubungan yang baik, harmonis, dan dinamis.

Dalam rangka pengembangan bisnis dan usaha serta produktivitas, PJT II secara terus menerus dan berkesinambungan berusaha menciptakan suasana kerja yang kondusif serta memberikan kesempatan bagi Karyawan dalam meningkatkan pengetahuan, wawasan, keterampilan dan kemampuan.

Kebijakan dan Pelaksanaan Rekrutmen

Kebijakan rekrutmen dilaksanakan untuk memenuhi sumber daya manusia yang bertanggung jawab serta memenuhi standar kualitas yang telah diterapkan sehingga menjamin terpenuhinya upaya peningkatan Bisnis Perusahaan. PJT II memberikan kesempatan yang sama dan setara kepada setiap anak bangsa terbaik untuk berkarya dan bekerja di Perusahaan, tanpa memandang unsur gender, agama, ras, maupun hal lainnya yang bersifat diskriminasi. Sistem rekrutmen ini dilakukan secara transparan dan fair, yang didasarkan pada perencanaan kebutuhan Karyawan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Ruang lingkup proses rekrutmen meliputi:

1. Perencanaan dan persiapan rekrutmen.
2. Pelaksanaan seleksi.
3. Hasil seleksi.

Kebijakan rekrutmen bertujuan untuk:

1. Merancang proses rekrutmen yang handal, sehingga calon Karyawan yang akan menjalani seleksi sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai.
2. Mencapai visi dan misi Perusahaan secara optimal melalui ketersediaan sumber daya manusia yang bekerja secara profesional.
3. Memperoleh Karyawan yang berkualitas

1. *Selective recruitment process both for replacement and filling vacant positions as needed.*
2. *Employee education, training and development programmes through various programmes both in-house and public training in line with the Company's business development and business volume.*
3. *Employee rotation, transfer and promotion process in accordance with the needs and development of the Company's organisation as well as employee career path.*
4. *Maintenance of Employees' health and welfare continuously in line with the achievement and development of the Company's business and business.*
5. *Implementation of internal regulations as a guide for the Company and Employees to establish a good, harmonious and dynamic relationship.*

In the context of business and business development and productivity, PJT II continuously and continuously strives to create a conducive work atmosphere and provide opportunities for employees to improve knowledge, insight, skills and abilities.

Policy and Implementation of Recruitment

Recruitment policy is implemented to fulfil responsible human resources and meet the quality standards that have been applied so as to ensure the fulfilment of the Company's business improvement efforts. PJT II provides equal and equal opportunities to every best child of the nation to work and work in the Company, regardless of gender, religion, race, or other things that are discriminatory. This recruitment system is carried out in a transparent and fair manner, which is based on employee needs planning to support the achievement of the Company's goals and objectives in the short and long term.

The scope of the recruitment process includes:

1. *Recruitment planning and preparation.*
2. *Implementation of selection.*
3. *Selection results.*

The recruitment policy aims to:

1. *Design a reliable recruitment process, so that prospective employees who will undergo selection in accordance with the objectives to be achieved.*
2. *Achieve the Company's vision and mission optimally through the availability of human resources who work professionally.*
3. *Obtaining qualified employees based on the*



berdasarkan syarat dan spesifikasi pekerjaan yang dibutuhkan oleh Perusahaan.

requirements and job specifications required by the Company.

Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi

PJT II menyadari SDM memiliki peran penting dalam menunjang keberlanjutan kegiatan bisnis dan operasional Perusahaan. Keterlibatan SDM yang berkualitas akan memberikan pengaruh positif dan menjadi faktor kunci bagi keberlanjutan bisnis Perusahaan. Oleh karena itu, PJT II senantiasa berkomitmen untuk terus mengembangkan potensi SDM secara konsisten dan berkesinambungan antara lain dengan menyelenggarakan berbagai pendidikan, pelatihan dan *workshop*, baik yang dilakukan oleh pihak internal melalui Lembaga Pendidikan, maupun bekerjasama dengan berbagai pihak eksternal.

Perencanaan pengembangan sumber daya manusia disusun setiap tahun, yang meliputi antara lain rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan SDM, termasuk rencana biaya atau anggaran pendidikan dan pelatihan baik untuk Karyawan, Direksi dan Komisaris, serta rencana pelaksanaan sertifikasi manajemen risiko bagi pengurus dan pejabat tertentu.

Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Karir

Pengembangan karir dapat dipahami sebagai pendekatan formal dalam upaya peningkatan atau perbaikan, pertumbuhan, kepuasan kerja, pengetahuan dan kemampuan Karyawan agar dapat memastikan bahwa orang-orang yang berkualifikasi dan pengalaman yang tepat tersedia ketika dibutuhkan, dengan demikian perencanaan dan pengembangan karir yang jelas akan membantu Karyawan dan organisasi dalam meraih keberhasilan.

Pengembangan karir harus dilihat secara holistik, tidak hanya dari sisi promosi tetapi juga dari sisi peningkatan kapabilitas, perluasan kewenangan, pengembangan individu dan peningkatan remunerasi.

Pengembangan SDM

Peningkatan sumber daya manusia PJT II melalui pendidikan dan pelatihan yang diadakan tahun 2022 untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan bisnis yang semakin meningkat setiap tahunnya. Pengembangan sumber daya manusia dilakukan secara menyeluruh baik proses seleksi, penilaian kinerja, serta pelatihan dan pendidikan.

Untuk mencapai peningkatan kinerja yang telah ditargetkan, PJT II mempunyai komitmen untuk terus mengembangkan potensi Karyawan secara konsisten

Policy and Implementation of Competency Development

PJT II realises that HR has an important role in supporting the sustainability of the Company's business and operational activities. The involvement of qualified human resources will have a positive influence and become a key factor for the sustainability of the Company's business. Therefore, PJT II is always committed to continue to develop the potential of human resources consistently and continuously, among others, by organising various education, training and workshops, both conducted by internal parties through Educational Institutions, as well as in collaboration with various external parties.

Human resource development planning is prepared annually, which includes, among others, plans for HR education and training needs, including education and training cost or budget plans for employees, Directors and Commissioners, as well as plans for implementing risk management certification for management and certain officials.

Career Development Policy and Implementation

Career development can be understood as a formal approach in an effort to increase or improve, growth, job satisfaction, knowledge and abilities of Employees in order to ensure that people with the right qualifications and experience are available when needed, thus clear career planning and development will help Employees and organisations in achieving success.

Career development should be viewed holistically, not only in terms of promotion but also in terms of increased capability, expanded authority, individual development and increased remuneration.

Human Resource Development

Increasing PJT II's human resources through education and training held in 2022 to increase business growth and development which is increasing every year. The development of human resources is carried out thoroughly both the selection process, performance appraisal, and training and education.

To achieve the targeted performance improvement, PJT II has a commitment to continue to develop the potential of employees consistently and continuously through



dan berkesinambungan melalui proses pembelajaran, antara lain menyelenggarakan berbagai pendidikan, pelatihan dan workshop baik secara internal maupun secara eksternal bekerjasama dengan lembaga pendidikan. Pendidikan dan pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Karyawan dalam meningkatkan produktivitas kerja, pengelolaan risiko, budaya Perusahaan serta profesionalitas.

Dalam tahun 2022, Perusahaan berusaha meningkatkan kompetensi Karyawan melalui pendidikan dan latihan, *Workshop*, dan *Coaching* yang diselenggarakan oleh pihak eksternal guna mendapatkan pengetahuan-pengetahuan dan kemampuan khusus.

the learning process, including organising various education, training and workshops both internally and externally in collaboration with educational institutions. This education and training is expected to increase Employee knowledge and skills in improving work productivity, risk management, corporate culture and professionalism.

In 2022, the Company seeks to improve Employee competence through education and training, workshops, and coaching organised by external parties in order to gain specific knowledge and skills.

NO.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Education And Training	JUMLAH Total
1.	IHT Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)	21 Orang
2.	Manajemen Risiko Batch II Kelas A	30 Orang
3.	Manajemen Risiko Batch II Kelas B	30 Orang
4.	Manajemen Risiko Batch II Kelas C	27 Orang
5.	IHT Finance For Non Finance Batch II Kelas A	21 Orang
6.	IHT Finance For Non Finance Batch II Kelas B	21 Orang
7.	IHT Finance For Non Finance Batch II Kelas C	21 Orang
8.	Pelatihan Dan Sertifikasi Kompetensi Teknik Ketenagalistrikan	20 Orang
9.	Inhouse Online Training Sertifikasi Qualified Risk Management Professional (QRMP)	8 Orang
10.	Inhouse Online Training Sertifikasi Qualified Risk Management Officer (QRMO)	15 Orang
11.	IHT Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 1	26 Orang
12.	IHT Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 16	23 Orang
13.	ERMCP Manajemen Risiko	1 Orang
14.	Sertifikasi Bidang Pengamanan	1 Orang
15.	Pelatihan MC	5 Orang
16.	Pelatihan Protokol	2 Orang
17.	Pelatihan Performance Management-KPI Aligning Organization's Performance	6 Orang
18.	Pelatihan ISO 26000	6 Orang
19.	Pelatihan Kearsipan	30 Orang
20.	Talent Secondment Danareksa	1 Orang
21.	Pertemuan Ilmiah Tahunan ke-39 HATHI	2 Orang
22.	Sertifikasi Penggerak Mula Kelas 1 (genset)	1 Orang
23.	Pelatihan & Sertifikasi Ahli K3 Umum	7 Orang
24.	Seminar Motivasi "Meningkatkan Produktifitas Kerja dan Manajemen Emosi dan Fikiran"-Bina Marga Jabar	11 Orang
25.	The Amazing You-Danareksa	2 Orang
26.	Risk Beyond 2022 ERMA International Conference on ERM-CRMS Indonesia	2 Orang
27.	PSAK 24	4 Orang
28.	Risk Management (Danareksa Learning Institute)	1 Orang
29.	Non Pendidikan: PMMB	9 Orang
30.	Sharing Session #6 Coopetition and Integration (FHCI)	10 Orang



Kegiatan SDM Tahun 2022

NO.	KEGIATAN SDM 2022 HR Activities 2022	JUMLAH Total
a.	Pembinaan Administrasi Kepegawaian Tahun 2022 Audited 2022 Audited Personnel Administration Development	
	Kenaikan Gaji Berkala / Periodic Salary Increase	424 Orang
	Kenaikan Pangkat Golongan / Class Promotion	275 Orang
	Kenaikan Level Grade / Grade Level Increase	572 Orang
	Kenaikan Skala Grade / Grade Scale Increase	1.036 Orang
	Pensiun / Pension	29 Orang
	Cuti / Paid leave	1.351 Orang
b.	Kegiatan Pelayanan Kesehatan s.d. Semester I Tahun 2022 Health Service Activities up to. Semester I of 2022	
	Pasien Poliklinik di Jatiluhur / Polyclinic Patients in Jatiluhur	2.933 Orang
	Pasien Dokter Keliling / Roving Doctor Patient	308 Orang
	Medical Check-up / Medical Checkup	183 Orang
	Donor Darah / Blood donors	188 Orang
	Pemsus / Pemsus	7 Orang

Dalam melaksanakan pengelolaan Sumber Daya Manusia di lingkungan Perum Jasa Tirta II serta penugasan dari Kementerian BUMN terkait peningkatan kapabilitas SDM telah dilaksanakan kegiatan- kegiatan sebagai berikut:

1. Program Perekrutan Bersama (PPB) Calon Karyawan Reguler dan Disabilitas telah selesai dilaksanakan bersama dengan *Forum Human Capital Indonesia (FHCI)* dengan rincian sebagai berikut:
 - Tahapan proses rekrutmen terdiri dari 5 tahapan yaitu pendaftaran dan seleksi awal, Tes Kemampuan Dasar (TKD) dan Core Value BUMN (AKHLAK), Tes Kemampuan Bidang, Wawancara User dan Tes MCU, Bela Negara dan Inaugurasi.
 - Calon Karyawan Reguler yang dinyatakan Lulus sebanyak 22 (dua puluh dua) orang yang terdiri dari tingkat pendidikan Sarjana Strata 1 sebanyak 21 (dua puluh satu) orang dan Diploma 3 sebanyak 1 (satu) orang.
 - Calon Karyawan Disabilitas dari tingkat Pendidikan Sarjana Strata 1 yang dinyatakan Lulus sebanyak 1 (satu) orang.
2. Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2 Tahun 2022 melalui Kerjasama dengan FHCI, berupa: penyampaian rencana kebutuhan Rekrutmen Bersama BUMN (RBB) Batch 2 Tahun 2022 sebanyak 10 orang terdiri dari 8 orang Strata 1 (S1) dan 2 orang Diploma 3 (D3).

In carrying out the management of Human Resources within Perum Jasa Tirta II as well as assignments from the Ministry of SOEs related to improving HR capabilities, the following activities have been carried out:

1. *The Joint Recruitment Programme (PPB) for Regular and Disability Employee Candidates has been completed together with the Indonesian Human Capital Forum (FHCI) with the following details:*
 - *The stages of the recruitment process consist of 5 stages, namely registration and initial selection, Basic Ability Test (TKD) and SOE Core Value (AKHLAK), Field Ability Test, User Interview and MCU Test, State Defence and Inauguration.*
 - *Regular Employee Candidates who passed were 22 (twenty-two) people consisting of 21 (twenty-one) Bachelor Strata 1 education levels and 1 (one) Diploma 3 person.*
 - *Candidates for Disability Employees from the Bachelor of Strata 1 education level who passed as many as 1 (one) person.*
2. *Joint Recruitment of SOEs Batch 2 Year 2022 through Cooperation with FHCI, in the form of: submission of a plan for the needs of Joint Recruitment of SOEs (RBB) Batch 2 Year 2022 as many as 10 people consisting of 8 people Strata 1 (S1) and 2 people Diploma 3 (D3).*



3. Telah dilaksanakan *Onboarding* Calon Karyawan sebanyak 32 orang terdiri dari 23 orang hasil
6. Telah dilaksanakan kegiatan *Assessment BOD - 1* dan *Assessment Top Milenial* pada Triwulan I Tahun 2022, *Assessment BOD* pada Triwulan II Tahun 2022 dan *Assessment BOD-2* pada Semester III Tahun 2022.
7. Telah dilaksanakan pekerjaan *Review Sistem Penilaian Kompetensi Individu Terhadap Standar Kompetensi Karyawan* pada Triwulan II tahun 2022.
8. Telah dilaksanakan pekerjaan *Kajian Grading Karyawan* pada Sd. Tahun 2022 Audited tahun 2022.
9. Telah dilaksanakan pekerjaan *Sistem Kompensasi* pada Sd. Tahun 2022 Audited tahun 2022.
10. *Updating data talent Perum Jasa Tirta II* pada portal HC BUMN dan portal HC Danareksa.
11. *Updating data demografi karyawan Perum Jasa Tirta II* pada portal HC Danareksa.
12. Telah dilaksanakan *monitoring* dan evaluasi pengembangan SDM Triwulan III dan IV Tahun 2022.
13. Telah dilaksanakan Kegiatan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat (PMMB) Batch II Tahun 2022 dari Bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan April 2023.
14. Telah dilaksanakan program-program sertifikasi, pelatihan dan semiloka sebagai berikut:
 - *In House Training (IHT) Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)*, pada tanggal 17 - 19 September 2022 sebanyak 21 orang;
 - *IHT Manajemen Risiko Batch II Kelas A*, pada tanggal 01-04 November 2022 sebanyak 30 orang;
 - *IHT Manajemen Risiko Batch II Kelas B*, pada tanggal 22-25 November 2022 sebanyak 30 orang;
 - *IHT Manajemen Risiko Batch II Kelas C*, pada tanggal 13- 16 Desember 2022 sebanyak 27 orang;
 - *IHT Finance For Non Finance Batch II Kelas A*, pada tanggal 08 - 10 November 2022 sebanyak 21 orang;
 - *IHT Finance For Non Finance Batch II Kelas B*, pada tanggal 29 November - 01 Desember 2022 sebanyak 21 orang;
 - *IHT Finance For Non Finance Batch II Kelas C*, pada tanggal 07 - 09 Desember 2022 sebanyak 21 orang;
 - *Pelatihan Dan Sertifikasi Kompetensi Teknik Ketenagalistrikan*, pada tanggal 19 - 23 Desember 2022, sebanyak 20 orang;
 - *Inhouse Online Training dan Sertifikasi Qualified Risk Management Professional (QRMP)*, pada tanggal. 28 November 2022 - 02 Desember 2022 sebanyak 8 orang;
3. *Employee Candidate Onboarding* has been carried out as many as 32 people consisting of 23 results.
6. *BOD Assessment - 1 and Top Millennial Assessment activities* have been carried out in the first quarter of 2022, *BOD Assessment* in the second quarter of 2022 and *BOD-2 Assessment* in the third semester of 2022.
7. *Review of Individual Competency Assessment System against Employee Competency Standards* has been carried out in the second quarter of 2022.
8. *Employee Grading Review work* has been carried out in Sd. of 2022 Audited in 2022.
9. *Compensation System work* has been carried out at the end of 2022 Audited in 2022.
10. *Updating Perum Jasa Tirta II talent data* on the SOE HC portal and Danareksa HC portal.
11. *Updating demographic data of Perum Jasa Tirta II employees* on Danareksa HC portal.
12. *Monitoring and evaluation of HR development* has been carried out in the third and fourth quarter of 2022.
13. *Certified Student Internship Programme (PMMB) Batch II Year 2022* has been implemented from October 2022 to April 2023.
14. *Certification programmes, trainings and seminars* have been conducted as follows:
 - *In House Training (IHT) on Anti-Bribery Management System (SMAP)*, on 17 - 19 September 2022 for 21 people;
 - *IHT Risk Management Batch II Class A*, on 01-04 November 2022 for 30 people;
 - *Risk Management IHT Batch II Class B*, on 22-25 November 2022 with a total of 30 people;
 - *IHT Risk Management Batch II Class C*, on 13-16 December 2022 as many as 27 people;
 - *IHT Finance For Non Finance Batch II Class A*, on 08-10 November 2022 as many as 21 people;
 - *IHT Finance For Non Finance Batch II Class B*, on 29 November - 01 December 2022 as many as 21 people;
 - *IHT Finance For Non Finance Batch II Class C*, on 07 - 09 December 2022 as many as 21 people;
 - *Training and Certification of Electricity Engineering Competence*, on 19 - 23 December 2022, as many as 20 people;
 - *Inhouse Online Training and Qualified Risk Management Professional (QRMP) Certification*, on. 28 November 2022 - 02 December 2022 as many as 8 people;



- Pelatihan MC, pada tanggal 22 November 2022 sebanyak 5 orang;
 - Pelatihan Protokol, pada tanggal 22 November 2022 sebanyak 2 orang;
 - Pelatihan *Performance Management-KPI Aligning Organization's Performance*, pada tanggal 15 – 18 November 2022 sebanyak 6 orang;
 - Pelatihan ISO 26000, pada tanggal 11 November 2022 sebanyak 6 orang;
 - Pelatihan Kearsipan, pada tanggal 28 – 30 November 2022 sebanyak 30 orang;
 - Pertemuan Ilmiah Tahunan ke-39 HATHI, pada tanggal 27 – 30 Oktober 2022 sebanyak 2 orang;
 - Sertifikasi Penggerak Mula Kelas 1 (genset), pada tanggal 24 – 28 Oktober 2022 sebanyak 1 orang;
 - Pelatihan & Sertifikasi Ahli K3 Umum, pada tanggal 28 November – 12 Desember 2022 sebanyak 7 orang;
 - Seminar Motivasi “Meningkatkan Produktifitas Kerja dan Manajemen Emosi dan Fikiran”-Bina Marga Jabar, pada tanggal 24 November 2022 sebanyak 11 orang;
 - The Amazing You-Danareksa, pada tanggal 03 – 04 Desember 2022 sebanyak 2 orang;
 - *Risk Beyond 2022 ERMA International Conference on ERM-CRMS Indonesia*, pada tanggal 08 – 09 Desember 2022 sebanyak 2 orang;
 - PSAK 24, pada tanggal 20 – 21 Desember 2022 sebanyak 4 orang;
 - *Risk Management (Danareksa Learning Institute)*, pada tanggal 21 – 23 Desember 2022 sebanyak 2 orang;
 - *Sharing Session #6 Coopetition and Integration (FHCI)*, pada tanggal 23 November 2022 sebanyak 10 orang.
15. Telah dilaksanakan program *Talent Secondment* Danareksa Batch II tahun 2022 mulai Juli 2022– Januari 2023.
 16. Proses administrasi kenaikan pangkat/golongan dan grade karyawan.
 17. Telah dilaksanakan kegiatan rutin Lembaga Kerjasama Bipartit oleh Tim.
 18. Telah dilaksanakan Sosialisasi Perjanjian Kerjasama Bersama (PKB) Periode 2021-2023 antara Perum Jasa Tirta II dengan Serikat Karyawan Perum Jasa Tirta II.
 19. Telah dilaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi ketenagakerjaan terkait hubungan industrial.
 - Pembayaran Uang Cuti Tahunan berdasarkan Keputusan Direksi Perum Jasa Tirta II Nomor: KPT-10/DIR/02/2022 Tentang Pemberian Uang Cuti Tahunan Tahun 2022 Kepada
 - MC training, on 22 November 2022 as many as 5 people;
 - Protocol Training, on 22 November 2022 as many as 2 people;
 - Performance Management-KPI Aligning Organization's Performance training, on 15-18 November 2022 as many as 6 people;
 - ISO 26000 Training, on 11 November 2022 for 6 people;
 - Archives Training, on 28 – 30 November 2022 as many as 30 people;
 - HATHI 39th Annual Scientific Meeting, on 27 – 30 October 2022 for 2 people;
 - Class 1 Starter Driver Certification (generator set), on 24-28 October 2022 for 1 person;
 - General OHS Expert Training & Certification, on 28 November – 12 December 2022 for 7 people;
 - Motivation Seminar “Improving Work Productivity and Management of Emotion and Mind”-Bina Marga Jabar, on 24 November 2022 for 11 people;
 - The Amazing You-Danareksa, on 03 – 04 December 2022 as many as 2 people;
 - Risk Beyond 2022 ERMA International Conference on ERM-CRMS Indonesia, on 08 – 09 December 2022 as many as 2 people;
 - PSAK 24, on 20-21 December 2022 for 4 people;
 - Risk Management (Danareksa Learning Institute), on 21 – 23 December 2022 for 2 people;
 - Sharing Session #6 Coopetition and Integration (FHCI), on 23 November 2022 for 10 participants.
15. *Danareksa Batch II Talent Secondment programme in 2022 has been implemented from July 2022 to January 2023.*
 16. *Administrative process for promotion/class and grade of employees.*
 17. *Bipartite Co-operation Institution routine activities have been carried out by the Team.*
 18. *Socialisation of the Collective Cooperation Agreement (PKB) for the 2021-2023 period between Perum Jasa Tirta II and the Perum Jasa Tirta II Employees Union has been carried out.*
 19. *Coordination and consultation with labour agencies related to industrial relations have been carried out.*
 - *Payment of Annual Leave based on the Decree of the Board of Directors of Perum Jasa Tirta II Number: KPT-10/DIR/02/2022 concerning the Granting of Annual Leave in 2022 to Employees*



Karyawan Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II;

- Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2022 berdasarkan Keputusan Direksi Perum Jasa Tirta II Nomor : KPT-29/DIR/04/2022 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2022;
- Pembayaran Tunjangan Kinerja I (Jasa Produksi) Triwulan I Tahun 2022 berdasarkan Keputusan Direksi Perum Jasa Tirta II Nomor: KPT-36/DIR/04/2022 Tentang Pemberian Tunjangan Kinerja I (Jasa Produksi) Triwulan I Tahun 2022;
- Pembayaran Tunjangan Kinerja I (Jasa Produksi) Triwulan II Tahun 2022 berdasarkan Keputusan Direksi Perum Jasa Tirta II Nomor: KPT-67/DIR/08/2022 Tentang Pemberian Tunjangan Kinerja I (Jasa Produksi) Triwulan II Tahun 2022;
- Pembayaran Bantuan Pendidikan Tahun 2022 berdasarkan Keputusan Direksi Perum Jasa Tirta II Nomor: KPT-71/DIR/08/2022 Tentang Pemberian Bantuan Pendidikan Tahun 2022;
- Pembayaran Tunjangan Kinerja I (Jasa Produksi) Triwulan III Tahun 2022 berdasarkan Keputusan Direksi Perum Jasa Tirta II Nomor: KPT-107/DIR/10/2022 Tentang Pemberian Tunjangan Kinerja I (Jasa Produksi) Triwulan III Tahun 2022;
- Telah dilaksanakan Kajian Atas Program Pensiun Manfaat Pasti Pada Dana Pensiun Jasa Tirta II berdasarkan Surat Perintah Kerja Antara Perum Jasa Tirta II dan KKA Steven and Mourits Nomor : SPK-14/SDM.DKS/SM/03/2022;
- Telah dilaksanakan Pekerjaan Perhitungan Aktuaria Valuasi 30 Juni 2022 Dan Kajian Tata Kelola Pada Dana Pensiun Jasa Tirta II berdasarkan Surat Perintah Kerja Antara Perum Jasa Tirta II dan KKA Steven and Mourits Nomor: SPK-22/SDM.DKS/SM/10/2022;
- Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dengan Rumah Sakit;
- Pelaksanaan kegiatan *Corporate Gathering* Tahun 2022; dan
- Program Bantuan Biaya Pembinaan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa Tahun 2022.
- Pemberian Seragam Pakaian Kerja berupa 1 stel pakaian Branding dan 1 stel Pakaian Dinas Lapangan Tahun 2022.

of Public Company (Perum) Jasa Tirta II;

- *Payment of Religious Holiday Allowance in 2022 based on Decree of the Board of Directors of Perum Jasa Tirta II Number: KPT-29/DIR/04/2022 concerning Religious Holiday Allowance in 2022;*
- *Payment of Performance Allowance I (Production Services) for the first quarter of 2022 based on the Decree of the Board of Directors of Perum Jasa Tirta II Number: KPT-36/DIR/04/2022 concerning the Granting of Performance Allowance I (Production Services) for the first quarter of 2022;*
- *Payment of Performance Allowance I (Production Services) for the second quarter of 2022 based on Decree of the Board of Directors of Perum Jasa Tirta II Number: KPT-67/DIR/08/2022 Regarding the Granting of Performance Allowance I (Production Services) for the second quarter of 2022;*
- *Payment of Education Assistance in 2022 based on the Decree of the Board of Directors of Perum Jasa Tirta II Number: KPT-71/DIR/08/2022 concerning the Provision of Education Assistance in 2022;*
- *Payment of Performance Allowance I (Production Services) for the third quarter of 2022 based on the Decree of the Board of Directors of Perum Jasa Tirta II Number: KPT-107/DIR/10/2022 on the Granting of Performance Allowance I (Production Services) for the third quarter of 2022;*
- *A review of the Defined Benefit Pension Plan of Jasa Tirta II Pension Fund has been conducted based on the Work Order between Perum Jasa Tirta II and KKA Steven and Mourits Number: SPK-14/SDM.DKS/SM/03/2022;*
- *Actuarial Calculation of 30 June 2022 Valuation and Governance Study on Pension Fund of Jasa Tirta II based on Work Order between Perum Jasa Tirta II and KKA Steven and Mourits Number: SPK-22/SDM.DKS/SM/10/2022;*
- *Implementation of Cooperation Agreement with Hospital;*
- *Implementation of Corporate Gathering activities in 2022; and*
- *Cost Assistance Programme for Development of Devotion to God Almighty in 2022.*
- *Provision of Uniform Work Clothes in the form of 1 suit of Branding clothes and 1 suit of Field Service Clothes in 2022.*



22. Telah dilaksanakan program Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) antara lain:

- Kegiatan Bulan K3 Nasional Tahun 2022;
- Audit eksternal Sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan (SMK3) oleh PT. Alcon Indo Sertifikasi pada tanggal 16 - 17 November 2022 dengan capaian Tingkat Penilaian Memuaskan untuk Kategori Tingkat Lanjutan (166 Kriteria).

Manajemen dan Penilaian Kinerja

Manajemen dan Penilaian Kinerja merupakan alat evaluasi pencapaian target dan tujuan yang harus dicapai oleh seluruh Karyawan maupun satuan kerja yang disusun berdasarkan visi, misi dan tujuan jangka panjang perusahaan serta KPI Perusahaan. Penilaian Kinerja masing-masing individu Karyawan yang dilaksanakan secara objektif, berjenjang, periodik, dan transparan.

Penerapan Penghargaan dan Sanksi

Perusahaan senantiasa berupaya meningkatkan kesejahteraan Karyawan berdasarkan pencapaian kinerja secara adil dan obyektif. Prestasi kinerja terbaik akan memperoleh penghargaan demikian sebaliknya bagi Karyawan yang tidak berprestasi maupun melakukan pelanggaran memperoleh sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Remunerasi Karyawan

Penentuan dan pemberian remunerasi Karyawan tunduk pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk batas Upah Minimum Provinsi (UMR), Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan peraturan terkait lainnya.

Kesejahteraan dan Jaminan Sosial

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang ketenagakerjaan serta dalam rangka meretensi Karyawan, Perusahaan senantiasa berupaya terus meningkatkan kesejahteraan Karyawan melalui berbagai aspek antara lain:

- Pemberian dan perbaikan remunerasi dan benefit, kepesertaan jaminan sosial BPJS Kesehatan, kepesertaan dalam BPJS Ketenagakerjaan, fasilitas kesehatan serta Asuransi.
- Program pengembangan Karyawan seperti program peningkatan jenjang Pendidikan.
- Dukungan pada kebutuhan Karyawan untuk melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaan dengan penyediaan sarana dan prasarana serta anggaran pelaksanaan kegiatan keagamaan.

22. Occupational Safety & Health (K3) programmes have been implemented, among others:

- National OHS Month activities in 2022;
- External audit of the Safety & Health Management System Certification (SMK3) by PT Alcon Indo Certification on 16-17 November 2022 with the achievement of a Satisfactory Assessment Level for the Advanced Level Category (166 Criteria).

Performance Management and Assessment

Performance Management and Appraisal is an evaluation tool for the achievement of targets and goals that must be achieved by all employees and work units that are prepared based on the company's vision, mission and long-term goals and KPIs. Performance Appraisal of each individual Employee is carried out objectively, tiered, periodically, and transparently.

Implementation of Rewards and Sanctions

The Company always strives to improve Employee welfare based on fair and objective performance achievement. The best performance achievements will receive awards and vice versa for Employees who do not perform or commit violations receive sanctions in accordance with the applicable provisions in the Company with due observance of applicable laws and regulations.

Employee Remuneration

The determination and provision of Employee remuneration is subject to applicable laws and regulations, including the Provincial Minimum Wage (UMR) limit, Minister of Labour Regulation and other relevant regulations.

Welfare and Social Security

In order to implement the mandate of the Labour Law and in order to retain Employees, the Company always strives to continue to improve Employee welfare through various aspects, among others:

- Provision and improvement of remuneration and benefits, BPJS Health social security membership, BPJS Employment membership, health facilities and insurance.
- Employee development programmes such as education upgrading programmes.
- Support for the needs of Employees to carry out worship according to religion and belief by providing facilities and infrastructure as well as the budget for implementing religious activities.



- Dukungan pada kebutuhan Karyawan untuk melaksanakan kegiatan olah raga dengan penyediaan sarana dan prasarana serta anggaran pelaksanaan kegiatan olah raga.
- Bantuan bagi Karyawati/Isti Karyawan yang melahirkan.
- Bantuan bagi Karyawan yang mengalami duka cita.
- Ditahun ini Perusahaan juga membuat program kepemilikan kendaraan bermotor (*Car Ownership Program*) untuk Para Pejabat Perusahaan guna meretensi Karyawan yang potensial.

- *Support for the needs of employees to carry out sports activities by providing facilities and infrastructure as well as the budget for implementing sports activities.*
- *Assistance for Employees who give birth.*
- *Assistance for Employees who experience bereavement.*
- *This year the Company also made a car ownership programme for Company Officials to retain potential employees.*

Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

Pemberian jaminan kesehatan kepada Karyawan, Perusahaan mengikutsertakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada BPJS Kesehatan, dan untuk kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan selain program yang telah diikuti yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan juga Karyawan telah diikutsertakan pada program baru yaitu Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Implementation of the National Social Security System (SJSN)

Providing health insurance to employees, the Company includes the National Health Insurance (JKN) programme at BPJS Health, and for participation in BPJS Employment in addition to the programmes that have been followed, namely Work Accident Insurance (JKK), Death Insurance (JKM), Old Age Insurance (JHT), Pension Insurance (JP) and also employees have been included in a new programme, namely the Job Loss Insurance Program (JKP).

Sistem Manajemen Kinerja

PJT II memiliki sistem penilaian kinerja Karyawan yang berkaitan dengan sistem penilaian unit kerja masing-masing yaitu berupa *Key Performance Indicator (KPI)* untuk menilai performa/kinerja unit kantor yang dinilai setiap triwulan/tahunan dan Sasaran Kinerja Individu (SKI) untuk mengukur kinerja Karyawan setiap setahun sekali. Penilaian SKI secara aktif akan membimbing para Karyawan dalam setiap unit kerja dalam mencapai sasaran unitnya dalam kerangka mencapai sasaran usaha PJT II serta memberikan penilaian kinerja dan potensi secara lebih objektif.

Performance Management System

PJT II has an Employee performance assessment system that is related to the assessment system of each work unit, namely in the form of Key Performance Indicator (KPI) to assess the performance of office units which are assessed every quarter / year and Individual Performance Objectives (SKI) to measure Employee performance once a year. The SKI assessment will actively guide Employees in each work unit in achieving their unit's goals within the framework of achieving PJT II's business goals and provide a more objective assessment of performance and potential.



Internalisasi Budaya

Menyadari sepenuhnya bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset penting dalam menjaga keberlangsungan Perusahaan, maka pengelolaan SDM menjadi salah satu fokus utama PJT II. Program penyempurnaan kebijakan pengelolaan SDM senantiasa dilakukan secara berkesinambungan, dimana PJT II juga telah menetapkan budaya Perusahaan yang ditanamkan melalui serangkaian program internalisasi visi, misi dan nilai-nilai budaya Perusahaan. Penerapan budaya kerja adalah suatu hal penting bagi PJT II untuk memastikan setiap Karyawan mampu menjunjung tinggi nilai-nilai Perusahaan, menjalankan secara penuh implementasi *good corporate governance* serta berjalan selaras dengan strategi dan kegiatan usaha Perusahaan secara keseluruhan. Hal ini dilakukan demi menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan harmonis agar loyalitas Karyawan dapat meningkat sehingga dalam jangka panjang akan berpengaruh positif terhadap keberlangsungan usaha PJT II.

Tim Internalisasi Budaya

Dalam menjalankan internalisasi budaya Perusahaan, PJT II melibatkan seluruh Karyawan mulai dari level yang tertinggi sampai terendah, dibantu oleh tim khusus yang bertanggung jawab untuk melakukan internalisasi budaya di setiap Unit Kerja.

Program Internalisasi Budaya

Selama tahun 2022 PJT II telah melaksanakan program internalisasi budaya, di antaranya sebagai berikut,

- Mengenalkan dan mensosialisasikan sejak awal tentang budaya Perusahaan yang berlaku di PJT II yaitu sejak Karyawan mengikat kontrak kerja dengan PJT II.
- Selalu mensosialisasikan kepada Karyawan disetiap kesempatan misalnya pada saat briefing pagi atau pada pertemuan-pertemuan internal lainnya.
- Membuat dan memberikan buku saku yang berisi budaya Perusahaan kepada Karyawan.

Pengembangan Kompetensi Manajemen Sumber Daya Manusia

PJT II memberikan kesempatan yang sama bagi Karyawan untuk terus berkembang seiring dengan perkembangan kinerja Perusahaan. Program pengembangan SDM dilakukan melalui pendidikan karir, pelatihan dan sertifikasi profesi, keterampilan, serta berbagai kursus, pelatihan, sosialisasi, seminar, workshop dan pelatihan manajemen dan teknis yang disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan.

Culture Internalisation

Fully aware that Human Resources (HR) is an important asset in maintaining the sustainability of the Company, HR management is one of the main focuses of PJT II. The HR management policy improvement program is always carried out on an ongoing basis, where PJT II has also established a corporate culture that is instilled through a series of internalisation programs of the Company's vision, mission and cultural values. The implementation of work culture is an important thing for PJT II to ensure that every Employee is able to uphold the Company's values, fully implement good corporate governance and run in harmony with the Company's overall strategy and business activities. This is done in order to create a comfortable and harmonious work environment so that Employee loyalty can increase so that in the long run it will have a positive effect on the sustainability of PJT II's business.

Performance Management System

In carrying out the internalisation of the Company's culture, PJT II involves all Employees from the highest to the lowest level, assisted by a special team responsible for internalising the culture in each Work Unit.

Culture Internalisation

During 2022 PJT II has implemented cultural internalisation programmes, including the following,

- Introducing and socialising from the beginning about the Corporate culture that applies in PJT II, namely since the Employee binds the work contract with PJT II.*
- Always socialise to Employees at every opportunity for example during morning briefing or other internal meetings.*
- Create and provide a pocket book containing corporate culture to Employees.*

Human Resource Management Competency Development

PJT II provides equal opportunities for Employees to continue to grow along with the development of the Company's performance. HR development programmes are conducted through career education, professional training and certification, skills, as well as various courses, training, socialisation, seminars, workshops and management and technical training tailored to the needs of the Company.



Sebelum menentukan program pelatihan, maka dilakukan kajian kebutuhan melalui berbagai tahapan. Metode pelatihan dan pengembangan dalam pengelolaan pelatihan dan pengembangan Sumber Daya Manusia di PJT II dilakukan melalui beberapa tahapan, yakni sebagai berikut:

1. Analisis kebutuhan.
2. Penetapan Tujuan.
3. Pengembangan Metode Pelatihan.
4. Pengembangan Materi Pelatihan.
5. Pelaksanaan Pelatihan.
6. Evaluasi Pelatihan.

Penentuan pelatihan berfokus pada tugas, pekerjaan, atau posisi yang spesifik yang membuat seseorang menyelesaikan pekerjaannya. Oleh sebab itu, topik pelatihan ditentukan oleh tingkat kepentingannya.

Tujuan Pelatihan

Setiap Karyawan mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan kebutuhan karir Karyawan itu sendiri. Karyawan akan mengikuti program pelatihan baik dalam rangka meningkatkan keterampilan maupun dalam melaksanakan tugas-tugasnya sekarang dan antisipasi pengembangan tugas ke depan.

Biaya Pelatihan

Biaya Pelatihan Pegawai Tahun 2020-2022 (dalam Rp)
Employee Training Costs for 2020-2022 (in IDR)

JENIS DIKLAT / Type of Training	TINGKAT TURNOVER KARYAWAN / Employee Turnover Rate		
	2022	2021	2020
Pelatihan Inhouse / Inhouse Training			
Pelatihan Eksternal / External Training			
Total / Total			

Program Pengembangan Kualitas Dan Kompetensi Karyawan

Pengembangan kualitas dan kompetensi Karyawan dilaksanakan sesuai dengan pedoman blue print edukasi PJT II yang telah dirumuskan sebagai berikut:

Kesempatan Dan Keselamatan Kerja

PJT II merupakan Perusahaan yang bergerak dalam lingkungan kerja yang tidak memicu banyak risiko kecelakaan kerja, namun PJT II berusaha untuk memberikan perlindungan dalam bekerja, sehingga semua pihak dapat melakukan aktivitas dengan nyaman. PJT II berupaya memenuhi standar kesehatan

Before determining the training programme, a needs assessment is conducted through various stages. Training and development methods in the management of training and development of Human Resources in PJT II are carried out through several stages, namely as follows:

- 1. Needs analysis.*
- 2. Goal setting.*
- 3. Development of Training Methods.*
- 4. Development of Training Materials.*
- 5. Training Implementation.*
- 6. Training Evaluation.*

Training assignments focus on the specific tasks, jobs, or positions that enable a person to complete their job. Therefore, training topics are determined by their level of importance.

Training Objectives

Every Employee has the same opportunity to obtain education in accordance with the Employee's own career needs. Employees will participate in training programmes both in order to improve skills and in carrying out their current duties and anticipate the development of future duties.

Training Costs

Employee Quality and Competency Development Programme

Employee quality and competency development is carried out in accordance with PJT II education blue print guidelines that have been formulated as follows:

Work Opportunity and Safety

PJT II is a company engaged in a work environment that does not trigger many risks of work accidents, but PJT II strives to provide protection at work, so that all parties can carry out activities comfortably. PJT II strives to meet occupational health and safety standards and achieve zero accidents in each work unit. Risks are



dan keselamatan kerja serta tercapainya kecelakaan nihil pada setiap unit kerja. Risiko yang diminimalisir berupa bahaya kebakaran, bahaya pencurian, dan fasilitas kesehatan. Penjelasan lebih lengkap terkait kesehatan dan keselamatan kerja ada pada bagian *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Penilaian Kinerja Karyawan

PJT II menetapkan standarisasi penilaian kinerja Karyawan menggunakan kamus dan *balance scorecard* untuk setiap jabatan yang disebut dengan istilah *Key Performance Indicator (KPI)*. Penilaian ini sangat mempengaruhi jenjang karir, promosi, dan rotasi masing-masing Karyawan. Namun penilaian ini sedang dalam proses perbaikan dan perubahan untuk lebih memberikan nilai-nilai keadilan bagi seluruh Karyawan.

Reward And Punishment

Sistem *reward and punishment* dari manajemen penting untuk diterapkan oleh Perusahaan. Sistem *reward and punishment* membantu manajemen dalam mewujudkan visi, misi, strategi, dan tujuan Perusahaan. Selain itu, sistem *reward and punishment* dari manajemen menjadi alat manajemen untuk dapat memberikan pengaruh kepada Karyawan agar bertindak positif guna pencapaian tujuan Perusahaan. Karyawan akan kooperatif apabila manajemen dapat mengembangkan dan mengelola Karyawan dengan tepat, sehingga target Perusahaan dapat berjalan sesuai harapan manajemen.

Sistem *reward and punishment* dari manajemen juga dirancang untuk memotivasi Karyawan agar tujuan perusahaan tercapai. *Reward* merupakan salah satu alat pengendalian penting yang digunakan oleh Perusahaan untuk memotivasi personel agar mencapai tujuan Perusahaan dengan perilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh Perusahaan. Sedangkan *punishment* merupakan sesuatu yang tidak disukai/disenangi oleh Karyawan untuk menghasilkan efek jera sehingga tidak akan melakukan perbuatan dan kesalahan yang sama. Bentuk-bentuk *punishment* antara lain kehilangan pekerjaan, tidak menerima kenaikan gaji, dihapus dari daftar Karyawan yang akan dipromosi, kegagalan mendapatkan *reward*, pemutusan hubungan kerja, dan lain sebagainya.

Sepanjang tahun 2022, PJT II telah memberikan 4 (empat) orang *reward* dan 2 (dua) orang *punishment*.

minimised in the form of fire hazards, theft hazards, and health facilities. A more complete explanation of occupational health and safety is in the Corporate Social Responsibility (CSR) section.

Employee Performance Assessment

PJT II standardises employee performance appraisal using dictionary and balance scorecard for each position called Key Performance Indicator (KPI). This assessment greatly affects the career path, promotion, and rotation of each Employee. However, this assessment is in the process of improvement and change to better provide fairness values for all Employees.

Reward And Punishment

The reward and punishment system from management is important to be implemented by the Company. The reward and punishment system helps the management in realising the Company's vision, mission, strategy and goals. In addition, the reward and punishment system from management is a management tool to be able to influence employees to act positively to achieve the Company's goals. Employees will cooperate if management can develop and manage employees appropriately, so that the Company's targets can run as expected by management.

The reward and punishment system from management is also designed to motivate employees to achieve company goals. Reward is one of the important control tools used by the Company to motivate personnel to achieve the Company's goals with the behaviour expected by the Company. Meanwhile, punishment is something that is disliked by Employees to produce a deterrent effect so that they will not commit the same actions and mistakes. Forms of punishment include losing a job, not receiving a salary increase, being removed from the list of employees to be promoted, failure to get a reward, termination of employment, and so on.

Throughout 2022, PJT II has given 4 (four) rewards and 2 (two) punishments.



Rencana Pengembangan SDM Di Tahun 2023

Penerimaan Sumber Daya Manusia baru akan dilaksanakan guna menunjang pemenuhan Karyawan pada jaringan kantor, mengisi formasi atau jenis pekerjaan baru, mengganti Karyawan yang berhenti baik karena alasan pensiun ataupun lainnya serta pertimbangan hasil *Work Load Analysis (WLA)*.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi menawarkan banyak sekali kemudahan, salah satunya ialah memudahkan informasi menyebar tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Proses pembelajaran secara serempak dapat dilaksanakan untuk lingkup sasaran yang kecil maupun besar, dimanapun dan kapan pun serta dapat diikuti setiap Karyawan.

HR Development Plan in 2023

The recruitment of new Human Resources will be carried out to support the fulfilment of employees in the office network, filling new formations or types of work, replacing employees who quit either for retirement or other reasons and considering the results of Work Load Analysis (WLA).

The development of communication and information technology offers many conveniences, one of which is making it easier for information to spread without being limited by time and space. Simultaneous learning processes can be carried out for small or large target scopes, anywhere and anytime and can be followed by every Employee.



TEKNOLOGI INFORMASI

Information Technology





STORAGE



LAPORAN TEKNOLOGI INFORMASI (TI) DAN SISTEM MANAJEMEN MUTU

Information Technology (IT) Report and Quality Management System

Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang pengelolaan sumberdaya air, PJT II senantiasa melakukan peningkatan terhadap penerapan sistem teknologi informasi pada semua aspek operasional sesuai dengan perkembangan dan standar yang berlaku. Untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan dan perkembangan teknologi informasi, PJT II melakukan langkah-langkah perubahan yang strategis di bidang TI dalam rangka peningkatan pelayanan PJT II.

As a company engaged in the management of water resources, PJT II continues to improve the application of information technology systems in all operational aspects in accordance with applicable developments and standards. To anticipate the increasing needs and development of information technology, PJT II takes strategic change steps in the IT field in order to improve PJT II services.

Sepanjang tahun 2022 fokus PJT II dalam bidang TI adalah:

Throughout 2022 the focus of PJT II in the IT field is:

URAIAN Description	STATUS Status	KETERANGAN Information
Pemenuhan Standar IT Danareksa Holding pada Aspek Infrastruktur dan IT Security. Persyaratan yang harus terpenuhi adalah sebagai berikut: 1. Ketersediaan Email Domain Perusahaan; 2. Ketersediaan Data Center (DC) 3. Penerapan Sistem Backup dan Replikasi 4. Ketersediaan Primary Link Internet (Kantor, DC & DRC) 5. Ketersediaan Secondary Link Internet (Kantor dan DC) 6. Penerapan Virtualisasi Server 7. Penerapan Sistem Monitoring Server dan Jaringan 8. Penerapan Firewall (VPN IPSEC, IPS) 9. Penerapan Antivirus 10. Penerapan SSL (Secure Socket Layer) 11. Penerapan Active Directory/LDAP 12. Disaster Recovery Center (DRC) 13. SIEM (Security Information and Event Management)	Terpenuhi (Close)	Terpenuhi (Close)
Pemenuhan Standar IT Danareksa Holding pada Aspek Business Process. Persyaratan yang harus terpenuhi adalah sebagai berikut: a. Sistem Pencatatan Keuangan / ERP b. HRIS c. Website Korporasi d. E-Office (Digital Signature) e. Dashboard Management f. GRC (Governance, Risk, Compliance System)	1. Sistem Pencatatan Keuangan / ERP (Close) 2. Human Resource Information System (HRIS) Close 3. Website Korporasi (Close) 4. E-Office Digital Signature (Open) e. Dashboard Management (Open) f. GRC (Governance, Risk, Compliance System) (Close)	1. Terhitung sejak tahun 2017 PJT II telah menggunakan Tools ERP (Odoo) untuk mendukung sistem Pencatatan Keuangan. Sistem ini kemudian dikembangkan pada Sd. Tahun 2022 Audited tahun 2022 dari eksternal Perusahaan guna mempertinggi tingkat akurasi proses pelaporan keuangan. 2. Terhitung sejak tahun 2020 PJT II telah menggunakan Sistem Informasi Karyawan guna mendukung pengelolaan database karyawan, penggajian dan pengelolaan absensi secara online. Sistem ini kemudian dikembangkan pada Sd. Tahun 2022 Audited tahun 2022 oleh Pengembang dari Eksternal Perusahaan guna mempertinggi tingkat akurasi dan melengkapi



URAIAN Description	STATUS Status	KETERANGAN Information
		modul-modul pengelolaan data Karyawan Perusahaan. 3. - 4. PJT II telah menggunakan aplikasi tata persuratan yang diberinama "JatiVio" sejak tahun 2020, namun sehubungan dengan belum terimplementasinya digital signature, maka pada tanggal 28 Oktober 2022 PJT II telah mengajukan kebutuhan E-Office+E- Signature kepada Danareksa Holding sesuai surat Dinas Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko Nomor: SD- / DKSMR/TI/10/2022 sebagai salah satu bentuk dukungan kepesertaan IT Shared Service Danareksa (ITSSD) 5. Semula PJT II telah mempersiapkan <i>Dashboard Management</i> sebagai portal informasi yang diperoleh dari aplikasi-aplikasi yang digunakan di lingkungan Perusahaan, namun demikian sebagai tindak lanjut upaya mendukung implementasi <i>Dashboard Management Danareksa Holding</i>, maka pada tahun 2023 PJT II telah mengalokasikan anggaran "aktivasi akun" agar dapat mengakses dan meng-upload informasi terkait PJT II pada <i>Dashboard Management Danareksa</i> f. Aplikasi E-GRC merupakan aplikasi yang dikembangkan untuk membantu pengelolaan peraturan, risiko dan tingkat kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan yang berlaku; Aplikasi ini merupakan pengembangan dari aplikasi SIMRISK yang telah digunakan PJT II sejak tahun 2019 dengan menambah fungsi audit dan compliance. Proses pembangunan aplikasi ini diselenggarakan selama 4 (empat) bulan didampingi oleh narasumber dari unit-unit proses bisnis untuk memastikan ketepatan pemenuhan modul-modul yang diperlukan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
Pemenuhan Standar IT Danareksa Holding pada Aspek Tata Kelola. Persyaratan yang harus terpenuhi adalah sebagai berikut: 1. IT Master Plan 2. Kebijakan Teknologi Informasi 3. Kebijakan Pengembangan Teknologi Informasi 4. Kebijakan Operasional Teknologi Informasi 5. Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi 6. Disaster Recovery Plan (DRP) 7. Asesmen IT Maturity 8. Asesmen INDI 4.0 9. Penetration and Vulnerability testing 10. DRC Rehearsal	a. <i>IT Master Plan (Close)</i> b. Kebijakan Pengembangan dan Operasional Teknologi Informasi serta Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (Open) c. Disaster Recovery Plan d. <i>Asesmen IT Maturity (Close)</i> e. <i>Asesmen INDI 4.0 (Close)</i> f. <i>Penetration and Vulnerability testing (Close)</i> a. DRC Rehearsal	1. Sudah Terpenuhi dengan adanya ITMP PJT II Tahun 2020 s/d 2024 2. Kebijakan Pengembangan dan Operasional Teknologi Informasi serta Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi telah selesai disusun oleh Konsultan IT, namun mengingat belum dapat diimplementasikan pada tahun 2022 maka kebijakan ini direncanakan ditetapkan melalui Peraturan Direksi PJT II pada Triwulan I Tahun 2023. 3. Terpenuhi. 4. Terpenuhi dengan skor 2,09 5. Terpenuhi dengan skor 2,05 6. Terpenuhi.



Perkembangan teknologi informasi yang semakin berkembang pesat dan persaingan antar perusahaan yang semakin kompetitif mengharuskan PJT II untuk menata dan membenahi kualitas layanan yang berbasis teknologi informasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan dan masyarakat. Karena teknologi merupakan kunci utama yang memungkinkan Kami menyediakan produk dan jasa kepada pelanggan, mengukur dan menelusuri kinerja bisnis, serta mengambil keputusan-keputusan manajemen yang tepat untuk kelangsungan usahanya.

Guna menjaga efektivitas dan efisiensi serta relevansi pemanfaatan TI, Perusahaan berupaya menciptakan inovasi berkelanjutan dengan memperhatikan kebutuhan bisnis, baik pada kebijakan, proses, hingga infrastruktur yang dimiliki. Didukung oleh mekanisme evaluasi secara berkala, kehadiran SDM di bidang TI yang kompeten, serta perencanaan yang matang, Perusahaan optimis dapat bergerak progresif menuju pencapaian visi misi serta tujuan bisnis yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2022, PJT II kembali melaksanakan penyesuaian IT Masterplan selaras dengan Perubahan pada Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).

Didalam dokumen tersebut terdapat 3 (tiga) kategori perencanaan pengembangan IT, yang meliputi perencanaan pengembangan sistem informasi atau aplikasi, penguatan infrastruktur dan perbaikan tata kelola IT perusahaan.

Dalam rangka menyusun perencanaan pengembangan sistem informasi, maka pada tahap awal dilakukan kajian terhadap Arsitektur Bisnis PJT II sebagaimana terlihat pada gambar dibawah ini:

The development of information technology that is growing rapidly and competition between companies is increasingly competitive requires PJT II to organize and improve the quality of services based on information technology to provide the best service to customers and the public. Because technology is the main key that enables us to provide products and services to customers, measure and track business performance, and make the right management decisions for business continuity.

In order to maintain the effectiveness and efficiency as well as the relevance of IT use, the Company strives to create sustainable innovation by taking into account business needs, both in policies, processes, and the infrastructure it owns. Supported by regular evaluation mechanisms, the presence of competent IT human resources, and careful planning, the Company is optimistic that it can move progressively towards achieving the stated vision, mission and business goals.

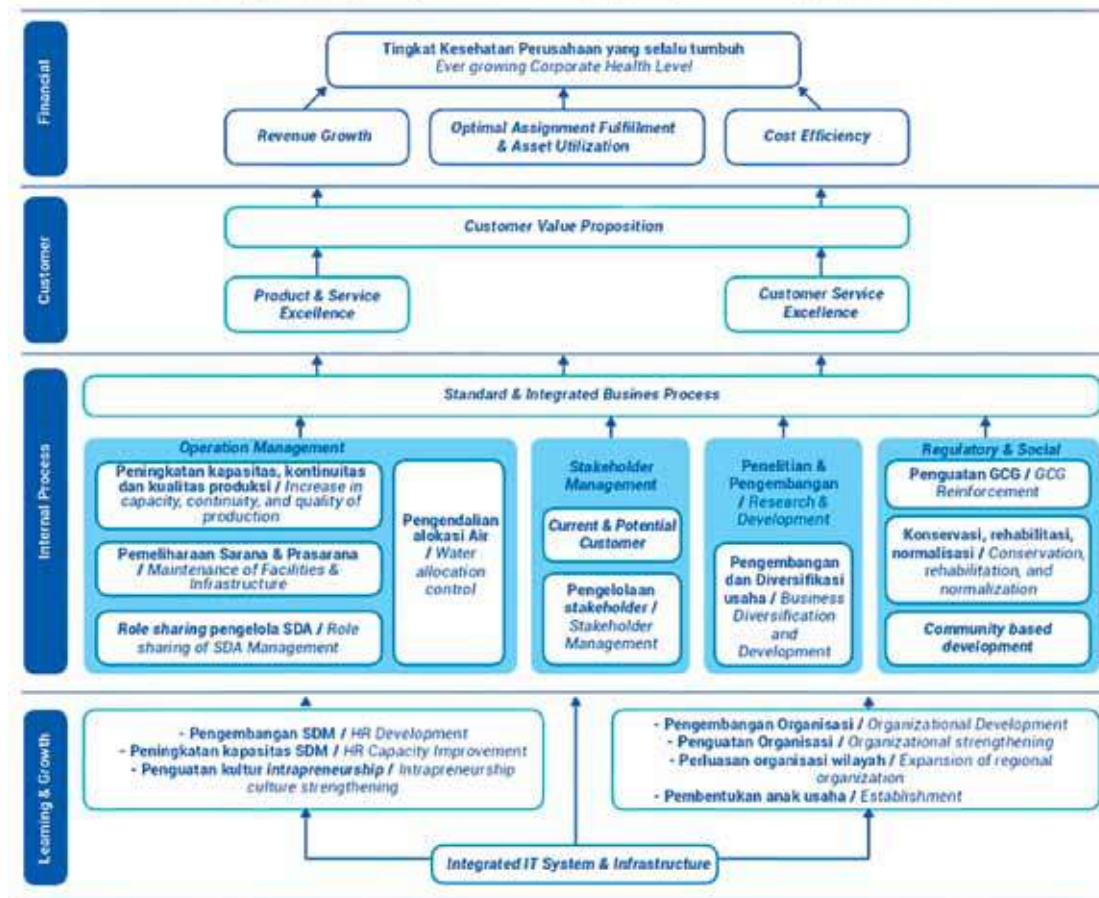
In 2022, PJT II will again carry out adjustments to the IT Master Plan in line with the Changes in the Company's Long-Term Plan (RJPP).

In this document, there are 3 (three) categories of IT development planning, which include planning for information system development or applications, strengthening infrastructure and improving corporate IT governance.

In order to prepare an information system development plan, at the initial stage, a study was carried out on the PJT II Business Architecture as shown in the figure below:



Peta Strategi (Strategy Map) Perum Jasa Tirta II Tahun 2018 – 2022 | Perum Jasa Tirta II Strategy Map for 2018 – 2022



Peta Strategi TI

Tujuan Perusahaan dalam memelihara komitmen pengembangan TI secara berkelanjutan yang terarah dan terukur diwujudkan melalui penyusunan peta strategi (strategy map) TI sebagai acuan dasar yang memuat strategi utama pengembangan dan pengelolaan TI dalam proses bisnis yang dijalankan. Adapun penyusunannya didasarkan pada kebutuhan Perusahaan untuk memperkuat lini fungsional serta arah pengembangan bisnis ke depan.

Rantai Nilai Pengelolaan Bisnis

Sebuah perusahaan pada dasarnya merupakan sebuah kumpulan aktivitas yang dilakukan untuk mendesain, menghasilkan, memasarkan, menyajikan dan mendukung produk atau jasa yang dihasilkan. Kesatuan aktivitas tersebut direpresentasikan ke dalam suatu bentuk rantai nilai (value chain). Pendekatan rantai nilai ini membedakan aktivitas bisnis ke dalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu (1) aktivitas utama (primary activities) yang berkaitan langsung dengan core business Perusahaan; dan (2) aktivitas pendukung (supporting business) yang tidak berkaitan langsung dengan core business, tetapi pengelolaannya dapat menentukan kesuksesan aktivitas utama.

IT Strategy Map

The Company's objective in maintaining IT development commitment that is directed and measurable is realized through the preparation of the IT strategy map as a basic reference that contains the main strategies for developing and managing IT in the business processes that are carried out. The preparation is based on the Company's need to strengthen functional lines and the direction of business development going forward.

Business Management Value Chain

A company is basically a collection of activities carried out to design, produce, market, present and support the products or services it produces. All of these activities can be represented in the form of a value chain. This value chain approach distinguishes business activities into 2 (two) large groups, namely (1) Primary activities, which are directly related to the company's core business; and (2) supporting activities that are not directly related to the core business but their management can determine the success of the main activities.

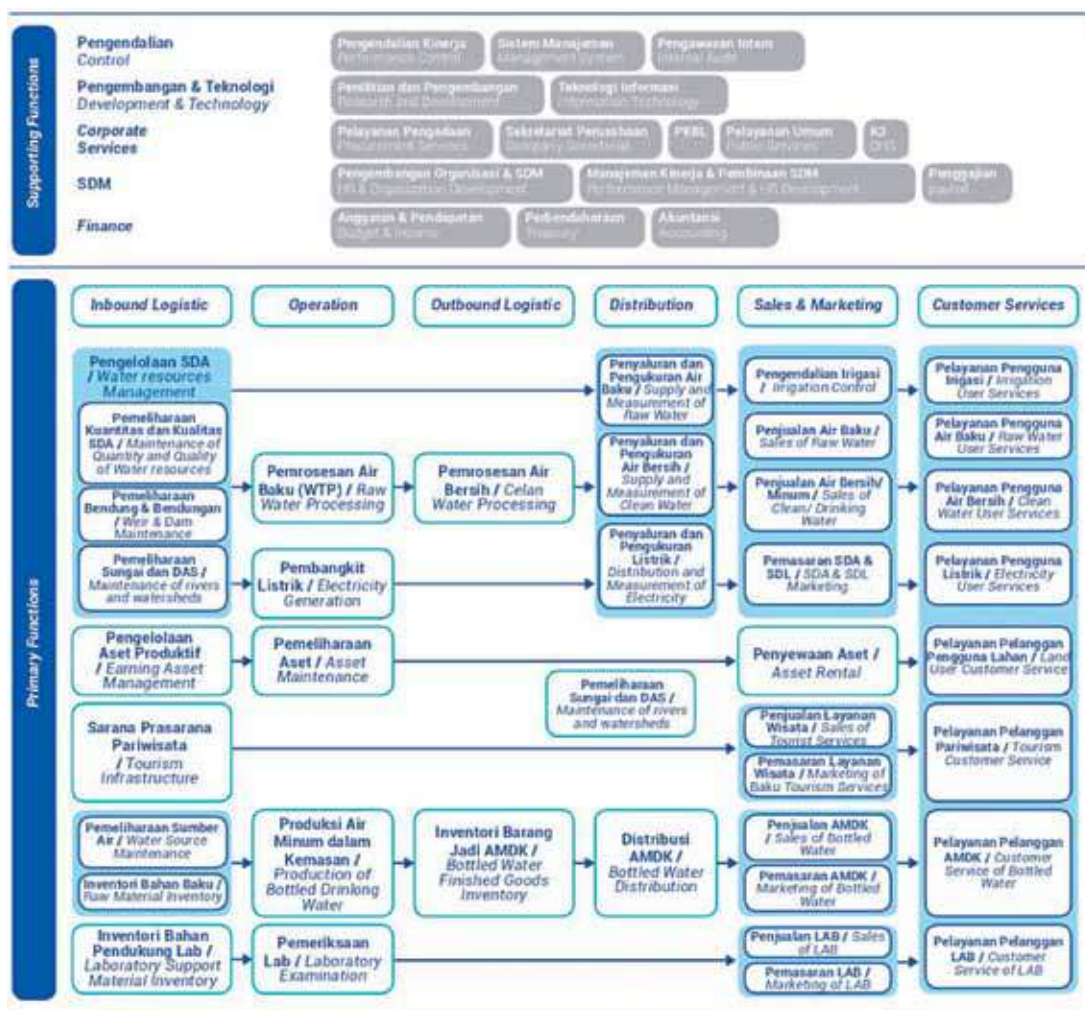


Aktivitas-aktivitas tersebut dikelola oleh perusahaan menggunakan instrumen unit/fungsi bisnis yang dimuat dalam struktur organisasi yang bertanggung jawab dalam mengelola efektivitas dan efisiensi aktivitas bisnis secara keseluruhan. Dengan demikian, guna memahami bisnis yang dikelola Perum Jasa Tirta II maka perlu dilakukan identifikasi terhadap seluruh fungsi bisnis yang terdapat di Perusahaan sehingga dapat dianalisis sejauh mana kebutuhan fungsi, dukungan, dan infrastruktur TI bagi kelancaran operasional bisnis yang dijalankan.

These activities are managed by the company using business unit/function instruments contained in the organizational structure responsible for managing the effectiveness and efficiency of overall business activities. Thus, in order to understand the business managed by Perum Jasa Tirta II, it is necessary to identify all business functions in the Company so that it can be analyzed the extent to which the needs of functions, support, and IT infrastructure for the smooth running of business operations are run.

Adapun model rantai nilai bisnis Perum Jasa Tirta II diuraikan dalam arsitektur bisnis sebagai berikut:

The Perum Jasa Tirta II business value chain model is described in the business architecture as follows:



STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA TI / IT Management Organizational Structure





Tata Kelola Dan Manajemen TI

Pengelolaan Teknologi Informasi di lingkungan Perum Jasa Tirta II diarahkan pada pemenuhan best practices *Good Corporate Governance (GCG)* dengan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2018 tentang Prinsip Tata Kelola Teknologi Informasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara, regulasi eksternal relevan lainnya, serta peraturan internal Perusahaan. Analisis dilakukan terhadap ketiga komponen tata kelola, yaitu (1) Struktur Tata Kelola TIK Korporat; (2) Proses tata kelola TIK; dan (3) Struktur Organisasi Pengelola TI.

Struktur Tata Kelola TIK Korporat Struktur tata kelola TIK Korporat diorientasikan dan diarahkan pada optimalisasi investasi dan infrastruktur TI sehingga manfaat yang dihasilkan dapat terasa dan berdampak positif bagi proses dan aktivitas bisnis secara keseluruhan.

Pengembangan Sdm Di Bidang TI

Sejalan dengan pengembangan teknologi informasi, Perusahaan turut menaruh perhatian pada pemenuhan kebutuhan pengembangan kompetensi SDM di bidang TI. Hal ini dimaksudkan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, baik dari segi pengetahuan maupun keterampilannya.

Dalam mendukung tujuan tersebut, Perusahaan telah menyusun kebijakan pengelolaan sumber daya TI yang mengatur tatanan pengelolaan sumber daya TI Perum Jasa Tirta II yang menjamin efektivitas dan efisiensi produk TI yang dihasilkan. Kebijakan tersebut terdiri dari :

- Prosedur pengelolaan SDM TI
- Prosedur pengelolaan data/informasi
- Prosedur pengelolaan *hardware/software*
- Prosedur pengelolaan infrastruktur teknologi informasi (data center dan jaringan komputer)

Sistem Informasi Sumber Daya Air (Sisda)

PJT II sebagai perusahaan umum mendapatkan penugasan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pengusahaan SDA di wilayah sungai dan sebagian tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan SDA di wilayah kerja sesuai Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2022.

It Governance And Management

Management of Information Technology in Perum Jasa Tirta II is directed at meeting the best practices of Good Corporate Governance (GCG) by referring to SOE Ministerial Regulation Number PER-02/ MBU/02/2018 concerning Principles of Information Technology Governance in the Ministry of State-Owned Enterprises, external regulations other relevant, and internal company regulations. The analysis was carried out on the three components of governance, namely (1) Corporate ICT Governance Structure; (2) ICT governance processes; and (3) IT Management Organizational Structure.

Corporate ICT governance Structure The corporate ICT governance structure is oriented and directed at optimizing IT investment and infrastructure so that the benefits generated can be felt and have a positive impact on the overall business processes and activities.

Hr Development In It Field

In line with the development of information technology, the Company also pays attention to meeting the needs of developing HR competencies in the IT field. This is intended to prepare competent human resources and able to adapt to technological developments, both in terms of knowledge and skills.

In support of these objectives, the Company has prepared an IT resource management policy that governs the management of Perum Jasa Tirta II's IT resources that ensures the effectiveness and efficiency of IT products generated. The policy consists of :

- *IT HR management procedures*
- *Data/information management procedures*
- *Hardware/software management procedures*
- *Information technology infrastructure management procedures (data center and computer networks)*

Water Resources Information System (Sisda)

PJT II as a public company is assigned to carry out its duties and responsibilities in the exploitation of water resources in the river area and some of the tasks and responsibilities in the field of water resource management in the working area according to Government Regulation No. 25 of 2022.



Untuk menunjang penugasan tersebut, PJT II membangun Sistem Informasi Sumber Daya Air (SISDA) sejak tahun 2013 yang dimanfaatkan untuk mendapatkan informasi pengelolaan SDA di seluruh wilayah kerja.

Data-data yang tersedia pada SISDA tersebut antara lain meliputi:

Data Spasial

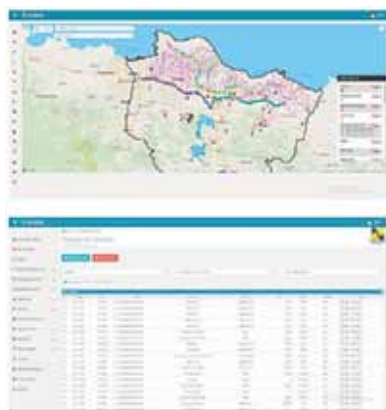
- DAS dan Sub DAS WS
- Citarum dan sebagian WS Ciliwung – Cisadane
- Jaringan hidrologi
- Prasarana SDA

Data Tabular

- Debit air di pos hidrologi
- Debit air di bending
- Data curah hujan
- Iklim
- Pengusahaan air baku
- Data kualitas air
- Batimetri Waduk Ir. H. Djuanda

Model

- Simulasi debit sesaat
- Simulasi debit harian



To support this assignment, PJT II has built a Water Resources Information System (SISDA) since 2013 which is used to obtain information on the management of water resources in all working areas.

The data available on the SISDA include:

Spatial Data

- Watershed and sub-watershed for WS
- Citarum and part of WS Ciliwung – Cisadane
- Hydrological network
- Water Resources Infrastructure

Tabular Data

- Water discharge at the hydrology post
- Water discharge in bending
- Rainfall data
- Climate
- Raw water exploitation
- Water quality data
- Bathymetry of Ir. H. Juanda

Model

- Simulation of instantaneous discharge
- Daily debit simulation



Pengembangan SISDA terus dilakukan sebagai satu kesatuan sistem informasi yang menampung data pantau operasi sarana prasarana SDA sehingga dapat dilakukan pengendalian dan evaluasi serta analisis sebagai dukungan dalam pengambilan keputusan (Decision Support System (DSS).

The development of SISDA continues to be carried out as a unified information system that accommodates monitoring data on the operation of water resource facilities so that control and evaluation can be carried out as well as analysis as support for decision making (Decision Support System (DSS).



PJT II juga memiliki *Network Operation Center (NOC)* yang merupakan perangkat infrastruktur untuk melakukan kontrol baik pengawasan maupun pengendalian aktivitas jaringan sekaligus memastikan agar jaringan data center SISDA tetap berfungsi baik. Dengan kata lain, NOC ini merupakan ruang kendali DSS.

The development of SISDA continues to be carried out as a unified information system that accommodates monitoring data on the operation of water resource facilities so that control and evaluation can be carried out as well as analysis as support for decision making (Decision Support System (DSS)).



Bertepatan dengan peringatan hari jadi PJT II yang ke 53, pada tanggal 26 Agustus 2020, telah diluncurkan aplikasi SISDA berbasis smartphone. Di tahun 2020 ini dilakukan investasi pemasangan telemetri hidrometri berbasis *Internet of Things (IoT)* melalui pekerjaan *West-East Tarum Canal Water Security System* and *Bekasi Flood Warning System* di 14 lokasi sebagai bagian dari proses digitalisasi dan otomatisasi pengiriman data dari lapangan.

To coincide with the 53rd anniversary of PJT II, on August 26, 2020, the smartphone-based SISDA application was launched. In 2020, an investment in the installation of Internet of Things (IoT) based hydrometric telemetry was made through the work of the West-East Tarum Canal Water Security System and Bekasi Flood Warning System in 14 locations as part of the digitization process and automation of data transmission from the field.

Proses digitalisasi, otomatisasi dan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi ini merupakan bagian dari penerapan *Smart Water Operation Management (SWOM)* yang akan terus dilakukan PJT II secara berkelanjutan.

The process of digitizing, automating and using Information and Communication Technology is part of the implementation of Smart Water Operation Management (SWOM) which will continue to be carried out by PJT II on an ongoing basis.



Hal ini menjadi bukti nyata bahwa PJT II bertransformasi menjadi Badan Usaha yang siap menghadapi era disruptif Revolusi Industri 4.0 serta sejalan pula dengan RPJMN tahun 2020 – 2024 dan Visium Kementerian PUPR 2030 bahwa kegiatan pengelolaan SDA didukung pilar strategis informasi, komunikasi dan teknologi.

This is clear evidence that PJT II is transforming into a Business Entity that is ready to face the disruptive era of the 4.0 Industrial Revolution and is also in line with the 2020-2024 RPJMN and the Vision of the Ministry of PUPR 2030 that water resource management activities are supported by strategic pillars of information, communication and technology.

Pengembangan TI Tahun 2022

Pada tahun 2022, Perum Jasa Tirta II telah melakukan peningkatan sistem teknologi informasi sebagai berikut:

1. Integrasi Infrastruktur Jaringan Luas (*Wide Area Network*) Perum Jasa Tirta II di lingkungan Kantor Pusat dan Kantor-kantor Cabang (Wilayah);
2. Implementasi Perangkat *Video Conference* antara Kantor Pusat dengan kantor-kantor cabang (Wilayah);
3. Implementasi Aplikasi Pendukung Proses Bisnis, antara lain Sistem Informasi Manajemen Risiko, Sistem Informasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, Sistem Informasi Karyawan, dan Sistem Informasi Geografis Aset Perum Jasa Tirta II.

IT Development in 2022

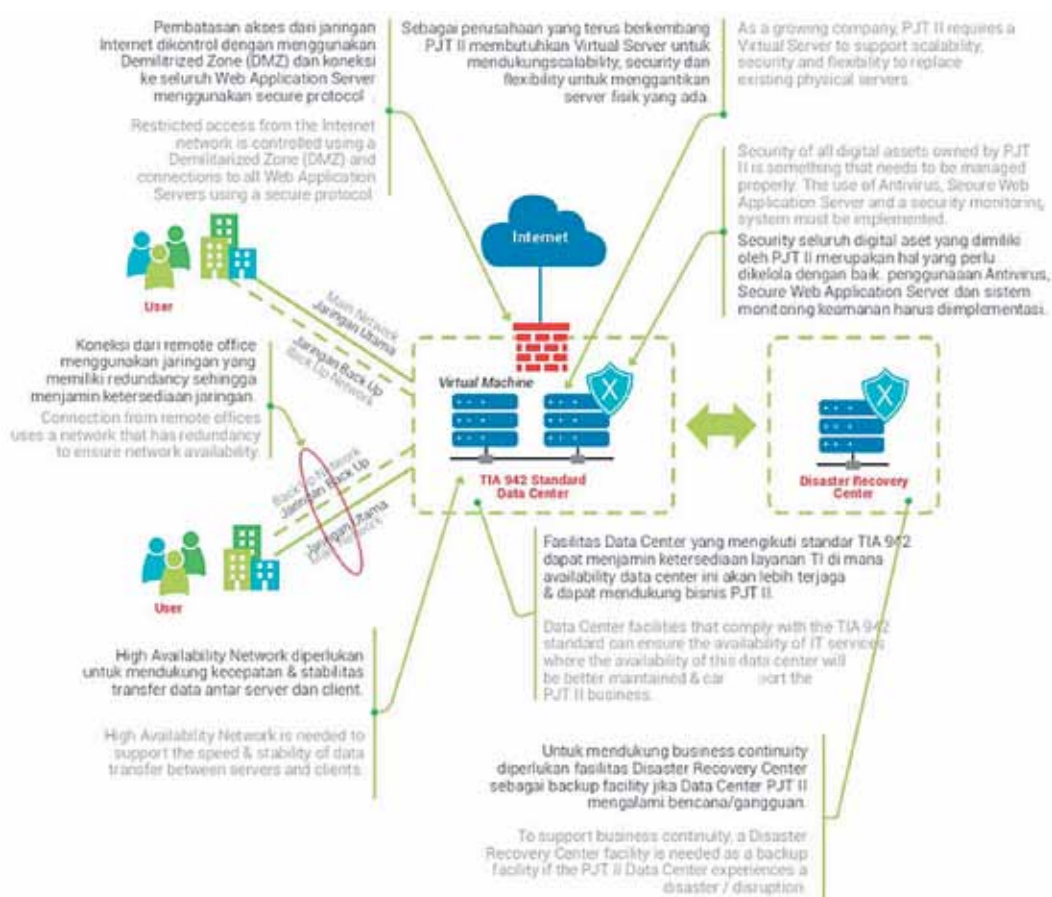
In 2022, Perum Jasa Tirta II has improved the information technology system as follows:

1. *Integration of Wide Area Network Infrastructure of Perum Jasa Tirta II within the Head Office and Branch Offices (Regional);*
2. *Implementation of Video Conference Equipment between Headquarters and branch offices (Regions);*
3. *Implementation of Business Process Supporting Applications, including Risk Management Information System, Partnership and Community Development Program Information System, Employee Information System, and Geographic Information System of Perum Jasa Tirta II.*



Rencana Pengembangan TI Tahun 2022 Berkaca dari peta strategi TI yang telah disusun, pengembangan dan pemanfaatan TI Perusahaan di tahun mendatang diarahkan pada implementasi Sistem Terintegrasi (Enterprise Resource Planning) di lingkungan PJT II, yang meliputi Aplikasi Accounting, Human Resource Management (HRM), Procurement, Maintenance, Project Management, dan aplikasi-aplikasi pendukung proses bisnis utama lainnya.

IT Development Plan for 2022 Reflecting on the IT strategy map that has been prepared, the development and utilization of the Company's IT in the coming year is directed at the implementation of the Integrated System (Enterprise Resource Planning) in the PJT II environment, which includes Accounting Application, Human Resource Management (HRM), Procurement, Maintenance, Project Management, and other key business process supporting applications.



Laporan Teknologi Informasi (TI)

Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang pengelolaan pengelolaan air, PJT II senantiasa melakukan peningkatan terhadap penerapan sistem teknologi informasi pada semua aspek operasional sesuai dengan perkembangan dan standar yang berlaku. Untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan dan perkembangan teknologi informasi, PJT II melakukan langkah-langkah perubahan yang strategis di bidang TI dalam rangka peningkatan pelayanan PJT II.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan diantaranya adalah dengan melakukan peningkatan dan pembenahan infrastruktur Sistem Teknologi Informasi yang menunjang aspek operasional di lingkungan PJT II.

Dalam rangka untuk mencapai sasaran-sasaran bisnis yang telah dicanangkan tersebut, maka PJT II menyusun strategi bisnis yang dapat dijelaskan melalui peta strategi (*strategy map*) berikut ini:

Information Technology (IT) Report

As a company engaged in water management, PJT II continues to improve the application of information technology systems in all operational aspects in accordance with developments and applicable standards. To anticipate the increasing need and development of information technology, PJT II undertakes strategic changes in the IT sector in order to improve PJT II services.

The steps taken include improving and revamping the Information Technology System infrastructure that supports operational aspects within the PJT II environment.

In order to achieve the stated business goals, PJT II has developed a business strategy that can be explained through the following strategy map:



Sumber: RJPP PJT II 2017-2021 versi Akhir Maret 2018 / *Source: RJPP PJT II 2017-2021 version End of March 2018*

Sumber: RJPP PJT2, Kuesioner, Analisa tim PGNCom menggunakan framework Balanced Scorecard / *Source: RJPP PJT2, Questionnaire, Analysis of the PGNCom team using the Balanced Scorecard framework*



Perkembangan teknologi terutama teknologi informasi yang semakin berkembang pesat dan persaingan antar perusahaan yang semakin kompetitif mengharuskan PJT II untuk menata dan membenahi kualitas layanan yang berbasis teknologi informasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan dan masyarakat. Karena teknologi merupakan kunci utama yang memungkinkan kami menyediakan produk dan jasa kepada pelanggan, mengukur dan menelusuri kinerja bisnis, serta mengambil keputusan-keputusan manajemen yang tepat untuk kelangsungan usahanya. Guna menjaga efektivitas dan efisiensi serta relevansi pemanfaatan TI, Perusahaan berupaya menciptakan inovasi berkelanjutan dengan memperhatikan kebutuhan bisnis, baik pada kebijakan, proses, hingga infrastruktur yang dimiliki. Didukung oleh mekanisme evaluasi secara berkala, kehadiran SDM di bidang TI yang kompeten, serta perencanaan yang matang, Perusahaan optimis dapat bergerak progresif menuju pencapaian visi misi serta tujuan bisnis yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2022, PJT II melaksanakan layanan pembuatan aplikasi pendukung proses bisnis sesuai *IT Master Plan* dan kebutuhan unit kerja serta memberikan layanan dukungan infrastruktur dilingkungan perusahaan.

Layanan pembuatan aplikasi pendukung proses bisnis sesuai *IT Master Plan* dan kebutuhan Unit Kerja serta memberikan layanan dukungan infrastruktur dilingkungan perusahaan, diantaranya:

1. *Monitoring dan Evaluasi Kinerja Infrastruktur IT*
2. *Pemeliharaan Sistem Informasi Akuntansi*
3. *Pemeliharaan Data Center*
4. *Pemeliharaan Jaringan LAN dan WAN*
5. *Pemeliharaan Webmail Server PJT II*

In order to provide the best service to clients and the general public, PJT II must organize and enhance the quality of information technology-based services. This is due to the development of technology, particularly information technology, which is expanding quickly and becoming more competitive between companies. Because technology is the primary tool that enables us to deliver goods and services to customers, monitor and assess business performance, and make the best management choices for the long-term success of their enterprise. The Company works to develop sustainable innovations by taking into account business demands in policies, processes, and infrastructure in order to preserve the effectiveness, efficiency, and relevance of IT utilization. The Company is confident that, with the help of a regular review process, the availability of skilled IT human resources, and careful planning, it can take steps forward towards attaining the vision, mission, and business goals that have been established.

According to the IT Master Plan and the requirements of the work units, PJT II will carry out business process support application development services in 2022 and offer infrastructure support services inside the business.

Offering infrastructure support services within the organization as well as services for creating business process support applications in accordance with the IT Master Plan and the demands of the Work Unit, including:

1. *Performance evaluation of the IT infrastructure*
2. *Upkeep of Accounting Information Systems*
3. *Upkeep of Data Centers*
4. *Network maintenance for LAN and WAN*
5. *Upkeep of the PJT II Webmail Server*

A hand holding a small amount of dark soil is visible in the bottom right corner. A large, dynamic splash of water arcs across the upper half of the frame. The background is a clear blue sky with a few wispy white clouds. The text is positioned in the upper left area.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

*Social and Environmental
Responsibility*





Pengelolaan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Laporan keuangan dan pelaksanaan Program TJSL BUMN menjadi satu kesatuan dengan laporan berkala dan laporan tahunan kinerja BUMN yang dituangkan dalam bab tersendiri.

Pengertian Program TJSL adalah kegiatan yang merupakan komitmen Perusahaan terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan serta hukum dan tata kelola dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis perusahaan.

Pelaksanaan Program TJSL BUMN dapat dilakukan dalam bentuk:

- Pembiayaan dan pembinaan usaha mikro dan usaha kecil; dan/atau
- Bantuan dan/atau kegiatan lainnya.

The management of Social and Environmental Responsibility (TJSL) funds is carried out based on the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-05/MBU/04/2021 concerning the Social and Environmental Responsibility Program of State-Owned Enterprises. The financial reports and the implementation of the SOE TJSL Program are integrated with the periodic reports and annual reports on the performance of SOEs which are set out in separate chapters.

The definition of the CSR program is an activity that is the Company's commitment to sustainable development by providing economic, social, environmental and legal benefits and governance with more integrated, targeted, measurable and accountable principles and is part of the company's business approach.

The implementation of the SOE CSR Program can be carried out in the form of:

- Financing and fostering micro and small businesses; and/or*
- Assistance and/or other activities.*



Dalam rangka pelaksanaan Program TJSL BUMN untuk pembiayaan dan pembinaan usaha mikro dan usaha kecil, BUMN dapat secara khusus membentuk Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil. Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang sebelumnya bernama Program Kemitraan diharapkan dapat memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat sekitar wilayah kerja Perusahaan Umum Jasa Tirta II (PJT II). Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil di Perusahaan Umum Jasa Tirta II dikelola oleh Divisi Umum dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ("TJSL") yang bertanggung jawab kepada Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko.

PJT II selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diwajibkan melakukan pembinaan terhadap usaha mikro dan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri.

Komitmen Pada Tanggung Jawab Sosial

Perum Jasa Tirta II menyadari bahwa kinerja positif Perusahaan tidak hanya diukur dari pertumbuhan dan kinerja bisnis semata. Kontribusi dalam pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan karyawan, dan kepuasan pelanggan merupakan bagian dari kinerja positif dan kunci keberhasilan Perusahaan secara berkelanjutan. Hal tersebutlah yang melatarbelakangi pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perusahaan (TJSL) yang secara konsisten dilakukan oleh Perusahaan.

In the context of implementing the SOE TJSL Program for financing and fostering micro and small businesses, SOEs may specifically establish a Micro and Small Business Funding Program. The Micro and Small Business Funding Program, previously known as the Partnership Program, is expected to expand employment and business opportunities for the community around the working area of the Jasa Tirta II Public Company (PJT II). The Micro and Small Business Funding Program at Jasa Tirta II Public Company is managed by the General Division and Social and Environmental Responsibility ("TJSL") which is responsible to the Director of Finance, Human Resources and Risk Management.

PJT II as a State-Owned Enterprise (BUMN) is required to provide guidance to micro and small businesses to become strong and independent.

Commitment To Social Responsibility

Perum Jasa Tirta II realizes that the Company's positive performance is not only measured by business growth and performance. Contributions to environmental preservation, community empowerment, employee welfare, and customer satisfaction are part of the positive performance and the key to the Company's sustainable success. This is the background for the implementation of Corporate Social and Environmental Responsibility (TJSL) which is consistently carried out by the Company.



Program TJSL Perusahaan dilakukan melalui berbagai inisiatif dengan mengadopsi pendekatan ISO 26000 Social responsibility yang secara holistik dan komprehensif mengatur 7 (tujuh) aspek utama dalam tanggung jawab sosial. Pendekatan tersebut menjadi pendekatan ideal yang digunakan organisasi dan perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial yang berprinsip pada tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals)

The Company's CSR program is carried out through various initiatives by adopting the ISO 26000 Social responsibility approach which holistically and comprehensively regulates 7 (seven) main aspects of social responsibility. This approach is the ideal approach used by organizations and companies in carrying out social responsibility based on the principles of sustainable development goals (Sustainable Development Goals).

7 Prinsip Utama CSR Berdasarkan ISO 26000 / 7 Main Principles Of CSR Based On ISO 26000



ISO 26000 Social Responsibility mengatur mengenai tujuh fokus tanggung jawab sosial dengan uraian sebagai berikut / ISO 26000 Social Responsibility regulates the seven focuses of social responsibility with the following descriptions:

FOKUS TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN / Corporate Responsibility Focus	URAIAN / Description
Tata Kelola Organisasi / Organizational Governance	Penetapan, pengambilan, dan penerapan keputusan strategis sehingga prinsip tanggung jawab sosial dapat diterapkan. / Determination, the making, and application of strategic decisions so that the principles of social responsibility can be applied.
Hak Asasi Manusia / Human Rights	Hak dasar yang dimiliki semua orang sebagai manusia, antara lain mencakup hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. / Basic rights that all people have as humans, including civil, Political, economic, social and cultural rights.
Praktik Ketenagakerjaan / Labour Practices	Kebijakan dan praktik terkait pekerjaan dan ketenagakerjaan. / Policies and practices related to job and labour.
Lingkungan / Environment	Tanggung jawab atas dampak lingkungan kepada masyarakat dari kegiatan bisnis yang dilakukan. / Responsibility on environmental impact on the community from business activities carried out.
Operasi yang Adil / Fair Operating Practices	Penerapan perilaku etis dan adil saat berinteraksi dengan pemangku kepentingan. / Implementation of ethical and fair behaviour when interacting with stakeholders.
Isu Pelanggan / Consumer Issues	Pemenuhan hak-hak pelanggan terkait produk dan layanan yang diberikan, kejelasan informasi, dan perlakuan yang adil. / Fulfillment of consumer rights related to product and services given, information clarity, and fair treatment.
Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat / Community Involvement and Development	Hubungan dan interaksi perusahaan dengan masyarakat di lingkungan operasinya. / Relationship and interaction of the company with community around its operational area.



Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Program Pendanaan UMK bagi Perum Jasa Tirta II adalah menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil menjadi usaha yang Tangguh dan mandiri agar dapat berkembang menjadi usaha menengah serta meningkatkan peranan usaha kecil dalam pembentukan produk nasional, perluasan lapangan kerja dan berusaha meningkatkan ekspor, peningkatan dan pemerataan pendapatan serta memperkuat struktur perekonomian nasional.

Tujuan Program TJSL adalah menciptakan keseimbangan sosial dan menggalang kebersamaan dengan masyarakat di sekitar lingkungan terdekat sehingga tercipta iklim yang kondusif bagi pelaksanaan operasi dan pengembangan perusahaan.

Dasar Kebijakan Pelaksanaan CSR

Pelaksanaan program CSR PJT II mengacu pada peraturan perundang-undangan di Indonesia baik yang mengatur secara umum maupun khusus mengenai CSR antara lain:

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM).
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas (UU PT).
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
- Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum tanggungjawab dunia usaha dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut, Perusahaan menyusun kebijakan dan program TJSL baik secara konsep maupun sasaran implementasi secara tertulis. Perusahaan telah memiliki kebijakan tertulis dari pimpinan Perusahaan terkait program TJSL. Di samping itu, Perum Jasa Tirta II telah memiliki *Standard Operating Procedure (SOP)* TJSL yang mengatur segala macam panduan kebijakan dalam melaksanakan program- program TJSL agar bisa berjalan efektif dan memberi dampak optimal

Objective

The objectives to be achieved in the implementation of the UMK Funding Program for Perum Jasa Tirta II are to grow and improve the ability of small businesses to become resilient and independent businesses so that they can develop into medium-sized businesses and increase the role of small businesses in the formation of national products, expanding employment opportunities and trying to increase exports. , increasing and equitable distribution of income as well as strengthening the structure of the national economy.

The objective of the CSR Program is to create a social balance and to build togetherness with the local community in the immediate vicinity so as to create a conducive climate for the implementation of the company's operations and development.

Policy Basic Implementation of CSR

The implementation of the PJT II CSR program refers to the laws and regulations in Indonesia, both those that regulate in general and specifically regarding CSR, including:

- *Law Number 25 of 2007 concerning Investment (UU PM).*
- *Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UU PT).*
- *Government Regulation Number 32 of 1998 concerning Small Business Guidance and Development.*
- *Law Number 20 of 2008 concerning Micro, Small and Medium Enterprises.*
- *Law Number 13 of 2011 concerning Handling the Poor.*
- *Regulation of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia Number 13 of 2012 concerning the Forum for the Responsibility of the Business World in the Implementation of Social Welfare.*
- *Government Regulation No. 47 of 2012 concerning Social and Environmental Responsibility.*
- *Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 59 of 2017 concerning Implementation of the Achievement of Sustainable Development Goals.*

Referring to a number of these policies, the Company formulates CSR policies and programs both conceptually and in written implementation targets. The company already has a written policy from the company leadership regarding the CSR program. In addition, Perum Jasa Tirta II has a TJSL Standard Operating Procedure (SOP) which regulates all kinds of policy guidelines in implementing CSR programs so that they can run effectively and have an optimal impact on stakeholders. The SOP is also intended to enforce



kepada para pemangku kepentingan. SOP juga dimaksudkan untuk menegakkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dalam pelaksanaan program TJSL.

Kegiatan Utama:

- 1) Memberikan Pembinaan
Pembinaan yang diberikan oleh Unit TJSL BUMN kepada para UMK Binaan adalah Bantuan pendidikan, pelatihan, pemasaran, promosi dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan produktivitas UMK Binaan, serta untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan Program Pendanaan UMK.
- 2) Memberikan Pendanaan UMK Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/04/2021 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, jumlah pinjaman untuk setiap UMK binaan dari Program Pendanaan UMK maksimum sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), kecuali pinjaman tambahan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan UMK binaan yang jumlahnya paling banyak sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

Metode Program TJSL

Kebijakan TJSL Perum Jasa Tirta II mengacu kepada konsep *triple bottom line* yaitu profit, people, dan planet. Dalam konsep ini, Perusahaan tidak hanya bertujuan untuk mengejar keuntungan (*profit*) semata, namun berkontribusi memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat, karyawan, dan pemangku kepentingan lain (*people*) serta turut aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*). Guna mengimplementasikan prinsip tersebut, Perusahaan menerapkan tanggung jawab sosial dimulai dari aspek yang terkecil, sebagai contoh dengan memiliki kebijakan dan menjalankan program kerja yang tidak mengeksploitasi alam.

Perusahaan merancang dan melaksanakan program TJSL secara sistematis dan terpadu. Pelaksanaan TJSL dilakukan dengan metode partisipatif, yaitu dengan memberdayakan potensi daerah yang ada agar dapat meningkatkan kemampuan, penghasilan, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

the principles of Good Corporate Governance in the implementation of the CSR program.

Main Activities:

- 1) *Providing Coaching*
The guidance provided by the SOE TJSL Unit to the fostered MSEs is assistance in education, training, marketing, promotion and other forms of assistance related to efforts to increase the productivity of the fostered MSEs, as well as for studies/research related to the MSE Funding Program.
- 2) *Providing MSE Funding Based on the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-05/MBU/04/2021 concerning Social and Environmental Responsibility of State-Owned Enterprises, the loan amount for each UMK fostered from the UMK Funding Program is a maximum of Rp. 250,000,000 (two hundred and fifty million rupiah), except for additional loans to finance needs, short-term in nature in order to fulfill orders from partners of UMK fostered in the maximum amount of Rp. 100,000,000 (one hundred million rupiah).*

TJSL Program Method

The TJSL policy of Perum Jasa Tirta II refers to the triple bottom line concept, namely profit, people, and planet. In this concept, the Company does not only aim to pursue profit (profit), but also contributes to paying attention to and being involved in fulfilling the welfare of the community, employees, and other stakeholders (people) as well as actively participating in preserving the environment (planet). In order to implement these principles, the Company implements social responsibility starting from the smallest aspects, for example by having policies and implementing work programs that do not exploit nature.

The company designs and implements the CSR program in a systematic and integrated manner. The implementation of CSR is carried out using a participatory method, namely by empowering the existing regional potential in order to increase the ability, income, and welfare of the community in a sustainable manner.



Struktur Organisasi

Keputusan Direksi Perum Jasa Tirta II No. PRD-16/DIR/12/2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II, bahwa Bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) berada dua tingkat di bawah Direksi yaitu Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Manajemen Risiko (Direktur KSMR) dan Kepala Divisi Umum dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Pengelolaan Unit TJSL di bawah Divisi Umum dan TJSL Perusahaan melalui Bidang TJSL bertanggung jawab kepada Direktur KSMR. Pejabat Unit TJSL Perum Jasa Tirta II adalah sebagai berikut:

Organizational Structure

Decision of the Board of Directors of Perum Jasa Tirta II No. PRD-16/DIR/12/2021 concerning the Organizational Structure and Work Procedure of Jasa Tirta II Public Company, that the Social and Environmental Responsibility (TJSL) is two levels below the Board of Directors, namely the Director of Finance, Human Resources and Risk Management (Director of KSMR) and Head of General Division and Social and Environmental Responsibility. The management of the TJSL Unit under the General Division and the Company's TJSL through the TJSL Division is responsible to the Director of KSMR. The officials of the TJSL Unit of Perum Jasa Tirta II are as follows:





Metode Due Diligence Terhadap Dampak Sosial, Ekonomi Dan Lingkungan Dari Aktivitas Perusahaan

Dalam memetakan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dihasilkan dari kegiatan usaha, Perusahaan melakukan identifikasi dan pengukuran tingkat urgensi dampak keberlanjutan yang dihasilkan setiap aktivitas usahanya. Pelaksanaan metode *due diligence* dilakukan dengan melibatkan unit kerja dan pemangku kepentingan lainnya guna memetakan skala prioritas atas isu-isu keberlanjutan yang diangkat. Hasil metode *due diligence* selanjutnya menjadi acuan bagi Perusahaan untuk menyusun kegiatan dan program yang dikhususkan untuk membidik isu-isu keberlanjutan tersebut.

Dalam menetapkan isu-isu keberlanjutan, Perusahaan melakukan identifikasi dengan berlandaskan pada 4 (empat) langkah yang disyaratkan sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi aspek-aspek yang material dan *boundary* (langkah identifikasi);
2. Membuat prioritas atas aspek-aspek pada langkah sebelumnya (langkah Prioritas);
3. Melakukan validasi atas aspek-aspek material tersebut (langkah Validasi);
4. Melakukan review atas laporan setelah diterbitkan guna meningkatkan kualitas laporan tahun berikutnya (langkah Review).

Tugas Dan Tanggung Jawab

Bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

- 1) Bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) melaksanakan tugas pokok dalam kegiatan menyiapkan, mengarahkan dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan yang berlaku di bidang TJSL sesuai dengan aturan yang berlaku di Perusahaan
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Bidang TJSL mempunyai fungsi:
 - a. Menyiapkan, mengarahkan dan mengevaluasi pengelolaan risiko, program kerja dan KPI Bidang TJSL.
 - b. Menyiapkan, mengarahkan dan mengevaluasi penyusunan, review, dan melaksanakan sosialisasi aturan/ pedoman/ prosedur pengelolaan TJSL

Social, Economic, And Environmental Impacts Of Company Activities: Due Diligence Method

The company determines and assesses the level of urgency of the sustainability impacts produced by each of its business activities while mapping the social, economic, and environmental effects coming from business activities. Work units and other stakeholders are included in the implementation of the due diligence technique in order to map out the priority scale for the sustainability issues raised. The company will use the findings of the due diligence approach as a guide for creating activities and programs that are expressly designed to address these sustainability challenges.

The following are the four (four) steps the company uses to identify sustainability issues:

1. *Identify the boundaries and material components (the identification process);*
2. *Give the elements from the prior step (Priority step) a higher priority;*
3. *Verify the tangible elements (validation stage);*
4. *Reviewing reports after they are published to raise the caliber of the report for the following year (Review step)*

The Duty And The Responsibility

Social and Environmental Responsibility Bidang

- 1) *The Division of Social and Environmental Responsibility (TJSL) carries out the main tasks of preparing, directing and evaluating and reporting activities that apply in the field of CSR in accordance with the rules that apply in the Company*
- (2) *In carrying out the tasks as referred to in paragraph (1). The TJSL field has the following functions:*
 - a. *Preparing, directing and evaluating risk management, work programs and KPIs for the TJSL Sector.*
 - b. *Prepare, direct and evaluate the preparation, review, and socialization of TJSL management rules/guidelines/procedures*



- c. Menyiapkan, mengarahkan dan mengevaluasi kelengkapan dokumen usulan RKAP termasuk namun tidak terbatas pada Kerangka Acuan Kerja (KAK), *Project Digest*, dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) untuk pekerjaan jasa konsultansi sesuai dengan ketentuan penyusunan RKAP yang berlaku d. menyiapkan, mengarahkan dan mengevaluasi rencana paket pengadaan barang/jasa sesuai dengan batas kewenangan Divisi Umum dan TJSL
- e. Menyiapkan, mengarahkan dan mengevaluasi kelengkapan dokumen rencana pengadaan termasuk namun tidak terbatas pada Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendiri HPS (*Owner Estimate*) dan Rancangan Kontrak untuk pekerjaan jasa konsultansi sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku 1 menyiapkan, mengarahkan dan mengevaluasi naskah *Memorandum Of Understanding (MoU)* dan/atau Perjanjian Kerja Sama (PKS) sesuai dengan tugas dan fungsi g merencanakan, mengelola dan mengevaluasi kinerja TJSL
- h. Menyiapkan, mengarahkan dan mengevaluasi laporan keuangan TJSL,
- i. Berkoordinasi dengan Komite Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam rangka merumuskan tujuan dan petunjuk pelaksanaan Program TJSL, pemetaan dan penyusunan Program TJSL
- j. Mengendalikan bukti kerja pelaksanaan tugas dan fungsi, dan k menyiapkan, mengarahkan dan mengevaluasi penyusunan laporan sesuai dengan tugas dan fungsi.

(3) Bidang TJSL terdiri dari

- a. Sub Bidang TJSL Pendanaan UMK dan Bantuan,
- b. Sub Bidang Administrasi dan Keuangan.

Metoda Dan Lingkup *Due Diligent* Terhadap Dampak Sosial, Ekonomidan Lingkungan Dari Aktivitas Perusahaan

Dalam rangka mencegah terjadinya dampak negatif dari keputusan dan kegiatan Perusahaan, maka PJT II telah memiliki berbagai kebijakan, mekanisme pemantauan dan mekanisme penanganan keluhan. Metode dan lingkup *due diligent* disajikan sebagai berikut:

- c. *Prepare, direct and evaluate the completeness of the proposed RKAP document including but not limited to the Terms of Reference (KAK), Project Digest, and Budget Details (RAB) for consulting services work in accordance with the provisions of the applicable RKAP preparation d. prepare, direct and evaluate the package plan for the procurement of goods/services in accordance with the limits of authority of the General Division and TJSL*
- e. *Prepare, direct and evaluate the completeness of the procurement plan document including but not limited to the Terms of Reference (TOR), the HPS Self Estimate (Owner Estimate) and the Draft Contract for consulting services work in accordance with the provisions of the applicable procurement of goods and services 1 prepare, direct and evaluate the text of the Memorandum of Understanding (MoU) and/or Cooperation Agreement (PKS) in accordance with the duties and functions of planning, managing and evaluating the performance of TJSL*
- h. *Prepare, direct and evaluate TJSL financial statements,*
- i. *Coordinate with the Social and Environmental Responsibility Committee in order to formulate objectives and guidelines for the implementation of the CSR program, mapping and preparing the CSR program*
- j. *Control the evidence of work implementation of duties and functions, and k prepare, direct and evaluate the preparation of reports in accordance with the duties and functions.*

(3) The CSR field consists of

- a. *TJSL Sub-Sector UMK Funding and Assistance,*
- b. *Sub Division of Administration and Finance.*

Due Diligent Methods And Scope On Social, Economic And Environmental Impacts Of Company Activities

In order to prevent negative impacts from the Company's decisions and activities, PJT II already has various policies, monitoring mechanisms and complaints handling mechanisms. The methods and scope of due diligence are presented as follows:



SUBJEK INTI / Core Subject	LINGKUP / Scope	KEBIJAKAN / Policy	MEKANISME PEMANTAUAN / Monitoring Mechanism	MEKANISME PENANGGAPAN KELUHAN / Complaints Handling Mechanism
Hak Azasi Manusia / Human Rights	Penerapan prinsip-prinsip HAM kepada seluruh Pekerja / Application of human rights principles to all workers	- Perjanjian Kerja / Employment Agreement - Bersama Code of Conduct/CoC / Together with the Code of Conduct	Survei kepuasan karyawan / Employee Satisfaction Survey	Pengaduan dapat disampaikan melalui pimpinan secara langsung. / Complaints can be submitted directly through the leadership.
Operasi Yang Adil / Fair Operation	Pencegahan benturan kepentingan, implementasi Whistleblowing System dan Code of Conduct, larangan perilaku insiders serta hubungan dengan organisasi lain. / Prevention of conflicts of interest, implementation of the Whistleblowing System and Code of Conduct, prohibition of insiders behavior and relationships with other organizations.	- Kebijakan pengendalian internal / Internal control policy - Whistleblowing System (WBS) / Whistleblowing System (WBS) - Kode Etik / Code of Conduct - Kebijakan Gratifikasi / Gratuity Policy	Assessment GCG sebagai penilaian dalam pelaksanaan operasi yang adil. / GCG assessment as an assessment in the implementation of fair operations.	Pengaduan dilaporkan kepada Tim Pengelola Laporan Pelanggaran melalui Whistle Blowing System. / Complaints are reported to the Violation Report Management Team through the Whistle Blowing System.
Lingkungan Hidup / Environment	Efisiensi di lingkungan internal Perusahaan, pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup serta penerapan keuangan berkelanjutan. / Efficiency in the Company's internal environment, environmental preservation and implementation of sustainable finance.	Kebijakan terkait dengan aspek lingkungan hidup, baik di internal maupun eksternal. / Policies related to environmental aspects, both internally and externally.	Evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) / Evaluation of the implementation of the Sustainable Finance Action Plan (RAKB)	Pengaduan dapat disampaikan langsung ke Kantor Pusat atau Kantor Cabang terdekat PJT II. / Complaints can be submitted directly to the Head Office or the nearest PJT II Branch Office.
Ketenagakerjaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja / Occupational Health and Safety	Berbagai program ketenagakerjaan seperti kesetaraan gender dalam kesempatan bekerja, kesetaraan dalam program pendidikan dan pelatihan kebebasan berserikat dan lainnya. Selain itu, dalam lingkup kegiatan kesehatan dan keselamatan kerja, Perusahaan memiliki program untuk memberikan fasilitas kesehatan serta memberikan jaminan keselamatan kerja kepada seluruh karyawan. / Various employment programs such as gender equality in employment opportunities, equality in education and training programs on freedom of association and others. In addition, within the scope of occupational health and safety activities, the Company have a program to provide health facilities and provide work safety guarantees to all employees.	Peraturan Standar K3 PJT II / PJT II K3 Standard Regulations	Survei Kepuasan Karyawan / Employee Satisfaction Survey	Pengaduan dapat disampaikan melalui pimpinan secara langsung. / Complaints can be submitted directly through the leadership.
Tanggung Jawab Pelanggan / Customer Responsibilities	- Kemudahan akses informasi dan jaringan layanan Perusahaan. / Ease of access to information and the Company's service network. - Peningkatan kualitas layanan. / Improved service quality. - Program literasi Perusahaan. / Company literacy program.	- SK Direksi tentang Kebijakan Penyelesaian Pengaduan Pelanggan Perusahaan / Decree of the Board of Directors regarding the Company's Customer Complaint Resolution Policy. - SK Direksi / Director's Decree	Laporan pelaksanaan CSR / CSR implementation report	Pengaduan dapat disampaikan langsung ke Kantor Pusat atau Kantor Cabang terdekat PJT II. / Complaints can be submitted directly to the Head Office or the nearest PJT II Branch Office.
Pengembangan Sosial Kemasyarakatan / Community Social Development	Kontribusi kepada masyarakat / Contribution to society	Kebijakan internal terkait pelaksanaan kegiatan CSR PJT II / Internal policies related to the implementation of PJT II CSR activities		Pengaduan dapat disampaikan langsung ke Kantor Pusat atau Kantor Cabang terdekat PJT II. / Complaints can be submitted directly to the Head Office or the nearest PJT II Branch Office.



Stakeholder Penting Yang Terdampak Atau Berpengaruh Pada Dampak Dari Kegiatan Perusahaan PJT II

Mengidentifikasi pemangku kepentingannya berdasarkan kepentingan dan hubungannya dengan Perusahaan. Berdasarkan hasil identifikasi, keterlibatan Pemangku Kepentingan PJT II dapat dilihat pada tabel berikut:

PEMANGKU KEPENTINGAN Stakeholders	TOPIK UTAMA YANG DIAJUKAN Main Subjects
Topik Utama yang Diajukan / Main Topic Proposed	Kinerja keuangan/kinerja non finansial Perusahaan/informasi terkini tentang aksi dan arahan strategis Perusahaan. / Financial performance/non-financial performance of the Company/updated information on the Company's strategic actions and directions.
Karyawan / Employee	Kinerja keuangan/kinerja non finansial Perusahaan/informasi terkini tentang aksi dan arahan strategis Perusahaan. / Financial performance/non-financial performance of the Company/updated information on the Company's strategic actions and directions.
Pelanggan / Customer	Pelayanan Pelanggan/kerahasiaan data Pelanggan. / Customer service/customer data confidentiality.
Pemerintah / Government	Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. / Compliance with applicable laws and regulations.
Masyarakat / Public	Kontribusi kepada masyarakat. / Contribution to society.

Important Stakeholders That Impact Or Influence On The Impact Of PJT II Company Activities

Identify its stakeholders based on their interests and relationship with the Company. Based on the identification results, the involvement of PJT II Stakeholders can be seen in the following table:

Isu Sosial, Ekonomi Dan Lingkungan Penting Terkait Dampak Kegiatan Perusahaan

Dalam memaparkan isu-isu, data dan informasi terkini yang relevan dengan hak para Pemangku Kepentingan, PJT II melakukan *Focus Group Discussion* kepada para pemangku kepentingan. Adapun isu-isu penting pendidikan, sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan adalah sebagai berikut:

- Ekonomi
- Kepatuhan Lingkungan
- Keselamatan, Keamanan dan Kesehatan Kerja
- Pendidikan dan Pelatihan
- Kepuasan Karyawan
- Kesejahteraan Masyarakat

Important Social, Economic And Environmental Issues Related To The Impact Of Company Activities

In presenting the latest issues, data and information relevant to the rights of the Stakeholders, PJT II conducts *Focus Group Discussions* with stakeholders. The important educational, social, cultural, economic and environmental issues are as follows:

- Economy
- Environmental Compliance
- Occupational Safety, Security and Health
- Education and training
- Employee Satisfaction
- Public welfare

Lingkup Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Baik Yang Merupakan Kewajiban Maupun Yang Melebihi Kewajiban

Lingkup tanggung jawab sosial PJT II adalah sebagai berikut:

- Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial
- Hak Azasi Manusia
- Operasi Yang Adil
- Lingkungan Hidup
- Ketenagakerjaan
- Pemenuhan Kepentingan Pelanggan
- Kemasyarakatan

Perusahaan telah melaksanakan berbagai program CSR, baik yang merupakan kewajiban (*mandatory*) maupun melebihi kewajiban (*voluntary*). Rincian kegiatankegiatan tersebut diungkapkan sebagai berikut:

Scope Of Corporate Social Responsibility Whether That Is A Liability Or Exceeds An Obligation

PJT II's scope of social responsibility is as follows:

- Social Responsibility Governance
- Human rights
- Fair Operation
- Environment
- Employment
- Fulfillment of Customer Interests
- Society

The company has implemented various CSR programs, both mandatory and voluntary. The details of these activities are disclosed as follows:

SUBJEK INTI / Core Subject	PERATURAN TERKAIT / Related Rules
Hak Asasi Manusia / Human Rights	• Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Pelanggan Sektor Jasa Keuangan. / <i>Financial Services Authority Regulation No. 1/ POJK.07/2013 concerning Protection of Customers in the Financial Services Sector.</i> • Peraturan Perusahaan Indonesia No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Pelanggan. / <i>Indonesian Company Regulation No. 7/7/PBI/2005 concerning Settlement of Customer Complaints.</i>
Operasi Yang Adil / Fair Operation	Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. / <i>Law of the Republic of Indonesia No. 20 of 2001 concerning Amendments to Law no. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes.</i>
Lingkungan Hidup / Environment	• Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas / <i>Law of the Republic of Indonesia No. 20 of 2001 About Changes to</i> • Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi / <i>Law no. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes</i>
Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja / Employment, Health and Safety	UU Ketenagakerjaan Republik Indonesia No 13 tahun 2013 / <i>The Manpower Law of the Republic of Indonesia No. 13 of 2013</i>
Pelanggan / Customers	• Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Pelanggan Sektor Jasa Keuangan. / <i>Financial Services Authority Regulation No. 1/ POJK.07/2013 concerning Protection of Customers in the Financial Services Sector.</i> • Peraturan Perusahaan Indonesia No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Pelanggan, dimana telah diubah dengan PBI No. 10/10/PBI/2008 Tentang perlindungan Pelanggan. / <i>Indonesian Company Regulation No. 7/7/PBI/2005 concerning the Resolution of Customer Complaints, which has been amended by PBI No. 10/10/PBI/2008 About Customer protection.</i>
Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan / Social and Community Development	Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: PER- 02/ MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. / <i>Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number: PER-02/MBU/7/2017 concerning the Second Amendment to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-09/MBU/07/2015 concerning the Partnership Program and Community Development Program of State-Owned Enterprises.</i>



Sedangkan lingkup tanggung jawab sosial yang melebihi kewajiban yaitu Perusahaan turut mendukung dan berpartisipasi dalam mencapai Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) melalui pelaksanaan aktivitas dan program-program tanggung jawab sosial perusahaan.

Strategi Dan Program Kerja Dalam Upaya Stakeholders Engagement Dan Meningkatkan Nilai Stakeholders

PJT II telah mengidentifikasi pemangku kepentingannya dalam menangani isu-isu sosial, ekonomi dalam upaya *stakeholders engagement* dan meningkatkan *value* untuk *stakeholder* dan *shareholder*. Keterlibatan Pemangku Kepentingan PJT II dapat dilihat pada tabel berikut:

PEMANGKU KEPENTINGAN / Stakeholders	METODE PELIBATAN / Engagement Methods	FREKUENSI / Frequency
Pemilik Modal / Capital owners	Rapat Umum Pemilik Modal / General Meeting of Capital Owners	Minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. / Minimum 1 (one) time in 1 (one) year.
Pelanggan / Customer	Pertemuan langsung dengan Pelanggan / Face-to-face meeting with customers	Sesuai dengan kebutuhan / As needed
Karyawan / Employee	Berkumpul / Gathering	Minimal 1 (satu) tahun sekali / Minimum 1 (one) year
Mitra Kerja / Work partners	Proses Operasional / Operational Process	Sesuai dengan kebutuhan / As needed
Masyarakat / Public	Penerapan CSR / CSR Implementation	Penerapan CSR / CSR Implementation

Di samping itu, strategi dan program kerja tanggung jawab sosial untuk tiap-tiap *core subject* tanggung jawab sosial disampaikan sebagai berikut:

- **Hak Asasi Manusia** Strategi dalam tanggung jawab sosial terkait hak asasi manusia yaitu menekankan pada pemenuhan prinsip hak asasi manusia terhadap Pekerja. Program kerja dalam tanggung jawab sosial terkait hak asasi manusia antara lain, pemenuhan hak pekerja dan program-program relevan lainnya.
- **Operasi Yang Adil** Strategi dalam tanggung jawab sosial terkait operasi yang adil yaitu menekankan pada kegiatan operasional yang sesuai dengan etika bisnis dan etika usaha yang berlaku. Program kerja dalam tanggung jawab sosial terkait operasi yang adil antara lain, pengadaan barang dan jasa serta program-program relevan lainnya.
- **Lingkungan Hidup** Strategi dalam tanggung jawab sosial terkait lingkungan hidup menekankan pada pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup serta penghematan energi listrik dan pengurangan emisi. Program kerja dalam tanggung jawab sosial

Meanwhile, the scope of social responsibility that exceeds obligations is that the Company supports and participates in achieving the Sustainable Finance Action Plan (RAKB) through the implementation of corporate social responsibility activities and programs.

Strategies And Work Programs In The Effort Of Stakeholders Engagement And Increasing Stakeholders Value

PJT II has identified its stakeholders in dealing with social, economic issues in an effort to engage stakeholders and increase value for stakeholders and shareholders. The involvement of PJT II Stakeholders can be seen in the following table:

In addition, strategies and work programs for social responsibility for each core subject of social responsibility are presented as follows:

- **Human Rights** The strategy in social responsibility related to human rights is to emphasize the fulfillment of human rights principles for workers. Work programs in social responsibility related to human rights include the fulfillment of workers' rights and other relevant programs.
- **Fair Operations** The strategy in social responsibility related to fair operations is to emphasize operational activities that are in accordance with applicable business ethics and business ethics. Work programs in social responsibility related to fair operations, among others, procurement of goods and services as well as other relevant programs.
- **Environment** The strategy in social responsibility related to the environment emphasizes the management and protection of the environment as well as saving electrical energy and reducing emissions. Work programs in social responsibility



terkait lingkungan hidup antara lain, Penghematan energi listrik dan pengurangan emisi, penghematan penggunaan air, pengelolaan limbah, dan program-program relevan lainnya.

- Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja Strategi dalam tanggung jawab sosial terkait ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja yaitu menekankan pada hubungan industrial yang sehat dan kondusif antara Perusahaan dengan karyawan. Program kerja dalam tanggung jawab sosial terkait ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja antara lain, program-program kesejahteraan pekerja, pelaksanaan pemeriksaan kesehatan, serta program-program relevan lainnya.
- Pelanggan Strategi dalam tanggung jawab sosial terkait Pelanggan yaitu menekankan pada upaya perlindungan Pelanggan serta peningkatan kualitas produk dan layanan. Program kerja dalam tanggung jawab sosial terkait Pelanggan antara lain, kemudahan akses informasi dan jaringan layanan perPerusahaan, peningkatan kualitas layanan Pelanggan, program literasi perPerusahaan, serta program-program relevan lainnya.
- Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan Strategi dalam tanggung jawab sosial terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan yaitu menekankan pada pembangunan ekonomi berkelanjutan. Program kerja dalam tanggung jawab sosial terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan antara lain, program Kemitraan dan Bina Lingkungan (TJSL) serta program-program relevan lainnya.

Anggaran Dan Realisasi Biaya Tanggung Jawab Sosial

PJT II memandang CSR sebagai sebuah investasi dalam jangka panjang, sehingga perencanaan harus diperhitungkan secara matang guna kelancaran realisasi semua program CSR dan pencapaian targetnya. Faktor penting dari pelaksanaan program CSR adalah tersedianya dana atau anggaran yang dialokasikan khusus untuk kegiatan CSR. Perum Jasa Tirta II telah melakukan TJSL dalam bentuk Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sejak tahun 1991 baik dalam bentuk pinjaman maupun bantuan Pembinaan yang bersifat hibah.

related to the environment include saving electricity and reducing emissions, saving water use, waste management, and other relevant programs.

- *Employment, Health, and Occupational Safety The strategy in social responsibility related to employment, health and safety at work is to emphasize healthy and conducive industrial relations between the Company and employees. Work programs in social responsibility related to employment, occupational health and safety include, among others, worker welfare programs, implementation of health checks, and other relevant programs.*
- *Customers The strategy in customer-related social responsibility is to emphasize efforts to protect customers and improve product and service quality. Work programs in customer-related social responsibility, among others, ease of access to information and the Company's service network, improvement of customer service quality, the Company's literacy program and other relevant programs.*
- *Social and Community Development The strategy in social responsibility related to social and community development is to emphasize sustainable economic development. Work programs in social responsibility related to social and community development include the Partnership and Community Development program (TJSL) and other relevant programs.*

Budget And Cost Realization Of Social Responsibility

PJT II views CSR as an investment in the long term, so that planning must be carefully considered for the smooth realization of all CSR programs and achieving their targets. An important factor in implementing CSR programs is the availability of funds or budgets allocated specifically for CSR activities.

Perum Jasa Tirta II has conducted CSR in the form of Micro and Small Business Funding (UMK) since 1991, both in the form of loans and assistance in the form of grants. Cumulative distribution of UMK Funding.



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN HAK ASASI MANUSIA

Corporate Social Responsibility Related To Human Rights

Komitmen Dan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Hak Asasi Manusia

PJT II memiliki komitmen penuh terhadap penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Ruang lingkup tanggung jawab sosial terkait HAM meliputi pencegahan tindakan diskriminasi, kebebasan berserikat, pengaturan waktu kerja, izin karena kondisi darurat, dan kesempatan untuk menjalankan ibadah. PJT II juga memberikan hak dan kesempatan yang sama untuk bekerja tanpa memandang perbedaan agama, etnis, ras, status sosial, warna kulit, gender, ataupun kondisi fisik lainnya, termasuk dalam hal pengangkatan calon pekerja.

Lingkup Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Hak Asasi Manusia

Lingkup tanggung jawab sosial Perusahaan terkait dengan Hak Asasi Manusia, yakni berkaitan dengan ketenagakerjaan meliputi perlakuan/tindakan diskriminasi, pengakuan dan jaminan bagi Serikat Pegawai, hak pemberian waktu kerja, cuti tahunan, izin istirahat jika melahirkan/keguguran atau sakit karena haid, izin menjalankan ibadah maupun izin meninggalkan pekerja jika ada sesuatu hal.

Commitment And Corporate Social Responsibility Policy In Human Rights Sector

PJT II is fully committed to the enforcement of Human Rights (HAM). The scope of social responsibility related to human rights includes preventing acts of discrimination, freedom of association, working time arrangements, permits due to emergency conditions, and opportunities to practice worship. PJT II also provides equal rights and opportunities to work regardless of differences in religion, ethnicity, race, social status, skin color, gender, or other physical conditions, including the appointment of prospective workers.

Scope Of Corporate Social Responsibility For Human Rights

The scope of the Company's social responsibility related to Human Rights, which is related to employment includes discrimination treatment/actions, recognition and guarantees for the Employee Union, the right to work time, annual leave, permission to rest in case of childbirth/miscarriage or illness due to menstruation, permission to worship as well as permission to leave the worker if there is something wrong.



Perencanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Hak Asasi Manusia

Terjalinnya hubungan kerja yang harmonis dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk mendukung kelancaran operasional Perusahaan dan Tidak diterimanya laporan terkait pelanggaran HAM.

Pelaksanaan Dan Inisiatif Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Hak Asasi Manusia

Setiap tahun, PJT II senantiasa menyusun perencanaan kegiatan yang dituangkan dalam program kerja yang dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran PJT II (RKAP). Program kerja tersebut ditujukan untuk menjamin proses kerja di PJT II telah memperhatikan juga implementasi HAM antara lain pengalokasian biaya untuk kegiatan-kegiatan pegawai.

Waktu Kerja

- Memperhatikan kelancaran operasional Perusahaan, kerja lembur dapat dilaksanakan dengan persetujuan bersama antara PJT II dengan Pegawai guna menyelesaikan pekerjaan yang tidak dapat ditunda dan untuk itu PJT II akan membayar upah kerja lembur kepada Pegawai.
- Waktu Kerja Lembur disesuaikan dengan kebutuhan operasional Perusahaan dan Perusahaan menetapkan fasilitas lembur. Terhadap besarnya upah mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.
- Bagi pegawai *teller*, *customer service*, dan pegawai operasional lainnya pada jama-jam istirahat tetap melayani Pelanggan, selanjutnya waktu istirahat dapat diatur secara bergilir dengan rekan sekerja lainnya.
- Khusus bagi pegawai wanita yang menyusui, telah diberikan kesempatan yang sepatutnya untuk melakukan laktasi dan atau menyusui anaknya selama waktu kerja.

Izin Pernikahan

- Bagi pegawai yang akan melangsungkan pernikahan harus mengajukan izin tertulis kepada Direksi melalui unit kerja dengan ketentuan bagi pegawai pria untuk istri pertama, bagi pegawai wanita menjadi istri pertama dengan menyebutkan identitas calon istri/suami.
- Permohonan izin tersebut harus melampirkan Surat Keterangan Belum Menikah atau yang bisa dipersamakan dari kantor kelurahan/kepala desa

Corporate Social Responsibility Planning For Human Rights

Establishing a harmonious working relationship and in accordance with the provisions of the law. Creating a conducive work environment to support the smooth operation of the Company and not receiving reports related to human rights violations.

Implementation And Initiatives Of Corporate Social Responsibility In Human Rights Sector

Every year, PJT II always prepares activity plans as outlined in the work program contained in the PJT II Work Plan and Budget (RKAP). The work program is intended to ensure that the work process at PJT II has also taken into account the implementation of human rights, including the allocation of costs for employee activities.

Working Time

- *Taking into account the smooth operation of the Company, overtime work can be carried out with mutual agreement between PJT II and employees in order to complete work that cannot be delayed and for that PJT II will pay overtime wages to employees.*
- *Overtime hours are adjusted to the Company's operational needs and the Company determines overtime facilities. The amount of wages refers to the applicable laws and regulations.*
- *For teller employees, customer service, and other operational employees during break hours they continue to serve customers, then rest periods can be arranged in rotation with other co-workers.*
- *Especially for female employees who are breastfeeding, have been given appropriate opportunities to do lactation and or breastfeed their children during working hours.*

Marriage Permit

- *For employees who are going to get married, they must apply for written permission to the Board of Directors through the work unit with provisions for male employees to be the first wife, for female employees to be the first wife by stating the identity of the prospective wife/husband.*
- *The permit application must attach a Certificate of Unmarried or an equivalent from the kelurahan office/village head from other authorized agencies*



dari instansi berwenang lainnya bagi pegawai atau calon yang memiliki status belum pernah melakukan perkawinan.

for employees or candidates who have never married status.

Cuti Tahunan

- Cuti tahunan diberikan kepada Pegawai yang telah bekerja di Perusahaan selama 1 (satu) tahun secara terus menerus.
- Selama menjalani masa cuti tahunan, Pegawai tetap menerima gaji penuh.
- Lamanya cuti tahunan ditentukan berdasarkan jabatan Pegawai yang diatur oleh Perusahaan.
- Ketentuan pelaksanaan cuti tahunan diatur oleh Perusahaan.
- Hak cuti tahunan dilaksanakan berdasarkan permintaan pegawai dan/atau penugasan oleh Perusahaan dan disesuaikan dengan beban kerja/kebutuhan Perusahaan
- Bagi pegawai yang mengajukan rencana cuti tahunan namun ditolak oleh kepala unit kerja yang bersangkutan, maka diwajibkan kepada kepala unit dimaksud untuk memberikan alasan penolakannya secara tertulis dan ditembuskan ke unit kerja *Human Capital*.

Annual Leave

- *Annual leave is given to Employees who have worked in the Company for 1(one) year continuously.*
- *During the period of annual leave, employees continue to receive their full salary.*
- *The length of annual leave is determined based on the employee's position as regulated by the Company.*
- *Provisions for the implementation of annual leave are regulated by the Company.*
- *The right to annual leave is carried out based on the request of the employee and/or assignment by the Company and adjusted to the workload/needs of the Company.*
- *For employees who submit an annual leave plan but are rejected by the head of the work unit concerned, it is obligatory for the head of the unit to provide the reasons for his refusal in a formal manner. in writing and copied to the Human Capital work unit*

Izin Menjalankan Ibadah

PJT II senantiasa memberikan ijin kepada Pegawai untuk menjalankan ibadah yang ketentuan pelaksanaannya diatur oleh PJT II, termasuk izin untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh.

Permission to Run Worship

PJT II always gives permission to employees to carry out worship whose implementation provisions are regulated by PJT II, including permission to carry out Hajj and Umrah.

Izin Meninggalkan Pekerjaan

Setiap pegawai yang berhalangan hadir di kantor karena alasan apapun wajib memberitahukan hal tersebut baik secara tertulis maupun secara lisan pada hari yang bersangkutan. Dalam hal pemberitahuan secara lisan, harus disusun pemberitahuan secara tertulis kepada atasannya paling lambat pada kesempatan pertama masuk kantor. Izin meninggalkan pekerjaan diberikan pada saat:

- Peristiwa khusus yaitu pernikahan pegawai, pegawai menikahkan anak, suami/istri/anak/menantu/orang tua/ mertua/anggota dalam satu rumah meninggal dunia, kelahiran anak, istri pegawai mengalami keguguran kandungan, khitanan anak, dan lain-lain.
- Sakit, yaitu sakit dengan surat dokter selama maksimum 3 (tiga) hari, sakit tanpa surat dokter selama 1 (satu) hari dan sakit dengan rawat inap.
- Keperluan pribadi yang penting, mendadak dan tidak dapat diwakilkan.

PJT II telah mengatur ketentuan pelaksanaan ijin meninggalkan pekerjaan.

Permission to Leave Work

Every employee who is unable to attend the office for any reason must notify this matter either in writing or orally on the day concerned. In the case of verbal notification, a written notification must be prepared to his superior no later than the first opportunity to enter the office. Permission to leave work is given when:

- *Special events, namely employee marriage, employee marrying off their child, husband/wife/child/son-in-law/parent/in-law/member in one house dies, child is born, employee's wife experiences miscarriage, child circumcision, and others.*
- *Sickness, namely illness with a doctor's letter for a maximum of 3 (three) days, illness without a doctor's letter for 1 (one) day and illness with hospitalization.*
- *Important personal needs, urgent and can not be represented.*

PJT II has set the conditions for the implementation of the permit to leave work.



Capaian Dan Penghargaan Inisiatif Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Hak Azasi Manusia

Dengan memberikan izin cuti dan menjamin pelaksanaan ibadah masing-masing pegawai, berdampak pada peningkatan kinerja karyawan serta kesungguhan dalam bekerja. Dengan menerapkan prinsip-prinsip HAM, PJT II dapat meningkatkan keharmonisan dalam kegiatan operasional Perusahaan. Selain itu, para karyawan akan merasa nyaman berada di lingkungan Perusahaan. Hal ini berdampak pada meningkatnya survei kepuasan karyawan. Pada tahun 2022, PJT II belum mendapatkan penghargaan terkait hak asasi manusia.

Achievements And Awards Of Corporate Social Responsibility Initiatives In Human Rights Sector

By giving leave permits and guaranteeing the implementation of worship for each employee, it has an impact on increasing employee performance and sincerity in work. By applying the principles of human rights, PJT II can improve harmony in the Company's operational activities. In addition, employees will feel comfortable in the Company's environment. This has an impact on increasing employee satisfaction surveys. In 2022, PJT II has not yet received an award related to human rights.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN OPERASI YANG ADIL

Corporate Social Responsibility Related To Fair Operations

Komitmen Dan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Operasi Yang Adil

Sebagai salah satu perwujudan dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik, PJT II memiliki komitmen untuk senantiasa menjalankan praktik-praktik operasi yang adil. PJT II telah memiliki berbagai kebijakan yang mengatur dilaksanakan operasi yang adil diantaranya kebijakan pengendalian internal, Whistleblowing System (WBS), Code of Conduct, dan kebijakan gratifikasi. Kebijakan tersebut khususnya ditujukan untuk pencegahan benturan kepentingan dan pelaksanaan kegiatan usaha yang sehat. Ruang lingkup pelaksanaan tanggung jawab sosial terkait dengan praktik operasi yang adil yang ditekankan oleh PJT II saat ini adalah pencegahan benturan kepentingan, penerapan anti korupsi, kompetisi yang sehat, dan pencegahan perilaku insiders. Penerapan anti koRPBi diwujudkan melalui pelaksanaan WBS, Code of Conduct dan Kebijakan Gratifikasi.

Fair Operations Commitment And Corporate Social Responsibility Policy

As a manifestation of the implementation of good corporate governance, PJT II is committed to always implementing fair operating practices. PJT II already has various policies that regulate fair operations, including internal control policies, Whistleblowing System (WBS), Code of Conduct, and gratification policies. This policy is specifically aimed at preventing conflicts of interest and implementing healthy business activities. The scope of the implementation of social responsibility related to fair operating practices that are currently emphasized by PJT II are prevention of conflicts of interest, application of anti-corruption, healthy competition, and prevention of insider behavior. The implementation of anti-corruption is realized through the implementation of WBS, Code of Conduct and Gratification Policy.

Rumusan Dan Lingkup Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Operasi Yang Adil

Lingkup kegiatan tanggung jawab sosial terkait operasi yang adil meliputi pencegahan benturan kepentingan, implementasi Whistleblowing System dan Code of Conduct, larangan perilaku insiders serta hubungan dengan organisasi lain.

Formulation And Scope Of Corporate Social Responsibility Field Of Operating Fair

The scope of social responsibility activities related to fair operations includes prevention of conflicts of interest, implementation of the Whistleblowing System and Code of Conduct, prohibition of insiders behavior and relationships with other organizations.



Perencanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Operasi Yang Adil

PJT II senantiasa menargetkan dalam perencanaan tahunannya untuk menjamin terlaksananya semua kebijakan praktik operasi yang adil. Setiap pelanggaran yang terjadi akan dikenakan sanksi dengan tegas sesuai kebijakan PJT II dan peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan Inisiatif Tanggung Jawab Sosial Bidang Operasi Yang Adil

Pelaksanaan tanggung jawab sosial terkait dengan praktik operasi yang adil yang secara konsisten dilaksanakan oleh PJT II meliputi hal-hal berikut ini:

Pencegahan Benturan Kepentingan

PJT II melalui penerapan kode etik telah menegaskan kembali Larangan Pencegahan/Anti Korupsi dan Gratifikasi bagi seluruh jajaran PJT II. Hal ini terkait dengan komitmen bersama sebagaimana tertuang dalam Kode Etik dan Nilai-nilai Budaya Perusahaan, yang antara lain mengatur mengenai *conflict of interest*, larangan penyalahgunaan jabatan dan pengaturan integritas karyawan Perusahaan sangat menyadari perlunya menjaga hubungan kerjasama yang baik dengan Pelanggan, rekanan dan seluruh stakeholder dengan memperhatikan etika dan menghindari diri dari hal-hal yang menjurus pada tindakan yang dikategorikan sebagai gratifikasi dan menciptakan budaya anti Korupsi.

Penyalahgunaan Jabatan dan Gratifikasi

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon) komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Sanksi pelanggaran bagi yang melakukan gratifikasi adalah :

- Setiap orang yang memberikan gratifikasi kepada penerima gratifikasi, baik dalam kondisi penerima gratifikasi melaporkan maupun tidak melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK atau UPG, sedara hukum dapat diancam pidana sebagai pemberi suap, sepanjang unsurunsur pasal bagi pemberi suap, yaitu: Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terpenuhi.

Fair Operating Corporate Social Responsibility Planning

PJT II always targets in its annual planning to ensure the implementation of all fair operating practice policies. Any violations that occur will be subject to strict sanctions in accordance with PJT II policies and applicable regulations.

Implementation Of Social Responsibility Initiatives In Fair Operations

The implementation of social responsibility related to fair operating practices consistently carried out by PJT II includes the following:

Prevention of Conflict of Interests

PJT II through the implementation of the code of ethics has reaffirmed the Prohibition of Prevention/Anti-Corruption and Gratification for all ranks of PJT II. This is related to the shared commitment as stated in the Code of Ethics and Corporate Cultural Values, which among others regulates conflicts of interest, prohibits abuse of office and regulates employee integrity. The Company is very aware of the need to maintain good cooperative relationships with customers, partners and all stakeholders. by paying attention to ethics and avoiding things that lead to actions that are categorized as gratification and creating an anti-corruption culture.

Misapplication of Position and Gratification

Gratification is a broad term for the provision of money, goods, commission rebates (discounts), interest-free loans, travel tickets, lodging facilities, tourist trips, free medical treatment, and other services. Gratuities are received both domestically and internationally, and are carried out either electronically or manually. The following are the penalties for gratification violations:

- *Anyone who gives gratification to the recipient of gratification, whether in the condition that the recipient of gratification reports or does not report the gratification he has received to the KPK or UPG, legally can be threatened with a criminal offense as a bribe giver, as long as the elements of the article are for the bribe giver. , namely: Article 5 paragraph (1) and Article 13 of Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption are fulfilled.*



- Dalam hal penerima gratifikasi tidak melaporkan barang gratifikasi yang telah diterimanya sesuai jangka waktu yang telah diatur di atas, maka penerimaan tersebut dianggap suap sampai dibuktikan sebaliknya di pengadilan.
- Bagi insan Perusahaan yang menerima gratifikasi dan tidak melaporkan penerimaan tersebut diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- Ketentuan sanksi atas tidak berlaku jika penerima gratifikasi melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui UPG PJT II.

Implementasi Whistleblowing System

Dalam rangka penyelenggaraan operasional Perusahaan yang sehat dan penerapan tata kelola yang baik, seluruh pegawai/pejabat PJT II wajib melaporkan setiap dugaan tindakan penyimpangan yang terjadi di lingkungan Perusahaan. Kebijakan whistleblowing diimplementasikan untuk memberikan dorongan serta kesadaran kepada pegawai dan pejabat PJT II untuk melaporkan fraud yang terjadi. Lingkup pengaduan meliputi:

- a. Perbuatan *fraud*.
- b. Pelanggaran kode etik antara lain meliputi:
 - Penyalahgunaan dan pemalsuan data dan/atau dokumen.
 - Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan atau kepentingan lain di luar Perusahaan.
 - Menginformasikan/mengungkapkan rahasia Pelanggan dan Perusahaan.
 - Penerimaan dan/atau pemberian gratifikasi yang dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan dan/atau mengakibatkan kerugian Perusahaan.
 - Penyelewengan uang/kas Perusahaan. Penggelapan aset dan/atau inventaris Perusahaan.
 - Pemerasan.
 - Perbuatan Asusila

Capaian Dan Penghargaan Inisiatif Tanggung Jawab Sosial Bidang Operasi Yang Adil

Komitmen PJT II dalam penerapan tanggung jawab sosial terkait praktik operasi yang adil telah meningkatkan kepercayaan para stakeholders kepada PJT II. Dengan meningkatnya kepercayaan dari

- *In the event that the recipient of the gratuity does not report the gratuity that has been received according to the period stipulated above, the acceptance is considered a bribe until proven otherwise in court.*
- *Company personnel who receive gratification and do not report the receipt are threatened with life imprisonment or imprisonment for a minimum of 4 (four) years and a maximum of 20 (twenty) years, and a fine of at least Rp. 200,000,000.00 (two hundred million rupiah) and a maximum of Rp.1,000,000,000.00 (one billion rupiah).*
- *The above sanctions provisions do not apply if the recipient of the gratuity reports the gratuity he received to the Corruption Eradication Commission (KPK) through UPG PJTII.*

Whistleblowing System Implementation

All PJT II employees/officers are required to report any alleged irregularities that occur within the Company in the context of implementing healthy Company operations and good governance. The whistleblowing policy is in place to encourage and educate PJT II employees and officials about reporting fraud. The following are the types of complaints:

- a. *Fraud.*
- b. *Examples of Code of Ethics violations are:*
 - *Misuse and falsification of data and/or documents*
 - *Misuse and corruption data and/or documents misuse of Position for Personal/Group Interests or Other Outside Interests*
 - *Informing/disclosing Customer and Company Secrets*
 - *Accept and/or disbursement of gratuities that may influence decision-making and/or result in losses to the company.*
 - *Misappropriation of company funds taking Company assets and/or inventory.*
 - *Extortion.*
 - *Immoral Behavior*

Fair Operations Achievements And Awards Initiatives For Social Responsibility

The commitment of PJT II to implementing social responsibility in the form of fair operating practices has increased stakeholders' trust in the company. It



stakeholder diharapkan dapat meningkatkan kinerja Perusahaan. Sampai dengan tahun 2022, Perusahaan tidak dikenakan sanksi dalam perkara hukum serta diakui kinerja Perusahaan oleh pihak eksternal. Sampai dengan Desember 2022, PJT II belum memiliki penghargaan terkait operasi yang adil, mengurangi kualitas layanan energi. Sekitar 45

is expected that increased trust from stakeholders will improve the Company's performance. Until 2022, the Company is not subject to legal sanctions, and its performance is recognized by third parties. PJT II does not yet have a fair operations award as of December 2022.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN LINGKUNGAN HIDUP

Environmental Social Responsibility In Corporate

Komitmen Dan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Lingkungan Hidup

Sebagai salah satu penerapan keuangan berkelanjutan, PJT II telah memiliki beberapa kebijakan terkait dengan aspek lingkungan hidup, baik di internal maupun eksternal.

Commitment And Responsibility Policy Social Entrepreneurship Environmental Field Live

As one of the sustainable finance implementations, PJT II has several environmental policies, both internally and externally.

Dampak Dan Risiko Lingkungan

Pelaksanaan tanggung jawab sosial terkait lingkungan hidup oleh PJT II juga dapat memberikan dampak dan risiko pada lingkungan. Risiko tersebut yaitu, jika Perusahaan memberikan fasilitas kredit kepada Pelanggan menggunakan fasilitas tersebut ke dalam usaha yang dapat mencemari dan juga merusak lingkungan. Dalam hal ini, Perusahaan harus melakukan seleksi dalam memberikan kredit agar kredit yang diberikan tersebut dapat berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, karena berkembang Perusahaan tergantung pada fasilitas kreditnya.

Impacts And Risks On The Environment

The implementation of environmental social responsibility by PJT II may have environmental consequences and risks. The risk is that if the Company provides credit facilities to Customers, they will use these facilities in a way that will pollute and harm the environment. Because the Company's development is dependent on its credit facilities, the Company must make a choice in providing credit so that the credit provided can participate in environmental management.

Target/Rencana Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Lingkungan Hidup

Terjadinya efisiensi di lingkungan internal PJT II sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan profit kepada Perusahaan dengan menekan biaya operasional. Sedangkan untuk kegiatan eksternal, dapat dijalin hubungan yang baik antara masyarakat dan Perusahaan, sehingga citra PJT II di masyarakat dapat terjaga.

Corporate Social Responsibility Target/Plan In The Environmental Sector

Efficiency occurs within the PJT II internal environment in order to increase profits for the company by reducing operational costs. can be maintained in society

Kegiatan Lingkungan Hidup Terkait Dengan Kegiatan Operasional Perusahaan

Wujud dukungan PJT II terhadap pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup tercermin dalam setiap kegiatan Perusahaan baik itu operasional di kantor pusat maupun kegiatan bisnisnya, antara lain sebagai berikut.

Environmental Activities In Connection With Company Operations

The form of PJT II's environmental preservation support is reflected in every activity of the Company, both operational at the headquarters and business activities, including the following.



Peduli Lingkungan Internal

PJT II terus berupaya untuk meningkatkan kinerja Perusahaan termasuk kinerja kami pada lingkungan. Oleh sebab itu, PJT II senantiasa menerapkan peduli lingkungan di lingkungan operasional Perusahaan. Perusahaan menyadari, efisiensi energi dan air tidak hanya baik untuk keberlanjutan lingkungan, namun juga sebagai salah satu upaya penghematan biaya perusahaan dalam menghadapi perlambatan ekonomi. PJT II membuat kebijakan terkait lingkungan internal yaitu melalui program PJT II Go Green. Melalui program PJT II Go Green ini, seluruh pegawai diminta untuk peduli akan 5 (lima) hal, yakni:

- Gunakan air sehemat mungkin;
- Nyalakan listrik jika diperlukan;
- Tanam pohon sebanyak mungkin;
- Gunakan bahan yang mudah didaur ulang;
- Buang sampah pada tempatnya.

Selain hal tersebut, manajemen telah menentukan kebijakan antara lain hemat penggunaan listrik terutama di gedung kantor pusat PJT II dimana seluruh bagian gedung akan dimatikan saat jam 18.00 sore untuk penghematan. Selain itu dalam melaksanakan rapat sudah jarang digunakan kertas dalam menduplikasi bahan rapat melainkan dengan presentasi melalui TV atau Infocus, selain itu dalam penggunaan kertas juga diminimalisasi dengan penggunaan email dan kertas yang sudah terpakai untuk dimanfaatkan sisi yang masih bisa digunakan.

Gedung PJT II Hemat Energi

Kepedulian Perusahaan terhadap lingkungan dalam kegiatan operasional diwujudkan melalui penerapan prinsip *Green Office*. *Green Office* merupakan konsep kantor yang pelaksanaan kegiatannya dijalankan secara ramah lingkungan, di mana seluruh pegawai dan manajemen kantor berupaya untuk menerapkan berbagai penghematan, seperti hemat kertas, hemat penggunaan listrik, hemat konsumsi air, dan didukung oleh pengelolaan sampah yang baik dan tidak mencemari lingkungan.

Di tengah krisis energi global ini, di mana suplai energi makin langka dan mahal, membangun gedung besar berarti menambah konsumsi energi dalam jumlah besar pula. Energi yang terbatas tersebut perlu dibagi secara bijak antara lain dengan menerapkan prinsip gedung hemat energi.

Gedung hemat energi adalah gedung yang menggunakan lebih sedikit energi tanpa mengurangi kualitas layanan energi. Sekitar 45% energi primer di

PJT II Care For The Internal Environment

As a result, PJT II always practices environmental stewardship in the Company's operational environment. The company recognizes that energy and water efficiency is beneficial not only for environmental sustainability, but also for cost savings in the face of an economic slowdown. PJT II implements environmental policies, specifically the PJT II Go Green program. All employees are asked to care about 5 (five) things as part of the PJT II Go Green program:

- *Use water as sparingly as possible;*
- *Turn on power only when necessary;*
- *Plant as many trees as possible;*
- *Use easily recyclable materials;*
- *Put garbage in its proper place.*

Aside from that, management has established policies such as saving electricity, particularly in the PJT II head office building, where all parts of the building will be turned off at 18.00 pm to save money. Furthermore, when conducting meetings, paper is rarely used in duplicating meeting materials, but with presentations via TV or Infocus, paper use is also minimized by using email and paper that has been used on the side that can still be used.

PJT II Green Office Building Saves Energy

The application of Green Office principles demonstrates the Company's concern for the environment in operational activities. Green Office is an office concept in which all office employees and management strive to implement various savings, such as saving paper, saving electricity use, saving water consumption, and supported by good waste management and not polluting the environment. Building large buildings means increasing energy consumption in large quantities

In the midst of this global energy crisis, where energy supplies are becoming increasingly scarce and expensive. This limited energy must be distributed wisely, for example, by implementing the principle of energy-efficient buildings.

Energy efficient buildings use less energy while maintaining the quality of energy services. Buildings consume approximately 45% of primary energy in



Indonesia dikonsumsi oleh bangunan, sehingga sektor bangunan bertanggung jawab terhadap emisi gas rumah kaca (GRK) dalam proporsi signifikan. Dengan menggunakan peralatan listrik efisiensi tinggi, dinding gedung yang keseluruhan menggunakan kaca membuat sistem pencahayaan yang mengkonsumsi sekitar 20 persen listrik di gedung perkantoran dapat dibuat efisien.

Sepanjang tahun 2022 melalui penerapan konsep *Green Office*, Perusahaan telah melakukan penghematan penggunaan air dan listrik.

Sementara kegiatan konservasi air, pengelolaan sampah, dan penghijauan yang dilaksanakan di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) selama tahun 2022 memberikan dampak positif terhadap efektivitas dan efisiensi penyaluran air bagi kebutuhan pemangku kepentingan. Secara kuantitatif, hal tersebut tercermin dari penyediaan air baku, air baku ke PLTA, air bersih, dan air irigasi tahun 2022 sebagai berikut:

Indonesia, making the building sector a significant contributor to greenhouse gas (GHG) emissions. The walls of the building are entirely made of glass thanks to the use of high-efficiency electrical equipment, making the lighting system efficient, which consumes about 20% of the electricity in an office building.

Throughout 2022, the Company has saved money on water and electricity by implementing the Green Office concept.

Meanwhile, water conservation, waste management, and reforestation activities conducted in the watershed area (DAS) during 2022 have a positive impact on the effectiveness and efficiency of water distribution for stakeholders' needs. This is reflected quantitatively in the provision of raw water, raw water to hydropower, clean water, and irrigation water in 2022, as shown below:

Program CSV / CSV Program

Gambaran TPB Program CSV Yang Dilaksanakan Oleh Perum Jasa Tirta II adalah sebagai berikut / *The description of the TPB of the CSV Program Implemented by Perum Jasa Tirta II is as follows:*

NO.	PROGRAM / Program	ANGGARAN TAHUN 2022 (Rp) 2022 Budget (Rp)	REALISASI TAHUN 2022 (Rp) Realization In 2022 (Rp)	REALISASI TAHUN 2021 (Rp) Realization In 2021 (Rp)	NILAI MANFAAT CSV BAGI PERUSAHAAN Value Of Csv Benefits For Companies
1.	Program Biogas di Kawasan Citarum Hulu / <i>Biogas Program in the Upper Citarum Area</i>	800.000.000	800.000.000	-	Mengurangi Pencemaran sungai Citarum dari kotoran sapi / <i>Reducing Citarum River Pollution from cow dung</i>

Gambaran TPB Program CSV Yang Dilaksanakan Oleh Perum Jasa Tirta II Tahun 2022

Latar belakang pemilihan program biogas adalah pembuangan limbah ternak dalam hal ini kotoran sapi ke Citarum dan Anak Sungai Citarum menyebabkan terjadinya pencemaran yang memerlukan penanganan dengan mengedukasi masyarakat. Pemberdayaan masyarakat yang berada di DAS Citarum Melalui Program Biogas yang mengolah limbah kotoran sapi menjadi gas sebagai energi alternatif (kompor dan lampu/penerangan) dan pupuk cair serta untuk mengatasi pencemaran air sungai Citarum dari kotoran sapi yang diperkirakan sebanyak 36 ribu sapi yang kotorannya dibuang ke sungai Citarum, nilai bantuan rencananya sebesar Rp800.000.000,00 dengan indikator keberhasilan terbangunnya 50 Digester Biogas.

TPB CSV Program Implemented by Perum Jasa Tirta II is described as follows:

TPB CSV Program Implemented by Perum Jasa Tirta II in 2022: Overview The background for selecting the biogas program is that the disposal of livestock waste, in this case cow dung, into the Citarum and Citarum River tributaries causes pollution that must be addressed through public education. Empowerment of communities in the Citarum watershed through the Biogas Program, which converts cow dung waste into gas for alternative energy (stoves and lamps/lighting) and liquid fertilizers, as well as to combat Citarum river water pollution caused by cow dung, which is estimated to be 36 thousand cows whose dung is dumped into the river. Citarum River, with an indicator of the success of the construction of 50 Biogas Digesters, the value of the planned assistance is Rp800,000,000.00.

Realisasi pembangunan Digester Biogas Tahun 2022 dengan nilai sebesar Rp800.000.000,00 yang berlokasi di Desa Sukamanah, kec. Pangalengan, Kab. Bandung dengan jumlah digester sebanyak 50 Digester Biogas atau mencapai 100,00% dari RKA Tahun 2022 sebanyak 50 Digester Biogas

The completion of a Biogas Digester with a value of Rp. 800,000,000.00 in 2022, located in Sukamanah Village, kec. Pangalengan, Kab. Bandung, with a total of 50 Biogas Digesters, or reaching 100.00% of the 2022 RKA of 50 Biogas Digesters.

Program Unggulan

Gambaran TPB Program Unggulan Yang Dilaksanakan oleh Perum Jasa Tirta II adalah sebagai berikut :

Featured Shows

The following is an overview of TPB Featured Programs implemented by Perum Jasa Tirta II:

NO.	PROGRAM UNGGULAN / Leading Program	TPB	RKA TAHUN 2022 (Rp) RKA 2022 (Rp)	REALISASI TAHUN 2022 (Rp) Realization In 2022 (Rp)	REALISASI TAHUN 2021 (Rp) Realization In 2021 (Rp)
1.	Penyediaan Sarana Air Bersih di Kawasan Citarum Hulu / Provision of Clean Water Facilities in the Upper Citarum Area	5	300.000.000	270.000.000	187.000.000
2.	Konservasi dan Pemberdayaan masyarakat di Kawasan Citarum Hulu / Conservation and Community Empowerment in the Upper Citarum Area	15	400.000.000	353.000.000	140.000.000

Program TJSL Unggulan PJT II tahun 2022 sesuai Prioritas Program TPB sebagai berikut / TJSL will lead TJSL Program II in 2022, based on TPB Program Priorities as follows:

Penyediaan Sarana Air Bersih di Kawasan Citarum Hulu

Penyediaan Sarana Air Bersih masuk kedalam kategori Pilar Lingkungan TPB 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak dengan program pemberian bantuan sarana air bersih hingga masyarakat dapat mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua, dengan rencana nilai bantuan sebesar Rp300.000.000,00 yaitu tersedianya 4 sarana dan atau prasarana air baku untuk melayani kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Realisasi Penyediaan Sarana Air Bersih di Kawasan Citarum Hulu Tahun 2022 yaitu tersedianya 9 sarana air bersih dengan nilai sebesar Rp270.000.000,00 yang berlokasi di:

- Kampung Kertamanah Desa Margamukti Kec. Pangalengan Kab. Bandung;
- Situ Sipatahunan Baleendah Bandung;
- Komplek Madani Regency, Bandung,
- Jl. Lingkar Gunung Parang Desa Pesanggrahan Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta.
- Desa Mekarjaya Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung.
- RT 007 RW 005 Kelurahan Baleendah Kecamatan Belendah Kabupaten Purwakarta.
- Kampung Gentong Kelurahan Jelekong Kabupaten Bandung.

Provision of Safe Drinking Water in the Citarum Upstream Area

The provision of clean water facilities is included in TPB 6 Clean Water and Adequate Sanitation with a program of providing clean water facilities so that the community can achieve universal and equitable access to safe and affordable drinking water for all, with a planned value of assistance of Rp300,000,000.00, namely the availability of 4 raw water facilities and or infrastructure to serve community groups in need.

Realization of the Provision of Clean Water Facilities in the Upper Citarum Area in 2022, Specifically, 9 clean water facilities worth Rp270,000,000.00 are available at the following locations:

- Kampung Kertamanah, Margamukti Village, Kec. Pangalengan District, Bandung;
- Situ Sipatahunan Baleendah Bandung;
- Madani Regency Complex, Bandung,
- Jl. Mount Parang Circle, Pesanggrahan Village, Tegalwaru District, Purwakarta Regency.
- Mekarjaya Village is located in the Banjaran District of the Bandung Regency.
- Baleendah Village, Belendah District, Purwakarta Regency, RT 007 RW 005. Bandung Regency,
- Gentong Village, Jelekong Village



- Desa Lamajang Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung.
- Desa Selaawi Kecamatan Pasawahan kabupaten Purwakarta.

Telah mencapai 225,00% dari RKA Tahun 2022 yaitu tersedianya 4 sarana dan atau prasarana air baku untuk melayani kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Efisiensi dan Konservasi Air

Perusahaan menitikberatkan pada pentingnya penerapan upaya efisiensi dan konservasi air secara efektif dan efisien guna mendukung pengelolaan Sumber Daya Air yang berkelanjutan. Upaya ini diwujudkan pada lingkup operasional perkantoran maupun penyaluran air kepada pemangku kepentingan melalui pemantauan dan pengawasan penggunaan air sesuai kebutuhan.

Dalam lingkup operasional perkantoran, efisiensi air digencarkan melalui sosialisasi penghematan air dengan memasang petunjuk hemat air di setiap sarana penggunaan air, penggunaan kembali air limbah bersih untuk kebutuhan siram tanaman di lingkungan kantor, dan penggunaan air minum galon dibandingkan air minum kemasan sekali pakai.

Adanya pandemi Covid-19 yang tengah terjadi tidak membatasi dan menghalangi seluruh insan Jasa Tirta II untuk tetap memberikan partisipasi aktif dalam menjaga kelestarian alam melalui program konservasi di HUT PJT II ke-53 yang jatuh di tahun 2020. Dengan mengusung tagline Save Water, Save Trees, Save Life, kegiatan konservasi ini menjadi bagian penting dari corporate campaign mengenai pentingnya menjaga kelestarian air melalui penanaman pohon untuk mendukung terwujudnya keberlanjutan di kehidupan masa depan.

Konservasi Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kawasan Citarum Hulu

Konservasi dan Pemberdayaan masyarakat di Kawasan Citarum Hulu masuk kedalam Pilar Lingkungan TPB 15 Ekosistem Daratan melalui penanaman pohon dan penebaran benih ikan serta pemberdayaan masyarakat sehingga dapat melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati dengan rencana nilai bantuan sebesar Rp400.000.000,00 yaitu dengan keterlibatan 4 kelompok masyarakat dalam pelaksanaan atau realisasi bantuan.

- Lamajang Village is located in the Pangalengan District of the Bandung Regency.
- Selaawi Village is located in the Pasawahan District of the Purwakarta Regency.

Has attained 225.00% of the RKA for 2022, namely the availability of four raw water facilities and/or infrastructure to serve community groups in need.

Water Conservation and Efficiency

The Company emphasizes the importance of effective and efficient water efficiency and conservation efforts to support long-term water resource management. This effort is reflected in the scope of office operations as well as the distribution of water to stakeholders via monitoring and supervision of water use as needed.

Water efficiency is increased within the scope of office operations by socializing water savings by installing water-saving instructions at every water use facility, reusing clean wastewater for watering plants in the office environment, and using gallon drinking water instead of single-use bottled water.

The ongoing Covid-19 pandemic does not limit or prevent all Jasa Tirta II personnel from actively participating in nature preservation programs at the 53rd PJT II Anniversary in 2020. This conservation activity, with the tagline Save Water, Save Trees, Save Life, is an important part of the corporate campaign about the importance of maintaining water conservation through tree planting to support the realization of sustainability in future life. Upper Citarum

Community Conservation And Empowerment Community

Conservation and Empowerment in the Upper Citarum Area is included in the Environmental Pillar of TPB 15 Land Ecosystems through tree planting and fish seed distribution, as well as community empowerment to protect, restore, and improve sustainable use of the environment with a planned assistance value of Rp. 400,000,000.00, namely with the involvement of four community groups in the implementation or realization of assistance.



Realisasi Konservasi dan Pemberdayaan masyarakat di Kawasan Citarum Hulu Tahun 2022 dengan nilai Rp353.000.000,00 yaitu Keterlibatan 4 Kelompok Masyarakat dalam kegiatan Konservasi di 5 lokasi (kelompok masyarakat) dan Pemberdayaan terhadap 3 kelompok masyarakat atau mencapai 200,00% dari RKA Tahun 2022.

Pengelolaan Sampah Dan Limbah

Kegiatan pengelolaan sampah di lingkungan Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan kegiatan rutin yang dilakukan Perum Jasa Tirta II dalam mendukung efektivitas konservasi sumber daya air. Pengelolaan sampah dan limbah dilakukan dengan pengangkutan sampah yang mengganggu kualitas air dan berpotensi menimbulkan banjir akibat penyumbatan sampah. Selain itu pengelolaan sampah juga merupakan bagian dari upaya pengendalian pencemaran air, yang dimaksudkan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air yang masuk dan yang berada pada sumber air, dengan cara mencegah masuknya pencemaran air pada sumber air dan prasarana sumber air. Kegiatan Pengendalian Pencemaran Air yang dilaksanakan oleh PJT II antara lain:

Pembuatan Project Biogas

Pembangunan Project Biogas dipilih oleh PJT II sebagai bentuk komitmen terhadap kelestarian alam dan untuk membantu masyarakat sesuai dengan semangat "Air untuk menghidupi negeri". Terbentuknya program pembangunan Project Biogas yang perencanaannya dimulai pada November 2016 adalah sebagai upaya pengendalian pencemaran air dengan berbasis pemberdayaan masyarakat. PJT II membuat project di 2 lokasi yaitu di Pangalengan merepresentasikan Bandung Selatan dan di Lembang merepresentasikan Bandung Utara.

Penertiban Keramba Jaring Apung

Dasar Pelaksanaan Penertiban Keramba Jaring Apung:

- Statement Presiden Joko Widodo agar Sungai Citarum bersih dalam kurun waktu 7 tahun (Kompas 23/02/2018)
- Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum
- Permen PUPR nomor 27 Tahun 2015 tentang Bendungan

Realization of Conservation and Community Empowerment in the Upper Citarum Area in 2022 with a value of IDR 353,000,000.00, namely the participation of four community groups in conservation activities in five locations (community groups) and the empowerment of three community groups, or reaching 200.00% of the RKA in 2022.

Waste and Waste Administration

Waste management in the Watershed (DAS) environment is a routine activity carried out by Perum Jasa Tirta II to support the effectiveness of water resource conservation. Waste and waste management entails removing waste that impedes water quality and has the potential to cause flooding due to garbage blockage. Furthermore, waste management is part of efforts to control water pollution, which is intended to maintain and restore the quality of incoming water and that is in water sources by preventing water pollution from entering water sources and water source infrastructure. Among the water pollution control activities carried out by PJT II are:

Developing a Biogas Project

PJT II chose the Biogas Project Development as a form of commitment to nature conservation and to help the community in keeping with the spirit of "Water to support the country." The Biogas Project Development Program, which is set to begin in November 2016, is an effort to control water pollution through community empowerment. PJT II completed projects in two locations: Pangalengan, which represents South Bandung, and Lembang, which represents North Bandung.

Floating Net Cage Control

Basic Control of Floating Net Cages:

- *President Joko Widodo's Promise to Clean the Citarum River in 7 Years (Kompas 23/02/2018)*
- *Presidential Regulation No. 15 of 2018 concerning the Acceleration of Pollution Control and Damage to the Citarum River Basin P*
- *Permen PUPR No. 27 of 2015 concerning Dams*



- Peraturan Gubernur No. 28 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum Tahun 2019-2025
- Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 660.31/Kep.923-DKP/2019 tentang Jumlah Keramba Jaring Apung (KJA) di Waduk Cirata, Waduk Saguling, dan Waduk Jatiluhur yang memenuhi Daya Dukung Lingkungan.
- Governor's Regulation No. 28 of 2019 concerning the Action Plan for Pollution Control and Damage to the Citarum River Basin for 2019-2025.
- Governor of West Java Decree No. 660.31/Kep.923-DKP/2019 on the Number of Floating Net Cages (KJA) in Cirata, Saguling, and Jatiluhur Reservoirs that meet the Environmental Carrying Capacity.

Penerapan Culture Base Fisheries (CBF)

Culture Base Fisheries (CBF) adalah Kegiatan perikanan tangkap dimana ikan hasil tangkapan berasal dari benih ikan hasil budidaya.

Culture-Based Fisheries Implementation (CBF)

Culture Base Fisheries (CBF) is a type of capture fishery in which the caught fish is derived from cultured fish.

PELAKSANAAN INISIATIF TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Implementation of Corporate Social Responsibility Initiatives In The Environmental Sector

Peduli Lingkungan External

Selain program internal, PJT II juga turut dalam beberapa program peduli lingkungan yang melibatkan pihak eksternal. Program CSR dibidang lingkungan hidup telah dilaksanakan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah (Program Kemitraan) dan Organisasi/LSM/Masyarakat (Dana Bantuan Kemasyarakatan), beberapa program yang telah dilaksanakan lebih terfokus dalam kegiatan yang segera dilaksanakan dan tidak berkelanjutan antara lain dalam peduli lingkungan seperti Pemberian Alat Pemadam Api Portable, pemberian Tong Sampah, Truk Sampah dan lainnya namun tidak ada program keberlanjutannya. Pemberian CSR tersebut lebih kepada permintaan dari Pemerintah Daerah atau Organisasi/ LSM/Masyarakat.

Care For The External Environment

In addition to internal programs, PJT II also participates in several environmental care programs that involve external parties. CSR programs in the environmental field have been implemented in collaboration with the Regional Government (Partnership Program) and Organizations/NGOs/Society (Community Assistance Funds), several programs that have been implemented are more focused on activities that are immediately implemented and are not sustainable, among others in environmental care such as the Provision of Equipment Portable Fire Extinguishers, Trash Cans, Garbage Trucks and others but there is no sustainability program. The provision of CSR is more at the request of the Regional Government or Organizations/NGOs/Communities.



Program TJSL TJSL Programme

• Bidang Pendidikan / *Education*



Program Beasiswa Untuk 11 orang Atlet Olahraga Air Berprestasi / *Scholarship Programme for 11 Outstanding Water Sports Athletes.*



Pembangunan Ruang Kelas Baru PAUD Yayasan Al-Madani / *Construction of a New Classroom for Al-Madani Foundation PAUD.*



Pemagaran dan Pengecoran Halaman MDTA Al-Hidayah / *Fencing and Casting of MDTA Al-Hidayah Courtyard.*



Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Raudhatul Athfal (RA) Baetul Ghofur / *Assistance for the Construction of a New Classroom (RKB) for Raudhatul Athfal (RA) Baetul Ghofur.*



Bantuan Sarana Pendidikan Untuk Yayasan Mutiara gading Indonesia / *Educational Facilities Assistance for Mutiara gading Indonesia Foundation.*



Bantuan Sarana Pendidikan Untuk Yayasan Citra Melati / *Educational Facilities Assistance for Citra Melati Foundation.*



• Program Biogas / *Biogas Programme*



Bantuan 52 Digester Biogas yang berlokasi di Desa Warnasari, Desa Margamekar, Desa Pulosari dan Desa Margamulya Kec. Pangalengan Kab. Bandung / *Assistance for 52 Biogas Digesters located in Warnasari Village, Margamekar Village, Pulosari Village and Margamulya Village, Pangalengan Sub-district, Bandung Regency.*



• Penyediaan Sarana Air Bersih / *Provision of Clean Water Facilities*



Penyediaan Sarana Air Bersih di Citarum Hulu dan Kabupaten Purwakarta / *Provision of Clean Water Facilities in Upper Citarum and Purwakarta Districts.*

• Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni / *Repair of uninhabitable houses*



Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Purwakarta / *Assistance in Repairing Uninhabitable Houses in Purwakarta Regency.*



• Bantuan Elektrifikasi / *Electrification Assistance*



Bantuan Elektrifikasi kepada 110 Rumah tangga yang belum teraliri listrik di Kabupaten Purwakarta / *Electrification assistance to 110 unelectrified households in Purwakarta Regency.*

• Bantuan Sarana Mandi Cuci Kakus / *Assistance with Bathing and Washing Facilities*



Bantuan Sarana MCK 7 Lokasi di Kabupaten Purwakarta / *MCK Facilities Assistance 7 Locations in Purwakarta Regency.*



• Bantuan Sarana Umum / *Public Facilities Assistance*



• Konservasi / *Conservation*





• Penebaran Benih Ikan / *Fish Seed Stocking*



Bantuan Paket Sembako Untuk Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Purwakarta / *Basic Food Package Assistance for Poor Communities in Purwakarta Regency.*

Khitanan Massal Dalam Rangka Memperingati HUT PJT II Ke-55 / *Mass Circumcision in Commemoration of PJT II's 55th Anniversary.*



• Bidang Pengembangan UMK / *MSE Development Division*





LAPORAN KEUANGAN

Financial Report

2022





2.25	62 €
200,	82 €
221,75 €	3,14 €
270,82 €	148,07 €
296,31 €	166,68 €
262,12 €	208,61 €
122,00 €	202,00 €
327,53 €	



Perum Jasa Tirta II
Air Untuk Menghidupi Negeri

**Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
PERUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK**

*Consolidated Financial Statements
For Years Ended
December 31, 2022 and 2021
PERUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARES*



PERUM JASA TIRTA II
JL. LURAH KAWI NO. 1
JATILUHUR - JAWA BARAT
INDONESIA - 41152
☎ (0265) 201972 / 201971

BUMN UNTUK
INDONESIA

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK**

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES**

Daftar Isi	Halaman/ <u>Page</u>	Table of Contents
Surat Pernyataan Direksi		<i>Directors' Statement Letter</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditor's Report</i>
Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021		<i>Consolidated Financial Statements For the Years Ended December 31, 2022 and 2021</i>
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1	<i>Consolidated Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	3	<i>Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	4	<i>Consolidated Statements of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas Konsolidasian	5	<i>Consolidated Statements of Cash Flows</i>
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	6	<i>Notes to the Consolidated Financial Statements</i>

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK**

**DIRECTORS' STATEMENT LETTER
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR
THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARY**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We the undersigned:

1. Nama :	Imam Santoso	:	Name 1.
Alamat Kantor :	Jl. Lurah Kawi No. 1 Jatiluhur Purwakarta Jawa Barat	:	Office Address
Alamat Domisili sesuai KTP atau Identitas :	Jl. Warga I No. 7 RT/RW 014/003 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan, DKI Jakarta	:	Domicile as stated in ID Card
Nomor Telepon :	(0264) 201972	:	Phone Number
Jabatan :	Direktur Utama/ President Director	:	Position
2. Nama :	Indriani Widiastuti	:	Name 2.
Alamat Kantor :	Jl. Lurah Kawi No. 1 Jatiluhur Purwakarta Jawa Barat	:	Office Address
Alamat Domisili sesuai KTP atau Identitas :	Jl. Siaga I Gg. Lukis No. 36 RT/RW 004/005 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan, DKI Jakarta	:	Domicile as stated in ID Card
Nomor Telepon :	(0264) 201972	:	Phone Number
Jabatan :	Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Manajemen Risiko/ Finance, Human Resources and Risk Management	:	Position

Menyatakan bahwa:

State that:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian Perusahaan Umum Jasa Tirta II dan Entitas Anak (Grup).	1. We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of Perusahaan Umum Jasa Tirta II and Subsidiary (Group).
2. Laporan keuangan konsolidasian Grup telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.	2. The consolidated financial statements of the Group have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Grup telah dimuat secara lengkap dan benar.	3. a. All information contained in the consolidated financial statements of the Group are complete and correct.
b. Laporan keuangan konsolidasian Grup tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.	b. The consolidated financial statements of the Group do not contain any incorrect information or material facts and nor do they omit material information or facts.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan.	4. We are responsible for the Company's internal control system.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This is our declaration, which has been made truthfully.

Atas nama dan mewakili Direksi/ For and on behalf of the Board of Directors
Purwakarta, 14 April 2023/ April 14, 2023

 Imam Santoso Direktur Utama/ President Director	 Indriani Widiastuti Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Manajemen Risiko/ Finance, Human Resources and Risk Management

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Nomor/Number : 00021/3.0310/AU.1/05/0500-2/1/IV/2023

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Registered Public Accountants

RSM Indonesia
SOHO SKYLOFT
Unit 1888-1898

Ciputra World Surabaya
Jl. Mayjen Sungkono No. 89
Surabaya - 60224

Laporan Auditor Independen/ Independent Auditor's Report

T +62 319953 3999, +62 319953 3333
F +62 319953 2121

Pemegang Saham, Dewan Pengawas dan Direksi/
The Shareholders, Boards of Supervisory and Directors

www.rsm.id

Perusahaan Umum Jasa Tirta II

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perusahaan Umum Jasa Tirta II dan Entitas Anaknya ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opinion

We have audited the consolidated financial statements of Perusahaan Umum Jasa Tirta II and its subsidiaries ("the Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as at December 31, 2022, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as at December 31, 2022, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standard on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with Standard on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is

terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit Grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*
- *Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.*

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Laporan atas Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Lain

Kami juga melakukan pengujian atas kepatuhan Grup terhadap peraturan perundang-undangan tertentu dan pengendalian internal. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu dan pengendalian internal adalah tanggung jawab manajemen Grup. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan kesimpulan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian internal Grup berdasarkan audit kami. Pengujian atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian internal tersebut kami laksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Pernyataan Standar Audit No. 62 (SA Seksi 801) yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

We also have tested on the Group's compliance with certain laws and regulations and internal controls. The compliance with certain laws and regulations and internal controls are the responsibility of the Group's management. Our responsibility is to express conclusion on the Group's compliance with certain laws and regulations and internal controls based on our audit. Testing of the compliance with certain laws and regulations and internal controls that we performed were in accordance with State Financial Auditing Standards established by Supreme Audit Board of the Republic Indonesia and Statement as Standards on Auditing No. 62 (SA Section 801) established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

Laporan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian internal disampaikan secara terpisah kepada manajemen, masing-masing dalam laporan kami No. R/023.AAT/epw/2023 dan No. R/024.AAT/epw/2023 tanggal 14 April 2023.

The reports of compliance to certain regulations and internal controls, are submitted to the management, separately in our reports No. R/023.AAT/epw/2023 and No. R/024.AAT/epw/2023 dated April 14, 2023.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan



Endang Pramuwati
Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0500/
Public Accountant License Number: AP.0500

Surabaya, 14 April 2023/ April 14, 2023



**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain) (Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION**

As of December 31, 2022 and 2021

	Catatan/ Notes	2022 Rp	2021*) Rp	
ASET				ASSETS
Aset Lancar				Current Assets
Kas dan Setara Kas	5, 37	567,815,077,826	452,330,656,021	Cash and Cash Equivalents
Piutang Usaha				Accounts Receivable
Pihak Berelasi	6, 37	63,231,588,561	37,297,672,501	Related Parties
Pihak Ketiga	6	34,174,328,659	34,202,828,304	Third Parties
Piutang Retensi	7	1,544,313,386	820,224,778	Retention Receivables
Pendapatan yang Masih Akan Diterima				Accrued Revenue
Pihak Berelasi	8, 37	144,980,396,801	117,757,694,629	Related Parties
Pihak Ketiga	8	92,050,781,455	93,249,971,078	Third Parties
Tagihan Bruto dari Pemberi Kerja	9	7,707,817,958	1,070,504,437	Gross Amount Due from Customers
Aset Keuangan Lancar Lainnya	10	701,279,719	780,706,426	Other Current Financial Assets
Persediaan	11	1,927,827,777	1,902,799,319	Inventories
Pembayaran di Muka	12	7,155,040,551	8,467,423,137	Prepayments
Pajak Dibayar di Muka - Bagian Lancar	28a	17,834,374,167	--	Prepaid Taxes - Current Portion
Jumlah Aset Lancar		939,122,826,860	747,880,480,630	Total Current Assets
Aset Tidak Lancar				Non Current Assets
Investasi pada Entitas Asosiasi	13	--	--	Investments on Associates
Investasi Jangka Panjang Lainnya	14	--	--	Other Long-Term Investment
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya		67,275,000	67,275,000	Other Non-Current Financial Assets
Aset Tetap	15	804,196,873,850	752,742,717,514	Fixed Assets
Aset Takberwujud	16	9,017,107,242	--	Intangible Assets
Aset Hak Guna	17	15,056,815,780	12,543,702,936	Right-of-Use Assets
Pajak Dibayar di Muka - Setelah				Prepaid Taxes - Less
Dikurangi Bagian Lancar	28a	48,241,227,669	101,587,584,808	Current Portion
Aset Pajak Tangguhan	28d	97,493,791,869	74,712,242,370	Deferred Tax Assets
Aset Tidak Lancar Lainnya	18	220,577,800	220,577,800	Other Non-Current Assets
Jumlah Aset Tidak Lancar		974,293,669,210	941,874,100,428	Total Non Current Asset
JUMLAH ASET		1,913,416,496,070	1,689,754,581,058	TOTAL ASSETS

*) Direklasifikasi (Catatan 44)

*) As reclassified (Note 44)

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain) (Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION (Continued)**

As of December 31, 2022 and 2021

	Catatan/ Notes	2022 Rp	2021*) Rp	
LIABILITAS				LIABILITIES
Liabilitas Jangka Pendek				Current Liabilities
Utang Usaha	19, 37	13,473,038,006	10,409,269,250	Accounts Payable
Utang Retensi	20	1,180,062,311	1,887,271,379	Retention Payables
Beban Akrua	21	71,777,435,621	37,483,990,810	Accrued Expenses
Uang Muka Penjualan	22	1,514,794,098	--	Sales Advances
Utang Pajak	28b	58,885,527,161	26,306,064,447	Taxes Payable
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	24	44,701,634,041	57,858,612,655	Other Short-Term Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang - Bagian Lancar:				Long-Term Liabilities - Current Portion:
Pendapatan Diterima di Muka	23	25,213,379,194	26,794,540,537	Deferred Revenue
Liabilitas Sewa	25	6,160,381,683	6,022,860,500	Lease Liabilities
Liabilitas Keuangan Lainnya	27	2,200,000,000	1,100,000,000	Other Financial Liabilities
Liabilitas Imbalan Kerja	26	6,278,499,682	1,847,920,667	Employee Benefits Liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		231,384,751,797	169,710,530,245	Total Current Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang				Non-Current Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang - Setelah Dikurangi Bagian Lancar:				Long-Term Liabilities - Less Current Portion:
Pendapatan Diterima di Muka	23	4,814,688,858	9,155,671,608	Deferred Revenue
Liabilitas Sewa	25	8,921,459,629	6,696,762,755	Lease Liabilities
Liabilitas Keuangan Lainnya	27	10,830,129,200	11,930,129,200	Other Financial Liabilities
Liabilitas Imbalan Kerja	26	274,739,479,761	211,054,285,800	Employee Benefits Liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		299,305,757,448	238,836,849,363	Total Non-Current Liabilities
JUMLAH LIABILITAS		530,690,509,245	408,547,379,608	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Modal Pemerintah	29	164,547,635,935	164,547,635,935	Government Capital
Cadangan Umum		13,943,023,591	13,943,023,591	Reserve
Cadangan Bertujuan		1,027,001,112,300	1,027,001,112,300	Appropriated Reserve
Penghasilan Komprehensif Lain		(179,544,761,143)	(135,815,636,511)	Other Comprehensive Income
Komponen Ekuitas Lainnya		193,963,239	193,963,239	Other Equity Component
Saldo Laba		349,067,919,953	203,264,495,798	Retained Earnings
Jumlah Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan:				Total Equity Attributable To:
Pemilik Entitas Induk		1,375,208,893,875	1,273,134,594,352	The Owners of Parent Entity
Kepentingan Non Pengendali	30	7,517,092,950	8,072,607,098	Non-Controlling Interest
Jumlah Ekuitas		1,382,725,986,825	1,281,207,201,450	Total Equity
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		1,913,416,496,070	1,689,754,581,058	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

*) Direklasifikasi (Catatan 44)

*) As reclassified (Note 44)

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain) (Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
PROFIT OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021

	Catatan/ Notes	2022 Rp	2021 Rp	
PENDAPATAN USAHA				OPERATING REVENUES
Pendapatan Sumber Daya Air	31	870,180,878,007	755,911,307,660	Water Resources Revenues
Pendapatan Non Sumber Daya Air	31	110,866,273,868	100,606,874,262	Non Water Resources Revenue
JUMLAH PENDAPATAN		981,047,151,875	856,518,181,922	TOTAL REVENUES
BEBAN POKOK PENDAPATAN				COST OF REVENUES
Beban Sumber Daya Air	32	(527,707,345,081)	(487,645,867,607)	Water Resources Expenses
Beban Non Sumber Daya Air	32	(72,563,957,505)	(57,041,307,664)	Non Water Resources Expenses
JUMLAH BEBAN POKOK PENDAPATAN		(600,271,302,586)	(544,687,175,271)	TOTAL COST OF REVENUES
LABA KOTOR		380,775,849,289	311,831,006,651	GROSS PROFIT
Beban Pemasaran	33	(5,794,215,282)	(4,730,927,476)	Marketing Expenses
Beban Umum dan Administrasi	34	(187,159,972,250)	(168,651,298,989)	General and Administration Expenses
Pendapatan (Beban) Keuangan	35	10,879,375,103	11,004,850,211	Financial Income (Expenses)
Pendapatan (Beban) Lain-lain	36	(6,845,748,016)	(4,871,774,977)	Other Income (Expenses)
JUMLAH BEBAN USAHA		(188,920,560,445)	(167,249,151,231)	TOTAL OPERATING EXPENSES
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		191,855,288,844	144,581,855,420	PROFIT BEFORE TAXES
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	28c	(46,607,162,979)	(37,135,464,667)	Income Tax Benefit (Expense)
LABA TAHUN BERJALAN		145,248,125,865	107,446,390,753	PROFIT FOR THE CURRENT YEAR
Penghasilan Komprehensif Lain:				Other Comprehensive Income:
Pos-pos yang Tidak Akan				Items that Will Not be Reclassified
Direklasifikasi ke Laba Rugi				to Profit or Loss
Pengukuran Kembali atas				Remeasurement of Defined Benefit
Program Imbalan Pasti	26	(56,063,257,039)	(55,352,075,997)	Plans
Pajak Penghasilan Terkait	28	12,333,916,549	12,177,456,720	Related Income Tax
Penghasilan Komprehensif				Other Comprehensive
Lain Tahun Berjalan		(43,729,340,490)	(43,174,619,277)	Income for the Current Year
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF				TOTAL COMPREHENSIVE INCOME
TAHUN BERJALAN		101,518,785,375	64,271,771,476	FOR THE CURRENT YEAR
Laba Tahun Berjalan yang				Profit for the Current
Dapat Diatribusikan ke:				Year Attributable to:
Pemilik Entitas Induk		145,803,424,155	107,608,172,087	The Owners of Parent Entity
Kepentingan Non Pengendali		(555,298,290)	(161,781,334)	Non-Controlling Interest
Jumlah Laba Tahun Berjalan		145,248,125,865	107,446,390,753	Total Profit for the Current Year
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun				Total Comprehensive Income for
Berjalan yang Dapat Diatribusikan ke:				the Current Year Attributable to:
Pemilik Entitas Induk		102,074,299,523	64,433,552,810	The Owners of Parent Entity
Kepentingan Non Pengendali		(555,514,148)	(161,781,334)	Non-Controlling Interest
Jumlah Penghasilan Komprehensif				Total Comprehensive Income
Tahun Berjalan		101,518,785,375	64,271,771,476	for the Current Year

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Entitas Induk/ Equity Attributable to the Owner of the Parent Entity									
	Modal Pemerintah Republik Indonesia/ Government Capital of Republic of Indonesia	Cadangan Umum/ Reserves	Cadangan Bertujuan/ Appropriated Reserves	Komponen Ekuitas Lainnya/ Other Equity Components	Penghasilan Komprehensif Lainnya/ Other Comprehensive Income	Saldo Laba/ Retained Earnings	Jumlah/ Total	Kepentingan Non Pengendali/ Non-Controlling Interest	Jumlah/ Total
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Saldo 31 Desember 2020	164,547,635,935	13,943,023,591	1,027,001,112,300	193,963,239	(92,641,017,234)	95,619,021,571	1,208,663,739,402	8,271,690,572	1,216,935,429,974
Balance as of December 31, 2020									
Saldo 1 Januari 2021									
Balance as of January 1, 2021									
Kerugian Pengukuran Kembali									
Program Imbalan Pasti	26	-	-	-	(43,174,619,277)	-	(43,174,619,277)	-	(43,174,619,277)
Penyesuaian	-	-	-	-	-	37,302,140	37,302,140	(37,302,140)	-
Labai Tahun Berjalan	-	-	-	-	-	107,608,172,087	107,608,172,087	(161,781,334)	107,446,390,753
Saldo 31 Desember 2021	164,547,635,935	13,943,023,591	1,027,001,112,300	193,963,239	(135,815,635,511)	203,264,495,798	1,273,134,594,352	8,072,607,098	1,281,207,201,450
Balance as of December 31, 2021									
Saldo 1 Januari 2022									
Balance as of January 1, 2022									
Kerugian Pengukuran Kembali									
Program Imbalan Pasti	26	-	-	-	(43,729,124,632)	-	(43,729,124,632)	(215,858)	(43,729,340,490)
Labai Tahun Berjalan	-	-	-	-	-	145,803,424,155	145,803,424,155	(555,298,290)	145,248,125,865
Saldo 31 Desember 2022	164,547,635,935	13,943,023,591	1,027,001,112,300	193,963,239	(179,544,761,143)	349,067,919,953	1,375,208,893,875	7,517,092,950	1,382,725,986,825
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance as of December 31, 2022									
Balance									

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these
consolidated financial statements

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain) (Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
THE CONSOLIDATED STATEMENTS
OF CASH FLOWS**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021

	Catatan/ Notes	2022 Rp	2021*) Rp	
Arus Kas dari Aktivitas Operasi				Cash Flows from Operating Activities
Penerimaan dari Pelanggan		968,711,407,169	794,365,429,469	Receipts from Customers
Penerimaan Restitusi Pajak		49,687,283,764	36,111,876,173	Receipts of Tax Refunds
Penghasilan Bunga		13,071,919,361	12,573,210,214	Interest Income
Pembayaran Kas kepada:				Cash Payments to:
Pemasok dan Pihak Ketiga Lainnya		(333,453,692,805)	(328,840,767,568)	Suppliers and Other Third Parties
Dewan Pengawas, Direksi dan Karyawan		(273,446,037,110)	(258,011,827,084)	Supervisory Board, Directors and Employees
Pembayaran Pajak		(187,836,013,119)	(143,635,528,609)	Tax Payment
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi		236,734,867,260	112,562,392,595	Net Cash Flows Provided by Operating Activities
Arus Kas dari Aktivitas Investasi				Cash Flows from Investing Activities
Perolehan Aset Tetap	15, 41	(110,443,054,809)	(168,242,230,802)	Acquisition of Fixed Assets
Perolehan Aset Takberwujud	16	(2,011,368,076)	--	Acquisition of Intangible Assets
Perolehan Aset Hak-Guna	17	(704,000,000)	--	Acquisition of Right-of-Use Assets
Pembayaran Uang Muka		(504,656,172)	(1,848,954,676)	Advances Payment
Hasil Pelepasan Aset Tetap		--	378,398,265	Gain from Disposal of Fixed Assets
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi		(113,663,079,057)	(169,712,787,213)	Net Cash Flows Used in Investment Activities
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan				Cash Flows from Financing Activities
Pembayaran:				Payments of:
Liabilitas Sewa	41	(6,085,023,805)	(5,833,415,986)	Lease Liabilities
Liabilitas Keuangan Lainnya		--	(1,234,937,500)	Other Financial Liabilities
Pembayaran Bunga	35	(1,502,342,593)	(1,612,599,281)	Interest Payment
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan		(7,587,366,398)	(8,680,952,767)	Net Cash Flows Used in Financing Activities
Penurunan Bersih Kas dan Setara Kas		115,484,421,805	(65,831,347,385)	Net Decrease in Cash and Cash Equivalents
Kas dan Setara Awal Tahun		452,330,656,021	518,162,003,406	Cash and Cash Equivalents at the Beginning of the Year
Kas dan Setara Akhir Tahun		567,815,077,826	452,330,656,021	Cash and Cash Equivalents at the End of the Year
Kas dan Setara Kas Terdiri Dari:				Cash and Cash Equivalents are as follows:
Kas		1,179,036,948	1,629,924,833	Cash
Bank		106,636,040,878	40,700,731,188	Bank
Deposito		460,000,000,000	410,000,000,000	Time Deposit
Jumlah		567,815,077,826	452,330,656,021	Total

*) Direklasifikasi (Catatan 44)

*) As reclassified (Note 44)

Informasi transaksi yang tidak memengaruhi arus kas
disajikan di Catatan 41.

Transaction information that does not affect cash
flows is disclosed in Note 41.

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these
consolidated financial statements

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. Umum

1. General

a. Pendirian dan Informasi Umum

Pembangunan Bendungan/Waduk PLTA Ir. H. Djuanda dimulai tahun 1957 dan selesai tahun 1967. Dengan selesainya pembangunan tersebut, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 1967, Pemerintah menetapkan berdirinya Perusahaan Negara (PN) Djatiluhur yang bertugas menyelenggarakan Eksploitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Bendungan/Waduk dan PLTA Ir. H. Djuanda serta merintis pengembangan proyek-proyek selanjutnya. Dengan berfungsinya sebagian besar prasarana pengairan yang meliputi waduk, bendungan utama dan PLTA Ir. H. Djuanda serta jaringan irigasi, maka berdasarkan PP Nomor 20 Tahun 1970, Pemerintah menetapkan pendirian Perum Otorita Jatiluhur (POJ) yang kemudian diubah dengan PP Nomor 35 Tahun 1980. PP Nomor 20 Tahun 1970 jo. PP Nomor 35 Tahun 1980 disesuaikan dan disempurnakan menjadi PP Nomor 42 Tahun 1990 yang memperluas kewenangan, tugas serta lapangan usaha Perusahaan, selanjutnya dengan diterbitkannya PP Nomor 94 Tahun 1999, Perum Otorita Jatiluhur (POJ) diubah menjadi Perum Jasa Tirta II yang selanjutnya diatur kembali dengan PP Nomor 7 Tahun 2010 dan PP Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II ("Perusahaan").

b. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Perusahaan adalah turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, terutama di bidang Pengusahaan dan Pengelolaan Sumber Daya Air serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Dalam rangka melaksanakan maksud dan tujuan, Perusahaan melakukan kegiatan usaha:

- 1) Pelayanan air baku untuk air minum, industri, pertanian, penggelontoran, pelabuhan, pembangkit tenaga listrik dan pemenuhan kebutuhan air lainnya;
- 2) Penyediaan tenaga listrik kepada PT Perusahaan Listrik Negara dan/atau selain PT Perusahaan Listrik Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

a. Establishment and General Information

Construction of Dam/Reservoir of HEPP Ir. H. Djuanda began in 1957 and was completed in 1967. With the completion of the construction, then according to Government Regulation (PP) Number 8 Year 1967, the Government established the Perusahaan Negara (PN) Djatiluhur that is in charge of Exploitation and Maintenance of Dam/Reservoir Facilities and Infrastructure of HEPP Ir. H. Djuanda and pioneering the development of further projects. With the functioning of most irrigation infrastructure by which includes reservoirs, main dams and HEPP Ir. H. Djuanda as well as irrigation networks, then according to PP Number 20 Year 1970, the Government establishes the establishment of the Perum Otorita Jatiluhur (POJ) to which then amended by PP Number 35 Year 1980. PP Number 20 Year 1970 jo. PP Number 35 Year 1980 was adjusted and refined to PP Number 42 Year 1990 which expanded the authority, duties and field of business of the Company, then with the issuance of PP Number 94 Year 1999, the Perum Otorita Jatiluhur (POJ) was changed to Perum Jasa Tirta II by which it is regulated further with PP Number 7 Year 2010 and PP Number 25 Year 2022 concerning Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II ("The Company").

b. Purpose and Objective

The purpose and objective of the Company is to participate in implementing and supporting Government policies and programs in the national economy and development sector in general, especially in the field of Undertaking and Managing Water Resources as well as optimizing the utilization of Company resources to produce goods and services based on good corporate governance (GCG). In order to carry out the aims and objectives, the Company conducts business activities:

- 1) Raw water services for drinking water, industry, agriculture, flushing out, power plants and other water needs;
- 2) Supply of electricity to PT Perusahaan Listrik Negara and/or other than PT Perusahaan Listrik Negara in accordance with the provisions of laws and regulations;

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

3) Menyelenggarakan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) secara lokal dan/atau regional sampai dengan unit produksi, beserta perlengkapan dan perangkat operasionalnya bagi pemenuhan kebutuhan air minum dan/atau penyelenggara SPAM lainnya, dengan didasarkan pada rencana induk pengembangan SPAM yang ditetapkan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; 4) Mengembangkan pembangkit listrik melalui Energi Baru Terbarukan (EBT); 5) Penyediaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dan usaha minuman dalam kemasan lainnya; 6) Budidaya perikanan pada Sumber Daya Air; 7) Usaha air bersih untuk kebutuhan industri termasuk, tetapi tidak terbatas pada, proses produksi seperti air untuk sistem pendingin mesin; 8) Melakukan eksplorasi, eksploitasi dan pemurnian bahan tambang dan sumber air; 9) Melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki; 10) Pembangkitan, penyaluran listrik tenaga air, air minum, usaha jasa konsultasi di bidang teknologi Sumber Daya Air, penyewaan alat besar dan jasa laboratorium kualitas air; dan 11) Pengembangan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum).	3) Carry out the development of Drinking Water Supply Systems (SPAM) locally and/or regionally up to production units, along with operational equipment and devices to meet the needs of drinking water and/or other SPAM operators, based on the SPAM development master plan stipulated by the Central Government and/or Regional Government; 4) Develop power plants through Renewable Energy (EBT); 5) Supply of Bottled Drinking Water (AMDK) and other packaged beverage businesses; 6) Aquaculture in Water Resources; 7) Clean water business for industrial needs including, but not limited to, production processes such as water for engine cooling systems; 8) Exploring, exploiting and refining mining materials and water sources; 9) Carrying out business activities in order to optimize the utilization of potential resources owned; 10) Generation, distribution of hydropower, drinking water, business consulting services in the field of Water Resources technology, large equipment rental and water quality laboratory services; and 11) Development of SPAM (Drinking Water Supply System).

c. Lokasi Perusahaan dan Wilayah Kerja

Lokasi Usaha Perusahaan
Jl. Lurah Kawi No. 01, Jatiluhur, Purwakarta,
Jawa Barat.

c. The Company Location and Work Area

Working areas of the Company
Jl. Lurah Kawi No. 1, Jatiluhur, Purwakarta,
West Java.

Unit Usaha	Lokasi/ Location	Business Unit
Unit Wilayah I	Bekasi	Regional I Unit
Unit Wilayah II	Karawang	Regional II Unit
Unit Wilayah III	Subang	Regional III Unit
Unit Wilayah IV	Jatiluhur	Regional IV Unit
Unit PLTA	Jatiluhur	Hydropower Unit
Unit Usaha Pariwisata dan Hotel	Jatiluhur	Tourism and Hotel Business Unit

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

**d. Dewan Pengawas dan Perangkat Kerjanya,
Direksi dan Karyawan
Dewan Pengawas**

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Wakil Pemerintah sebagai Pemilik Modal Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II No: SK-214/MBU/09/2022 tanggal 21 September 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II, memutuskan memberhentikan Mohamad Sofwan dan mengangkat Fakthurohman Taufik sebagai anggota Dewan Pengawas. Susunan Keanggotaan Dewan Pengawas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut:

	2022
Ketua	Kelik Wirawan Wahyu W
Anggota	Nuning Sri Rejeki W
Anggota	Romy Marcandi
Anggota	Fatkurohman Taufik
Sekretaris	
Dewan Pengawas	Yusuf Abdullah Musthofa

Direksi

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-222/MBU/08/2018 tanggal 1 Agustus 2018 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II, Nomor: SK-196/MBU/06/2020 tanggal 11 Juni 2020 tentang Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II dan Nomor: SK-350/MBU/10/2020 tanggal 27 Oktober 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II dan Nomor: SK-301/MBU/09/2021 tanggal 9 September 2021 tentang Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengalihan Tugas Anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II Nomor: SK-420/MBU/12/2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II, susunan Direksi pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut:

**d. Board of Supervisors and Its Working Units,
Directors and Employees
Board of Supervisory**

Based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as the Representative of the Government as the Shareholder of Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II No: SK-214/MBU/09/2022 dated September 21, 2022 concerning Dismissal and Appointment of the Members of the Supervisory Board of Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II, decided to dismiss Mohamad Sofwan and appointed Fakthurohman Taufik. The Supervisory Board as of December 31, 2022 and 2021 is as follows:

	2021	
Kelik Wirawan Wahyu W		Chairman
Nuning Sri Rejeki W		Member
Romy Marcandi		Member
Mohamad Sofwan		Member
Yusuf Abdullah Musthofa		Secretary of the Supervisory Board

Directors

Based on the Decree of the Minister of SOE Number: SK-222/MBU/08/2018 dated August 1, 2018 concerning Dismissal, Change of Position Nomenclature, and Appointment of Members of the Board of Directors of Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II, Number: SK-196/MBU/06/2020 dated June 11, 2020 regarding Changes in Position Nomenclature and Appointment of Members of the Board of Directors of Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II and Number: SK-350/MBU/10/2020 dated October 27, 2020 concerning Dismissal and Appointment of the President Director of Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II and Number: SK-301/MBU/09/2021 dated September 9, 2021 concerning Changes in Position Nomenclature and Transfer of Duties of Members of the Board of Directors of Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II Number: SK-420/MBU/12/2021 dated December 29, 2021 concerning Dismissal, Transfer of Duties and Appointment of Members of the Board of Directors of Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II, composition of the Board of Directors on December 31, 2022 and 2021 as follows:

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	2022	2021	
Direktur Utama	Imam Santoso	Imam Santoso	President Director
Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia (SDM) dan Manajemen Risiko	Indriani Widiastuti	Indriani Widiastuti	Director of Finance, Human Resources (HR) and Risk Management
Direktur Operasi dan Pemeliharaan	Anton Mardiyono	Anton Mardiyono	Director of Operating and Maintenance
Direktur Pengembangan Usaha	Dikdik Permadi Yoffana	Dikdik Permadi Yoffana	Director of Business Development

Komite Audit

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komite Audit Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II Nomor: KEP-02/DEWAS/II/2021 tanggal 29 Januari 2021 dan Nomor: KEP-04/DEWAS/XI/2022 tanggal 14 Oktober 2022, susunan keanggotaan Komite Audit pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut:

Audit Committees

Based on the Decree of the Supervisory Board of Perum Jasa Tirta II concerning the Dismissal and Appointment of the Chairman of the Audit Committee of Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II Number: KEP-02/DEWAS/II/2021 dated January 29, 2021 and Number: KEP/DEWAS/XI/2022 dated October 14, 2022, the composition of the Audit Committee membership as of December 31, 2022 and 2021 is as follows:

	2022	2021	
Ketua	Nuning Sri Rejeki W	Nuning Sri Rejeki W	Chairman
Anggota	Emirio Fajar	Wawan Saeful Anwar	Member
Anggota	Agus Waluyo	Agus Waluyo	Member

Komite Pemantau Manajemen Risiko

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II Nomor: KEP-84/DEWAS/XI/2020 tanggal 5 November 2020 tentang Pengangkatan Ketua Komite Pemantau Risiko Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II dan Nomor: KEP-85/DEWAS/XI/2020 tanggal 5 November 2020 tentang Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II, susunan keanggotaan Komite Pemantau Manajemen Risiko pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut:

Risk Management Monitoring Committee

Based on the Decree of the Supervisory Board of Perum Jasa Tirta II Number: KEP-84/DEWAS/XI/2020 dated November 5, 2020 regarding the Appointment of the Chairman of the Risk Monitoring Committee of Public Company (Perum) Jasa Tirta II and Number: KEP-85/DEWAS/XI/2020 dated November 5, 2020 regarding the Appointment of Members of the Risk Management Monitoring Committee for Public Company (Perum) Jasa Tirta II, the composition of the membership of the Risk Management Monitoring Committee on December 31, 2022 and 2021 is as follows:

	2022	2021	
Ketua	Romy Marcandi	Romy Marcandi	Chairman
Anggota	Kandianawati	Kandianawati	Member

e. Sumber Daya Manusia (SDM)

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, jumlah SDM Perusahaan terdiri dari (tidak diaudit):

e. Human Resources (HR)

As of December 31, 2022 and 2021, the total HR of the Company consists of (unaudited):

	2022	2021	
Organik	1,049	1,041	Organic
Non Organik	--	5	Non Organic
Jumlah	1,049	1,046	Total

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

f. Struktur Grup

Pada laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan dan entitas anak secara bersama-sama disebut sebagai "Grup". Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, struktur Grup adalah sebagai berikut:

f. Group Structure

In these consolidated financial statements, the Company and its subsidiaries are collectively referred to as "the Group". As of December 31, 2022 and 2021 the structure of the Group is as follows:

Entitas Anak/ Subsidiaries	Lokasi/ Location	Kegiatan Usaha/ Scope of Business	Tahun Berdiri/ Year of Establishment	Persentase Kepemilikan dan Jumlah Aset Sebelum Eliminasi/ Percentage of Ownership and Total Assets Before Elimination			
				2022		2021	
				%	Rp	%	Rp
<u>Dikonsolidasi/ Consolidated</u>							
<u>Kepemilikan Langsung/ Direct Ownership</u>							
PT Jasa Tirta Luhur	Bekasi	Jasa Sistem Penyediaan Air Minum dan Konstruksi/ Drinking Water Supply System Service and Construction	2018	99.00%	60,621,444,594	99.00%	49,602,816,487
<u>Kepemilikan Tidak Langsung Melalui Entitas Anak/ Indirect Ownership Through Subsidiary</u>							
PT Tegar Mandiri Cemerlang	Bekasi	Industri dan Pengelolaan Air/ Industry and Water Management	2013	51.00%	44,803,388,901	51.00%	40,233,934,126

Kepemilikan Langsung
PT Jasa Tirta Luhur (JTL)

PT Jasa Tirta Luhur didirikan berdasarkan Akta No. 46 tanggal 29 Agustus 2018, dari Putranto Nur Utomo, S.H., M.Kn, Notaris di Bogor dan telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat keputusannya No. AHU-0042191.AH.01.01 Tahun 2018 tanggal 5 September 2018. Akta Pendirian ini mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 155 tanggal 11 Mei 2021 dari Putranto Nur Utomo, S.H., M.Kn, Notaris di Bogor tentang pengalihan saham PT Pilar Jati Persada ke PT Air Sumber Kemakmuran. Perubahan ini telah diterima pemberitahuannya dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam suratnya No. AHU-AH.01.03-0308897 tanggal 17 Mei 2021.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kemitraan atau Kerjasama Operasional No: 7 tanggal 2 September 2022 dari Putranto Nur Utomo, S.H., M.Kn, notaris di Bogor, Perusahaan sepakat untuk membentuk Kerjasama Operasi dengan PT Air Sumber Kemakmuran dengan nama Jasa Tirta Luhur JO Air Kemakmuran. Keikutsertaan modal (*sharing*) dalam Kerjasama Operasi adalah 60% untuk Perusahaan dan 40% untuk PT Air Sumber Kemakmuran, dimana masing

Direct Ownership
PT Jasa Tirta Luhur (JTL)

PT Jasa Tirta Luhur was established based on Deed No. 46 dated August 29, 2018, from Putranto Nur Utomo, S.H., M.Kn, Notary in Bogor and has received approval from the Ministry of Law and Human Rights through its decree No. AHU-0042191.AH.01.01 Year 2018 dated September 5, 2018. This Deed of Establishment has been amended several times, most recently by Deed No. 155 dated May 11, 2021 from Putranto Nur Utomo, S.H., M.Kn, Notary in Bogor regarding the transfer of shares of PT Pilar Jati Persada to PT Air Sumber Kemakmuran. Notification of this change has been received from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its letter No. AHU-AH.01.03-0308897 dated May 17, 2021.

Based on the Deed of Partnership Agreement or Joint Operation No. 7 dated September 2, 2022 from Putranto Nur Utomo, S.H., M.Kn, a Notary in Bogor, the Company agreed to form a Joint Operation with PT Air Sumber Kemakmuran under the name of Jasa Tirta Luhur JO Air Sumber Kemakmuran. Capital participation (*sharing*) percentage in this Joint Operation is 60% for the Company and 40% for PT Air Sumber Kemakmuran, where each

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

masing peserta akan mengambil bagian sesuai *sharing* dalam hal pengeluaran, keuntungan dan kerugian dari Kerjasama Operasi.

Kepemilikan Tidak Langsung

PT Tegar Mandiri Cemerlang (TMC)

PT Tegar Mandiri Cemerlang didirikan berdasarkan Akta No. 16 tanggal 16 Mei 2013, dari Soeleman Odang, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat keputusannya No. AHU-44847.AH.01.01. Tahun 2013 tanggal 27 Agustus 2013. Akta Pendirian mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 08 tanggal 6 Agustus 2020, dari Henry Susanto, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Karawang tentang Perubahan Maksud dan Tujuan Perseroan. TMC beroperasi sejak Agustus 2018.

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

participant will take part according to the sharing percentage in terms of expenses, profits and losses from the Joint Operation.

Indirect Ownership

PT Tegar Mandiri Cemerlang (TMC)

PT Tegar Mandiri Cemerlang was established based on Deed No. 16 dated May 16, 2013, of Soeleman Odang, Notary in Jakarta and has received approval from the Minister of Law and Human Rights through his decree No. AHU-44847.AH .01.01. Year 2013 dated August 27, 2013. The Deed of Establishment was amended several times, most recently with Deed No. 08 dated August 6, 2020, of Henry Susanto, S.H., M.Kn, Notary in Karawang Regency regarding Changes in the Purposes and Objectives of the Company. TMC has been operating since August 2018.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi penting yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup. Kebijakan ini telah diaplikasikan secara konsisten terhadap semua tahun yang disajikan, kecuali dinyatakan lain.

a. Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK - IAI).

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Biaya perolehan umumnya didasarkan pada nilai wajar imbalan yang diserahkan dalam pemerolehan aset.

2. Summary of Significant Accounting Policies

Presented below are the significant accounting policies adopted in preparing the consolidated financial statements of the Group. These policies have been consistently applied to all the years presented, unless otherwise stated.

a. Compliance with the Financial Accounting Standards (SAK)

The consolidated financial statements were prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which include the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standard Board - Indonesian Institute of Accountant (DSAK - IAI).

b. Basis of Preparation of Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements have been prepared and presented based on going concern assumption and accrual basis of accounting, except for the consolidated statements of cash flows. Basis of measurement in preparation of these consolidated financial statements is the historical costs concept, except for certain accounts which have been prepared on the basis of other measurements as described in their respective policies. Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for assets.

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Laporan arus kas konsolidasian disajikan dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Grup. Setiap entitas di dalam Grup mengatur mata uang fungsional itu sendiri dan unsur-unsur dalam laporan keuangan dari setiap entitas diukur berdasarkan mata uang fungsional tersebut.

c. Pernyataan dan Interpretasi Standar Akuntansi Baru dan Revisi yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

Standar baru dan amendemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- Amendemen PSAK 22: Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual;
- Amendemen PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Merugi - Biaya Memenuhi Kontrak;
- Amendemen PSAK 16: Aset Tetap tentang Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan;
- PSAK 69 (Penyesuaian Tahunan 2020): Agrikultur;
- PSAK 71 (Penyesuaian Tahunan 2020): Instrumen Keuangan; dan
- PSAK 73 (Penyesuaian Tahunan 2020): Sewa.

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

d. Prinsip - Prinsip Konsolidasian

Entitas anak merupakan semua entitas, dimana Grup memiliki pengendalian. Grup mengendalikan suatu entitas ketika Grup memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan suatu entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas entitas tersebut.

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

The consolidated statement of cash flow is presented based on the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities.

The presentation currency used in the preparation of these financial statements is Rupiah which is the functional currency of the Group. Each entity in the Group manages the functional currency itself and the elements in the financial statements of each entity are measured based on the functional currency.

c. New and Revised Statements and Interpretation of Financial Accounting Standards Effective in the Current Year

New standards and amendment to standard which effective for periods beginning on or after January 1, 2022, with early adoption is permitted, are as follows:

- Amendment PSAK 22: Business Combinations regarding Reference to Conceptual Frameworks;
- Amendment PSAK 57: Provisions, Contingent Liabilities, and Contingent Assets regarding Onerous Contracts – Cost of Fulfilling the Contracts;
- Amendment PSAK 16: Property, Plant and Equipment regarding Proceeds before Intended Use;
- PSAK 69 (Annual Improvement 2020): Agriculture;
- PSAK 71 (Annual Improvement 2020): Financial Instruments; and
- PSAK 73 (Annual Improvement 2020): Leases.

The implementation of these standards does not result in substantial changes to the Group's accounting policies and has no significant impact on the consolidated financial statements in the current period or the previous year.

d. Principles of Consolidation

Subsidiaries are all entities, over which the Group has control. The Group controls an entity when the Group is exposed to, or has rights to, variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its power over the entity.

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Entitas anak dikonsolidasi sejak tanggal pengendalian beralih kepada Grup dan tidak lagi dikonsolidasi sejak tanggal hilangnya pengendalian.

Saldo, transaksi, penghasilan dan beban intra kelompok usaha dieliminasi. Keuntungan dan kerugian hasil dari transaksi intra kelompok usaha yang diakui dalam aset juga dieliminasi. Kebijakan akuntansi entitas anak telah diubah seperlunya untuk memastikan konsistensi penerapan kebijakan oleh Grup.

Grup mengatribusikan laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain kepada pemilik entitas induk dan kepentingan nonpengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan nonpengendali memiliki saldo defisit. Grup menyajikan kepentingan nonpengendali di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

Transaksi dengan kepentingan non-pengendali yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Selisih antara nilai wajar imbalan yang dibayarkan dan bagian yang diakuisisi atas nilai tercatat aset neto entitas anak dicatat pada ekuitas. Keuntungan atau kerugian pelepasan kepentingan non-pengendali juga dicatat pada ekuitas.

Jika Grup kehilangan pengendalian, maka Grup:

- a) Menghentikan pengakuan aset (termasuk *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada jumlah tercatatnya ketika pengendalian hilang;
- b) Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan nonpengendali pada entitas anak terdahulu ketika pengendalian hilang (termasuk setiap komponen penghasilan komprehensif lain yang diatribusikan pada kepentingan nonpengendali);
- c) Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima (jika ada) dari transaksi, peristiwa, atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian;
- d) Mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian;

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Subsidiaries are consolidated from the date on which control is transferred to the Group. They are de-consolidated from the date when that control ceases.

Intragroup balances, transactions, income and expenses are eliminated. Profits and losses resulting from intragroup transactions that are recognized in assets are also eliminated. The accounting policies of subsidiaries have been amended where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Group.

The Group attributed the profit or loss and each component of other comprehensive income to the owners of the parent and non-controlling interest even though this results in the non-controlling interests having a deficit balance. The Group presents non-controlling interest in equity in the consolidated statement of financial position, separately from the equity owners of the parent entity.

Transactions with non-controlling interests that do not result in a loss of control are accounted for as equity transactions. The difference between the fair value of any consideration paid and the relevant share acquired of the carrying value of net assets of the subsidiary is recorded in equity. Gains or losses on disposals to non-controlling interests are also recorded in equity.

If the Group loses control, the Group will:

- a) *Derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiary at their carrying amounts at the date when control is lost;*
- b) *Derecognizes the carrying amount of any non-controlling interests in the former subsidiary at the date when control is lost (including any components of other comprehensive income attributable to them);*
- c) *Recognizes the fair value of the consideration received (if any) from the transaction, event or circumstances that resulted in the loss of control;*
- d) *Recognizes any investment retained in the former subsidiary at fair value at the date when control is lost;*

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021

(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- e) Mereklasifikasi ke laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh SAK lain, jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dalam kaitan dengan entitas anak;
- f) Mengakui perbedaan apapun yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi yang diatribusikan kepada entitas induk.

e. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

- a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
- b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
 - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor;
 - vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);

- e) *Reclassifies to profit or loss, or transfer directly to retained earnings if required by other SAKs, the amount recognized in other comprehensive income in relation to the subsidiary;*
- f) *Recognizes any resulting difference as a gain or loss in profit or loss which attributable to the parent.*

e. Transactions with Related Parties

A related party is a person or an entity that is related to the reporting entity:

- a. *A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:*
 - i. *Has control or joint control over the reporting entity;*
 - ii. *Has significant influence over the reporting entity; or*
 - iii. *Is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.*
- b. *An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:*
 - i. *The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);*
 - ii. *One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);*
 - iii. *Both entities are joint ventures of the same third party;*
 - iv. *One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;*
 - v. *The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity;*
 - vi. *The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a);*

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

- vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).i memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); atau
- viii. Entitas atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Entitas yang berelasi dengan pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh pemerintah. Pemerintah mengacu kepada pemerintah, instansi pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional.

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah dapat berupa entitas yang dikendalikan atau dipengaruhi secara signifikan oleh Kementerian Keuangan atau entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan yang relevan.

f. Investasi pada Entitas Asosiasi

Entitas asosiasi adalah entitas yang mana investor memiliki pengaruh signifikan. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional *investee*, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut.

Jika entitas memiliki secara langsung maupun tidak langsung (contohnya melalui entitas anak), 20% atau lebih hak suara *investee*, maka entitas dianggap memiliki pengaruh signifikan, kecuali dapat dibuktikan dengan jelas bahwa entitas tidak memiliki pengaruh signifikan. Sebaliknya, jika entitas memiliki, secara langsung maupun tidak langsung (contohnya melalui entitas anak), kurang dari 20% hak suara *investee*, maka entitas dianggap tidak memiliki pengaruh signifikan, kecuali pengaruh signifikan tersebut dapat dibuktikan dengan jelas. Kepemilikan substansial atau mayoritas oleh investor lain tidak menghalangi entitas untuk memiliki pengaruh signifikan.

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- vii. A person identified in (a).i has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity); or
- viii. The entity or any members of a group of which it is a part, provides key management personnel service to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

A government-related entity is an entity that is controlled, jointly controlled or significant influence by a government. Government refers to government, government agencies and similar bodies whether local, national or international.

Government related entity can be an entity which controlled or significantly influenced by the Ministry of Finance or an entity controlled by the Government of Republic of Indonesia, represented by the State Minister for State Owned Enterprises as a shareholder's representative.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant Notes.

f. Investments in Associates

An associate is an entity in which the investor has significant influence. Significant influence is the power to participate in financial and operating policy decisions investee, but not control or joint control over those policies.

If the entity has directly or indirectly (e.g through subsidiaries), 20% or more of the voting power of the investee, it shall be deemed to have significant influence, unless it can be clearly demonstrated that the entity does not have significant influence. Conversely, if an entity has, directly or indirectly (e.g through subsidiaries), less than 20% of the voting rights investee, it shall be considered not to have significant influence, unless such a significant influence can be clearly demonstrated. Substantial or majority ownership by another investor does not preclude an entity to have a significant influence.

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Penyisihan kerugian penurunan nilai atas penyertaan saham dibentuk apabila berdasarkan pendapat manajemen terdapat penurunan nilai secara permanen atas nilai penyertaan.

Investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Dalam metode ekuitas, pengakuan awal investasi diakui sebesar biaya perolehan, dan jumlah tercatat ditambah atau dikurang untuk mengakui bagian atas laba rugi *investee* setelah tanggal perolehan. Bagian atas laba rugi *investee* diakui dalam laba rugi. Penerimaan distribusi dari *investee* mengurangi nilai tercatat investasi. Penyesuaian terhadap jumlah tercatat tersebut juga mungkin dibutuhkan untuk perubahan dalam proporsi bagian investor atas *investee* yang timbul dari penghasilan komprehensif lain, termasuk perubahan yang timbul dari revaluasi aset tetap dan selisih penjabaran valuta asing. Bagian investor atas perubahan tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

Grup menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal ketika investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi sebagai berikut:

- a. Jika *investee* menjadi entitas anak.
- b. Jika sisa kepentingan dalam entitas asosiasi merupakan aset keuangan, maka Grup mengukur sisa kepentingan tersebut pada nilai wajar.
- c. Ketika Grup menghentikan penggunaan metode ekuitas, Grup mencatat seluruh jumlah yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan investasi tersebut menggunakan dasar perlakuan yang sama dengan yang disyaratkan jika *investee* telah melepaskan secara langsung aset dan liabilitas terkait.

g. Instrumen Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Grup mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika dan hanya jika, Grup menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan, Grup mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

The allowance for impairment losses on investments in shares is made when in the opinion of the management, there is a permanent decline in the value of the investment.

Investment in associates accounted for using the equity method. Under the equity method, the investment in an associate is initially recognised at cost and the carrying amount plus or minus to recognize the investor's share of the profit or loss of the investee after the date of acquisition. The investor's share of the profit or loss of the investee is recognized in profit or loss. Distributions received from an investee reduce the carrying amount of the investment. Adjustments to the carrying amount may also be necessary for changes in the investor's proportionate interest in the investee arising from changes in the investee's other comprehensive income, including those arising from the revaluation of property, plant and equipment and from foreign exchange translation differences. The investor's share of those changes is recognized in other comprehensive income.

The Group discontinue the use of the equity method from the date when its investment ceases to be an associate as follows:

- a. If the investee becomes a subsidiary.
- b. If the retained interest in the former associate is a financial asset, the Group measure the retained interest at fair value.
- c. When the Group discontinue the use of the equity method, the Group account for all amounts previously recognized in other comprehensive income in relation to that investment on the same basis as would have been required if the investee had directly disposed of the related assets or liabilities.

g. Financial Instruments

Initial Recognition and Measurement

The Group recognizes a financial asset or a financial liability in the consolidated statement of financial position when and only when, it becomes a party to the contractual provisions of the instrument. At initial recognition, the Group measures financial assets and financial liabilities, at its fair value. In the case of a financial asset or financial liability not measured at fair value through profit or loss, fair value plus or minus

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

tersebut ditambah atau dikurang dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung untuk memperoleh atau menerbitkan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut. Biaya transaksi yang dikeluarkan untuk memperoleh aset keuangan dan menerbitkan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan segera.

Pengukuran Selanjutnya Aset Keuangan

Aset keuangan Grup diklasifikasikan sebagai berikut: aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, serta aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dengan menggunakan dua dasar, yaitu: model bisnis Grup dalam mengelola aset keuangan dan karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan.

- i. Aset Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi
Aset keuangan dapat diukur dengan biaya perolehan diamortisasi hanya jika memenuhi kedua kondisi berikut dan tidak ditetapkan sebagai FVTPL:
 - a. Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan untuk tujuan mendapatkan arus kas kontraktual (*held to collect*); dan
 - b. Kriteria kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu menghasilkan arus kas yang merupakan pembayaran pokok dan bunga (*solely payments of principal and interest - SPPI*) dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan ini diukur pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan dikurangi dengan pembayaran pokok, kemudian dikurangi atau ditambah dengan jumlah amortisasi kumulatif atas perbedaan jumlah pengakuan awal dengan jumlah pada saat jatuh tempo, dan penurunan nilainya.

Pendapatan keuangan dihitung dengan metode menggunakan suku bunga efektif dan diakui di laba rugi. Perubahan pada nilai wajar diakui di laba rugi ketika aset dihentikan atau direklasifikasi.

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

with the transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of the financial asset or financial liability. Transaction costs incurred on acquisition of a financial asset and issue of a financial liability classified at fair value through profit or loss are expensed immediately.

Subsequent Measurement of Financial Assets

The Group financial assets are classified into the following specified categories: financial assets at amortized costs, financial assets at fair value through other comprehensive income, and financial assets at fair value through profit or loss on the basis of both: the Group's business model for managing the financial assets and the contractual cash flow characteristics of the financial assets.

- i. Financial Assets Measured at Amortized Costs
A financial asset is measured at amortized cost only if it meets both of the following conditions and it is not designated as at FVTPL:
 - a. The financial assets is held within a business model whose objective is to hold the asset to collect contractual cash flows (*held to collect*); and
 - b. Its contractual terms give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest ("SPPI") on the principal amount outstanding.

The financial asset is measured at the amount recognized at initial recognition minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization of any difference between that initial amount and the maturity amount, and any loss allowance.

Interest income is calculated using the effective interest method and is recognized in profit or loss. Changes in fair value are recognized in profit and loss when the asset is derecognized or reclassified.

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Aset keuangan yang diklasifikasikan menjadi aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dapat dijual ketika terdapat peningkatan risiko kredit. Penghentian untuk alasan lain diperbolehkan namun jumlah penjualan tersebut harus tidak signifikan jumlahnya atau tidak sering.

- ii. Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain ("FVTOCI")
Aset keuangan diukur pada FVTOCI jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- a. Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- b. Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang hanya berasal dari pembayaran pokok dan bunga (*solely payments of principal and interest - SPPI*) dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan tersebut diukur sebesar nilai wajar, dimana keuntungan atau kerugian diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian akibat penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, diakui pada laba rugi. Ketika aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau direklasifikasi, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

- iii. Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi ("FVTPL")
Aset keuangan yang diukur pada FVTPL adalah aset keuangan yang tidak memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau untuk diukur FVTOCI.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

Aset keuangan berupa derivatif dan investasi pada instrumen ekuitas tidak memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Financial assets classified to amortized cost may be sold where there is an increase in credit risk. Disposals for other reasons are permitted but such sales should be insignificant in value or infrequent in nature.

- ii. *Financial Assets Measured at Fair Value Through Other Comprehensive Income ("FVTOCI")*
The financial assets are measured at FVTOCI if these conditions are met:

- a. *The financial asset is held within a business model whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows and selling the financial asset; and*
- b. *The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flow that are solely payments of principal and interest ("SPPI") on the principal amount outstanding.*

The financial assets are measured at fair value. The changes in fair value are recognized initially in other comprehensive income, except for impairment losses and gain or loss on foreign exchange, are recognized in profit or loss. When the asset is derecognized or reclassified, changes in fair value previously recognized in other comprehensive income and accumulated in equity are reclassified from equity to profit or loss as a reclassification adjustment.

- iii. *Financial Assets Measured at Fair Value Through Profit or Loss ("FVTPL")*
Financial assets measured at FVTPL are those which do not meet both criteria for neither amortized costs nor FVTOCI.

After initial recognition, FVTPL financial assets are measured at fair value. The changes in fair value are recognized in profit or loss.

Financial assets in form of derivatives and investment in equity instrument are not eligible to meet both criteria for amortized

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

perolehan diamortisasi atau kriteria untuk diukur pada FVTOCI, sehingga diukur pada FVTPL. Namun demikian, Grup dapat menetapkan pilihan yang tidak dapat dibatalkan saat pengakuan awal atas investasi pada instrumen ekuitas yang bukan untuk diperjualbelikan dalam waktu dekat (*held for trading*) untuk diukur pada FVTOCI. Penetapan ini menyebabkan semua keuntungan atau kerugian disajikan di penghasilan komprehensif lain, kecuali pendapatan dividen tetap diakui di laba rugi. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke saldo laba tidak melalui laba rugi.

Pengukuran Selanjutnya Liabilitas Keuangan

Grup mengklasifikasikan seluruh liabilitas keuangan sehingga setelah pengakuan awal liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, kecuali:

- i. Liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas dimaksud, termasuk derivatif yang merupakan liabilitas, selanjutnya akan diukur pada nilai wajar.
- ii. Liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan yang tidak memenuhi kualifikasi penghentian pengakuan atau ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan.
- iii. Kontrak jaminan keuangan dan komitmen untuk menyediakan pinjaman dengan suku bunga dibawah pasar. Setelah pengakuan awal, penerbit kontrak dan penerbit komitmen selanjutnya mengukur kontrak tersebut sebesar jumlah yang lebih tinggi antara:
 - a. Jumlah penyisihan kerugian dan
 - b. Jumlah yang pertama kali diakui dikurangi dengan, jika sesuai, jumlah kumulatif dari penghasilan yang diakui sesuai dengan prinsip PSAK 72.
- iv. Imbalan kontinjensi yang diakui oleh pihak pengakusisi dalam kombinasi bisnis ketika PSAK 22 diterapkan. Imbalan kontinjensi selanjutnya diukur pada nilai wajar dan selisihnya dalam laba rugi.

Saat pengakuan awal, Grup dapat membuat penetapan yang takterbatalkan untuk mengukur liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

costs or FVTOCI. Hence, these are measured at FVTPL. Nonetheless, the Group may irrevocably designated an investment in an equity instrument which is not held for trading in any time soon as measured at FVTOCI. This designation result in gains and losses to be presented in other comprehensive income, except for dividend income on a qualifying investment which is recognized in profit or loss. Cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are reclassified to retained earnings, not to profit or loss.

Subsequent Measurement of Financial Liabilities

The Group shall classify all financial liabilities as subsequently measured at amortised cost, except for:

- i. Financial liabilities at fair value through profit or loss. Such liabilities, including derivatives that are liabilities, shall be subsequently measured at fair value.
- ii. Financial liabilities that arise when a transfer of a financial asset does not qualify for derecognition or when the continuing involvement approach applies.
- iii. Financial guarantee contracts and commitments to provide a loan at a below-market interest rate. After initial recognition, an issuer of such a contract and an issuer of such a commitment shall subsequently measure it at the higher of:
 - a. The amount of the loss allowance and
 - b. The amount initially recognised less, when appropriate, the cumulative amount of income recognised in accordance with the principles of PSAK 72.
- iv. Contingent consideration recognized by an acquirer in a business combination to which PSAK 22 applies. Such contingent consideration shall subsequently be measured at fair value with changes recognised in profit or loss.

The Group may, at initial recognition, irrevocably designate a financial liability as measured at fair value through profit or loss when permitted by

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021

(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

rugi, jika diizinkan oleh standar atau jika penetapan akan menghasilkan informasi yang lebih relevan, karena:

- i. Mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (kadang disebut sebagai "accounting mismatch") yang dapat timbul dari pengukuran aset atau liabilitas atau pengukuran keuntungan dan kerugian atas aset atau liabilitas dengan dasar yang berbeda-beda; atau
- ii. Sekelompok liabilitas keuangan atau aset keuangan dan liabilitas keuangan dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai manajemen risiko atau strategi investasi yang terdokumentasi, dan informasi dengan dasar nilai wajar dimaksud atas kelompok tersebut disediakan secara internal untuk personil manajemen kunci Grup.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir atau Grup mengalihkan hak kontraktual untuk menerima kas yang berasal dari aset keuangan atau tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima kas tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan. Jika Grup secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Grup menghentikan pengakuan aset keuangan dan mengakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas untuk setiap hak dan kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki dalam pengalihan tersebut. Jika Grup secara substansial tidak mengalihkan dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut dan masih memiliki pengendalian, maka Grup mengakui aset keuangan sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut. Jika Grup secara substansial masih memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Grup tetap mengakui aset keuangan tersebut.

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

the standard or when doing so results in more relevant information, because either:

- i. It eliminates or significantly reduces a measurement or recognition inconsistency (sometimes referred to as "an accounting mismatch") that would otherwise arise from measuring assets or liabilities or recognising the gains and losses on them on different bases; or*
- ii. A group of financial liabilities or financial assets and financial liabilities is managed, and its performance is evaluated on a fair value basis, in accordance with a documented risk management or investment strategy, and information about the group is provided internally on that basis to the Group's key management personnel.*

Derecognition of Financial Assets and Liabilities

The Group derecognized a financial asset when and only when the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire or the Group transfers the contractual rights to receive the cash flows of the financial asset or retains the contractual rights to receive the cash flows but assumes a contractual obligation to pay the cash flows to one or more recipients in an arrangement. If the Group transfers substantially all the risks and benefits of ownership of the financial asset, the Group derecognize the financial asset and recognize separately as asset or liabilities for any rights and obligation created or retained in the transfer. If the Group neither transfers nor retains substantially all risks and benefits of ownership of the financial asset and has retained control, the Group continue to recognize the financial asset to the extent of its continuing involvement in the financial asset. If the Group retains substantially all the risks and benefits of ownership of the financial asset, the Group continues to recognize the financial asset.

The Group removes a financial liability when and only when, it is extinguished, i.e. when the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expires.

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Grup mengakui penyisihan kerugian untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup mengukur penyisihan kerugian instrumen keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

Namun, jika risiko kredit instrumen keuangan tersebut tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, maka Grup mengakui sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan.

Grup menerapkan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap piutang usaha dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan.

Grup menganggap aset keuangan gagal bayar ketika pihak ketiga tidak mampu membayar kewajiban kreditnya kepada Grup secara penuh. Periode maksimum yang dipertimbangkan ketika memperkirakan kerugian kredit ekspektasian adalah periode maksimum kontrak dimana Grup terekspos terhadap risiko kredit.

Penyisihan kerugian diakui sebagai pengurang jumlah tercatat aset keuangan kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada FVTOCI yang penyisihan kerugiannya diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Sedangkan jumlah kerugian kredit ekspektasian (atau pemulihan kerugian kredit) diakui dalam laba rugi, sebagai keuntungan atau kerugian penurunan nilai.

Penyisihan kerugian diakui sebagai pengurang jumlah tercatat aset keuangan, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada FVTOCI yang penyisihan kerugiannya diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Jumlah kerugian kredit ekspektasian (atau pemulihan kerugian kredit) diakui dalam laba rugi, sebagai keuntungan atau kerugian penurunan nilai aset keuangan.

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian dari instrumen keuangan dilakukan dengan suatu cara yang mencerminkan:

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Impairment of Financial Assets

Group recognize expected credit loss for its financial assets measured at amortized cost.

At the end of each reporting date, the Group calculates any impairment provision in financial instruments based on its lifetime expected credit loss if the credit risk of the financial instruments has increased significantly since its initial recognition.

However, if credit risk has not increased significantly since initial recognition, then 12 months expected credit loss (stage 1) is recognized.

The Group applied a simplified approach to measure such expected credit loss for trade receivables and contract assets without significant financing component.

The Group considers a financial asset to be in default when the counterparty is unlikely to pay its credit obligations to the Group in full. The maximum period considered when estimating expected credit loss is the maximum contractual period over which the Group is exposed to credit risk.

Impairment losses are recognized as a deduction in financial assets' carrying amount, except for financial assets measured at FVTOCI where its impairment is recognized in other comprehensive income. The expected credit loss (or recovery of credit loss) is recognized in profit or loss, as gains or losses of financial asset impairment.

Impairment losses are recognized as a deduction in financial assets' carrying amount, except for financial assets measured at FVTOCI where its impairment is recognized in other comprehensive income. The expected credit loss (or recovery of credit loss) is recognized in profit or loss, as gains or losses of financial asset impairment.

The expected credit loss of financial instruments are conducted by a means which reflect:

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021

(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- i. Jumlah yang tidak bias dan rata-rata probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi serangkaian kemungkinan yang dapat terjadi;
- ii. Nilai waktu uang; dan
- iii. Informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan.

Aset keuangan dapat dianggap tidak mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal jika aset keuangan memiliki risiko kredit yang rendah pada tanggal pelaporan. Risiko kredit pada instrumen keuangan dianggap rendah ketika aset keuangan tersebut memiliki risiko gagal bayar yang rendah, peminjam memiliki kapasitas yang kuat untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya dalam jangka waktu dekat dan memburuknya kondisi ekonomi dan bisnis dalam jangka waktu panjang mungkin, namun tidak selalu, menurunkan kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya. Untuk menentukan apakah aset keuangan memiliki risiko kredit rendah, Grup dapat menggunakan peringkat risiko kredit internal atau penilaian eksternal. Misal, aset keuangan dengan peringkat "investment grade" berdasarkan penilaian eksternal merupakan instrumen yang memiliki risiko kredit yang rendah, sehingga tidak mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal.

Metode Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan (atau kelompok aset atau liabilitas keuangan) dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh jumlah tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, Grup mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, seperti pelunasan dipercepat, opsi beli dan opsi serupa lain, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit masa depan. Perhitungan ini

- i. An unbiased and probability-weighted amount that reflects a range of possible outcomes;
- ii. Time value of money; and
- iii. Reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort about past events, current conditions and forecasts of future conditions.

Financial assets may be considered to not having significant increase in credit risk since initial recognition if the financial assets have a low credit risk at the reporting date. Credit risk on financial instrument may be considered be low if there is a low risk of default, the borrower has a strong capacity to meet its contractual cash flow obligations in the near term and adverse changes in economic and business conditions in the longer term may, but will not necessarily, reduce the ability of the borrower to fulfil its contractual cash flow obligations. To determine whether a financial asset has a low credit risk, the Group may use internal credit risk rating or external assessment. For example, a financial asset with "investment grade" according to external assessment has a low credit risk rating, thus it does not experience an increase in significant credit risk since initial recognition.

The Effective Interest Method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial asset or a financial liability (or group of financial assets of financial liabilities) and method of allocating the interest income or interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discount estimated life of the financial instrument or, when appropriate, a shorter period to the net carrying amount of the financial asset or financial liability. When calculating the effective interest rate, the Group estimates cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, for example, prepayment, call and similar option, but shall not consider future credit losses. The calculation includes all fees and points paid or received between parties to the contract that are an integral part of the effective interest rate, transaction costs, and all other premiums or discounts.

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021

(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima oleh pihak - pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premium atau diskonto lain.

Reklasifikasi

Grup dapat mereklasifikasi seluruh aset keuangan jika dan hanya jika, terjadi perubahan model bisnis.

Ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan, maka Perusahaan menerapkan reklasifikasi secara prospektif dari tanggal reklasifikasi. Grup tidak menyajikan kembali keuntungan, kerugian (termasuk keuntungan atau kerugian penurunan nilai), atau bunga yang diakui sebelumnya.

Ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi menjadi kategori FVTPL, nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi. Pada saat Grup melakukan reklasifikasi sebaliknya, yaitu dari aset keuangan kategori FVTPL menjadi kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi, maka nilai wajar pada tanggal reklasifikasi menjadi jumlah tercatat bruto yang baru.

Pada saat Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi menjadi kategori FVTOCI, nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar aset keuangan diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi. Ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan sebaliknya, yaitu keluar dari kategori FVTOCI menjadi kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan direklasifikasi pada nilai wajarnya pada tanggal reklasifikasi. Akan tetapi keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dihapus dari ekuitas dan disesuaikan terhadap nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi. Akibatnya, pada tanggal reklasifikasi aset keuangan diukur seperti halnya jika aset keuangan tersebut selalu diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Penyesuaian ini memengaruhi penghasilan

Reclassification

The Group can reclassify all its financial assets if and only if, a change in the business model.

If the Group reclassifies a financial asset, it is required to apply the reclassification prospectively from the reclassification date. Previously recognized gains, losses (including impairment gains or losses) or interest are not restated.

When the Group reclassifies its financial asset out of the amortized cost into FVTPL, then its fair value is measured at reclassification date. Any gains or losses resulted from the difference between previous amortized cost and its fair value is recognized in profit or loss. Otherwise, if the Group reclassifies its financial asset from FVTPL into amortized cost, then its fair value at the date of reclassification becomes new gross carrying amount.

When the Group reclassifies its financial asset out of the amortized cost into FVTOCI, its fair value is measured at the reclassification date. Any gains or losses resulted from the difference between previous amortized cost and fair value is recognized in other comprehensive income. Effective interest rate and expected credit loss measurement are not adjusted as a result of the reclassification. Otherwise, when the Group reclassifies its financial asset out of FVTOCI into amortized cost, the financial asset is reclassified by its fair value at the reclassification date. However, any cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are omitted from equity and adjusted to the financial asset's fair value at the date of reclassification. Consequently, at the reclassification date, the financial asset is measured the same way as if it were amortized cost. This adjustment affects other comprehensive income but not profit or loss, and hence it is not a reclassification adjustment. Effective interest rate and expected credit loss are no longer adjusted as a result of the reclassification.

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

komprehensif lain tetapi tidak memengaruhi laba rugi, dan karenanya bukan merupakan penyesuaian reklasifikasi. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi.

Pada saat Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran FVTPL menjadi kategori pengukuran FVTOCI, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya. Sama halnya, ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori FVTOCI menjadi kategori pengukuran FVTPL, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui di penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi pada tanggal reklasifikasi.

Saling Hapus Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan, jika dan hanya jika, Grup saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berintens untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

Nilai wajar dikategorikan dalam level yang berbeda dalam suatu hierarki nilai wajar berdasarkan pada apakah input suatu pengakuan dapat diobservasi dan signifikan input terhadap keseluruhan pengukuran nilai wajar:

- i. Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran (Level 1);
- ii. Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung (Level 2);

When the Group reclassifies its financial asset out of the FVTPL into FVTOCI, the financial asset is measured at its fair value. Similarly, when the Group reclassifies its financial asset out of the FVTOCI into FVTPL, the financial asset is measured at its fair value. Any gains or losses previously recognized in other comprehensive income are reclassified out of the equity to profit or loss as a reclassification adjustment at the date of reclassification.

Offsetting a Financial Asset and a Financial Liability

A financial asset and financial liability shall be offset when and only when, the Group currently has a legally enforceable right to sell off the recognized amount; and intends either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

Fair Value Measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

The fair value of financial assets and financial liabilities must be estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes.

Fair values are categorized into different levels in a fair value hierarchy based on the degree to which the inputs to the measurement are observable and the significance of the inputs to the fair value measurement in its entirety:

- i. *Quotation price (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that can be accessed at the measurement date (Level 1);*
- ii. *Inputs other than quotation prices included in Level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly or indirectly (Level 2);*

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- iii. Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Level 3).

Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, Grup sebisa mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi. Apabila nilai wajar aset atau liabilitas tidak dapat diobservasi secara langsung, Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Perpindahan antara level hierarki nilai wajar diakui oleh Grup pada akhir periode pelaporan dimana perpindahan terjadi.

h. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal penempatannya dan tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.

Deposito berjangka yang dijadikan jaminan untuk bank garansi tidak diklasifikasikan sebagai dari "Kas dan Setara Kas". Kas yang dibatasi penggunaannya dan deposito berjangka ini disajikan sebagai bagian dari "Aset Keuangan Lancar Lainnya" atau "Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya".

i. Piutang Retensi

Piutang retensi merupakan piutang Grup kepada pemberi kerja yang akan dilunasi setelah penyelesaian kontrak atau pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak. Piutang retensi dicatat pada saat pemotongan sejumlah persentase tertentu dari setiap tagihan termin untuk ditahan oleh pemberi kerja sampai suatu kondisi setelah penyelesaian kontrak dipenuhi.

j. Tagihan Bruto kepada Pemberi Kerja

Tagihan bruto kepada pemberi kerja merupakan piutang yang berasal dari pekerjaan kontrak konstruksi yang dilakukan untuk pemberi kerja namun pekerjaan yang dilakukan masih dalam pelaksanaan.

Tagihan bruto kepada pemberi kerja diakui sebagai pendapatan sesuai dengan metode persentase penyelesaian yang dinyatakan dalam berita acara pekerjaan, dimana faktur belum dapat ditagihkan karena perbedaan antara tanggal berita acara kemajuan (*progres*) fisik dengan pengajuan penagihan pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

- iii. Unobservable inputs for the assets or liabilities (Level 3).

When measuring the fair value of an asset or a liability, the Group uses market observable data to the extent possible. If the fair value of an asset or a liability is not directly observable, Group uses valuation techniques that appropriate in the circumstances and maximizes the use of relevant observable inputs and minimizes the use of unobservable inputs.

Transfers between levels of the fair value hierarchy are recognized by the Group at the end of the reporting period during which the change occurred.

h. Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash on hand, cash in banks and time deposits with maturity of 3 (three) months or less from the placement date and are not pledged as collateral and are not restricted.

Time deposits which are pledged as collateral for bank guarantees are not classified as "Cash and Cash Equivalents". These restricted cash and time deposits are presented as part of "Other Current Financial Assets" or "Other Non-Current Financial Assets".

i. Retention Receivable

Retention receivable represents the Group's receivable from owner of the project which will be paid after completion of the contract or fulfillment of certain condition in the contract. Retention receivable is recorded when certain percentage deduction is applied in every invoice which retained by the owner of the project until certain condition after completion of the contract has been met.

j. Gross Amount Due From Customer

Gross amount due from customer is receivable arising from construction contracts undertaken for the customers while the work undertaken is in progress.

Gross amount due from customers is recognized as revenue based on the percentage of completion method which is stated on the certificate of work completion, while the invoice is still unbilled due to the difference between the date of physical progress certificates and the submission of billing on the consolidated statements of financial position date.

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

k. Persediaan

Persediaan dinyatakan berdasarkan jumlah terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Biaya perolehan terdiri dari seluruh biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Biaya perolehan ditentukan metode FIFO (*first in, first out*). Nilai realisasi neto merupakan taksiran harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

Penyisihan penurunan nilai persediaan dibentuk berdasarkan penelaahan fisik persediaan pada akhir periode.

Setiap penurunan nilai persediaan di bawah biaya perolehan menjadi nilai realisasi neto dan seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai realisasi neto, diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah beban persediaan pada periode terjadinya pemulihan tersebut.

l. Pembayaran di Muka

Pembayaran di muka terdiri atas biaya dibayar di muka dan uang muka.

Biaya dibayar di muka merupakan biaya yang telah dibayar untuk masa manfaat dua belas bulan atau lebih.

Biaya dibayar di muka diamortisasi sesuai dengan masa manfaat masing-masing biaya menggunakan metode garis lurus.

Uang muka merupakan sejumlah kas keluar atau biaya yang dikeluarkan Grup untuk suatu kegiatan atau suatu hal yang nantinya akan mendapat pertanggungjawaban dalam waktu tertentu dan telah ditetapkan.

m. Aset Tetap

Biaya perolehan awal aset tetap meliputi harga perolehan, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan sesuai dengan tujuan penggunaan yang ditetapkan.

Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya,

k. Inventories

Inventories are carried at the lower of cost and net realizable value. The cost of inventories comprises all costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition. Cost is determined using the FIFO (first in, first out) method. Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

Allowance for decrease in value of inventory is provided based on the physical check of inventory at the end of the period.

The amount of any write-down of inventories to net realizable value and all losses of inventories shall be recognized as an expense in the period the write-down or loss occurs. The amount of any reversal of any write-down of inventories, arising from an increase in net realizable value, is recognized as a reduction in the amount of inventories recognizes as an expense in the period in which the reversal occurs.

l. Prepayments

Prepayments consist of prepaid expenses and advances.

Prepaid expenses represent expenses that have been paid for the useful life of twelve months or more.

Prepaid expenses are amortized over their beneficial periods using the straight-line method.

Advances are an amount of cash out or costs incurred by the Group for an activity or something that will be accounted for within a specified and predetermined time.

m. Fixed Assets

The initial of acquisition cost of fixed assets consists of its purchase price, including import duties and taxes and any directly attributable costs in bringing the fixed assets to its working condition and location for its intended-on use.

The cost includes the cost of replacing part of the fixed asset when the cost occurs, if it meets the recognition criteria. Further, when a

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat (*carrying amount*) aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya.

Grup telah memilih untuk menggunakan model biaya sebagai kebijakan akuntansi untuk pengukuran aset tetapnya.

Aset tetap, kecuali tanah dan hak atas tanah, dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai, jika ada.

Nilai tercatat aset tetap ditelaah kembali dan dilakukan penurunan nilai apabila terdapat peristiwa atau perubahan kondisi tertentu yang mengindikasikan nilai tercatat tersebut tidak dapat dipulihkan sepenuhnya.

Aset kerjasama operasi adalah tanah Grup yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama operasi. Bangunan kantor yang diperoleh sebagai kompensasi dalam kerjasama operasi dan pendapatan diterima di muka terkait diakui pada saat aset tersebut selesai dibangun dan siap digunakan sesuai dengan tujuannya. Pendapatan diterima di muka diakui selama periode Kerjasama Operasi (KSO).

Aset dan aset KSO dinyatakan pada nilai dapat diperoleh kembali pada saat kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan keadaan mengindikasikan bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat diperoleh kembali. Penurunan nilai aset, jika ada, diakui sebagai rugi pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya (*derecognized*) pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Aset tetap yang dijual atau dilepaskan, dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutan dan amortisasi serta akumulasi penurunan nilai yang terkait dengan aset tetap tersebut. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap ditentukan sebesar perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan, jika ada, dengan jumlah tercatat dari aset tetap tersebut, dan diakui dalam laporan rugi komprehensif pada tahun terjadinya penghentian pengakuan.

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

significant inspection is performed, the cost of the inspection is recognized in the carrying amount of the fixed asset as a replacement if it meets the recognition criteria. All maintenance and repair costs that do not meet the recognition criteria are recognized in the statement of income as incurred.

The Group has chosen to use the cost model as the accounting policy for the measurement of its fixed assets.

Fixed assets, except land and landrights, are stated at acquisition cost less any accumulated depreciation and impairment losses, if any.

The carrying values of fixed assets are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that the carrying values may not be recoverable.

The joint operation assets are the Group's land used to conduct joint operation activities. The office buildings acquired as compensation in the joint operation and the related earnings in advanced are recognized when the assets are completed and ready for its intended use. Unearned income is recognized during the period of Joint Operation (JO).

Assets and the joint operation (JO) assets are stated at estimated recoverable amount whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be fully recoverable. Impairment in asset values, if any, is recognized as a loss in the statements of profit or loss and other comprehensive income.

The carrying amount of fixed asset is derecognized at the time of disposal or when no future economic benefit is expected from its use or disposal. Fixed asset sold or disposed of, are removed from the accounts with the accumulated depreciation and amortization and accumulated impairment losses associated with fixed asset. Gains or losses arising from the termination of recognition of fixed assets are determined at the difference between the net amount of disposal proceeds, if any, and the carrying amount of fixed assets and recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income in the year of the cessation of the recognition.

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Biaya kemudian setelah biaya perolehan pertama kali

Biaya pemeliharaan dan perbaikan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat aset atau yang memberikan tambahan manfaat ekonomis berupa peningkatan kapasitas atau mutu produksi dari aset, dikapitalisasi dan disusutkan sesuai dengan tarif penyusutan yang berlaku.

Costs then after the first acquisition costs

The cost of maintenance and repairs is charged as an expense when incurred. Expenditures which extend the useful life of an asset or provide further economic benefits by increasing the capacity or quality of production of the asset, are capitalized and depreciated based on the applicable depreciation rate.

Penyusutan

Penyusutan dimulai sejak aset mulai atau siap digunakan, dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis yang menghasilkan persentase penyusutan tahunan dari biaya perolehan sebagai berikut:

Depreciation

Depreciation starts at commencement of assets or when the assets are ready to use, using the straight-line method based on the estimated useful lives of the economies resulting in an annual percentage of depreciation of the following cost:

Kelompok Aset Tetap	Umur/ Useful Life (Year)	Group of Assets
	Ekonomis/ Economic (Tahun/Year)	
Bangunan	10-50	Buildings
Sarana	10-20	Facilities
Instalasi dan Jaringan	2-20	Installations and Networks
Suku Cadang Penyangga	4-10	Supporting Spareparts
Perabotan dan Peralatan	4-5	Furnitures and Equipments
Alat Angkut dan Alat Berat	4-5	Vehicles and Heavy Equipments
Tanaman Konservasi	40	Plant Conservation

Aset Dalam Pelaksanaan (ADP)

Aset dalam pelaksanaan dinyatakan sebesar biaya perolehan sesuai persentase penyelesaian pekerjaan dan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Ketika telah selesai dan siap digunakan, akumulasi biaya perolehan direklasifikasi ke akun aset tetap yang sebenarnya.

Assets Under Construction (ADP)

Assets under construction are stated at acquisition cost based on the percentage of completion and presented as a part of fixed assets. Once it is completed and ready to use, accumulated acquisition costs are reclassified to the actual fixed assets account.

Aset Tanaman Konservasi

Merupakan tanaman hidup yang digunakan dalam rangka konservasi yang jangka waktu tanamannya lebih dari 1 (satu) periode dan memiliki kemungkinan yang sangat jarang untuk dijual sebagai produk agrikultur, kecuali untuk penjualan sisa yang insidental.

Plant Conservation Assets

Represents plants used in the context of conservation by which the plant period is more than 1 (one) period and have very rare possibilities to be sold as agricultural products, except for residual sales that are insidental.

Tanaman konservasi terdiri dari:

Plant conservation assets consist of:

- **Tanaman Konservasi – Dewasa**, yaitu tanaman konservasi yang secara teknis pertanian tidak memerlukan lagi biaya untuk menunjang pertumbuhan yang bersangkutan. Dengan demikian, segala pengeluaran yang berkenaan dengan Tanaman Konservasi – Dewasa (jika ada) diklasifikasikan sebagai beban pemeliharaan tanaman.

- **Conservation Plants – Mature**, is conservation plants that technically do not require more agricultural costs to support the growth of the plants. Thus, all expenses in relation to Conservation Plants - Mature (if any) are classified as plant maintenance expenses.

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

- **Tanaman Konservasi – Dalam Pertumbuhan**, yaitu tanaman konservasi yang secara teknis pertanian masih memerlukan pembiayaan dalam rangka pertumbuhan biologis sampai dengan tanaman tersebut menjadi dewasa. Biaya yang timbul meliputi biaya perolehan bibit, penyemaian, penanaman, pemupukan, biaya penjagaan/pengamanan dan biaya-biaya pertumbuhan tanaman lainnya sampai dengan tanaman tersebut siap menjadi dewasa (*mature*).

Aset Tidak Produktif/ Tidak Berfungsi

Merupakan aset tetap yang tidak memberikan manfaat dalam aktivitas produksi atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya dikategorikan sebagai aset tidak produktif/ tidak berfungsi dan disajikan pada aset tidak lancar lainnya.

Aset tidak produktif/ tidak berfungsi dilakukan penurunan nilai sebesar nilai tercatatnya pada saat tidak lagi memberikan manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaannya. Akumulasi penurunan nilai aset tidak produktif dibentuk sebagai penerapan atas akuntansi penurunan nilai.

Penghapusbukuan dan pemindahtanganan aset tetap mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-02/MBU/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aset Tetap Badan Usaha Milik Negara.

Aset tidak produktif dihentikan pengakuannya bilamana telah mendapat persetujuan penghapusan dari Dewan Pengawas dan/atau Pemegang Saham.

Keuntungan atau kerugian yang diperoleh dari hasil penjualan aset tetap tidak produktif usulan penghapusan ini, diakui pada kelompok pendapatan atau beban lain-lain.

Reviu atas Masa Manfaat Aset dan Nilai Sisa

Grup menerapkan besaran nilai residu setiap jenis aset tetapnya yaitu Rp1.000.

Taksiran masa manfaat, nilai residu dan metode penyusutan direviu minimal setiap akhir tahun buku dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi akuntansi diterapkan secara prospektif.

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- **Conservation Plants – In Growth**, is conservation plants that are in agricultural technical still need financing to support biological growth until the plants mature. Costs incurred include costs for obtaining seedlings, seeding, planting, fertilizing, safeguarding costs, and costs for the growth of other plants until they are ready to mature.

Non-Productive/ Non-Functioning Assets

Represents fixed assets that do not provide benefits in production activity, or no future economic benefits are expected from the use or disposal of assets are classified as non-productive/ non-functioning and are presented in other non-current assets.

Non-productive/ non-functioning assets will be impaired at its carrying amount at the time those assets are no longer provide future economic benefits are expected from its use. Accumulated impairment of non-productive assets is formed as the application of the accounting of impairment.

The write-off and the alienation of fixed assets is in accordance with the regulation designated in the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-02/MBU/2010 regarding Procedure for Written-off and Alienation of Fixed Assets of State-Owned Enterprises.

Non-productive assets are derecognized when write-off approval from the Board of Commissioners and/or Shareholders has been received.

Any gain or loss realized from the sale of fixed assets proposed the elimination unproductive it was recognized in the group income or other expenses.

Review of Useful Lives of Assets and Residual Value

The Group applies the residual value of each type of fixed asset at Rp1,000.

The estimated useful lives, residual values and depreciation method are reviewed at least every year end and the effect of any changes in accounting estimate are applied on a prospective basis.

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Aset Kelola

Aset kelola adalah aset berwujud milik negara yang digunakan dalam aktivitas operasi Grup, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal Grup, tetapi tidak dicatat sebagai harta Grup sesuai kebijakan pemerintah. Aset kelola terdiri dari sungai, waduk, bendungan, saluran induk, tanggul, jalan inspeksi, stasiun pompa air Curug, tower Morning Glory dan minihydro PLTA.

n. Aset Takberwujud

Aset takberwujud terdiri dari perangkat lunak (*software*) dan lisensi. Aset takberwujud diakui jika kemungkinan besar Grup akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset takberwujud tersebut dan biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal.

Aset takberwujud dicatat berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan penurunan nilai. Aset takberwujud diamortisasi selama estimasi masa manfaatnya. Grup mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset takberwujud.

Perangkat lunak diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat aset takberwujud, di mana untuk perangkat lunak (*software*) diamortisasi selama 4 (empat) tahun tanpa nilai residu, sedangkan untuk lisensi diamortisasi selama 10 (sepuluh) tahun tanpa nilai residu sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/KM.6/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tanggal 2 April 2018 tentang Masa Manfaat dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Barang Aset Takberwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

Aset takberwujud dihentikan pengakuannya ketika aset tersebut dilepaskan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasan aset tersebut. Selisih dalam laporan antara nilai tercatat aset dengan hasil neto yang diterima dari pelepasannya diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

o. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan diterima di muka adalah penerimaan uang dari pihak lain sehubungan dengan jasa yang akan dilakukan oleh entitas di masa depan, tetapi jasa tersebut belum diserahkan kepada pihak tersebut.

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Managed Assets

Managed assets represent stated-owned tangible assets that is used in the Group's operational activities, not intended for sale in the Group's normal activities nor recorded as the Group's assets in accordance with government policy. Managed assets consist of rivers, reservoirs, dams, primary canal, levees, inspection road, Curug pumping station, Morning Glory tower and minihydro.

n. Intangible Assets

Intangible assets consist of software and license. An intangible asset is recognized when it is probable that the Group will obtain future economic benefits from the intangible asset and the cost of the asset can be measured reliably.

Intangible assets are stated at cost less accumulated amortization and accumulated impairment losses. Intangible assets are amortized over their estimated useful lives. The Group estimates the recoverable amount of an intangible assets.

Softwares are amortized using the straight-line method based on the estimated useful lives of the intangible assets, whereas software are amortized for 4 (four) years with no residue value, while for licenses are amortized for 10 (ten) years with no residual value according to the Decree of Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 81/KM.6/2018 concerning Amendments to the Decree of Minister of Finance Number 620/KM.6/2015 dated April 2, 2018 concerning Useful Lives in the Context of Amortization of State-Owned Property in the Form of Intangible Assets in Central Government Entities.

An intangible asset is derecognized when the asset is disposed of or when no future economic benefits are expected from the use or disposal of the asset. The difference between the carrying amount of the asset and the net proceeds received from disposal is recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

o. Deferred Revenue

Deferred revenue are money received from other parties in relation to the services of products that will be performed by entities in the future, but the services have yet delivered to that party.

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

p. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Grup mengakui pendapatan sesuai dengan PSAK 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan", dengan melakukan analisis transaksi melalui metode lima langkah pengakuan pendapatan sebagai berikut:

- i. Identifikasi kontrak dengan pelanggan dengan kriteria sebagai berikut;
 - Kontrak telah disetujui oleh pihak-pihak terkait dalam kontrak
 - Grup bisa mengidentifikasi hak dari pihak-pihak terkait dan jangka waktu pembayaran dari barang atau jasa yang akan dialihkan
 - Kontrak memiliki substansi komersial
 - Besar kemungkinan Grup akan menerima imbalan atas barang atau jasa yang dialihkan
- ii. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan;
- iii. Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Grup membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak;
- iv. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah marjin;
- v. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

p. Revenue and Expense Recognition

The Group recognizes revenues in accordance with PSAK 72, "Revenue from Contracts with Customers", by performing transaction analysis through the five steps of income recognition model as follows:

- i. Identify contract(s) with a customer with certain criteria as follows:
 - The contract has been agreed by the parties involved in the contract
 - The Group can identify the rights of relevant parties and the term of payment for the goods or services to be transferred
 - The contract has commercial substance
 - It is probable that the Group will receive benefits for goods or services which is diverted.
- ii. Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct;
- iii. Determine the transaction price. Transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer. If the consideration promised in a contract includes a variable amount, the Group estimates the amount of consideration to which it expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer less the estimated amount of service level guarantee which will be paid during the contract period;
- iv. Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promised in the contract. Where these are not directly observable, the relative stand-alone selling price are estimated based on expected cost-plus margin;
- v. Recognize revenue when performance obligation is satisfied by transferring a promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of that goods or services).

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Dengan terpenuhi lima kriteria seluruhnya tersebut di atas, Grup mengakui pendapatan sebagai berikut:

- i. Pendapatan Listrik diakui pada saat dibuat Berita Acara Pemakaian Bulanan dikalikan dengan tarif yang telah ditetapkan yang menghasilkan jumlah tagihan yang harus dibayar oleh pelanggan.
- ii. Pendapatan Air diakui pada saat dibuat Berita Acara Pemakaian Bulanan dikalikan dengan tarif yang telah ditetapkan atau tagihan yang harus dibayar oleh pelanggan.
- iii. Pendapatan Konstruksi diakui sepanjang waktu kontrak yang dicatat dengan menggunakan metode persentase penyelesaian. Dengan metode ini, pendapatan yang diakui setara dengan estimasi terbaru dari total nilai kontrak dikalikan dengan tingkat penyelesaian sebenarnya yang ditentukan dengan mengacu pada keadaan fisik kemajuan pekerjaan. Kerugian diakui secara penuh ketika dapat diukur secara andal, terlepas dari tingkat penyelesaian.
- iv. Pendapatan Pariwisata diakui pada saat jasa tersebut diberikan atau dimanfaatkan oleh pengunjung pariwisata, setelah dikurangi kewajiban pajak dan pelayanan.
- v. Pendapatan Pemanfaatan Lahan diakui saat timbulnya hak atas pemanfaatan lahan/ diterbitkan tagihan dan sebesar kas diterima sesuai masa sewa periode akuntansi, tidak termasuk pajak.

Beban

Beban diakui sesuai dengan masa manfaatnya pada periode yang bersangkutan (*accrual basis*).

q. Imbalan Kerja

Imbalan Kerja Jangka Pendek

Imbalan kerja jangka pendek merupakan imbalan kerja yang dibayarkan dalam waktu kurang dari satu tahun, meliputi antara lain gaji, upah, bonus dan iuran jaminan sosial. Kewajiban pembayaran imbalan ini diakui sebesar jumlah tidak terdiskonto dan dibebankan pada laporan rugi komprehensif tahun berjalan serta dicatat sebagai beban yang masih harus dibayar.

Imbalan Kerja Jangka Panjang

Imbalan kerja jangka panjang merupakan imbalan kerja yang akan dibayarkan/terutang setelah pekerja menyelesaikan masa kerjanya. Kewajiban pembayaran imbalan ini diakui

With all of five criterias above are fulfilled, the Group recognizes revenue as follows:

- i. Electricity Revenue is recognized when the Minutes of Monthly Electricity Usage multiplied by a predetermined rate which resulted in the amount of bills to be paid by the customer.
- ii. Water Revenue is recognized when Minutes of Monthly Usage are made multiplied by a predetermined rates or charges to be paid by the customer.
- iii. Construction Revenue is recognized over time which accounted for using the percentage of completion method. Under this method, the revenue recognized equals the latest estimate of the total value of the contract multiplied by the actual completion rate determined by reference to the physical state of progress of the works. The loss is provided for in full as soon as it is can be reliably measured, irrespective of the completion rate,
- iv. Tourism Revenue is recognized when the services are provided or utilized by tourism visitors, net of tax liabilities and services.
- v. Land Utilization Revenue is recognized when the right of utilization/ issuance of invoice and the amount of cash received according to the lease term for the accounting period, excluding tax.

Expense

Expenses are recognized in accordance with the useful life of the period (*accrual basis*).

q. Employment Benefits

Short-Term Employee Benefits

Short-term employee benefits represent employee benefits that are paid in less than one year, including salaries, wages, bonuses and social security contributions. The obligation to pay these benefits is recognized at an undiscounted amount and charged to the statement of comprehensive loss for the year and recorded as accrued expenses.

Long-Term Employee Benefits

Long-term employee benefits represent employee benefits that will be paid/payable after the employee has completed his tenure. The obligation to pay these benefits is recognized at

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

sebesar jumlah yang didiskontokan dan jatuh tempo setelah satu periode akuntansi dan diakui sebagai beban pada laporan laba rugi komprehensif dan liabilitas.

Bagian kewajiban yang akan jatuh tempo dalam waktu satu periode akuntansi akan dicatat sebagai liabilitas jangka pendek dan bagian kewajiban yang akan jatuh tempo setelah satu periode akuntansi dicatat sebagai liabilitas jangka panjang.

Imbalan kerja jangka panjang meliputi:

Imbalan Pascakerja

Imbalan pascakerja seperti pensiun, uang pisah dan uang penghargaan masa kerja dihitung berdasarkan Undang-undang Cipta Kerja No. 10/2020 untuk tahun 2021 dan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 untuk tahun 2020 atau Perjanjian Kerja Bersama ("PKB"), mana yang lebih tinggi.

Grup mengakui jumlah liabilitas imbalan pasti neto sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program yang dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan imbalan tersebut.

Grup mencatat tidak hanya kewajiban hukum berdasarkan persyaratan formal program imbalan pasti, tetapi juga kewajiban konstruktif yang timbul dari praktik informal entitas.

Biaya jasa kini, biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, serta bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto diakui dalam laba rugi.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, imbal hasil atas aset program dan setiap perubahan dampak batas atas aset diakui sebagai penghasilan komprehensif lain.

Pesangon

Grup mengakui pesangon sebagai liabilitas dan beban pada tanggal yang lebih awal di antara:

- Ketika Grup tidak dapat lagi menarik tawaran atas imbalan tersebut; dan
- Ketika Grup mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam ruang

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

the discounted amount and matures after one accounting period and is recognized as an expense in the statement of comprehensive income and a liability.

The portion of liabilities that will mature within one accounting period will be recorded as short-term liabilities and the portion of liabilities that will mature after one accounting period are recorded as long-term liabilities.

Post-employment benefits consist of:

Post-employment Benefit

Post-employment benefits such as retirement, severance and service payments are calculated based on the Omnibus Law No. 10/2020 for the year 2021 and Labor Law No. 13/2003 or Collective Labor Agreement ("PKB"), whichever is higher.

The Group recognizes the amount of the net defined benefit liability at the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets which calculated by independent actuaries using the Projected Unit Credit method. Present value benefit obligation determine by discounting the benefit.

The Group account not only for its legal obligation under the formal terms of a defined benefit plan, but also for any constructive obligation that arises from the entity's informal practices.

Current service cost, past service cost and gain or loss on settlement, and net interests on the net defined benefit liability (asset) are recognized in profit and loss.

The remeasurement of the net defined benefit liability (assets) comprises actuarial gains and losses, the return on plan assets, and any change in effect of the asset ceiling are recognized in other comprehensive income.

Termination Benefits

The Group recognizes a liability and expense for termination benefits at the earlier of the following dates:

- When the Group can no longer withdraw the offer of those benefits; and*
- When the Group recognizes costs for a restructuring that is within the scope of*

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

lingkup PSAK 57 dan melibatkan
pembayaran pesangon.

Imbalan Jangka Panjang Lainnya

Grup memberikan imbalan kerja jangka panjang lainnya dalam bentuk cuti besar dan penghargaan masa kerja. Perkiraan biaya imbalan ini diakui sepanjang masa kerja karyawan, dengan menggunakan metodologi akuntansi yang hampir sama dengan metodologi yang digunakan dalam program imbalan pascakerja manfaat pasti, kecuali untuk keuntungan dan kerugian aktuarial yang diakui pada laba rugi.

r. Pajak Penghasilan

Beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui dalam laba rugi, kecuali pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau secara langsung di ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihannya diakui sebagai aset. Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan undang-undang pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan.

Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari:

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

PSAK 57 and involves payment of
termination benefits.

Other Long-Term Benefits

The Group provides other long-term employee benefits in the form of grand leave and long service award. The expected costs of these benefits are accrued over the period of employment, using accounting methodology similar to that for post-employment defined benefit plans, except for actuarial gain and losses which is recognised in profit or loss.

r. Income Tax

Tax expense is the aggregate amount included in the determination of profit or loss for the period in respect of current tax and deferred tax. Current tax and deferred tax is recognized in profit or loss, except for income tax arising from transactions or events that are recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is recognized in other comprehensive income or equity, respectively.

Current tax for current and prior periods shall, to the extent unpaid, be recognised as a liability. If the amount already paid in respect of current and prior periods exceeds the amount due for those periods, the excess shall be recognised as an asset. Current tax liabilities (assets) for the current and prior periods shall be measured at the amount expected to be paid to (recovered from) the taxation authorities, using the tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

Tax benefits relating to tax loss that can be carried back to recover current tax of a previous periods is recognized as an asset. Deferred tax asset is recognized for the carryforward of unused tax losses and unused tax credit to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the unused tax losses and unused tax credits can be utilized.

A deferred tax liability shall be recognised for all taxable temporary differences, except to the extent that the deferred tax liability arises from:

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

- a. Pengakuan awal *goodwill*; atau
- b. Pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba dimaksud, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan. Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Grup memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan. Grup mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Setiap pengurangan tersebut dilakukan pembalikan atas aset pajak tangguhan hingga kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya memadai.

Grup melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika:

- a. Grup memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan
- b. Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas:

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- a. *The initial recognition of goodwill; or*
- b. *The initial recognition of an asset or liability in a transaction which is not a business combination and at the time of the transaction, affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).*

A deferred tax asset shall be recognised for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary difference can be utilised, unless the deferred tax asset arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and at the time of the transaction affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period. The measurement of deferred tax liabilities and deferred tax assets shall reflect the tax consequences that would follow from the manner in which the Group expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of its assets and liabilities.

The carrying amount of a deferred tax asset reviewed at the end of each reporting period. The Group shall reduce the carrying amount of a deferred tax asset to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilised. Any such reduction shall be reversed to the extent that it becomes probable that sufficient taxable profit will be available.

The Group offset deferred tax assets and deferred tax liabilities if, and only if:

- a. *The Group has a legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities; and*
- b. *The deferred tax assets and the deferred tax liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either:*

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- i. Entitas kena pajak yang sama; atau
- ii. Entitas kena pajak yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diperkirakan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

Grup melakukan saling hapus atas aset pajak kini dan liabilitas pajak kini jika dan hanya jika, Grup:

- a. Memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui; dan
- b. Bermaksud untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

s. Penggunaan Saldo Laba Berdasarkan Rapat Pembahasan Bersama (RPB)

Penggunaan saldo laba yang dilakukan atas dasar Keputusan/ Rapat Pembahasan Bersama direalisasikan sesuai dengan isi keputusan tersebut. Penggunaan tersebut meliputi, tetapi tidak terbatas pada pembagian laba atau dividen, biaya pegawai dan penyisihan saldo laba ke cadangan umum. Pembagian laba tersebut tidak diperlakukan sebagai beban (*expense*) melainkan sebagai distribusi / pengurang saldo laba.

t. Sewa

Grup sebagai Penyewa

Pada permulaan kontrak, Grup menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, Grup akan menilai apakah:

- Grup memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomis dari penggunaan aset identifikasian; dan
- Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian.

- i. The same taxable entity; or
- ii. Different taxable entities which intend either to settle current tax liabilities and assets on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.

The Group offset current tax assets and current tax liabilities if, and only if, the Group:

- a. Has a legally enforceable right to set off a recognized amount; and
- b. Intends either to settle on a net basis, or to realize the assets and settle liabilities simultaneously.

s. Use of Retained Earnings Based on Joint Discussion Meetings ("RPB")

The use of retained earnings on the basis of Decisions / Minutes of Joint Discussion Meetings ("RPB") is realized in accordance with the contents of the decision. Such use includes, but is not limited to profit or dividends, employee costs and allowance for retained earnings to general reserves. Profit sharing is not treated as expense but rather as a distribution / deduction of retained earnings.

t. Lease

The Group as a Lessee

At inception of a contract, the Group assesses whether the contract is, or contains, a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified assets for a period of time in exchange for consideration.

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Group will assess whether:

- The Group has the right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use; and
- The Group has the right to direct the use of the asset.

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Pada tanggal permulaan sewa, Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna pada saat di awal, diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi:

- Jumlah pengukuran awal liabilitas sewa;
- Pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, dikurangi dengan insentif sewa;
- Biaya langsung awal yang dikeluarkan; dan
- Estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan oleh syarat dan ketentuan sewa.

Untuk kontrak yang mengandung komponen sewa dan tambahan satu atau lebih komponen sewa atau nonsewa, Grup mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dan harga tersendiri agregat dari komponen nonsewa.

Setelah tanggal permulaan, Grup mengukur aset hak-guna sebesar biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan nilai, jika ada.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Grup pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Grup akan mengeksekusi opsi beli, maka Grup menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Grup menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran berikut ini:

- Pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi dikurangi dengan piutang insentif sewa;

At the commencement date of the lease, the Group recognises a right-of-use asset and a lease liability. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises:

- The initial amount of the lease liability;*
- Lease payment made at or before the commencement date, less any lease incentive;*
- Initial direct cost incurred; and*
- An estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset to the condition required by the terms and conditions of the lease.*

For a contract that contains a lease component and one or more additional lease or non-lease components, the Group allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of their relative stand-alone prices and the aggregate stand-alone price of the non-lease components.

After the commencement date, the Group measures right-of-use assets at cost less any accumulated depreciation and any accumulated impairment losses, if any.

If the lease transfers ownership of the underlying asset to the Group by the end of the lease term or if the cost of the right-of-use asset reflects that the Group will exercise a purchase option, the Group depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset. Otherwise, the Group depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, using incremental borrowing rate. Generally, the Group uses its incremental borrowing rate as the discount rate.

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise the following:

- Fixed payments, including in-substance fixed payments less any lease incentive receivable;*

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

- Pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- Jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dengan jaminan nilai residual;
- Harga eksekusi opsi beli jika Grup cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut; dan
- Penalti karena penghentian awal sewa kecuali jika Grup cukup pasti untuk tidak menghentikan lebih awal.

Setelah tanggal permulaan, Grup mengukur liabilitas sewa dengan:

- Meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa;
- Mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan sewa yang telah dibayar; dan
- Mengukur kembali jumlah tercatat untuk merefleksikan penilaian kembali atau modifikasi sewa atau untuk merefleksikan pembayaran sewa tetap secara substansi revisian.

Sewa jangka pendek dan sewa yang aset dasarnya bernilai rendah

Grup memutuskan untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang dan sewa yang aset dasarnya bernilai rendah. Grup mengakui pembayaran sewa atas sewa tersebut sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Modifikasi sewa

Grup mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika:

- Modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih; dan
- Imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu.

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- *Variable lease payments that depend on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date;*
- *Amounts expected to be payable under a residual value guarantee;*
- *The exercise price under a purchase option that the Group is reasonably certain to exercise; and*
- *Penalties for early termination of a lease unless the Group is reasonably certain not to terminate early.*

After the commencement date, the Group shall measure the lease liability by:

- *Increasing the carrying amount to reflect interest on the lease liability;*
- *Reducing the carrying amount to reflect the lease payments made; and*
- *Remeasuring the carrying amount to reflect any reassessment or lease modifications, or to reflect revised in-substance fixed lease payments.*

Short-term leases and low-value leases

The Group has elected not to recognise right-of-use assets and lease liabilities for short-term leases that have a lease term of 12 months or less and low-value leases. The Group recognises the lease payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

Lease modification

The Group accounts for a lease modification as a separate lease if:

- *The modification increases the scope of the lease by adding the right to use one or more underlying assets; and*
- *The consideration for the lease increases by an amount commensurate with the stand-alone price for the increase in scope and any appropriate adjustments to that stand-alone price to reflect the circumstances of the particular contract.*

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Untuk modifikasi sewa yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, pada tanggal efektif modifikasi sewa, Grup:

- Mengukur kembali dan mengalokasikan imbalan kontrak modifikasian;
- Menentukan masa sewa dari sewa modifikasian;
- Mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian. Pada tanggal efektif modifikasi, tingkat diskonto revisian ditentukan sebagai suku bunga pinjaman inkremental Grup untuk sisa masa sewa;
- Menurunkan jumlah tercatat aset hak-guna untuk merefleksikan penghentian sebagian atau sepenuhnya sewa untuk modifikasi sewa yang menurunkan ruang lingkup sewa. Grup mengakui dalam laba rugi setiap keuntungan atau kerugian yang terkait dengan penghentian sebagian atau sepenuhnya sewa tersebut; dan
- Membuat penyesuaian terkait aset hak-guna untuk seluruh modifikasi sewa lainnya.

Grup sebagai Pesewa

Ketika Grup bertindak sebagai pesewa, Grup akan mengklasifikasi masing-masing sewanya baik sewa operasi atau sewa pembiayaan.

Untuk mengklasifikasi masing-masing sewa, Grup membuat penilaian secara keseluruhan atas apakah sewa mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar. Jika penilaian membuktikan hal tersebut, maka sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan; jika tidak, maka merupakan sewa operasi.

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

Klasifikasi sewa sebagai pembiayaan atau sewa operasi didasarkan pada substansi transaksi dan bukan pada bentuk kontraknya. Contoh dari situasi yang secara individual atau gabungan dalam kondisi normal mengarah pada sewa yang diklasifikasikan sebagai pembiayaan adalah:

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

For a lease modification that is not accounted for as a separate lease, at the effective date of the lease modification, the Group:

- *Remeasures and allocates the consideration in the modified contract;*
- *Determines the lease term of the modified lease;*
- *Remeasures the lease liability by discounting the revised lease payments using a revised discount rate. At the effective date of the modification, the revised discount rate is determined as the Group's incremental borrowing rate for the remainder of the lease term;*
- *Decreases the carrying amount of the right-of-use asset to reflect the partial or full termination of the lease for lease modifications that decrease the scope of the lease. The Group recognises in profit or loss any gain or loss relating to the partial or full termination of the lease; and*
- *Makes a corresponding adjustment to the right-of-use asset for all other lease modifications.*

The Group as a Lessor

When the Group acts as a lessor, it will classify each of its leases as either an operating lease or a finance lease.

To classify each lease, the Group makes an overall assessment of whether the lease transfers substantially all of the risks and rewards incidental to ownership of the underlying asset. If this is the case, then the lease is classified as a finance lease; if not, then it is an operating lease.

A lease is classified as a finance lease if it transfers substantially all the risks and rewards incidental to ownership. A lease is classified as an operating lease if the lease does not transfer substantially all the risks and benefits related to ownership of the asset.

The classification of leases as financing or operating leases is based on the substance of the transaction and not on the form of the contract. Examples of situations that individually or in combination under normal conditions leading to leases classified as financing are:

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. Sewa mengalihkan kepemilikan aset kepada penyewa pada akhir masa sewa.
2. Penyewa mempunyai opsi untuk membeli aset pada harga cukup rendah dibandingkan nilai wajar pada tanggal opsi mulai dapat dilaksanakan sehingga pada awal sewa dapat dipastikan bahwa opsi memang akan dilaksanakan.
3. Masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomis aset meskipun hak milik tidak dialihkan.
4. Pada awal sewa nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum secara substansial mendekati nilai wajar aset sewaan, dan;
5. Aset sewaan bersifat khusus dan dimana hanya lessee yang dapat menggunakannya tanpa perlu dimodifikasi secara material.

Indikator dari situasi yang secara individual atau gabungan dapat juga menunjukkan bahwa sewa diklasifikasikan sebagai pembiayaan adalah:

1. Jika penyewa dapat membatalkan sewa, maka rugi pesewa yang terkait dengan pembatalan ditanggung oleh penyewa.
2. Laba atau rugi dari fluktuasi nilai wajar residu dibebankan kepada penyewa (sebagai contoh, dalam bentuk potongan harga rental dan yang setara dengan sebagian besar hasil penjualan residu pada akhir sewa), dan
3. Penyewa memiliki kemampuan untuk melanjutkan sewa untuk periode kedua dengan nilai sewa yang secara substansial lebih rendah dari nilai pasar sewa.

1. Leases transfer ownership of assets to the lessee at the end of the lease period.
2. The lessee has the option to purchase assets at a price that is quite low compared to the fair value at the date the option can be exercised so that at the beginning of the lease it is certain that the option will be implemented.
3. The lease period is for the majority of the economic life of the asset even though the ownership rights are not transferred.
4. At the beginning of the lease, the present value of the minimum lease payments is substantially close to the fair value of the leased asset, and;
5. Leased assets are special and where only the lessee can use them without needing to be modified materially.

Indicators of situations that individually or collectively can also show that leases are classified as financing are:

1. If the lessee can cancel the lease, the lessor's loss related to the cancellation is borne by the lessee.
2. Gains or losses from fluctuations in the fair value of residuals are charged to the lessee (for example, in the form of a discounted rental price and which is equivalent to the majority of the proceeds of residual sales at the end of the lease), and
3. The lessee can continue leasing for a second period with a rental value that is substantially lower than the rental market value.

3. Sumber Ketidakpastian Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi Kritis

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

3. Source of Estimation Uncertainty and Critical Accounting Judgments

The preparation of the Group's consolidated financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in future periods.

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Asumsi utama masa depan dan sumber utama ketidakpastian estimasi lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

a. Penurunan Nilai Aset Keuangan

Grup menilai penurunan nilai pada aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi pada setiap tanggal pelaporan. Dalam menentukan apakah rugi penurunan nilai harus dicatat dalam laba rugi, manajemen harus mempertimbangkan informasi yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan. Grup menerapkan pendekatan disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian untuk menilai piutang usaha dan piutang yang masih akan diterima dan pendekatan umum untuk menilai investasi jangka panjang. Nilai tercatat piutang usaha dan piutang yang masih akan diterima telah diungkapkan masing-masing dalam Catatan 6 dan 8.

b. Sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian mengandung unsur sewa membutuhkan pertimbangan yang cermat untuk menilai apakah perjanjian tersebut memberikan hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomis dari penggunaan aset identifikasian dan hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian, bahkan jika hak tersebut tidak dijabarkan secara eksplisit di perjanjian.

Karena Grup tidak dapat dengan mudah menentukan suku bunga implisit, manajemen menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Grup sebagai tingkat diskonto. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, yang banyak di antaranya memerlukan pertimbangan untuk dapat secara andal mengukur penyesuaian yang diperlukan untuk sampai pada tingkat diskonto akhir.

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

a. Impairment of Financial Assets

The Group assesses impairment losses of financial assets at amortized cost at each reporting date. In determining whether an impairment loss should be recorded in profit or loss, management makes a judgment as to whether there is reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort about past events, current conditions and forecasts of future conditions. The Group applies simplified approach to measure accounts receivable and accrued revenue and general approach to measure long-term investments. The carrying amounts of accounts receivable and accrued revenue are disclosed in Notes 6 and 8.

b. Leases

Determining whether an arrangement is or contains a lease requires careful judgement to assess whether the arrangement conveys a right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use and right to direct the use of the asset, even if the right is not explicitly specified in the arrangement.

Since the Group could not readily determine the implicit rate, management uses the Group's incremental borrowing rate as a discount rate. There are a number factors to consider in determining an incremental borrowing rate, many of which need judgement in order to be able to reliably quantify any necessary adjustments to arrive at the final discount rates.

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, Grup mempertimbangkan faktor-faktor utama berikut: risiko kredit korporat Grup, jangka waktu sewa, jangka waktu pembayaran sewa, lingkungan ekonomi, waktu di mana sewa dimasukkan, dan mata uang di mana pembayaran sewa ditentukan.

Dalam menentukan jangka waktu sewa, Grup mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang menimbulkan insentif ekonomi untuk menggunakan opsi perpanjangan, atau tidak menggunakan opsi penghentian. Opsi perpanjangan (atau periode setelah opsi penghentian kontrak kerja) hanya termasuk dalam jangka waktu sewa jika cukup pasti akan diperpanjang (atau tidak dihentikan).

Nilai tercatat liabilitas sewa disajikan di Catatan 25.

c. Pajak Penghasilan

Perhitungan beban pajak penghasilan Grup memerlukan pertimbangan dan asumsi dalam menentukan pengurangan beban tertentu selama proses pengestimasian. Semua pertimbangan dan estimasi yang dibuat manajemen dapat dipertanyakan oleh Direktorat Jenderal Pajak ("DJP").

Sebagai akibatnya, terjadi ketidakpastian dalam penentuan pajak. Resolusi posisi pajak yang diambil oleh Grup, melalui negosiasi dengan otoritas pajak yang relevan dapat berlangsung bertahun-tahun dan sangat sulit untuk memprediksi hasil akhirnya. Apabila terdapat perbedaan perhitungan pajak dengan jumlah yang telah dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan dan pajak tangguhan dalam tahun dimana penentuan pajak tersebut dibuat.

Penghasilan yang diperoleh Perusahaan dalam Grup kadang-kadang dapat dikenakan pajak final dan nonfinal. Penentuan penghasilan yang dikenakan pajak final dan non final dan juga biaya pengurang pajak sehubungan dengan penghasilan yang dikenakan pajak non final memerlukan pertimbangan dan estimasi.

Aset pajak tangguhan, termasuk yang timbul dari rugi fiskal, penyisihan modal, dan perbedaan temporer lainnya, diakui hanya apabila dianggap lebih mungkin daripada tidak bahwa mereka dapat diterima kembali, dimana hal ini tergantung pada kecukupan pembentukan laba kena pajak di masa depan.

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

In determining incremental borrowing rate, the Group considers the following main factors: the Group's corporate credit risk, the lease term, the lease payment term, the economic environment, the time at which the lease is entered into, and the currency in which the lease payments are denominated.

In determining the lease term, management considers all facts and circumstances that create an economic incentive to exercise an extension option, or not exercise a termination option. Extension options (or periods after termination options) are only included in the lease term if the lease is reasonably certain to be extended (or not terminated).

Carrying amount of lease liabilities is presented in Note 25.

c. Income Taxes

The calculations of income tax expense for the Group require judgements and assumptions in determining the deductibility of certain expenses during the estimation process. All judgement and estimates made by management may be challenged by the Directorate General of Taxes ("DGT").

As a result, the ultimate tax determination becomes uncertain. The resolution of tax position taken by the Group, through negotiations with the relevant tax authorities can take several years to complete and, in some cases, it is difficult to predict the ultimate outcome. Where the final outcome of these matters is different from the amounts initially recorded, such differences will have an impact on the income tax and deferred income tax reserve in the year in which this determination is made.

The revenue of the companies within the Group is sometimes also subject to both final and non-final income tax. Determining the amount of revenue subject to final and nonfinal tax as well as expenses relating to revenue from the non-final income tax regime requires judgments and estimates.

Deferred tax assets, including those arising from tax losses carried forward, capital allowances and other temporary differences, are recognised only where it is considered more likely than not that they will be recovered, which depends on the generation of sufficient future taxable profits. Assumptions about the generation of future

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021

(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Asumsi atas pembentukan laba kena pajak sangat dipengaruhi oleh estimasi dan asumsi manajemen atas tingkat produksi yang diharapkan, volume penjualan, harga komoditas, dan lain-lain, yang mana terpapar risiko dan ketidakpastian, sehingga ada kemungkinan perubahan estimasi dan asumsi akan mengubah proyeksi laba kena pajak di masa mendatang.

taxable profits are heavily affected by Management's estimates and assumptions regarding the expected production levels, sales volume, commodity prices, etc, which are subject to risk and uncertainty, and hence there is a possibility that changes in circumstances will alter the projected future taxable profits.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan. Grup mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Setiap pengurangan tersebut dilakukan pembalikan atas aset pajak tangguhan hingga kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya memadai.

The carrying amount of a deferred tax asset reviewed at the end of each reporting period. The Group shall reduce the carrying amount of a deferred tax asset to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilised. Any such reduction shall be reversed to the extent that it becomes probable that sufficient taxable profit will be available.

d. Liabilitas Imbalan Kerja

Nilai kini kewajiban pensiun tergantung pada sejumlah pensiun yang ditentukan berdasarkan basis dari aktuaria dengan menggunakan sejumlah asumsi. Asumsi yang digunakan dalam menentukan beban/(pendapatan) bersih untuk pensiun termasuk tingkat diskonto, perubahan remunerasi masa depan, tingkat pengurangan karyawan, tingkat harapan hidup dan periode sisa yang diharapkan dari masa aktif karyawan. Setiap perubahan dalam asumsi-asumsi ini akan berdampak pada nilai tercatat atas kewajiban pensiun.

d. Employee Benefits Liabilities

The present value of the pension obligation depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. The assumptions used in determining the net cost/(income) for pensions include the discount rate, future remuneration changes, employee attrition rates, life expectancy and expected remaining periods of service of employees. Any changes in these assumptions will have an impact on the carrying amount of the pension obligation.

Grup menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada setiap akhir tahun. Tingkat suku bunga inilah yang digunakan untuk menentukan nilai kini dari estimasi arus kas keluar masa depan yang akan dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban pensiun. Dalam menentukan tingkat diskonto yang sesuai, Grup menggunakan tingkat suku bunga obligasi korporat berkualitas tinggi (atau obligasi pemerintah, dengan pertimbangan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi korporat berkualitas tinggi) dalam mata uang yang sama dengan mata uang imbalan yang akan dibayarkan dan memiliki waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo kewajiban pensiun yang bersangkutan.

The Group determines the appropriate discount rate at the end of each year. This is the interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the related pension obligation. In determining the appropriate discount rate, the Group considers using the interest rates of high quality corporate bonds (or Government bonds, if there is no deep market for high quality corporate bonds) that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension obligation.

Asumsi kunci lainnya untuk kewajiban pensiun didasarkan sebagian pada kondisi pasar saat ini, sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 26.

Other key assumptions for pension obligation benefits are based in part on current market conditions, as disclosed in Note 26.

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**e. Estimasi Umur Manfaat Aset Tetap dan Aset
Takberwujud**

Manajemen melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat ekonomis aset tetap dan aset takberwujud berdasarkan faktor-faktor seperti kondisi fisik dan teknis serta perkembangan teknologi mesin dan peralatan di masa depan. Hasil operasi di masa depan akan dipengaruhi secara material atas perubahan estimasi ini yang diakibatkan oleh perubahan faktor yang telah disebutkan di atas (Catatan 15 dan 16).

4. Perizinan dan Aset yang Diserah Operasikan

Pemanfaatan sumber daya air (SDA) oleh pelanggan harus memiliki Surat Ijin Penggunaan Sumber Daya Air (SIPSDA) untuk menggunakan sumber daya air sesuai dengan ketentuan Undang-undang RI No. 17 Tahun 2019, tentang Sumber Daya Air, pada pasal 10 dinyatakan, bahwa: Dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) bertugas, yang salah satunya sebagaimana tersebut pada huruf-f, yaitu menyelenggarakan progres perijinan penggunaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai lintas negara, wilayah sungai lintas provinsi dan wilayah sungai strategis nasional. Penerbitan SIPSDA tersebut kepada para pelanggan harus mendapat rekomendasi dari Perusahaan bilamana memanfaatkan aliran sungai Citarum. Dengan belum dimilikinya SIPSDA oleh pelanggan dari Perusahaan, mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan yang seharusnya dapat ditagihkan bilamana SIPSDA tersebut telah terbit.

Untuk melakukan penjualan listrik, maka Perusahaan seharusnya memiliki Surat Ijin Usaha Pengusahaan Tenaga Listrik (SIUPTL) sesuai Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 2012, tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik pasal 31 ayat (3) yang menyebutkan Penjualan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) wajib mendapat persetujuan dari Menteri, Gubernur atau Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya, tentunya dengan rekomendasi dari PT PLN (Persero); dan oleh karena itu salah satu sumber pendapatan perusahaan adalah jasa penjualan listrik, baik ke industri swasta dan PLN.

Bahwa salah satu pendapatan usaha Perusahaan adalah dari penyewaan lahan dimana atas kawasan/ wilayah kerja Perusahaan yang disewakan kepada pihak lain, bahwa sebagian belum memiliki legalitas kepemilikan berupa Hak

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

**e. Estimating the Useful Life of Fixed Assets
and Intangible Assets**

Management makes a periodic review of the useful lives of fixed assets and intangible assets based on several factors such as physical and technical conditions and development of equipment technology in the future. The results of future operations will be materially influenced by the change in estimate as caused by changes in the factors mentioned above (Notes 15 and 16).

**4. Licensing and the Assets Handed-over
Operations**

The use of water resources (SDA) by customers must have a Water Resources Usage Permit (SIPSDA) to use water resources in accordance with the provisions of the Indonesian Republic Law No. 17 Year 2019, regarding Water Resources, Article 10 states, that: In regulating and managing Water Resources, the Central Government as referred to in article 9 paragraph (1) is in charge, one of which is as referred to in letter-f, namely carrying out progress licensing for the use of water resources in transnational river areas, interprovincial river areas and nationally strategic river basins. The issuance of the SIPSDA to customers must obtain a recommendation from the Company when utilizing the Citarum river flow. By not having SIPSDA by customers from the Company, it has resulted in a loss of potential revenue that could have been billed if the SIPSDA had been published.

In order to sell electricity, the Company should have an Electricity Concession Business License (SIUPTL) in accordance with the Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 14 Year 2012, concerning the Business Activities of Electricity Supply Article 31 paragraph (3) which states that Sales as mentioned in paragraph (1) must obtain approval from the Minister, Governor or Regent / Mayor in accordance with their authority, of course with a recommendation from PT PLN (Persero); and therefore, one of the company's revenue sources is electricity sales services, to both private industry and PLN.

Whereas one of the Company's business revenues is from land leasing where the working area / area of the Company is leased to other parties, that some of them do not have legal ownership in the form of Land Management Rights (HPL). However,

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Pengelolaan Lahan (HPL). Meskipun demikian, beberapa lahan telah dimiliki perusahaan dengan adanya sertifikat HGB.

Sesuai Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 39/KPTS/1994, tanggal 8 Februari 1994, tentang Penetapan Jumlah dan Jenis Barang Inventaris Kekayaan/ Milik Negara yang Dikelola oleh Perusahaan Umum (Perum) Otoritas Jatiluhur, dimana Perusahaan dalam aktivitas usahanya sebagai pengelola barang di kawasan tersebut maka ditunjuk/ ditetapkan sebagai Pengurus Barang atas penyerahan barang inventaris sesuai Daftar Barang Inventaris Kekayaan/ Milik Negara di lingkungan Ditjen Irigasi I – Ditjen. Pengairan. Dalam surat keputusan tersebut bahwa status kepemilikan barang inventaris tersebut tetap berada pada Departemen Pekerjaan Umum c.q. Ditjen Pengairan.

Beberapa jenis barang yang masuk dalam Daftar Barang Inventaris Kekayaan/ Milik Negara di lingkungan Ditjen Irigasi I – Ditjen. Pengairan sebagai berikut:

- Tanah persil bangunan gedung: 104.216.865 m²;
- Tanah persil bangunan bukan gedung: 16.342.481.898 ha;
- Bangunan gedung tempat kerja;
- Bangunan gedung tempat tinggal: 39 BH.

Dengan adanya Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tersebut maka, Perusahaan tidak dapat mencatatkan ke dalam buku / daftar aset tetap atau aset lainnya, mengingat hanya sebagai Pengurus Barang. Dilain pihak optimalisasi pemanfaatan aset di kawasan bendungan Jatiluhur, secara fisik tidak dapat dipisahkan dengan aset-aset tersebut diatas dimana Perusahaan sebagai Pengurus Barang, sekaligus memberikan kepastian hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

HPL bukan merupakan hak atas tanah, dan tidak diatur dalam UU Pokok Agraria, tetapi dalam:

- Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 1953, tentang Penguasaan Tanah-tanah Negara; dan
- Permen. Agraria / Kepala BPN No. 9 Tahun 1999, tentang Tata-cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan; dan

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

some of the land has been owned by the company with the HGB certificate.

In accordance with the Decree of the Minister of Public Works No.39/KPTS/1994, dated February 8, 1994, concerning the Determination of the Amount and Types of State Property/ Property Inventory that are Managed by the Public Company (Perum) of the Jatiluhur Authority, where the Company in its business activities as the goods manager in the area is then appointed/ stipulated as the Goods Manager for the delivery of the inventory items in accordance with the State Property/ Property Inventory List within the Directorate General of Irrigation I - Ditjen. Irrigation. The decree states that the ownership status of the inventory items remains with the Department of Public Works c.q. Directorate General of Irrigation.

Several types of goods are included in the Inventory List of Wealth/ State Owned Goods within the Directorate General of Irrigation I - Ditjen. Irrigation as follows:

- *Building parcel land: 104,216,865 sqm;*
- *Building parcel land not building: 16,342,481,898 ha;*
- *Workplace building;*
- *Residential buildings: 39 BH.*

With the existence of the Decree of the Minister of Public Works, the Company cannot record it in the book / list of fixed assets or other assets, considering that it is only a Goods Manager. On the other hand, optimizing the use of assets in the Jatiluhur dam area, physically it cannot be separated from the assets mentioned above, where the Company as the Goods Manager, while providing legal certainty in accordance with applicable regulations.

HPL is not a right to land, and is not regulated in the Basic Agrarian Law, but in:

- *Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 8 Year 1953, concerning Control of State Lands; and*
- *Permen. Agraria / Head of BPN No. 9 Year 1999, concerning Procedures for Granting and Cancellation of Rights to State Land and Management Rights; and*

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

- Ketentuan – Ketentuan tentang Kebijakan Pelaksanaan Selanjutnya.

HPL tidak mempunyai jangka waktu kepemilikan dan diberikan hanya atas tanah negara yang dikuasai oleh PEMDA, BUMN dan BUMD yang bertujuan untuk mengontrol *zoning* dan *land use*, agar sesuai dengan perencanaan tata ruangnya.

Diatas HPL masih dapat diletakkan Hak atas Tanah, antara lain:

- Hak Guna Bangunan (“HGB”);
- Hak Guna Usaha (“HGU”); dan
- Hak Pakai.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 40, Tahun 1996 menyatakan bahwa, di atas tanah HPL dapat diberikan atau dibebankan dengan hak-hak atas tanah, yaitu:

- Hak Guna Bangunan (“HGB”); dan
- Hak Pakai (“HP”).

HGB atau HP yang berada di atas tanah HPL diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan usul (rekomendasi) dari Pemegang HPL kepada calon pemegang HGB / HP.

Tanah-tanah Hak Pengelolaan, yaitu tanah negara yang dikuasai dengan Hak Pengelolaan, yang merupakan pelimpahan pelaksanaan sebagian kewenangan hak menguasai dari negara kepada pemegang haknya.

Dalam Permeneg Agraria / Kepala BPN No. 9 TH.1999, tanggal 24 Oktober 1999, tentang Tatacara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, Pasal-67, dinyatakan bahwa:

1. Hak Pengelolaan dapat diberikan kepada:
 - a. Instansi Pemerintah, termasuk Pemerintah Daerah;
 - b. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - c. Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. PT Persero;
 - e. Badan Otorita;
 - f. Badan-badan hukum Pemerintah lainnya yang ditunjuk pemerintah.

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- *Terms of the Further Policy.*

HPL does not have a period of ownership and is given only to state land controlled by the local government, state-owned enterprises and local-owned enterprises with the aim of controlling zoning and land use, so that it is in accordance with their spatial planning.

Above the HPL can still be placed the Right to Land, among others:

- *Building Use Rights (“HGB”);*
- *Business Use Rights (“HGU”); and*
- *Right of Use.*

Based on Government Regulation (PP) No. 40, Year 1996 states that, HPL land can be granted or charged with land rights, namely:

- *Building Use Rights (“HGB”); and*
- *Right to Use (“HP”).*

HGB or HP that is on HPL land is granted by a decision to grant rights by the Minister or an appointed official based on a recommendation (recommendation) from the HPL Holder to the prospective HGB / HP holder.

Management Rights Land, namely state land controlled with Management Rights, which is the delegation of the exercise of part of the authority over the right to control from the state to the right holders.

In Permeneg Agraria / Head of BPN No. 9 TH.1999, dated 24 October 1999, concerning Procedures for Granting and Cancellation of Rights to State Land and Management Rights, Article 67, states that:

1. *Management rights can be granted to:*
 - a. *Government Agencies, including Local Governments;*
 - b. *State Owned Enterprises (BUMN);*
 - c. *Regional owned enterprises;*
 - d. *PT Persero;*
 - e. *Authority Agency;*
 - f. *Other Government legal entities appointed by the government.*

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

2. Badan-badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan Hak Pengelolaan sepanjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan pengelolaan tanah.

Dengan demikian, Hak Pengelolaan (selanjutnya disebut Hak Pengelolaan Lahan atau HPL) sesuai ketentuan di atas dapat diurus oleh Perusahaan, atas kawasan Bendungan Jatiluhur dan bantaran sungai Citarum yang tentunya bertujuan menjaga konservasi alam dan lingkungannya.

Kewenangan Subyek HPL, sesuai Pasal 6, Permenag No. 9 Tahun 1999 menjelaskan HPL memberikan wewenang kepada pemegangnya untuk:

- a. Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut;
- b. Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya;
- c. Menyerahkan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dengan hak pakai yang berjangka waktu 6 (enam) tahun;
- d. Menerima uang pemasukan/ ganti rugi dan/ atau uang wajib tahunan.

Selanjutnya, sesuai Pasal 4 jo. Pasal 16 jo. Pasal 53 jo. Peraturan Pemerintah (PP) No. 40/1996 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 41/1996 bahwa, negara memberikan berbagai jenis hak atas tanah, yang terdiri dari:

- a. Hak individual yang bersifat perdata;
- b. Hak Pengelolaan, yaitu hak istimewa yang diberikan oleh negara pada instansi-instansi tertentu untuk dikelola dan diambil manfaat atasnya;
- c. Tanah wakaf yaitu hak atas tanah yang semula merupakan hak primer (HM, HGB, HGU, HP atau tanah girik) dan kemudian diwakafkan atau diserahkan oleh pemiliknya kepada badan keagamaan ataupun badan sosial lainnya untuk di wakafkan.

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. Legal entities as referred to in paragraph (1) can be granted Management Rights as long as they are in accordance with their main tasks and functions related to land management.

Thus, the Management Rights (hereinafter referred to as Land Management Rights or HPL) according to the above provisions can be administered by the Company, over the Jatiluhur Dam area and the banks of the Citarum river which of course aims to preserve nature and its environment.

The authority of HPL Subjects, according to Article 6, Permenag No. 9 Year 1999 describes HPL as giving authority to its holders to:

- a. Planning the allocation and use of the land;
- b. Use the land for the purposes of carrying out his duties;
- c. Hand over parts of the land to a third party with usufructuary rights for a period of 6 (six) years;
- d. Receive income/ compensation and/ or mandatory annual money.

Furthermore, according to Article 4 jo. Article 16 jo. Article 53 jo. Government Regulation (PP) No. 40/1996 and Government Regulation (PP) No. 41/1996 that, the state grants various types of land rights, which consist of:

- a. Individual rights that are civil in nature;
- b. Management rights, namely special rights granted by the state to certain agencies to be managed and taken advantage of;
- c. Waqf land is the right to land that was originally a primary right (HM, HGB, HGU, HP or girik land) and then waqfed or handed over by the owner to a religious body or other social body to be waqfed.

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

5. Kas dan Setara Kas

5. Cash and Cash Equivalents

	2022 Rp	2021 Rp
Kas/ Cash on Hand	1,179,036,948	1,629,924,833
Kas di Bank/ Cash in Banks		
Pihak Berelasi (Catatan 37)/ <i>Related Parties (Note 37)</i>	102,276,191,003	36,413,490,307
Pihak Ketiga/ <i>Third Parties</i>		
PT Bank CIMB Niaga Tbk	1,989,309,988	1,254,285,102
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	1,474,596,522	--
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	798,364,145	2,708,196,403
PT Bank Index Selindo	97,579,220	324,759,376
Sub Jumlah - Pihak Ketiga/ <i>Sub Total - Third Parties</i>	4,359,849,875	4,287,240,881
Jumlah Bank/ Total of Bank	106,636,040,878	40,700,731,188
Deposito Berjangka/ Time Deposits		
Pihak Berelasi (Catatan 37)/ <i>Related Parties (Note 37)</i>		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	240,000,000,000	100,000,000,000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	50,000,000,000	40,000,000,000
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	150,000,000,000	140,000,000,000
Sub Jumlah - Pihak Berelasi/ <i>Sub Total - Related Parties</i>	440,000,000,000	280,000,000,000
Pihak Ketiga/ <i>Third Parties</i>		
PT Bank Syariah Indonesia	20,000,000,000	--
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	--	130,000,000,000
Sub Jumlah - Pihak Ketiga/ <i>Sub Total - Third Parties</i>	20,000,000,000	130,000,000,000
Jumlah Deposito/ Total of Time Deposits	460,000,000,000	410,000,000,000
Jumlah/ Total	567,815,077,826	452,330,656,021

Seluruh kas dan setara kas pada 31 Desember 2022 dan 2021 dalam mata uang Rupiah.

All cash and cash equivalents as of December 31, 2022 and 2021 are in Rupiah.

Jangka waktu deposito adalah 1 sampai dengan 3 bulan.

Terms of time deposits are 1 up to 3 months.

Tingkat suku bunga tahunan deposito berjangka pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar 4,90% - 6% dan 2,85% - 3,15%.

The annual interest rates of time deposits as of December 31, 2022 and 2021 are 4.90% - 6% and 2.85% - 3.15%, respectively.

6. Piutang Usaha

6. Accounts Receivable

	2022 Rp	2021 Rp
a. Berdasarkan Pelanggan/ By Customers		
Pihak Berelasi (Catatan 37)/ <i>Related Parties (Note 37)</i>	99,906,104,922	83,475,430,452
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Usaha - Pihak Berelasi/ <i>Allowance for Impairment Losses on Accounts Receivable - Related Parties</i>	(36,674,516,361)	(46,177,757,951)
Sub Jumlah - Pihak Berelasi/ <i>Sub Total - Related Parties</i>	63,231,588,561	37,297,672,501

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	2022	2021
	Rp	Rp
Pihak Ketiga/ Third Parties		
PDAM Tirta Bhagasasi	7,869,275,197	8,547,756,820
Perumda Tirtawening	8,421,815,500	8,041,429,900
PDAM Kabupaten Purwakarta	5,170,379,480	3,705,625,705
PT Tenang Jaya Sejahtera	3,284,614,010	1,798,530,875
PDAM Kabupaten Karawang	3,201,031,640	3,231,201,114
PDAM Tirta Patriot	2,215,683,100	--
PT Mutiara Energy	1,967,824,620	1,967,824,620
PT Indograha Samudra Persada Realty	1,838,961,020	1,838,961,020
PT Amarthia Sejahtera	1,538,697,810	--
PT Archindo Development	1,018,881,000	1,018,881,000
PT East Jakarta Industrial Park	908,809,323	--
PT South Pacific Viscose	859,680,418	1,066,169,288
PT Hosaindo Sejahtera Abadi	706,360,026	730,839,826
PT Alexandra Citra Pertiwi	672,830,400	560,037,275
PT Indo Bharat Rayon	643,274,400	--
PT Tridaya Kreasi	573,278,000	573,278,000
PDAM Kabupaten Bogor IPA Citra	557,881,300	557,881,300
PT Hebel Indonesia	536,581,873	536,581,873
PT Jababeka Infrastruktur (KIJ)	213,520,498	518,803,650
PT DIC Graphics	115,676,121	871,786,915
PT Pindodeli Pulp And Paper Mills	53,096,749	741,525,870
PDAM Kabupaten Bandung	--	730,782,200
PT Lippo Cikarang Tbk	--	553,578,940
Lain-lain (di bawah Rp500 juta)/ Others (below Rp500 million)	24,770,736,209	20,725,827,971
Sub Jumlah - Pihak Ketiga/ Sub Total - Third Parties	67,138,888,694	58,317,304,162
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Usaha - Pihak Ketiga/ Allowance for Impairment Losses on Accounts Receivable - Third Parties	(32,964,560,035)	(24,114,475,858)
Sub Jumlah - Pihak Ketiga/ Sub Total - Third Parties	34,174,328,659	34,202,828,304
Jumlah/ Total	97,405,917,220	71,500,500,805
b. Berdasarkan Umur/ By Age		
Belum Jatuh Tempo/ Not Yet Due	42,480,523,698	92,933,019,507
Jatuh Tempo/ Past Due		
1 - 30 hari/ days	1,738,562,698	2,648,527,617
31 - 60 hari/ days	2,576,964,265	2,106,561,556
61 - 90 hari/ days	7,077,962,050	7,374,823,936
Di atas 90 hari/ More than 90 days	113,170,980,905	36,729,801,999
Sub Jumlah/ Sub Total	167,044,993,616	141,792,734,615
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Usaha/ Allowance for Impairment Losses on Accounts Receivable	(69,639,076,396)	(70,292,233,810)
Jumlah/ Total	97,405,917,220	71,500,500,805

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha adalah sebagai berikut:

	2022 Rp
Saldo Awal	70,292,233,810
Pemulihan	(14,970,370,574)
Kerugian Penurunan Nilai	14,317,213,160
Saldo Akhir	69,639,076,396

Pada 31 Desember 2022 dan 2021, seluruh piutang usaha disajikan dalam Rupiah.

Pada 31 Desember 2022 dan 2021, tidak ada piutang usaha yang dijadikan jaminan.

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai piutang telah mencukupi untuk menutup kerugian yang timbul dari tidak tertagihnya piutang.

Movement of allowance for impairment losses on accounts receivable is as follows:

	2021 Rp	
	65,364,159,651	<i>Beginning Balance</i>
	--	<i>Recovery</i>
	4,928,074,159	<i>Impairment Losses</i>
	70,292,233,810	Ending balance

As of December 31, 2022 and 2021, all of accounts receivable are denominated in Rupiah.

As of December 31, 2022 and 2021, there are no accounts receivable as collateral.

Management believes that the allowance for impairment losses on accounts receivable are adequate to cover loss on uncollectible receivables.

7. Piutang Retensi

7. Retention Receivables

Berdasarkan Pelanggan/ By Customers

Pihak Ketiga/ *Third Parties*

PT Multi Optimal Sentosa

PT Belaputera Intiland

Jumlah/ Total

2022 Rp	2021 Rp
1,512,080,435	820,224,778
32,232,951	--
1,544,313,386	820,224,778

Piutang retensi kepada PT Multi Optimal Sentosa merupakan piutang retensi atas pekerjaan konstruksi Pembangunan Sistem Jaringan Penyediaan Air Industri untuk Kawasan Jatiluhur *Industrial Smart City* berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor MOS-0062/SPK-JTL/VI/2021 dan adendumnya.

Piutang retensi kepada PT Belaputera Intiland atas Pekerjaan Sistem Pengolahan Air Minum 100L/Detik Kota Baru Parahyangan berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 133/BI/TECH-LOA/VII/2022.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, manajemen tidak melakukan perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai piutang retensi karena piutang tersebut belum jatuh tempo dan manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan.

Retention receivable to PT Multi Optimal Sentosa represents retention receivable for the construction work of the Construction of an Industrial Water Supply Network System for the Jatiluhur Industrial Smart City Area based on Work Order Letter Number MOS-0062/SPK-JTL/VI/2021 and its addendum.

Retention receivable to PT Belaputera Intiland for the Work of the 100L/Second Drinking Water Treatment System in Kota Baru Parahyangan based on Work Order Letter Number 133/BI/TECH-LOA/VII/2022.

At December 31, 2022 and 2021, management did not calculate the the allowance for impairment losses on retention receivables since those receivables are not due yet and management believes that there are no credit risk which concentrated significantly.

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

8. Pendapatan yang Masih Akan Diterima

8. Accrued Revenue

	2022 Rp	2021 Rp	
Sumber Daya Air			Water Resources
Air Baku	170,635,754,419	144,758,426,351	Raw Water
Listrik	52,767,047,897	55,036,967,587	Electricity
Air Bersih	7,440,093,035	7,618,863,285	Clean Water
Sub Jumlah	230,842,895,351	207,414,257,223	Sub Total
Non Sumber Daya Air			Non Water Resources
Pemanfaatan Lahan	17,177,060,274	13,406,601,278	Land Utilization
Pariwisata	2,512,031,886	2,861,031,754	Tourism
Jasa Laboratorium	929,603,112	1,756,920,998	Laboratory Service
Air Minum Dalam Kemasan	1,486,141,522	1,212,107,022	Bottled Drinking Water
Sub Jumlah	22,104,836,794	19,236,661,052	Sub Total
Cadangan Kerugian Penurunan			Allowance for Impairment
Nilai Pendapatan yang Akan			Losses on Accrued
Diterima	(15,916,553,889)	(15,643,252,568)	Revenue
Jumlah	237,031,178,256	211,007,665,707	Total

Rincian pendapatan yang masih akan diterima
berdasarkan pelanggan adalah sebagai berikut:

The details of accrued revenue based on
customers are as follows:

	2022 Rp	2021 Rp
Berdasarkan Pelanggan/ By Customers		
Pihak Berelasi (Catatan 37)/ Related Parties (Note 37)	146,544,542,217	122,854,091,007
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang - Pihak Berelasi/ Allowance for Impairment Losses - Related Parties	(1,564,145,416)	(5,096,396,378)
Sub Jumlah - Pihak Berelasi/ Sub Total - Related Parties	144,980,396,801	117,757,694,629
Pihak Ketiga/ Third Parties		
PAM Jaya	18,476,196,329	13,570,173,520
PDAM Tirta Bhagasasi	15,296,220,781	344,980,010
PT Indotama Ferro Alloys	12,942,459,602	13,393,599,005
PT Elegant Textile	9,895,489,474	10,111,553,908
PT Cikarang Listrindo	5,703,711,628	414,312,210
Perumda Tirtawening	4,465,039,500	380,385,600
PDAM Tirta Tarum	4,167,542,213	--
PT Indograha Samudra Persada Realty	1,755,356,200	--
PDAM Tirta Ranga	1,200,763,224	117,504,136
PT Logos Indonesia Prima One	1,127,703,000	--
PDAM Tirta Patriot	1,036,919,690	4,860,450,090
PT Indonesia Libolon Fiber System	869,269,668	1,387,012,300
PT Indorama Synthetics Tbk	859,123,216	2,233,325,545
PT Bangunperkasa Adhitamasentra	676,443,994	1,280,788,054
PDAM Tirta Darma Ayu	626,086,973	754,595,997
Lain-lain (di bawah Rp500 juta)/ Others (below Rp500 million)	27,304,864,436	54,948,146,893
Sub Jumlah - Pihak Ketiga/ Sub Total - Third Parties	106,403,189,928	103,796,827,268
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang - Pihak Ketiga/ Allowance for Impairment Losses - Third Parties	(14,352,408,473)	(10,546,856,190)
Sub Jumlah - Pihak Berelasi/ Sub Total - Related Parties	92,050,781,455	93,249,971,078
Jumlah/ Total	237,031,178,256	211,007,665,707

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai pendapatan yang masih akan diterima adalah sebagai berikut:

Movement of allowance for impairment losses on accrued revenues is as follows:

	2022	2021	
	Rp	Rp	
Saldo Awal	15,643,252,568	15,226,874,766	<i>Beginning Balance</i>
Pemulihan	(431,708,084)	--	<i>Recovery</i>
Kerugian Penurunan Nilai	705,009,405	416,377,802	<i>Impairment Losses</i>
Saldo Akhir	15,916,553,889	15,643,252,568	<i>Ending balance</i>

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai pendapatan yang masih akan diterima telah mencukupi untuk menutup kerugian yang timbul dari tidak tertagihnya pendapatan yang masih akan diterima.

Management believes that the allowance for impairment losses on accrued revenue is adequate to cover loss on uncollectible accrued revenues.

9. Tagihan Bruto dari Pemberi Kerja

9. Gross Amount Due from Customers

	2022	2021	
	Rp	Rp	
Biaya Konstruksi	19,360,516,075	15,962,668,805	<i>Cost of Construction</i>
Laba yang Diakui	1,832,110,677	1,512,331,195	<i>Profit Recognized</i>
Pendapatan Kontraktual	21,192,626,752	17,475,000,000	<i>Contractual Revenue</i>
Dikurangi: Progres Ditagihkan	13,484,808,794	16,404,495,563	<i>Less: Progress Billed</i>
Tagihan Bruto dari Pemberi Kerja	7,707,817,958	1,070,504,437	<i>Gross Amount Due from Customers</i>

Rincian tagihan bruto dari pemberi kerja berdasarkan pemberi kerja adalah sebagai berikut:

The details of gross amount due from customers based on customers are as follows:

	2022	2021	
	Rp	Rp	
PT Multi Optimal Sentosa	7,103,380,298	--	<i>PT Multi Optimal Sentosa</i>
PT Belaputera Intiland	604,437,660	1,070,504,437	<i>PT Belaputera Intiland</i>
Jumlah	7,707,817,958	1,070,504,437	<i>Total</i>

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, manajemen tidak melakukan perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai tagihan bruto kepada pemberi kerja karena manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan atas tagihan bruto kepada pemberi kerja tersebut.

At December 31, 2022 and 2021, management did not calculate the the allowance for impairment losses of gross amount due from customers since the management believes that there are no credit risk which concentrated significantly of gross amount due from customers.

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

10. Aset Keuangan Lancar Lainnya

10. Other Current Financial Assets

	2022 Rp	2021 Rp	
Perusahaan			The Company
Piutang Talangan			Bailout Receivables on
Asuransi Karyawan	2,245,384,059	2,245,384,059	Employee Insurance
Piutang Bunga Deposito	617,706,802	410,604,908	Interest Deposit Receivables
Piutang Karyawan	70,491,763	7,140,364	Employee Receivables
Piutang Lainnya	13,081,154	12,961,154	Other Receivables
Dikurangi:			Less:
Cadangan Kerugian Penurunan			Allowance for Impairment Losses
Nilai Piutang Talangan			on Bailout Receivables
Asuransi Karyawan	(2,245,384,059)	(2,245,384,059)	on Employee Insurance
Sub Jumlah - Perusahaan	701,279,719	430,706,426	Sub Total - The Company
Entitas Anak			The Subsidiary
Piutang Direktur	--	350,000,000	Director's Receivable
Sub Jumlah - Entitas Anak	--	350,000,000	Sub Total - The Subsidiary
Jumlah	701,279,719	780,706,426	Total

Piutang Karyawan (Asuransi Jiwasraya) merupakan piutang karyawan atas premi awal yang dibayarkan terlebih dahulu oleh Perusahaan dan telah dihitung penurunan nilainya (Catatan 38).

Employee Receivables (Jiwasraya Insurance) represent receivables on initial premium which was initially paid by the Company and has been assessed the allowance for impairment losses (Note 38).

11. Persediaan

11. Inventories

	2022 Rp	2021 Rp	
Suku Cadang	747,450,000	747,450,000	Spareparts
Bahan Baku - Air Minum			Raw Materials -
Dalam Kemasan	609,995,794	448,720,800	Bottled Drinking Water
Bahan Kimia	306,998,935	268,054,651	Chemicals
Bahan Farmasi	160,918,621	229,758,814	Pharmaceuticals
Bahan dan			Other Materials and
Perlengkapan Lain	153,672,000	215,007,500	Equipments
Barang Jadi - Air Minum			Finished Goods -
Dalam Kemasan	32,337,839	120,422,049	Bottled Drinking Water
Bahan Makanan dan Minuman	56,998,378	37,348,443	Food and Beverages
Bahan Perlengkapan			Hospitality
Perhotelan	31,962,310	13,800,712	Equipments
Bahan Perlengkapan Bar			Bar and Restaurant
dan Restoran	16,777,100	11,519,550	Equipments
Sub Jumlah	2,117,110,977	2,092,082,519	Sub Total
Dikurangi:			Less:
Cadangan Kerugian Penurunan			Allowance for Impairment
Nilai Persediaan	(189,283,200)	(189,283,200)	Losses on Inventories
Jumlah	1,927,827,777	1,902,799,319	Total

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Pada 31 Desember 2022 dan 2021, manajemen tidak melakukan penambahan penyisihan kerugian penurunan nilai persediaan karena manajemen berpendapat bahwa seluruh persediaan berada dalam kondisi baik dan tidak terdapat persediaan usang.

As of December 31, 2022 and 2021, management did not provide any additional allowance for impairment losses on inventory since management believes that all inventories are in a good condition and there are no existing obsolete stock.

12. Pembayaran di Muka

12. Prepayments

	2022	2021	
	Rp	Rp	
Biaya Dibayar di Muka	6,649,994,639	6,593,207,547	<i>Prepaid Expenses</i>
Uang Muka	505,045,912	1,874,215,590	<i>Advances</i>
Jumlah	7,155,040,551	8,467,423,137	Total

a. Biaya Dibayar di Muka

a. Prepaid Expenses

	2022	2021	
	Rp	Rp	
Personalia	6,623,504,185	6,545,078,820	<i>General Affairs</i>
Bahan dan Perlengkapan	26,490,454	48,128,727	<i>Material and Supplies</i>
Jumlah	6,649,994,639	6,593,207,547	Total

Biaya personalia merupakan biaya gaji dibayar di muka dengan rincian sebagai berikut:

General affairs expenses represent prepaid salary costs with details as follows:

	2022	2021	
	Rp	Rp	
Gaji	3,236,206,196	3,068,782,779	<i>Salary</i>
Tunjangan dan Honorarium	3,386,797,989	3,450,796,041	<i>Allowances and Honorarium</i>
Lain-lain	500,000	25,500,000	<i>Others</i>
Jumlah	6,623,504,185	6,545,078,820	Total

b. Uang Muka

b. Advances

	2022	2021	
	Rp	Rp	
Uang Muka Pengadaan Aset Tetap/ Procurement of Fixed Assets Advances			
CV Jatiluhur Faris Purnama	208,227,120	--	
PT Intra Indotama Karya	197,025,000	--	
CV Semesta Estetika	99,404,052	--	
PT Gelora Megah Sejahtera	--	1,181,620,000	
PT Prima Pesona Ardi Kreasi	--	494,926,506	
PT Rasa Nungga Utama	--	172,408,170	
Uang Muka Lainnya/ Other Advances	389,740	25,260,914	
Jumlah/ Total	505,045,912	1,874,215,590	

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

13. Investasi pada Entitas Asosiasi

13. Investments in Associates

Metode Ekuitas/ Equity Method

PT Bakti Usaha Menanam Nusantara Hijau Lestari I

Saldo Awal/ Beginning Balance

Penambahan Tahun Berjalan/ Current Year Addition

Saldo Akhir/ Ending Balance

Akumulasi Bagian Rugi Entitas Asosiasi/

Accumulated Loss on Associates

Nilai Penyertaan - Bersih/ Investments - Net

2022 Rp	2021 Rp
5,236,705,577	3,800,000,000
--	1,436,705,577
5,236,705,577	5,236,705,577
(5,236,705,577)	(5,236,705,577)
--	--

PT Bakti Usaha Menanam Nusantara Hijau Lestari I (PT BUMN HL I)

Berdasarkan surat dari PT Bakti Usaha Menanam Nusantara Hijau Lestari I No. SB/A.II/3790/XI/2008 tanggal 3 November 2008, Perusahaan menginvestasikan dananya sebesar Rp1.400.000.000 atau 20% dari total modal yang disetor. Pada tahun 2011 dan 2012, Perusahaan menambah modal disetor masing-masing sebesar Rp750.000.000 dan Rp250.000.000, sehingga total modal disetor sebesar Rp2.400.000.000 yang telah diaktakan oleh Notaris Irma Rahmawati, S.H.

Berdasarkan Risalah RUPS PT BUMN Hijau Lestari I tanggal 6 Mei 2013 bahwa PT BUMN Hijau Lestari II melakukan merger dengan PT BUMN Hijau Lestari I, dengan Akta Penggabungan PT BUMN Hijau Lestari II ke dalam PT BUMN HL I yang dibuat oleh Notaris Rachmawati No. 16 tanggal 6 Juli 2015 yang disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU – 0105825.AH.01.10. Tahun 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Bakti Usaha Menanam Nusantara Hijau Lestari I, menyatakan total modal disetor Perusahaan sebanyak 3.800 lembar saham dengan nilai nominal Rp3.800.000.000 atau 20,54% dari total saham ditempatkan sebanyak 18.504 lembar saham.

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perusahaan melakukan pencatatan kekurangan penyertaan sebesar Rp1.436.705.577 atas peningkatan modal PT BUMN HL I menjadi sebesar Rp25.500.000.000 berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT BUMN HL I yang berlaku efektif serta mengikat sejak tanggal 5 Agustus 2015. Pencatatan ini dilakukan atas Laporan Hasil Reviu atas Rencana Pembubaran PT BUMN HL I tanggal 26 Oktober 2021 dan pada 31 Desember 2021, Perusahaan telah mengakui bagian kerugian atas penyertaan tersebut.

PT Bakti Usaha Menanam Nusantara Hijau Lestari I (PT BUMN HL I)

Based on a letter from PT Bakti Usaha Menanam Nusantara Hijau Lestari I No. SB/A.II/3790/XI/2008 dated November 3, 2008, the Company invested Rp1,400,000,000 or 20% of the total paid-in capital. In 2011 and 2012, the Company increased its paid-in capital by Rp750,000,000 and Rp250,000,000, respectively, so that the total paid-up capital amounted to Rp2,400,000,000 which was notarized by Notary Irma Rahmawati, S.H.

Based on the Minutes of the GMS of PT BUMN Hijau Lestari I dated May 6, 2013 that PT BUMN Hijau Lestari II carried out a merger with PT BUMN Hijau Lestari I, with the Deed of Merger of PT BUMN Hijau Lestari II into PT BUMN HL I made by Notary Rachmawati No. 16 dated July 6, 2015 approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU – 0105825.AH.01.10. Year 2015 concerning Approval of Amendments to the Articles of Association of Limited Liability Company Bakti Usaha Menanam Nusantara Hijau Lestari I, states that the total paid-up capital of the Company is 3,800 shares with a nominal value of Rp3,800,000,000 or 20.54% of the total issued shares were 18,504 shares.

As of December 31, 2021, the Company recorded a lack of investment of Rp1,436,705,577 for the increase in the capital of PT BUMN HL I amounting to Rp25,500,000,000 based on the Circular Decision of the Shareholders of PT BUMN HL I which was effective and binding on August 5, 2015. This recording is carried out on the Review Report on the Dissolution Plan of PT BUMN HL I dated October 26, 2021, and on December 31, 2021, the Company has recognized the share of losses on the investment.

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Pada tanggal 7 Februari 2022, Keputusan Sirkuler Pemegang Saham diluar RUPS PT BUMN HL I ditandatangani oleh Para Pemegang Saham, yaitu menyetujui dan menetapkan:

1. Menyetujui pembatalan RUPS yang tercantum dalam Risalah RUPS LB tanggal 17 Desember 2020, yaitu "kekurangan modal disetor Perum Jasa Tirta II sebesar Rp1.400.000.000 akan disetorkan setelah proses likuidasi disetujui Kementerian BUMN".
2. Menyetujui bahwa kekurangan modal disetor Perusahaan sebesar Rp1.436.705.577 akan disetorkan paling lambat 5 hari setelah berlaku efektifnya Keputusan Sirkuler ini.

Pada tanggal 13 Juli 2022, Keputusan Sirkuler Pemegang Saham diluar RUPS PT BUMN HL I ditandatangani oleh Para Pemegang Saham, yaitu menyetujui dan menetapkan:

1. Penggunaan setoran modal Perusahaan untuk pelunasan kewajiban perseroan dilaksanakan setelah dana tersedia untuk memenuhi kewajiban.
2. Menyetujui aset Perseroan yang telah dilakukan penilaian oleh KJPP dijual kepada Perhutani atau pihak lainnya.
3. Menyetujui hasil penjualan aset Perseroan diprioritaskan untuk pemenuhan kewajiban Perseroan kepada eks karyawan dan kewajiban lain yang belum terselesaikan.
4. Menugaskan *Personnel In-Charge* Perseroan untuk melaksanakan hal-hal terkait kegiatan penjualan aset dimaksud.
5. Memberhentikan dan mengangkat *Personnel In-Charge* PT BUMN HL I termasuk persetujuan honorarium PIC Perseroan.

Pada tanggal 22 November 2022, dilaksanakan pembahasan terkait hutang Perseroan kepada eks karyawan dan rencana RUPS pertanggungjawaban PT BUMN HL I. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut selanjutnya disusun *draft* RUPS PT BUMN HL I yang selanjutnya disampaikan oleh Perum Perhutani melalui surat No. 0741/001.2/PP/2022 tanggal 26 Desember 2022 perihal Penyampaian *Draft* RUPS PT BUMN HL I.

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

On February 7, 2022, the Shareholders' Circular Resolution outside the GMS of PT BUMN HL I was signed by the Shareholders, namely agreeing and stipulating:

1. *Approved the cancellation of the GMS which was stated in the Minutes of the Extraordinary GMS on December 17, 2020, namely "a lack of paid-up capital of Perum Jasa Tirta II of Rp1,400,000,000 will be deposited after the liquidation process is approved by the Ministry of SOE".*
2. *Approved that the lack of Company's paid-up capital of Rp1,436,705,577 will be deposited no later than 5 days after the effectiveness of this Circular Decree.*

On July 13, 2022, the Shareholders' Circular Resolution outside the GMS of PT BUMN HL I was signed by the Shareholders, namely agreeing and stipulating:

1. *The use of the Company's paid-in capital to pay off the Company's obligations is carried out after the funds are available to fulfill obligations.*
2. *Approve Company's assets that have been assessed by KJPP to be sold to Perhutani or other parties.*
3. *Approved the proceeds from the sale of the Company's assets to prioritize the fulfillment of the Company's obligations to former employees and other unresolved obligations.*
4. *Assign the Personnel In-Charge of the Company to carry out matters related to the said asset sale activities.*
5. *Dismiss and appointing the Personnel In-Charge of PT BUMN HL I including the approval of the Company's Personnel In-Charge honorarium.*

On November 22, 2022, a discussion was held regarding the Company's debt to former employees and plans for an accountability GMS for PT BUMN HL I. Based on the results of the discussion, a draft of the GMS of PT BUMN HL I was then prepared, which was then submitted by Perum Perhutani through letter No. 0741/001.2/PP/2022 dated December 26, 2022 regarding Submission of the PT BUMN HL I GMS Draft.

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

14. Investasi Jangka Panjang Lainnya

14. Other Long-Term Investment

Metode Biaya/ Cost Method

PT Air Minum Indonesia
PT Padi Energi Nusantara
Dikurangi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/
Less Allowance for Impairment Losses
Jumlah/Total

2022 Rp	2021 Rp
100,000,000	100,000,000
2,000,000,000	2,000,000,000
(2,100,000,000)	(2,100,000,000)
--	--

PT Air Minum Indonesia

Sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Air Minum Indonesia No. 04 tanggal 30 Juli 2015 yang dibuat oleh Notaris Putranto Nur Utomo, S.H., M.Kn., yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-2449637.AH.01.01 Tahun 2015 dan surat dari PT Air Minum Indonesia No. 03/AMI/2015 tanggal 7 September 2015, Perusahaan menyetorkan modal sebesar Rp100.000.000 yang mewakili 10% kepemilikan di PT Air Minum Indonesia.

Berdasarkan surat Direktur Jendral Cipta Karya No: PR.01-03DC/374 tanggal 4 April 2017 tentang Tindak Lanjut Kerja Sama Pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jatiluhur untuk penyediaan air minum wilayah Jakarta, Bekasi dan Karawang yang menyatakan bahwa proyek SPAM Regional Jatiluhur I akan dilaksanakan dengan skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha) dimana Perusahaan akan bertindak sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) dan tidak akan tergabung dalam konsorsium Badan Usaha Pelaksana Proyek. Untuk itu, Perusahaan agar menarik partisipasi dalam PT Air Minum Indonesia dan melepaskan kepemilikan saham pada PT Air Minum Indonesia dan menarik anggota Direksi dan Dewan Dewan Pengawas yang berasal dari Perusahaan.

PT Padi Energi Nusantara (PEN)

Berdasarkan Surat dari Kementerian BUMN No: S-899/MBU/2008 tentang persetujuan Pendirian PEN tanggal 17 November 2008, Perusahaan melakukan penyertaan sebesar Rp2.000.000.000 atau 6,9% dari total modal yang disetor pada PEN yang telah tercatat dalam akta Pendirian PEN Nomor 12 tanggal 30 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris Neny Saadah, S.H.

PT Air Minum Indonesia

In accordance with the Deed of Establishment of a Limited Liability Company PT Air Minum Indonesia No. 04 dated July 30, 2015 made by Notary Putranto Nur Utomo, S.H., M.Kn., which has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-2449637.AH.01.01 Year 2015 and a letter from PT Air Minum Indonesia No. 03/AMI/2015 dated September 7, 2015, the Company paid up capital of Rp100,000,000 which represents 10% of ownership in PT Air Minum Indonesia.

Based on letter from the General Director of Cipta Karya No: PR.01-03-DC/374 dated April 4, 2017 regarding Follow-up to the Cooperation in the Implementation of the Development of the Jatiluhur Drinking Water Supply System (SPAM) for the supply of drinking water in Jakarta, Bekasi and Karawang areas which stated that SPAM Regional Jatiluhur I project will be implemented with scheme KPBU (Government Business Entity Cooperation) scheme in which the Company will act as the Project In-Charge of the Cooperation (PJPK) and will not be part of the Project Implementing Business Entity consortium. For this reason, the Company must withdraw its participation in PT Air Minum Indonesia and relinquish its share ownership in PT Air Minum Indonesia and withdraw members of the Board of Directors and Board of Supervisory from the Company.

PT Padi Energi Nusantara (PEN)

Based on Letter of Ministry of SOE No: S-899/MBU/2008 concerning the agreement of Establishment of PEN dated November 17, 2008, the Company invested Rp2,000,000,000 or 6,9% of total paid-up capital of PEN as shown in the Deed of Establishment of PEN Number 12 dated December 30, 2008 which issued by Notary Neny Saadah, S.H.

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Berdasarkan hasil *Financial Due Diligence* dari konsultan PT Saraswati Perdana, nilai ekuitas proforma PEN per 31 Desember 2012 sebesar Rp882.000.000 yang terbagi atas 29.000 saham atau Rp30.430 per saham. Penyertaan saham Perusahaan pada PEN adalah 2.000 saham dengan total nominal Rp2.000.000.000. Sehingga, berdasarkan hasil *Financial Due Diligence* tersebut, nilai saham Perusahaan menjadi sebesar Rp60.860.000.000. Karena kondisi PEN menunjukkan adanya kesangsian besar tentang kemampuan mempertahankan kelangsungan hidupnya, diperkirakan nilai penyertaan saham perusahaan pada PEN per 31 Desember 2013 sebesar nihil atau mengalami penurunan nilai sebesar Rp2.000.000.000 (100%).

Pada tanggal 13 April 2022, dilaksanakan rapat pembahasan *Draft* Keputusan Pemegang Saham PT PEN terkait rencana penggantian likuidator dan tambahan biaya likuidasi dengan hasil pembahasan sebagai berikut:

1. Masing-masing perwakilan Pemegang Saham akan mengajukan persetujuan prinsip kepada manajemen masing-masing terhadap rencana penggantian likuidator PT PEN termasuk biaya penyelesaian likuidasi PT PEN sebagaimana diuraikan dalam lampiran serta mereviu *Draft* Keputusan Pemegang Saham (KPS). Persetujuan manajemen dimaksud dan hasil *review draft* KPS akan disampaikan kepada PT Pupuk Kaltim paling lambat tanggal 18 April 2022.
2. Terkait teknis pemberhentian Bpk. Bahrul Ilmi Yakub selaku Likuidator PT PEN yang lama dan pertanggungjawabannya akan dibahas lebih lanjut oleh Pemegang Saham PT PEN.

Akta pernyataan RUPS No. 89 tanggal 28 Juni 2022, Akta Notaris Mahendra Adinegara S.H., M.Kn., telah terbit berdasarkan RUPS Sirkuler menyetujui dan menetapkan:

1. Mencabut keputusan Pemegang Saham terkait penunjukan KAP Ellya Noorlisyati & Rekan untuk melakukan *general audit*.
2. Memberhentikan Bahrul Ilmi Yakup & Partners sebagai likuidator PT PEN.
3. Menunjuk Rahmatsyah S.H. yang merupakan Advokat dari Ertiga Law Firm sebagai Likuidator PT PEN (DL) ("Likuidator") didampingi sesuai keperluannya oleh mantan Direktur PT PEN (DL) untuk melakukan penyelesaian likuidasi PT PEN.

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Based on *Financial Due Diligence* report by consultant PT Saraswati Perdana, PEN's pro forma equity value as of December 31, 2012 amounting to Rp882,000,000 to which divided into 29,000 shares or Rp30,430 per share. The Company's investment in PEN is 2,000 shares with a total nominal value of Rp2,000,000,000. Therefore, based on the *Financial Due Diligence* report, the Company's nominal value is Rp60,860,000,000. Since the condition of PEN shows that there is great doubt about its ability to maintain its going concern, it is estimated that the value of the company's investment in PEN as of December 31, 2013 is amounting to nil or a decrease of Rp2,000,000,000 (100%).

On April 13, 2022, a discussion meeting was held to discuss the PT PEN Shareholders' Draft Decision regarding the plan to replace the liquidator and additional liquidation costs with the results of the discussion as follows:

1. Each representative of the Shareholders will submit in-principle approval to their respective management for the plan to change PT PEN's liquidator including the cost of completing PT PEN's liquidation as described in the attachment and review the Draft Shareholder Decision (KPS). The intended management approval and the review results of the KPS draft will be submitted to PT Pupuk Kaltim no later than April 18, 2022.
2. Regarding the technicality of dismissing Mr. Bahrul Ilmi Yakub as the former PT PEN Liquidator and his responsibilities will be discussed further by PT PEN's Shareholders.

Deed of GMS statement No. 89 dated June 28, 2022, Deed of Notary Mahendra Adinegara S.H., M.Kn., has been issued based on the Circular GMS agreed and determined:

1. Revoke the Shareholders' decision regarding the appointment of KAP Ellya Noorlisyati & Partners to conduct a general audit.
2. Dismissing Bahrul Ilmi Yakup & Partners as PT PEN's liquidator.
3. Appoint Rahmatsyah S.H. who is an Advocate from Ertiga Law Firm as Liquidator of PT PEN (DL) ("Liquidator") accompanied as needed by the former Director of PT PEN (DL) to carry out the liquidation settlement of PT PEN.

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. Menunjuk PT Pupuk Kalimantan Timur sebagai wakil dari Pemegang Saham Perseroan untuk melakukan perikatan dengan Likuidator. 5. Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Likuidator untuk menunjuk auditor laporan keuangan independen dan tenaga profesional-profesional lainnya yang diperlukan sehubungan dengan proses pembubaran/likuidasi Perseroan. 6. Meminta Likuidator untuk menyelesaikan pemberesan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan likuidasi PT PEN. 7. Menyetujui kompensasi/upah (<i>fee</i>) yang harus diberikan kepada Likuidator yang akan ditanggung oleh Pemegang Saham Perseroan secara proporsional sesuai persentase kepemilikan saham masing-masing. 8. Apabila terdapat utang-utang terkait pajak dalam rangka penyelesaian likuidasi (jika ada) Perseroan dan sisa hasil likuidasi tidak cukup untuk melunasi utang-utang pajak tersebut, maka ditanggung oleh Pemegang Saham Perseroan secara proporsional sesuai persentase kepemilikan saham masing-masing. 9. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Likuidator Perseroan untuk mewakili Pemegang Saham Perseroan menyatakan kembali segala sesuatu yang diputuskan dalam Keputusan ini di hadapan Notaris atau Pejabat yang berwenang bila diperlukan, dan untuk menandatangani setiap akta atau dokumen-dokumen yang terkait dengannya, melaporkan dan mendaftarkan akta kepada instansi yang berwenang serta melakukan segala tindakan yang dipandang perlu dan bermanfaat guna terlaksananya maksud dan tujuan Keputusan ini.	4. Appointed PT Pupuk Kalimantan Timur as a representative of the Company's Shareholders to enter into an engagement with the Liquidator. 5. Agree to give authority to the Liquidator to appoint an independent financial report auditor and other professionals needed in connection with the dissolution/liquidation process of the Company. 6. Asking the Liquidator to complete the settlement of matters relating to the liquidation of PT PEN. 7. Approve the compensation/wages (fees) that must be given to the Liquidators which will be borne by the Company's Shareholders proportionally according to the percentage of each share ownership. 8. If there are tax-related debts in the context of settlement of the liquidation (if any) of the Company and the remaining liquidation proceeds are not sufficient to pay off these tax debts, then they shall be borne by the Company's Shareholders proportionally to their respective share ownership percentages. 9. To grant power of attorney with substitution rights to the Company's Liquidators to represent the Company's Shareholders restate everything decided in this Decree before a Notary or an authorized Officer if necessary, and to sign any deed or documents related to it, report and register deed to the competent authority and take all actions deemed necessary and useful in order to carry out the aims and objectives of this Decree.

15. Aset Tetap

15. Fixed Assets

	2022					
	Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Reklasifikasi dan Koreksi/ <i>Reclassification and Correction</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>	
Biaya Perolehan						Acquisition Cost
Tanah	16,635,043,301	--	--	6,855,989,750	23,491,033,051	Land
Sarana	21,678,368,228	658,428,690	--	--	22,336,796,918	Facilities
Bangunan	213,002,325,595	18,432,850,835	--	3,569,707,835	235,004,884,265	Buildings
Suku Cadang Penyangga	3,828,336,831	--	--	--	3,828,336,831	Spareparts
Instalasi dan Jaringan	764,892,712,414	46,669,308,753	--	27,901,728,221	839,463,749,388	Installation and Networks
Alat Angkut dan Alat Berat	105,997,398,762	9,387,845,150	--	6,018,491,570	121,403,735,482	Heavy Equipment and Vehicle
Perabotan dan Peralatan	195,864,056,223	10,249,240,782	--	--	206,113,297,005	Furnitures and Equipment
Sub Jumlah	1,321,898,241,354	85,397,674,210	--	44,345,917,376	1,451,641,832,940	Sub Total

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2022						
	Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Reklasifikasi dan Koreksi/ <i>Reclassification and Correction</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>	
Aset Dalam Penyelesaian						Assets Under Construction
Tanah	7,440,602,425	1,851,990,775	--	(6,855,989,750)	2,436,603,450	Land
Sarana	--	2,619,557,423	--	--	2,619,557,423	Facilities
Bangunan	4,216,990,679	17,414,681,896	--	(3,569,707,835)	18,061,964,740	Buildings
Instalasi dan Jaringan	32,773,413,305	31,356,632,346	--	(32,773,413,305)	31,356,632,346	Installation and Networks
Alat Angkut dan Alat Berat	6,018,491,570	--	--	(6,018,491,570)	--	Heavy Equipment and Vehicle
Sub Jumlah	50,449,497,979	53,242,862,440	--	(49,217,602,460)	54,474,757,959	Sub Total
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Sarana	11,993,592,403	952,993,503	--	--	12,946,585,906	Facilities
Bangunan	77,207,127,321	12,341,571,322	--	--	89,548,698,643	Buildings
Suku Cadang Penyangga	2,198,131,849	217,437,938	--	--	2,415,569,787	Spareparts
Instalasi dan Jaringan	332,596,359,371	33,592,519,501	--	--	366,188,878,872	Installation and Networks
Alat Angkut dan Alat Berat	52,680,783,692	13,777,042,726	--	--	66,457,826,418	Heavy Equipment and Vehicle
Perabotan dan Peralatan	142,929,027,183	21,433,130,240	--	--	164,362,157,423	Furnitures and Equipment
Sub Jumlah	619,605,021,819	82,314,695,230	--	--	701,919,717,049	Sub Total
Nilai Buku	752,742,717,514				804,196,873,850	Book Value
2021						
	Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Reklasifikasi dan Koreksi/ <i>Reclassification and Correction</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>	
Biaya Perolehan						Acquisition Cost
Tanah	16,635,048,380	--	5,079	--	16,635,043,301	Land
Sarana	20,013,287,112	1,665,081,116	--	--	21,678,368,228	Facilities
Bangunan	194,988,428,207	17,453,778,478	3,452,455	563,571,365	213,002,325,595	Buildings
Suku Cadang Penyangga	3,828,336,831	--	--	--	3,828,336,831	Spareparts
Instalasi dan Jaringan	678,815,819,806	45,041,505,320	--	41,035,387,288	764,892,712,414	Installation and Networks
Alat Angkut dan Alat Berat	63,087,214,762	42,910,184,000	--	--	105,997,398,762	Heavy Equipment and Vehicle
Perabotan dan Peralatan	165,136,014,788	20,873,850,185	--	9,854,191,250	195,864,056,223	Furnitures and Equipment
Tanaman Konservasi	7,510,296,025	--	--	(7,510,296,025)	--	Conservation Plantation
Sub Jumlah	1,150,014,445,911	127,944,399,099	3,457,534	43,942,853,878	1,321,898,241,354	Sub Total
Aset Dalam Penyelesaian						Assets Under Construction
Tanah	1,556,569,970	6,374,556,775	--	(490,524,320)	7,440,602,425	Land
Bangunan	2,074,039,000	38,716,686,679	--	(36,573,735,000)	4,216,990,679	Buildings
Instalasi dan Jaringan	865,533,350	41,418,771,415	--	(9,510,891,460)	32,773,413,305	Installation and Networks
Alat Angkut dan Alat Berat	--	6,018,491,570	--	--	6,018,491,570	Heavy Equipment and Vehicle
Perabotan dan Peralatan	3,828,286,000	957,071,500	--	(4,785,357,500)	--	Furnitures and Equipment
Sub Jumlah	8,324,428,320	93,485,577,939	--	(51,360,508,280)	50,449,497,979	Sub Total
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Sarana	11,068,509,546	925,082,857	--	--	11,993,592,403	Facilities
Bangunan	71,375,865,321	5,854,046,923	3,449,455	(19,335,468)	77,207,127,321	Buildings
Suku Cadang Penyangga	1,961,887,513	236,244,336	--	--	2,198,131,849	Spareparts
Instalasi dan Jaringan	303,772,063,605	28,824,295,766	--	--	332,596,359,371	Installation and Networks
Alat Angkut dan Alat Berat	44,152,339,183	8,528,444,509	--	--	52,680,783,692	Heavy Equipment and Vehicle
Perabotan dan Peralatan	125,590,460,516	17,338,566,667	--	--	142,929,027,183	Furnitures and Equipment
Tanaman Konservasi	724,383,374	187,757,402	--	(912,140,776)	--	Conservation Plantation
Sub Jumlah	558,645,509,058	61,894,438,460	3,449,455	(931,476,244)	619,605,021,819	Sub Total
Nilai Buku	599,693,365,173				752,742,717,514	Book Value

Pada 31 Desember 2022 dan 2021, aset tetap tidak diasuransikan terhadap risiko kebakaran, pencurian dan risiko lainnya.

As of December 31, 2022 and 2021, fixed assets are not insured against fire, theft and other possible risks.

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Aset Dalam Penyelesaian pada 31 Desember 2022 dan 2021 yang menjadi beban masing-masing sebesar nihil dan Rp3.142.740.920.

Assets Under Construction as of December 31, 2022 and 2021 which became expenses amounting to nil and Rp3,142,740,920, respectively.

Pada tahun 2022, Aset Dalam Penyelesaian berupa Instalasi dan Jaringan sebesar Rp32.773.413.305 direklasifikasi ke Aset Takberwujud dan Aset Tetap masing-masing sebesar Rp4.871.685.084 dan Rp27.901.728.221.

In 2022, Assets Under Construction in the form of Installation and Networks amounting to Rp32,773,413,305 has been reclassified to Intangible Assets and Fixed Assets amounting to Rp4,871,685,084 and Rp27,901,728,221, respectively.

Harga perolehan aset tetap yang telah disusutkan penuh namun masih digunakan untuk kegiatan operasional Perusahaan pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp280.604.410.303 dan Rp250.144.065.225.

Acquisition cost of fixed assets which has been fully depreciated yet are still used for the Company's operational activities as of December 31, 2022 and 2021 is amounting to Rp280,604,410,303 and Rp250,144,065,225, respectively.

Beban penyusutan aset tetap untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dialokasikan masing-masing pada:

Depreciation expenses of fixed assets for the years ended as of December 31, 2022 and 2021, respectively, are allocated to:

	2022	2021	
	Rp	Rp	
Beban Pokok Pendapatan (Catatan 32)	71,799,363,278	53,915,361,645	Cost of Revenue (Note 32)
Beban Umum dan Administrasi (Catatan 34)	10,515,331,952	7,979,076,815	General and Administrative Expenses (Note 34)
Jumlah	82,314,695,230	61,894,438,460	Total

Rincian aset dalam penyelesaian pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Details of assets under construction as of December 31, 2022 and 2021 are as follows:

2022			
	Persentase Penyelesaian/ Percentage of Completion	Biaya Perolehan/ Acquisition Cost	Estimasi Tahun Penyelesaian/ Estimated Year of Completion
Tanah/ Land	40% - 97%	2,436,603,450	Agustus - September 2023/ August - September 2023
Bangunan/ Building	62% - 98%	18,061,964,740	Maret - April 2023/ March - April 2023
Instalasi dan Jaringan/ Installation and Network	77% - 97%	31,356,632,346	Februari - Maret 2023/ February - March 2023
Sarana/ Facilities	24% - 87%	2,619,557,423	Februari - Maret 2023/ February - March 2023

2021			
	Persentase Penyelesaian/ Percentage of Completion	Biaya Perolehan/ Acquisition Cost	Estimasi Tahun Penyelesaian/ Estimated Year of Completion
Tanah/ Land	60% - 95%	7,440,602,425	Maret - April 2022/ March - April 2022
Bangunan/ Building	0% - 90%	4,216,990,679	Januari - November 2022/ January - November 2022
Instalasi dan Jaringan/ Installation and Network	5% - 97%	32,773,413,305	Januari - Juli 2022/ January - July 2022
Alat Angkut dan Alat Berat/ Transportation and Heavy Equipment	40%	6,018,491,570	Januari - Desember 2022/ January - December 2022

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

16. Aset Takberwujud

16. Intangible Assets

2022					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Reklasifikasi dan Koreksi/ Reclassification and Correction	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Biaya Perolehan					Acquisition Cost
Perangkat Lunak Komputer	--	897,727,559	4,871,685,084	5,769,412,643	Computer Software
Lisensi	--	1,113,640,517	--	1,113,640,517	License
Sub Jumlah	--	2,011,368,076	4,871,685,084	6,883,053,160	Sub Total
Aset Takberwujud					Intangible Assets
Dalam Penyelesaian					Under Construction
Perangkat Lunak Komputer	--	3,238,955,498	--	3,238,955,498	Computer Software
Sub Jumlah	--	3,238,955,498	--	3,238,955,498	Sub Total
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Perangkat Lunak Komputer	--	1,081,515,593		1,081,515,593	Computer Software
Lisensi	--	23,385,823	--	23,385,823	License
Sub Jumlah	--	1,104,901,416	--	1,104,901,416	Sub Total
Nilai Buku	--			9,017,107,242	Book Value

Beban penyusutan aset takberwujud untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dialokasikan pada Beban Umum dan Administrasi (Catatan 34).

Depreciation expenses of intangible assets for the year ended as of December 31, 2022 are allocated to General and Administrative Expenses (Note 34).

17. Aset Hak-Guna

17. Right-of-Use Assets

2022						
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deduction	Penyesuaian/ Adjustment	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Aset Hak-Guna:						Right-of-Use Assets:
Tanah	3,329,839,502	7,372,307,688	--	--	10,702,147,190	Land
Bangunan	1,329,545,455	704,000,000	1,329,545,455	--	704,000,000	Building
Kendaraan	16,441,637,655	1,105,782,958	2,502,024,701	--	15,045,395,912	Vehicle
Sub Jumlah	21,101,022,612	9,182,090,646	3,831,570,156	--	26,451,543,102	Sub Total
Akumulasi Penyusutan:						Accumulated Depreciation:
Tanah	1,942,406,377	665,967,901	--	--	2,608,374,278	Land
Bangunan	1,287,878,788	144,333,334	1,329,545,455	--	102,666,667	Building
Kendaraan	5,327,034,511	5,459,419,154	2,102,767,288	--	8,683,686,377	Vehicle
Sub Jumlah	8,557,319,676	6,269,720,389	3,432,312,743	--	11,394,727,322	Sub Total
Nilai Buku	12,543,702,936				15,056,815,780	Book Value

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	2021					
	Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deduction</i>	Penyesuaian/ <i>Adjustment</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>	
Aset Hak-Guna:						Right-of-Use Assets:
Tanah	3,259,156,401	--	--	70,683,101	3,329,839,502	Land
Bangunan	1,329,545,455	--	--	--	1,329,545,455	Building
Kendaraan	10,830,105,210	12,276,226,892	6,688,293,376	23,598,929	16,441,637,655	Vehicle
Sub Jumlah	15,418,807,066	12,276,226,892	6,688,293,376	94,282,030	21,101,022,612	Sub Total
Akumulasi Penyusutan:						Accumulated Depreciation:
Tanah	1,249,343,287	665,967,901	--	27,095,189	1,942,406,377	Land
Bangunan	1,162,878,788	125,000,000	--	--	1,287,878,788	Building
Kendaraan	6,753,326,976	5,213,813,137	6,688,293,376	48,187,774	5,327,034,511	Vehicle
Sub Jumlah	9,165,549,051	6,004,781,038	6,688,293,376	75,282,963	8,557,319,676	Sub Total
Nilai Buku	6,253,258,015				12,543,702,936	Book Value

Beban penyusutan aset hak-guna untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dialokasikan masing-masing pada:

Depreciation expenses of right-of-use assets for the years ended as of December 31, 2022 and 2021, respectively, are allocated to:

	2022 Rp	2021 Rp	
Beban Pokok Pendapatan (Catatan 32)	3,443,370,412	2,910,887,990	Cost of Revenue (Note 32)
Beban Umum dan Administrasi (Catatan 34)	2,826,349,977	3,093,893,048	General and Administrative Expenses (Note 34)
Jumlah	6,269,720,389	6,004,781,038	Total

18. Aset Tidak Lancar Lainnya

18. Other Non-Current Assets

	2022 Rp	2021 Rp	
Keanggotaan <i>Golf Club</i>	213,500,000	213,500,000	<i>Golf Club Membership</i>
Barang Usang/ Besi Tua	6,379,400	6,379,400	Obsolescence Goods
Aset Tidak Produktif	698,400	698,400	Non-productive Assets
Jumlah	220,577,800	220,577,800	Total

Keanggotaan *Golf Club*

Merupakan keanggotaan *golf club* di PT Surya Mas Duta Makmur (Rancamaya *Golf and Country Club* Bogor).

Golf Club Membership

Represents golf club membership in PT Surya Mas Duta Makmur (Rancamaya Golf and Country Club Bogor).

Aset Tidak Produktif

Aset tidak produktif merupakan saldo aset tanah milik Perusahaan di Ciganea yang digunakan untuk jalan Tol Cipularang. Kementerian Pekerjaan Umum telah menyiapkan lahan pengganti yang terletak di Kampung Bongas, Kelurahan Sindangkasih, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, dengan luas 40.230 m² melalui

Non-Productive Assets

Non-productive assets represent land owned by the Company in Ciganea that built for Cipularang Toll road. The Ministry of Public Works has prepared a replacement land that located in Bongas Village, Sindangkasih Ward, Purwakarta District, Puwakarta Regency with an area of 40,230 sqm through discussion conducted by The Land

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

pembahasan yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Tingkat II Purwakarta.

Procurement of Purwakarta District Level II Committee.

Direksi telah mengirim surat ke Kementerian BUMN tanggal 28 November 2013 perihal Laporan Perkembangan Penyelesaian Permasalahan dan Usulan Penghapusbukuan Aktiva Tetap Milik Perusahaan dengan Mekanisme Tukar Menukar.

The Directors had sent a letter to Ministry of SOE dated November 28, 2013 regarding Progress Report of Problem Solving and Proposal of the Company's Fixed Assets Write-offs in Swap Scheme.

Tukar menukar tanah milik Perusahaan yang berlokasi di Ciganea dengan tanah pengganti yang terletak di Kampung Bongas saat ini telah diselesaikan. Sehingga tanah pengganti yang terletak di Kampung Bongas tercatat sebagai aset Perusahaan, namun untuk tanah Ciganea sampai saat ini belum dapat dikeluarkan dari daftar aset Perusahaan. Hal ini disebabkan karena harus menunggu persetujuan Kementerian untuk dilakukan penghapusan.

The swap of land owned by the Company located in Ciganea for a replacement land located in Bongas village has now been completed. So that the replacement land located in Bongas Village is recorded as the Company's assets, but for Ciganea land has not been removed from the Company's asset list. This is because they have to wait for the approval of the Ministry for write-off.

Berdasarkan Surat Sekertariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. PS.0402-Sj/356 tanggal 20 April 2021 mengenai penyelesaian Tukar Menukar Tanah Perum Jasa Tirta II yang Terdampak Proyek Jalan Tol Cipularang di Kp. Ciganea, Desa Mekargalih, Kecamatan Purwakarta, menginstruksikan kepada Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk segera menyelesaikan pelaksanaan tukar menukar secara definitif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

According to the Letter of the Secretariat General of the Ministry of Public Works and Public Housing No. PS.0402-Sj/356 dated April 20, 2021 regarding the completion of the Land Swap for Perum Jasa Tirta II Affected by the Cipularang Toll Road Project in Kp. Ciganea, Mekargalih Village, Purwakarta District, instructed the Directorate General of Highways of the Ministry of Public Works and Public Housing to immediately complete the definitive swap in accordance with the provisions of the legislation.

19. Utang Usaha

19. Accounts Payable

	2022 Rp	2021 Rp
Pihak Berelasi (Catatan 37)/ <i>Related Parties (Note 37)</i>	5,112,319,329	5,555,232,233
Pihak Ketiga/ <i>Third Parties</i>		
PT Kartika Cipta Indonesia	2,501,329,500	--
PT Tirta Sarama Mulia Technology	1,143,210,377	--
Kantor Hukum K&K Advocates	723,250,000	--
PT SRW Asia	544,500,000	--
PT Inatama Metal Sejahtera	534,049,387	--
PT Adi Sarana Armada	40,817,392	670,114,453
PT Artha Trimita Selaras	--	1,189,675,300
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)	--	658,831,290
PT Binaman Utama (PPM Manajemen)	--	577,835,500
Lainnya (di bawah Rp500 juta)/ <i>Others (below Rp500 million)</i>	2,873,562,021	1,757,580,474
Sub Jumlah - Pihak Ketiga/ <i>Sub Total - Third Parties</i>	8,360,718,677	4,854,037,017
Jumlah/ <i>Total</i>	13,473,038,006	10,409,269,250

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Seluruh utang usaha pada 31 Desember 2022 dan 2021 dalam mata uang Rupiah.

All accounts payable as of December 31, 2022 and 2021 are in Rupiah.

20. Utang Retensi

20. Retention Payables

	2022	2021
	Rp	Rp
PT Duta Rama	560,712,500	1,887,271,379
PT Tirta Sarana Mulia Technology	397,198,624	--
PT Tirta Sari Mandiri	213,630,478	--
Lain-lain/ Others	8,520,709	--
Jumlah/ Total	1,180,062,311	1,887,271,379

21. Beban Akrua

21. Accrued Expenses

	2022	2021	
	Rp	Rp	
Beban Pegawai	61,253,845,784	22,505,100,786	Employee Expenses
Beban Non-Pegawai	10,523,589,837	14,978,890,024	Non-Employee Expenses
Jumlah	71,777,435,621	37,483,990,810	Total

Beban pegawai dialokasikan sebagai berikut:

Employee expenses are allocated as follows:

	2022	2021	
	Rp	Rp	
Beban Jasa Produksi	24,626,546,275	12,066,160,088	Bonus Expenses
Insentif	21,506,819,929	--	Incentive
Tantiem	10,150,000,000	7,500,000,000	Tantiem
Biaya Rumah Sakit	4,451,116,891	2,505,813,859	Hospital Expenses
Beban Pegawai Lainnya	519,362,689	433,126,839	Other Employee Expenses
Jumlah	61,253,845,784	22,505,100,786	Total

Beban non-pegawai dialokasikan sebagai berikut:

Non-employee expenses are allocated as follows:

	2022	2021	
	Rp	Rp	
Konstruksi, Operasi dan Pemeliharaan	7,347,292,048	10,188,824,728	Construction, Operational and Maintenance
Utilitas	1,405,402,177	1,264,221,677	Utilities
Beban Penyediaan Air Baku	794,591,328	512,555,328	Raw Water Supply Expenses
Konsultan	55,200,000	480,658,200	Consultant
Lainnya	921,104,284	2,532,630,091	Others
Jumlah	10,523,589,837	14,978,890,024	Total

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

22. Uang Muka Penjualan

22. Sales Advances

	2022	2021	
	Rp	Rp	
PT Belaputera Intiland	1,052,794,098	--	PT Belaputera Intiland
PT Multi Optimal Sentosa	462,000,000	--	PT Multi Optimal Sentosa
Jumlah	1,514,794,098	--	Total

Merupakan uang muka penjualan yang diterima dari PT Belaputera Intiland dan PT Multi Optimal Sentosa atas pekerjaan konstruksi.

Represent sales advances received from PT Belaputera Intiland and PT Multi Optimal Sentosa for construction work.

23. Pendapatan Diterima di Muka

23. Deferred Revenue

	2022	2021
	Rp	Rp
Berdasarkan Pelanggan/ By Customers		
Pihak Berelasi (Catatan 37)/ Related Parties (Note 37)	6,679,121,186	8,743,532,738
Pihak Ketiga/ Third Parties		
PT Cikarang Litrindo	5,060,738,235	5,167,445,495
PT Indo Bharat Rayon	2,440,667,894	3,416,935,052
PT Triguna Internusa	2,031,113,067	2,792,780,467
PT Mora Telemática Indonesia	954,735,063	551,926,650
PT Daya Cipta Kemasindo	470,789,500	489,088,325
PT High Speed Railway Contractor	290,625,000	968,916,667
PT Logos Indonesia Prime One	--	1,033,727,750
Lain-lain (di bawah Rp500 juta)/ Others (below Rp500 million)	12,100,278,107	12,785,859,001
Sub Jumlah - Pihak Ketiga/ Sub Total - Third Parties	23,348,946,866	27,206,679,407
Jumlah/ Total	30,028,068,052	35,950,212,145
Bagian Jangka Pendek/ Current Portion	(25,213,379,194)	(26,794,540,537)
Bagian Jangka Panjang/ Non-Current Portion	4,814,688,858	9,155,671,608

24. Liabilitas Jangka Pendek Lainnya

24. Other Short-Term Liabilities

	2022	2021	
	Rp	Rp	
Pembelian Aset Tetap	31,539,521,003	40,431,201,336	Acquisition of Fixed Assets
Titipan Pemerintah Daerah			Local Government of West Java
Jawa Barat (Catatan 38-iv)	6,380,840,656	9,745,653,752	Deposits (Note 38-iv)
Rekening Koran dalam			Bank Statements in
Penyelesaian	4,957,013,091	5,736,033,431	Settlement
Uang Jaminan	528,489,012	528,489,012	Deposits
Asuransi	510,640,766	636,354,381	Insurance
Angsuran Rumah Dinas	151,146,153	151,146,153	Official House Installments
Jasa/ Pelayanan Pariwisata	106,474,772	125,068,400	Tourism Services
Lain-lain	527,508,588	504,666,190	Others
Jumlah	44,701,634,041	57,858,612,655	Total

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Rincian pembelian aset tetap dari masing-masing
vendor pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah
sebagai berikut:

List of acquisition of fixed assets from each vendors
as of December 31, 2022 and 2021 is as follows:

	2022 Rp	2021 Rp
PT Ridha Tri Utama	4,069,347,584	4,203,714,530
PT Infomedia Nusantara	3,238,955,498	--
PT Gelora Megah Sejahtera	3,015,578,500	4,812,260,170
KSO Anugerah Bangun Kencana dan Karya Konstrindo	2,641,255,989	524,011,344
PT Mirambi Energi	2,513,067,853	--
PT Spektrum Krisindo Elektrika	2,198,710,200	--
PT Borneo Mitra Sinergi	2,011,551,447	6,482,370,371
PT Bisetta	1,738,829,674	--
PT Quantum Inti Utama	1,178,475,456	--
CV Djaja Sampurna Mandiri	994,193,700	--
CV Raisya Putri	991,017,990	--
PT Intra Indotama Karya	935,868,750	--
PT Air Surya Radiator	830,070,529	--
PT Arkindo	794,197,280	--
PT Kita Teknologi Indonesia	732,233,700	--
PT Energi Trans Mandiri	641,779,800	--
PT Perlinas Energi Utama	625,663,266	--
PT Arca Energi	268,054,954	2,097,280,068
KSO PT Putra Kencana dan PT Shiddiq Sarana Mulya	--	14,656,488,000
PT Pilar Jati Persada	--	1,013,950,080
Kantor PPAT Iwan Setyawan, SE., SH., M.Kn	--	1,100,317,625
PT Sava Jaya Anugerah	--	934,724,532
CV Jason Putra Abadi	--	798,497,854
Notaris dan PPAT H. Tafieldi Nevawan, SH., MH	--	567,364,500
Lain-lain (di bawah Rp500 juta)/ Others (below Rp500 million)	2,120,668,833	3,240,222,262
Jumlah	31,539,521,003	40,431,201,336

25. Liabilitas Sewa

25. Lease Liabilities

	2022 Rp	2021 Rp	
Liabilitas Sewa Bruto -			Gross Lease Liabilities -
Pembayaran Sewa Minimum			Minimum Lease Payments
Tidak Lebih dari 1 Tahun	6,751,857,546	6,372,989,200	Not Later than 1 Year
Lebih dari 1 Tahun	13,021,551,120	6,816,634,900	Later than 1 Year
Sub Jumlah	19,773,408,666	13,189,624,100	Sub Total
Dikurangi:			Less:
Beban Keuangan di			Future Finance Charges on
Masa Depan atas Sewa	(4,691,567,354)	(470,000,845)	Leases
Nilai Kini Liabilitas Sewa	15,081,841,312	12,719,623,255	Present Value of Lease Liabilities

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	2022 Rp	2021 Rp	
Dikurangi:			Less:
Bagian Jatuh Tempo dalam Waktu 1 Tahun	(6,160,381,683)	(6,022,860,500)	Current Portion Mature within 1 Year
Bagian Jangka Panjang	8,921,459,629	6,696,762,755	Non-Current Portion
Liabilitas Sewa Berdasarkan Jatuh Tempo			Lease Liabilities by Due Date
Tidak Lebih dari 1 Tahun	6,160,381,683	6,022,860,500	Not Later than 1 Year
Lebih dari 1 Tahun	8,921,459,629	6,696,762,755	Later than 1 Year
Jumlah	15,081,841,312	12,719,623,255	Total
Merupakan liabilitas sewa sehubungan dengan Aset Hak-Guna (Catatan 17).		Represent the lease liabilities in accordance to Right-of-Use Assets (Note 17).	

26. Liabilitas Imbalan Kerja

26. Employee Benefits Liabilities

	2022 Rp	2021 Rp	
Perusahaan			The Company
Imbalan Pascakerja	97,151,490,653	80,810,555,426	Post-Employee Benefits
Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain	16,267,785,078	11,535,772,367	Other Long-Term Benefits
Manfaat Pensiun	167,066,434,919	120,284,374,803	Pension Benefits
Sub Jumlah	280,485,710,650	212,630,702,596	Sub Total
Entitas Anak			The Subsidiary
Imbalan Pascakerja	532,268,793	271,503,871	Post-Employee Benefits
Sub Jumlah	532,268,793	271,503,871	Sub Total
Jumlah	281,017,979,443	212,902,206,467	Total
Bagian Jangka Pendek	(6,278,499,682)	(1,847,920,667)	Current Portion
Bagian Jangka Panjang	274,739,479,761	211,054,285,800	Non-Current Portion

Berdasarkan Surat Edaran Perum Jasa Tirta II Nomor: SD-24/DIR/12/2021 tanggal 31 Desember 2021, Perusahaan menetapkan pemberian hak karyawan akibat Pemutusan Kerja di tahun 2022 dan 2021 mengacu pada ketentuan perhitungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi Perum Jasa Tirta II Nomor: PRD-09/DIR/06/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Perum Jasa Tirta II, yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Perusahaan memiliki tiga program, yaitu manfaat pensiun dari Dana Pensiun Jasa Tirta II, kewajiban diestimasi imbalan pascakerja karyawan dan liabilitas jangka panjang lainnya.

Based on the Circular Letter of Perum Jasa Tirta II Number: SD-24/DIR/12/2021 dated December 31, 2021, the Company stipulates that the granting of employee rights due to Termination in 2022 and 2021 refers to the calculation provisions as stipulated in the Regulation of the Board of Directors of Perum Jasa Tirta II Number: PRD-09/DIR/06/2020 concerning Guidelines for the Management of Human Resources in Perum Jasa Tirta II, which is guided by Law Number 13 Year 2003 concerning Manpower.

The Company has three programs, namely pension benefits from the Dana Pensiun Jasa Tirta II, the obligation to estimate post-employment benefits for employees and other long-term liabilities.

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Perhitungan manfaat pensiun dari Dana Pensiun dihitung oleh aktuaris independen dari Kantor Konsultan Aktuaria (KKA) Steven & Mourits dengan No. 0897/ST-HR-PSAK24-PUJTII/II/2023 tanggal 23 Februari 2023 untuk tahun 2022 dan Kantor Konsultan Aktuaria (KKA) Indra Catarya Situmeang dan Rekan dengan laporan No. 134/LA-IK/KKAICS/III-2022 tanggal 25 Maret 2022 untuk tahun 2021.

Calculation of pension benefits from Dana Pensiun is calculated by an independent actuary from the Actuarial Consulting Office (KKA) Steven & Mourits with No. 0897/ST-HR-PSAK24-PUJTII/II/2023 dated February 23, 2023 for the year 2022 and the Actuarial Consulting Office (KKA) Indra Catarya Situmeang and Partners with report No. 134/LA-IK/KKAICS/III-2022 dated March 25, 2022 for the year 2021.

Perusahaan memberikan imbalan kerja jangka panjang dan imbalan pascakerja lainnya kepada karyawan sesuai dengan imbalan berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 (UU No. 13/2003) dan sesuai surat edaran nomor: SED-24/DIR/12/2021 imbalan tersebut tidak didanai. Perhitungan imbalan pascakerja telah dihitung oleh aktuaris independen KKA Steven & Mourits dengan No. 0897/ST-HR-PSAK24-PUJTII/II/2023 tanggal 23 Februari 2023 untuk tahun 2022 dan aktuaris independen KKA Nurichwan berdasarkan laporan aktuaria No.368/KKA-N/R-I/II/2022 tanggal 16 Februari 2022 untuk tahun 2021.

The Company provides long-term employee benefits and other post-employment benefits to employees in accordance with the benefits based on Labor Law No. 13/2003 (Law No. 13/2003) and according to circular letter number: SED-24/DIR/12/2021 the benefits are not funded. Calculation of post-employment benefits has been calculated by the independent actuary KKA Steven & Mourits with No. 0897/ST-HR-PSAK24-PUJTII/II/2023 dated February 23, 2023 for the year 2022 and the independent actuary KKA Nurichwan based on actuarial report No. 368/KKA-N/R-I/II/2022 dated February 16, 2022 for the year 2021.

Asumsi dan metode yang digunakan dalam menghitung imbalan kerja adalah sebagai berikut:

The assumptions and methods used in calculating employee benefits are as follows:

a. Asumsi Imbalan Pascakerja

a. Post-Employment Benefits Assumptions

	2022	2021	
Tingkat Bunga Aktuaria	7.30%	6.97%	Actuarial Interest Rate
Tingkat Kenaikan Upah	7.00%	7.00%	Wage Increase Rate
Tingkat Kematian/Mortalita	TMI IV 2019 (P/W)		Mortality Rate
Tingkat Kecacatan	1% x Tingkat Mortalita	5% x Tingkat Mortalita	Disability Rate
	1% x Mortality Rate	5% x Mortality Rate	
Tingkat Pengunduran diri	1% per tahun	5% pada usia	Resignation Rate
	sampai usia 20 dan	sampai usia 39	
	menurun secara	tahun dan menurun	
	linier ke 0% di usia	secara linier sampai	
	56 tahun	dengan usia normal	
	1%p.a up to age 20	5% at age to 39	
	years old and	years old and	
	reducing linearly to	reducing linearly to	
	0% p.a at age 56	0% p.a age the	
	years old	normal retirement	
		age	
Metode Penghitungan Aktuaria	Projected Unit Credit		Actuary Valuation Method

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

b. Asumsi Manfaat Pensiun

	2022	2021
Tingkat Bunga Aktuaria	7.40%	7.50%
Tingkat Kenaikan Upah	7.00%	7.00%
Tingkat Kematian/Mortalita	ANN 1949	ANN 1949
Sebelum Pensiun	TMI IV 2019 (P/W)	AMT/ANN-1949 (P)
Setelah Pensiun	AMT/ANN-1949 (P/W)	AMT/ANN-1949 (P)
Tingkat Kecacatan	1% dari mortalita/ 1% from mortality	5% dari mortalita/ 5% from mortality
Tingkat Pengunduran diri	1% per tahun sampai usia 20 tahun dan menurun secara linear ke 0% di usia 56 tahun/ 1% p.a up to at age 20 years old and decreases linearly to 0% p.a at age 56 years old	5% per tahun sampai usia 39 tahun lalu menurun secara linear ke 0% di usia pensiun normal/ 5% p.a up to at age 39 years old then decreases linearly to 0% p.a at the normal retirement age

Metode Penghitungan Aktuaria

Projected Unit Credit

b. Pension Benefit Liability Assumption

2022	2021
7.40%	7.50%
7.00%	7.00%
ANN 1949	ANN 1949
TMI IV 2019 (P/W)	AMT/ANN-1949 (P)
AMT/ANN-1949 (P/W)	AMT/ANN-1949 (P)
1% dari mortalita/ 1% from mortality	5% dari mortalita/ 5% from mortality
1% per tahun sampai usia 20 tahun dan menurun secara linear ke 0% di usia 56 tahun/ 1% p.a up to at age 20 years old and decreases linearly to 0% p.a at age 56 years old	5% per tahun sampai usia 39 tahun lalu menurun secara linear ke 0% di usia pensiun normal/ 5% p.a up to at age 39 years old then decreases linearly to 0% p.a at the normal retirement age

Actuarial Interest Rate

Wage Increase Rate

Mortality Rate

Before Pension

After Pension

Disability Rate

Resignation Rate

Actuary valuation method

c. Mutasi Imbalan Pascakerja

Mutasi liabilitas imbalan pascakerja di laporan
posisi keuangan:

	2022 Rp	2021 Rp
Perusahaan		
Nilai Kini Kewajiban -		
Awal Tahun	80,810,555,426	91,421,207,659
Penyesuaian Liabilitas atas		
Reklasifikasi Imbalan	2,751,739,477	--
Biaya Bunga	5,803,226,919	6,298,921,208
Biaya Jasa Kini	7,320,928,675	4,792,377,910
Biaya Jasa Lalu atas		
Perubahan Imbalan	14,339,203,425	--
Penyesuaian atas Penerapan		
Perubahan Atribusi		
Imbalan Kerja	(10,806,467,824)	--
Pembayaran Imbalan	(6,843,686,385)	(10,638,393,518)
Sub Jumlah	93,375,499,713	91,874,113,259
Pengukuran Kembali		
(Manfaat)/ Kerugian dari		
Perubahan Asumsi:		
Keuangan	(308,073,357)	(4,033,347,166)
Demografi	888,979,065	--
Penyesuaian atas		
Pengalaman	3,195,085,232	(7,030,210,667)
Sub Jumlah	3,775,990,940	(11,063,557,833)
Nilai Kini Liabilitas		
Akhir Tahun - Perusahaan	97,151,490,653	80,810,555,426

c. Post-Employment Benefits Movement

Movements of post-employment benefit
liabilities in the statement of financial position:

2022 Rp	2021 Rp
80,810,555,426	91,421,207,659
2,751,739,477	--
5,803,226,919	6,298,921,208
7,320,928,675	4,792,377,910
14,339,203,425	--
(10,806,467,824)	--
(6,843,686,385)	(10,638,393,518)
93,375,499,713	91,874,113,259
(308,073,357)	(4,033,347,166)
888,979,065	--
3,195,085,232	(7,030,210,667)
3,775,990,940	(11,063,557,833)
97,151,490,653	80,810,555,426

The Company

Present Value of Liabilities -

Beginning of the Year

Liabilities Adjustment on

Reclassification of Benefits

Interest Cost

Current Service Cost

Past Service on Changes of

Benefits

Adjustment due to

Implementation of Change on

Employee Benefits Attribution

Benefit Payments

Sub Total

Remeasurement of

(Gain)/ Loss From Changes

of Assumption:

Financial

Demography

Adjustment on

Experience

Sub Total

Present Value of Liabilities at

End of Year - The Company

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	2022 Rp	2021 Rp	
Entitas Anak			The Subsidiary
Nilai Kini Kewajiban -			Present Value of Liabilities -
Awal Tahun	271,503,871	--	Beginning of the Year
Beban Tahun Berjalan	260,073,846	271,503,871	Current Year Expense
Pembayaran Imbalan	(26,983,000)	--	Benefit Payment
Sub Jumlah	504,594,717	271,503,871	Sub Total
Rugi Pengukuran Kembali Aktuaria yang dibebankan ke Penghasilan Komprehensif Lain	27,674,076	--	Remeasurement of Actuarial Loss Charged to Other Comprehensive Income
Nilai Kini Liabilitas Akhir Tahun - Entitas Anak	532,268,793	271,503,871	Present Value of Liabilities at End of Year - The Subsidiary
Jumlah	97,683,759,446	81,082,059,297	Total

Beban imbalan pascakerja yang diakui dalam
laporan laba rugi komprehensif:

Post-employment benefit expense recognized
in the statement of comprehensive income:

	2022 Rp	2021 Rp	
Perusahaan			The Company
Biaya Jasa Kini	7,320,928,675	4,792,377,910	Current Service Cost
Bunga Neto atas Liabilitas (Aset)	5,803,226,919	6,298,921,208	Net Interest of Liabilities (Assets)
Sub Jumlah	13,124,155,594	11,091,299,118	Sub Total
Entitas Anak			The Subsidiary
Penyesuaian Saldo Awal	(71,923,674)	--	Beginning Balance Adjustment
Biaya Jasa Kini	322,237,345	271,503,871	Current Service Cost
Biaya Bunga	9,760,175	--	Interest Cost
Sub Jumlah	260,073,846	271,503,871	Sub Total
Jumlah	13,384,229,440	11,362,802,989	Total

Rekonsiliasi ekuitas imbalan pascakerja –
penghasilan komprehensif lain pada laporan
posisi keuangan:

Post-employment benefit equity reconciliation –
other comprehensive income on the statement
of financial position:

	2022 Rp	2021 Rp	
Perusahaan			The Company
Penghasilan Komprehensif Lain - Awal Tahun	(66,188,170,003)	(55,124,612,170)	Other Comprehensive Income - Beginning of the Year
Asumsi Aktuaria	580,905,708	(4,033,347,166)	Actuary Assumption
Penyesuaian atas Pengalaman	3,195,085,232	(7,030,210,667)	Adjustment on Experience
Penghasilan Komprehensif Lain - Akhir Tahun	(62,412,179,063)	(66,188,170,003)	Other Comprehensive Income - End of Year

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	2022 Rp	2021 Rp	
Entitas Anak			The Subsidiary
Rugi Komprehensif Lain			Other Comprehensive Loss
Awal Tahun	--	--	at Beginning of the Year
Penyesuaian Saldo Awal	9,442,219	--	Beginning Balance Adjustment
Kerugian Perubahan			Loss on Changes
Asumsi Aktuaria	18,231,857	--	in Actuarial Assumption
Penghasilan Komprehensif Lain - Akhir Tahun	27,674,076	--	Other Comprehensive Income - End of Year
Jumlah	(62,384,504,987)	(66,188,170,003)	Sub Total
Pajak Penghasilan Terkait			Related Income Tax
Saldo Awal	14,561,397,400	12,127,414,677	Beginning Balance
Mutasi Tahun Berjalan	(836,806,304)	2,433,982,723	Movement in Current Year
Saldo Akhir	13,724,591,096	14,561,397,400	Ending Balance
Penghasilan (Kerugian) Komprehensif Akhir Tahun	(48,659,913,891)	(51,626,772,603)	Comprehensive Income (Loss) at the End of the Year
d. Mutasi Imbalan Pascakerja Lainnya			d. Other Post-Employment Benefits Movement
Mutasi liabilitas imbalan pascakerja lainnya di laporan posisi keuangan:			Movements of other post-employment benefits in the statement of financial position:
	2022 Rp	2021 Rp	
Liabilitas Bersih Awal Tahun	11,535,772,367	--	Net Liabilities Beginning of the Year
Penyesuaian atas Reklasifikasi	(2,751,739,477)	--	Adjustment on Reclassification
Beban Tahun Berjalan	8,918,253,578	14,515,502,047	Current Year Expenses
Pembayaran Manfaat	(1,434,501,390)	(2,979,729,680)	Benefits Payment
Liabilitas Bersih Akhir Tahun	16,267,785,078	11,535,772,367	Net Liabilities End of Year
e. Mutasi Manfaat Pensiun			e. Pension Benefits Movement
Mutasi manfaat pensiun di laporan posisi keuangan:			Movements of pension benefits in the statement of financial position:
	2022 Rp	2021 Rp	
Saldo Awal Tahun	120,284,374,803	58,615,514,500	Beginning of the Year Balance
Beban Tahun Berjalan	8,877,899,322	11,259,904,682	Current Year Expenses
Pembayaran Iuran	(14,355,431,229)	(16,006,678,209)	Contribution Payments
Manfaat/ Kerugian dari Perubahan Asumsi	52,259,592,023	66,415,633,830	Gain/ Loss from Changes in Assumptions
Saldo Akhir Tahun	167,066,434,919	120,284,374,803	End of Year Balance

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Beban manfaat pensiun yang diakui dalam
laporan laba rugi komprehensif:

*Pension benefits expense recognized in the
statement of comprehensive income:*

	2022	2021	
	Rp	Rp	
Biaya Jasa Kini	6,677,020,024	7,221,295,733	Current Service Cost
Bunga Neto atas Liabilitas (Aset)	25,687,106,779	20,081,784,408	Net Interest of Liabilities (Assets)
Imbal Hasil Ekspektasian	(17,745,861,148)	(16,043,175,459)	Expected Benefit Return
Penerapan Perubahan Atribusi Imbalan Kerja	(5,740,366,333)	--	Implementation of Change on Employee Benefit Attribution
Beban yang Diakui	8,877,899,322	11,259,904,682	Recognized Expenses

Rekonsiliasi ekuitas manfaat pensiun –
penghasilan komprehensif lain pada laporan
posisi keuangan:

*Reconciliation of pension benefit equity – other
comprehensive income on the statement of
financial position:*

	2022	2021	
	Rp	Rp	
Pengukuran Kembali Liabilitas (Aset) Imbalan Pasti Neto - Awal	240,310,780,915	173,895,147,086	Net Defined Benefit Liabilities (Assets) Remeasurement
Perubahan Asumsi Keuangan	22,806,993,254	37,519,379,322	Change in Financial Assumption
Penyesuaian Liabilitas Program	13,233,960,337	19,207,496,765	Adjustments for Liabilities Program
Imbal Hasil atas Aset Program	16,218,638,432	9,688,757,743	Benefit Return of Plan Assets
Penghasilan Komprehensif Lain Akhir Tahun	292,570,372,938	240,310,780,915	Other Comprehensive Income End of Year
Pajak Penghasilan Terkait			Related Income Tax
Saldo Awal	(52,868,371,802)	(38,256,932,359)	Beginning Balance
Perubahan Tarif			Change in Tariff
Mutasi Tahun Berjalan	(11,497,110,245)	(14,611,439,443)	Current Year Movement
Saldo Akhir	(64,365,482,047)	(52,868,371,802)	Ending Balance
Penghasilan (Kerugian) Komprehensif Akhir Tahun	228,204,890,891	187,442,409,113	Other Comprehensive Income (Loss) End of Year

Rekonsiliasi aset program:

Reconciliation of program assets:

	2022	2021	
	Rp	Rp	
Nilai Kini Liabilitas Manfaat Pasti	403,361,922,924	358,722,593,997	Current Value of Defined Benefit Plan
Nilai Wajar Aset Program	(236,295,488,005)	(238,438,219,194)	Fair Value of Plan Assets
Posisi Pendanaan	167,066,434,919	120,284,374,803	Funding Position

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	2022 Rp	2021 Rp	
Nilai Wajar Aset			<i>Fair Value of Plan</i>
Program Awal Tahun	(238,438,219,194)	(233,610,696,593)	<i>Assets Beginning of the Year</i>
Bunga atas			<i>Interest on Plan</i>
Aset Program	(17,745,861,148)	(16,043,175,459)	<i>Asset</i>
Pembayaran Iuran -			<i>Contributions Payments -</i>
Pemberi Kerja	(14,355,431,229)	(16,006,678,209)	<i>Employer</i>
Pembayaran Iuran -			<i>Contributions Payments -</i>
Peserta Program	(2,966,035,549)	(2,988,955,601)	<i>Plan Participants</i>
Pembayaran Manfaat Pensiun	20,991,420,683	20,522,528,925	<i>Benefit Pension Payments</i>
Kerugian Aktuaria	16,218,638,432	9,688,757,743	<i>Actuarial Loss</i>
Nilai Wajar Aset Program			<i>Fair Value of Plan Assets</i>
Akhir Tahun	(236,295,488,005)	(238,438,219,194)	<i>at the End of the Year</i>

Analisa jatuh tempo yang diharapkan dari liabilitas imbalan pascakerja dan imbalan jangka panjang lainnya yang tidak terdiskonto adalah sebagai berikut:

Expected maturity analysis of undiscounted post-employment benefits and other long-term benefit is as follows:

	2022 Rp	2021 Rp	
Estimasi Imbalan yang			<i>Benefits Estimation Paid in</i>
Dibayarkan Tahun Depan	6,278,499,682	1,847,920,667	<i>Following Year</i>
Tahun ke - 2	5,498,300,349	17,032,375,074	<i>Second Year</i>
Tahun ke - 3	7,689,195,277	--	<i>Third Year</i>
Tahun ke - 4	11,711,001,465	--	<i>Fourth Year</i>
Tahun ke - 5	13,448,751,260	13,406,705,770	<i>Fifth Year</i>
Tahun ke - 6 sampai			<i>Sixth Year to</i>
dengan Tahun ke -10	98,704,244,195	112,436,124,476	<i>Tenth Year</i>

Program imbalan pasti memberikan eksposur Grup terhadap risiko tingkat bunga dan risiko gaji, sebagai berikut:

A defined benefit plan provides the Group's exposure to interest rate risk and salary risk, as follows:

- Risiko Tingkat Bunga**
Nilai kini kewajiban pensiun imbalan pasti dihitung menggunakan tingkat diskonto yang ditetapkan dengan mengacu pada imbal hasil obligasi korporasi berkualitas tinggi. Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program.
- Risiko Gaji**
Nilai kini kewajiban pensiun imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

- Interest Rate Risk**
The present value of the defined pension obligation is calculated using discount rate determined by reference to yields on high quality corporate bonds. Decrease bond interest rate would increase the liability bond program.
- Salary Risk**
The present value of the defined benefit pension obligation is calculated by referring to the salary of the future program participants. Thus, the salary increase program participants will increase the program's liabilities.

Diasumsikan bahwa tingkat diskonto dan kenaikan gaji di masa depan berdampak signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam

An assumption has been made that discount rate and future salary growth rates have a significant effect on the amounts recognized in

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

laba rugi. Satu persen perubahan diasumsikan pada tingkat bunga dan kenaikan upah akan memiliki dampak sebagai berikut:

profit or loss. One percent of change in the assumption of interest rate and wage growth will have the following impact:

	Imbalan Pascakerja/ Post - Employment Benefits	Imbalan Pascakerja Lainnya/ Other Post-Employment Benefits	Manfaat Pensiun/ Pension Benefits	
Tingkat Bunga +1%	90,648,497,000	15,310,563,000	389,119,729,472	Interest Rate +1%
Tingkat Bunga -1%	104,421,269,000	17,343,367,000	419,832,360,776	Interest Rate -1%

	Imbalan Pascakerja/ Post - Employment Benefits	Imbalan Pascakerja Lainnya/ Other Post-Employment Benefits	Manfaat Pensiun/ Pension Benefits	
Kenaikan Upah +1%	104,577,959,000	17,043,003,000	419,691,269,797	Increase in Wage +1%
Kenaikan Upah -1%	90,438,580,000	15,563,126,000	388,984,039,731	Increase in Wage -1%

27. Liabilitas Keuangan Lainnya

27. Other Financial Liabilities

	2022 Rp	2021 Rp
PT Bandung Management Economic Center	1,660,692,000	1,660,692,000
PT Dua Ribu Satu Pangripta	1,469,437,200	1,469,437,200
PT Marunda Mandiri International	9,900,000,000	9,900,000,000
Jumlah/ Total	13,030,129,200	13,030,129,200
Bagian Jangka Pendek/ Current Portion	(2,200,000,000)	(1,100,000,000)
Bagian Jangka Panjang/ Non-Current Portion	10,830,129,200	11,930,129,200

Utang ke PT Bandung Management Economic Center dan PT Dua Ribu Satu Pangripta merupakan saldo reklasifikasi atas saldo utang usaha yang tidak dapat diselesaikan dan dilunaskan dalam siklus operasi normal.

Payables to PT Bandung Management Economic Center and PT Dua Ribu Satu Pangripta are reclassified balances of accounts payable balances that cannot be settled and paid in the normal operating cycle.

Utang ke PT Marunda Mandiri Internasional merupakan *Shareholder Loan* kepada PT Tegar Mandiri Cemerlang. Berdasarkan Perjanjian Pinjaman No. 011/MMI-TMC/XI/2019 tanggal 4 November 2019 dan No. 001/MMI-TMC/II/2020 tanggal 17 Januari 2020, PT Marunda Mandiri Internasional memberikan pinjaman dana kepada TMC masing-masing sebesar Rp8.000.000.000 dan Rp3.000.000.000, dimana uang tersebut dipergunakan untuk pembayaran penyelesaian proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Marunda kepada kontraktor dan modal kerja operasional SPAM Marunda. Utang tersebut dikenakan bunga 8,5% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 16 Februari 2030. Saldo pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp9.900.000.000.

Payable to PT Marunda Mandiri Internasional represents *Shareholder Loan* to PT Tegar Mandiri Cemerlang. Based on the Loan Agreement No. 011/MMI-TMC/XI/2019 dated November 4, 2019 and No. 001/MMI-TMC/II/2020 dated January 17, 2020, PT Marunda Mandiri Internasional provided loan funds to TMC amounting to Rp8,000,000,000 and Rp3,000,000,000, respectively, wherein the money was used to pay for the completion of the Marunda Drinking Water Supply System (SPAM) project to contractors and working capital for the Marunda SPAM operation. The loan bears interest at 8.5% per annum and will mature on February 16, 2030. The balance as of December 31, 2022 and 2021 amounting to Rp9,900,000,000, respectively.

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

28. Perpajakan

28. Taxes

a. Pajak Dibayar di Muka

a. Prepaid Taxes

	2022 Rp	2021 Rp	
Pajak Dibayar di Muka -			Prepaid Taxes -
Bagian Lancar			Current Portion
Perusahaan			The Company
PPH Pasal 25	17,723,164,276	--	Income Tax Article 25
Entitas Anak			The Subsidiary
PPN Masukan	111,209,891	--	VAT In
Sub Jumlah	17,834,374,167	--	Sub Total
Pajak Dibayar di Muka -			Prepaid Taxes -
Bagian Tidak Lancar			Non-Current Portion
Pajak Penghasilan Pasal 28a:			Income Tax Article 28a:
Tahun 2020	--	53,346,357,139	Year 2020
Tahun 2021	48,241,227,669	48,241,227,669	Year 2021
Sub Jumlah	48,241,227,669	101,587,584,808	Sub Total
Jumlah	66,075,601,836	101,587,584,808	Total

Selama tahun 2022, Perusahaan telah melakukan pembayaran angsuran atas Pajak Penghasilan Pasal 25 yang akan diperhitungkan pada perhitungan pajak penghasilan badan tahun 2022 sebesar Rp55.499.422.144. Pembayaran ini mengacu kepada besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 bulan terakhir tahun pajak 2021. Berdasarkan Surat Direktorat Jendral Pajak No: S-00015/RKAP/KPP.190303/2022 tanggal 21 Oktober 2022, besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 ditetapkan sejumlah Rp37.776.257.860 dan atas kelebihan setor angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 sejumlah Rp17.723.164.276 dipindahbukukan ke angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 masa pajak tahun 2023.

Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan tahun 2020 No: 00010/406/20/051/22 tanggal 22 April 2022, Perusahaan ditetapkan lebih bayar atas Pajak Penghasilan tahun 2020 sebesar Rp50.124.718.610 dan berdasarkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak No: 00502A tanggal 6 Juni 2022, jumlah lebih bayar yang disetujui setelah dikurangi kompensasi hutang pajak sejumlah Rp1.824.428.702 melalui pemotongan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) sejumlah Rp48.300.289.908.

Throughout 2022, the Company has made installment payment upon Income Tax Article 25 to which will be calculated in corporate income tax calculation in 2022 amounting to Rp55,499,422,144. This payment based on installment of Income Tax Article 25 at the last month of tax period of 2021. According to Directorate General of Taxation Letter No.S-00015/RKAP/KPP.190303/2022 dated October 21, 2022, the amount of Income Tax Article 25 installment was determined amounting to Rp37,776,257,860 and for overpayment of Income Tax Article 25 installment amounting to Rp17,723,164,276 was overbooked to Income Tax Article 25 installment for tax period of 2023.

Based on the in 2020 Income Tax Overpayment Assessment Letter No: 00010/406/20/051/22 dated April 22, 2022, the Company is determined to have overpaid the Income Tax in 2020 amounting to Rp50,124,718,610 and based on Letter of the Order to Pay the Excess Tax No: 00502A dated June 6, 2022, the approved overpayment after deducting the tax payable compensation amounting to Rp1,824,428,702 through the withholding of the Letter of Order for Paying Excess Tax (SPMKP) amounting to Rp48,300,289,908.

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan tahun 2019 No: 00013/406/19/051/21 tanggal 22 April 2021, Perusahaan ditetapkan lebih bayar atas Pajak Penghasilan tahun 2019 sebesar Rp37.852.036.259 dan berdasarkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak No: 00394A tanggal 18 Mei 2021, jumlah lebih bayar yang disetujui setelah dikurangi kompensasi hutang pajak sejumlah Rp1.740.160.086 melalui pemotongan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) sejumlah Rp36.111.876.173.

Based on the Letter of Income Tax Overpayment Assessment in 2019 No: 00013/406/19/051/21 dated April 22, 2021, the Company is determined to have overpaid the Income Tax in 2019 amounting to Rp37,852,036,259 and based on the Letter of Order to Pay the Excess Tax No: 00394A dated May 18, 2021, the approved overpayment after deducting the tax payable compensation amounting to Rp1,740,160,086 through the withholding of the Letter of Order for Paying Excess Tax (SPMKP) amounting to Rp36,111,876,173.

b. Utang Pajak

b. Taxes Payable

	2022 Rp	2021 Rp	
Perusahaan			The Company
Pajak Pertambahan Nilai - Keluaran	15,436,692,494	7,147,694,084	Value Added Tax - Out
Pajak Pertambahan Nilai - Masukan Wajib Pungut	4,155,551,248	3,481,380,114	Value Added Tax - In Withholding Tax
PPh Pasal 21	10,075,866,427	4,773,549,068	Income Tax Article 21
PPh Pasal 22	178,431,949	107,874,409	Income Tax Article 22
PPh Pasal 23	274,647,721	475,066,608	Income Tax Article 23
PPh Pasal 4 (2) Final	2,422,538,167	2,667,496,858	Income Tax Article 4 (2) Final
PPh Pasal 29	10,961,208,599	--	Income Tax Article 29
Pajak Penerangan Jalan	6,822,268,877	6,641,655,165	Street Lighting Tax
Pajak Hotel dan Restoran	119,502,801	142,645,925	Hotel and Restaurant Tax
Pajak Pengambilan Air Permukaan	8,369,289,000	423,036,785	Ground Water Intake Tax
Pajak Parkir	3,808,500	1,008,250	Parking Tax
Sub Jumlah	58,819,805,783	25,861,407,266	Sub Total
Entitas Anak			The Subsidiary
PPh Pasal 21	2,304,412	--	Income Tax article 21
PPh Pasal 23	41,441,723	25,036,728	Income Tax article 23
PPh Pasal 4 (2)	2,649,438	56,721,876	Income Tax article 4(2)
Pajak Pertambahan Nilai	19,325,805	362,898,577	Value Added Tax
Sub Jumlah	65,721,378	444,657,181	Sub Total
Jumlah	58,885,527,161	26,306,064,447	Total

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

c. Beban (Manfaat) Pajak

	2022	2021
	Rp	Rp
Perusahaan		
Pajak Kini	53,833,157,400	29,790,709,300
Penyesuaian atas		
Surat Ketetapan Pajak	3,221,638,529	12,446,416,230
Beban (Manfaat)		
Pajak Tangguhan	(9,463,768,198)	(2,777,088,112)
Sub Jumlah	<u>47,591,027,731</u>	<u>39,460,037,418</u>
Entitas Anak		
Beban (Manfaat)		
Pajak Tangguhan	(983,864,752)	(2,324,572,751)
Sub Jumlah	<u>(983,864,752)</u>	<u>(2,324,572,751)</u>
Jumlah	<u>46,607,162,979</u>	<u>37,135,464,667</u>

c. Tax Expenses (Benefits)

The Company
Current Tax
Adjustment on Notice of
Tax Assessment
Deferred Tax Expenses
(Benefits)
Sub Total

The Subsidiary
Deferred Tax Expenses
(Benefits)
Sub Total

Total

Pajak Kini

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

Current Tax

A reconciliation between income before tax per statements of comprehensive income and taxable income is as follows:

	2022	2021
	Rp	Rp
Laba Konsolidasian Sebelum		
Pajak Penghasilan Badan	191,855,288,844	144,581,855,420
Penyesuaian Eliminasi		
Konsolidasian		
Dikurangi:		
Rugi Sebelum		
Pajak Penghasilan		
Entitas Anak	(4,989,163,871)	(3,133,375,783)
Laba Sebelum Pajak		
Penghasilan		
Perusahaan	196,844,452,715	147,715,231,203
Bagian Rugi		
Entitas Asosiasi	--	1,436,705,577
Laba Sebelum Pajak	<u>196,844,452,715</u>	<u>149,151,936,780</u>

Consolidated Profit
Before Corporate Income Tax
Adjusted for Consolidated
Elimination
Less:
Loss Before
Income Tax of
Subsidiaries

Profit Before Income Tax of
the Company
Net Share Loss
on Associates
Profit Before Tax

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	2022 Rp	2021 Rp	
Perbedaan Tetap			Permanent Differences
Pendapatan Pemanfaatan			
Lahan yang dikenakan			Land Utilization Revenue
Pajak Final	(67,510,752,785)	(60,801,750,529)	Subjected to Final Tax
Bunga Jasa Giro dan			Current Account and Time
Deposito	(12,355,690,395)	(12,573,210,214)	Deposits Interest
Kesejahteraan Sosial	10,863,231,584	9,429,375,977	Social Welfare
Beban Pajak Final Lahan	6,751,075,280	5,192,492,862	Land Final Tax Expenses
Jamuan	1,712,805,220	1,087,125,191	Entertainment
Majalah dan Surat Kabar	161,827,500	208,719,500	Magazine and Newspaper
Biaya Overhead Sewa Lahan			
yang Telah Dikenakan			Overhead Cost of Land Utilization
Pajak Final	1,308,592,913	1,047,575,425	Subjected to Final Tax
Beban Lainnya	33,963,158,994	3,727,332,276	Other Expenses
Biaya Perawatan	21,619,261,886	18,147,070,098	Medical Expenses
Biaya Personalia	2,526,863,840	3,441,592,503	Employee Expenses
Beban Promosi dan			Promotion and Marketing
Pemasaran	5,794,215,282	4,730,927,476	Expenses
Jumlah	4,834,589,319	(26,362,749,435)	Total
Perbedaan Waktu			Timing Differences
Penyusutan Aset Tetap	(5,139,018,862)	(9,683,375,471)	Depreciation Expenses of Fixed Assets
Cadangan Kerugian			Allowance for Impairment Losses
Penurunan Nilai Piutang	(379,856,093)	5,344,451,961	on Account Receivable
Jasa Produksi	12,560,386,187	12,066,160,088	Bonuses
Tantiem	2,650,000,000	(2,500,000,000)	Tantiem
Insentif	21,506,819,929	--	Incentive
Beban Imbalan Kerja	34,453,044,095	33,886,976,167	Employee Benefit Expenses
Realisasi Pembayaran			Realization of
Imbalan Kerja	(22,633,619,004)	(26,645,071,727)	Employee Benefit
Sewa	(628,077)	153,986,764	Lease
Jumlah	43,017,128,175	12,623,127,782	Total
Laba Kena Pajak	244,696,170,209	135,412,315,127	Taxable Income
Pembulatan	244,696,170,000	135,412,315,000	Rounded

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	2022 Rp	2021 Rp	
Rincian Beban dan Utang (Piutang) Pajak Kini adalah sebagai berikut:			<i>Details of Expenses and Payables (Receivables) on Current Tax are as follows:</i>
Beban Pajak Kini			<i>Current Tax Expenses</i>
Tarif 22%	53,833,157,400	29,790,709,300	<i>22% Tariff</i>
Pajak Dibayar di Muka			<i>Prepaid Tax</i>
PPH Pasal 22	3,162,322,525	2,324,238,780	<i>Income Tax Article 22</i>
PPH Pasal 23	1,933,368,408	568,210,561	<i>Income Tax Article 23</i>
PPH Pasal 25	37,776,257,868	75,139,487,628	<i>Income Tax Article 25</i>
Jumlah	42,871,948,801	78,031,936,969	<i>Total</i>
Kurang/ (Lebih) Bayar Pajak Penghasilan	10,961,208,599	(48,241,227,669)	<i>Under/ (Over) Payment of Income Tax</i>

d. Pajak Tangguhan

Rincian dari aset pajak tangguhan adalah
sebagai berikut:

d. Deferred Tax

The detail of the deferred tax is as follows:

	31 Desember 2021/ December 31, 2021 Rp	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laporan Laba Rugi/ Credited (Charged) to Income for the Year Rp	Dikreditkan (Dibebankan) ke Pendapatan Komprehensif Lain/ Credited (Charged) to Others Comprehensive Income for the Year Rp	31 Desember 2022/ December 31, 2022 Rp	
Perusahaan					The Company
Cadangan Kerugian					<i>Allowance for Impairment Losses</i>
Penurunan Nilai Aset Keuangan	19,399,791,495	(83,568,340)	--	19,316,223,155	<i>on Financial Assets</i>
Cadangan Kerugian					<i>Allowance for Impairment Losses</i>
Penurunan Nilai Persediaan	41,642,304	--	--	41,642,304	<i>on Inventory</i>
Jasa Produksi	2,654,555,220	2,763,284,961	--	5,417,840,181	<i>Bonuses</i>
Tantiem	1,650,000,000	583,000,000	--	2,233,000,000	<i>Tantiem</i>
Insentif	--	4,731,500,384	--	4,731,500,384	<i>Incentive</i>
Imbalan Kerja	46,778,754,572	2,600,273,520	12,327,828,252	61,706,856,344	<i>Employee Benefits</i>
Beban Penyusutan Aset Tetap	1,821,264,295	(1,130,584,150)	--	690,680,145	<i>Depreciation of Fixed Assets</i>
Sewa	41,661,734	(138,177)	--	41,523,557	<i>Lease</i>
Jumlah Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan	72,387,669,620	9,463,768,198	12,327,828,252	94,179,266,070	<i>Total Deferred Tax (Liabilities) Assets</i>
Entitas Anak	2,324,572,750	983,864,752	6,088,297	3,314,525,799	<i>The Subsidiary</i>
Jumlah	74,712,242,370	10,447,632,950	12,333,916,549	97,493,791,869	<i>Total</i>

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	31 Desember 2020/ December 31, 2020	Koreksi Dasar Pengenaan Pajak/ Tax Base Correction	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laporan Laba Rugi/ Credited (Charged) to Income for the Year	Dikreditkan (Dibebankan) ke Pendapatan Komprehensif Lain/ Credited (Charged) to Others Comprehensive Income for the Year	31 Desember 2021/ December 31, 2021	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Perusahaan						The Company
Cadangan Kerugian						Allowance for Impairment Losses
Penurunan Nilai Piutang	18,224,012,064	--	1,175,779,431	--	19,399,791,495	on Account Receivables
Cadangan Kerugian						Allowance for Impairment Losses
Penurunan Nilai Persediaan	41,642,304	--	--	--	41,642,304	on Inventory
Jasa Produksi	--	2,654,555,220	--	--	2,654,555,220	Bonuses
Tantiem	2,200,000,000	(550,000,000)	--	--	1,650,000,000	Tantiem
Imbalan Kerja	33,008,078,875	--	1,593,218,977	12,177,456,720	46,778,754,572	Employee Benefits
Beban Penyusutan Aset Tetap	3,951,606,898	--	(2,130,342,604)	--	1,821,264,295	Depreciation of Fixed Assets
Sewa	7,784,646	--	33,877,088	--	41,661,734	Lease
Jumlah Aset (Liabilitas)						Total Deferred Tax
Pajak Tangguhan	57,433,124,788	2,104,555,220	672,532,892	12,177,456,720	72,387,669,620	(Liabilities) Assets
Entitas Anak	--	1,467,064,710	857,508,040	--	2,324,572,750	The Subsidiary
Jumlah	57,433,124,788	3,571,619,930	1,530,040,932	12,177,456,720	74,712,242,370	Total

Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

A reconciliation between the total tax expense and the amounts computed by applying the effective tax rates to income before tax is as follows:

	2022 Rp	2021 Rp	
Laba Konsolidasian Sebelum			Consolidated Profit
Pajak Penghasilan Badan	191,855,288,844	144,581,855,420	Before Corporate Income Tax
Rugi Sebelum			Loss Before
Pajak Penghasilan			Income Tax of
Entitas Anak	(4,989,163,871)	(3,133,375,783)	Subsidiaries
Bagian Rugi Entitas			
Asosiasi	--	1,436,705,577	Net Share Loss on Associates
Laba Sebelum Pajak	196,844,452,715	149,151,936,780	Profit Before Tax

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	2022 Rp	2021 Rp	
Tarif Pajak yang Berlaku			<i>Applicable Effective Tax Rate</i>
22% x Rp196.844.452.715	(43,305,779,597)	--	22% x Rp196,844,452,715
22% x Rp149.151.936.780	--	(32,813,426,092)	22% x Rp149,151,936,780
Pengaruh Pajak atas Beban yang Tidak Dapat Dikurangkan Menurut Pajak Bunga Jasa Giro dan Deposito	2,718,251,887	2,766,106,247	<i>Tax Effect on Non Deductible Expense Current Account and Time Deposits Interest</i>
Pendapatan Pemanfaatan Lahan yang Dikenakan Pajak Final	14,852,365,613	13,376,385,116	<i>Land Utilization Income Subject to Final Tax</i>
Kesejahteraan Sosial	(2,389,910,948)	(2,074,462,715)	<i>Social Welfare</i>
Beban Pajak Final Lahan	(1,485,236,562)	(1,142,348,430)	<i>Land Final Tax Expenses</i>
Jamuan	(376,817,148)	(239,167,542)	<i>Entertainment</i>
Majalah dan Surat Kabar	(35,602,050)	(45,918,290)	<i>Magazines and Newspaper</i>
Biaya atas Pendapatan yang Pajaknya Telah Dikenakan Final	(287,890,441)	(230,466,594)	<i>Costs over Revenue which Tax is Subjected to Final</i>
Beban Lainnya	(7,471,894,979)	(820,013,072)	<i>Other Expenses</i>
Biaya Perawatan	(4,756,237,615)	(3,992,355,422)	<i>Medical Costs</i>
Biaya Personalia	(555,910,045)	(757,150,351)	<i>General Affair Cost</i>
Beban Promosi dan Pemasaran	(1,274,727,362)	(1,040,804,045)	<i>Promotion and Marketing Expenses</i>
Jumlah Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	(44,369,389,247)	(27,013,621,190)	Total Income (Expense) Tax Benefit
Beban Pajak Kini	53,833,157,400	29,790,709,300	<i>Current Tax Expenses</i>
Manfaat Pajak Tangguhan	(9,463,768,198)	(2,777,088,112)	<i>Deferred Tax Benefits</i>
Penyesuaian atas Surat Ketetapan Pajak	3,221,638,529	12,446,416,230	<i>Adjustment on Notice of Tax Assessment</i>
Jumlah Beban Pajak	47,591,027,731	39,460,037,418	Total Tax Expenses
Entitas Anak			The Subsidiary
Beban (Manfaat) Pajak Tangguhan	(983,864,752)	(2,324,572,751)	<i>Deferred Tax Expenses (Benefits)</i>
Sub Jumlah	(983,864,752)	(2,324,572,751)	<i>Sub Total</i>
Jumlah	46,607,162,979	37,135,464,667	Total

29. Modal Pemerintah

29. Government Capital

	2022 Rp	2021 Rp	
Modal Dasar	46,000,000,000	46,000,000,000	<i>Authorized Capital</i>
Penambahan Modal	118,547,635,935	118,547,635,935	<i>Additional Paid-Up Capital</i>
Jumlah	164,547,635,935	164,547,635,935	Total

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. Penetapan Modal Perusahaan, tanggal 1 Januari 1991 berdasarkan SK Menteri Keuangan No. 202/KMK.13/1992 tanggal 5 Februari 1992.	46,000,000,000	Company's Capital dated January 1, 1991 based on Ministry of Finance Decree No. 202/KMK.13/1992 dated February 5, 1992.
2. Penambahan Modal Negara berupa Instalasi dan Jaringan berdasarkan PP No. 78 tahun 1998 tanggal 22 Oktober 1998.	60,287,829,310	Additional Government Capital consisting of Installation and Network based on Government Regulation No. 78 year 1998 dated October 22, 1998.
3. Penambahan Modal Negara Berupa lahan ex Departemen PU Divisi I PJT II berdasarkan PP No. 90 tahun 2000.	18,439,506,625	Additional State Capital consisting of ex - 3. Department PU's land Division I PJT II based on Government Regulation No. 90 year 2000.
4. Penambahan Modal Negara berupa Rehabilitasi/ up-rating PLTA Ir. H. Djuanda berdasarkan PP No. 4 tahun 2009 tanggal 16 Januari 2009.	39,820,300,000	Additional Government Capital consisting of HEPP Ir. H. Djuanda rehabilitation/ up-rating based on Government Regulation No. 4 year 2009 dated January 16, 2009.
Jumlah	164,547,635,935	Total

Berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara No. S-410/MBU/06/2022 tanggal 27 Juni 2022, Pemegang Saham memberikan Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahaan Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2021 dan 2020 dan menetapkan penggunaan laba bersih konsolidasian Tahun Buku 2021 dan 2020 seluruhnya sebagai laba ditahan.

Based on the Letter of the Minister of State-Owned Enterprises No. S-410/MBU/06/2023 dated June 27, 2022, the Shareholders approve the Annual Report and Ratification of the Financial Statements of the Company Financial Year of 2021 and 2020 and stipulate the use of consolidated net profit for the 2021 and 2020 Financial Year of 2021 and 2020 entirely as retained earnings.

30. Kepentingan Non Pengendali

30. Non-Controlling Interest

	2022	2021	
	Rp	Rp	
PT Tegar Mandiri Cemerlang			PT Tegar Mandiri Cemerlang
Nilai Tercatat - Awal	7,940,623,902	8,133,548,593	Carrying Amount - Beginning
Bagian Rugi Bersih	(520,449,797)	(155,245,761)	Net Loss Share
Penyesuaian	--	(37,678,930)	Adjustments
Sub Jumlah	7,420,174,105	7,940,623,902	Sub Total
PT Jasa Tirta Luhur			PT Jasa Tirta Luhur
Nilai Tercatat - Awal	131,983,196	138,141,979	Carrying Amount - Beginning
Bagian Rugi Bersih	(34,848,493)	(6,535,573)	Net Loss Share
Kerugian Aktuaria	(215,858)	--	Actuary Loss
Penyesuaian	--	376,790	Adjustments
Sub Jumlah	96,918,845	131,983,196	Sub Total
Jumlah	7,517,092,950	8,072,607,098	Total

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

31. Pendapatan Usaha

31. Revenue

	2022	2021	
	Rp	Rp	
Pendapatan Sumber Daya Air			Water Resources Revenue
Pendapatan Listrik	493,119,023,962	454,556,359,414	Electricity Revenue
Pendapatan Air Baku	368,007,894,097	292,436,438,725	Raw Water Revenue
Pendapatan Air Bersih	9,053,959,948	8,918,509,521	Water Revenue
Sub Jumlah	<u>870,180,878,007</u>	<u>755,911,307,660</u>	Sub Total
Pendapatan Non Sumber Daya Air			Non Water Resources Revenue
Pendapatan Pariwisata	11,015,802,013	10,654,672,239	Tourism Revenue
Pendapatan Pemanfaatan			
Lahan	67,510,752,785	60,801,750,529	Land Utilization Revenue
Pendapatan Laboratorium	7,998,874,351	6,984,167,000	Laboratory Revenue
Pendapatan Air Minum			Bottled Drinking Water
Dalam Kemasan	2,732,059,290	2,927,746,577	Revenue
Pendapatan Sewa	38,056,000	128,811,667	Rent Revenue
Pendapatan Konstruksi	21,192,626,752	17,475,000,000	Construction Revenue
Pendapatan Usaha Lainnya	378,102,677	1,634,726,250	Other Operating Revenue
Sub Jumlah	<u>110,866,273,868</u>	<u>100,606,874,262</u>	Sub Total
Jumlah	<u>981,047,151,875</u>	<u>856,518,181,922</u>	Total

Pendapatan Listrik

Berdasarkan Addendum VI atas Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik PLTA Ir. H. Djuanda No. 1/97/SPU/2004 antara Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II dengan PT PLN (Persero) tanggal 28 November 2018, harga jual energi listrik tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp346/kWh dan Rp338/kWh.

Berdasarkan Peraturan Direksi Perum Jasa Tirta II No. 1/3/PRT/2015 tentang Tarif Tenaga Listrik PLTA Ir. H. Djuanda Bagi Pelanggan Non-PLN yang Berada di bawah Penguasaan Perum Jasa Tirta II tanggal 30 Januari 2015, harga jual energi listrik untuk pelanggan non-PLN ditetapkan 80% dari tarif tenaga listrik yang ditetapkan pemerintah.

Pendapatan Air Baku

Tarif Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) untuk penggunaan sumber daya air bagi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Daerah Khusus Ibukota Jakarta ditetapkan untuk tahun 2022 sebesar Rp294,00/m³ sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 26/KPTS/M/2023 tanggal 12 Januari 2023 yang berlaku surut.

Electricity Revenue

Based on Addendum VI of the Sale and Purchase of Electricity Power HEPP Ir. H. Djuanda No. 1/97/SPU/2004 between the Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II and PT PLN (Persero) on November 28, 2018, the selling price of electrical energy in 2022 and 2021 is amounting to Rp346/kWh and Rp338/kWh, respectively.

Based on the Regulation of the Board of Directors of Perum Jasa Tirta II No. 1/3/PRT/2015 concerning the Electricity Tariff of HEPP Ir. H. Djuanda for Non-PLN Customers Under the Control of Perum Jasa Tirta II dated January 30, 2015, the selling price of electricity for non-PLN customers is set at 80% of the electricity tariff set by the government.

Raw Water Revenues

The Water Resources Management Service Fee (BJPSDA) tariff for the use of water resources for the Regional Drinking Water Company (PDAM) for the Special Capital Region of Jakarta is set for 2022 at Rp294.00/cbm in accordance with the Decree of the Minister of Public Works and Public Housing No. 26/KPTS/M/2023 dated January 12, 2023, by which apply retroactively.

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Tarif BJPSDA untuk pemanfaatan sumber daya air bagi PDAM di Provinsi Jawa Barat sebesar Rp130,81/m³, bagi Industri di Provinsi Jawa Barat sebesar Rp224,71/m³ dan bagi Industri yang mengambil air langsung dari Waduk Jatiluhur sebesar Rp251,80/m³ terhitung mulai tanggal 12 Januari 2023 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 27/KPTS/M/2023 yang berlaku surut.

The BJPSDA tariff for the use of water resources for PDAMs in West Java Province is Rp130.81/cbm, for Industry in West Java Province is Rp224.71/cbm and for Industries that take water directly from Jatiluhur Reservoir amounting to Rp251.80/cbm starting from January 12, 2023 in accordance with the Decree of the Minister of Public Works and Public Housing No. 27/KPTS/M/2023, by which apply retroactively.

Tarif BJPSDA untuk pemanfaatan sumber daya air bagi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Waduk Ir. H. Djuanda sebesar Rp85,28/kWh, Saguling sebesar Rp14,01/kWh dan Cirata sebesar Rp45,69/kWh terhitung mulai tanggal 22 November 2017 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 935/KPTS/M/2017.

The BJPSDA tariff for the use of water resources for Hydroelectric Power Plants (HEPP) in Ir. H. Djuanda is Rp85.28/kWh, Saguling is Rp14.01/kWh and Cirata is Rp45.69/kWh starting on November 22, 2017 in accordance with the Decree of the Minister of Public Works and Public Housing No. 935/KPTS/M/2017.

Pendapatan dari pihak berelasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar 27,74% dan 26,45% (Catatan 37).

Revenue from related parties for the years ended December 31, 2022 and 2021 amounted to 27,74% and 26.45%, respectively (Note 37).

32. Beban Pokok Pendapatan

32. Cost of Revenues

	2022	2021	
	Rp	Rp	
Beban Sumber Daya Air			Water Resources Expenses
Beban Listrik	112,300,047,310	94,475,383,716	Electricity Expenses
Beban Air Baku	404,471,227,456	383,370,832,278	Raw Water Expenses
Beban Air Bersih	10,936,070,315	9,799,651,613	Water Expenses
Sub Jumlah	527,707,345,081	487,645,867,607	Sub Total
Beban Non Sumber Daya Air			Non Water Resources Expenses
Beban Pariwisata	26,488,947,034	18,687,069,207	Tourism Expenses
Beban Pemanfaatan Lahan	10,943,699,577	8,446,770,222	Land Utilization Expenses
Beban Laboratorium	9,155,305,922	7,268,072,471	Laboratory Expenses
Beban Air Minum			Bottled Drinking Water
Dalam Kemasan	4,688,019,887	5,690,086,324	Expenses
Beban Konstruksi	20,381,352,809	15,962,668,806	Construction Expenses
Beban Usaha Lainnya	906,632,276	986,640,634	Other Operating Expenses
Sub Jumlah	72,563,957,505	57,041,307,664	Sub Total
Jumlah	600,271,302,586	544,687,175,271	Total

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Rincian beban sumber daya air adalah sebagai berikut:

Details of water resource expenses are as follows:

2022					
	Beban Listrik/ Electricity Expenses	Beban Air Baku/ Raw Water Expenses	Beban Air Bersih/ Clean Water Expenses	Jumlah/ Total	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
Beban Personalia	30,525,463,014	102,584,361,604	512,348,435	133,622,173,053	General Affair Expenses
Beban Umum dan					Water Resources General and
Operasi Sumber Daya Air	2,905,956,854	50,873,801,296	4,513,358,057	58,293,116,207	Operational Expenses
Beban Bahan dan					Materials and Supplies
Perlengkapan	4,575,396,825	6,073,272,601	116,305,942	10,764,975,368	Expenses
Beban Pemeliharaan	6,873,496,052	26,705,493,677	145,737,259	33,724,726,988	Maintenance Expenses
Beban Sistem Informasi	--	497,575,641	--	497,575,641	Information System Expenses
Beban Perencanaan	--	457,183,100	--	457,183,100	Planning Expenses
Beban Pemanfaatan, Evaluasi					Utilization, Evaluation and Community
dan Pemberdayaan Masyarakat	--	796,393,100	--	796,393,100	Empowerment Expenses
Beban Pelaksanaan Konservasi	621,634,190	12,740,066,850	62,749,064	13,424,450,104	Conservation Expenses
Beban Penyusutan Aset Tetap					Depreciation Expenses of
(Catatan 15)	26,499,761,210	27,937,748,419	4,919,603,658	59,357,113,287	Fixed Assets (Note 15)
Beban Penyusutan Aset Hak-Guna					Depreciation Expenses of
(Catatan 17)	464,175,425	1,953,161,630	665,967,900	3,083,304,955	Right-of-Use Assets (Note 17)
Beban Overhead Lainnya	39,834,163,740	173,852,169,538	--	213,686,333,278	Other Overhead Expenses
Jumlah	112,300,047,310	404,471,227,456	10,936,070,315	527,707,345,081	Total

2021					
	Beban Listrik/ Electricity Expenses	Beban Air Baku/ Raw Water Expenses	Beban Air Bersih/ Clean Water Expenses	Jumlah/ Total	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
Beban Personalia	25,079,029,667	87,218,748,699	2,372,930,835	114,670,709,201	General Affair Expenses
Beban Umum dan					Water Resources General and
Operasi Sumber Daya Air	3,006,906,029	52,669,066,354	861,153,168	56,537,125,551	Operational Expenses
Beban Bahan dan					Materials and Supplies
Perlengkapan	5,066,868,850	6,002,125,022	1,497,866,180	12,566,860,052	Expenses
Beban Pemeliharaan	12,638,584,500	36,284,831,945	852,545,437	49,775,961,882	Maintenance Expenses
Beban Sistem Informasi	--	487,352,437	10,014,577	497,367,014	Information System Expenses
Beban Perencanaan	--	281,259,700	--	281,259,700	Planning Expenses
Beban Pemanfaatan, Evaluasi					Utilization, Evaluation and Community
dan Pemberdayaan Masyarakat	--	670,455,800	--	670,455,800	Empowerment Expenses
Beban Pelaksanaan Konservasi	396,520,300	20,075,287,500	400,223,800	20,872,031,600	Conservation Expenses
Beban Penyusutan Aset Tetap					Depreciation Expenses of
(Catatan 15)	23,531,424,686	21,718,644,434	3,088,954,715	48,339,023,835	Fixed Assets (Note 15)
Beban Penyusutan Aset Hak-Guna					Depreciation Expenses of
(Catatan 17)	385,703,329	1,559,901,895	665,967,901	2,611,573,125	Right-of-Use Assets (Note 17)
Beban Overhead Lainnya	24,370,346,355	156,403,158,492	49,995,000	180,823,499,847	Other Overhead Expenses
Jumlah	94,475,383,716	383,370,832,278	9,799,651,613	487,645,867,607	Total

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Rincian beban non sumber daya air adalah sebagai berikut:

Details of non-water resource expenses are as follows:

2022						
	Beban Pariwisata/ Tourism Expenses	Beban Pemanfaatan Lahan/ Land Utilization Expenses	Beban Laboratorium/ Laboratory Expenses	Beban Air Minum Dalam Kemasan/ Bottled Drinking Water Expenses	Beban Konstruksi dan Usaha Lainnya/ Construction and Other Operational Expenses	Jumlah/ Total
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Beban Personalia	1,623,645,508	2,784,437,141	4,703,149,019	--	--	9,111,231,668
Beban Rumah Tangga dan Operasi	5,611,659,423	36,831	1,098,983,951	--	--	6,710,680,205
Beban Bahan dan Perengkapan	2,634,247,198	--	1,380,020,329	4,226,169,840	906,632,276	9,147,069,643
Beban Pemeliharaan	1,113,591,048	54,573,400	144,494,072	--	--	1,312,658,520
Beban Subkonstruksi	--	--	--	--	20,381,352,809	20,381,352,809
Beban Sistem Informasi	143,802,859	--	40,836,060	--	--	184,638,919
Beban Perencanaan	--	--	74,999,300	--	--	74,999,300
Beban Pemanfaatan, Evaluasi dan Pemberdayaan Masyarakat	--	--	107,904,870	--	--	107,904,870
Beban Pelaksanaan Konservasi	9,897,500	--	263,985,870	--	--	273,883,370
Beban Penyusutan Aset Tetap (Catatan 15)	10,994,292,217	--	986,107,727	461,850,047	--	12,442,249,991
Beban Penyusutan Aset Hak-Guna (Catatan 17)	146,879,788	--	213,185,669	--	--	360,065,457
Beban Overhead Lainnya	4,210,931,493	8,104,652,205	141,639,055	--	--	12,457,222,753
Jumlah	26,488,947,034	10,943,699,577	9,155,305,922	4,688,019,887	21,287,985,085	72,563,957,505
2021						
	Beban Pariwisata/ Tourism Expenses	Beban Pemanfaatan Lahan/ Land Utilization Expenses	Beban Laboratorium/ Laboratory Expenses	Beban Air Minum Dalam Kemasan/ Bottled Drinking Water Expenses	Beban Konstruksi dan Usaha Lainnya/ Construction and Other Operational Expenses	Jumlah/ Total
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Beban Personalia	1,976,386,612	2,092,376,325	3,451,190,043	1,425,764,910	50,000,000	8,995,717,890
Beban Rumah Tangga dan Operasi	5,236,827,850	882,000	759,124,985	963,166,239	577,788,100	7,537,789,174
Beban Bahan dan Perengkapan	2,213,041,934	--	1,325,809,033	2,511,158,997	358,852,534	6,408,862,498
Beban Pemeliharaan	930,619,380	113,443,610	146,684,048	302,098,155	--	1,492,845,193
Beban Sistem Informasi	--	--	--	--	15,962,668,806	15,962,668,806
Beban Subkonstruksi	157,567,369	--	15,600,000	11,622,650	--	184,790,019
Beban Perencanaan	--	--	70,000,000	--	--	70,000,000
Beban Pemanfaatan, Evaluasi dan Pemberdayaan Masyarakat	--	--	154,989,975	7,486,000	--	162,475,975
Beban Pelaksanaan Konservasi	558,617,900	--	213,998,000	--	--	772,615,900
Beban Penyusutan Aset Tetap (Catatan 15)	4,171,097,434	--	936,451,003	468,789,373	--	5,576,337,810
Beban Penyusutan Aset Hak-Guna (Catatan 17)	122,029,981	--	177,284,884	--	--	299,314,865
Beban Overhead Lainnya	3,320,880,747	6,240,068,287	16,940,500	--	--	9,577,889,534
Jumlah	18,687,069,207	8,446,770,222	7,268,072,471	5,690,086,324	16,949,309,440	57,041,307,664

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

33. Beban Pemasaran

33. Marketing Expenses

	2022	2021	
	Rp	Rp	
Beban Promosi dan Reklame	4,033,388,113	3,201,856,043	Marketing and Advertising Expenses
Beban Jamuan	1,760,827,169	1,529,071,433	Entertainment Expenses
Jumlah	5,794,215,282	4,730,927,476	Total

34. Beban Umum dan Administrasi

34. General and Administrative Expenses

	2022	2021	
	Rp	Rp	
Beban Personalia	97,382,757,938	73,624,256,521	General Affair Expenses
Beban Rumah Tangga dan Administrasi Kantor	48,565,064,276	51,157,840,835	Office Household and Administration Expenses
Beban Perencanaan	15,794,109,642	13,439,278,406	Planning Expenses
Beban Penyusutan (Catatan 15 dan 17)	13,341,681,929	11,072,969,862	Depreciation Expenses (Note 15 and 17)
Beban Pemeliharaan	2,778,358,889	9,694,835,147	Maintenance Expenses
Beban Pemanfaatan, Evaluasi dan Pemberdayaan Masyarakat	4,958,642,852	5,421,581,563	Utilization, Evaluation and Community Empowerment
Beban Sistem Informasi	2,665,871,728	3,515,562,655	Information Systems Expenses
Beban Amortisasi (Catatan 16)	1,104,901,416	--	Amortization Expense (Note 16)
Beban Pelaksanaan Konservasi	568,583,580	724,974,000	Conservation Implementation
Jumlah	187,159,972,250	168,651,298,989	Total

35. Pendapatan (Beban) Keuangan

35. Financial Income (Expenses)

	2022	2021	
	Rp	Rp	
Pendapatan Keuangan			Financial Income
Pendapatan Bunga Deposito	10,547,548,965	11,784,964,178	Time Deposits Income
Pendapatan Jasa Giro	1,841,256,171	837,686,162	Current Account Income
Sub Jumlah	12,388,805,136	12,622,650,340	Sub Total
Beban Keuangan			Financial Expenses
Beban Bunga Pinjaman	1,139,266,800	1,100,000,001	Loan Interest Expense
Beban Bunga Sewa	363,075,793	512,599,280	Lease Interest Expense
Beban Bank	3,276,800	2,769,708	Bank Fees
Pajak Jasa Giro	3,810,640	2,431,140	Current Account Service Tax
Sub Jumlah	1,509,430,033	1,617,800,129	Sub Total
Jumlah	10,879,375,103	11,004,850,211	Total

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

36. Pendapatan (Beban) Lain-lain

36. Other Income (Expense)

	2022 Rp	2021 Rp	
Pendapatan Lain-lain:			Other Income:
Pemulihan Kerugian Nilai	15,402,078,658	--	Impairment Losses Recovery
Penerimaan Kelebihan			
Pembayaran PPN			Receipts of VAT Overpayment
Tahun 2011	1,386,993,856	--	Year 2011
Pendapatan Denda	555,192,032	1,318,581,743	Penalty Income
			Gain on Disposal of
Laba Penjualan Aset Tetap	--	378,390,186	Fixed Assets
Pendapatan Lain-lain	966,226,510	1,671,997,945	Other Income
Sub Jumlah	18,310,491,056	3,368,969,874	Sub Total
Beban Lain-lain:			Other Expenses:
Cadangan Kerugian			Allowance for Impairment
Penurunan Nilai Piutang	15,022,222,565	5,344,451,959	Losses on Receivables
Beban Pajak	5,843,371,331	--	Tax Expenses
			Correction of Minimum
Koreksi Pemakaian Volume			Surcharge of Raw Water
Minimum Air Baku	2,892,594,333	--	Volume Usage
Bagian Rugi Perusahaan			Loss Share in
Asosiasi	--	1,436,705,577	Associates
Beban Lain	1,398,050,843	1,459,587,315	Other Expenses
Sub Jumlah	25,156,239,072	8,240,744,851	Sub Total
Jumlah	(6,845,748,016)	(4,871,774,977)	Total

37. Saldo, Sifat dan Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi

37. Balances, Nature and Transactions with Related Parties

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi yang dilakukan dengan syarat-syarat dan kondisi normal. Transaksi ini termasuk pembayaran oleh Grup atas beban-beban pihak berelasi atau sebaliknya. Saldo transaksi dengan pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

In the normal course of business, the Company entered into certain transactions with the related parties conducted by normal terms and conditions. These transactions include payments made by the Group to the related parties or vice versa. Balance of related parties accounts as of December 31, 2022 and 2021 are as follows:

a. Sifat Hubungan dan Transaksi

Hubungan dan sifat saldo transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

a. Nature of Relationship and Transactions

Nature of relationship and transactions with related parties are as follows:

Pihak-pihak Berelasi/ Related Parties	Sifat Hubungan/ Nature of Relationship	Jenis Transaksi/ Type of Transaction
Kementerian Keuangan Republik Indonesia/ Ministry of Finance of Republic of Indonesia	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ Controlled by Central Government of Republic of Indonesia	Modal Saham, Perpajakan/ Capital Share, Taxation
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ Controlled by Central Government of Republic of Indonesia	Penempatan Giro/ Placement of Current Account

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021

(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Pihak-pihak Berelasi/ Related Parties	Sifat Hubungan/ Nature of Relationship	Jenis Transaksi/ Type of Transaction
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of Republic of Indonesia</i>	Penempatan Giro dan Deposito/ <i>Placement of Current Account and Deposit</i>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of Republic of Indonesia</i>	Penempatan Giro dan Deposito/ <i>Placement of Current Account and Deposit</i>
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of Republic of Indonesia</i>	Penempatan Deposito/ <i>Placement of Deposit</i>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of Republic of Indonesia</i>	Penempatan Deposito/ <i>Placement of Deposit</i>
PT Sang Hyang Seri (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of Republic of Indonesia</i>	Piutang Usaha/ <i>Accounts Receivable</i> , Pendapatan/ <i>Revenue</i>
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of Republic of Indonesia</i>	Piutang Usaha/ <i>Accounts Receivable</i> , Pendapatan yang Masih Akan Diterima/ <i>Accrued Revenue</i> , Pendapatan/ <i>Revenue</i>
PT Pertamina (Persero) Daerah Operasi Hulu	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of Republic of Indonesia</i>	Piutang Usaha/ <i>Accounts Receivable</i> , Pendapatan/ <i>Revenue</i>
PT Pertamina EP Asset 3 Subang Field	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of Republic of Indonesia</i>	Piutang Usaha/ <i>Accounts Receivable</i> , Pendapatan/ <i>Revenue</i>
PT Pertamina EP Asset 3 Tambun Field	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of Republic of Indonesia</i>	Piutang Usaha/ <i>Accounts Receivable</i> , Pendapatan/ <i>Revenue</i>
PT Kujang Tatar Persada	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of Republic of Indonesia</i>	Piutang Usaha/ <i>Accounts Receivable</i> , Pendapatan/ <i>Revenue</i>
PT Pertamina EP Region Jawa	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of Republic of Indonesia</i>	Piutang Usaha/ <i>Accounts Receivable</i> , Pendapatan/ <i>Revenue</i>
PT Pertamina EP Region Jawa Subang Field	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of Republic of Indonesia</i>	Piutang Usaha/ <i>Accounts Receivable</i> , Pendapatan/ <i>Revenue</i>
PT Pertamina EP Region Jawa Jatibarang Field	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of Republic of Indonesia</i>	Piutang Usaha/ <i>Accounts Receivable</i> , Pendapatan/ <i>Revenue</i>
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of Republic of Indonesia</i>	Piutang Usaha/ <i>Accounts Receivable</i> , Pendapatan/ <i>Revenue</i>
PT Barata Indonesia (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of Republic of Indonesia</i>	Piutang Usaha/ <i>Accounts Receivable</i> , Pendapatan/ <i>Revenue</i>
PT Waskita Beton Precast Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of Republic of Indonesia</i>	Piutang Usaha/ <i>Accounts Receivable</i> , Pendapatan/ <i>Revenue</i>
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of Republic of Indonesia</i>	Piutang Usaha/ <i>Accounts Receivable</i> , Pendapatan/ <i>Revenue</i>

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021

(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Pihak-pihak Berelasi/ Related Parties	Sifat Hubungan/ Nature of Relationship	Jenis Transaksi/ Type of Transaction
PT Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of Republic of Indonesia</i>	Piutang Usaha/ <i>Accounts Receivable</i> , Pendapatan/ <i>Revenue</i>
PT Pembangkitan Jawa-Bali	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of Republic of Indonesia</i>	Piutang Usaha/ <i>Accounts Receivable</i> , Pendapatan/ <i>Revenue</i>
PT Pertamina Patra Niaga	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of Republic of Indonesia</i>	Pendapatan yang Masih Akan Diterima/ <i>Accrued Revenue</i> , Pendapatan/ <i>Revenue</i>
PT PLN Nusantara Power	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of Republic of Indonesia</i>	Pendapatan yang Masih Akan Diterima/ <i>Accrued Revenue</i> , Pendapatan/ <i>Revenue</i>
PT Indonesia Power	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of Republic of Indonesia</i>	Pendapatan yang Masih Akan Diterima/ <i>Accrued Revenue</i> , Pendapatan/ <i>Revenue</i>
PT PP Properti Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of Republic of Indonesia</i>	Piutang Usaha/ <i>Accounts Receivable</i> , Pendapatan/ <i>Revenue</i>
Balai Besar Penelitian Tanaman Padi	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of Republic of Indonesia</i>	Piutang Usaha/ <i>Accounts Receivable</i> , Pendapatan/ <i>Revenue</i>
Balai Besar Wilayah Sungai Citarum	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of Republic of Indonesia</i>	Piutang Usaha/ <i>Accounts Receivable</i> , Pendapatan/ <i>Revenue</i>
Balai Penelitian, Pemulihan dan Konservasi Sumber Daya Ikan	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of Republic of Indonesia</i>	Piutang Usaha/ <i>Accounts Receivable</i> , Pendapatan/ <i>Revenue</i>
Balai Pengembangan Budidaya Ikan Patin dan Lele	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of Republic of Indonesia</i>	Piutang Usaha/ <i>Accounts Receivable</i> , Pendapatan/ <i>Revenue</i>
PT Dahana (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of Republic of Indonesia</i>	Piutang Usaha/ <i>Accounts Receivable</i> , Pendapatan/ <i>Revenue</i>
PT Indosat Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of Republic of Indonesia</i>	Piutang Usaha/ <i>Accounts Receivable</i> , Pendapatan/ <i>Revenue</i>
PT Kimia Farma Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of Republic of Indonesia</i>	Piutang Usaha/ <i>Accounts Receivable</i> , Pendapatan/ <i>Revenue</i>
PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of Republic of Indonesia</i>	Piutang Usaha/ <i>Accounts Receivable</i> , Pendapatan/ <i>Revenue</i>
PT Industri Sandang Nusantara (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of Republic of Indonesia</i>	Piutang Usaha/ <i>Accounts Receivable</i> , Pendapatan/ <i>Revenue</i>
PT Kertas Padalarang (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of Republic of Indonesia</i>	Piutang Usaha/ <i>Accounts Receivable</i> , Pendapatan/ <i>Revenue</i>
PT Mitra Rajawali Banjaran	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of Republic of Indonesia</i>	Piutang Usaha/ <i>Accounts Receivable</i> , Pendapatan/ <i>Revenue</i>

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021

(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Pihak-pihak Berelasi/ Related Parties	Sifat Hubungan/ Nature of Relationship	Jenis Transaksi/ Type of Transaction
PT Pabrik Gula Rajawali II	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of Republic of Indonesia</i>	Piutang Usaha/ <i>Accounts Receivable</i> , Pendapatan/ <i>Revenue</i>
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of Republic of Indonesia</i>	Piutang Usaha/ <i>Accounts Receivable</i> , Pendapatan/ <i>Revenue</i>
PT Kukuh Tangguh Sandang Mills	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of Republic of Indonesia</i>	Piutang Usaha/ <i>Accounts Receivable</i> , Pendapatan/ <i>Revenue</i>
PT Pertamina VI RU Balongan	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of Republic of Indonesia</i>	Piutang Usaha/ <i>Accounts Receivable</i> , Pendapatan/ <i>Revenue</i>
PT Raharja Putra Perkasa	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of Republic of Indonesia</i>	Utang Usaha/ <i>Accounts Payable</i>
PT Pilar Jati Persada	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of Republic of Indonesia</i>	Utang Usaha/ <i>Accounts Payable</i>
PT Bakti Usaha Menanam Nusantara Hijau Lestari I	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of Republic of Indonesia</i>	Utang Usaha/ <i>Accounts Payable</i>
PT Indra Karya (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of Republic of Indonesia</i>	Utang Usaha/ <i>Accounts Payable</i>
Koperasi Karya Bakti Raharja	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of Republic of Indonesia</i>	Utang Usaha/ <i>Accounts Payable</i>
PT Sucofindo Advisory Utama	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of Republic of Indonesia</i>	Utang Usaha/ <i>Accounts Payable</i>
PT Industri Nuklir Indonesia (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of Republic of Indonesia</i>	Utang Usaha/ <i>Accounts Payable</i>
PT Sucofindo (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of Republic of Indonesia</i>	Utang Usaha/ <i>Accounts Payable</i>
PT Surveyor Indonesia	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of Republic of Indonesia</i>	Utang Usaha/ <i>Accounts Payable</i>
PT Hotel Indonesia Group	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of Republic of Indonesia</i>	Utang Usaha/ <i>Accounts Payable</i>
PT Yodya Karya Persero	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of Republic of Indonesia</i>	Utang Usaha/ <i>Accounts Payable</i>
PT Indah Karya (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of Republic of Indonesia</i>	Utang Usaha/ <i>Accounts Payable</i>
PT Virama Karya (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of Republic of Indonesia</i>	Utang Usaha/ <i>Accounts Payable</i>

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

b. Rincian Transaksi dan Saldo

Transaksi-transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

b. Nature of Relationship and Transactions

Significant transactions with related parties are as follows:

	2022 Rp	2021 Rp	Persentase terhadap Jumlah Aset/ Percentage to Total Assets	
			2022 %	2021 %
Aset/ Assets				
Bank (Catatan 5)/ Banks (Note 5)				
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	91,727,776,551	16,687,313,693	4.79%	0.99%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	3,541,765,891	13,866,201,037	0.19%	0.82%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	7,006,648,561	5,859,975,577	0.37%	0.35%
Deposito (Catatan 5/ Time Deposits (Note 5))				
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	240,000,000,000	100,000,000,000	12.54%	5.92%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	50,000,000,000	40,000,000,000	2.61%	2.37%
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	150,000,000,000	140,000,000,000	7.84%	8.29%
Jumlah	542,276,191,003	316,413,490,307	28.35%	18.73%
Piutang Usaha (Catatan 6)/ Accounts Receivable (Note 6)				
PT Sang Hyang Seri (Persero)	61,834,638,493	52,271,058,616	3.23%	3.09%
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	34,390,346,144	21,377,397,782	1.80%	1.27%
PT Pertamina EP Asset 3 Subang Field	13,181,303	3,314,999,403	0.00%	0.20%
PT Kujang Tatar Persada	2,271,873,130	2,271,873,130	0.12%	0.13%
PT Pertamina EP Region Jawa Subang Field	118,297,694	1,495,198,186	0.01%	0.09%
PT Pertamina EP Region Jawa Jatibarang Field	96,258,870	1,275,994,329	0.01%	0.08%
PT Pertamina EP Region Jawa Jatibarang Field	198,096,711	--	0.01%	--
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	174,423,500	174,423,500	0.01%	0.01%
PT Barata Indonesia (Persero)	141,098,311	141,098,311	0.01%	0.01%
PT Waskita Beton Precast Tbk	74,541,196	130,592,000	0.00%	0.01%
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	128,925,500	128,997,500	0.01%	0.01%
Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia	110,351,001	118,584,719	0.01%	0.01%
PT Pembangkitan Jawa-Bali	--	114,803,375	--	0.01%
PT PP Properti Tbk	96,349,100	110,951,935	0.01%	0.01%
Lain-lain (di bawah Rp100 juta)/ Others (below Rp100 million)	257,723,969	549,457,666	0.01%	0.03%
Jumlah	99,906,104,922	83,475,430,452	5.24%	4.94%

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	2022 Rp	2021 Rp	Persentase terhadap Jumlah Aset/ Percentage to Total Assets	
			2022 %	2021 %
Pendapatan yang Masih Akan Diterima (Catatan 7)/ Accrued Revenue (Note 7)				
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	79,447,808,962	117,521,870,412	4.15%	6.95%
PT PLN Nusantara Power	32,754,330,337	--	1.71%	--
PT Indonesia Power	18,804,699,682	--	0.98%	--
PT Pertamina Patra Niaga	11,528,509,797	--	0.60%	--
PT Sang Hyang Seri (Persero)	2,902,972,233	5,224,553,675	0.15%	0.31%
PT Indosat Tbk	537,862,270	--	0.03%	--
Lain-lain (di bawah Rp500 juta)/ Others below Rp500 million)	568,358,936	107,666,920	0.03%	0.01%
Jumlah	146,544,542,217	122,854,091,007	7.66%	7.27%
	2022 Rp	2021 Rp	Persentase terhadap Jumlah Liabilitas/ Percentage to Total Liabilities	
			2022 %	2021 %
Liabilitas/ Liabilities				
Utang Usaha (Catatan 19)/ Accounts Payable (Note 19)				
PT Virama Karya (Persero)	2,284,686,083	--	0.43%	--
PT Raharja Putra Perkasa	1,928,309,760	2,021,789,000	0.36%	0.49%
PT Indra Karya (Persero)	729,899,957	816,695,000	0.14%	0.20%
PT Bakti Usaha Menanam Nusantara Hijau Lestari I	--	1,436,705,577	--	0.35%
PT Pilar Jati Persada	--	989,370,030	--	0.24%
Lainnya (di bawah Rp500 juta)/ Others (below Rp500 million)	169,423,529	290,672,626	0.03%	0.07%
Jumlah	5,112,319,329	5,555,232,233	0.95%	1.36%
Pendapatan Diterima di Muka (Catatan 23)/ Deferred Revenue (Note 23)				
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	3,886,513,226	4,587,350,943	0.73%	1.12%
PT Pertamina EP Asset 3 Subang Field	2,111,682,798	2,008,540,666	0.40%	0.49%
PT Pertamina EP Asset 3 Tambun Field	--	914,843,183	--	0.22%
PT Pertamina EP Region Jawa Subang Field	104,232,102	487,058,814	0.02%	0.12%
PT Pertamina DOH	429,200,300	429,200,300	0.08%	0.11%
Lain-lain (di bawah Rp100 juta)/ Others (below Rp100 million)	147,492,760	316,538,832	0.03%	0.08%
Jumlah	6,679,121,186	8,743,532,738	0.53%	1.02%

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	2022 Rp	2021 Rp	Persentase terhadap Jumlah Pendapatan/ Percentage to Total Revenue	
			2022 %	2021 %
Pendapatan (Catatan 27)/ Revenue (Note 27)				
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	252,163,070,338	209,170,701,305	25.70%	24.42%
PT PLN Nusantara Power	29,508,405,677	--	3.01%	--
PT Indonesia Power	16,941,170,872	--	1.73%	--
PT Sang Hyang Seri (Persero)	7,109,908,520	8,006,203,770	0.72%	0.93%
PT Pertamina Patra Niaga	4,652,769,906	--	--	--
PT Indosat Tbk	--	5,676,466,282	--	0.66%
PT Pertamina RU VI Balongan	--	3,100,998,000	--	0.36%
Lain-lain (di bawah Rp500 juta/ Others (below Rp500 million))	--	559,768,545	--	0.07%
Jumlah/ Total	310,375,325,313	226,514,137,902	31.16%	26.45%

**c. Kompensasi Dewan Pengawas, Organ
Pendukung dan Direksi**

Biaya remunerasi Dewan Pengawas
Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
masing-masing sebesar Rp5.666.489.667 dan
Rp5.544.805.206.

Biaya remunerasi Dewan Direksi Perusahaan
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing
sebesar Rp11.632.478.182 dan
Rp8.985.968.319.

**c. Compensation for Board of Supervisory,
Supporting Working Units and Directors**

The remuneration for the Board of Supervisory
for the years ended December 31, 2022 and
2021 amounting to Rp5,666,489,667 and
Rp5,544,805,206.

The remuneration for the Company's Board of
Directors for the years ended December 31,
2022 and 2021 amounting to
Rp11,632,478,182 and Rp8,985,968,319.

38. Informasi Penting Lainnya

38. Other Important Information

Perusahaan

i. Kesepakatan Penyelesaian Piutang

a. PT Sang Hyang Seri

Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan
Penyelesaian Piutang No. BA-
3/DIR/02/2020 tanggal 21 Februari 2020,
Perusahaan memberikan kesempatan
kepada PT Sang Hyang Seri untuk
mengadakan penjadwalan kembali
pembayaran utang BJPSDA sejumlah
Rp42.136.015.150 dengan cara diangsur 5
(lima) kali angsuran yang di bayarkan
setiap tahun mulai 31 Desember 2020
sampai dengan 31 Desember 2024.

Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan
Penyelesaian Piutang No. BA-
01/DIR/02/2021 tanggal 25 Februari 2021,
Perusahaan memberikan kesempatan
kepada PT Sang Hyang Seri untuk

The Company

i. Settlement of Receivables Agreement

a. PT Sang Hyang Seri

Based on the Minutes of Receivable
Settlement Agreement No. BA-
3/DIR/02/2020 dated February 21, 2020,
the Company provided an opportunity for
PT Sang Hyang Seri to reschedule
BJPSDA debt payments in the amount of
Rp42,136,015,150 by means of 5 (five)
times installments to be paid annually
starting December 31, 2020 until
December 31, 2024.

Based on the Minutes of Receivable
Settlement Agreement No. BA-
01/DIR/02/2021 dated February 25, 2021,
the Company provided an opportunity for
PT Sang Hyang Seri to reschedule

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

mengadakan penjadwalan kembali pembayaran utang BJPSDA tahun 2020 sejumlah Rp9.647.648.998 dengan cara diangsur 6 (enam) kali angsuran yang dibayarkan setiap triwulan mulai 31 Juni 2021 sampai dengan 30 September 2022.

Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Piutang No. BA-02/DPU/12/2021 tanggal 1 Desember 2021, Perusahaan memberikan kesempatan kepada PT Sang Hyang Seri untuk mengadakan penjadwalan kembali pembayaran utang BJPSDA bulan Januari sampai dengan Juni 2021 sejumlah Rp3.582.270.472 dengan cara diangsur 6 (enam) kali angsuran yang dibayarkan setiap triwulan mulai 31 Maret 2022 sampai dengan 30 Juni 2023.

Dari penjadwalan kembali, PT Sang Hyang Seri selama tahun 2022 dan 2021 telah melakukan pembayaran sejumlah Rp650.000.000 dan Rp800.000.000.

Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Nomor: BA-05/DIR/12/2022 dan BA-214/DIR/SHS.01/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022, Perusahaan dan PT Sang Hyang Seri mengadakan kesepakatan penyelesaian kewajiban BJPSDA PT Sang Hyang Seri sampai dengan 31 Desember 2022 sejumlah Rp61.834.638.497 ke Perusahaan dilakukan dengan *asset settlement* dengan ketentuan:

- Penyelesaian kewajiban BJPSDA PT Sang Hyang Seri sebesar Rp61.834.638.497 dengan skema *asset settlement* sebagai bagian restrukturisasi hutang.
- Aset yang digunakan sebagai *asset settlement* merupakan aset milik PT Sang Hyang Seri tidak sedang diagunkan, tidak terdapat permasalahan/sengketa dengan pihak lain, dan tidak digunakan dan/atau diduduki oleh pihak lain tanpa hak (dalam kondisi *clear and clean*).
- Pihak Perusahaan akan mengecek dan memverifikasi atas asetnya apabila tidak memenuhi potensi yang dibutuhkan, maka Perusahaan akan menyampaikan secara tertulis untuk mengajukan aset pengganti.

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

BJPSDA debt payments for 2020 in the amount of Rp9,647,648,998 in 6 (six) times installments to be paid quarterly from June 31, 2021 to September 30, 2022.

Based on the Minutes of Receivable Settlement Agreement No. BA-02/DPU/12/2021 dated December 1, 2021, the Company provided an opportunity for PT Sang Hyang Seri to reschedule BJPSDA debt payments from January to June 2021 in the amount of Rp3,582,270,472 in 6 (six) times installments which are paid quarterly from March 31, 2022 to June 30, 2023.

From the rescheduling, PT Sang Hyang Seri during 2022 and 2021 has made payments in the amount of Rp650,000,000 and Rp800,000,000.

Based on the Minutes of Agreement Number: BA-05/DIR/12/2022 and BA-214/DIR/SHS.01/XII/2022 dated December 27, 2022, the Company and PT Sang Hyang Seri entered into an agreement to settle PT Sang Hyang Seri's BJPSDA obligations until by December 31, 2022 in the amount of Rp61,834,638,497 to the Company by means of asset settlement under the following conditions:

- *Settlement of PT Sang Hyang Seri's BJPSDA liabilities amounting to Rp61,834,638,497 with an asset settlement scheme as part of debt restructuring.*
- *Assets used as asset settlement owned by PT Sang Hyang Seri did not being used as collateral, there are no problems/disputes with other parties, and are not used and/or occupied by other parties without rights (in clear and clean conditions).*
- *The Company will check and verify its assets if they do not meet the required potential, then the Company will submit a written request to propose replacement assets.*

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- Para Pihak sepakat untuk menunjuk KJPP/ instansi/ kantor penilai yang independen untuk melakukan penilaian terhadap aset. Apabila aset yang dimaksud tidak mencapai besaran kewajibannya, maka PT Sang Hyang Seri akan mengajukan usulan aset tambahan dan apabila terjadi kelebihannya, maka atas kelebihannya Perusahaan akan melaksanakan pembayaran kelebihan tersebut.
- Para pihak sepakat Pelaksanaan *Asset Settlement* dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar dan ketentuan masing-masing pihak, perundang-undangan yang berlaku, mengedepankan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan setelah mendapat persetujuan Pemegang Saham.
- *The Parties agree to appoint an independent appraisal/ instance/ office to conduct an appraisal of the assets. If the stated assets in do not reach the amount of their liabilities, then PT Sang Hyang Seri will submit a proposal for additional assets and if there is an excess, then for the excess the Company will carry out the payment of the excess.*
- *The parties agree that the implementation of the Asset Settlement is carried out in accordance with the Articles of Association and the provisions of each party, the applicable laws, prioritizing the principles of Good Corporate Governance (GCG) and after obtaining the approval of the Shareholders.*

Proses penyelesaian *asset settlement* diperkirakan akan selesai pada bulan Desember 2023 dengan jadwal sebagai berikut:

The asset settlement process is expected to be completed in December 2023 with the following schedule:

Tahap/ Step	Proses/ Process	Lini Masa/ Timeline
1	Berita Acara Kesepakatan/ <i>Minutes of Agreement</i>	27 Desember 2022/ <i>December 27, 2022</i>
2	Appraisal Aset Bersama/ <i>Shared Asset Appraisal</i>	Januari 2023 <i>January 2023</i>
3	Penyusunan Kajian <i>Asset Settlement</i> / <i>Preparation of Asset Settlement Study</i>	Februari - Maret 2023 <i>February - March 2023</i>
4	Pendampingan Jamdatun dan BPKP/ <i>Jamdatun and BPKP Assistance</i>	Februari - Maret 2023 <i>February - March 2023</i>
5	Persetujuan Dewan Komisaris PT Sang Hyang Seri/ Dewan Pengawas PJT II/ <i>Approval of the Board of Commissioners of PT Sang Hyang Seri/ Supervisory Board of PJT II</i>	April - Mei 2023 <i>April - May 2023</i>
6	Persetujuan Pemegang Saham/ <i>Shareholders Approval</i>	Juni - Oktober 2023 <i>June - October 2023</i>
7	Proses Transaksi/ <i>Transaction Process</i>	November - Desember 2023 <i>November - December 2023</i>

ii. Pendapatan BJPSDA PT PLN (Persero), PT IP dan PT PJB

Penerapan BJPSDA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974, tentang Pengairan;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;

ii. Revenue of BJPSDA PT PLN (Persero), PT IP dan PT PJB

The application of BJPSDA is in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations, consist of:

- a. *Law Number 11 Year 1974, concerning Irrigation;*
- b. *Law Number 17 Year 2019 concerning Water Resources;*

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

- c. Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 1981, tentang luran Pembayaran Eksploitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengairan;

Sebagaimana representasi Direksi Perusahaan, sesuai surat dari Direktur Keuangan dan SDM No. SD-72/DIR/KU/03/2020, tanggal 18 Maret 2020, yang menyatakan adanya beberapa hal penting yang kemudian menjadi pertimbangan untuk tidak mengakui pendapatan BJPSDA dalam tahun 2021 dan 2020, antara lain:

1. Sesuai laporan Tim BJPSDA No. ND-01/Tim BJPSDA/03/2020, tanggal 4 Maret 2020 dan No. ND-02/Tim BJPSDA/03/2020, tanggal 17 Maret 2020, PT IP dan PT PJB menyatakan bahwa, "pembayaran BJPSDA prospektif ke depan mulai tahun 2020" sesuai dengan Risalah Rapat Tim BJPSDA dengan PT PLN (Persero), PT IP dan PT PJB di Kantor Pusat PT PLN (Persero) Jakarta tanggal 3 Maret 2020 dan Risalah Rapat dengan PT PJB di Kantor Pusat PT PJB Surabaya tanggal 13 Maret 2020. Hal tersebut tidak sesuai dengan temuan dan rekomendasi BPK RI yang menjadi dasar penagihan BJPSDA oleh Perusahaan kepada PT PLN (Persero), PT IP dan PT PJB.
2. PT PLN (Persero) belum melaksanakan kewajiban pembayaran BJPSDA yang telah disepakati dalam Rapat antara PT PLN dengan Perusahaan pada Senin, 9 Desember 2019, di Ruang Rapat Direktur Utama PT PLN (Persero) dengan agenda: Pembahasan Penyelesaian Pembayaran Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA), PT PLN (Persero), PT Indonesia Power (PT IP) dan PT Pembangkitan Jawa Bali (PT PJB) kepada Perusahaan. Di dalam Risalah Rapat pada angka 2 huruf d dinyatakan bahwa, "PT PLN akan menyelesaikan pembayaran BJPSDA periode 14 Februari 2013 sampai dengan 22 November 2017 sepanjang terdapat Perjanjian antara PT PLN (Persero) dengan Perusahaan".
3. PT PLN (Persero) belum melaksanakan kesepakatan sebagaimana Berita Acara Rapat antara Perusahaan dengan PT PLN (Persero), PT IP, PT PJB, Kementerian BUMN, Kementerian PUPR, dan Tim JPN DATUN di Kementerian BUMN tanggal 30 Desember 2019 dengan Agenda Pembahasan Penyelesaian Pembayaran

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- c. Government Regulation number 6 Year 1981, concerning Exploitation and Maintenance of Irrigation Infrastructure Payment Contribution;

As the representation of the Directors of the Company, according to a letter from the Director of Finance and HR No. SD-72/DIR/KU/03/2020, dated March 18, 2020, which stated that there were some important things which later became a consideration for not recognizing BJPSDA revenue in 2021 and 2020, including:

1. According to the BJPSDA Team report No. ND-01/Tim BJPSDA/03/2020, dated March 4, 2020 and No. ND-02/Tim BJPSDA/03/2020, dated March 17, 2020, PT IP and PT PJB stated that, "prospective BJPSDA payment going forward from 2020" in accordance with the Minutes of the BJPSDA Team Meeting with PT PLN (Persero), PT IP and PT PJB at PT PLN (Persero) Jakarta Head Office on March 3, 2020 and Minutes of Meeting with PT PJB at PT PJB Surabaya Head Office dated March 13, 2020. This is not in accordance with the findings and recommendations of BPK RI which is the basis for BJPSDA billing by the Company to PT PLN (Persero), PT IP and PT PJB.
2. PT PLN (Persero) has not carried out the BJPSDA payment obligations agreed at the Meeting between PT PLN and the Company on Monday, December 9, 2019, in the Meeting Room of the President Director of PT PLN (Persero) with the agenda: Discussion on Settling Payment of Management Services Costs Water Resources (BJPSDA), PT PLN (Persero), PT Indonesia Power (PT IP) and PT Pembangkitan Jawa Bali (PT PJB) to the Company. In the Minutes of the Meeting in item 2 letter d states that, "PT PLN will complete the payment of BJPSDA for the period of February 14, 2013 to November 22, 2017 as long as there is an Agreement between PT PLN (Persero) and the Company".
3. PT PLN (Persero) has not yet implemented an agreement as Minutes of Meeting between the Company and PT PLN (Persero), PT IP, PT PJB, the Ministry of SOE, the Ministry of PUPH, and the JPN DATUN Team at the Ministry of SOE on December 30, 2019 with the Payment Settlement Discussion Agenda BJPSDA

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

BJPSDA PT PLN (Persero), PT IP, dan PT PJB kepada Perusahaan. Di dalam Berita Acara Rapat pada angka 1 dan 2 dinyatakan bahwa, "PT PLN, PT IP dan PT PJB sepakat bahwa BJPSDA tetap menjadi kewajiban pembayaran kepada Perusahaan dan sepakat akan membuat perjanjian sesuai tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah dan mulai tahun 2013".

Rekomendasi BPK RI yang dituangkan dalam risalah rapat adalah sebagai berikut:

1. Risalah Rapat antara PT PLN (Persero) dengan Perusahaan pada Senin, 9 Desember 2019, di Ruang Rapat Direktur Utama PT PLN (Persero) dengan agenda: Pembahasan Penyelesaian Pembayaran Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA), PT PLN (Persero), PT Indonesia Power (PT IP) dan PT Pembangkitan Jawa Bali (PT PJB) kepada Perusahaan. Di dalam Risalah Rapat pada angka 2 huruf e dinyatakan bahwa, "PT IP dan PT PJB telah mendapatkan manfaat dari sumber daya air, maka PT IP dan PT PJB dapat membayar BJPSDA".
2. Berita Acara Rapat antara Perusahaan dan PT PLN (Persero), PT IP, PT PJB, Kementerian BUMN, Kementerian PUPR, dan Tim JPN DATUN di Kementerian BUMN tanggal 30 Desember 2019 dengan Agenda Pembahasan Penyelesaian Pembayaran BJPSDA PT PLN (Persero), PT IP, dan PT PJB kepada Perusahaan, menyatakan bahwa "PT PLN, PT IP dan PT PJB sepakat bahwa BJPSDA tetap menjadi kewajiban pembayaran kepada Perusahaan sesuai dengan Berita Acara Rapat pada angka 1 dan sepakat akan membuat perjanjian sesuai tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah dan mulai tahun 2013.

Dalam upaya untuk menyelesaikan permasalahan diatas, masing-masing pihak telah membuat Kesepahaman Bersama Para Pihak untuk Melakukan Mediasi oleh BPKP tentang Penyelesaian Tagihan Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air PLTA Djuanda, PLTA Cirata, dan PLTA Saguling antara Perusahaan dengan PT PLN (Persero) No. Pihak Pertama: MoU-1/DIR/01/2021 dan No. Pihak Kedua: 0003-1.MoU/HKM.05.01/801080000/2021 tanggal 25 Januari 2021.

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

PT PLN (Persero), PT IP, and PT PJB to the Company. In the Minutes of the Meeting in numbers 1 and 2 stated that, "PT PLN, PT IP and PT PJB agreed that BJPSDA remains a payment obligation to the Company and agreed to make an agreement according to the rates set by the Government and starting in 2013".

BPK RI's recommendations that has been outlined in the minutes of the meeting are as follow:

1. Minutes of Meeting between PT PLN (Persero) and the Company on Monday, December 9, 2019, in the Meeting Room of the President Director of PT PLN (Persero) with the agenda: Discussion on Payment of Water Resources Management Services (BJPSDA), PT PLN (Persero), PT Indonesia Power (PT IP) and PT Pembangkitan Jawa Bali (PT PJB) to the Company. In the Minutes of Meeting in item 2 letter e states that, "PT IP and PT PJB have benefited from water resources, then PT IP and PT PJB can pay BJPSDA".
2. Minutes of the Meeting between the Company and PT PLN (Persero), PT IP, PT PJB, the Ministry of SOEs, the Ministry of PWPH, and the JPN DATUN Team at the Ministry of SOEs on December 30, 2019 with the Agenda for Discussion on Settlement of BJPSDA Payment of PT PLN (Persero), PT IP, and PT PJB to the Company, stated that "PT PLN, PT IP and PT PJB agreed that BJPSDA remains a payment obligation to the Company in accordance with the Minutes of Meeting in number 1 and agreed to make an agreement according to the tariff set by the Government and start 2013.

In order to resolve the above problems, each party has made a Mutual Understanding of the Parties to Conduct Mediation held by BPKP regarding the Settlement of Bills for Water Resources Management Services for HEPP Djuanda, HEPP Cirata, and HEPP Saguling between the Company and PT PLN (Persero) No. First Party: MoU-1/DIR/01/2021 and No. Second Party: 0003-1.MoU/HKM.05.01/801080000/2021 dated January 25, 2021.

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Telah terbit Laporan Reviu atas Permasalahan Tagihan Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) Perum Jasa Tirta II dengan PT PLN (Persero) Grup No. LR-33/D405/2/2022 tanggal 29 Maret 2022, dengan pokok-pokok hasil revidi sebagai berikut:

Reviu atas Dasar Pengenaan BJPSDA

Berdasarkan hasil revidi atas dasar pengenaan diketahui bahwa:

- a. Perusahaan memiliki tugas dan wewenang untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya air serta memungut, menerima, dan menggunakan Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) yang antara lain wilayah sungai Citarum sesuai Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II.
- b. Baik periode berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 beserta peraturan pelaksanaannya dan periode berlakunya kembali Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 beserta peraturan pelaksanaannya, PT PLN (Persero) Grup sebagai pengguna sumber daya air wajib membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air (iuran eksploitasi dan pemeliharaan bangunan pengairan) terhadap penggunaan sumber daya air pada wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum yang dikelola oleh Perusahaan.
- c. Besarnya biaya jasa pengelolaan sumber daya air dihitung berdasarkan tarif sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 56/KPTS/M/2013 untuk periode 14 Februari 2013 sampai dengan 21 November 2017 dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 935/KPTS/M/2017 untuk periode 22 November 2017 sampai dengan 31 Desember 2019.
- d. Operasi dan pemeliharaan bendungan beserta waduknya untuk bendungan dan waduk Saguling dan Cirata yang dibangun oleh PT PLN (Persero) Grup merupakan tanggung jawab PT PLN (Persero) Grup.

Reviu atas Tagihan Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA)

Sesuai Surat Direktur Utama Perusahaan kepada Direktur Utama PT PLN (Persero) Nomor SD-8/DIR/UL/01/2020 tanggal 14 Januari 2020 perihal Permintaan Pembayaran Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

A Review Report has been published on the Problem of Billing for Water Resources Management Services (BJPSDA) of Perum Jasa Tirta II to PT PLN (Persero) Group No. LR-33/D405/2/2022 dated March 29, 2022, with the main points of the results of the review as follows:

Review on the Imposition of BJPSDA

Based on the results of the review on the basis of imposition, it is known that:

- a. The Company has the duty and authority to carry out water resource management and to collect, receive, and use Water Resources Management Service Fees (BJPSDA), which include the Citarum river area in accordance with Government Regulation No. 7 Year 2010 concerning Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II.
- b. Both the period of the enactment of Law No. 7 Year 2004 and its implementing regulations and the period of re-enactment of Law No. 11 Year 1974 and its implementing regulations, PT PLN (Persero) Group as a user of water resources is required to pay a water resource management service fee (exploitation and maintenance of irrigation structures fee) for the use of water resources in the Citarum River Basin (DAS) area managed by the Company.
- c. The amount of the water resources management service fee is calculated based on the tariff in accordance with the Decree of the Minister of Public Works No. 56/KPTS/M/2013 for the period of February 14, 2013 until November 21, 2017 and Decree of the Minister of Public Works No. 935/KPTS/M/2017 for the period of November 22, 2017 to December 31, 2019.
- d. The operation and maintenance of dams and their reservoirs for the Saguling and Cirata dams and reservoirs built by PT PLN (Persero) Group is the responsibility of PT PLN (Persero) Group.

Review of Bill of Water Resources Management Services (BJPSDA)

According to the Letter of the President Director of the Company to the President Director of PT PLN (Persero) Number SD-8/DIR/UL/01/2020 dated January 14, 2020 regarding Requests for Payment of Water

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

(BJPSDA) PT PLN (Persero) Grup, besarnya kewajiban pembayaran BJPSDA PT PLN (Persero) Grup untuk penggunaan sumber daya air sejak 14 Februari 2013 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.100.685.210.314,90. Terhadap tagihan BJPSDA di atas, PT PLN (Persero) Grup telah melakukan pembayaran tagihan BJPSDA untuk PLTA Ir. H. Djuanda periode Juli 2019 sampai dengan Desember 2019 sebesar Rp19.217.584.608,00 pada tanggal 8 April 2021 sehingga saldo tagihan menjadi sebesar Rp1.081.467.625.706,90. Berdasarkan data operasional realisasi produksi listrik periode 14 Februari 2013 sampai dengan 31 Desember 2019 untuk PLTA Saguling dan PLTA Cirata yang disampaikan oleh PT PLN (Persero) Grup dan data penjualan listrik Perusahaan dari PLTA Ir. H. Djuanda kepada PT PLN (Persero) Grup periode 14 Februari 2013 sampai dengan 21 November 2017 serta memperhitungkan pelunasan, tagihan BJPSDA adalah sebesar Rp1.047.616.792.595.

Reviu atas Kebutuhan Pengelolaan Sumber Daya Air di Wilayah Sungai Citarum

Berdasarkan hasil reviu terhadap kebutuhan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai Citarum dijumpai bahwa:

- Perusahaan belum melakukan penyusunan Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP) wilayah sungai Citarum secara berkala.
- Penyusunan Rencana Kerja Operasi dan Pemeliharaan (RKOP) Perusahaan hanya mendasarkan pada kegiatan operasional dan pemeliharaan yang mampu dibiayai dengan BJPSDA yang mungkin tertagih.
- Masih terdapat kekurangan pembiayaan operasi dan pembiayaan tahunan sebesar Rp301.330.814.607 antara penerimaan BJPSDA dengan Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP) Perusahaan. Kekurangan tersebut menyebabkan Perusahaan belum dapat melakukan tugas pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai Citarum sesuai dengan Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP) Perusahaan.

Hal Lainnya Perlu Diperhatikan

- Realisasi komponen BJPSDA untuk penjualan listrik PLTA Ir. H. Djuanda ke pelanggan Non-PLN dan pemakaian sendiri belum diadministrasikan secara baik.

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Resources Management Services Fees (BJPSDA) of PT PLN (Persero) Group, the amount PT PLN (Persero) Group's BJPSDA payment obligation for the use of water resources since February 14, 2013 until December 31, 2019 amounted to Rp1,100,685,210,314.90. Regarding the BJPSDA bill above, PT PLN (Persero) Group has paid the BJPSDA bill for HEPP Ir. H. Djuanda period July 2019 until December 2019 amounted to Rp19,217,584,608.00 on April 8, 2021, so that the balance of the bill was Rp1,081,467,625,706.90. Based on the operational data of the realization of electricity production for the period of February 14, 2013 until December 31, 2019 for HEPP Saguling and HEPP Cirata submitted by PT PLN (Persero) Group and the Company's electricity sales data from HEPP Ir. H. Djuanda to PT PLN (Persero) Group for the period February 14, 2013 to November 21, 2017 and taking into account the settlement, the bill for BJPSDA amounted to Rp1,047,616,792,595.

Review of Water Resources Management Needs in Citarum River Basin

Based on the results of a review of the management needs of water resources in the Citarum river area, it was found that:

- The Company has not carried out the preparation of the Real Operation and Maintenance Needs Figure (AKNOP) for the Citarum river area on a regular basis.*
- The preparation of the Operation and Maintenance Work Plan (RKOP) of the Company is only based on operational and maintenance activities that can be financed with BJPSDA which may be collected.*
- There is still a shortage of operational financing and annual financing of Rp301,330,814,607 between BJPSDA receipts and the Company's Real Operation and Maintenance Needs Figures (AKNOP). This deficiency causes the Company to not be able to carry out the task of managing water resources in the Citarum river area in accordance with the Real Operation and Maintenance Needs Figure (AKNOP) of the Company.*

Other Matters for Attention

- Realization of BJPSDA components for electricity sales of HEPP Ir. H. Djuanda to non-PLN customers and their own use has not been properly administered.*

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

- b. Pengajuan Surat Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (SIPSDA) untuk PLTA Saguling belum mendapat persetujuan dari Kementerian PUPR.

Saran

Dalam rangka penyelesaian permasalahan tagihan Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) Perusahaan kepada PT PLN (Persero) Grup, BPKP menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

- PT PLN (Persero) Grup dan Perusahaan membuat kesepakatan baru untuk menyelesaikan tagihan BJPSDA tersebut dengan mempertimbangkan kesesuaian kebutuhan pelaksanaan Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP) Perusahaan wilayah sungai Citarum.
- Perusahaan agar menyusun dan melaksanakan Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP) wilayah sungai Citarum serta melaporkan rencana dan realisasi penerimaan Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) serta penggunaannya untuk operasi dan pemeliharaan wilayah sungai Citarum secara berkala kepada Kementerian PUPR.
- Perusahaan agar melakukan pemisahan pencatatan BJPSDA dari pendapatan listrik untuk penjualan kepada Non-PLN maupun pemakaian sendiri energi listrik dari PLTA Ir. H. Djuanda.
- PT PLN (Persero) meningkatkan koordinasi dengan Kementerian PUPR untuk mempercepat pengurusan Surat Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (SIPSDA) untuk PLTA Saguling.

Pembahasan Penyelesaian Tagihan Perum Jasa Tirta II atas BJPSDA PLTA Djuanda, PLTA Cirata dan PLTA Saguling telah dilakukan berdasarkan Notulen Rapat tanggal 9 Januari 2023 dan Perusahaan telah menindaklanjuti penyelesaian permasalahan tagihan tersebut dengan menandatangani Perjanjian Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air PLTA Cirata dengan PT PLN Nusantara Power dan Perjanjian Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air PLTA Saguling dengan PT Indonesia Power (Catatan 43).

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- b. The application for a Water Resources Concession Permit (SIPSDA) for the HEPP Saguling has not yet received approval from the Ministry of PUPH.

Suggestions

In order to resolve the problem of the bill for the Water Resources Management Service Fee (BJPSDA) of the Company to PT PLN (Persero) Group, BPKP conveys several suggestions as follows:

- PT PLN (Persero) Group and the Company made a new agreement to settle the BJPSDA bill by considering the suitability of the implementation of the Company Real Operation and Maintenance Needs Figure (AKNOP) for the Citarum river area.
- The Company to compile and implement the Real Operation and Maintenance Requirement Figure (AKNOP) for the Citarum river area and report the plan and realization of the receipt of the Water Resources Management Service Fee (BJPSDA) and its use for the operation and maintenance of the Citarum river area on a regular basis to the Ministry of PUPH.
- The Company to separate the recording of BJPSDA from electricity revenue for sales to Non-PLN and own use of electrical energy from HEPP Ir. H. Djuanda.
- PT PLN (Persero) is increasing coordination with the Ministry of PUPH to speed up the processing of a Water Resources Concession Permit (SIPSDA) for the HEPP Saguling.

Discussion of Invoice Settlement of Perum Jasa Tirta II upon BJPSDA HEPP Djuanda, HEPP Cirata and HEPP Saguling has been done in accordance with Minutes of Meeting dated January 9, 2023 and the Company has followed up on the resolution of the stated billing problem by signing the Agreement of Water Resources Management Service of HEPP Cirata with PT PLN Nusantara Power and Agreement of Water Resources Management Service of HEPP Saguling with PT Indonesia Power (Note 43).

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

iii. Piutang Karyawan (Asuransi Jiwasraya)

Pada tahun 2009, Perusahaan melakukan kerja sama dengan Asuransi Jiwasraya untuk program *Past Service Liabilities* bagi Karyawan Perusahaan. Program ini merupakan pembayaran Premi Awal Asuransi Jiwasraya atas Pegawai Perusahaan yang diakui sebagai beban pada tahun 2009.

Berdasarkan hasil rapat pembahasan teknis dengan Kementerian BUMN tentang Laporan Audit Independen Perusahaan tahun 2009 tanggal 21 Mei 2010 "bahwa, beban pegawai untuk asuransi jiwasraya tidak boleh menjadi beban Perusahaan, melainkan beban masing-masing karyawan, sehingga perlu diadakan koreksi dan penyesuaian atas kelebihan beban tersebut". Direksi Perusahaan mengeluarkan Surat Keputusan Direksi No. 1/606/KPT.S/2009 tanggal 31 Desember 2009, tentang pengalihan beban *Past Service Liabilities* Asuransi Jiwasraya dari Perusahaan kepada Pegawai yang menjadi peserta Asuransi Jiwasraya.

Melalui surat Direksi Perusahaan No. 1/149/2010 tanggal 25 Mei 2010, tentang hasil pembahasan teknis dengan kementerian BUMN atas Laporan Keuangan tahun buku 2009, agar dilakukan penyesuaian atas Laporan Keuangan *Unaudited* tahun buku 2009 yang berakibat penurunan beban pegawai sebesar Rp4.608.301.256 yang berasal dari penurunan beban Asuransi Jiwasraya Rp11.644.694.314 dan kenaikan beban insentif sebesar Rp7.036.393.058 sehingga diperoleh kenaikan Laba bersih sebesar Rp3.317.976.976 dan penurunan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp3.317.976.976.

Pada awal tahun 2010, berdasarkan koreksi tersebut, maka timbul piutang karyawan (Asuransi Jiwasraya) sebesar Rp6.333.195.276. Selama tahun 2010, terjadi pembayaran atas piutang pegawai tersebut, sehingga saldo piutang karyawan Asuransi Jiwasraya sebesar Rp5.551.297.894, yang terdiri dari piutang pegawai yang masih aktif sebesar Rp3.307.010.964, dan piutang pegawai yang telah pensiun dan meninggal dunia sebesar Rp2.244.286.930.

Berdasarkan hal di atas, manajemen berkeyakinan bahwa piutang karyawan yang telah pensiun dan meninggal dunia tidak dapat ditagih, maka Direksi Perusahaan mengeluarkan Surat Keputusan Direksi No. 1/569/SKPT.S/2010 tanggal 30 Desember

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

iii. Employee Receivables (Jiwasraya Insurance)

In 2009, the Company held cooperation with Jiwasraya Insurance for Past Service Liabilities program for employees of the Company. The program was an Initial Premium Payment of Jiwasraya Insurance of Employees that recognized as expenses in 2009.

Based on technical discussion meeting result with Ministry of SOE about Independent Audit Report of the Company in 2009 dated May, 21 2010, that "personnel expenses for Jiwasraya Insurance should not be Company's expenses, but the expenses of each employee, so there should be a correction and adjustment of excess from those expenses". Board of Directors of the Company issued the Directors Decree No. 1/606/KPT.S/2009 dated December 31, 2009, about the transfer of Past Service Liabilities expenses of Jiwasraya Insurance from Company to Employees who participated in Jiwasraya Insurance.

Through Letter of Directors of the Company No. 1/149/2010 dated May, 25 2010, about technical discussion result with Ministry of SOE of Financial Statements for the year 2009 that held adjustment for Financial Statements (Unaudited) of 2009 which affected the decreasing of employees expenses as amount Rp4,608,310,256 from decrease of Jiwasraya Insurance for Rp11,644,694,314 and increase of incentives expenses for Rp7,036,393,058 so obtained the increasing of net income for Rp3,317,976,976 and decreasing of Short-Term Liabilities for Rp3,317,976,976.

At beginning of 2010, based on correction, then procured employees receivables (Jiwasraya Insurance) for Rp6,333,195,276. During 2010, occurred payments of those receivables, so the employees receivables of Jiwasraya Insurance for Rp5,551,297,894 which consists of active employees receivable for Rp3,307,010,964 and pension and passed away employees receivables for Rp2,244,286,930.

Based on above, management believes that pension and passed away employees receivables can not be collected, so Directors of the Company issued the Letter of Decree of Directors No. 1/569/SKPT.S/2010 dated December, 30 2010, about the Allowance for

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

2010 tentang Penetapan Cadangan Piutang Pegawai Perusahaan, yang isinya menetapkan cadangan piutang pegawai Perusahaan sebesar Rp2.244.286.930 menjadi beban Perusahaan.

iv. Titipan Pemerintah Daerah Jawa Barat

Pada 8 September 2003, Gubernur Provinsi Jawa Barat mengirimkan Surat Resmi No. 970/2463/Sarek kepada Direksi Perusahaan perihal Kontribusi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat terkait penyesuaian tarif kontribusi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp5/m³ untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Rp10/m³ untuk industri atas kenaikan tarif luran Pembiayaan Eksploitasi dan Pemeliharaan (IPEP) Prasarana Pengairan sebesar Rp45/m³ untuk PDAM dan Rp50/m³ untuk industri guna menunjang pembangunan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum. Dewan Pengawas setuju untuk memberikan kontribusi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Surat Dewan Pengawas No. S-17/Dewas/2003 tanggal 10 Oktober 2003. Pada 22 Juni 2004, Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia memberikan persetujuannya melalui surat No. Am01.09-Mn/314.

Namun, berdasarkan Risalah Rapat mengenai Pembahasan atas Rencana Pengenaan Biaya Konservasi Wilayah Sungai Bagian Hulu dari BJPSDA di Wilayah Kerja PJT II untuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat tanggal 27 Juli 2011 disebutkan bahwa kesepakatan tersebut sudah tidak ada payung hukumnya lagi. Melalui Surat No. 1/293/2011 tanggal 26 September 2011, Direksi Perusahaan meminta arahan dan persetujuan Menteri Pekerjaan Umum atas tindak lanjut hasil pembahasan tersebut.

Berdasarkan Surat Direksi tersebut, Perusahaan tidak akan lagi melakukan pembayaran kontribusi untuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai tahun 2011 dalam bentuk dana IPEP. Oleh karena itu, saldo dana IPEP yang tersisa akan dipergunakan untuk kegiatan konservasi DAS Citarum.

Berdasarkan Kontrak No. SP.SPU.JKons-03/OPSDAL.DOP/06/2022 tanggal 3 Juni 2022, Perusahaan telah melakukan Pekerjaan Perencanaan *Detail Engineering Design* (DED) Kampung Konservasi di Sub DAS Cirasea pada DAS Citarum dengan PT Trineka Sarana

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Doubtful Account of the Personnel Receivable of the Company, whose contents about the allowance of personnel receivables of the Company for Rp2,244,286,930 became the Company's expenses.

iv. Local Government of West Java Deposits

On September 8, 2003, the Governor of West Java Province sent Official Letter No. 970/2463/Sarek to the Company's Directors regarding Contribution to Regional Original Revenue (PAD) of West Java Province regarding the adjustment of contribution rates to the West Java Provincial Government of Rp5/cbm for Regional Drinking Water Companies (PDAM) and Rp10/cbm for industry for tariff increases Exploitation and maintenance fee (IPEP) for Irrigation Infrastructure is Rp45/cbm for PDAM and Rp50/cbm for industry to support the development of the Citarum River Basin (DAS). The Supervisory Board agreed to contribute to the West Java Provincial Government through the Supervisory Board Letter No. S-17/Dewas/2003 dated October 10, 2003. On June 22, 2004, the Minister of Settlement and Regional Infrastructure of the Republic of Indonesia gave his approval through letter No. Am01.09-Mn/314.

However, based on the Minutes of Meeting regarding the Discussion of Plans to Imposition Costs for Upstream River Basin Conservation from the BJPSDA in the PJT II Working Area for the Provincial Government of West Java dated July 27, 2011, it was stated that the agreement no longer had a legal protection. Through Letter No. 1/293/2011 dated September 26, 2011, the Company's Directors requested direction and approval from the Minister of Public Works for the follow-up of the discussion results.

Based on the stated Directors' Letter, the Company will no longer make contribution payments to the West Java Provincial Government starting in 2011 in the form of IPEP funds. Therefore, the remaining IPEP fund balance will be used for Citarum watershed conservation activities.

Based on Contract No. SP.SPU.JKons-03/OPSDAL.DOP/06/2022 dated June 3, 2022, the Company has carried out Detailed Engineering Design (DED) Planning Work for the Conservation Village in the Cirasea Sub-watershed in the Citarum Watershed with

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Mandiri dengan nilai pekerjaan sebesar
Rp630.091.500.

Berdasarkan Kontrak No. SP.SPU.JKons-
01/OPSDAL.DOP/05/2022 tanggal 20 Mei
2022, Perusahaan telah melakukan Pekerjaan
Pengawasan Pekerjaan Konservasi Sumber
Daya Air di Sub DAS Cirasea pada DAS
Citarum dengan PT Marga Sarana Bhumi
dengan nilai pekerjaan sebesar
Rp177.267.000.

Berdasarkan Kontrak No. SP.SPU.JK-
01/OPSDAL.DOP/05/2022 tanggal 20 Mei
2022, Perusahaan telah melakukan Pekerjaan
Konservasi Sumber Daya Air di Sub DAS
Cirasea pada DAS Citarum dengan CV
Wirahma Putra Mandiri dengan nilai pekerjaan
sebesar Rp2.692.057.470. Progress pekerjaan
ini telah mencapai 100%, namun masa
pemeliharaannya belum berakhir. Sehingga
sampai 31 Desember 2022, Perusahaan telah
melakukan pembayaran sebesar
Rp2.557.454.596. Perusahaan membayar
utang retensi sebesar Rp134.602.874 pada 31
Januari 2023.

Berdasarkan Surat No. 1802/KU.03.04.01/BM
tanggal 24 Februari 2023, Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat Dinas Sumber Daya Air
mengonfirmasi sisa dana IPEP sebesar
Rp6.246.237.782.

Entitas Anak

Berdasarkan Akta Perjanjian Kemitraan atau
Kerjasama Operasional No. 7 tanggal 2 September
2022 Notaris dari Putranto Nur Utomo, S.H., M.Kn,
Notaris di Bogor, Entitas Anak sepakat untuk
membentuk Kerjasama Operasi dengan PT Air
Sumber Kemakmuran dengan nama Jasa Tirta
Luhur JO Air Kemakmuran. Keikutsertaan modal
(sharing) dalam Kerjasama Operasi adalah 60%
untuk Perusahaan dan 40% untuk PT Air
Sumber Kemakmuran, dimana masing-masing
peserta akan mengambil bagian sesuai sharing
dalam hal pengeluaran, keuntungan dan kerugian
dari Kerjasama Operasi.

**Kerjasama Operasi PT Jasa Tirta Luhur JO
PT Air Sumber Kemakmuran**

Berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor: MOS-
0100/SPK-JTL/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022,
PT Jasa Tirta Luhur JO PT Air Sumber
Kemakmuran mengadakan Kerjasama dengan
PT Multi Optimal Sentosa untuk melakukan
pekerjaan Pembuatan Tower Menara Air 300 x 2
m³ di Kawasan Industri Jatiluhur *Industrial Smart*

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

PT Trineka Sarana Mandiri with a work value
amounting to Rp630,091,500.

Based on Contract No. SP.SPU.JKons-
01/OPSDAL.DOP/05/2022 dated May 20,
2022, the Company has carried out the Work of
Supervision of Water Resources Conservation
Work in the Cirasea Sub-watershed in the
Citarum Watershed with PT Marga Sarana
Bhumi with a work value amounting to
Rp177,267,000.

Based on Contract No. SP.SPU.JK-
01/OPSDAL.DOP/05/2022 dated May 20,
2022, the Company has carried out Water
Resources Conservation Work in the Cirasea
Sub-watershed in the Citarum Watershed with
CV Wirahma Putra Mandiri with a work value
amounting to Rp2,692,057,470. The progress
of this work has reached 100%, but the
maintenance period has not ended. Thus until
December 31, 2022, the Company has made
payment amounting to Rp2,557,454,596. The
company paid a retention payable of
Rp134,602,874 on January 31, 2023.

Based on Letter No. 1802/KU.03.04.01/BM
dated February 24, 2023, the Regional
Government of West Java Province, the Water
Resources Service, confirmed that the
remaining IPEP funds amounted to
Rp6,246,237,782.

The Subsidiary

Based on the Deed of Partnership Agreement or
Joint Operation No. 7 dated September 2, 2022
from Putranto Nur Utomo, S.H., M.Kn, a Notary in
Bogor, the Subsidiary agreed to form a Joint
Operation with PT Air Sumber Kemakmuran under
the name of Jasa Tirta Luhur JO Air Sumber
Kemakmuran. Capital participation (sharing)
percentage in this Joint Operation is 60% for the
Company and 40% for PT Air Sumber
Kemakmuran, where each participant will take part
according to the sharing percentage in terms of
expenses, profits and losses from the Joint
Operation.

**Joint Operation PT Jasa Tirta Luhur JO PT Air
Sumber Kemakmuran**

Based on Work Order Number: MOS-0100/SPK-
JTL/VIII/2022 dated August 23, 2022, PT Jasa Tirta
Luhur JO PT Air Sumber Kemakmuran has an
Agreement with PT Multi Optimal Sentosa to do the
construction of 300 x 2 cbm Water Tower in
Jatiluhur Industrial Smart City (JISC) with a contract
value of Rp4,273,500,000 and period of completion

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

City (JISC) dengan nilai kontrak Rp4.273.500.000 dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan sampai dengan 14 Februari 2023. Sampai dengan tanggal pelaporan keuangan 31 Desember 2022, penyelesaian kontrak adalah 16,89%.

Berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor: 159/BI/TECH-PP/IX/2022 tanggal 19 September 2022, PT Jasa Tirta Luhur JO PT Air Sumber Kemakmuran mengadakan Kerjasama dengan PT Belaputera Intiland untuk melakukan pekerjaan Sistem Pengolahan Air Minum Kapasitas 100L/Detik Kota Baru Parahyangan dengan nilai kontrak Rp20.669.310.000 dan jangka waktu penyelesaian pekerjaan sampai dengan 28 Februari 2023. Sampai dengan tanggal pelaporan keuangan 31 Desember 2022 penyelesaian kontrak masing-masing adalah 11,18%.

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

by February 14, 2023. Until the financial reporting date of December 31, 2022, the completion of contracts is 16.89%.

Based on Work Order Number: 159/BI/TECH-PP/IX/2022 dated September 19, 2022, PT Jasa Tirta Luhur JO PT Air Sumber Kemakmuran has an agreement with PT Belaputera Intiland for the work of the 100L/Second Drinking Water Treatment System of Kota Baru Parahyangan with a contract value of Rp20,669,310,000 and period of completion until February 28, 2023. Until the financial reporting date of December 31, 2022 the completion of contracts is 11.18%.

39. Perkara-Perkara Litigasi

39. Litigation Cases

- a. Gugatan Perdata No. 51/Pdt.G/2019/PN.Ckr
Objek sengketa adanya pihak lain yang mengakui dan menguasai lahan milik Perusahaan yang terletak di Blok Rawa Belut Kampung Tangsi Patikoro RT 003 RW 06 Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Bekasi, seluas ± 77.500 m².

Berdasarkan Risalah Pemberitahuan Pernyataan Kasasi No: 51/Pdt.G/2019/PN.Ckr. Jo No: 201/Pdt/2020/PT.Bdg Jo No: 13/Akta.Kasasi/2020 tanggal 14 Agustus 2020, Perusahaan sebagai Pemohon Kasasi II semula Terbanding II/ Tergugat II.

Sampai dengan tanggal pelaporan 31 Desember 2022, masih menunggu keputusan dari Mahkamah Agung.

- b. Gugatan Perdata No. 103/Pdt.G/2019/PN.Ckr
Objek sengketa adanya pihak lain yang mengakui dan menguasai lahan milik Perusahaan yang terletak di Desa Cibuntu, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi – Provinsi Jawa Barat seluas 9.885 m².

Perusahaan dinyatakan kalah dalam pokok perkara pada tanggal 7 Juli 2020 dalam putusannya No: 252/PDT/2020/PT BDG dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding, semula Tergugat I.

- a. Civil Lawsuit No. 51/Pdt.G/2019/PN.Ckr
The object of dispute about other party claimed and controlled over a land owned by the Company which located on Rawa Belut Block Tangsi Patikoro Village RT 003 RW 06 Sukadanau Village, West Cikarang District, Bekasi, with an area of ± 77,500 sqm.

Based on the Notice of Cassation Statement No: 51/Pdt.G/2019/PN.Ckr. Jo No: 201/Pdt/2020/PT.Bdg Jo No: 13/Akta.Kasasi/2020 dated August 14, 2020, the Company is mentioned as Cassation Petitioner II, formerly Defendant II

Until the reporting date December 31, 2022, a decision from Supreme Court is yet to be made.

- b. Civil Lawsuit No. 103/Pdt.G.2019/PN.Ckr
The object of dispute about other party claimed and controlled over a land owned by the Company which located on Cibuntu Village, Cibitung District, Bekasi Regency, West Java Province with an area of 9,855 sqm.

The Company was declared defeated on the subject matter on July 7, 2020 in verdict No: 252/PDT/2020/PT BDG with the following order:

- Received an appeal for Apellant, formerly Defendant I.

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang, No. 103/Pdt.G/ 2019/PN Ckr, tanggal 16 Januari 2020, yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum Pembanding, semula Tergugat I, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000.

Perusahaan sudah mengajukan proses kasasi ke Mahkamah Agung sesuai Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Kasasi tgl 28 September 2020 dan sampai dengan tanggal pelaporan keuangan, masih menunggu Putusan dari Mahkamah Agung.

- c. Gugatan Perdata No. 371/Pdt.G/2019/PN.Bks
Objek sengketa adanya pihak lain yang mengakui dan menguasai lahan milik Perusahaan yang terletak di Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, seluas 418 m².

Perusahaan mengajukan Permohonan Banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 7 Januari 2021 sebagaimana terbukti dari Surat Pernyataan Banding No. 371/Pdt.G/2019/PN.Bks. Jo. No. 1/Bdg/2021/PN.Bks.

Berdasarkan Surat Tanda Terima Memori Kasasi No. 371/Pdt.G/2019/PN. Bks Jo No. 522/Pdt/2021/PT.Bdg Jo No. 53/Akta.K/2021/PN.Bks, Perusahaan sebagai Pemohon Kasasi telah menyerahkan Memori Kasasi kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi.

Berdasarkan Risalah Pemberitahuan Mahkamah Agung RI No: 2900K/Pdt/2022 Jo No: 371/Pdt.G/2019/PN. Bks Jo No. 53/Akta.K/2021/PN.Bks tanggal 24 November 2022, Pengadilan Negeri Purwakarta memutuskan untuk menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi "Perum Jasa Tirta II.

Sampai dengan tanggal pelaporan keuangan, sedang dipertimbangkan untuk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara untuk membatalkan sertifikat yang dikuasai oleh Tergugat dengan melibatkan Jaksa Pengacara Negara (JPN).

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- Confirmed the Decision of the Cikarang District Court, No. 103/Pdt.G/2019/PN Ckr, dated January 16, 2020, for which the appeal was requested.
- Fined the prior Appellant, formerly Defendant I, to pay court fees at both levels of court, which in the appeal level is set at Rp150,000.

The Company has filed an appeal process to the Supreme Court in accordance with the Minutes of Notification and Submission of The Memory of The Cassation dated September 28, 2020 and until financial reporting date, the verdict from the Supreme Court is yet to be made.

- c. Civil Lawsuit No. 371/Pdt.G/2019/PN.Bks
The object of dispute about other party claimed and controlled land owned by the Company which located on Margajaya Village, South Bekasi District, Bekasi City, with an area of 418 sqm.

The Company filed a request for appeal to Bekasi District Court Clerk's Office on January 7, 2021, as evidenced by the statement of appeal No. 371/Pdt.G/2019/PN.Bks. Jo. No. 1/Bdg/2021/PN.Bks.

Based on Cassation Memory Receipt No. 371/Pdt.G/2019/PN. Bks Jo No. 522/Pdt/2021/PT.Bdg Jo No. 53/Akta.K/2021/PN.Bks, the Company as a Cassation Petitioner has submitted a memorandum of cassation to Bekasi District Court Clerk.

Based on the Minutes of Notification of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No: 2900K/Pdt/2022 Jo No: 371/Pdt.G/2019/PN. Bks Jo No. 53/Deed. K/2021/PN.Bks dated November 24, 2022, Purwakarta District Court decided to reject the request for appeal by "Perum Jasa Tirta II.

Until financial reporting date, considerations are made pertained to filing a State Administrative Suit to invalidate a certificate controlled by the Defendant involving the State Attorney (JPN).

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

- d. Gugatan Perdata No. 161/Pdt.G/2021/PN.Cikarang
Objek sengketa adanya pihak lain yang mengakui dan menguasai lahan yang dahulu milik Perum Jasa Tirta II, namun telah diserahkan kepada PT Adi Karya melalui Kementerian PUPR, yang terletak di Desa Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, seluas 9.120 m².

Putusan Pengadilan Negeri Cikarang No. 161/PDT.G/2021/PN.CKR tertanggal 21 Desember 2021 mengadili dalam gugatan masal dalam konvensi, dalam Eksepsi menolak eksepsi para tergugat untuk seluruhnya dalam pokok perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat untuk Sebagian.
2. Menyatakan Surat Pernyataan Waris tanggal 16 Januari 2021 yang telah diketahui oleh pejabat terkait adalah sah secara hukum bagi para penggugat sebagai pewaris atau keturunan dari Tju To Sih alias Gepeng.
3. Menyatakan ahli waris yang sah dari Alm. Tju To Sih alias Gepeng dan Alm. Ci Orok adalah para penggugat selaku cucu kandung berdasarkan surat pernyataan waris tertanggal 16 Januari 2021.
4. Menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Sampai dengan tanggal pelaporan, Perusahaan sedang dalam tahap mengajukan upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Bandung melalui Pengadilan Negeri Cikarang.

- e. Gugatan Perdata No. 74/Pdt.G/2021/PN.BKS
Objek sengketa adanya pihak lain yang mengakui dan menguasai lahan milik Perusahaan yang terletak di Sepanjang Jalan Irigasi RT02/RW17, Kampung Poncol Bulak, Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi, seluas 741 m².

Perusahaan mengajukan Permohonan Kontra Memori Kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 28 Desember 2021 dan Risalah Pernyataan Kasasi dari Pemohon Kasasi tanggal 28 Desember 2021.

Sampai dengan tanggal pelaporan, memori Kasasi yang diajukan oleh Perusahaan masih dalam proses Pemeriksaan di Mahkamah Agung.

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- d. Civil Lawsuit No. 161/Pdt.G/2021/PN.Cikarang

The object of dispute about other party claimed and controlled over a land once owned by the Perum Jasa Tirta II, but has been handed to PT Adi Karya through the Ministry of PUPH, located in Jatimulya Village, South Tambun District, Bekasi Regency, with an area of 9,120 sqm.

Cikarang District Court Decision No. 161/PDT.G/2021/PN.CKR dated December 21, 2021, adjudicates in a mass suit in the convention, in the Exchequer rejects the defendants' exoneration in its entirety in the subject matter of the case:

1. *Accepting and granting the plaintiffs' claims in Part of.*
2. *Declare that the Statement of Inheritance dated January 16, 2021, that has been known by the relevant officials is legally valid for the plaintiffs as heirs or descendants of Tju To Sih as known as Gepeng.*
3. *Declaring the legal heirs of Alm. Tju To Sih as known as Gepeng and Alm. Ci Orok is the plaintiff as the biological grandson based on the affidavit of inheritance dated January 16, 2021.*
4. *Declaring the defendants to have committed unlawful acts.*

Until the reporting date, the Company is in the stage of filing an appeal to Bandung High Court through Cikarang District Court.

- e. Civil Lawsuit No. 74/Pdt.G/2021/PN.BKS
The object of dispute about other party claimed and controlled over a land owned by the Company which located along the RT02/RW 17 Irrigation Road, Poncol Bulak Village, Jakasetia Village, Bekasi District, with an area of 741 sqm.

The Company filed a Counter Memory Cassation Application at the Registrar of the Bekasi District Court on December 28, 2021 and the Minutes of Cassation Statement from the Cassation Applicant dated December 28, 2021.

As of the reporting date, the memory of the Cassation filed by the Company is still under examination in the Supreme Court.

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- f. Gugatan Perdata No. 603/Pdt.Bth/2022/PN.BKS
Objek sengketa adanya pihak lain yang mengakui dan menguasai lahan milik Perusahaan yang terletak di di Kampung Tapak Serang, Desa Lenggahjaya, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, seluas 42.480 m².

Sampai dengan tanggal pelaporan 31 Desember 2022, masih dalam tahap persidangan dengan agenda pemanggilan para pihak pada tanggal 24 Januari 2023.

- f. Civil Lawsuit No. 603/Pdt.Bth/2022/PN.BKS

The object of dispute about other party claimed and controlled over a land owned by the Company which located in Kampung Tapak Serang, Lenggahjaya Village, Cabangbungin District, Bekasi Regency, with an area of 42.480 sqm.

Until the reporting date of December 31, 2022, it is still in the trial stage with the agenda of summoning the parties on January 24, 2023.

40. Manajemen Risiko Bisnis dan Keuangan dan Instrumen Keuangan

40. Business and Financial Risk Management and Financial Instruments

a. Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan

Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Grup untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang memadai tersedia untuk operasi dan pengembangan bisnis, serta untuk mengelola risiko mata uang asing, tingkat suku bunga, kredit dan risiko likuiditas. Perusahaan beroperasi dengan pedoman yang telah ditentukan oleh Dewan Direksi.

Risiko kerugian yang terkait dengan potensi penyimpangan hasil dari transaksi dan instrumen keuangan (suku bunga, nilai tukar, komoditas dan ekuitas) maupun dari pengelolaan keuangan perusahaan (likuiditas, akuntansi, kredit dan pinjaman serta permodalan, piutang dan pajak) yang disebabkan oleh faktor internal maupun oleh faktor eksternal perusahaan.

Bisnis Grup mencakup aktivitas pengambilan risiko dengan sasaran tertentu dengan pengelolaan yang profesional. Fungsi utama dari manajemen risiko Grup adalah untuk mengidentifikasi seluruh risiko kunci, mengukur risiko-risiko ini dan mengelola posisi risiko.

Tujuan Grup dalam mengelola risiko keuangan adalah untuk mencapai keseimbangan yang sesuai antara risiko dan tingkat pengembalian dan meminimalisasi potensi efek memburuknya kinerja keuangan Grup.

"Pengelolaan Risiko Usaha" khususnya dalam rangka untuk mengelola risiko keuangan secara efektif, Direksi Grup telah melaksanakan beberapa strategi untuk pengelolaan risiko keuangan, yang sejalan dengan tujuan Grup, antara lain:

a. Objectives and Financial Risk Management Policy

Objectives and policies of the Group's financial risk management to ensure that adequate financial resources available for operations and business development, and to manage foreign currency risk, interest rate, credit and liquidity risk. The Company operates with the guidelines set by Board of Directors.

The risk of loss related to potential deviations result from transactions and financial instruments (interest rates, exchange rates, commodity and equity) as well as of financial management (liquidity, accounting, credit and loans and equities, debt and taxes) are caused by internal factors and by external factors.

The Group business includes risk-taking activities with specific target with professional management. The main function of corporate risk management is to identify all key risks, quantify these risks and manage risk positions.

The Group's goal is to manage the financial risks to achieve an appropriate balance between risk and return and minimize the potential effects of the deteriorating the Group's financial performance.

"Business Risk Management" especially in order to effectively manage financial risks, Directors of the Group has implemented several strategies for managing financial risk, which is in line with the Group's objectives, among others:

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- Meminimalkan tingkat suku bunga, mata uang dan risiko pasar untuk semua jenis transaksi.
- Perusahaan dapat berinvestasi dalam saham atau instrumen serupa hanya dalam hal terjadi kelebihan likuiditas yang bersifat sementara, dan transaksi tersebut harus disahkan oleh Dewan Pengawas.

Dalam menjalankan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, Grup menghadapi risiko keuangan, yaitu risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko pasar dan mendefinisikan risiko-risiko sebagai berikut:

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko kerugian keuangan yang timbul jika pelanggan gagal memenuhi kewajiban kontraktual kepada Grup.

Nilai tercatat dari aset keuangan mencerminkan nilai eksposur kredit maksimum. Nilai eksposur kredit maksimum pada tanggal laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

- Minimize the interest rate, currency and market risks for all types of transactions.
- The Company may invest in shares or similar instruments only in the event of excess liquidity is temporary, and the transaction must be approved by the Board of Supervisory.

In running the operating, investing, and financing, the Group faced financial risks, namely credit risk, liquidity risk and market risk and define the risks as follows:

Credit Risk

Credit risk is the risk of financial losses incurred if the customer fails to meet the contractual obligations to the Group.

The carrying amount of the financial asset reflects the value of the maximum credit exposure. The maximum credit exposure value on the statements of financial position are as follows:

31 Desember 2022	Kurang dari 3 Bulan/ Less than 3 Month	Lebih dari 3 Bulan/ More than 3 Month	Jumlah Aset Keuangan/ Total Financial Assets	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ Allowance for Impairment Losses	Jumlah Aset Keuangan Bersih/ Net Total Financial Assets	December 31, 2022
Aset Keuangan						Financial Assets
Kas dan Setara Kas	567,815,077,826	--	567,815,077,826	--	567,815,077,826	Cash and Cash Equivalents
Piutang Usaha	53,874,012,711	113,170,980,905	167,044,993,616	(69,639,076,396)	97,405,917,220	Accounts Receivable
Piutang Retensi	1,544,313,386	--	1,544,313,386	--	1,544,313,386	Retention Receivables
Pendapatan yang Masih Akan Diterima	252,947,732,145	--	252,947,732,145	(15,916,553,889)	237,031,178,256	Accrued Revenue
Tagihan Bruto kepada Pemberi Kerja	7,707,817,958	--	7,707,817,958	--	7,707,817,958	Gross Amount Due from Customers
Aset Keuangan Lancar Lainnya	2,946,663,778	--	2,946,663,778	(2,245,384,059)	701,279,719	Other Current Financial Assets
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	67,275,000	--	67,275,000	--	67,275,000	Other Non-Current Financial Assets
Jumlah	886,902,892,804	113,170,980,905	1,000,073,873,709	(87,801,014,344)	912,272,859,365	Total

31 Desember 2021	Kurang dari 3 Bulan/ Less than 3 Month	Lebih dari 3 Bulan/ More than 3 Month	Jumlah Aset Keuangan/ Total Financial Assets	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ Allowance for Impairment Losses	Jumlah Aset Keuangan Bersih/ Net Total Financial Assets	December 31, 2021
Aset Keuangan						Financial Assets
Kas dan Setara Kas	452,330,656,021	--	452,330,656,021	--	452,330,656,021	Cash and Cash Equivalents
Piutang Usaha	105,062,932,616	36,729,801,999	141,792,734,615	(70,292,233,810)	71,500,500,805	Accounts Receivable
Piutang Retensi	820,224,778	--	820,224,778	--	820,224,778	Retention Receivables
Pendapatan yang Masih Akan Diterima	226,650,918,275	--	226,650,918,275	(15,643,252,568)	211,007,665,707	Accrued Revenue
Tagihan Bruto kepada Pemberi Kerja	1,070,504,437	--	1,070,504,437	--	1,070,504,437	Gross Amount Due from Customers
Aset Keuangan Lancar Lainnya	3,026,090,485	--	3,026,090,485	(2,245,384,059)	780,706,426	Other Current Financial Assets
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	67,275,000	--	67,275,000	--	67,275,000	Other Non-Current Financial Assets
Jumlah	789,028,601,612	36,729,801,999	825,758,403,611	(88,180,870,437)	737,577,533,174	Total

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Grup tidak bisa memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo.

Pada saat ini Grup dapat membayar semua kewajiban pada saat jatuh tempo. Grup memiliki kas dan setara kas dan aset keuangan lainnya yang dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya. Untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka panjangnya, Grup berharap adanya peningkatan penjualan di masa mendatang.

Rincian jatuh tempo liabilitas keuangan yang dimiliki adalah sebagai berikut:

31 Desember 2022	Kurang dari 3 Bulan/ Less than 3 Month	3 Bulan sampai 1 Tahun/ 3 Month up to 1 Year	Lebih dari 1 Tahun/ More than 1 Year	Jumlah/ Total	December 31, 2022
Utang Usaha	13,473,038,006	--	--	13,473,038,006	Accounts Payable
Utang Retensi	1,180,062,311	--	--	1,180,062,311	Retention Payables
Liabilitas Sewa	--	6,160,381,683	8,921,459,629	15,081,841,312	Lease Liabilities
Beban Akrua	71,777,435,621	--	--	71,777,435,621	Accrued Expenses
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	44,701,634,041	--	--	44,701,634,041	Other Short-Term Liabilities
Liabilitas Keuangan Lainnya	--	2,200,000,000	10,830,129,200	13,030,129,200	Other Financial Liabilities
Jumlah	131,132,169,979	8,360,381,683	19,751,588,829	159,244,140,491	Total

31 Desember 2021	Kurang dari 3 Bulan/ Less than 3 Month	3 Bulan sampai 1 Tahun/ 3 Month up to 1 Year	Lebih dari 1 Tahun/ More than 1 Year	Jumlah/ Total	December 31, 2021
Utang Usaha	10,409,269,250	--	--	10,409,269,250	Accounts Payable
Utang Retensi	1,887,271,379	--	--	1,887,271,379	Retention Payables
Liabilitas Sewa	--	6,022,860,500	6,696,762,755	12,719,623,255	Lease Liabilities
Beban Akrua	37,483,990,810	--	--	37,483,990,810	Accrued Expenses
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	57,858,612,655	--	--	57,858,612,655	Other Short-Term Liabilities
Liabilitas Keuangan Lainnya	1,100,000,000	--	11,930,129,200	13,030,129,200	Other Financial Liabilities
Jumlah	108,739,144,094	6,022,860,500	18,626,891,955	133,388,896,549	Total

Risiko Tingkat Suku Bunga

Risiko tingkat suku bunga arus kas adalah risiko dimana arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar.

Grup memiliki pinjaman jangka pendek dan jangka panjang dengan bunga mengambang. Grup akan memonitor secara ketat pergerakan suku bunga di pasar dan apabila suku bunga mengalami kenaikan yang signifikan maka Grup akan menegosiasikan suku bunga tersebut dengan pemberi pinjaman.

Liquidity Risk

Liquidity risk is the risk that the Group could not meet obligations as they fall due.

At this time the Group can pay all obligations as they fall due. The Group had cash and cash equivalents and other financial assets that can be used to meet short-term financial obligations. To meet the long-term financial obligations, the Group expected a sales increase in the future.

Details of the maturities of financial liabilities held as follows:

Interest Rate Risk

Interest rate risk is the risk that the cash flow of future cash flows of a financial instrument fluctuates due to changes in market interest rates.

The Group has short-term loans and long-term floating rate. The Group will closely monitor movements in market interest rates and if interest rates rise significantly, the Group will negotiate interest rates with lenders.

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Pada saat ini, Grup tidak mempersiapkan kebijakan atau pengaturan tertentu untuk mengelola risiko tingkat suku bunga untuk mengurangi risiko nilai wajar yang berhubungan dengan risiko arus kas yang terkait dengan kewajiban tingkat suku bunga mengambang. Tidak terdapat aktivitas lindung nilai tingkat bunga pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

At this time, the Group did not prepare a specific policy or regulation to manage interest rate risk to reduce the risks associated with the fair value of cash flow risk associated with floating rate liabilities. There is no interest rate hedging activities on December 31, 2022 and 2021.

Tidak ada risiko signifikan atas pengelolaan risiko usaha, kecuali upaya Grup untuk membantu pelanggan dalam mendapatkan SIPSDA.

There is no significant risk for business risk management, except for the efforts of the Group to assist customers in obtaining SIPSDA.

Pada tanggal laporan posisi keuangan, profil instrumen keuangan Grup adalah:

On the statement of financial position, the Group's profile, as follows:

	2022	2021	
	Rp	Rp	
Aset Keuangan	1,000,073,873,709	825,758,403,611	Financial Assets
Liabilitas Keuangan	(159,244,140,491)	(133,388,896,549)	Financial Liabilities
Total Aset - bersih	840,829,733,218	692,369,507,062	Total Asset - net

Tabel berikut menganalisis rincian aset dan liabilitas keuangan berdasarkan sifat bunga:

The following table analyzes the financial assets and liabilities by type of interest:

	2022	2021	
	Rp	Rp	
Tidak Dikenakan Bunga			Bear No Interest
Aset Keuangan	433,437,832,831	375,057,672,423	Financial Assets
Liabilitas Keuangan	(131,132,169,979)	(107,639,144,094)	Financial Liabilities
Sub Jumlah	302,305,662,852	267,418,528,329	Sub Total
Tingkat Bunga Tetap			Fixed Interest Rate
Aset Keuangan	460,000,000,000	410,000,000,000	Financial Assets
Liabilitas Keuangan	(28,111,970,512)	(25,749,752,455)	Financial Liabilities
Sub Jumlah	431,888,029,488	384,250,247,545	Sub Total
Tingkat Bunga Mengambang			Floating Interest Rate
Aset Keuangan	106,636,040,878	40,700,731,188	Financial Assets
Liabilitas Keuangan	--	--	Financial Liabilities
Sub Jumlah	106,636,040,878	40,700,731,188	Sub Total
Total Aset - bersih	840,829,733,218	692,369,507,062	Total Assets - net

Kenaikan suku bunga 2% akan meningkatkan ekuitas dan laba untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp2.132.720.818 dan Rp814.014.624. Penurunan 2% suku bunga untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 akan memiliki sama tetapi berlawanan efek, atas dasar bahwa semua variabel lainnya tetap konstan.

A 2% increase in interest rates would have increased equity and profit for the years ended December 31, 2022 and 2021 by Rp2,132,720,818 and Rp814,014,624, respectively. Decreasing 2% in interest rates for the years ended December 31, 2022 and 2021 would have the equal but opposite effect, on the basis that all other variables remain constant.

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

b. Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Instrumen keuangan yang disajikan di dalam laporan posisi keuangan dicatat sebesar nilai wajar atau pada biaya perolehan diamortisasi. Selain itu, instrumen keuangan disajikan sebesar jumlah tercatat baik karena jumlah tersebut adalah kurang lebih sebesar nilai wajarnya atau karena nilai wajarnya tidak dapat diakrual secara andal.

Nilai wajar mendekati atau setara dengan nilai tercatatnya, karena dampak dari diskonto tidak signifikan atau akan jatuh tempo dalam jangka pendek.

Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021:

b. Fair Value of Financial Instruments

Financial instruments are presented in the statement of financial position are stated at fair value or at amortized cost. Moreover, financial instruments are stated at carrying amounts either because the amount is less than fair value or because of their fair value cannot be reliably accrued.

The fair value is close to or equal to its carrying value, due to the impact of the discount is not significant or will be due in the short term.

The table below shows the carrying values and fair values of the assets and financial liabilities recorded in the statements of financial position for the years ended December 31, 2022 and 2021:

	2022		2021		
	Nilai tercatat/ Carrying Value Rp	Nilai wajar/ Fair Value Rp	Nilai tercatat/ Carrying Value Rp	Nilai wajar/ Fair Value Rp	
Aset Keuangan					Financial Assets
Kas dan Setara Kas	567,815,077,826	567,815,077,826	452,330,656,021	452,330,656,021	Cash and Cash Equivalents
Piutang Usaha	97,405,917,220	97,405,917,220	71,500,500,805	71,500,500,805	Accounts Receivable
Piutang Retensi	1,544,313,386	1,544,313,386	820,224,778	820,224,778	Retention Receivables
Pendapatan yang Masih Akan Diterima	237,031,178,256	237,031,178,256	211,007,665,707	211,007,665,707	Accrued Revenue
Tagihan Bruto kepada Pemberi Kerja	7,707,817,958	7,707,817,958	1,070,504,437	1,070,504,437	Gross Amount Due from Customers
Aset Keuangan Lancar Lainnya	701,279,719	701,279,719	780,706,426	780,706,426	Other Current Financial Assets
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	67,275,000	67,275,000	67,275,000	67,275,000	Other Non-Current Financial Assets
Jumlah	912,272,859,365	912,272,859,365	737,577,533,174	737,577,533,174	Total
Liabilitas Keuangan					Financial Liability
Utang Usaha	13,473,038,006	13,473,038,006	10,409,269,250	10,409,269,250	Accounts Payable
Utang Retensi	1,180,062,311	1,180,062,311	1,887,271,379	1,887,271,379	Retention Payables
Liabilitas Sewa	15,081,841,312	15,081,841,312	12,719,623,255	12,719,623,255	Lease Liabilities
Beban Akrua	71,777,435,621	71,777,435,621	37,483,990,810	37,483,990,810	Accrued Expenses
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	44,701,634,041	44,701,634,041	57,858,612,655	57,858,612,655	Other Short-Term Liabilities
Liabilitas Keuangan Lainnya	13,030,129,200	13,030,129,200	13,030,129,200	13,030,129,200	Other Financial Liabilities
Jumlah	159,244,140,491	159,244,140,491	133,388,896,549	133,388,896,549	Total

Tidak ada risiko likuiditas yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

There is no significant liquidity risk as of December 31, 2022 and 2021.

41. Aktivitas Non-Kas

Berikut adalah aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak memerlukan penggunaan kas dan setara kas, sehingga tidak disajikan dalam laporan arus kas konsolidasian:

41. Non-Cash Activities

Below are the investing and financing activities that do not require the use of cash and cash equivalents, so it is not presented in the consolidated statement of cash flows:

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	2022 Rp	2021 Rp	
Perolehan Aset Takberwujud melalui:			Acquisition of Intangible Assets through:
Reklasifikasi dari Aset Tetap Dalam Pelaksanaan	4,871,685,084	--	Reclassifying from Assets Under Construction
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	3,238,955,498	--	Other Short-Term Liabilities
Jumlah	8,110,640,582	--	Total
Perolehan Aset Tetap melalui:			Acquisition of Fixed Assets through:
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	26,348,527,165	40,431,201,336	Other Short-Term Liabilities
Realisasi dari Uang Muka	1,848,954,676	12,756,544,900	Realization from Advances
Jumlah	28,197,481,841	53,187,746,236	Total
Perolehan Aset Hak-Guna melalui:			Acquisition of Right-of-Use Assets through:
Liabilitas Sewa	8,478,090,646	--	Lease Liabilities
Jumlah	8,478,090,646	--	Total

Tabel di bawah ini menunjukkan rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, sebagai berikut:

The table below sets out a reconciliation of liabilities arising from financing activities for the years ended December 31, 2022 and 2021, as follows:

31 Desember 2022/ December 31, 2022					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Arus Kas/ Cash Flows	Non Kas/ Non Cash	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Liabilitas Sewa	12,719,623,255	(6,085,023,805)	8,447,241,862	15,081,841,312	Lease Liabilities
Liabilitas Keuangan Lainnya	13,030,129,200	--	--	13,030,129,200	Other Financial Liabilities
Jumlah	25,749,752,455	(6,085,023,805)	8,447,241,862	28,111,970,512	Total
31 Desember 2021/ December 31, 2021					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Arus Kas/ Cash Flows	Non Kas/ Non Cash	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Liabilitas Sewa	6,257,813,282	(5,833,415,986)	12,295,225,959	12,719,623,255	Lease Liabilities
Liabilitas Keuangan Lainnya	14,265,066,700	(1,234,937,500)	--	13,030,129,200	Other Financial Liabilities
Jumlah	20,522,879,982	(7,068,353,486)	12,295,225,959	25,749,752,455	Total

42. Aset Kontinjensi

Terdapat pengguna Sumber Daya Air (intake pelanggan) belum memiliki SIPSDA (Non SIPSDA) dan pemakaian airnya telah dituangkan dalam Berita Acara Pemakaian Air tahun 2022 sebanyak 86 intake yang menjadi potensi pendapatan yang belum dapat ditagihkan sebesar Rp19.276.242.360

42. Contingency Asset

There are Water Resources users (customer intakes) who do not have SIPSDA (Non SIPSDA) and the use of water has been stated in the 2022 Water Usage Minutes as many as 86 intakes which are potential income that cannot be billed as much as Rp19,276,242,360 and in 2021 as many as 92

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

dan tahun 2021 sebanyak 92 *intake* yang menjadi potensi pendapatan yang belum dapat ditagihkan sebesar Rp16.313.486.264.

Potensi pendapatan BJPSDA yang belum ditagihkan tersebut di atas, dicatat secara *extraccountable* dan pendapatan dibukukan pada saat diterbitkan/ diperolehnya SIPSDA oleh Pengguna SDA tersebut.

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

intakes which became the potential unbilled income of Rp16,313,486,264.

The potential revenue of BJPSDA that has not been billed above is recorded on an extraccountable basis and the income is recorded at the time the SIPSDA is issued/acquired by the SDA User.

43. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Perusahaan

1. Berdasarkan Notulen Rapat Pembahasan Penyelesaian Tagihan Perum Jasa Tirta II atas BJPSDA PLTA Djuanda, PLTA Cirata dan PLTA Saguling tanggal 9 Januari 2023 disimpulkan hasil sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan rekomendasi dari BPKP, untuk menyelesaikan permasalahan BJPSDA ini, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan pembahasan dalam Perjanjian dan SLA BJPSDA PLTA Saguling dan PLTA Cirata tahun 2023 dan kedepan yang dapat ditargetkan selesai *tentative* bulan Januari 2023.
 - b. PT PLN (Persero) Grup akan membayar BJPSDA periode 2022 untuk PLTA Saguling dan PLTA Cirata setelah dialokasikan dalam perhitungan subsidi/kompensasi tahun 2022 dan Perjanjian Jasa Pengelolaan SDA ditandatangani PT PLN (Persero) Grup dengan Perusahaan.
 - c. PT PLN (Persero) Grup akan menghitung kembali tagihan BJPSDA periode 2021 untuk PLTA Saguling dan PLTA Cirata dan hanya dapat dibayarkan sepanjang Kementerian Keuangan menyetujui tambahan subsidi/ kompensasi untuk pembayaran tagihan BPJSDA tersebut.
 - d. Perusahaan dan PT PLN (Persero) Grup menyepakati bahwa tagihan BJPSDA PLTA Djuanda (Periode 2013-2017), PLTA Saguling dan PLTA Cirata (Periode 2013 - 2020) tidak dapat dibayarkan, dikarenakan kendala pengalokasian tambahan anggaran dalam APBN untuk pembayaran subsidi tagihan yang sudah lampau.

43. Events After Reporting Period

The Company

1. *Based on the Minute of Meeting to Discuss the Settlement of Perum Jasa Tirta II Bills for the BJPSDA HEPP Djuanda, HEPP Cirata and HEPP Saguling dated January 9, 2023, the following results are concluded:*
 - a. *Based on the recommendations from BPKP, to resolve the BJPSDA issue, both parties agreed to discuss in the Agreement and SLA of the BJPSDA of the HEPP Saguling and HEPP Cirata in 2023 onwards which can be targeted for completion tentatively in January 2023.*
 - b. *PT PLN (Persero) Group will pay BJPSDA for the 2022 period for HEPP Saguling and HEPP Cirata after being allocated in the calculation of subsidies/compensation in 2022 and the Water Resources Management Service Agreement signed by both PT PLN (Persero) Group and the Company.*
 - c. *PT PLN (Persero) Group will recalculate the BJPSDA bill for the 2021 period for the HEPP Saguling and HEPP Cirata. The bill will be paid as long as the Ministry of Finance approves additional subsidies/ compensation for the payment of the BJPSDA bill.*
 - d. *The Company and PT PLN (Persero) Group agreed that the bills of BJPSDA for HEPP Djuanda (Period 2013-2017), HEPP Saguling and HEPP Cirata (Period 2013-2020) could not be paid, due to constraints on allocating additional budgets in the State Budget for payment of subsidies for past bills.*

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

- e. Setelah bersepakat, BPKP bersedia melakukan pendampingan kepada Perusahaan dan PT PLN (Persero) untuk menjelaskan kepada *stakeholder* dalam hal ini BPK dan Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM dan Kementerian PUPR terkait dengan tagihan BJPSDA.
- f. Berdasarkan *Focus Group Discussion* Progres Penyelesaian Biaya Jasa Sumber Daya Air Bagi PLN Grup (PLTA Saguling/PLN Indonesia Power dan PLTA Cirata /PLN Nusantara Power) tanggal 24 Februari 2023 disebutkan PT PLN Grup dan Perusahaan menyepakati:
 - Pembayaran BJPSDA PLTA Cirata dan PLTA Saguling tahun 2022 dan seterusnya akan dituangkan dalam Perjanjian Pemanfaatan Air Baku antara Perusahaan, PT PLN Indonesia Power dan PT PLN Nusantara Power dan ditandatangani paling lambat 31 Maret 2023.
 - Mempertimbangkan kendala untuk pengalokasian anggaran dalam APBN, maka terhadap adanya permasalahan tagihan BJPSDA tahun 2021, Perusahaan dan PT PLN Grup bersepakat untuk tidak dilanjutkan kembali.

Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air PLTA Cirata Nomor 072.PJ/061/PNP-PJTII/IV/2023 dengan PT PLN Nusantara Power tanggal 14 April 2023 dan Perjanjian Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air PLTA Saguling Nomor 164.PJ/061/IP/2023 dengan PT Indonesia Power tanggal 12 April 2023 dengan menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

- a. Jangka waktu perjanjian selama 5 tahun, mulai dari 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2026;
- b. Nilai PJPSDA progresif 60% sampai dengan 70% sampai dengan akhir jangka waktu perjanjian; dan
- c. Nilai Non PJPSDA adalah 30% - 40% dari realisasi produksi kWh netto yang telah disepakati oleh PT PLN Nusantara Power (PLTA Cirata) dan PT Indonesia Power (PLTA Saguling) sesuai tarif yang telah ditentukan oleh Kementerian PUPR masing-masing sebesar Rp45,69/kWh dan Rp14,01/kWh.

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- e. After agreeing, BPKP is willing to provide assistance to the Company and PT PLN (Persero) to explain to stakeholders, in this case BPK and the Ministry of SOEs, Ministry of Finance, Ministry of EMR and the Ministry of PWPH pertained to BJPSDA bills.
- f. Based on the Focus Group Discussion on the Progress of Solving Water Resources Service Fees for PLN Group (HEPP Saguling/ PLN Indonesia Power and HEPP Cirata/ PLN Nusantara Power) dated February 24, 2023, PT PLN Group and the Company agreed that:
 - The payment of BJPSDA HEPP Cirata and HEPP Saguling from 2022 onwards will be stated in the Raw Water Utilization Agreement between the Company, PT PLN Indonesia Power and PT PLN Nusantara Power and signed no later than March 31, 2023.
 - Considering the constraints for budget allocation in the state budget, the BJPSDA bill dispute in 2021, the Company and PT PLN Group agreed not to resume.

The Company has signed Agreement of Water Resources Management Service of HEPP Cirata Number 072.PJ/061/PNP-PJTII/IV/2023 with PT PLN Nusantara Power dated April 14, 2023 and Agreement of Water Resources Management Service of HEPP Saguling Number 164.PJ/061/IP/2023 with PT Indonesia Power dated April 12, 2023 by explaining the following:

- a. The term of the agreement is 5 years, starting from January 1, 2022 to December 31, 2026;
- b. Progressice PJPSDA value of 60% to 70% until the end of the agreement period; and
- c. The Non PJPSDA value is 30% - 40% of the actual net kWh production that has been agreed upon by PT PLN Nusantara Power (HEPP Cirata) and PT Indonesia Power (HEPP Saguling) according to the tariff determind by the Ministry of PWPH amounting to Rp45.69/kWh and Rp14.01/kWh, respectively.

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. Berdasarkan Notulen Rapat atas Tindak Lanjut Kesepakatan Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) PT Sang Hyang Seri kepada Perum Jasa Tirta II tanggal 16 Februari 2023 telah disimpulkan bersama oleh Perum Jasa Tirta II, PT Sang Hyang Seri, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Rajawali Nasional Indonesia (Persero) serta Kementerian BUMN yang diwakili oleh Asisten Deputi Jasa Telekomunikasi dan Media dan Asisten Deputi Industri Pangan dan Pupuk dengan kesimpulan:
 - a. PT Sang Hyang Seri dan Perusahaan agar segera menjalankan tahapan lebih lanjut terkait penyelesaian utang BJPSDA melalui skema *asset settlement*, dimana prosesnya akan diselaraskan dengan proses restrukturisasi utang perbankan yang saat ini tengah berjalan di PT Sang Hyang Seri.
 - b. Agar dapat dilaksanakan kajian bersama oleh PT Sang Hyang Seri dan Perusahaan sebagai upaya penurunan tarif air mengingat air baku yang digunakan PT Sang Hyang Seri bukan sepenuhnya untuk kepentingan komersial namun digunakan untuk para petani.
2. Based on the Minute of the Meeting on the Follow-up Agreement on the Settlement of Obligations for Payment of Water Resources Management Service Fees (BJPSDA) PT Sang Hyang Seri to Perum Jasa Tirta II dated February 16, 2023 has been concluded jointly by Perum Jasa Tirta II, PT Sang Hyang Seri, Director of Finance and Risk Management of PT Rajawali Nasional Indonesia (Persero) and the Ministry of SOEs represented by Assistant Deputy for Telecommunication and Media Services and Assistant Deputy for Food and Fertilizer Industry in conclusion:
 - a. PT Sang Hyang Seri and the Company to immediately carry out further stages related to BJPSDA debt settlement through an asset settlement scheme, where the process will be aligned with the bank debt restructuring process currently underway at PT Sang Hyang Seri.
 - b. In order to be able to carry out a joint assessment by PT Sang Hyang Seri and the Company as an effort to reduce water tariffs considering that the raw water used by PT Sang Hyang Seri is not entirely used for commercial purposes but for farmers.

44. Reklasifikasi Akun

Beberapa akun dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasi pada tanggal 31 Desember 2021 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, berikut adalah rincian akun-akun sebelum dan sesudah reklasifikasi:

44. Reclassification of Accounts

Several accounts in the consolidated statement of financial position and consolidated statements of cash flows as of December 31, 2021 have been reclassified to conform to the presentation of the consolidated financial statements for the year ended December 31, 2022, here are the details accounts before and after reclassification:

31 Desember 2021/ December 31, 2021			
	Sebelum Reklasifikasi/ Before Reclassification	Reklasifikasi/ Reclassification	Setelah Reklasifikasi/ After Reclassification
	Rp	Rp	Rp
ASET LANCAR			CURRENT ASSETS
Piutang Usaha	72,320,725,583	(820,224,778)	71,500,500,805
Piutang Retensi	--	820,224,778	820,224,778
JUMLAH ASET	1,689,754,581,058	--	1,689,754,581,058
LIABILITAS JANGKA PENDEK			CURRENT LIABILITIES
Utang Usaha	12,296,540,629	(1,887,271,379)	10,409,269,250
Utang Retensi	--	1,887,271,379	1,887,271,379
Biaya yang Masih Harus Dibayar	37,638,101,878	(154,111,068)	37,483,990,810
Liabilitas Imbalan Kerja	212,748,095,399	154,111,068	212,902,206,467
JUMLAH LIABILITAS	408,547,379,608	--	408,547,379,608
			TOTAL ASSETS
			TOTAL LIABILITIES

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021

(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

31 Desember 2021/ December 31, 2021				
	Sebelum Reklasifikasi/ Before Reclassification	Reklasifikasi/ Reclassification	Setelah Reklasifikasi/ After Reclassification	
	Rp	Rp	Rp	
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN				CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
Pemasok dan Pihak Ketiga Lainnya	330,453,366,849	(1,612,599,281)	328,840,767,568	Suppliers and Other Third Parties
Pembayaran Bunga	--	1,612,599,281	1,612,599,281	Interest Payment
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	452,330,656,021	--	452,330,656,021	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR

**45. Standar Akuntansi yang Telah Disahkan Namun
Belum Berlaku Efektif**

Amendemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi;
- Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang;
- Amendemen PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan tentang Definisi Estimasi Akuntansi; dan
- Amendemen PSAK 46: Pajak Penghasilan tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal.
- Revisi PSAK 107: Akuntansi Ijarah.

Standar baru dan amendemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 74: "Kontrak Asuransi";
- Amendemen PSAK 74: Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK 74 dan PSAK 71 - Informasi Komparatif.

Hingga tanggal laporan keuangan konsolidasian ini diotorisasi, Grup masih melakukan evaluasi atas dampak potensial dari penerapan standar baru, amendemen standar dan interpretasi standar tersebut.

**45. Accounting Standards Issued But Not
Yet Effective**

Amendment to standards which effective for periods beginning on or after January 1, 2023, with early adoption is permitted, are as follows:

- Amendment PSAK 1: Presentation of Financial Statements regarding Disclosure of Accounting Policies;
- Amendment PSAK 1: Presentation of Financial Statements regarding Classification of Liabilities as a Current or Non Current;
- Amendment PSAK 25: Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors regarding Definition of Accounting Estimates; and
- Amendments PSAK 46: Income Tax regarding Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction.
- Revised PSAK 107: Accounting for Ijarah.

New standard and amendment to standard which effective for periods beginning on or after January 1, 2025, with early adoption is permitted, are as follows:

- PSAK 74: "Insurance Contract";
- Amendments PSAK 74: Insurance Contract regarding Initial Implementation of PSAK 74 and PSAK 71 - Comparative Information.

Until the date of the consolidated financial statements is authorized, the Group is still evaluating the potential impact of the adoption of new standards, amendments to standards and interpretations of these standards.

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

*For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)*

**46. Tanggung Jawab dan Otorisasi Penerbitan
Laporan Keuangan Konsolidasian**

Manajemen Perusahaan, sesuai dengan ketentuan hukum dan batasan kewenangannya bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian yang diotorisasi untuk terbit pada tanggal 14 April 2023.

**46. Responsibility and Authorization for
Issuance of the Consolidated Financial
Statements**

The Management of the Company, to the extent fullest limited by laws and its authority is responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements that were authorized to be published on April 14, 2023.

AR Annual Report Award

2023

KRITERIA ANNUAL REPORT AWARD 2015+)

Annual Report Award Criteria 2015+)

Penilaian ARA 2015 dibagi menjadi 2 tahap, yaitu:

A. Penilaian Kuantitatif (100%) terdiri dari 8 klasifikasi, yaitu:

1. Umum: Bobot keseluruhan untuk klasifikasi ini sebesar 2%;
2. Ikhtisar Data Keuangan Penting: Bobot keseluruhan untuk klasifikasi ini sebesar 5%;
3. Laporan Dewan Komisaris dan Direksi: Bobot keseluruhan untuk klasifikasi ini sebesar 3%;
4. Profil Perusahaan: Bobot keseluruhan untuk klasifikasi ini sebesar 8%;
5. Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan: Bobot keseluruhan untuk klasifikasi ini sebesar 22%;
6. *Good Corporate Governance*: Bobot keseluruhan untuk klasifikasi ini sebesar 35%;
7. Informasi Keuangan: Bobot keseluruhan untuk klasifikasi ini sebesar 20%; dan
8. Lain-lain: Bobot keseluruhan untuk klasifikasi ini sebesar +/- 5%

a. Praktik *good corporate governance* (+5%) yang melebihi kriteria, seperti:

- 1) Terdapat surat pernyataan tanggung jawab manajemen atas Laporan Keuangan bagi Perusahaan non Tbk; dan
- 2) Menyampaikan Laporan Keberlanjutan/CSR yang disusun berdasarkan standar yang berlaku secara internasional (*GRI Sustainability Reporting Guidelines*).

b. Praktik *bad corporate governance* (-5%) yang tidak diatur dalam kriteria, seperti:

- 1) Adanya laporan sebagai perusahaan yang mencemari lingkungan;
- 2) Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, anggota Direksi dan /atau anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat yang tidak diungkapkan dalam Laporan Tahunan;
- 3) Ketidapatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan; dan
- 4) Ketidaksesuaian penyajian laporan tahunan dan laporan keuangan dengan peraturan yang berlaku dan SAK.

B. Wawancara (Penentuan Pemenang)

+) Kriteria penilaian dimaksud berlaku bagi semua peserta, kecuali peserta Dana Pensiun

Rate of ARA in 2015 is divided into two stages:

A. *Quantitative Assessment* (100%) consists of eight classifications, namely:

1. *General*: Overall weight for this classification is by 2%;
2. *Financial Highlights*: Overall weight for this classification is by 5%;
3. *Report of the Board of Commissioners and Board of Directors*: Overall weight for this classification is by 3%;
4. *Company Profile*: The weight of the overall classification is by 8%;
5. *The Management Analysis and Discussion on the Company's Performance*: Overall weight for this classification is by 22%;
6. *Good Corporate Governance*: The Weight of the overall classification is by 35%;
7. *Financial Information*: Overall weight for this classification is by 20%; and
8. *Others*: Overall weight for this classification is about +/- 5%

a. *The practice of good corporate governance (+ 5%) which exceeds the criteria, such as:*

- 1) *There is a statement of management's responsibility for the Non Tbk Company's Financial Statements ; and*
- 2) *Delivering Sustainability Report/CSR which is based on internationally accepted standards (GRI Sustainability Reporting Guidelines).*

b. *Bad corporate governance practices (-5%) are not governed by the criteria, such as:*

- 1) *There is a report as company that pollutes the environment;*
- 2) *Important case being faced by the company, its subsidiaries, members of the Board of Directors and / or members of the Board of Commissioners in office, which was not disclosed in the Annual Report;*
- 3) *Non-compliance in the fulfillment of tax obligations; and*
- 4) *Incompatibility presentation of the annual report and financial statements with the applicable regulations and IFRSs.*

B. *Interview (Determination of Winners)*

+) *The evaluation criteria is applicable to all participants, except the participant of the Pension Fund*

KRITERIA ANNUAL REPORT AWARD 2020+)

Criteria Annual Report Award 2020+)

NO.	KRITERIA / Criteria
I	UMUM / General
1.	Laporan tahunan disajikan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dianjurkan menyajikan juga dalam bahasa Inggris / <i>Annual report is presented in good and appropriate Bahasa Indonesia and also in English</i>
2.	Laporan tahunan dicetak dengan kualitas yang baik dan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca <i>Annual report is printed in good quality by using font type and size that are easy to read</i>
3.	Laporan tahunan mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas <i>Annual report mentions corporate identities clearly</i>
4.	Laporan tahunan ditampilkan di website perusahaan <i>Annual report is displayed in company's website</i>
II	IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING / Financial Highlights
1.	Informasi hasil usaha perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun. / <i>Information of company's business result in comparison form for 3 (three) fiscal years or since starting its business if the company run the business activities for less than 3 (three) years.</i>

PENJELASAN / Description	PENILAIAN / Valuation
Nama perusahaan dan tahun annual report ditampilkan di: <i>The name of the company and the year of the annual report are displayed in:</i> 1. Sampul muka / <i>The cover;</i> 2. Samping / <i>Side cover;</i> 3. Sampul belakang; dan / <i>Back cover; and</i> 4. Setiap halaman / <i>Each page.</i> Mencakup laporan tahunan terkini dan paling kurang 4 tahun terakhir. <i>The annual report includes the most recent and less than 4 years.</i>	
Informasi memuat antara lain: 1. Penjualan/pendapatan usaha; 2. Laba (rugi): a. Diatribusikan kepada pemilik entitas induk; dan b. Diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali; 3. Total laba (rugi) dan penghasilan komprehensif lain: a. Diatribusikan kepada pemilik entitas induk; dan b. Diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali; dan 4. Laba (rugi) per saham. Catatan: Apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, perusahaan menyajikan laba (rugi) serta laba (rugi) dan penghasilan komprehensif lain secara total. <i>Information includes among others:</i> 1. <i>Sales / revenues;</i> 2. <i>Gain (loss):</i> a. <i>Attributable to owners of the parent; and</i> b. <i>Attributable to non-controlling interests;</i> 3. <i>Total profit (loss) and other comprehensive income:</i> a. <i>Attributable to owners of the parent; and</i> b. <i>Attributable to non-controlling interests; and</i> 4. <i>Earnings (loss) per share.</i> <i>Note: If the company does not have a subsidiary, the company presents net income (loss) and earnings (loss) and other comprehensive income in total.</i>	

NO.	KRITERIA / Criteria
II	IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING / Financial Highlights
2.	Informasi posisi keuangan perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun. <i>Information of company's financial position in comparison form for 3 (three) fiscal years or since starting its business if the company run the business activities for less than 3 (three) years.</i>
3.	Rasio keuangan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun. <i>Financial ratios in comparison form for 3 (three) fiscal years or since starting its business if the company run the business activities for less than 3 (three) years.</i>
4.	Informasi harga saham dalam bentuk tabel dan grafik* <i>Information of stock price in tables and charts.*</i>
5.	Informasi mengenai obligasi, sukuk atau obligasi konversi yang masih beredar dalam 2 (dua) tahun buku terakhir* <i>Information on bonds, securities or convertible bonds that are still circulating in the last 2 (two) fiscal year. *</i>

PENJELASAN / <i>Description</i>	PENILAIAN / <i>Valuation</i>
Informasi memuat antara lain: 1. Jumlah investasi pada entitas asosiasi; 2. Jumlah aset; 3. Jumlah liabilitas; dan 4. Jumlah ekuitas. <i>Information includes among others:</i> 1. <i>The amount of investments in associates;</i> 2. <i>Total assets;</i> 3. <i>Total liabilities; and</i> 4. <i>The amount of equity.</i> Informasi memuat 5 (lima) rasio keuangan yang umum dan relevan dengan industri perusahaan. <i>Information includes five (5) financial ratios that are common and relevant to industrial companies.</i>	
1. Informasi dalam bentuk tabel yang memuat: a. Jumlah saham yang beredar; b. Kapitalisasi pasar; c. Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan; dan d. Volume perdagangan. 2. Informasi dalam bentuk grafik yang memuat paling kurang harga penutupan dan volume perdagangan saham. untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir. <i>1. The information in table form which contains:</i> a. <i>The number of shares outstanding;</i> b. <i>The market capitalization;</i> c. <i>The stock price high, low and closing; and</i> d. <i>The trading volume.</i> <i>2. The information in graphic form containing at least the closing prices and trading volumes. for each quarter in 2 (two) last fiscal year.</i>	
Informasi memuat: 1. Jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (outstanding); 2. Tingkat bunga/imbalan; 3. Tanggal jatuh tempo; dan 4. Peringkat obligasi/sukuk. <i>Information includes:</i> 1. <i>Number of bonds / securities / convertible bonds outstanding;</i> 2. <i>The interest rate / yield;</i> 3. <i>The maturity date; and</i> 4. <i>Rating obligations/bonds</i>	

NO.	KRITERIA / <i>Criteria</i>
III	LAPORAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI / <i>Report of Board of Commissioners and Directors</i>
1.	Laporan Dewan Komisaris <i>Report of Board of Commissioners</i>
2.	Laporan Direksi <i>Report of Board of Directors</i>
3.	Tanda tangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi <i>Signatures of members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors</i>

PENJELASAN / Description

PENILAIAN / Valuation

Memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Penilaian atas kinerja Direksi mengenai pengelolaan perusahaan dan dasar penilaiannya;
2. Pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh Direksi dan dasar pertimbangannya;
3. Penilaian atas kinerja komite-komite yang berada di bawah Dewan Komisaris; dan
4. Perubahan komposisi Dewan Komisaris (jika ada) dan alasan perubahannya.

Contains of the following:

1. *Assessment of the performance of the Board of Directors on the company's management and the assessment base;*
2. *The overview of the company's business prospects prepared by the Board of Directors and the basic considerations;*
3. *The assessment of the performance of the committees under the Board of Commissioners; and*
4. *Changes in the composition of the Board of Commissioners (if any) and the reasons for the change.*

Memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Analisis atas kinerja perusahaan, yang mencakup antara lain kebijakan strategis, perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan, dan kendala-kendala yang dihadapi perusahaan;
2. Analisis tentang prospek usaha;
3. Penerapan tata kelola perusahaan; dan
4. Penilaian atas kinerja komite-komite yang berada di bawah Direksi (jika ada); dan
5. Perubahan komposisi anggota Direksi (jika ada) dan alasan perubahannya.

Contains of the following:

1. *Analysis of the performance of the company, which includes, among others, strategic policy, a comparison between the results achieved with targeted, and the constraints faced by the company;*
2. *Analysis of business prospects;*
3. *Application of corporate governance; and*
4. *Assessment of the performance of the committees under the Board of Directors (if any); and*
5. *Changes in the composition of the Board of Directors (if any) and the reasons for the change.*

Memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Tanda tangan dituangkan pada lembar tersendiri;
2. Pernyataan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan;
3. Ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan menyebutkan nama dan jabatannya; dan
4. Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari yang bersangkutan dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan, atau penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan.

NO.	KRITERIA / <i>Criteria</i>
III	LAPORAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI / <i>Report of Board of Commissioners and Directors</i>
IV	PROFIL PERUSAHAAN / <i>Company Profile</i>
1.	Nama dan alamat lengkap perusahaan <i>Company's name and address</i>
2.	Riwayat singkat perusahaan <i>Company's history</i>
3.	Tanda tangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi <i>Signature of Commissioners and Directors</i>
4.	Struktur Organisasi <i>Organizational structure</i>

PENJELASAN / Description

PENILAIAN / Valuation

Contains of the following:

1. *Signature poured on a separate sheet;*
2. *A declaration that the Board of Commissioners and Directors are fully responsible for the accuracy of the content of the annual report;*
3. *Signed the Board of Commissioners and Director by mention name and title; and*
4. *A written explanation in a separate letter from the concerned parties in the event of a member of the Board of Commissioners or Board of Directors who did not sign the annual report, or a written explanation in a separate letter from the other members in the absence of appropriate written explanation from the concerned parties.*

Informasi memuat antara lain: nama dan alamat, kode pos, no. Telp, no. Fax, email, dan website.

Information includes among others: the name and address, zip code, Phone number, Fax number, email, and website.

Mencakup antara lain: tanggal/tahun pendirian, nama, dan perubahan nama perusahaan (jika ada).

Catatan: apabila perusahaan tidak pernah melakukan perubahan nama, agar diungkapkan.

Include: date / year of establishment, the name, and the name change company (if any).

Note: if the company never did change the name, please be disclosed.

Uraian mengenai antara lain:

1. Kegiatan usaha perusahaan menurut anggaran dasar terakhir;
2. Kegiatan usaha yang dijalankan; dan
3. Produk dan/atau jasa yang dihasilkan.

The description of, among others:

1. *The business activities of the company according to the last budget;*
2. *The business activities which are carried out; and*
3. *Products and / or services which are produced.*

Dalam bentuk bagan, meliputi nama dan jabatan paling kurang sampai dengan struktur satu tingkat di bawah direksi.

In chart form, including the name and position at least one structure level below the directors.

NO.	KRITERIA / <i>Criteria</i>
IV	PROFIL PERUSAHAAN / <i>Company Profile</i>
5.	Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan <i>Vision, Mission and Company's Culture</i>
6.	Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Dewan Komisaris <i>Identity and history of Board of Commissioners</i>
7.	Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Direksi <i>Identity and history of Directors</i>

PENJELASAN / Description

PENILAIAN / Valuation

Mencakup:

1. Visi perusahaan;
2. Misi perusahaan;
3. Keterangan bahwa visi dan misi tersebut telah disetujui oleh Direksi/Dewan Komisaris; dan
4. Pernyataan mengenai budaya perusahaan (corporate culture) yang dimiliki perusahaan.

Includes:

1. *The company's vision;*
2. *The company's mission;*
3. *Remarks that the vision and the mission has been approved by the Board of Directors / Board of Commissioners; and*
4. *Statement on corporate culture of the company.*

Informasi memuat antara lain:

1. Nama;
2. Jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain);
3. Umur;
4. Domisili;
5. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan);
6. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat); dan
7. Riwayat penunjukkan sebagai anggota Dewan Komisaris di Perusahaan.

Information includes among others:

1. *Name;*
2. *Position (including positions in companies or other institutions);*
3. *Age;*
4. *Domicile;*
5. *Education (Field Studies and the Institute of Education);*
6. *Work Experience (Position, Agencies and Served Period); and*
7. *History of the appointment as a member of the Board of Commissioners of the Company.*

Informasi memuat antara lain:

1. Nama;
2. Jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain);
3. Umur;
4. Domisili;
5. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan);
6. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat); dan
7. Riwayat penunjukkan sebagai anggota Direksi di Perusahaan.

NO.	KRITERIA / <i>Criteria</i>
IV	PROFIL PERUSAHAAN / <i>Company Profile</i>
8.	Jumlah karyawan (komparatif 2 tahun) dan deskripsi pengembangan kompetensinya (misal: aspek pendidikan dan pelatihan karyawan) <i>Number of employees (comparative 2 years) and description of the competence development (e.g: education aspects and employee training)</i>
9.	Komposisi Pemegang saham <i>Composition of shareholders</i>

PENJELASAN / Description

PENILAIAN / Valuation

Information includes among others:

1. Name;
2. Position (including positions in companies or other institutions);
3. Age;
4. Domicile;
5. Education (Field Studies and the Institute of Education);
6. Work Experience (Position, Agencies and Served Period); and
7. History of the appointment as member of the Board of Directors of the Company.

Informasi memuat antara lain:

1. Jumlah karyawan untuk masing-masing level organisasi;
2. Jumlah karyawan untuk masing-masing tingkat pendidikan;
3. Jumlah karyawan berdasarkan status kepegawaian;
4. Deskripsi dan data pengembangan kompetensi karyawan yang telah dilakukan dengan mencerminkan adanya persamaan kesempatan untuk masing-masing level organisasi; dan
5. Biaya pengembangan kompetensi karyawan yang telah dikeluarkan.

Information includes among others:

1. The number of employees for each level of the organization;
2. The number of employees for each level of education;
3. The number of employees based on employment status;
4. A description of the data and employee competence development has been done to reflect the equality of opportunity for each level of the organization; and
5. The cost of development of employee competencies that have been issued.

Mencakup antara lain:

1. Rincian nama pemegang saham yang meliputi 20 pemegang saham terbesar dan persentase kepemilikannya;
2. Rincian pemegang saham dan persentase kepemilikannya meliputi:
 - a. Nama pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham;
 - b. Nama Komisaris dan Direktur yang memiliki saham; dan
 - c. Kelompok pemegang saham masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5%.

Include:

1. Details of names of shareholders that includes 20 largest shareholders and the percentage of ownership;
2. Details of shareholders and percentage of ownership include:
 - a. The names of shareholders who own 5% or more shares;
 - b. Name of Commissioners and Directors who hold shares; and
 - c. Shareholder groups of society with a stake of each of less than 5%.

NO.	KRITERIA / <i>Criteria</i>
IV	PROFIL PERUSAHAAN / <i>Company Profile</i>
10.	Daftar entitas anak dan/atau entitas asosiasi <i>List of Subsidiaries and/or associate</i>
11.	Struktur grup perusahaan <i>Company's group structure</i>
12.	Kronologis pencatatan efek lainnya* <i>Chronological of other stock registration*</i>
13.	Kronologis pencatatan efek lainnya* <i>Chronological of other stock registration*</i>

PENJELASAN / Description

PENILAIAN / Valuation

Informasi memuat antara lain:

1. Nama entitas anak dan/atau asosiasi;
2. Persentase kepemilikan saham;
3. Keterangan tentang bidang usaha entitas anak dan/atau entitas asosiasi;
dan
4. Keterangan status operasi entitas anak dan/atau entitas asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi).

Information includes among others:

1. *Name of the subsidiaries and / or associates;*
2. *Percentage of share ownership;*
3. *Description of the business areas the subsidiaries and / or associated company; and*
4. *Description of subsidiaries operating status and / or an associate (already operating or not operating).*

Struktur grup perusahaan dalam bentuk bagan yang menggambarkan entitas anak, entitas asosiasi, joint venture, dan special purpose vehicle (SPV).

The structure of company's group in the form of a chart that describes the subsidiaries, entity of associates, joint ventures, and special purpose vehicle (SPV).

Mencakup antara lain:

1. Kronologis pencatatan saham;
2. Jenis tindakan korporasi (corporate action) yang menyebabkan perubahan jumlah saham;
3. Perubahan jumlah saham dari awal pencatatan sampai dengan akhir tahun buku; dan
4. Nama bursa dimana saham perusahaan dicatatkan.

Include:

1. *Chronology of stock listing;*
2. *Type of corporate actions which led to changes in the number of shares;*
3. *Change in number of shares from the start of recording until the end of the fiscal year; and*
4. *Name of the exchanges on which the company's shares are listed.*

Mencakup antara lain:

1. Kronologis pencatatan efek lainnya;
2. Jenis tindakan korporasi (corporate action) yang menyebabkan perubahan jumlah efek lainnya;
3. Perubahan jumlah efek lainnya dari awal pencatatan sampai dengan akhir tahun buku;
4. Nama bursa dimana efek lainnya dicatatkan; dan
5. Peringkat efek.

Include:

1. *Chronology of recording other effects;*
2. *Type of corporate actions that cause changes in the number of other effects;*
3. *Change in number of other effects of early registration until the end of the fiscal year;*
4. *Name of the exchanges on which other securities are listed; and*
5. *Ranked effect.*

NO.	KRITERIA / <i>Criteria</i>
IV	PROFIL PERUSAHAAN / <i>Company Profile</i>
14.	Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal* <i>Name and address of institution and/or profession of supporting capital market*</i>
15.	Penghargaan yang diterima dalam tahun buku terakhir dan/atau sertifikasi yang masih berlaku dalam tahun buku terakhir baik yang berskala nasional maupun internasional. <i>Awards received in the last fiscal year and / or valid certification in the last fiscal year both national and international.</i>
16.	Nama dan alamat entitas anak dan/atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada). <i>Name and address of subsidiaries and/or branch offices or representative offices (if any).</i>
17.	Informasi pada Website Perusahaan. <i>Information on company's website.</i>

PENJELASAN / Description

PENILAIAN / Valuation

Informasi memuat antara lain:

1. Nama dan alamat BAE/pihak yang mengadministrasikan saham perusahaan;
2. Nama dan alamat Kantor Akuntan Publik; dan
3. Nama dan alamat perusahaan pemeringkat efek.

Information includes among others:

1. *Name and address of BAE / parties who administer the company's shares;*
2. *The name and address of the Public Accounting Firm; and*
3. *The name and address of company securities rating.*

Informasi memuat antara lain:

1. Nama penghargaan dan/atau sertifikat;
2. Tahun perolehan;
3. Badan pemberi penghargaan dan/atau sertifikat; dan
4. Masa berlaku (untuk sertifikasi).

Information includes among others:

1. *Name of the award and / or certificates;*
2. *In the acquisition;*
3. *The Agency appreciator and / or certificates; and*
4. *The validity period (for certification).*

Memuat informasi antara lain:

1. Nama dan alamat entitas anak; dan
2. Nama dan alamat kantor cabang/perwakilan.

Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak/cabang/perwakilan, agar diungkapkan.

Contains information such as:

1. *Name and address of the subsidiary; and*
2. *The name and address of the branch office / representative.*

Note: if the company does not have subsidiaries / branches / representatives, please be disclosed.

Memuat uraian mengenai:

1. Penjelasan masing-masing segmen usaha.
2. Kinerja per segmen usaha, antara lain:
 - a. Produksi;
 - b. Peningkatan/penurunan kapasitas produksi;
 - c. Penjualan/pendapatan usaha; dan
 - d. Profitabilitas.

Contains of the following:

1. *Explanation of each business segment.*
2. *Performance per business segment, among others:*
 - a. *Production;*
 - b. *Increase / decrease in production capacity;*
 - c. *Sales / revenues; and*
 - d. *Profitability.*

NO.	KRITERIA / <i>Criteria</i>
V	ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN / <i>Management analysis and</i>
1.	Tinjauan operasi per segmen usaha <i>Operational review per business segments</i>
2.	Uraian atas kinerja keuangan perusahaan <i>Description on company's financial performance</i>
3.	Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar utang dan tingkat kolektibilitas piutang perusahaan, dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan sesuai dengan jenis industri perusahaan. <i>Discussion and analysis of the ability to pay debts and company's receivable collectability, by presenting the relevant ratio calculation in accordance with the type of industry the company.</i>

PENJELASAN / Description

PENILAIAN / Valuation

discussion on company's performance

Memuat uraian mengenai:

1. Penjelasan masing-masing segmen usaha.
2. Kinerja per segmen usaha, antara lain:
 - a. Produksi;
 - b. Peningkatan/penurunan kapasitas produksi;
 - c. Penjualan/pendapatan usaha; dan
 - d. Profitabilitas.

Contains of the following:

1. *Explanation of each business segment.*
2. *Performance per business segment, among others:*
 - a. Production;*
 - b. Increase / decrease in production capacity;*
 - c. Sales / revenues; and*
 - d. Profitability.*

Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya dan penyebab kenaikan/penurunan (dalam bentuk narasi dan tabel), antara lain mengenai:

1. Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset;
2. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas;
3. Ekuitas;
4. Penjualan/pendapatan usaha, beban dan laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) dan penghasilan komprehensif lain; dan
5. Arus kas.

Analysis of financial performance that includes a comparison between the financial performance for the year to a year earlier and the cause of the increase / decrease (in the form of narrative and tables), among others:

1. *Current assets, Fixed assets and total assets;*
2. *The short-term liabilities, long-term liabilities, and total liabilities;*
3. *Equity;*
4. *Sales / revenues, expenses and income (loss), other comprehensive income and total net income (loss) and other comprehensive income; and*
5. *Cash flow.*

Penjelasan tentang:

1. Kemampuan membayar hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang; dan
2. Tingkat kolektibilitas piutang.

Explanation of:

1. *Ability to pay the debt, both short- and long-term; and*
2. *Level of collectability.*

NO.	KRITERIA / <i>Criteria</i>
V	ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN / <i>Management analysis and</i>
4.	Bahasan tentang struktur modal (capital structure) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policy). <i>Discussion on capital structure and management policies on capital structure policy.</i>
5.	Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal pada tahun buku terakhir. <i>Discussion on material bond to capital goods investment in last fiscal year.</i>
6.	Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan pada tahun buku terakhir. <i>Discussion on capital goods investment which have been realized on last fiscal year.</i>

PENJELASAN / Description

PENILAIAN / Valuation

discussion on company's performance

Penjelasan atas:

1. Rincian struktur modal (*capital structure*) yang terdiri dari utang berbasis bunga dan ekuitas; dan
2. Kebijakan manajemen atas struktur modal (*capital structure policies*) dan dasar pemilihan kebijakan tersebut.

Explanation of:

1. *Details of capital structure consisting of interest-based debt and equity; and*
2. *Management policy on capital structure (capital structure policies) and the basis for selecting the policy.*

Penjelasan tentang:

1. Tujuan dari ikatan tersebut;
2. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut;
3. Mata uang yang menjadi denominasi; dan
4. Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait.

Catatan: apabila perusahaan tidak mempunyai ikatan terkait investasi barang modal pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.

Explanation of:

1. *The purpose of such commitments;*
2. *Sources of funds to meet these bonds;*
3. *Currency denominated; and*
4. *The steps the company plans to protect the risk of foreign currency related.*

Note: if the company does not have ties related to capital investments in the last fiscal year, please be disclosed.

Penjelasan tentang:

1. Jenis investasi barang modal;
2. Tujuan investasi barang modal; dan
3. Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan pada tahun buku terakhir.

Catatan: apabila tidak terdapat realisasi investasi barang modal, agar diungkapkan.

Explanation of:

1. *Type of capital investments;*
2. *The investment objective of capital goods; and*
3. *The value of capital investments incurred in the last fiscal year.*

Note: if there is no realization of capital investments, please be disclosed.

NO.	KRITERIA / <i>Criteria</i>
V	ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN / <i>Management analysis and</i>
7.	Informasi perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), dan target atau proyeksi yang ingin dicapai untuk satu tahun mendatang mengenai pendapatan, laba, dan lainnya yang dianggap penting bagi perusahaan. <i>Information on comparison between the target at the beginning of the fiscal year by achieved result (realized), and the target or projected to be achieved for the next year on revenues, profits, and others that are considered important for the company.</i>
8.	Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan. <i>Information and material facts which occurred after auditor's report date.</i>
9.	Uraian tentang prospek usaha perusahaan <i>Description on company's business prospect</i>
10.	Uraian tentang aspek pemasaran <i>Description on marketing aspect</i>
11.	Uraian mengenai kebijakan dividen dan jumlah dividen kas per saham dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir. <i>Description of the dividend policy and the amount of cash dividends per share and total dividend per year declared or paid during the two (2) years of the last fiscal book.</i>

PENJELASAN / Description

PENILAIAN / Valuation

discussion on company's performance

Informasi memuat antara lain:

1. Perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi); dan
2. Target atau proyeksi yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun mendatang.

Information includes among others:

1. *Comparison between the targets at the beginning of the fiscal year with the results achieved (realized); and*
2. *Target or projected to be achieved within 1 (one) year ahead.*

Uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang.

Catatan: apabila tidak ada kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan, agar diungkapkan.

Description of important events after the date of the auditor's report, including its impact on the performance and business risk in the future.

Note: if there is no important events after the date of the auditor's report, please be disclosed.

Uraian mengenai prospek perusahaan dikaitkan dengan industri dan ekonomi secara umum disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya.

The description of the company's prospects associated with the industry and the general economy quantitative supporting data from the data source to be trusted.

Uraian tentang aspek pemasaran atas produk dan/atau jasa perusahaan, antara lain strategi pemasaran dan pangsa pasar.

Description of the marketing of the product and/or service companies, such as marketing strategy and market share.

Memuat uraian mengenai:

1. Kebijakan pembagian dividen;
2. Total dividen yang dibagikan;
3. Jumlah dividen kas per saham;
4. Payout ratio; dan
5. Tanggal pengumuman dan pembayaran dividen kas untuk masing-masing tahun.

Catatan: apabila tidak ada pembagian dividen, agar diungkapkan alasannya.

Contains of the following:

1. *The dividend distribution policy;*
2. *Total dividend;*
3. *The amount of the cash dividend per share;*
4. *Payout ratio; and*
5. *Date of the announcement and payment of cash dividends for each year.*

Note: if there is no dividend distribution, please be disclosed.

NO.	KRITERIA / <i>Criteria</i>
V	ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN / <i>Management analysis and</i>
12.	Program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan perusahaan (ESOP/MSOP). <i>Stock ownership program by employee and/or management which implemented by company (ESOP/MSOP).</i>
13.	Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (dalam hal perusahaan masih diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana)* <i>Actual use of fund from public offering (in which the company is obliged to submit reports on realization of the use of funds)*</i>
14.	Informasi transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi* <i>Information on material transaction which consists of conflict of interest and/or transaction with affiliations*</i>

PENJELASAN / Description

PENILAIAN / Valuation

discussion on company's performance

Memuat uraian mengenai:

1. Jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya;
 2. Jangka waktu;
 3. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan
 4. Harga exercise.
- Catatan: apabila tidak memiliki program dimaksud, agar diungkapkan.

Loading description of:

1. *The number of shares of ESOP / MSOP and its realization;*
2. *Duration;*
3. *Terms of the employees and / or management of the beneficiaries; and*
4. *The exercise price.*

Note: if it does not have such programs, please be disclosed.

Memuat uraian mengenai:

1. Total perolehan dana;
2. Rencana penggunaan dana;
3. Rincian penggunaan dana;
4. Saldo dana; dan
5. Tanggal persetujuan RUPS/RUPO atas perubahan penggunaan dana (jika ada).

Contains of the following:

1. *Total achieved fund;*
2. *Plan for the use of funds;*
3. *Details of the use of funds;*
4. *The balance of the funds; and*
5. *Date of approval of GMS / RUPO on changes in the use of funds (if any).*

Memuat uraian mengenai:

1. Nama pihak yang bertransaksi dan sifat hubungan afiliasi;
2. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi;
3. Alasan dilakukannya transaksi;
4. Realisasi transaksi pada periode tahun buku terakhir;
5. Kebijakan perusahaan terkait dengan mekanisme review atas transaksi; dan
6. Pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait.

Catatan: apabila tidak mempunyai transaksi dimaksud, agar diungkapkan.

Loading description of:

1. *Name of the parties to a transaction and the nature of the affiliation;*
2. *Description of the fairness of the transaction;*
3. *Reasons for the transaction;*
4. *Actual transactions during the period of the last fiscal year;*
5. *The company's policy review on the mechanisms associated with the transaction; and*
6. *Compliance regulations and related provisions.*

Note: if it does not have the intended transaction, please be disclosed.

NO.	KRITERIA / <i>Criteria</i>
V	ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN / <i>Management analysis and</i>
15.	Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap perusahaan. <i>Description on change of laws which significantly affected to company</i>
16.	Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan pada tahun buku terakhir <i>Description on change of accounting policies which have been implemented by company in last fiscal year</i>
17.	Informasi kelangsungan usaha <i>Information on business continuance</i>

PENJELASAN / Description	PENILAIAN / Valuation
<i>discussion on company's performance</i>	
Uraian memuat antara lain: perubahan peraturan perundang-undangan dan dampaknya terhadap perusahaan. Catatan: apabila tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan, agar diungkapkan. <i>The description includes among others: changes in legislation and their impact on the company.</i> <i>Note: if there is no change in the legislation that significantly, please be disclosed.</i>	
Uraian memuat antara lain: perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan. Catatan: apabila tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi, agar diungkapkan. <i>The description includes among others: changes in accounting policies, reasons and impact on the financial statements.</i> <i>Note: if there are no changes in accounting policies, please be disclosed.</i>	
Pengungkapan informasi mengenai: 1. Hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir; 2. Assessment manajemen atas hal-hal pada angka 1; dan 3. Asumsi yang digunakan manajemen dalam melakukan assessment. Catatan: apabila tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan asumsi yang mendasari manajemen dalam meyakini bahwa tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku. <i>Disclosure of information about:</i> 1. <i>Things are potentially significant effect on the company's sustainability in the last fiscal year;</i> 2. <i>Assessment of management on matters in figure 1; and</i> 3. <i>The assumptions used by management in making the assessment.</i> <i>Note: if there are things that are potentially significant effect on the sustainability of the company in the last fiscal year, the underlying assumptions need to be disclosed in order the management believes that there are things that are potentially significant effect on the company's sustainability in the fiscal year.</i>	

NO.	KRITERIA / <i>Criteria</i>
VI	TATA KELOLA PERUSAHAAN / <i>Good Corporate Governance</i>
1.	Uraian Dewan Komisaris <i>Description on Board of Commissioners</i>
2.	Informasi mengenai Komisaris Independen <i>Information on Independent Commissioners</i>
3.	Uraian Direksi <i>Description on Directors</i>
4.	Assessment terhadap Dewan Komisaris dan Direksi <i>Assessment on Board of Commissioners and Directors</i>

PENJELASAN / <i>Description</i>	PENILAIAN / <i>Valuation</i>
Uraian memuat antara lain: 1. Uraian tanggung jawab Dewan Komisaris; 2. Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Dewan Komisaris atau program orientasi bagi Komisaris baru; dan 3. Pengungkapan mengenai Board Charter (pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris). <i>The description includes among others:</i> 1. <i>Description of responsibilities of the Board of Commissioners;</i> 2. <i>The training program in order to increase the competence of the Board of Commissioners or orientation program for new Commissioners; and</i> 3. <i>Disclosure of the Board Charter (guidelines and work rules BOC).</i>	
Meliputi antara lain: 1. Kriteria penentuan Komisaris Independen; dan 2. Pernyataan tentang independensi masing-masing Komisaris Independen. <i>Contains of the following:</i> 1. <i>Criteria for determining the Independent Commissioner; and</i> 2. <i>Statement of Independence each Independent Commissioner.</i> Uraian memuat antara lain: 1. Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; 2. Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi atau program orientasi bagi Direksi baru; dan 3. Pengungkapan mengenai Board Charter (pedoman dan tata tertib kerja Direksi). <i>The description includes among others:</i> 1. <i>The scope of work and responsibilities of each member of the Board of Directors;</i> 2. <i>The training program in order to improve the competence of the Board of Directors or orientation program for new Directors; and</i> 3. <i>Disclosure of the Board Charter (guidelines and work rules the Board of Directors).</i>	
Mencakup antara lain: 1. Prosedur pelaksanaan assessment atas kinerja Dewan Komisaris dan Direksi; 2. Kriteria yang digunakan dalam pelaksanaan assessment atas kinerja Dewan Komisaris dan Direksi; dan 3. Pihak yang melakukan assessment. <i>Include:</i> 1. <i>The procedures of assessment of the performance of the Board of Commissioners and Board of Directors;</i> 2. <i>Criteria used in the implementation of the assessment of the performance of the Board of Commissioners and Board of Directors; and</i> 3. <i>The Parties who undertake assessment.</i>	

NO.	KRITERIA / <i>Criteria</i>
VI	TATA KELOLA PERUSAHAAN / <i>Good Corporate Governance</i>
5.	Uraian mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi <i>Description on remuneration policies to Board of Commissioners and Directors</i>
6.	Frekuensi dan tingkat kehadiran rapat Dewan Komisaris, rapat Direksi, dan rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi. <i>The frequency and level of attendance of board meetings, the Board of Directors meetings and joint meetings with the Board of Commissioners Board of Directors.</i>
7.	Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu. <i>Information on major shareholders and controllers, either directly or indirectly, to the individual owner.</i>
8.	Pengungkapan hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali. <i>Disclosure of affiliation between the members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and the Main Shareholders and / or controllers.</i>

PENJELASAN / Description

PENILAIAN / Valuation

Mencakup antara lain:

1. Pengungkapan prosedur penetapan remunerasi Dewan Komisaris;
2. Pengungkapan prosedur penetapan remunerasi Direksi;
3. Struktur remunerasi yang menunjukkan jenis dan jumlah imbalan jangka pendek, pasca kerja, dan/atau jangka panjang lainnya untuk setiap anggota Dewan Komisaris;
4. Struktur remunerasi yang menunjukkan jenis dan jumlah imbalan jangka pendek, pasca kerja, dan/atau jangka panjang lainnya untuk setiap anggota Direksi; dan
5. Pengungkapan indikator untuk penetapan remunerasi Direksi.

Contains of the following:

1. *Disclosure of the remuneration of the Board of Commissioners determination procedures;*
2. *Disclosure of the remuneration of Directors determination procedures;*
3. *The remuneration structure that indicates the type and number of short-term benefits, post-employment, and / or other long-term for each member of the Board of Commissioners;*
4. *The remuneration structure that indicates the type and number of short-term benefits, post-employment, and / or other long-term for each member of the Board of Directors; and*
5. *Disclosure indicators for the remuneration of Directors.*

Informasi memuat antara lain:

1. Tanggal Rapat;
2. Peserta Rapat; dan
3. Agenda Rapat.

untuk masing-masing rapat Dewan Komisaris, Direksi, dan rapat gabungan.

Contains of the following:

1. *Date of the Meeting;*
2. *Participants Meeting; and*
3. *Agenda.*

for each meeting of the Board of Commissioners, Directors, and joint meetings.

Dalam bentuk skema atau diagram, kecuali untuk BUMN yang dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah.

In a schematic or diagram, except for State-Owned Enterprises which entirely owned by the government.

Mencakup antara lain:

1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya;
2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali;
4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan
5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.

Catatan: apabila tidak mempunyai hubungan afiliasi dimaksud, agar diungkapkan.

NO.	KRITERIA / <i>Criteria</i>
VI	TATA KELOLA PERUSAHAAN / <i>Good Corporate Governance</i>
9.	Komite Audit <i>Audit Committee</i>
10.	Komite/Fungsi Nominasi dan/atau Remunerasi. <i>Committee/Nomination Function and/or Remuneration.</i>

PENJELASAN / Description

PENILAIAN / Valuation

Include:

- 1. The relationship between the members of the Board of Directors affiliated with members of the Board of Directors;*
- 2. Affiliate Relations between members of the Board of Directors and the Board of Commissioners;*
- 3. The relationship between the members of the Board of Directors affiliated with Major Shareholder and / or control;*
- 4. The relationship between the members of the Board of Commissioners affiliation with members of other Commissioners; and*
- 5. The relationship between the members of the Board of Commissioners affiliated with Major Shareholder and / or controllers.*

Note: if it is not affiliated in question, please be disclosed.

Mencakup antara lain:

1. Nama dan jabatan anggota komite audit;
2. Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja anggota komite audit;
3. Independensi anggota komite audit;
4. Uraian tugas dan tanggung jawab;
5. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan komite audit; dan
6. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite audit.

Include:

- 1. Name and title of member of the audit committee;*
- 2. The educational qualifications and work experience of the audit committee members;*
- 3. The independence of audit committee members;*
- 4. Description of the tasks and responsibilities;*
- 5. Brief report of the activities of the audit committee; and*
- 6. Frequency of meetings and attendance levels of the audit committee.*

Mencakup antara lain:

1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite/fungsi nominasi dan/atau remunerasi;
2. Independensi komite/fungsi nominasi dan/atau remunerasi;
3. Uraian tugas dan tanggung jawab;
4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite/fungsi nominasi dan/atau remunerasi;
5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite/fungsi nominasi dan/atau remunerasi;
6. Pernyataan adanya pedoman komite/fungsi nominasi dan/atau remunerasi; dan
7. Kebijakan mengenai suksesi Direksi.

Include:

- 1. Name, position and brief resume of committee members / functions nomination and / or remuneration;*
- 2. Independence committees / functions nomination and / or remuneration;*
- 3. Description of the tasks and responsibilities;*
- 4. Description of the committee's activities / functions of the nomination and / or remuneration;*
- 5. Frequency of meetings and attendance committees / functions nomination and / or remuneration;*
- 6. Statement of the guidelines committee / functions nomination and / or remuneration; and*
- 7. Policies regarding the succession of Directors.*

NO.	KRITERIA / <i>Criteria</i>
VI	TATA KELOLA PERUSAHAAN / <i>Good Corporate Governance</i>
11.	Komite-komite lain di bawah Dewan Komisaris yang dimiliki oleh perusahaan. <i>Other committees under Board of Commissioners who owned by the company.</i>
12.	Uraian tugas dan Fungsi Sekretaris Perusahaan. <i>Description of task and function of corporate's secretary.</i>
13.	Informasi mengenai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun sebelumnya. <i>Information on last year Annual General Meeting of Shareholders (RUPS).</i>
14.	Uraian mengenai unit audit internal. <i>Description on internal audit unit.</i>

PENJELASAN / <i>Description</i>	PENILAIAN / <i>Valuation</i>
Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite lain; 2. Independensi komite lain; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite lain; dan 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite lain. <i>Include:</i> 1. <i>Name, position and brief resume of the other committee members;</i> 2. <i>The independence of the other committees;</i> 3. <i>Description of the tasks and responsibilities;</i> 4. <i>Description of the activities of other committees; and</i> 5. <i>Frequency of meetings and attendance of other committees.</i>	
Mencakup antara lain: 1. Nama, domisili, dan riwayat jabatan singkat sekretaris perusahaan; 2. Uraian pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan; dan 3. Program pelatihan dalam rangka mengembangkan kompetensi sekretaris perusahaan. <i>Include:</i> 1. <i>Name, domicile, and a brief history of the post of secretary of the company;</i> 2. <i>Description of the company secretarial duties; and</i> 3. <i>The training program in order to develop the competence of the company secretary.</i>	
Dalam bentuk tabel mencakup antara lain: 1. Keputusan RUPS tahun sebelumnya; 2. Realisasi hasil RUPS tahun sebelumnya pada tahun buku; dan 3. Alasan dalam hal terdapat keputusan RUPS yang belum direalisasikan. <i>In the form of tables include, among others:</i> 1. <i>Decision of RUPS on previous year;</i> 2. <i>Realization of the RUPS a year earlier in the fiscal year; and</i> 3. <i>Reason for the RUPS decision has yet to be realized.</i>	
Mencakup antara lain: 1. Nama ketua unit audit internal; 2. Jumlah pegawai (auditor internal) pada unit audit internal; 3. Sertifikasi sebagai profesi audit internal; 4. Kedudukan unit audit internal dalam struktur perusahaan; 5. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan unit audit internal; dan 6. Pihak yang mengangkat/memberhentikan ketua unit audit internal. <i>Include:</i> 1. <i>Name of the head of internal audit unit;</i> 2. <i>Number of employees (internal auditor) the internal audit unit;</i> 3. <i>Certification as the internal audit profession;</i> 4. <i>The position of the internal audit unit within the corporate structure;</i> 5. <i>Brief report of the implementation of the internal audit unit; and</i> 6. <i>The lifting / dismiss the head of internal audit unit.</i>	

NO.	KRITERIA / <i>Criteria</i>
VI	TATA KELOLA PERUSAHAAN / <i>Good Corporate Governance</i>
15.	Akuntan Publik. <i>Public accountant.</i>
16.	Uraian mengenai manajemen risiko perusahaan. <i>Description on company risk management.</i>
17.	Uraian mengenai sistem pengendalian intern. <i>Description on internal control system.</i>

PENJELASAN / *Description*PENILAIAN / *Valuation*

Informasi memuat antara lain:

1. Nama dan tahun akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir;
2. Nama dan tahun Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir;
3. Besarnya fee untuk masing-masing jenis jasa yang diberikan oleh akuntan publik pada tahun buku terakhir; dan
4. Jasa lain yang diberikan akuntan selain jasa audit laporan keuangan tahunan pada tahun buku terakhir.

Catatan: apabila tidak ada jasa lain dimaksud, agar diungkapkan.

Information includes among others:

1. *Name and year public accountants who audit the annual financial statements for the last 5 years;*
2. *The name and years of public accounting firm that audited the annual financial statements for the last 5 years;*
3. *The amount of fee for each type of service provided by a public accountant in the last fiscal year; and*
4. *Other services provided accounting services other than audit annual financial statements in the last fiscal year.*

Note: if there is no other service in question, please be disclosed.

Mencakup antara lain:

1. Penjelasan mengenai sistem manajemen risiko yang diterapkan perusahaan;
2. Penjelasan mengenai evaluasi yang dilakukan atas efektivitas sistem manajemen risiko;
3. Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan; dan
4. Upaya untuk mengelola risiko tersebut.

Include:

1. *A description of the risk management system applied by the company;*
2. *A description of the evaluation conducted on the effectiveness of the risk management system;*
3. *A description of the risks facing the company; and*
4. *Efforts to manage these risks.*

Mencakup antara lain:

1. Penjelasan singkat mengenai sistem pengendalian intern, antara lain mencakup pengendalian keuangan dan operasional;
2. Penjelasan kesesuaian sistem pengendalian intern dengan kerangka yang diakui secara internasional (COSO – *internal control framework*); dan
3. Penjelasan mengenai evaluasi yang dilakukan atas efektivitas sistem pengendalian intern.

Include:

1. *A brief description of the internal control system, among others, include both financial and operational control;*
2. *Explanation of the suitability of the internal control system with internationally recognized framework (COSO - internal control framework); and*
3. *A description of the evaluation conducted on the effectiveness of internal control systems.*

NO.	KRITERIA / <i>Criteria</i>
VI	TATA KELOLA PERUSAHAAN / <i>Good Corporate Governance</i>
18.	Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan lingkungan hidup. <i>Description on corporate social responsibility related to the environment.</i>
19.	Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja. <i>Description on corporate social responsibility related to the employment, health and work safety.</i>
20.	Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan pengembangan sosial dan kemasyarakatan. <i>Description on corporate social responsibility related to social and society development.</i>

PENJELASAN / Description

PENILAIAN / Valuation

Mencakup antara lain informasi tentang:

1. Kebijakan yang ditetapkan manajemen;
2. Kegiatan yang dilakukan; dan terkait program lingkungan hidup yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan, seperti penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, sistem pengolahan limbah perusahaan, pertimbangan aspek lingkungan dalam pemberian kredit kepada nasabah, dan lain-lain.
3. Sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki.

Contains of the following:

1. *The policies set management;*
2. *Activities undertaken; and related environmental programs related to the operations of the company, such as the use of materials and energy that are environmentally friendly and can be recycled, sewage treatment systems companies, consideration of environmental aspects in the provision of credit to customers, and others.*
3. *Certification in the field of environmental owned.*

Mencakup antara lain informasi tentang:

1. Kebijakan yang ditetapkan manajemen; dan
2. Kegiatan yang dilakukan.
Terkait praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, seperti kesetaraan gender dan kesempatan kerja, sarana dan keselamatan kerja, tingkat turnover karyawan,

Contains of the following:

1. *The policies set management; and*
2. *Activities undertaken.*
Related employment practices, health and safety, such as gender equality and employment opportunities, facilities and safety at work, employee turnover tingkat kecelakaan kerja, dan lain-lain.

Mencakup antara lain informasi tentang:

1. Kebijakan yang ditetapkan manajemen;
2. Kegiatan yang dilakukan; dan
3. Biaya yang dikeluarkan.
Terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan, seperti penggunaan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan, perbaikan sarana dan prasarana sosial, bentuk donasi lainnya, dan lain-lain.

Contains of the following:

1. *The policies set management;*
2. *Activities undertaken; and*
3. *Costs incurred.*

Related to social and community development, such as the use of local labor, community empowerment companies, repair facilities and social infrastructure, the form of donations, and others.

NO.	KRITERIA / <i>Criteria</i>
VI	TATA KELOLA PERUSAHAAN / <i>Good Corporate Governance</i>
22.	Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, serta anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang menjabat pada periode laporan tahunan. <i>Important case faced by the company, its subsidiaries, as well as members of the Board of Commissioners and the Board of Directors at the annual reporting period.</i>
23.	Akses informasi dan data perusahaan. <i>Access to company's information and data.</i>
24.	Bahasan mengenai kode etik. <i>Discussion on ethic codes.</i>

PENJELASAN / Description

PENILAIAN / Valuation

Mencakup antara lain:

1. Pokok perkara/gugatan;
2. Status penyelesaian perkara/gugatan;
3. Pengaruhnya terhadap kondisi perusahaan; dan
4. Sanksi administrasi yang dikenakan kepada perusahaan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas terkait (pasar modal, perbankan dan lainnya) pada tahun buku terakhir (atau terdapat pernyataan bahwa tidak dikenakan sanksi administrasi).

Catatan: dalam hal tidak berperkara, agar diungkapkan.

Include:

1. *Principal lawsuit / accusation;*
2. *Status of the settlement / accusation;*
3. *Effect on the condition of the company; and*
4. *An administrative sanction imposed on the company, members of the Board of Commissioners and Board of Directors, by the relevant authorities (capital markets, banking and others) in the last fiscal year (or there is a statement that is not subject to administrative sanctions).*

Note: in the absence of litigation, please be disclosed.

Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui website (dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris), media massa, mailing list, buletin, pertemuan dengan analis, dan sebagainya.

A description of the availability of access to information and corporate data to the public, for example through the website (in Indonesian and English), the mass media, mailing lists, newsletters, analyst meetings, and so on.

Memuat uraian antara lain:

1. Isi kode etik;
2. Pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi seluruh level organisasi;
3. Penyebarluasan kode etik;
4. Jenis sanksi untuk setiap pelanggaran kode etik; dan
5. Jumlah pelanggaran kode etik beserta sanksi yang diberikan pada tahun buku terakhir.

Catatan: apabila tidak terdapat pelanggaran kode etik pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.

Includes a description, among others:

1. *Fill in the code of conduct;*
2. *Disclosure that the code of conduct applies to all levels of the organization;*
3. *The dissemination of codes of conduct;*
4. *What kind of sanctions for any violations of the code of ethics; and*
5. *The number of code violations and penalties given in the last fiscal year.*

Note: if there is no violation of the code of conduct in the last fiscal year, please be disclosed.

NO.	KRITERIA / <i>Criteria</i>
VI	TATA KELOLA PERUSAHAAN / <i>Good Corporate Governance</i>
25.	Pengungkapan mengenai <i>whistleblowing system</i>. <i>Disclosure on whistleblowing system.</i>
26.	Kebijakan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi. <i>Policies on various compositions of Board of Commissioners and Directors.</i>
VII	INFORMASI KEUANGAN / <i>Financial Information</i>
1.	Surat Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan* <i>Statement of the Board of Directors and / or the Board of Commissioners on Responsibility for Financial Statements*</i>
2.	Opini auditor independen atas laporan keuangan. <i>Opinion of independent auditor on financial report.</i>
3.	Deskripsi Auditor Independen di Opini. <i>Description of independent auditor in opinion.</i>

PENJELASAN / Description

PENILAIAN / Valuation

Memuat uraian tentang mekanisme *whistleblowing system* antara lain:

1. Penyampaian laporan pelanggaran;
 2. Perlindungan bagi whistleblower;
 3. Penanganan pengaduan;
 4. Pihak yang mengelola pengaduan; dan
 5. Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses pada tahun buku terakhir serta tindak lanjutnya.
- Catatan: apabila tidak terdapat pengaduan yang masuk pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan

Contains a description of the mechanisms of the whistleblowing system, among others:

1. *Submission of reports of violations;*
 2. *Protection of whistleblowers;*
 3. *Handling of complaints;*
 4. *Parties which manages the complaint; and*
 5. *The number of complaints received and processed in the last fiscal year as well as follow-ups.*
- Note: if there are no complaints received in the last fiscal year, please be disclosed*

Uraian kebijakan Perusahaan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dalam pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, dan jenis kelamin.

Catatan: apabila tidak ada kebijakan dimaksud, agar diungkapkan alasan dan pertimbangannya.

Description of Company policies regarding the diversity of the composition of the Board of Commissioners and Directors in education (field of study), work experience, age, and gender. Note: if there is no such policy should be disclosed with reasons and considerations.

Kesesuaian dengan peraturan terkait tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan.

Compliance with the related regulations concerning the Responsibility for Financial Statements.

Deskripsi memuat tentang:

1. Nama & tanda tangan;
2. Tanggal Laporan Audit; dan
3. Nomor ijin KAP dan nomor ijin Akuntan Publik.

Description contains about:

1. *Name and signature;*
2. *Date of Audit Report; and*
3. *KAP license number and license number of Certified Public Accountants.*

NO.	KRITERIA / <i>Criteria</i>
VII	TATA KELOLA PERUSAHAAN / <i>Good Corporate Governance</i>
4.	Laporan keuangan yang lengkap. <i>Completed financial report.</i>
5.	Perbandingan tingkat profitabilitas. <i>Comparison on profitability.</i>
6.	Laporan Arus Kas. <i>Cash flow report.</i>

PENJELASAN / Description

PENILAIAN / Valuation

Memuat secara lengkap unsur-unsur laporan keuangan:

1. Laporan posisi keuangan;
2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain;
3. Laporan perubahan ekuitas;
4. Laporan arus kas;
5. Catatan atas laporan keuangan;
6. Informasi komparatif mengenai periode sebelumnya; dan
7. Laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya (jika relevan).

Contains a complete elements of financial statements:

1. *The statement of financial position;*
2. *The statements of income and other comprehensive income;*
3. *Statement of changes in equity;*
4. *Statement of cash flows;*
5. *Notes to the financial statements;*
6. *Comparative information concerning the previous period; and*
7. *The statement of financial position at the beginning of the previous period when an entity applies an accounting policy retrospectively or makes restatement of financial statement items, or when the entity reclassifies items in its financial statements (if relevant).*

Perbandingan kinerja/laba (rugi) tahun berjalan dengan tahun sebelumnya.

Comparison of performance / profit (loss) for the year with the previous year.

Memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Pengelompokan dalam tiga kategori aktivitas: operasi, investasi, dan pendanaan;
2. Penggunaan metode langsung (direct method) untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi;
3. Pemisahan penyajian antara penerimaan kas dan atau pengeluaran kas selama tahun berjalan pada aktivitas operasi, investasi dan pendanaan; dan
4. Pengungkapan transaksi non kas harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Meet the following requirements:

1. *Grouping into three categories of activity: operating, investing and financing activities;*
2. *The use of the direct method (direct method) to report cash flows from operating activities;*
3. *The separation between the presentation of cash receipts and disbursements for a year or run on operating, investing and financing activities; and*
4. *Disclosure of Non-cash transactions should be included in the notes to the financial statements.*

NO.	KRITERIA / <i>Criteria</i>
VII	INFORMASI KEUANGAN / <i>Financial Information</i>
7.	Ikhtisar Kebijakan Akuntansi. <i>Summary of accountant policies.</i>
8.	Pengungkapan transaksi pihak berelasi <i>Pengungkapan transaksi pihak berelasi</i>
9.	Pengungkapan yang berhubungan dengan perpajakan. <i>Disclosure related to tax.</i>

PENJELASAN / Description

PENILAIAN / Valuation

Meliputi sekurang-kurangnya:

1. Pernyataan kepatuhan terhadap SAK;
2. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan;
3. Pajak penghasilan;
4. Imbalan kerja; dan
5. Instrumen Keuangan.

Includes at least:

1. *Statement of compliance with IFRSs;*
2. *Basis of measurement and preparation of financial statements;*
3. *The income tax;*
4. *Employee benefits; and*
5. *Financial Instruments.*

Hal-hal yang diungkapkan antara lain:

1. Nama pihak berelasi, serta sifat dan hubungan dengan pihak berelasi;
2. Nilai transaksi beserta persentasenya terhadap total pendapatan dan beban terkait; dan
3. Jumlah saldo beserta persentasenya terhadap total aset atau liabilitas.

Things are disclosed, among others:

1. *Name of related parties, and the nature and relationships with related parties;*
2. *The transaction value and the percentage of total income and expense; and*
3. *The balance amount and the percentage of the total assets or liabilities.*

Hal-hal yang harus diungkapkan:

1. Rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini;
2. Penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi;
3. Pernyataan bahwa Laba Kena Pajak (LKP) hasil rekonsiliasi dijadikan dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan;
4. Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk setiap periode penyajian, dan jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan; dan
5. Pengungkapan ada atau tidak ada sengketa pajak.

Things that should be disclosed:

1. *Reconciliation fiscal and current income tax expense calculation;*
2. *Explanation of the relationship between expense (income) and income tax accounting;*
3. *A statement that the taxable income (CGC) as basis for reconciliation results charging Annual Income Tax Agency;*
4. *Details of the assets and the deferred tax liabilities recognized in the statement of financial position for all periods presented, and the amount of expense (income) Deferred tax recognized in the income statement if the number is not visible from the amount of deferred tax assets or liabilities are recognized in the statement of position finance; and*
5. *Disclosure or no tax disputes.*

NO.	KRITERIA / <i>Criteria</i>
VII	INFORMASI KEUANGAN / <i>Financial Information</i>
10.	Pengungkapan yang berhubungan dengan aset tetap. <i>Disclosure related to fixed assets.</i>
11.	Pengungkapan yang berhubungan dengan segmen operasi* <i>Disclosure related to operations segment*</i>

PENJELASAN / Description

PENILAIAN / Valuation

Hal-hal yang harus diungkapkan:

1. Metode penyusutan yang digunakan;
2. Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang dipilih antara model revaluasi dan model biaya;
3. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset tetap (untuk model revaluasi) atau pengungkapan nilai wajar aset tetap (untuk model biaya); dan
4. Rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan aset tetap pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan: penambahan, pengurangan dan reklasifikasi.

Things that should be disclosed:

1. *The used depreciation method;*
2. *A description of the accounting policies selected between the revaluation model and the cost model;*
3. *The used method and significant assumptions in estimating the fair value of fixed assets (to the revaluation model) or disclosure of the fair value of fixed assets (to the cost model); and*
4. *Reconciliation of the gross carrying amount and accumulated depreciation of fixed assets at the beginning and end of the period showing: addition, subtraction and reclassification.*

Hal-hal yang harus diungkapkan:

1. Informasi umum yang meliputi faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan;
2. Informasi tentang laba rugi, aset, dan liabilitas segmen yang dilaporkan;
3. Rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, laba rugi segmen yang dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan unsur material segmen lainnya terhadap jumlah terkait dalam entitas; dan
4. Pengungkapan pada level entitas, yang meliputi informasi tentang produk dan/atau jasa, wilayah geografis dan pelanggan utama.

Things that should be disclosed:

1. *General information covering factors used to identify reportable segment;*
2. *The information about income, assets and liabilities reportable segment;*
3. *Reconciliation of total segment revenues, reported segment profit or loss, segment assets, segment liabilities, and other segments of the material elements of the corresponding number in the entity; and*
4. *Disclosures on the entity level, which includes information about products and / or services, geographical areas and major customers.*

NO.	KRITERIA / <i>Criteria</i>
VII	INFORMASI KEUANGAN / <i>Financial Information</i>
12.	Pengungkapan yang berhubungan dengan Instrumen Keuangan. <i>PDisclosure related to financial instrument.</i>
13.	Penerbitan laporan keuangan. <i>Financial report publicity.</i>

* Kriteria khusus untuk Perusahaan *Listed*

** Specific criteria for listed company*

PENJELASAN / <i>Description</i>	PENILAIAN / <i>Valuation</i>
Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Rincian instrumen keuangan yang dimiliki berdasarkan klasifikasinya; 2. Nilai wajar dan hirarkinya untuk setiap kelompok instrumen keuangan; 3. Kebijakan manajemen risiko; 4. Penjelasan risiko yang terkait dengan instrumen keuangan: risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas; dan 5. Analisis risiko yang terkait dengan instrumen keuangan secara kuantitatif. <i>Things that should be disclosed:</i> 1. <i>Details of financial instruments held by its classification;</i> 2. <i>The fair value and their hierarchy for each class of financial instruments;</i> 3. <i>The risk management policy;</i> 4. <i>Explanation of risks associated with financial instruments: market risk, credit risk and liquidity risk; and</i> 5. <i>Analysis of the risks associated with financial instruments quantitatively.</i>	
Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit; dan 2. Pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan. <i>Things are disclosed, among others:</i> 1. <i>The date the financial statements were authorized for issue; and</i> 2. <i>The party responsible for authorizing the financial statements.</i>	



PERUM JASA TIRTA II

KANTOR PUSAT

Jl. Lurah Kawi No. 1, Kec. Jatiluhur, Jatiluhur,
Kec. Purwakarta, Kabupaten Purwakarta,
Jawa Barat 41152

☎ (0264) 201 972

☎ (0264) 201 971

KANTOR PERWAKILAN JAKARTA

Jl. H. Agus Salim No. 69
Jakarta Pusat
Telp : (021) 3193 1606

🏠 www.jasatirta2.co.id